MENDAULATKAN SUARA PEMILIH

Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019

Editor:

Sahran Raden | Fahrurrozi | Gebril Daulai | Yulhasni

Idham Holik | Adi Arwan Alimin | Diana Ariyanti

Edy Ariansyah | Nugroho Noto Susanto

Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia

KOMISI
PEMILIHAN UMUM
BHINNEKA TUNGGAL IKA

MENDAULATKAN SUARA PEMILIH

Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019

Editor:

Sahran Raden | Fahrurrozi | Gebril Daulai | Yulhasni

Idham Holik | Adi Arwan Alimin | Diana Ariyanti

Edy Ariansyah | Nugroho Noto Susanto

Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia

jdih.kpu.go.id

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan
ISBN: 978-602-50455-9-2
Cetakan I, September 2020

Pengarah

Arief Budiman
Pramono Ubaid Tanthowi.
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
Hasyim Asy'ari
Ilham Saputra
Viryan
Evi Novida Ginting Manik.
Nanang Priyatna

Penanggung Jawab

Nur Syarifah

Editor

Sahran Raden	(KPU Provinsi Sulawesi Tengah)
Fahrurrozi	(KPU Provinsi Bangka Belitung)
Gebril Daulai	(KPU Provinsi Sumatera Barat)
Yulhasni	(KPU Provinsi Sumatera Utara)
Idham Holik	(KPU Provinsi Jawa Barat)
Adi Arwan Alimin	(KPU Provinsi Sulawesi Barat)
Diana Ariyanti	(KPU Provinsi Jawa Tengah)
Edy Ariansyah	(KPU Provinsi Kalimantan Selatan)
Nugroho Noto Susanto	(KPU Provinsi Riau)

Desain dan Tata Letak

Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU RI

Penerbit:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang, dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

SAMBUTAN

Secara umum Pemilu Serentak 2019 telah dilaksanakan dengan aman, lancar dan damai. Kita patut bersyukur atas kesuksesan dan capaian Pemilu 2019 yang kita laksanakan dengan baik, berkualitas dan demokratis. Salah satu capaian dan kesuksesan Pemilu 2019 yakni adanya angka partisipasi pemilih yang sangat tinggi dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. KPU perlu melakukan inovasi baru dalam sosialisasi Pemilu dan pemilihan. Inovasi baru itu sangat penting dalam menjaga tingkat partisipasi masyarakat yang sudah diraih mencapai angka 81,93% pada Pemilu 2019. Ada lompatan yang cukup besar terhadap partisipasi pemilih. Artinya adalah tantangan yang jauh lebih besar ada di depan mata kita. Karena masyarakat melihat, partisipasi 81,93% itu sudah berhasil kita capai. Suatu tantangan baru bagi Pemilu dan pemilihan dimasa depan. Angka partisipasi yang cukup tinggi itu menjadi tantangan baru bagi penyelenggara pemilu dimasa mendatang, apakah bisa dipertahankan atau malah menurun.

Berbagai program kegiatan, strategi dan inovasi sosialisasi perlu digagas oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap momentum Pemilu dan pemilihan. Supaya partisipasi bisa tetap terjaga, yang harus disentuh, adalah menjadikan basis keluarga sebagai sasaran sosialisasi.

Keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu 2019 merupakan salah satu bentuk proses politik dan demokrasi. Partisipasi pemilih yang tinggi dalam pemilu, sebagai indikator masyarakat turut serta menentukan nasib bangsanya. Rakyat juga ikut serta mempengaruhi kebijakan politik bagi pemimpin yang terpilih. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pemimpin yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan.

jdih.kpu.go.id

Buku ini melengkapi informasi atas kerja keras Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Kita sadar bahwa Pemilu 2019 masih belum sempurna akan tetapi KPU telah sukses menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan baik. Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia telah dilantik menandai Pemilu 2019 telah berakhir. Catatan positif selama penyelenggaraan Pemilu 2019 manjadi kinerja baik KPU dan jajarannya, sedangkan catatan yang kurang baik menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilu berikutnya.

Jakarta, September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Arief Budiman

jdih.kpu.go.id

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua KPU RI Arief Budiman iii

Daftar Isi v

Prolog: Memaknai Daulat Pemilih: Potret Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu 2019 ix

BAGIAN PERTAMA: STRATEGI SOSIALISASI PEMILU.....1

Sosialialisasi: Revitalisasi Nilai Demokrasi dan Tantangan Mondial
Fahrurrozi.....3

Strategi Sosialisasi pada Kelompok Salafiah di Pondok Pesantren Dhiya'aussalaf Muara Enim Sumatera Selatan
Amrah Muslimin.....11

Kepri: From Zero To Hero
Parlindungan Sihombing.....25

Strategi Memanfaatkan Jaringan Waralaba
Eka Satialaksmana.....37

Komunikasi Publik dan Peningkatan Partisipasi Pemilu 2019 di Jawa Timur
Gogot Cahyo Baskoro.....47

Pemilih Tangguh Bencana: (Strategi Pendidikan Pemilih di Bumi Tadulako Sulawesi Tengah)
Sahran Raden.....65

Relawan Demokrasi: Upaya Membangun Kesukarelaan Warga Dalam Pemilu (*Electoral Volunteerism*)
Diana Ariyanti.....85

Memenangkan Partisipasi di Era Pasca kebenaran
Agus Hilman.....107

Melawan Perusak Demokrasi
Hariyadi Hamid.....125

Cara Gila Mengepung Pemilih
Yosafat Koli 145

BAGIAN KEDUA: POTRET PENDIDIKAN PEMILIH.....167

Hoax Marak, Mimbar Jumat Sebagai Solusi
Akmal Abzal.....169

Merebut Hati Pemilih di Ranah Minang
Gebril Daulai.....179

Menyasar Pemilih Usia Muda di Sumut dengan Metode Digitalisasi Pemilu
Yulhasni.....193

Potret Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Sulawesi Selatan Pemilu 2019
Faisal Amir 207

Sosialisasi Pemilu Berbasis Keluarga Di Kecamatan Pinogu Provinsi Gorontalo
Selvi Katili.....219

Tour D'Election, Menyasar Pemilih di 900 Kilometer
Adi Arwan Alimin.....243

Menembus Badai Menuju Perbatasan Australia dan Timor Leste
Hanafi Renwarin.....249

Metode Sosialisasi di Maluku Utara
Safrina.....255

Runtuhkan Golput dengan Semangat ''Isen Mulang''
Eko Wahyu S 271

Sosialisasi Pemilu di Pedalaman Way Haru dan Kuala Mesuji
Antoniyus.....289

Arung Jeram Demokrasi
Mukhasan Ajib 301

Menyasar Pemilih Kelompok Pemulung di Kalimatan Barat
Lomon.....313

jdih.kpu.go.id

Pesta Demokrasi Bagi Pemilih Disabilitas di DKI Jakarta
Marlina.....325

Peta Partisipasi Pemilih Riau Pada Pemilu 2019
Nugroho Noto Susanto.....341

Potret Sosialisasi Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara (dari Mentari Kota sampai ke Sinaran Desa)
Al Munardin, SH 365

Tantangan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat:
Jejak Demokrasi di Serambi Utara Indonesia
Salman Saelangi.....375

BAGIAN KETIGA: POTRET PENDIDIKAN PEMILIH.....387

Peran dan Kiprah Remaja Sahabat KPU dalam Sosialisasi
Darlinsyah.....389

Optimalisasi Manajemen Relawan Demokrasi : Perspektif Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus Provinsi Jawa barat)
Idham Holik.....397

Peranan Pemangku Adat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Bali
IGede John Darmawan.....427

Coattail Effect dan Partisipasi Pemilu Serentak 2019 di Kalimantan Selatan
Edy Ariansyah.....433

Partisipasi Pemilu di Yogyakarta dari Kuantitatif menuju Kuanlitatif (Refleksi Pemilu 2019)
Ahmad Shidqi.....457

Kiprah Relawan Demokrasi dalam Pemilu 2019 di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah
Apnizal.....469

Sistem Noken: Partisipasi Pemilih Etnik di Papua
Adam Arisoi.....489

EPILOG: Mendaulatkan Suara Pemilih: Suatu Ragam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu Serentak 2019 493

jdih.kpu.go.id

PROLOG

Memaknai Daulat Pemilih:
Potret Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu 2019

Oleh Sahran Raden
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Buku ini merupakan gagasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang ditulis oleh 34 KPU Provinsi se Indonesia berisi tentang potret, strategi sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 di masing-masing daerah. Buku Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019 adalah buku yang ditulis sebagai upaya mendokumentasikan kesuksesan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak di Indonesia. Sukses meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2019, maka KPU menginisiasi untuk memproduksi buku sosialisasi, potret pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. KPU memberikan hak bagi kepentingan suara pemilih, membuka akses informasi Pemilu, mendesain strategi, kreasi dan inovasi sosialisasi agar pemilu terbuka untuk kepentingan pemilih.

Buku ini ditulis sebagai kontribusi KPU terhadap demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Penulisan buku ini sebagai bagian dari evaluasi dan rekam jejak strategi sosialisasi, pendidikan pemilih dan potret partisipasi Pemilu 2019 di semua Provinsi se Indonesia. Apresiasi positif terhadap upaya KPU dan jajarannya di seluruh Indonesia yang sukses menaikan angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019. Prolog buku ini hendak memberikan pengkayaan gagasan terhadap Daulat Pemilih; Strategi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Potret Partisipasi Pemilu 2019 sebagaimana ditulis oleh rekan-rekan Anggota KPU Provinsi se Indonesia.

Memaknai Daulat Pemilih

Buku ini mengambil judul besar yakni Daulat Pemilih. Dalam padanan maknanya Daulat Pemilih mengambil makna terhadap kedaulatan rakyat dalam demokrasi dimana instrumennya adalah Pemilu. Dalam konteks demikian, pada amandemen UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Frasa" kedaulatan di tangan rakyat" dalam konstitusi merupakan pilihan dimana kedaulatan dalam demokrasi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dalam konstitusi itu hak memilih sebagai jaminan perlindungan diikuti dengan makna pemajuan, penegakan serta pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Makna Daulat Pemilih ini juga

sebagai salah satu bentuk konkret penerapan asas kedaulatan rakyat untuk secara langsung menentukan pilihannya dalam Pemilu. Pilihan terhadap Daulat Pemilih dalam buku ini dimaksudkan bahwa kedaulatan pemilih itu tidak boleh mendistorsi kehendak rakyat yang secara bebas menentukan pilihannya. Hal ini bukan tanpa dasar, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah menyelamatkan hak pilih warga negara dalam Pemilu. Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan bahwa hak pilih warga tidak dapat diganggu gugat dan sebagai hak konstitusional yang perlu mendapatkan perlidungan dan jaminan dari negara. Mahkamah Konstitusi juga pun telah menegaskan hak pilih rakyat itu tidak boleh dibatasi dengan prosedur administratif. Hak memilih itu bersifat substansial, yaitu *right to vote* dalam pemilu. Daulat Pemilih dalam buku ini juga ingin menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa hak memilih tidak dapat dikesampingkan akibat ketentuan prosedural semata. Meski demikian dalam mekanismenya, hak pilih dapat diperbolehkan dibatasi sepanjang bersifat proporsional, rasional, dengan alasan-alasan yang kuat, dan tidak berlebihan.

Daulat pemilih ini secara filosofis mengupayakan adanya usaha meningkatkan kualitas demokrasi substantif dengan mengedepankan nilai-nilai dan hakikat demokrasi dan kedaulatan rakyat. Meningkatkan kualitas demokrasi substantif pada dasarnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas demokrasi prosedural. Tetapi, demokrasi prosedural perlu dikonstruksikan secara proporsional dan rasional agar nilai-nilai demokrasi substantif tetap terjaga dengan baik. Pemilu tidak bisa sekadar dipandang sebagai sarana suksesi atau transfer kekuasaan dan proses konversi suara menjadi kursi di parlemen, akan tetapi secara substansial Pemilu merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Disinilah titik temu Daulat Pemilih dalam Pemilu dimana pendidikan pemilih dan partisipasi warga sebagai permulaan dalam proses *decision making* penyelenggaraan pemerintahan untuk menentukan arah dan tujuan pemerintahan negara ke depan. Sebagai upaya penegakan dan jaminan Daulat Pemilih, KPU sebagai penyelenggara Pemilu terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih melalui berbagai desain strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Salah satu standar internasional Pemilu demokratis adalah jaminan terhadap hak memberikan suara yang sama bagi warga negara dewasa. Sebagai wujud jaminan yang sama dalam memberikan hak bagi warga negara, maka kerangka hukum Pemilu harus mampu memastikan semua warga negara yang memenuhi persyaratan dijamin haknya memberikan suaranya secara universal dan adil serta berhak ikut dalam pemilu tanpa diskriminasi.[1] Penegasan

[1]IDEA, Standart –Standart Internasonal Untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Seri Buku Panduan, Halmsta : IDEA, 2002, h. 35

jdih.kpu.go.id

secara konstitusional, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dengan hak yang universal dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dan kemauan para pemilih.

Peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu. Target partisipasi pemilih 77,5 % yang ditetapkan Pemerintah dan KPU menjadi salah satu bagian dari pekerjaan rumah bagi KPU. Meningkatnya angka persentase pemilih di Pemilu 2019 sebagai harapan bagi masyarakat agar pemilu terlegitimasi baik sisi prosesnya maupun aspek hasilnya. Dalam berbagai studi kepemiluan, sebagaimana kajian Prof. Ramlan Surbakti bahwa Proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis paling tidak ditandai oleh sejumlah indikator.[2] Pertama, sistem pemilihan umum yang tidak saja sesuai dengan karakteristik masyarakat tetapi juga sesuai dengan sistem politik demokrasi (yang didalamnya terkandung sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan daerah, sistem partisipasi politik warga negara, dan sebagainya) yang hendak diwujudkan. Sistem pemilihan umum apapun yang diadopsi, setidak-tidaknya dua hal harus dijamin, yaitu kesetaraan warga negara dalam perwakilan baik dalam penentuan siapa saja yang berhak memilih maupun dalam alokasi kursi parlemen untuk setiap daerah yang harus berdasarkan jumlah penduduk. Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Dalam konteks demikian, Daulat Pemilih, sebagai sarana konstitusional dan kunci partisipasi warga dalam semua sistem pemilu dengan berbagai karakteristik sistem politik yang dibangun oleh suatu negara. Daulat Pemilih dianggap sebagai prinsip kebebasan dalam berpartisipasi pada Pemilu. Bahkan Salah satu indikator ciri negara demokratis yakni adanya jaminan hak politik (*political rights*) dan kebebasan sipil (*civil liberty*). Dua ukuran ini juga menjadi elementer penting dalam konsolidasi demokrasi. Memposisikan rakyat sebagai aktor kunci dalam menentukan semua kebijakan strategis seperti pemilu merupakan bagian dalam membangun pemilu yang partisipatif dan demokratis. Sebagai penguatan demokrasi, pemilih harus berdaulat seutuhnya. Sebab, demokrasi modern memosisikan rakyat sebagai aktor kunci pembangunan.

[2]Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggraaan Pemilihan Umum, Seri Demokrasi Elektoral Buku 12 Jakarta Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013, h. 7

jdih.kpu.go.id

Reproduksi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu 2019

Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai; sarana memilih pejabat publik atau pembentukan pemerintahan, sarana pendidikan politik rakyat dan sebagai media bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat sebagaimana dalam konstitusi Indonesia, maka pemilu menjadi hak politik bagi rakyat untuk mengagregasikan kepentingan politiknya. Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil presiden. Pemilu sebagaimana dalam konstitusi wajib dilaksanakan secara damai, aman, dan tertib. Selain itu Pemilu harus menjamin kesinambungan pembangunan nasional di Indonesia.

Dalam realitasnya di Indonesia, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Pemilu dan membangun kesadaran berdemokrasi bagi warga negara. Perubahan politik ekonomi suatu bangsa akan turut mempengaruhi tehadap pandangan politik bagi warga negaranya. Disadari atau tidak selalu ada kaitannya antara pembangunan ekonomi suatu negara dengan penyelenggaraan Pemilu. Pasca reformasi terjadi semacam ledakan partsipasi politik warga negara melalui pelaksanaan Pemilu. Pasca amandemen UUD 1945, dengan mengamanahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung serta adanya perubahan sistem Pemilu dimana rakyat langsung memilih calon dan partai politik terjadi peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat. Berdasarkan itulah muncul desain sejumlah kalangan untuk melakukan pendidikan politik. KPU dengan ikhtiarnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu juga menggagas paradigma pendidikan pemilih sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan KPU berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Pendidikan pemilih atau *Voters Education* pada hakekatnya sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa menyangkut relasi individu dan negaranya. Pendidikan pemilih merupakan aktivitas dalam membentuk insan politik yang menyadari status kedudukan politiknya dalam negara dan masyarakat.[3] Pendidikan pemilih membentuk kesadaran individu yang penuh tanggung jawab untuk menjadi insan politik yang cerdas dalam berpemilu. Pendidikan pemilih didesain oleh KPU untuk menjadi pemilih cerdas dan berdaulat yang bertanggung jawab bagi negaranya dilakukan melalui sarana memilih pada pemilu. Strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan salah satu fungsi manajemen kepemiluan yang harus berfungsi dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih. Untuk menyusun strategi yang efektif maka perlu memfungsikan pendukung dan sarana sosialisasi

[3]M Nur Khoirun dkk, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Oprasional dan Kerangka Kerja)*, Yogyakrta : LKIS, 1999, h. 4

jdih.kpu.go.id

berupa komunikasi. Kegiatan sosialisasi akan efektif bila terjadi pemahaman antara komunikator dalam hal ini Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Pemilih atau stakeholder. Dengan adanya pemahaman dan informasi yang terbuka, maka Pemilih akan percaya pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam menyusun strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU melakukan beberapa pendekatan, yakni: 1). Memetakan isu-isu besar kepemiluan baik isu yang sensitive maupun isu-isu yang diprediksi akan berkembang. 2). Melakukan analisis kluster pemilih dengan hubungannya terhadap partisipasi pemilih. 3). Melakukan riset dan assesment internal dan eksternal dalam penyelenggaraan sosialisasi. 4). Menyusun grand design strategi sosialisasi dan partisipasi melalui pemanfaatan media dan teknologi informasi. Dalam studi-studi kepemiluan pendekatan dalam melakukan pendidikan pemilih dapat dilihat dalam dua kategori, sebagaimana Hasyim Asy'ari[4] mengelompokkan dalam pendekatan perilaku pemilih (*voting behavior studies*). Pertama, pendekatan sosiologi dan Kedua pendekatan psikologi. Pada pendekatan sosiologis, pendidikan pemilih dilaksanakan dengan melakukan pengelompokan sosial berdasarkan umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama, status ekonomi, aspek geografis dan semacamnya yang memiliki peranan membentuk perilaku politik seseorang. Sedangkan pada pendekatan psikologi, pendidikan pemilih menggunakan dan mengembangkan konsep sosialisasi melalui perilaku pemilih. Pendekatan ini berkeyakinan pengaruh kekuatan psikologi dimana pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh psikologi sesuai produk sosialisasi yang diterimanya. Bahwa sikap seseorang dalam memilih sangat dipengaruhi dari materi sosialisasi yang diterimanya. Sikap yang diterima dari sosialisasi merefleksikan kepribadiannya sebagai variabel yang cukup menentukan dalam memengaruhi perilaku dan pilihan politik pemilih. Melalui proses sosialisasi diyakini selanjutnya berkembang ikatan yang kuat antara pemilih dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik berupa simpati kepada proses pemilu, kandidat dan partai politik.

Pada Pemilu 2019 KPU mereproduksi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk menargetkan pada kegiatan jangka pendek dan jangka panjang dalam konteks tahapan sirkulasi Pemilu 2019. Tujuannya agar Partisipasi pemilih stabil dalam ambang batas legitimasi demokrasi, berkurangnya pragmatisme pemilih, suara tidak sah pemilih rendah dan berkembangnya komunitas peduli pemilu dan demokrasi. Sedangkan pada konteks jangka panjang sirkulasi Pemilu 2019 tujuannya adalah meningkatnya tingkat literasi politik warganegara, meningkatnya keterlibatan warganegara dalam wilayah publik (*political engagement*) dan meningkatnya voluntarisme warga negara dalam proses politik. Berdasarkan itulah, KPU mendesain sejumlah program pendidikan pemilih sebagai upaya mencerdaskan pemilih agar berdaulat dalam memilih. Peningkatan partisipasi

[4] Hasyim Asy'ari, Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia, Yogyakarta, Thafa Media, 2019, h. 170

jdih.kpu.go.id

pemilih dilakukan melalui reproduksi kegiatan sosialisasi secara masif dan tepat sasaran.

Pendidikan Pemilih berbasis Keluarga

Pendidikan Pemilih berbasis keluarga merupakan upaya yang dilakukan secara terencana, sadar, partisipatif, kontekstual dan berkesinambungan dengan sasaran keluarga dalam rangka membentuk keluarga sadar pemilu. Dalam program pendidikan pemilih dengan metode pendidikan pemilih berbasis keluarga KPU mengharapkan agar pemilih mengetahui hak dan kewajibannya dalam pemilu. Turut serta mendorong terwujudnya pemilu damai, demokratis dan berintegritas. Aktif berpartisipasi pada semua tahapan pemilu. Keluarga sebagai penyaring terhadap informasi yang bersifat bohong atau hoax yang berasal dari lingkungan sosial di luar keluarga. Lahirnya tradisi dialog dalam keluarga untuk menyikapi isu-isu kepemiluan.

Pembentukan Relawan Demokrasi

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (*voluntarisme*) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu. Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana

jdih.kpu.go.id

serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan Pemilu-Pemilu sebelumnya.

Mendesain Kelanjutan Rumah Pintar Pemilu

Salah satu program pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU yaitu kegiatan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Secara khusus tujuan RPP yang dibentuk ini sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. KPU dan seluruh jajarannya berikhtiar membantu mengedukasi masyarakat akan pentingnya Pemilu dan demokrasi dengan cara memperkenalkan nilai-nilai dasar Pemilu dan demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi, menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi. Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktivitas project edukasi masyarakat. Pada Rumah Pintar Pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih dilakukan, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat Pemilu membangun gerakan. Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan demokrasi disediakan di rumah pintar pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pamer, ruang simulasi dan ruang diskusi. Di dalam Rumah Pintar Pemilu, setidaknya harus tersedia materi-materi kepemiluan dan demokrasi sebagai bahan pendidikan pemilih, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk antara lain: maket atau diorama, panel dinding informasi (manual atau digital), booklet, leaflet, flyer, video, film, dsb. Materi dalam bentuk panel dinding informasi dibuat dengan desain yang menarik, ringkas dan memuat pokok-pokok atau garis besar substansi materi yang akan ditampilkan. Materi yang lebih mendetail dan lengkap dituangkan dalam bentuk lainnya, seperti booklet, leaflet, flyer. Rumah Pintar Pemilu yang dibangun oleh KPU sampai dengan Pemilu 2019 telah terbangun disemua Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Dengan itu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menjadikan Rumah Pintar Pemilu ini sebagai program unggulan dalam melaksanakan pendidikan pemilih.

Fasilitasi Kluster Basis Pendidikan Pemilih

KPU memfasilitasi program pendidikan pemilih dengan basis kelompok masyarakat sesuai dengan sasaran sosiliasasi. Diantaranya yaitu kelompok pemilih muda, pemilih pemula dan pemilih milenial. Fasilitasi pada kelompok sasaran ini dilakukan dalam berbagai bentuk dengan kegiatan *Goes To Campus*, *Goes To School*, Pemanfaatan media sosial dan internet, dimana KPU meyakini bahwa media sosial dan internet sebagai sarana bagi pemilih milenial, pemilih muda atau pemilih pemula menggunakan aktivitas sosialnya.

KPU memproduksi sejumlah kegiatan sosialisasi yang sasarannya pada kelompok masyarakat secara luas, seperti; kelompok masyarakat marginal, kelompok keagamaan, kelompok perempuan, kelompok disabilitas. Selain kluster kelompok sasaran sosialisasi itu, KPU juga mengklasifikasikan sasaran sosialisasi dengan kluster kontekstual seperti peningkatan partisipasi pemilih pada daerah partisipasi pemilih rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, daerah rawan konflik dan daerah rawan bencana. KPU menyasar kelompok Pemilih yang berbasis (11 Basis), Masyarakat umum, Media massa, Partai politik, Organisasi kemasyarakatan, Masyarakat adat, dan Instansi pemerintah.

Desain Pendidikan Pemilih Electiontainment Model

Model dan bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih *electiontainment model*, ini dilaksanakan dalam bentuk hiburan misalnya lomba jingle dan maskot Pemilu, konser musik dan festival budaya, lombah mural, KPU run, pentas wayang, jalan santai, parade musik dan lain lain. Mobilisasi sosial disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah di Indonesia.

Dalam berbagai kegiatan pendidikan pemilih yang dicanangkan KPU, setidaknya ini sebagai bentuk pelaksanaan prinsip pemilu yang lebih transparan dengan terbuka kepada publik di Indonesia. Inovasi pendidikan pemilih mampu membangkitkan pemilih secara sadar untuk datang ke TPS pada hari Pemungutan Suara Pemilu 2019.

Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu 2019

Pemilu serentak tahun 2019 telah diselenggarakan dengan aman dan damai berdasarkan prinsip langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu 2019 dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu, KPU dapat menaikan angka partisipasi Pemilu 2019. Sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu mengingat salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah partisipasi pemilih. Angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81,93 % . Berikut tingkat Partisipasi pemilih Pemilu 2019 di seluruh Provinsi se Indonesia

jdih.kpu.go.id

No	Provinsi	Persentase Pemilih (%)
1	Aceh	81,90
2	Sumtera Utara	77,94
3	Sumatera Selatan	83,98
4	Sumatera Barat	78,86
5	Riau	84,49
6	Bengkulu	85,41
7	Jambi	85,19
8	Kepulau Riau	83,24
9	Lampung	80,53
10	Bangka Belitung	86,27
11	DKI Jakarta	79,53
12	Jawa Barat	82,41
13	Jawah Tengah	80,12
14	DI Yogyakarta	88,81
15	Jawah Timur	82,38
16	Banten	83,39
17	Bali	83,37
18	Nusa Tenggara Barat	82,83
19	Nusa Tenggara Timur	80,08
20	Kalimantan Barat	82,06
21	Kalimantan Selatan	82,75
22	Kalimantan Tengah	79,32
23	Kalimantan Timur	80,33
24	Kalimantan Utara	79,46
25	Sulawesi Selatan	81,52
26	Sulawesi Utara	83,39
27	Sulawesi Tengah	83,90
28	Sulawesi Tenggara	82,60
29	Gorontalo	88,79
30	Sulawesi Barat	86,71
31	Maluku	79,21
32	Maluku Utara	82,52
33	Papua	95,70
34	Papua Barat	87,35

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEMILU 2019

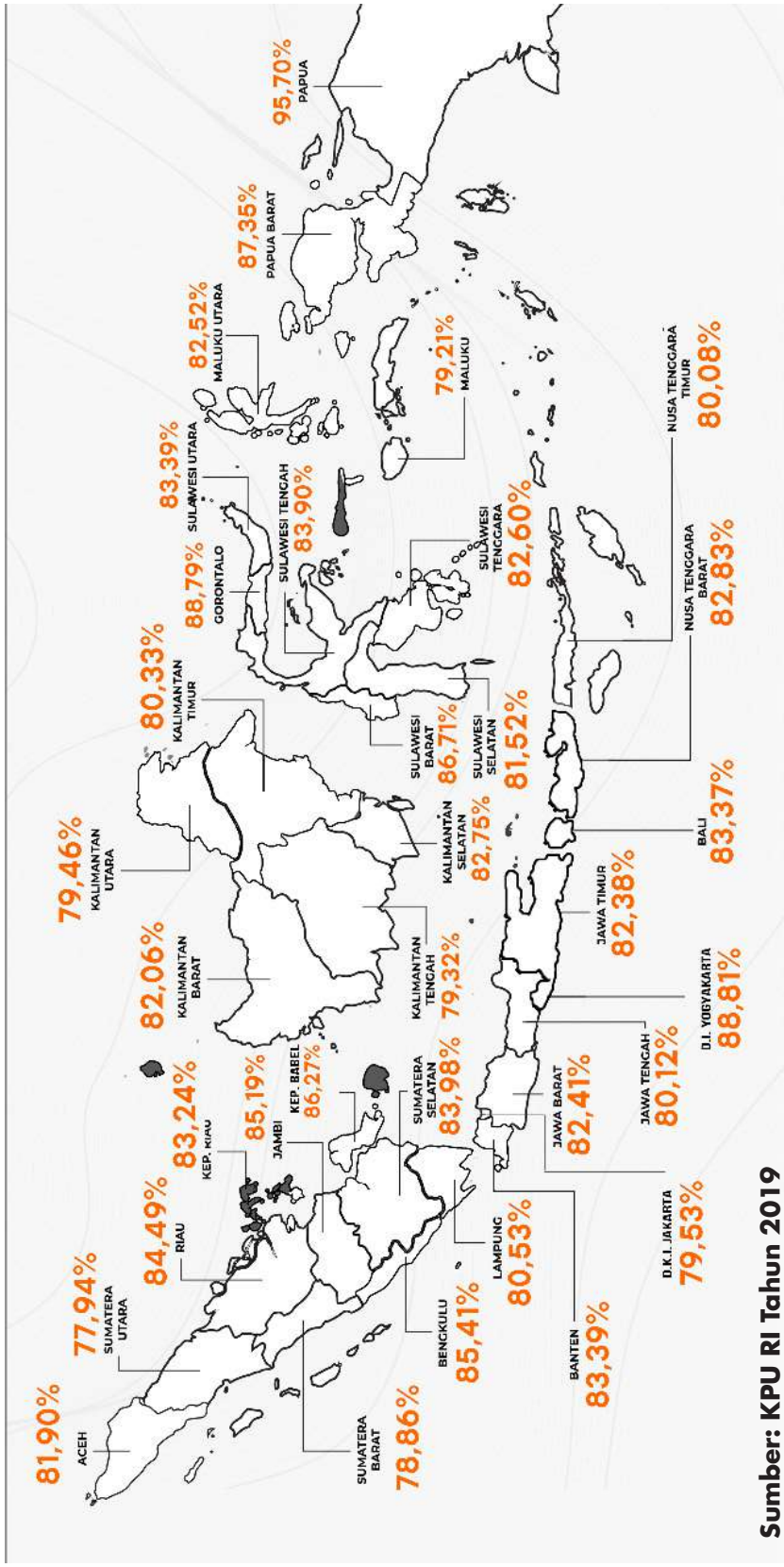

Berdasarkan tabel dan Infografis tersebut, menunjukan bahwa tingkat partisipasi pada Pemilu 2019 meningkat dari pemilu 2014. Dengan demikian, KPU dengan berbagai program peningkatan partispasi dan strategi sosialisasi pemilu selama kurun waktu tahapan Pemilu 2019 berhasil menaikkan angka partisipasi Pemilu 2019. Dengan tingkat kerumitan yang tinggi, tingkat partisipasi pemilu tahun 2019 naik sebanyak 10,62 % dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan naik sebanyak 6,82% dari Pemilu legislatif tahun 2014. Jika dibandingkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dengan pemilu tahun 2014, maka angka yang cukup signifikan dengan tingkat partisipasi pemilih dimana Pemilu 2019 antusias pemilih untuk melakukan pencoblosan di TPS sangat tinggi.

Banyak faktor yang turut serta memengaruhi terhadap naiknya tingkat partisipasi pemilu pada tahun 2019. Diantaranya faktor kandidat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia. Selain calon, pemilih yang cerdas merasa terwakili kepentingannya baik secara politik atau programatik turut ikut serta menjadi faktor dalam meningkatnya partisipasi pemilih Pemilu 2019. Selain dua diatas, dua faktor berikut ini memiliki andil strategis dalam peningkatan partisipasi pemilih yakni faktor media massa cetak, media elektronik, media sosial dan faktor sosialisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang secara masif, sistematis dan terstruktur dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat selama kurun waktu tahapan Pemilu 2019 berlangsung di semua daerah pemilihan di Indonesia.

KPU menyadari bahwa dalam pemilu, partisipasi pemilih selalu mengalami dinamika. Dinamika partisipasi pemilih dalam pemilu bisa trendnya naik dan bisa juga turun. Tren penurunan partisipasi pemilih (*voters turnout*) sebenarnya pernah terjadi sejak pemilu 1999 hingga 2009. Pada tahun 1999, partisipasi pemilu legislatif saat itu mencapai 92,96 persen. Jumlah itu turun menjadi 84,07 persen untuk pileg 2004, sementara Pilpres 2004 angka partisipasi pemilih pada putaran I sebesar 79,76 persen dan putaran II sebesar 74,44 persen. Tren penurunan partisipasi pemilih kembali terjadi pada Pemilu 2009. Pada pileg 2009, jumlah partisipasi pemilih hanya mencapai 70,99 persen, sementara untuk Pilpres hanya sebesar 72,09. “Tren itu untungnya tidak berlanjut terus. Sejak pemilu 2014 terjadi rebound, tren peningkatan kembali yang terus berlanjut di Pemilu 2019 bahkan hingga melampaui target nasional sebesar 77,5 persen. Pada Pileg 2014, angka partisipasi pemilihnya mencapai 75,11 persen. Namun untuk Pilpres 2014 masih mengalami penurunan ke angka 69,58 persen. Namun pada Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih baik pileg maupun pilpres mengalami peningkatan drastis. Untuk pileg, partisipasi pemilih mencapai 81,69 persen, sementara pilpres mencapai 81,97 persen. Terlepas dari apapun motivasinya, namun yang jelas bahwa semakin banyak pemilih yang menggunakan kedaulatannya untuk memilih wakil-wakilnya

jdih.kpu.go.id

sebagai pemimpin negeri ini.

Sejumlah program sosialisasi dan pendidikan pemilih dilaksanakan oleh KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019. Pendidikan Pemilih sebagai usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu tertentu. Dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu tahun 2019, sejumlah perbaikan perlu di optimalkan oleh jajaran KPU di seluruh tingkatan. Beberapa catatan kritis sebagai rekomendasi dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih untuk peningkatan partisipasi pemilih yakni diantaranya: Pertama, Sosialisasi berkaitan dengan jadwal kegiatan. Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan jadwal kegiatan sosialisasi dengan kegiatan tahapan lain untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaannya. Kedua, Penggunaan teknologi informasi. Perlu mengoptimalkan kegiatan sosialisasi melalui sarana teknologi informasi yang dimiliki oleh masing-masing satker KPU secara berjenjang. Ketiga, Melakukan pemetaan sasaran sosialisasi agar lebih strategis dalam upaya menyasar pemilih sesuai komunitasnya. Dengan pemetaan itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas meningkatkan partisipasi pemilih memiliki program sosialisasi yang langsung berdampak pada sasaran sosialisasi. Keempat, Mencegah hoaks dan *money politic*. Sosialisasi yang dilakukan diarahkan untuk memberikan informasi yang benar dan pencegahan politik uang sebagai respon KPU untuk perbaikan kualitas demokrasi.

Dalam pendidikan pemilih, didalamnya mencakup semua pemberian informasi kepemiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. Salah satu bangunan pemilu yang demokratis adalah adanya pemilih yang cerdas dan partisipatif, yang di dalamnya termasuk pemilih pemula yang sudah berumur 17 tahun. Pemilih yang cerdas ialah pemilih yang mempunyai pemahaman, pengetahuan dan sikap yang terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk di dalamnya hak untuk berpartisipasi dalam proses politik atau pemilu. Buku ini memberikan gambaran potret, strategi dan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Semoga buku ini bisa bermanfaat dalam kontribusi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Semoga buku ini menjadi ikhtiar KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan pemilu yang partisipatif dan demokratis.

jdih.kpu.go.id

Bagian 1
Strategi Sosialisasi Pemilu

Pada bagian pertama buku ini berisi tentang pengalaman melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia. Berbagai strategi, program pendidikan pemilih yang menjadi unggulan bagi KPU Provinsi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan pemilu dilaksanakan sebagai ikhtiar meningkatkan partisipasi elektoral. Dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu 2019, KPU menyasar kelompok-kelompok masyarakat strategis dalam melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Kelompok masyarakat strategis, misalnya kelompok milenial atau para pemilih pemula, disabilitas dan pemilih perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah dua kegiatan KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Sosialisasi dalam Pemilu merupakan suatu proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu. KPU memiliki tugas untuk memberikan informasi secara terbuka kepada pemilih mengenai tahapan pemilu. Sedangkan Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, KPU memiliki berbagai strategi, metode dan bentuk sosialisasi dan pendidikan Pemilih kepada warga negara agar meningkatkan pengetahuan dan kesadarannya dalam memilih.

Dalam penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU bekerja sama dengan semua pihak. Kerjasama itu dilaksanakan sebagai bentuk penerapan asas transparansi dalam pemilu. Sosialisasi dan pendidikan pemilih didesain untuk meningkatkan partisipasi pemilih secara nasional, dimana target persentasi partisipasi Pemilu 2019 sebesar 77,5 persen. KPU mendesain berbagai strategi dan pendidikan pemilih agar berdampak pada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Pemilu 2019. KPU menyakini bahwa dengan terbentuknya pemahaman masyarakat terhadap tahapan pemilu, maka partisipasi pemilih di Pemilu serentak tahun 2019 bisa meningkat secara signifikan.

jdih.kpu.go.id

Sosialisasi: Revitalisasi Nilai Demokrasi dan Tantangan Mondial

Oleh Fahrurrozi
Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengantar

Sosialisasi tidak saja dimaknai sebagai penyebarluasan informasi semata, yakni informasi tentang tahapan Pemilihan Umum (Pemilu), terutama hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara. Sosialisasi juga bukan semata menginformasikan apa saja hak dan kewajiban pemilih dalam setiap tahapan pemilu. Tapi, lebih jauh dari itu, sosialisasi adalah internalisasi nilai-nilai demokrasi tiap warga negara Indonesia, yg dilindungi oleh UUD 1945. Internalisasi nilai-nilai demokrasi diwujudkan dalam partisipasi masyarakat, baik itu menyangkut hak maupun kewajiban masyarakat.

Kenapa penulis menyebut sasaran sosialisasi adalah masyarakat, bukan kepada pemilih? Bukankah partisipasi yang dimaksud adalah warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih?

Perlu penulis sampaikan, bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU bukan hanya bermain pada permukaan yang bersifat instan semata, tapi lebih jauh dari itu, adalah internalisasi nilai-nilai demokrasi, pendidikan nilai yang ditanamkan bukan saja kepada para pemilih pemula, pemilih senior (pemilih yang sudah berkali-kali menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara), atau pemilih yang sudah berumur lebih dari 22 tahun tapi belum pernah memilih, tapi juga kepada anak-anak (pra pemilih) yang bahkan berusia SD. Kenapa demikian, jawabnya adalah menanamkan nilai-nilai demokrasi tidak bisa dilakukan secara instan, tapi mulai ditanamkan sejak usia dini. Dengan demikian, kesadaran terhadap hak dan kewajiban politik warga sudah tertanam dalam diri masyarakat.

Upaya internalisasi nilai demokrasi, bahkan terhadap pemilih senior yang masih golput, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak saja menggunakan pendekatan satu metode saja, tapi banyak metode, namun yang paling efektif adalah membangun komunikasi dua arah. *Two way communication* sampai saat ini masih sangat efektif dalam upaya pendidikan pemilih. Ada timbal balik antara penyelenggara dengan masyarakat. Masyarakat akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kendati demikian, sosialisasi satu arah masih tetap dibutuhkan, taruh saja misalnya melalui film, media massa, media luar ruang

(baliho, spanduk, dll). Namun segmen ini sangat terbatas dan tidak ada umpan balik yang signifikan. Dan sifatnya hanya sebagai bahan pengingat saja, meski kadang-kadang sedikit provokatif.

Untuk kelompok pemilih terakhir (pemilih senior yang golput) kami berusaha mengubah cara pandang mereka. Tepatnya, kami berusaha melakukan revitalisasi nilai-nilai pemahaman mereka terhadap demokrasi yang kita anut yaitu berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Tujuannya jelas, agar mereka lebih memahami pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilu sebagai satu-satunya cara yang konstitusional dalam peralihan kekuasaan politik di tanah air. Serta memberikan pemahaman bahwa hajat hidup mereka sangat tergantung dengan keputusan politik.

Tujuan Sosialisasi

1. *Knowlegde*
   Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pemilu, antara lain penyelenggara, peserta, pemilih, regulasi, tata kelola, tahapam, dan jadwal Pemilu.

2. *Awarenes*
   Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu.

3. *Participation*
   Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Tujuan diatas, Sejalan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi , Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 4, secara eksplisit disebutkan bahwa sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat bertujuan:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu;

2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan

3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Pemahaman warga terhadap pemilu yang sering kita temui sehari-hari masih sebatas pada hal-hal teknis, yaitu soal tahapan dan tanggal pelaksanaan pemilu dan belum menyentuh pada substansinya. Belum menyentuh pada nilai-nilai dasar dalam kehidupan berdemokrasi. Sehingga tidak heran jika pemilih yang hadir di TPS rata-rata tidak mengenal siapa yang mereka pilih dan mengapa mereka memilih. Jangankan mengenali programnya, kenal orangnya pun tidak.

Ini pula yang menyebabkan politik uang makin merajalela. Para calon yang nakal memanfaatkan situasi ini untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dengan menebar uang suap kepada pemilih. Pemilih yang sejak awal tidak memahami tujuan pemilu dan hak demokrasinya, tentu akan menjadi sasaran uang suap tersebut. Lama-kelamaan, pemilihan hanya jadi ajang kontestasi kekuasaan yang tidak sehat dan menyesatkan. Nilai-nilai demokrasi menjadi rusak karenanya!

Mereka tidak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, biaya pendidikan, sarana dan prasarana sangat tergantung pada keputusan politik. Dan tentu saja, jika yang duduk di kursi kekuasaan dipenuhi oleh calon yang hanya mengandalkan uang, tidak akan memikirkan kepentingan publik . Dia akan memikirkan bagaimana caranya supaya uang yang sudah banyak keluar bisa kembali. Selanjutnya, yang terjadi adalah korupsi di mana-mana. Jika korupsi menjadi-jadi, maka angka kemiskinan tetap akan tinggi, dan masyarakat akan terkena dampaknya. Bila ini terus dibiarkan, siapa yang rugi? Jawabnya adalah rakyat, baik yang buta politik maupun yang tidak.

Maka membangun kesadaran politik kepada masyarakat serta menanamkan arti penting kesertaannya dalam pemilu menjadi sangat mutlak. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung punya tanggung jawab yang sama dengan KPU di daerah lain untuk mengambil peran bagian tersebut.

Pengembangan Metode

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam rangka pendidikan politik, atau tepatnya menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat. Dan pelaksanaannya tidak tergantung pada tahapan pemilu. Sosialisasi dan pendidikan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Secara umum bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Pra Pemilu, Pemilu dan Pasca Pemilu. Maka KPU tidak boleh berhenti menyelenggarakan pendidikan pemilih pada saat pelaksanaan pemilu saja. Sebelum bahkan sesudah pemilu-pun, pendidikan harus tetap berlangsung.

KPU RI melakukan banyak upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai demokrasi,misalnya Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang harus dibangun di seluruh provinsi dan bahkan seluruh kabupaten dan kota se Indonesia. Segmen RPP ini menyasar warga dari pemilih pemula, pemilih senior dan bahkan pra pemilih (anak-anak TK, SD, SMP dan SMA). Di rumah pintar pemilu, para pengunjung diberikan informasi seputar pemilu dan pentingnya ikut berpartisipasi. Di tempat ini pengunjung diberikan wawasan mengenai pemilu dan pentingnya ikut berpartisipasi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, RPP dilengkapi dengan fasilitas audio visual, display serta maket tempat pemungutan suara. Sehingga pengunjung dikenalkan secara langsung apa itu pemilu dan

bagaimana tahapan-tahapannya.

Relawan Demokrasi

Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif adalah melibatkan secara langsung elemen masyarakat, khususnya para pemuda. Mereka direkrut dan bekerja secara sukarela dalam rangka memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat luas. Namun sebelum mereka terjun ke masyarakat luas, mereka terlebih dahulu dilatih dan diberikan pemahaman tentang demokrasi, pemilu serta hal-hal yang terkait seputar tahapan pemilu.

Para relawan demokrasi menyasar kepada para pemuda, baik di lingkungan tempat tinggal mereka maupun ke segmen-segmen lain. Namun tantangan yang lebih mendapat perhatian adalah di lingkungan kampus. Maklum, mahasiswa rata-rata tidak buta politik, namun kebanyakan anti politik. Ada ruang untuk tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Sehingga di kalangan mahasiswa banyak yang golput. Cara pikir (*mindset*) inilah yang perlu direvitalisasi. Perlu diberikan pemahaman nilai-nilai demokrasi dan arti penting untuk ikut menentukan pemimpin mana yang layak diberikan mandat kekuasaan.

Kegiatan di kampus maupun di luar lingkungan kampus diatur sedemikian rupa dengan beragam metode. Jadwal kegiatan serta metode pendekatan selalu dievaluasi dan dikembangkan. Untuk di lingkungan kampus, metode yang banyak dipakai adalah diskusi. Sehingga ada ruang tanya jawab yang cukup intensif.

Sedangkan di lingkungan lain, seperti di mall atau di pusat-pusat keramaian lainnya, kami mendirikan stand yang dilengkapi dengan beragam alat peraga untuk lebih memudahkan pengunjung memahami dunia seputar pemilu. Untuk menarik minat warga, di stand ini kami menyediakan souvenir yang menarik.

Natak Kampong

Natak kampong diambil dari bahasa daerah Bangka, yang artinya menyambangi atau mendatangi kampung. Natak kampong merupakan salah satu kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten dan Kota se Bangka Belitung dari rumah ke rumah penduduk. Kegiatan ini melibatkan seluruh penyelenggara sampai ke tingkat desa atau kelurahan, serta para relawan demokrasi. Natak kampong dilakukan secara massif dan terstruktur, utamanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Kampanye ayo ikut memilih yang dibarengi dengan pendidikan politik, khususnya mengenai apa saja hak dan kewajiban mereka, tidak mengenal hari kerja. Bahkan moment-moment hari libur banyak dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Secara garis besar, dapat penulis sampaikan, bahwa

seluruh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini, lebih banyak menyasar ke basis keluarga. Sebab dengan basis ini, kesadaran politik akan menjadi kuat dan mengakar.

Peningkatan Partisipasi

Angka partisipasi pada Pemilu 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat secara signifikan. Pada Pemilu 2014 lalu, angka partisipasi masyarat pada pemilu legislatif tercatat 73 persen. Sedangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 69,21 persen.

Sedangkan pada Pemilu 2019, angka partisipasi masyarakat meningkat cukup tajam, yaitu 82,54 persen untuk pemilu legislatif, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden mencapai 87 persen . Angka ini melebihi target secara nasional, yaitu sebesar 77,5 persen. Mengenai detilnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

PARTISIPASI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
SE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
63.57%
62%
61.67%
69.51%
60.82%
78%
PANGKALPINANG
BANGKA
BANGKA TENGAH
BANGKA BARAT
BANGKA SELATAN
BELITUNG
BELITUNG TIMUR
JUMLAH (PROVINSI)
PANGKALPINANG
BANGKA
BANGKA TENGAH
BANGKA BARAT
BANGKA SELATAN
BELITUNG
BELITUNG TIMUR
JUMLAH (PROVINSI)

PARTISIPASI PEMILIH PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
54%
58.5%
64.8%
62.8%
59.4%
70.7%
PANGKALPINANG
BANGKA
BANGKA TENGAH
BANGKA BARAT
BANGKA SELATAN
BELITUNG
BELITUNG TIMUR
JUMLAH (PROVINSI)
PANGKALPINANG
BANGKA
BANGKA TENGAH
BANGKA BARAT
BANGKA SELATAN
BELITUNG
BELITUNG TIMUR
JUMLAH (PROVINSI)

Peningkatan ini cukup menggembirakan, menandai meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Kendati demikian, upaya internalisasi nilai demokrasi harus tetap ditingkatkan, mengingat tantangan demokrasi ke depan jauh lebih kompleks dan menantang.

Penutup

Namun demikian, KPU tidak boleh juga mengklaim bahwa peningkatan angka partisipasi masyarakat tersebut hasil dari perjuangan seluruh elemen penyelenggara dari awal hingga akhir saja. Ada variabel lain yang turut menyumbang, antara lain hubungan pemilih dengan yang dipilih, serta cukup massiv-nya kampanye yang dilakukan peserta pemilu.

Namun demikian, upaya yang dilakukan KPU tidak boleh juga ditolak begitu saja. Sebab hasilnya cukup jelas, signifikan serta terukur. Dengan kata lain, penulis ingin mengatakan bahwa membangun kesadaran politik dan nilai demokrasi tidak bisa hanya dilakukan oleh KPU saja, tapi butuh dukungan dari semua pihak. Semua stakeholder harus terlibat semua.

Tentunya kita menginginkan masyarakat sadar bahwa hajat hidup mereka dalam sebuah negara yang demokrasi, sangat bergantung kepada keputusan politik. Dan muaranya, tujuan demokrasi itu sendiri adalah membawa kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Semoga!

jdih.kpu.go.id

Strategi Sosialisasi Pada Kelompok Salafiyah Di Pondok Pesantren Dhiya'aussalaf Muara Enim Sumatera Selatan

Oleh Amrah Muslimin
Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan

Abstrak

Partisipasi Pemilih dalam setiap pesta Demokrasi masih menjadi catatan serius dalam setiap Pemilu. Problematika "Golput" juga terjadi di Sumatera Selatan, dimana angka partisipasi pemilih di Provinsi Sumatera Selatan belum menyentuh target Nasional. Pada Provinsi Sumatera Selatan, terdapat salah satu Desa dimana tingkat Partisipasi masyarakatnya bisa dikatakan nihil. Kelompok Salafiyah di Pondok Pesantren Dhiyaa'Usalaf yang berlokasi di Desa Karang Agung, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim. Sejak dimulainya Sistem Demokrasi di Indonesia (Tahun 2004) sampai dengan Pemilu Terakhir (Pileg dan Pilpres Tahun 2019) masyarakat di Pondok pesantren tersebut tidak pernah ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Tulisan ini membahas tentang Strategi Sosialisasi kepada Kelompok Salafiyah dimana kelompok Salafi tidak mengenal dan anti dengan Pemilu dikarenakan pandangan kelompok Salafiyah terhadap Pemilu adalah sebagai gerakan bid'ah (penyimpangan). Penulis berharap ada ide-ide strategis lain yang muncul dimasa yang akan datang untuk mengatasi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pemikiran yang ekstrim terhadap pemilu. Harapan penulis tulisan ini dapat membangkitkan kesadaran kita bahwa dibalik upaya keras kita melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ternyata masih ada sekelompok kecil masyarakat yang menganggap bahwa Pemilu adalah perbuatan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, golput, kelompok salafiyah

Latar Belakang

Pemilu merupakan sebuah momentum yang sangat demokratis dan diberikan kepada masyarakat untuk menentukan arah suatu Negara. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu mengingat salah satu indikator keberhasilan Pemilu adalah Tingkat Partisipasi Pemilih. Kinerja penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dapat dilihat berdasarkan pencapaian target, tujuan, dan sasaran, oleh karenanya perlu dievaluasi secara komprehensif. Aspek partisipasi masyarakat dengan membangun kesadaran terhadap pentingnya Pemilu menjadi salah satu yang dapat menangkal terhadap akibat dari efek penyebaran ujaran kebencian dan hoaks pada Pemilu. Pemilih yang cerdas dan berdaulat dapat menjadi aspek penting dalam menjaga pemilu yang damai. Komisi Pemilihan Umum dan seluruh jajarannya diminta untuk mengikutsertakan para masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan informasi kepemiluan baik itu di daerah yang sulit menerima informasi tentang Pemilu maupun di daerah rawan konflik.

Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:

1. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih yang mana pendidikan pemilih tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pemilih serta meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemilu;
2. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Adapun sasaran pendidikan pemilih meliputi: Keluarga, Pemilih Pemula, Pemilih Muda, Pemilih Perempuan, Pemilih Penyandang Disabilitas, Pemilih Berkebutuhan Khusus, Kaum Marjinal, Komunitas, Keagamaan, Relawan Demokrasi, dan/atau Warga Internet (Netizen). Partisipasi Pemilih dalam setiap pesta demokrasi masih menjadi catatan serius dalam setiap Pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), berdasarkan pengalaman dalam Pilkada di berbagai daerah, persentase golput, relatif besar yaitu sekitar 25-35 % dari total pemilih, dan ini menjadi problematika partisipasi yang juga terjadi di Sumatera Selatan,

jdih.kpu.go.id

dimana angka partisipasi pemilih di Bumi Sriwijaya ini belum menyentuh target nasional 80% pada tahun lalu misalnya hanya mencapai 66,9% dari jumlah suara sah dan tidak sah, angka ini menurun dari tahun 2008 yang tingkat partisipasi masyarakatnya 72% dan pada Pemilu Nasional yaitu Pemilu tahun 1999 (92%), Pemilu 2004 (84%), Pemilu 2009 (71%) dan Pemilu 2014 (73%).

Sejarah Golput dan Profil Pesantren Dhiya'Aussalaf

Memilih adalah hak setiap Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Namun, ada sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu atau yang disebut Golongan Putih (Golput). Dilihat dari sejarahnya, golput alias Golongan Putih merupakan sebagian sikap demokrasi pemilih khususnya dari kalangan mahasiswa terhadap protes yang disampaikan dalam proses demokrasi pada waktu itu, yaitu mereka datang memilih namun bukan mencoblos calon yang ada melainkan mencoblos kotak putih di surat suara. Situasi tersebut terjadi pada proses pemilihan umum tahun 1971 dimana gerakan yang dimotori oleh Arief Budiman dan Imam Waluyo tersebut dilakukan lantaran publik tidak akan berani untuk tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana mereka akan ditandai ketika mereka tidak datang ke TPS untuk menyampaikan hak suaranya.

Namun sayangnya publik zaman sekarang memaknai golput bukan lagi karena alasan tersebut, melainkan lebih pada sikap apatismenya publik terhadap penyelenggaraan proses pemilihan umum tersebut. Ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak menyalurkan hak suaranya diantaranya:

1. Calon pemimpin tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan;

2. Tidak merepresentasikan suara masyarakat secara global;

3. KTP tidak sesuai dengan domilisi (faktor urbanisasi) dan alasan teknis lainnya seperti tidak bisa pulang kampung pada saat menjelang Pemilu;

4. Dan yang paling sangat ditakutkan adalah adanya kelompok yang mempunyai pemahaman demokrasi adalah bid'ah (penyimpangan).

Di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat salah satu desa dimana tingkat Partisipasi masyarakatnya yang bisa dikatakan nihil (Golput) yaitu Kelompok Salafiyah yang berlokasi di Dusun Karang Makmur, Desa Karang Agung, Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim yang terletak antara kota Prabumulih dengan kota Batu Raja.Nama pondok pesantren Dhiya'ussalaf, NSPP: 512160307016 tahun

berdiri 2015 berbadan hukum dengan nomor SK: Kw.06.5/I/KP.07.6/1098A/2004 tertanggal SK 30 April 2005 dengan nomor izin: Kw.06.502/16/2005 dan tipe pondok pesantren Salafiyah dengan penyelenggara yayasan dan manajemen mandiri.

Dipimpin oleh Ustadz Al Bukhori (Pimpinan Pondok Pesantren Dhiyaa'Ussalaf), Pondok Pesantren ini terletak berjarak 10 km dari Ibu kota Kecamatan (Lubai) dan 80 km dari ibu kota Kabupaten (Muara Enim) atau 100 km dari Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan (Palembang). Pondok pesantren ini memiliki luas tanah 17 Ha, luas untuk pondok 2 Ha, luas untuk masjid 0,5 Ha, luas untuk pemukiman 8 Ha, luas untuk perkebunan 4 Ha, luas untuk sarana olahraga 1 Ha, dan luas untuk yang lainnya 1,5 Ha. Status tanah adalah tanah wakaf dan beli, sedangkan keadaan bangunan terdiri dari gedung ruang belajar 4 bangunan, asrama putra 3 banguanan, asrama putri 1 bangunan, masjid 1 bangunan yang belum sempurna fasilitasnya yang digunakan untuk ruang belajar serta 1 lagi sudah dipakai untuk kegiatan ibadah, ta'lim, dan halaqah dan perumahan ustaz tiga unit rumah yang bentuk bangunannya sama dengan rumah santri yang orang tuanya juga menjadi santri di pondok pesantren ini.

Konsep pendidikan pada Pondok Pesantren Dhiyaa'Usalaf termasuk Pondok Pesantren salaf murni yang mengajarkan bidang studi ilmu agama saja dan tidak ada pendidikan formalnya atau tidak menggunakan kurikulum Nasional (sehingga santri yang sudah menyelesaikan pendidikannya tidak mendapatkan ijazah). Santri tidak boleh sekolah formal di luar pesantren. Pesantren salaf murni ini, disebut juga dengan salafiyah, yang bertujuan mencetak ulama ahli agama yang mempelajari kitab-kitab Kuning (Kitab Kuno). Dimana penguasaan terhadap Kitab Kita Kuno adalah ciri khas kualitas keilmuan Pesantren Salaf.

Adapun suasana lingkungan pesantren ditata dan diatur sesuai dengan tuntunan sunah Rasulullah SAW, diantaranya harus menutup aurat (wanita yang sudah menikah menggunakan cadar), tidak boleh berbaur antara pria dan wanita dalam suatu ruangan (sekalipun acara walimatul ursy), tidak boleh bersalaman antara pria dan wanita, tidak boleh berfoto kecuali untuk hal-hal penting, seperti untuk KTP, SIM dan paspor, tidak boleh nonton televisi, santri tidak boleh menggunakan handphone, masyarakat disana tidak mengikuti Pemilu dan tidak menggunakan istilah rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), sehingga untuk administrasi Pondok Pesantren mereka menggunakan istilah ketua lingkungan yang bukan bagian dari RT dan RW tertentu dan administrasinya langsung berhubungan dengan Kepala Desa. Untuk urusan penerapan ibadah, Pondok Pesantren ini murni menggunakan ajaran Rasulullah SAW dan mereka menolak keras praktik ibadah

yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW (yang sangat kontradiktif dengan praktik ibadah yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan luar pondok) seperti tidak ada qunut dalam solat subuh, tidak ada zikir bersama, doa bersama, istighasa' bersama, peringatan-peringatan hari-hari bersejarah islam, dan acara walimah yang dilaksanakan secara sangat sederhana.

Sejarah Gerakan Salafiyah

Sejarah perkembangan Gerakan Salafiyah yang masuk ke Kabupaten Muara Enim adalah salah satu dari sekian banyak Gerakan Salafiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Indonesia terdapat bermacam-macam gerakan yang memiliki paham dan aliran yang berbeda-beda. Masing-masing gerakan tersebut membawa dan melontarkan isu-isu perubahan sesuai dengan visi dan misi yang dibawa. Ada sebab-sebab tertentu dibalik eksistensi suatu paham dan aliran, baik itu motivasi yang berupa keduniaan, ketidakpuasan terhadap sesuatu terutama berkaitan dengan politik,faktor ambisi kekuasaan,ingin terkenal termasuk untuk memecah-belah umat Islam. Dalam kegiatan dakwah di Indonesia dewasa ini muncul fenomena saling menyesatkan bahkan mengkafirkan. Fenomena ini muncul karena adanya perbedaan dalam memandang dan menyikapi persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat, seperti perbedaan dalam persoalan politik, HAM, pengamalan ibadah, dan perbedaan dalam menyikapi masalah liberalisme, pluralisme, hermeneutika, dan sebagainya.

Pada zaman orde baru sekarang ini, pemahaman masyarakat Indonesia terbuka untuk menggunakan asas yang bersifat keagamaan sebagai dasar organisasi sosial dan politik. Organisasi-organisasi baru (Kelompok Islam) ini memiliki basis ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, konservatif, dan eksklusif. Salah satu kelompok yang berpengaruh dan berperan dalam pergerakan keislaman di Indonesia adalah gerakan salafiyah. Gerakan salafiyah mengajarkan ketaatan yang total kepada manhaj Nabi Muhammad dan as-salaf as-shalih. As-Salaf merupakan kata yang umum yang menunjuk para pelopor Islam yang shalih dan semua orang yang mengikuti jalan mereka dalam keyakinan, moral, dan tingkah laku. Gerakan salafiyah merupakan gerakan yang bertolak dari para pendahulu umat ini, para sahabat, dan tabi'in. Gerakan salaf adalah gerakan yang haq, gerakan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Misi utama dari gerakan adalah menciptakan dan mengupayakan terjadinya perbaikan di tengah-tengah manusia. Mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, kerancuan pemahaman, dan bid'ah, menuju kesatuan akidah dan sunah.

Gerakan salafiyah beranggapan massa (masyarakat) telah bergeser jauh, generasi terbaik telah tiada, fitnah dan kesyirikan telah menyebar luas bagaikan kabut hitam, kekufuran terpajang dengan jelas di etalase kehidupan, ahli bid'ah adu kekuatan, dan para pengikut kesesatan bersuara lantang, sehingga jarak antara umat saat ini dengan para generasi terbaik umatpun semakin menganga lebar. Ajaran mereka semakin dicampakkan, bahkan mereka terkadang dihujat dan dicerca. Inilah zaman manusia banyak yang menjadi buta mata hatinya. Mereka tidak dapat lagi membedakan antara yang benar dan salah, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, ketaatan dan maksiat. Kebenaran diklaim sebagai kesesatan sedang kesesatan dibela mati-matian. Itulah salah satu fitnah yang terjadi pada saat ini, semua kelompok mengaku sebagai ahli sunah. Sehingga pemahaman mereka tentang ketidak puasan terhadap sesuatu semakin menjadi.

Gerakan salafiyah masuk ke Indonesia mempunyai bermacam-macam versi. Versi pertama yang paling asli adalah gerakan Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang dibawa oleh ulama-ulama di Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Inilah salafiyah pertama di Indonesia, dikenal sebagai kaum Padri dan yang pertama kali membawanya adalah Tuanku Imam Bonjol. Di era modern, paham Salafiyah masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, antara lain melalui: buku-buku, media, proses pendidikan, kerja sama kelembagaan, dan jalur gerakan salafiyah.

Jalur pendidikan yang merupakan salah satu jalur yang paling banyak masuknya salafiyah yaitu berupa lembaga pendidikan Islam yang didirikan di Indonesia atau dengan mengirim pemuda-pemuda Indonesia untuk belajar di pusat-pusat pendidikan Islam di Timur Tengah. Jalur pendidikan melalui lembaga pendidikan saat ini yang dianggap sesuai oleh aktivis salafi adalah melalui pondok pesantren. Jumlah pesantren dalam sepuluh tahun terakhir ini meningkat hampir 100 persen dari 14.656 pesantren pada 2003-2004 menjadi 29.535 pesantren pada 2013-2014.Perkembangan yang terjadi tersebut bukan saja dari sisi jumlah, tetapi juga dalam banyak aspek seperti: organisasi kelembagaan, kualitas program pendidikan, jaringan, dan kewirausahaan.

Berbagai keunikan inilah yang menyebabkan berbagai pihak, aktivis, dan gerakan keislaman tertarik menggunakan jalur pendidikan pesantren ini sebagai salah satu wadah atau jalur pergerakan dan kaderisasi, termasuk gerakan salafi. Adanya keragaman jalur, keragaman pihak-pihak yang mengemban amanat gerakan salafiyah, keragaman lembaga-lembaga dan kebijakan mereka, akhirnya memunculkan keragaman wajah salafiyah di Indonesia. Pemahaman Salafiyah terhadap Pemilu Berdasarkan informasi dari https://wahdah.or.id/gerakan-salafi-modern-di-indonesia, menjelaskan bahwa pandangan kelompok Salafiyah terhadap Pemilu adalah sebagai gerakan bid'ah (penyimpangan) diantaranya

dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemilu adalah sebuah upaya menyekutukan Allah (syirik) karena menetapkan aturan berdasarkan suara terbanyak (rakyat) sedangkan pemahaman mereka bahwa yang berhak menetapkan aturan hanyalah Allah SWT. Hal ini karena pemahaman Kelompok Salafiyah sesuai dengan beberapa ayat Al-Qur'an berbunyi sebagai berikut:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

b. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. [Al-An'am/6 : 57]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. [Al-Maidah/5 : 44]

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak dizinkan Allah
[As-Syura/42 : 21]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.[An-Nisa/4 : 65]

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

Dan dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutuNya dalam menetapkan keputusan.[Al-Kahfi/18 : 26]

c. Pada proses Pemilu, bahwa apa yang disepakati suara terbanyak itulah yang dianggap sah (sebagai pemenang), meskipun bertentangan dengan agama atau aturan Allah dan Rasulnya.

d. Pemilu adalah tuduhan secara tidak langsung kepada Islam bahwa ia tidak mampu menciptakan masyarakat yang adil sehingga membutuhkan sistem lain (Pemilu) untuk menciptakan masyarakat yang adil.

e. Partai-partai Islam tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti aturan yang ada, meskipun aturan itu bertentangan dengan Islam.

f. Dalam Pemilu terdapat prinsip menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan-tujuan politis, dan sangat sedikit yang selamat dari itu.

g. Pemilu berpotensi besar menanamkan fanatisme jahiliah terhadap partai-

partai yang ada.

Sejak dimulainya Sistem Demokrasi di Indonesia (Tahun 2004) sampai dengan Pemilu Terakhir (Pileg dan Pilpres Tahun 2019), masyarakat di Desa Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu tidak pernah ikut berpartisipasi dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan nama Dusun Karang Makmur dan memiliki Pondok Pesantren yang bernama Dhiya' Aussalaf dengan jumlah jiwa sebanyak kurang lebih 800 KK dimana pada awal mulanya dulu hanya ada 1 (satu) keluarga yang berasal dari Jawa yang membuat usaha batu bata. Kemudian, mengajak teman-temannya untuk pindah ke Desa karang Agung sehingga sampai dengan jumlah sekarang yang menjadikan Desa tersebut sebagai penganut aliran Salafiyah yang cukup besar.

Upaya Persuasif Pemerintah Setempat

Menyikapi masalah golput yang tidak berkesudahan di desa tersebut, segala upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yaitu dengan mencoba membuat banyak TPS (sebanyak 17 TPS) demi meningkatkan Partisipasi Masyarakat di desa tersebut namun hasilnya Nihil. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim bahwa pada Pemilu Tahun 2019 Ada beberapa TPS yang dibuat oleh KPU Kabupaten Muara Enim dengan rincian sebagai berikut:
TPS 1 yang berlokasi dekat dengan pondok pesantren, dimana 80 % warga dari Pondok Pesantren Dhiya' Ussalaf yang didaftarkan dalam DPT di TPS tersebut tidak ada yang menggunakan hak pilihnya. Kemudian TPS 2, TPS 4 sampai dengan TPS 17 dimana warga Pondok Pesantren Dhiya'ussalaf disebar sebanyak 30 orang per TPS namun tetap tidak ada juga pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang berasal dari Pondok Pesantren Dhiya'Aussalaf.

Berdasarkan hasil pendekatan yang bersifat persuasif dengan metode wawancara yang dilakukan beberapa kali dengan memberikan informasi pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam menyukseskan Pemilu dan memilih Pemimpin yang tepat demi terciptanya Pembangunan Negara antara Pemerintah Setempat (Perwakilan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Camat Lubai, dan Kepala Desa Karang Agung) bersama Kesbangpol Kabupaten Muara Enim dengan Ustadz Muhammad Al Bukhori (Pimpinan Ponpes Dhiya'Ausalaf), beliau memberikan pernyataan bahwa :

1. Apabila Hak memilih itu diubah menjadi kewajiban, dalam artian akan menjadi dosa apabila tidak memilih barulah mereka akan memilih;

2. Apabila Sistem Demokrasi bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan (pemahaman ideologi kelompok salafiyah);

3. Sampai dengan saat ini mereka tetap memegang teguh terhadap pendirian mereka (kelompok Salafiyah) sesuai dengan ajaran Salaf yang memandang bahwa Pemilu lebih banyak mendatangkan bid'ah.

Kesimpulan dan Saran

Sejalan dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka yang menjadi point penting permasalahan adalah kekhawatiran akan berkembang lebih luas tentang pemahaman tersebut, meskipun eksistensi golput tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan, namun kekuatan golput ini seakan membangun delegitimasi politik demokrasi. Golput merupakan fenomena alamiah, ia tidak terorganisasi, namun berangkat dari hati nurani masing-masing pemilih. Menjadi sebuah ancaman demokrasi, jika golput telah menjadi 'ideologi' bagi kelompok masyarakat pesantren Dhiya'Ussalaf dan dikhawatirkan akan terus berkembang. Bila masyarakat mulai menganggap politik sebagai sesuatu yang bid'ah (penyimpangan) "buruk", sehingga mereka lebih memilih golput, maka keruntuhan demokrasi secara substantif sudah tidak bisa terelakkan lagi. Oleh karena itu KPU Provinsi Sumatera Selatan dibantu oleh KPU Kabupaten Muara Enim beserta PPK di Kecamatan Lubai untuk membuat suatu strategi agar dimungkinkan terjadinya perubahan pada Pemahaman dan berharap agar Kelompok Salafiyah di Pondok Pesantren Dhiya' Ussalaf dapat membuka diri dan menghilangkan pola eksklusifisme pondok pesantren Dhiya'ussalaf dengan lingkungan.

Dari sisi sosialisasi pada Pemilu 2019 tingkat Partisipasi Masyarakat secara nasional adalah sementara untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri mencapai angka 83,94 %. Dan Kabupaten Muara Enim adalah 85,87 % sebuah capaian yang tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya. Terlepas dari berbagai sudut pandang institusi yang dapat mengklaim hasil tersebut adalah jerih payah mereka. Penulis melihat ada hal yang harus menjadi perhatian kita semua sebagai bagian dari sebuah pelaksanaan pemilu. Ternyata dari 19% masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya telah muncul kelompok-kelompok yang tidak menggunakan hak pilih dikarenakan dasar "ajaran agama". Jika kita melihat dari kelompok Salafiah di pondok pesantren di desa Kab. Muara Enim yang jumlah nya hanya 3,70 % dari jumlah DPT Kabupaten Muara Enim, tentu ini bukanlah sebuah permasalahan yang penting untuk dibahas. Namun penulis berpendapat paham atau aliran agama yang menyimpulkan bahwa Pemilu adalah sebuah kegiatan yang salah menurut ajaran agama akan terus berkembang dan

bertambah jumlahnya seiring dengan bertambahnya jumlah anggota organisasi tersebut dan muncul atau betambahnya aliran sejenis di Indonesia. Sementara disisi lain, kita sebagai penyelenggara Pemilu senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Pemilu adalah sebagai sarana peralihan kekuasaan yang sah dan di atur dalam UUD 1945. Dari sisi inilah penulis melihat bahwa KPU perlu memerhatikan kelompok–kelompok masyarakat seperti ini untuk dijadikan salah satu sasaran objek sosialisasi dan kegiatan pendidikan pemilih oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Bahkan untuk kelompok-kelompok seperti ini sosialisasi yang bersifat insidentil (menjelang tahapan Pemilu) tidak akan cukup untuk merubah pola pikir kelompok ini terhadap pemilu.

Berdasarkan uraian diatas menyikapi kekhawatiran akan pemahaman tentang "anti pemilu" yang terus berkembang, dapat disimpulkan bahwa tantangan KPU dalam memikirkan strategi sosialisasi kepada Kelompok Salafiyah dirasakan perlu dimulai dari sekarang. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh KPU dan jajarannya dalam menghadapi kelompok masyarakat seperti ini:

1. Diperlukan pendataan terukur terhadap jumlah dan sebaran kelompok kelompok sejenis di Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait misalnya Kesbangpol, Polres dan Kodim setempat. Hal ini di perlukan karena dengan mengetahui jumlah dan sebarannya KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat membuat program dan menyesuaikan anggaran yang diusulkan.

2. Diperlukan kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau tokoh agama setempat. Keberadaannya dibutuhkan dalam rangka pembuatan materi yang akan di sampaikan dikarenakan KPU tentu memiliki kemampuan yang sangat terbatas apabila pengkajian pemilu dihubungkan dengan hukum agama. Ketegasan pernyataan organisasi seperti MUI terhadap keberadaaan pemilu di dalam Islam dibutuhkan untuk membendung upaya-upaya penyebaran pemahaman yang menyatakan bahwa pemilu di larang di dalam Islam. Disamping itu juga KPU perlu melibatkan para tokoh agama sebagai agent sosialisasi KPU terutama untuk kelompok-kelompok seperti ini. Paling peran KPU adalah menambahkan pengetahuan Pemilu kepada para tokoh agama ini seperti dengan mengadakan bimbingan teknis tentang pemilu.

3. Memaksimalkan potensi Rumah Pintar Pemilu dan sarana penunjang didalamnya untuk menjadikan mereka sebagai objek sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan sharing kegiatan sekolah demokrasi atau kegiatan lain dengan KPU Kabupaten Muara Enim.

jdih.kpu.go.id

Sekolah demokrasi akan di bentuk dengan melibatkan santri-santri pondok pesantren tersebut. Kelas ini dapat di bentuk dengan membaurkan siswa SMA/SMK setempat dengan para santri Pondok Pesantren tersebut. Penulis tahu bahwa kegiatan ini pasti akan mendapat penolakan yang keras dari pihak Pondok Pesantren. Namun dengan pola pendekatan persuasif yang terus menerus dilakukan suatu hari pasti strategi ini dapat terwujud.

4. Pengalaman pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa mereka dapat menerima sosialisasi yang dilakukan pada saat Pemilu 2019. Padahal selama ini terjadi penolakan apabila penyelenggara pemilu akan melakukan sosialisasi di tempat itu. Kenapa di terima? karena ketua tim sosialisasi KPU Provinsi Sumatera Selatan adalah ketua Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa (IKA LKS) Sumatera Selatan adalah pernah tergabung dalam kelompok salafiah ini di Palembang. Sehingga beliau diberi kesempatan oleh pengurus pondok untuk memberikan materi seputar Pemilu pada ba'da Asyar di masjid Pondok Pesantren tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kelompok ini masih memiliki potensi menerima masukan dari pihak luar asalkan pihak luar tersebut dapat mereka yakini bagian dari mereka. Walaupun pada Pemilu 2019 kita belum dapat mengubah pemikiran mereka untuk memilih, namun paling tidak ada harapan yang dapat kita manfaatkan untuk masa yang akan datang.

5. KPU Muara Enim dapat menggunakan relawan demokrasi yang melakukan sosialisasi sesuai dengan kelompok atau basis relawan itu sendiri. Di Provinsi Sumatera Selatan dari hasil persiapan, proses pelaksanaan, pemantauan, dan monitoring serta laporan relawan demokrasi yang bertugas di 17 Kabupaten/ Kota , 236 Kecamatan, 3238 Desa/Kelurahan dalam 11 basis pemilih, 933 orang tenaga relawan demokrasi melakukan tugas sesuai dengan arahan KPU RI. Relawan Demokrasi ini masuk sampai ke sendi kehidupan masyarakat dalam menyampaikan ajakan dan informasi penting mengenai penyelenggaraan Pemilu sehingga daripadanya angka partisipasi pemilih dapat terdongkrak dengan signifikan. Basis-basis relawan akan menyasar mereka setiap hari pada periode tertentu dengan demikian diharapkan terjadi perubahan pola pikir mereka secara bertahap.

6. Menambahkan dan mempertegas point pada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Pasal 308 yang menyatakan bahwa memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menjerat siapapun yang mengajak orang lain untuk "golput" agar tidak hanya memberikan punishment kepada yang mengajak golput, tetapi juga memberlakukan kepada publik yang memilih golput.

7. Peran pemerintah daerah yaitu, kepala daerah,TNI, Polri, camat, kepala desa dan perangkatnya akan sangat berpengaruh apabila strategi ini dilakukan dengan semangat dan kesadaran saling mendukung satu sama lain.

Saran

Penulis berharap ada ide-ide strategis lain yang muncul dimasa yang akan datang untuk mengatasi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pemikiran yang ekstrim terhadap pemilu. Harapan penulis tulisan ini dapat membangkitkan kesadaran kita bahwa dibalik upaya keras kita melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ternyata masih ada sekelompok kecil masyarakat yang menganggap bahwa Pemilu adalah perbuatan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Selatan

Daftar Pustaka

Alami, Athiqah Nur. (2013). "Menakar Kekuatan Media Sosial Menjelang Pemilu 2014". Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 10, No. 1, hal. 85- 100. Jakarta: LIPI.
Mulyadi, Mohammad. (2018). Falsifikasi Demokrasi, Berpikir Ulang Demokrasi. Jakarta: Obor

al-Furaih, A. 2016. Amalan Sunnah Sehari-hari Rasulullah.Jakarta: Istanbul.
Fauzi. 2016. Fenomena Teologis pada Masyarakat Modern. Jakarta: Kencana.
Jum'ah, Ali. 2013.Menjawab Dakwah Kaun Salafi, Terj. Abdul Ghafur. Jakarta: Khatulistiwa Press.
Muhammadin, 2017. Disertasi Gerakan Salafiyah di Pondok Pesantren Dhiyaa'Usalaf.

Satori Ismail, Achmad, 2017. Golput Halal Golput Haram Dalam Memilih Pemimpin.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum
https://wahdah.or.id/gerakan-salafi-modern-di-indonesia, diakses tanggal 11 Oktober 2019.

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-9-I-P3DI-Mei-2019-192.pdf, Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu Tahun 2019, diakses tanggal 22 Oktober 2019.

"Golput, Hak atau Tindak Pidana?",https://www.kompasiana.com/myraiva/golput-hak-atau-tindakpidana, diakses 22 Oktober 2019

Kegiatan Sosialisasi Kepemiluan yang dilakukan Oleh Relawan Demokrasi kepada Masyarakat

Salah Satu Kegiatan KPU untuk mengedukasi masyarakat tentang Pemilu Melalui Kegiatan Kursus Kepemiluan

Kepri: *From Zero To Hero*

Oleh Parlindungan Sihombing
Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau

Abstrak

Provinsi Kepulauan Riau mencatat surprise pada Pemilu Serentak 2019. Bukan saja angka partisipasi pemilih yang jauh melampaui target nasional, tetapi yang paling mencengangkan adalah lonjakan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 24,85% dibanding Pilpres 2014, atau 15,96% dibanding Pemilu Legislatif 2014. Dari provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih terendah nasional, menjadi "sepuluh besar" tingkat partisipasi terbaik nasional Pemilu Serentak 2019.

Ada banyak faktor yang bisa diduga berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Kepulauan Riau. Tulisan ini tidak bermaksud membahasnya satu persatu. Penulis hanya ingin memperlihatkan kepada publik, seperti apa "hiruk-pikuk" dan strategi sosialisasi serta pendidikan pemilih yang ada di balik kisah sukses lonjakan partisipasi pemilih tersebut.

Peningkatan Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih di Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilu Serentak 2019 tercatat 83,41% (Pilpres = 83,85%, Pemilu DPR = 82,96). Angka ini menempatkan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam kelompok sepuluh provinsi dengan tingkat partisipasi terbaik nasional pada Pemilu 2019

Di sisi lain, dengan angka partisipasi pemilih sebesar 83,41%, berhasil menobatkan Provinsi Kepulauan Riau pada posisi pertama dilihat dari peningkatan partisipasi pemilih Pemilu 2019 dibanding Pemilu 2014. Tingkat partisipasi pemilih Provinsi Kepri pada Pilpres 2014 hanya 59% dan menempatkan Kepri menjadi provinsi dengan tingkat partisipsi terendah nasional kala itu. Sedangkan Pileg 2014, dengan tingkat partisipasi pemilih hanya 67%, Kepri menempati posisi terendah kedua nasional setelah DKI Jakarta.

Dengan titik tolak seperti itu, Kepri mencatat lonjakan partisipasi pemilih tertinggi nasional (33 provinsi, minus Kalimantan Utara) untuk Pilpres pada Pemilu 2019, yakni kenaikan sebesar 24,85%, dan mencatat kenaikan partisipasi pemilih tertinggi kedua nasional untuk Pemilu DPR, yakni kenaikan sebesar 15,96%.

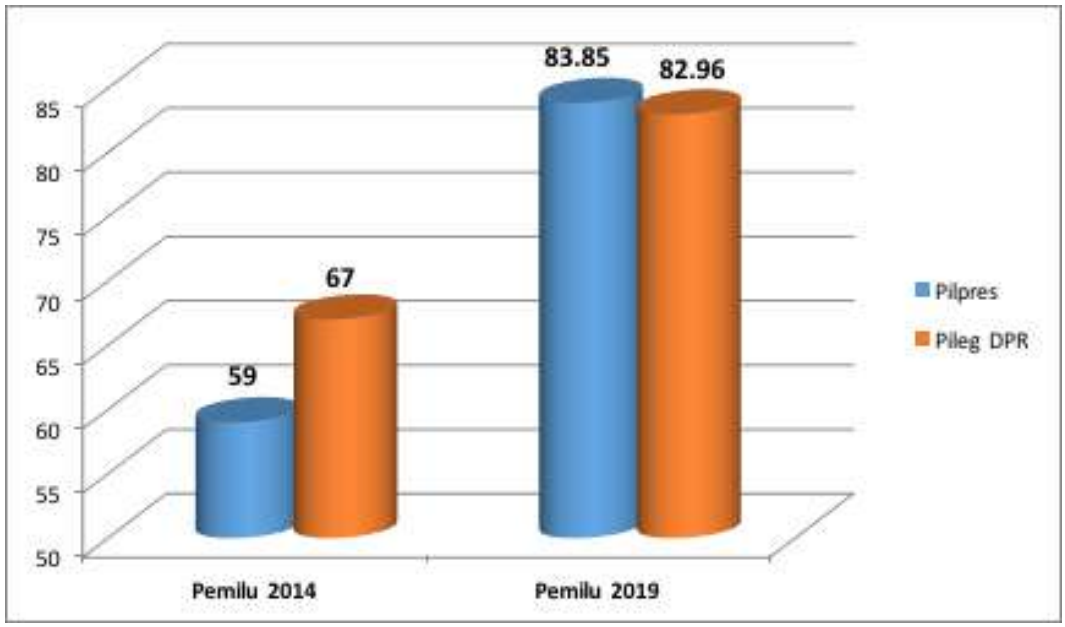

Pada Pemilu Serentak 2019, semua provinsi mengalami kenaikan tingkat partisipasi pemilih. Tidak tercatat satupun provinsi yang mengalami penurunan. Tetapi beberapa provinsi hanya mengalami kenaikan tingkat partisipasi kecil dan tidak signifikan. Sementara beberapa provinsi lainnya mengalami kenaikan cukup fantastis, dan Provinsi Kepri mencatat lonjakan tertinggi tingkat partisipasi pemilih dibanding Pemilu 2014 dari 33 Provinsi.

Di balik lonjakan partisipasi pemilih yang sangat tinggi, tulisan ini ingin memperlihatkan pilihan-pilihan strategi dan prioritas sosialisasi serta pendidikan pemilih yang dilakukan dalam Pemilu 2019 di Provinsi Kepulauan Riau.

Seperti diketahui, secara umum, semua provinsi melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu 2019 mengikuti arahan, kebijakan, dan anggaran yang sudah didesain dan ditetapkan oleh KPU RI. Namun dalam pelaksanaannya, selain intensitas yang mungkin berbeda, tetap ada ruang bagi KPU daerah untuk melakukan inovasi strategi dan pemilihan prioritas segmen sasaran dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dalam rangka pencapaian target-target partisipasi pemilih.

Beberapa model strategi sosialisasi, pemilihan segmen dan prioritas sosialisasi di provinsi Kepulauan Riau yang penting digaris bawahi:

Pemetaan Prioritas Wilayah

Daerah berpenduduk besar dengan tingkat partisipasi rendah, merupakan daerah prioritas utama sosialisasi Pemilu. Atas dasar itu, KPU Provinsi Kepri memilih Kota Batam sebagai daerah prioritas sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu 2019. Kota Batam adalah satu dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk terbesar. Bahkan, lebih dari setengah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berada di Batam. Sementara, dari pemilu ke pemilu, dan dari pilkada ke pilkada, Kota Batam menjadi daerah dengan tingkat partisipasi pemilih paling rendah. Bukan saja di tingkat provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga secara nasional. Tiga kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berturut-turut, partisipasi pemilih di Kota Batam tidak pernah menembus angka 50%. Selalu di bawah 50%, yakni tahun 2006 (45,54%), tahun 2011 (44,61%), tahun 2015 (48,5%). Bahkan tahun 2015, Kota Batam tercatat menjadi daerah dengan tingkat partisipasi pemilih terendah kedua secara nasional setelah Kota Medan.

Rendahnya partisipasi pemilih di Batam dengan sendirinya membuat partisipasi pemilih secara keseluruhan di Provinsi Kepulauan Riau menjadi tertekan, karena seperti disebutkan lebih dari 50% penduduk Provinsi Kepulauan Riau ada

di Batam. Dengan demikian, memperbaiki partisipasi pemilih di Batam secara linear pasti juga memengaruhi hasil akhir partisipasi pemilih di Provinsi Kepulauan Riau. Karena itulah, sekitar 50% kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan KPU Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilu 2019, diarahkan ke Kota Batam sebagai daerah prioritas sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Strategi Sosialisasi Medsos yang Efektif

Semua daerah pasti memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi pemilu. Tetapi hanya dengan pilihan metode dan strategi yang tepat, sosialisasi pemilu lewat media sosial bisa efektif dan efisien. Banyak sosialisasi medsos tidak dilakukan dengan strategi dan tehnik internet marketing yang benar, terarah, apalagi terukur. Hanya berjalan secara alamiah. Padahal, kunci keberhasilan sosialisasi lewat media sosial justru terletak pada pilihan tehnik dan strategi yang tepat.

Meluncurkan konten-konten sosialisasi pemilu lewat media sosial secara alamiah, sama dengan membuang garam ke laut. Kenapa? Karena konten sosialisasi itu sejatinya seperti menjual barang yang tidak laku. Tidak diminati. Jangan berharap ada konten sosialisasi pemilu yang bisa viral dengan sendirinya. Secara alamiah, dia hanya diminati oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan langsung. Dan kelompok ini bukan sasaran sosialisasi yang penting. Karena tanpa sosialisasi pun, mereka sudah tertarik dengan politik dan pemilu. Kelompok target sosialisasi dan pendidikan pemilih (dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih) sesungguhnya justru adalah kelompok masyarakat yang tidak atau belum berminat terhadap masalah-masalah politik dan pemilu.

Sosialisasi pemilu lewat media sosial, dengan demikian, harus dilakukan dengan strategi yang dapat memastikan bahwa pesan-pesan sosialisasi sampai kepada kelompok target secara agresif. Pilihan teknik konten yang tepat, memastikan bahwa setiap konten yang diluncurkan akan dibaca (atau terbaca), dilihat (atau terlihat) oleh kelompok target.

KPU Kepri mendesain sebuah strategi media sosial berdaya jangkau luas, cepat, terukur, dan murah. Menggunakan grup WA, kerja sosialisasi ini memanfaatkan jaringan pemerintahan tingkat bawah.

Metode kerjanya, dimulai dengan membangun list-building, yakni data base lurah-lurah sebagai kanal induk. Untuk mendapatkan nomor WA, KPU Kepri melakukan sosialisasi tatap muka dengan seluruh lurah se Kota Batam. Pertemuan itu menghadirkan Wali kota yang memberikan arahan agar semua Lurah membantu KPU dalam kerja sosialisasi. Juga disampaikan rencana pembentukan grup WA

untuk sosialisasi, dan para Lurah diminta meneruskan setiap konten sosialisasi dari KPU kepada ketua-ketua RW, dan ketua-ketua RW meneruskan kepada ketua-ketua RT, seterusnya ketua-ketua RT men-share kepada warganya masing-masing melalui grup warga di tingkat RT.

Untungnya, semua lurah se Kota Batam sudah memiliki grup WA beranggotakan ketua-ketua RW, yang selama ini memang sudah digunakan sebagai wadah komunikasi oleh lurah kepada RW-RW nya. Begitu juga semua ketua RW memiliki grup WA beranggotakan ketua-ketua RT. Dan semua ketua RT memiliki grup WA beranggotakan warga di lingkungan RT-nya masing-masing.

Dengan jaringan grup WA seperti ini, hanya dalam satu kali klik, sebuah konten sosialisasi pemilu dari KPU bisa meluncur bagaikan aliran air dari pipa induk menuju pipa-pipa distribusi dan masuk langsung ke rumah-rumah warga. Karena, hampir seluruh warga menjadi anggota grup WA di lingkungan perumahan dan RT-nya masing-masing.

Pola yang sama juga dilakukan untuk menjangkau masyarakat melalui basis peserta pemilu. KPU Kepri membentuk dua grup WA, masing-masing grup WA Parpol dan grup WA DPD. Pengurus partai dan LO DPD diminta meneruskan semua konten sosialisasi kepada grup WA di internal partai dan Tim DPD, dan selanjutnya secara berantai meneruskan kepada grup-grup WA lainnya dimana mereka menjadi anggotanya.

Menumbuhkan "Kompetisi," Meningkatkan Partisipasi

Selain metode sosialisasi tatap muka dengan segmen-segmen konvensional dan strategi sosialisasi pemilu yang agresif melalui media sosial, stategi sosialisasi yang dilakukan KPU Kepri di Batam dalam rangka mendongkrak partisipasi pemilih adalah dengan menumbuhkan semangat kompetisi antar kelompok warga. Salah satunya adalah dengan menumbuhkan semangat kompetisi antar RT, antar RW, antar Lurah, dan antar Camat sebagai agen sosialisasi pemilu yang aktif berlomba-lomba mendorong dan menggerakkan partisipasi pemilih di wilayahnya masing-masing.

Agar strategi ini berjalan efektif, KPU Provinsi Kepri menyebarluaskan informasi adanya pemberian penghargaan dalam bentuk Piala Demokrasi di tambah dengan hadiah uang tunai untuk 4 kategori pemenang partisipasi pemilih terbaik Pemilu 2019, yakni:

- Piala Demokrasi + uang tunai (tentatif Rp50 juta) untuk Kecamatan yang berhasil meraih tingkat partisipasi pemilih terbaik Pemilu 2019;

jdih.kpu.go.id

- Piala demokrasi + uang tunai (tentatif Rp50 juta) untuk Kelurahan yang berhasil meraih tingkat partisipasi pemilih terbaik Pemilu 2019;

- Piala demokrasi + uang tunai (tentatif Rp50 juta) untuk RW yang berhasil meraih tingkat partisipasi pemilih terbaik Pemilu 2019;

- Piala demokrasi + uang tunai (tentatif Rp50 juta) untuk RT yang berhasil meraih tingkat partisipasi pemilih terbaik Pemilu 2019.

Strategi "KOMPETISI" ini ternyata disambut antusias oleh para Camat, Lurah, Ketua RW, dan Ketua RT. Dengan harapan bisa terpilih menjadi kecamatan terbaik dan memperoleh hadiah uang tunai dengan nilai cukup besar, masing-masing camat dengan penuh semangat memerintahkan lurah-lurah di wilayah kecamatannya agar aktif mendorong partisipasi pemilih di kelurahan masing-masing. Para lurah juga, ramai-ramai meminta Ketua-Ketua RW untuk mendorong partisipasi pemilih, karena hanya dengan tingkat partisipasi yang tinggi di tingkat RW-RW, satu kelurahan bisa memenangkan kompetisi. Demikian seterusnya, Ketua-Ketua RW memotivasi RT-RT, dan Ketua-Ketua RT berlomba-lomba menggalang partisipasi pemilih warganya, karena termotivasi oleh adanya program pemberian penghargaan dengan hadiah uang tunai bernilai besar jika berhasil menjadi RT dengan tingkat partisipasi pemilih terbaik. Banyak ketua-ketua RT bahkan dengan antusias mendatangi satu per satu warganya, dan meminta semua warga menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan, Rabu, tanggal 17 April 2019.

Membangun Mitra Strategis

Dihitung secara kuantitatif, frekuensi kegiatan sosialisasi Pemilu 2019, lebih banyak justru dilakukan oleh stakeholder lainnya di luar pendanaan dan inisiasi KPU. Dengan menyisipkan tema-tema sosialisasi pemilu, forum-forum warga dan mitra strategis mengundang KPU Kepri sebagai narasumber dalam berbagai bentuk kegiatan.

Sejak awal KPU Kepri menyampaikan bahwa pesta demokrasi Pemilu 2019 adalah pesta rakyat. Dan tanggung jawab menyukseskannya adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Rendahnya partisipasi pemilih di Kepri dari pemilu ke pemilu adalah tugas bersama semua masyarakat Kepri. Melalui forum koordinasi pemilu, KPU Kepri mendorong berbagai pihak untuk terlibat melakukan kerja-kerja sosialisasi pemilu. Berbagai kegiatan-kegiatan instansi dan forum warga menjadi momen yang penting untuk menyisipkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

jdih.kpu.go.id

Beberapa stake holder penting yang banyak melakukan sosialisasi pemilu antara lain Kepolisian Daerah, Organisasi Mahasiswa, Universitas, Partai Politik, LSM dan Ormas, Dinas Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan lembaga pers. Berikut beberapa stakeholder mitra strategis KPU dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi.

Dari lembaga/instansi pemerintah, stakeholder utama yang paling gencar melakukan sosialisasi Pemilu 2019 adalah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Kesbangpol Provinsi Kepri, Kementerian Pertahanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil, Bawaslu Provinsi Kepri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan Komite Intelijen Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dari organisasi mahasiswa/universitas beberapa mitra strategis seperti GAN-Kepri, Lembaga Studi Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kepulauan Riau, STAIN Sultan Abdurrahman, DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kota Batam, Universitas Internasional Batam (UIB), Pramuka Kwartir Daerah Kepri 2018, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Batam, Kesatuan Suara Mahasiswa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Kepri, Universitas Riau Kepulauan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia TPI-Bintan, Pusat Study Antar Kawasan Provinsi Kepri.

Dari kelompok organisasi kemasyarakatan terdapat Rumah Konstitusi Indonesia, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Batam, Gerakan Pemuda Daerah, Kesatuan Nelayan Tradisional, Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro 1957, Komunitas Merah Putih Provinsi Kepulauan Riau, Lembaga Lingkungan Hidup Hijau.

Dari Partai Politik beberapa kegiatan sosialisasi pemilu dilakukan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar, DPD PDIP, DPD Partai Gerindra, DPD Partai Demokrat, DPW Partai Nasdem, dan DPW Partai Amanat Nasional, Dan dari kelompok jurnalis dan media massa kegiatan sosialisasi terbanyak dilakukan oleh RRI Tanjungpinang, Aliansi Jurnalis Independen Kota Tanjungpinang, Batam FM, Pos Metro, Batam Televisi, Mappilu PWI Kepri, dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Prioritas Segmen

Umumnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepri menyasar kelompok-kelompok masyarakat terseleksi yang tidak sekedar menerima materi

jdih.kpu.go.id

sosialisasi untuk dirinya sendiri, tetapi sekaligus dapat menjadi "Agen" untuk meneruskan sosialisasi kepada kelompok dan lingkungannya. Berikut beberapa segmen sosialisasi yang penting dan pilihan peserta yang sekaligus berperan sebagai agen untuk sosialisasi pemilu:

NO	Sasaran Akhir Sosialisasi	Peserta/ Agen sosialisasi	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1.	Warga komplek perumahan/ pemukiman tingkat RT (segmen berdasarkan wilayah RT)	Camat, Lurah, Kepala Desa, LPM, PPS	Sosialisasi tatap muka membahas strategi peningkatkan partisipasi pemilih di tingkat kecamatan, kelurahan/ desa, RW, dan tingkat RT pada Pemilu 2019	Mendorong peran strategis camat, lurah/ kepala desa, PPS, LPM, RW, dan RT untuk menjadi agen dan motor penggerak partisipasi pemilih di lingkungannya masing-masing melalui kompetisi RT, RW, Lurah, dan Camat peraih partisipasi tertinggi Pemilu 2019.
2.	Kelompok buruh/pekerja/ industri	Aktivis buruh/ pekerja (terseleksi)	Sosialisasi tatap muka membahas peran serta aktivis buruh dalam mendorong partisipasi pemilih di lingkungan perusahaan/ industri	Program khusus untuk Kota Batam bekerja sama dengan serikat-serikat buruh/ pekerja di berbagai kawasan Industri

jdih.kpu.go.id

NO	Sasaran Akhir Sosialisasi	Peserta/ Agen sosialisasi	Bentuk Kegiatan	Keterangan
3.	Perempuan	Tokoh dan Aktivis perempuan (terseleksi)	Sosialisasi tatap muka membahas peran serta tokoh dan aktivis perempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih	Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, BKOW, BKMT, Organisasi perempuan NU, dan Organisasi perempuan Muhamaddiyah
4.	Mahasiswa/ pelajar	Aktivis Mahasiswa/ pelajar	Sosialisasi tatap muka membahas peran strategis aktivis mahasiswa/ pelajar dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda dan pemilih pemula	Kegiatan melibatkan
5.	Masyarakat umum (lintas segmen, lintas wilayah)	Wartawan/ Jurnalis	Sosialisasi tatap muka membahas peran strategis pers dan media massa dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Provinsi Kepri	Dihadiri para aktivis pers, pemerhati pemilu, serta masyarakat umum

NO	Sasaran Akhir Sosialisasi	Peserta/ Agen sosialisasi	Bentuk Kegiatan	Keterangan
6.	Masyarakat umum tingkat kelurahan	PPS se Batam	Sosialisasi tatap muka membahas peran PPS dalam menggalang partisipasi pemilih di wilayah kelurahan masing-masing	PPS adalah bagian dari penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang paling memahami kondisi di masyarakat.
7.	Masyarakat Anggota Ormas, Paguyuban, dan LSM	Aktivis ormas, LSM, dan paguyuban	Sosialisasi tatap muka membahas peran strategis aktivis Ormas, LSM, dan paguyuban dalam meningkatkan partisipasi pemilih khususnya di lingkungan organisasi masing-masing	Aktivis LSM, Ormas, dan Paguyuban menjadi agen sosialisasi pemilu untuk anggota organisasi masing-masing
8.	Kelompok Disabilitas	Aktivis dan anggota kelompok disabilitas	Sosialisasi tatap muka membahas peran organisasi disabilitas dalam meningkatkan partisipasi pemilih khususnya di lingkungan disabilitas	Kegiatan ini dilakukan di Batam dan Tanjungpinang

jdih.kpu.go.id

Intensitas Sosialisasi

KPU Kepri melakukan kegiatan sosialisasi secara agresif dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.
Secara garis besarnya adalah:

a. Program Sosialisasi melalui tatap muka.
   Sosialisasi tatap muka masih merupakan salah satu metode sosialisasi yang penting dalam Pemilu 2019. KPU Kepri melakukan sedikitnya 30 kegiatan sosialisasi tatap muka yang diinisiasi dan didanai sendiri, ditambah dengan sekitar 50-an kegiatan sosialisasi memanfaatkan kerjasama dengan pihak ketiga (KPU sebagai narasumber/pemateri).

b. Program Sosialisasi melalui media
   Sosialisasi melalui media dilakukan dalam beberapa kegiatan talkshow dan dialog interaktif baik di radio maupun di televisi. Untuk radio, KPU Kepri mendapat jadwal talkshow rutin membahas berbagai tahapan Pemilu di RRI Tanjungpinang yang diberi nama "Rabu Pemilu". Seluruh komisioner, sekretaris, kepala bagian dan sub-bagian mendapat giliran mengisi acara interaktif ini.

c. Sosialisasi melalui iklan
   Sosialisasi melalui iklan di media massa dilakukan untuk semua tahapan pemilu yang penting. Mulai dari sosialisasi "Pindah Memilih", sosialisasi "Himbauan 17 April 2019 (Jangan Golput)", sosialisasi "Jadwal Kampanye Rapat Umum", sosialisasi "Ayo Ke TPS 17 April 2019", sosialisasi "5 Surat Suara Pemilu 2019", dan sosialisasi "Tata Cara Mencoblos". Sesuai ketersediaan anggaran, sosialisasi jenis ini mencakup iklan di media massa cetak, radio, televisi, dan media online.

d. Sosialisasi melalui baliho dan standing banner
   Untuk menanamkan adanya hajatan besar pesta demokrasi Pemilu Serentak Rabu 17 April 2019 di benak masyarakat luas, KPU Kepri berupaya bagaimana agar setiap hari, setiap orang wajib "bertemu" dengan tulisan "Pemilu Serentak Rabu 17 April 2019." Selain penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial, sosialisasi melalui media luar ruang seperti baliho dan standing banner juga tidak kalah penting. KPU Kepri memasang banyak baliho pemilu di lokasi-lokasi strategis, dan menyebarkan standing banner di pintu-pintu mall, pelabuhan, instansi pemerintah, pertokoan, restoran, perbankan, kantor pos, kampus, rumah sakit, puskesmas, dan berbagai tempat-tempat keramaian lainnya. Dengan cara ini, "Pemilu Serentak Rabu 17 April 2019" diharapkan tertanam dan melekat dalam memory setiap

jdih.kpu.go.id

pemilih.

e. Sosialisasi melalui penyelenggaraan even khusus
KPU RI menyediakan anggaran cukup besar untuk penyelenggaraan berbagai even dalam rangka sosialisasi Pemilu 2019. KPU Kepri kemudian memanfaatkan even-even ini untuk memperkaya program sosialisasi pemilu melalui kegiatan mobilisasi massa skala besar. Mulai dari Nonton Bareng Debat Capres dan Cawapres, Lomba Mural Pemilu 2019, Nonton Bareng "Suara April", Pagelaran Seni Menyongsong Satu tahun Pemilu 2019, Pemilu Expo, Pembukaan Posko Pengecekan Daftar Pemilih, Jalan Sehat "Gerakan Melindungi Hak Pilih", Deklarasi Kampanye Damai, Festival Musik "Jingle Pemilu", dan Pemilu RUN "Searah Melangkah Bersama."

f. Sosialisasi massif melalui media sosial
Menghadapi Pemilu 2019, KPU Kepri membentuk Tim Medsos yang bertugas mendesain dan menyebarluaskan berbagai konten sosialisasi pemilu melalui media sosial. Baik media sosial resmi lembaga maupun media sosial personal milik staf dan seluruh jajaran KPU Kepri. Sosialisasi ini dilakukan melalui semua plat form media sosial yang ada seperti WA group, Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube.

Prestasi partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 tidak terjadi di ruang hampa. Ada banyak faktor yang diperkirakan berkontribusi. Salah satunya adalah massif dan efektifnya kegiatan sosialisasi, baik yang dilakukan secara nasional maupun spesifik masing-masing daerah. Baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun yang dilakukan oleh pemerintah, media massa, dan berbagai stakeholder lainnya.

Capaian partisipasi pemilih Pemilu 2019 di Provinsi Kepri, dari provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih terendah pertama nasional pada Pilpres 2014 dan terendah kedua nasional pada Pileg 2014, menjadi provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih "sepuluh besar" pada Pemilu 2019 (dan persentase kenaikan tertinggi secara nasional), layak menjadi kajian yang menarik.

Pilihan-pilihan strategi, segmen, prioritas wilayah, dan media sosialisasi yang tepat diperkirakan menjadi salah satu penentu keberhasilan sosialisasi pemilu di Provinsi Kepulauan Riau. Kombinasi antara pemanfaatan jaringan media sosial yang efektif, terarah, dan terukur dengan pilihan strategi cerdas mendorong partisipasi pemilih melalui "KOMPETISI" antar kelompok masyarakat layak diadopsi dan dikembangkan untuk memperkaya kerja-kerja sosialisasi pemilu dan pemilihan ke depan.

jdih.kpu.go.id

Strategi Memanfaatkan Jaringan Waralaba

Oleh Eka Satialaksmana
Anggota KPU Provinsi Banten

Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai even politik, kerap dihindari kalangan usaha untuk secara terbuka berpartisipasi. Meskipun, tidak sedikit pebisnis yang diam-diam menjadi partisan salah satu atau lebih dari satu kontestan Pemilu. Keengganan lembaga bisnis, terlebih swasta, untuk terlibat langsung dalam politik karena khawatir bisnisnya terkena imbas negatif.

Namun tidak demikian pada even Pemilu 2019 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten berhasil meyakinkan salah satu waralaba yang memiliki jaringan nasional untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu. Bahwa "produk" ini layak dipromosikan oleh toko Alfamart kepada pengunjungnya.

Pengalaman Pemilu 2019 membuktikan bahwa lembaga bisnis tidak seapatis yang kita bayangkan, ketika mereka berurusan dengan politik, terutama Pemilu. Respons antusias dan para pengelolanya memiliki pandangan yang sama dengan penyelenggara Pemilu, terkait usaha meningkatkan partisipasi pemilih, meski kami sempat rasakan kewaspadaan mereka ketika diajak kerja sama dalam program sosialisasi ini. Keinginan melibatkan jaringan waralaba dalam sosialisasi Pemilu dilandasi efektivitas bisnis waralaba minimarket dalam hal distribusi dan penjualan barang kebutuhan rumah tangga yang menjangkau segala kalangan. Model ini dirasa akan efektif pula jika digunakan sebagai media sosialisasi Pemilu melalui penyebaran bahan sosialisasi dan pemasangan alat peraga sosialisasi.

Dijadikannya toko Alfamart sebagai media sosialisasi guna melengkapi "serangan darat" berbagai lini metode sosialisasi penyelenggaraan Pemilu yang tentu sudah juga kami garap. Seperti melalui media massa, medsos resmi KPU Banten, siaran lembaga penyiaran radio dan televisi, koran, baliho, dan papan reklame. Serta sejumlah metode sosialisasi tatap muka, mulai cara door to door ke rumah warga, menempel alat peraga di warung bakso, warteg, dan warung nasi Padang, keluar masuk sekolah dan kampus, hingga pasar tradisional dan mal.

jdih.kpu.go.id

Metode Sosialisasi KPU Provinsi Banten

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaran Pemilu menentukan sasaran pelaksanaan Sosialisasi Pemilu. Meliputi 9 (sembilan) komponen, terdiri dari; pemilih basis keluarga; pemula; pemilih muda; pemilih perempuan; pemilih penyandang disabilitas; pemilih berkebutuhan khusus; kaum marjinal; komunitas; keagamaan; relawan demokrasi; dan warga internet (netizen), masyarakat umum; media massa; partai politik peserta pemilu; pengawas; Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri; organisasi kemasyarakatan; masyarakat adat; dan instansi pemerintah. Mengingat konsumen waralaba juga berasal dari semua kalangan yang ada dalam kategori basis sasaran, sosialisasi menggunakan jaringan waralaba ini diharapkan dapat menjangkau individu dalam kelompok basis sasaran sosialisasi tersebut untuk mendapatkan informasi Pemilu.

Diskusi internal di KPU Provinsi Banten, akhirnya menyepakati menggunakan jaringan waralaba sebagai media pelaksanaan metode sosialisasi Pemilu 2019 dan memilih Alfamart sebagai mitra sosialisasi. Jaringannya tersebar hampir 2000 toko di Provinsi Banten. Kenapa Alfamart? Karena kebetulan kami punya akses komunikasi melalui salah seorang personal dalam jajaran manajemen Alfamart. Tanpa proses terlalu lama, kami bersurat kepada PT Sumber Alfaria Trijaya selaku perusahaan pengelola waralaba Alfamart pada 3 Januari 2019, dan sehari kemudian kami diminta melakukan ekspose rencana kemitraan kerjasama sosialisasi antara KPU Banten. Kami juga sebelumnya melakukan tracking "silsilah' perusahaan pengelola Alfamart ini, tentang siapa saja pemegang saham maupun jajaran direksinya, untuk memastikan tidak ada yang terafiliasi dengan salah satu kontestan Pemilu atau tim pemenangannya. Setelah diyakini tak ada afiliasi, pada tanggal 4 Januari 2019, KPU Provinsi Banten bertandang ke Head Office Alfamart, Gedung Alfa Tower Alam Sutra, Tangerang Selatan, dan diterima oleh Budi Santoso selaku Regional Corporate Communication Manager PT Sumber Alfaria Trijaya.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaran Pemilu, pasal 9, mengatur metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilu dilakukan melalui: (a) forum warga; (b) komunikasi tatap muka; (c) media massa; (d) bahan sosialisasi; (e) alat peraga sosialisasi; (f) Mobilisasi Sosial; (g) pemanfaatan budaya populer; (h) pemanfaatan budaya lokal/tradisional; (i) laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; (j) papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; (k) media sosial; (l) media kreasi; dan/atau; (m) bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilu dengan baik.

jdih.kpu.go.id

Atas dasar ketentuan tersebut kami menyampaikan proposal kemitraan sosialisasi Pemilu 2019 dengan cakupan kerjasama meliputi metode penyebaran bahan sosialisasi, penempelan alat peraga sosialisasi, pemutaran jingle Pemilu 2019 di seluruh toko Alfamart yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, serta metode direct campign (sosialisasi langsung) oleh karyawan toko Alfamart kepada setiap konsumen yang datang ke toko. Dalam ekspose tersebut kami sudah menyiapkan seluruh materi yang akan menjadi bahan sosialisasi baik berbentuk poster, leaflet, spanduk, dalam beberapa desain dan ukuran. Juga jingle Pemilu 2019 produksi KPU Republik Indonesia. Dalam proposal, kemitraan ini kami sebut "Waralaba Peduli Pemilu", sebagai bagian dari program Sadar Pemilu yang dicanangkan KPU Republik Indonesia.

Penyampaian proposal kami direspons dengan antusiasme yang baik dari pihak Alfamart, seraya menyatakan kesiapan pihak Alfamart untuk menjadi mitra sosialisasi demi sukses penyelenggaraan Pemilu 2019. Serta tercapainya target partisipasi pemilih di Banten sebesar 80%, di atas target nasional sebesar 77,5%. Regional Corporate Communication Manager PT Sumber Alfaria Trijaya, Budi Santoso saat itu menyatakan bahwa sebagai lembaga bisnis Alfamart tidak akan bersikap apatis terhadap perhelatan Pemilu dan siap mendukung upaya-upaya sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Banten. Sinyalemen kesiapan Alfamart untuk andil dalam program kemitraan ini diperkuat dengan lebih spesifiknya pihak Alfamart mengajukan syarat dan ketentuan, baik terkait materi bahan dan alat peraga sosialisasi maupun hal pembiayaan yang akan timbul jika kemitraan ini disepakati.

Pucuk dicinta ulam tiba. Selang satu bulan dari ekspose kami, tim Alfamart dipimpin Budi Santoso, melakukan kunjungan balik ke kantor KPU Provinsi Banten pada 7 Februari 2019. Kali ini, selain tim dari Corporate Communication, turut serta dalam rombongan adalah Kepala Cabang Alfamart untuk Wilayah Serang. Pada kesempatan ini, pihak Alfamart sudah mengantongi keputusan untuk ikut berpartisipasi dalam sosialisasi Pemilu 2019 dengan syarat dan ketentuan mencakup, syarat materi bahan sosialisasi yang dapat disebar dan ditempel di toko Alfamart ditentukan pihak manajemen dengan memerhatikan aspek-aspek imparsialitas. Mulai dari pemilihan warna, huruf, dan desain alat peraga sosialisasi. Dari dua desain yang kami ajukan, Alfamart menyetujui salah satunya. Bentuk bahan sosialisasi yang kami ajukan sejalan dengan pasal 12, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaran Pemilu, yang mengatur, penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi, terdiri atas: (a) penyebaran bahan sosialisasi, meliputi: brosur, selebaran (leaflet), pamflet, buku kecil (booklet), poster, folder, dan/atau, stiker. (b) pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi: spanduk,

jdih.kpu.go.id

pataka (banner), baliho, reklame (billboard)/reklame elektronik (videotron), dan/atau umbul-umbul. Selain materi bahan sosialisasi, pihak Alfamart juga menyetujui metode sosialisasi yang akan digunakan di jaringan toko Alfamart tertentu (tidak seluruh jaringan toko Alfamart), yakni penyebaran bahan sosialisasi, berupa leaflet, oleh pegawai toko Alfamart dan menyediakan ruang di salah satu sisi toko untuk ditempeli alat peraga sosialisasi berupa poster ukuran A3. Dari sini kita jadi tahu juga bahwa setiap jengkal dinding, kaca gedung toko, dan etalase toko Alfamart itu, sesungguhnya bernilai rupiah. Tapi, untuk KPU Banten dan Pemilu, Alfamart memberikan space gratis. Pihak Alfamart menyetujui 50 tokonya untuk menjadi media sosialisasi dan menyerahkan pemilihan toko di daerah mana yang akan menjadi prioritas program sosialisasi.

Basis Partisipasi

Setelah menelaah, kami memutuskan fokus di 5 (lima) daerah yakni, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang. Kami pun kembali menyerahkan kepada pihak Alfamart untuk menentukan toko mana saja di lima daerah tersebut berdasarkan penilaian letak strategis dan tingkat kunjungan di daerah itu. Pemilihan 5 wilayah ini didasarkan pertimbangan data partisipasi pemilih pada event Pemilu 2014 sebelumnya tingkat partisipasinya masih di bawah 70 persen pada Pemilu Presiden 2014. Empat daerah, yakni Kabupaten Serang dengan tingkat partisipasi 67,43%, Kabupaten Lebak partisipasi sebesar 69,27%, Kabupaten Pandeglang sebesar 66,40%, dan Kabupaten Tangerang partisipasi 68,23%. Keempatnya merupakan wilayahnya dengan luas dengan jumlah wilayah kecamatan dan kelurahan yang banyak. Daerah terakhir adalah Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten memiliki tingkat partisipasi 66,10%. Sementara tiga daerah lainnya, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Cilegon tidak masuk dalam program kemitraan ini.

Tepat 16 Februari 2019, Gerakan Sadar Pemilu bersama Alfamart kami luncurkan , berlokasi di salah satu toko Alfamart di Kota Serang. Ditandai dengan penempelan Alat Peraga Sosialisasi oleh Ketua KPU Provinsi Banten bersama Kepala Cabang Alfamart Kota Serang serta penyebaran bahan sosialisasi oleh pegawai toko kepada pengunjung Alfamart. Periode kerjasama program sosialisasi bersama Alfamart ini berlangsung hingga akhir batas masa kampanye Pemilu, tepatnya 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Sejak peluncuran itu, distribusi bahan sosialisasi dilakukan KPU Kabupaten/Kota dibantu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan/desa untuk diberikan kepada pengunjung Alfamart oleh pegawai toko. Sedangkan penempelan alat peraga di media dinding kaca toko dilakukan tim dari KPU Kabupaten/Kota bersama pegawai toko Alfamart. Setiap dua minggu, leaflet dipasok ke toko-toko Alfamart sampai

batas waktu kerjasama program berakhir.

Efektif Efisien

Usaha untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu, tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu. Organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat juga dapat berpartisipasi untuk turut mendorong masyarakat agar mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara. Beragam cara dan metode sosialisasi untuk meningkatan pengetahuan publik tentang pelaksanaan Pemilu dan guna mendorong motivasi pemilih untuk datang ke TPS. Aktivitas mempromosikan penyelenggaraan Pemilu ini terbagi menjadi enam kegiatan yang masing-masing memiliki target dan sasaran berbeda. Aktivitas sosialisasi itu adalah, *information campaigns, advertising campaigns, grass-roots movements, school/mock elections, entertainment, inducements,* (Andrew Ellis, IDEA, 2006).

Information campaigns, menitik beratkan kegiatan sosialisasi tentang informasi seputar penyelenggaraan Pemilu tentang waktu, kapan, hari dan tanggal serta jam berapa pemungutan suara dilaksanakan, di mana pemungutan suara dilakukan, apa saja yang bisa dipilih, batas waktu pemungutan suara, dan bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Sedangkan advertising *campaigns*, fokus pada usaha membangkitkan motivasional pemilih tentang alasan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu. *Grass-roots movements*, diarahkan pada pembentukan kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas kritis yang bertugas memberikan informasi dan memobilisasi masyarakat untuk peduli Pemilu. Selanjutnya *school/mock elections*, merupakan model sosialisasi tatap muka ke sekolah-sekolah melalui kegiatan seperti simulasi pemungutan suara atau dengan metode kursus singkat tentang demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu. Aktivitas *entertainment*, sosialisasi yang dilaksanakan dengan berdasar pada premis bahwa belajar tentang Pemilu dan politik dapat lebih menarik bagi audiens target tertentu jika disajikan dalam suasana yang lebih ringan dan disertai dengan musik dan atau tontonan. Terakhir adalah *inducements*, kegiatan sosialisasi yang dirancang agar proses pemungutan suara lebih menarik dengan cara menawarkan kompensasi tertentu kepada pemilih yang mau datang ke tempat pemungutan suara.

Target sosialisasi melalui program kemitraan dengan Alfamart ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kapan, dan jenis Pemilu apa saja yang akan dilaksanakan pada Pemilu Serentak 2019. Bahan dan alat peraga sosialisasi pun lebih dominan berisi tentang informasi waktu dan jenis pemilihan Pemilu Serentak 2019. Harapannya, informasi ini dapat mengubah aspek kognitif

masyarakat tentang Pemilu, sehingga akhirnya memutuskan untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Aspek kognitif calon pemilih yang disasar dalam program ini sejalan dengan *model information campaigns* dalam jurnal di atas. Jika ditilik dari pespektif pemasaran ala Philips Kotler yang tersohor dengan *marketing mix* atau Bauran Pemasaran (BP), yakni 4P (*Product, Price, Place, Promotions*), (Kotler dan Armstrong 2012:75), maka model kemitraan ini berada pada lingkup bauran pemasaran yang keempat, yakni *promotions*. Kalau Pemilu kita analogikan sebagai produk (*product*) maka Pemilu adalah produk yang bagus yang bisa kita tawarkan dan pula sudah mendapat perhatian publik, karena kompetisi yang terbuka, peserta yang heterogen, dan penyelenggara yang berintegritas plus jaminan kualitas produk yang dapat "dinikmati" secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Unsur kedua dalam BP, yakni harga dianggap sebagai nilai yang ditukar dengan manfaat yang diterima konsumen, Pemilu jelas memiliki manfaat besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan "nilai" yang ditukarkan berupa waktu dan suara pemilih yang amat berharga. Keunggulan lain dari Pemilu sebagai sebuah produk dalam unsur ketiga BP adalah adanya struktur penyelenggara Pemilu yang dibentuk hingga level terdekat dengan pemilih yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehingga memudahkan "konsumen" untuk menjangkau dan mendapatkan produk, ini yang oleh Kotler disebut *place*. Unsur promotions dalam BP merupakan upaya mengenalkan produk kepada konsumen yang berarti arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang pada tindakan yang menciptakan pertukaran. Pengembangan terhadap praktik komunikasi pemasaran seperti ini juga mengenal konsep *promotion mix* atau bauran promosi, salah satu unsurnya adalah advertising atau periklanan sebagai unsur terpenting daripada unsur bauran promosi lainnya, yakni, penjualan personal (*personal selling*), humas dan publikasi *(public relations and publicity*), promosi penjualan (*sales promotions*), pemasaran langsung *(direct mail*), pemasaran dari mulut ke mulut (*word- of mouth marketing*), dan pemasaran interaktif (*interactive marketing*), (Kotler dan Amstrong (2012:432).

Tentu saja, seluruh metode sosialisasi yang dirumuskan KPU memiliki kemiripan dengan konsep BP ini. Karenanya, kemitraan dengan Alfamart sekali lagi untuk menguatkan promosi atas produk kita yang targetnya adalah semakin bertambahnya konsumen. mengingat posisi strategis jaringan waralaba ini. Pemasangan spanduk yang dipasang di lokasi strategis dan pencetakan brosur yang disebar di pusat perbelanjaan adalah ciri dari praktik *advertising* atau periklanan sebagai bentuk komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi, produk, atau jasa. Dalam perspektif komunikasi, advertising mampu mengendalikan komunikasi massa, yang bertujuan untuk memberikan informasi, memengaruhi sikap, dan

mendorong tindakan yang menguntungkan pemasang iklan. Periklanan juga dapat meningkatan image dan posisi organisasi dalam pandangan publik, (Nolte dan Wilcox, 1984: 345).

Untuk penyelenggaraan Pemilu 2019, khususnya di Banten, model ini dikatakan efektif dan efisien, karena mampu menjangkau segala kalangan dan mampu memangkas sejumlah komponen biaya seperti biaya transport atau konsumsi jika sosialisasi dilakukan secara tatap muka. Pemasangan alat peraga sosialisasi di lokasi strategis tentu juga memerlukan biaya, tapi kemitraan ini memangkas biaya tersebut. Efektivitasnya juga tampak dari capaian tingkat partisipasi pemilih daerah dalam lingkup kerjasama program ini. KPU Banten mencatat, tingkat pertisipasi pemilih di Kota Serang sebesar 86,35%, Kabupaten Serang 81,80%, Kabupaten Tangerang A 84,39%, Kabupaten Tangerang B 84,34%, Kabupaten Lebak 78,21%, dan Kabupaten Pandeglang 78,32%. Secara keseluruhan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Tingkat Partisipasi Semua Jenis Pemilihan

Jenis Pemilihan	Tingkat Partisipasi								
	Provinsi	Kab. Pandeglang	Kab. Lebak	Kab. Tanggerang	Kota Tanggerang	Kota Tangerang Selatan	Kab. Serang	Kota Serang	Cilegon
Pilpres	83,71%	78,35%	78,28%	84,90%	87,38%	85,98%	81,92%	86,66%	90.70%
DPR Banten 1	78,26%	78,32%	78,21%						
DPR Banten 2	84,16%						81,81%	86,4%	90,14%
DPR Banten 3	85,03%			84,42%	86,74%	84,24%			
DPD	83,23%	78,33%	78,22%	84,43%	86,75%	84,26%	81,81%	86,41%	90,15%
DPRD Provinsi	83.18%	78,32%	78,21%	84,39% (A)	86,59(A)	84,21%	81,80%	86,35%	90,07%
				84,34%(B)	86,68% (B)				
DPRD Kab/ Kota		78,28%	78,14%	84,35%	86,70%	84,15%	79,96%	86,32%	90,02%

Sumber : Form DC1, KPU Provinsi Banten

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, tingkat partisipasi Pilpres tingkat Provinsi Banten sebesar 83,71%, Pandeglang 78,35%, Lebak 78,28%, Tangerang 84,90%, Kota Tangerang 87,38%, Kota Tangerang Selatan 85,98%, Kabupaten Serang 81,92%, Kota Serang 86,66%, dan Kota Cilegon 90.70%. Sedangkan untuk Pemilihan DPR RI capain tingkat partisipasi di masing-masing daerah pemilihan yakni, DPR Banten 1 tingkat partisipasi provinsi sebesar 78,26%, Kabupaten Pandeglang 78,32%, dan Kabupaten Lebak 78,21%. Daerah Pemilihan Banten 2, tingkat partisipasi Provinsi sebesar 84,16%, Kabupaten Serang 81,81%, Kota Serang 86,4%, dan Kota Cilegon 90,14%. Pada Daerah Pemilihan Banten 3, tingkat Provinsi sebesar 85,03%, Kabupaten Tangerang 84,42%, Kota Tangerang 86,74%, dan Kota Tangerang Selatan sebesar 84,24%. Sementara untuk pemilihan DPD, tingkat partisipasi provinsi sebesar 83,23%, Pandeglang 78,33%, Lebak 78,22%, Tangerang 84,43%, Kota Tangerang 86,75%, Kota Tangerang Selatan 84,26%, Kabupaten Serang 81,81%, Kota Serang 86,41%, dan Kota Cilegon 90,15%.

Tingkat partisipasi pada pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, capaian angkanya juga cukup signifikan. Untuk DPRD Provinsi, tingkat partisipasi provinsi mencapai 83.18%, Pandeglang 78,32%, Lebak 78,21%, Tangerang A 84,39%, Tangerang B 84,34% , Kota Tangerang A 86,59%, Kota Tangerang B 86,68%, Tangerang Selatan 84,21%, Kabupaten Serang 81,80%, Kota Serang 86,35%, Kota Cilegon 90,07%. Sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota, masing-masing tingkat partisipasi berada pada angka: Pandeglang 78,28%, Lebak 78,14%, Tangerang 84,35%, Kota Tangerang 86,70%, Tangerang Selatan 84,15%, Kabupaten Serang 79,96%, Kota Serang 86,32%, Kota Cilegon 90,02%.

Kenaikan angka partisipasi ini tentu saja juga dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak bisa kita nafikan. Namun kami meyakini program kemitraan ini ikut memberi kontribusi, sekaligus dapat menjadi model kerja sama yang mencoba keluar dari “tempurung” media sosialisasi dalam usaha peningkatan partisipasi pemilih. Kita menginginkan penyebaran informasi Pemilu yang lebih luas agar menjadi asupan bergizi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilu.

Daftar Pustaka

Engaging the Electorate: *Initiatives to Promote Voter Turnout From Around the World*, IDEA, 2006

Effective Publicity : *How to Reach The Public, Lawrence W Nolte dan Dennis L Wilcox*, 1984, John Wiley & Sins, Inc.

Prinsip-Prinsip Pemasaran, Philip Kotler dan Gary Amstrong, Edisi 13, Jilid 1, 2012, Erlangga

jdih.kpu.go.id

Komunikasi Publik dan Peningkatan Partisipasi Pemilu di Jawa Timur

Oleh Gogot Cahyo Baskoro
Anggota KPU Provinsi Jawa Timur

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menerapkan komunikasi publik sebagai kunci utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penerapan komunikasi publik menjadi langkah yang sangat penting di tengah derasnya arus disinformasi mengenai kepemiluan dan demokrasi. Komunikasi publik harus mendukung berbagai upaya KPU dalam melibatkan publik dalam pemilu.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi partisipasi masyarakat Jawa Timur pada Pemilu 2019, peran KPU Jawa Timur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui komunikasi publik, serta jenis komunikasi publik yang dilakukan oleh KPU Jawa Timur.

Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah pesimisme masyarakat terhadap potensi partisipasi masyarakat untuk mencapai target nasional 77,5 persen. Namun, fakta menunjukkan bahwa komunikasi publik menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Jawa Timur pada Pemilu 2019. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi masyarakat di Jawa Timur pada Pemilu 2019 mencapai 82 persen.

Latar Belakang

Keberadaan lembaga publik sesungguhnya bermuara pada bagaimana tugas-tugas yang dimandatkan berkaitan dengan publik terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.[1] Namun ada hal yang lebih penting daripada sekadar terlaksana, yaitu menjalin hubungan yang efektif dan dinamis antara lembaga publik dan masyarakatnya. Hal ini sangat penting karena bukan hanya pemenuhan hak publik untuk mengetahui informasi, tetapi juga berdampak pada terwujudnya kepentingan lembaga publik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Salah satu lembaga publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakatnya yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU bekerja untuk memastikan hak konstitusional warga negara terlaksana dengan baik. Berbagai tantangan juga dihadapi oleh KPU mengingat pelaksanaan pemilu tahun 2019 masyarakat harus memilih lima jenis pemilihan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah persoalan komunikasi hingga menimbulkan pesimisme publik terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai komentar para tokoh di media. Seperti halnya Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana mengatakan "sosialisasi pemilu minim picu tingginya golput di Jawa Timur".[2] Nada yang sama juga disampaikan oleh Anwari ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jawa Timur[3] bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh LSI Denny J.A. prediksi angkat golput di Jawa Timur masih tinggi yakni mencapai 30,42%.

Pendapat tersebut diperkuat dengan adanya survei yang dilakukan oleh Surabaya Survei Center (SSC) pada Januari 2019.[4] Pertama, tentang pelaksanaan pemilu menunjukkan hasil sebanyak 35,2% masyarakat Jawa Timur mampu menyebutkan tahun saja, 18,2% mampu menyebutkan bulan dan tahun saja, dan hanya 11,85% yang mampu menyebutkan secara lengkap tanggal, bulan, dan tahun. Kedua, pengetahuan tentang 5 jenis surat suara, menunjukkan hasil 92,5% tidak mengetahui lima jenis surat suara, dan hanya 7,5% yang mengetahui lima jenis surat suara. Ketiga, pengetahuan tentang partai politik peserta pemilu, menunjukkan bahwa 90,8% tidak mampu menyebut 16 partai politik, dan hanya 9,2% yang mampu menyebut 16 partai politik. Namun hasil sebaliknya terlihat pada

[1]Wisnu Widjanarko, 2017, dalam kolom-opini berjudul "*Memahami Khalayak: Sebuah Prasyarat Komunikasi Publik Pendidikan Tinggi*". Di akses pada https://ristekdikti.go.id. pada 5 November 2019.
[2]"*Wisnu Sakti: Sosialisasi Pemilu Minim Picu Tingginya Golput di Surabaya*", https://jatim.antaranews.com/. Di akses pada 5 November 2019
[3]"*Pemilu dalam Bayang-Bayang Golput Pemilih Pemula*", https://santrinews.com/. Diakses pada 5 November 2019
[4]"Versi Survei SSC: Publik Belum Mengetahui Jadwal Pemilu 2019", https://jatimnow.com/. Diakses pada 5 November 2019

survei tentang potensi partisipasi menunjukkan bahwa 88,8% pasti menggunakan hak pilih dan 11,2% belum pasti menggunakan hak pilih pada Pemilu.

Angka 88,8% menjadi bekal KPU Jawa Timur untuk senantiasa optimis dapat meningkatkan partisipasi pemilih sesuai target, minimal 77,5% sesuai batas minimal yang ditetapkan oleh KPU. Mengingat pola komunikasi dalam sosialisasi dan publikasi yang telah dilakukan. Faktanya, angka partisipasi masyarakat pada pemilu 17 April yang lalu mengalami peningkatan hingga mencapai angka 82%.

Meningkatnya angka partisipasi pemilih di atas menunjukkan bahwa aspek komunikasi yang telah dibangun oleh penyelenggara dan para pihak selama ini cukup ampuh dalam menjangkau masyarakat pemilih. Berdasar pada fakta di atas, tulisan ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana kondisi partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 di Jawa Timur, bagaimana peran KPU Jawa Timur dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 melalui komunikasi publik, serta apa saja bentuk-bentuk komunikasi publik yang dilakukan KPU Jawa Timur.

Metode Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komunikasi publik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendapat Merriam & Grenier (2019:4) yaitu "*there are two other philosophical perspective that largely inform the design of qualitative research. Drawing from critical social theory, you might investigate how the social and political aspect of the context shape how people see or understand the situation, that is, how larger contextual factors affect the way in which individuals construct reality. This would be a critical qualitative approach*."[5] Artinya, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait dengan fenomena sosial dan politik. Secara lebih spesifik, alasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penulisan ini bahwa komunikasi publik dan partisipasi masyarakat merupakan fenomena sosial dengan beragam dampak. Keberadaan media sebagai sarana komunikasi dengan jangkauan yang cepat dan luas dapat merubah sistem pola pikir masyarakat yang terus berkembang.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pembahasan ini juga menggunakan struktur penulisan dengan gaya naratif.[6] Disebutkan Rizal Mawardi dalam overview penelitian kualitatif pendekatan naratif bahwa gaya naratif merupakan kekuatan dari riset kualitatif. Salah satu karakteristik kunci penelitian narasi adalah berfokus pada pengalaman individu beserta kronologi. Penggunaan gaya naratif sudah sesuai dalam penulisan ini karena pembahasan mengenai

komunikasi publik dan partisipasi masyarakat merupakan sebuah *success story* bagi KPU Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur.

Pemilu Serentak 2019 dan Partisipasi Masyarakat di Jawa Timur

Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu Tahun 2019 menjadi momen yang menarik untuk dikaji. Bukan hanya sebuah aktivas politik lima tahunan yang rutin dilakukan untuk memilih para pemimpin rakyat. Pemilu di Indonesia yang telah berlangsung sebanyak dua belas kali sejak pertama kali pada tahun 1955 hingga Pemilu 2019 yang baru saja selesai. Berbagai pengalaman pemilu yang secara teratur dilaksanakan membuat interaksi masyarakat dengan aktivitas pemilu relatif intens sehingga membuat masyarakat memahami tahapan Pemilu. Namun berbeda dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang dilakukan secara serentak, dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif dilakukan secara bersamaan. Terhitung terdapat lima jenis pemilihan dalam Pemilu 2019, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lantas bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Jawa Timur?

1. Kondisi Sosial, Budaya, dan Politik di Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terluas di antara 6 (enam) Provinsi lainnya di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat. Provinsi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini memiliki 29 Kabupaten 9 Kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi. Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah Kabupaten/Kota terbanyak se Indonesia.[7]

Secara geografis, Provinsi Jawa Timur terletak di antara 111º0” bujur timur - 114º4” bujur timur dan 7º12” lintang selatan - 8º48” lintang selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km² yang meliputi dua bagian utama. Dua bagian tersebut adalah Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Bagian Jawa Timur daratan seluas 42.541 km² atau sebesar 88.70%, sedangkan luas kepulauan Madura yaitu 5.422 km² atau sebesar 11.30%.[8] Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah suku Jawa, namun demikian entitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Umumnya suku Jawa memeluk agama Islam, sebagian memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan

jdih.kpu.go.id

Budha. Sementara suku Madura menempati kepulauan Madura dan wilayah tapal kuda, terutama di pesisir utara dan selatan. Di wilayah tapal kuda, suku Madura mendominasi sebagian masyarakatnya. Hampir sebagian Kabupaten/Kota di Jawa Timur terdapat minoritas suku Madura.[9] Selain penduduk asli, Jawa Timur juga dihuni berbagai masyarakat pendatang. Walaupun jumlah mereka minoritas, secara signifikan yang datang adalah masyarakat Tionghoa dan Arab yang mendiami daerah perkotaan. Mengenai peta budaya lokal daerah, menurut Aribowo dalam Nurhasanah (2012:23), Jawa Tmur terbagi menjadi beberapa Sub kultur kebudayaan. Pertama, budaya Arek yang menjadi karakteristik masyarakat daerah Kota Surabaya. Kedua, budaya yang mendekati sub kultur Arek dengan ciri khasnya tersendiri. Sub kultur tersebut banyak dijumpai di daerah-daerah yang menjadi penyangga kawasan Surabaya, yaitu Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Gresik, Tuban, dan Lamongan. Ketiga, budaya Mataraman yang merentang mulai Ngawi, Kediri, Madiun, Nganjuk, Magetan, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung sampai Blitar. Keempat, budaya Pandalungan yang banyak dijumpai di pesisir pantai Jawa sebelah timur, khususnya Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Jember. Sub kultur pandalungan semuanya dipengaruhi oleh Madura Islam. Kelima, sub kultur Osing yang berada di Banyuwangi. Keenam, sub kultur Samin yang agak mirip dengan Mataraman, namun mempunyai perspektif lain di luar Mataraman. Ketujuh, sub kultur Tengger yang berada di Pegunungan Bromo dengan kultur yang agak khusus karena mendekati Majapahit. Selain itu, di Pulau Madura sendiri terdapat dua sub kultur yang berbeda, yaitu Madura Kangcan dan Madura Bawean. Kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan sinergitas antar sektor wilayah berdampak pada kemajuan pembangunan daerah. Baik dalam bidang infrastruktur, transportasi, teknologi, dan komunikasi yang secara langsung maupun tidak langsung membawa perubahan kehidupan masyarakat yang cukup signifikan. Mobilitas penduduk yang tinggi akan menimbulkan pergeseran tatanan nilai budaya hingga pada akhirnya akan berujung pada perubahan pandangan sosial, seperti halnya pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kondisi masyarakat di Jawa Timur memang sangat beragam. Namun secara kultural masih didominasi oleh orientasi nilai budaya vertikal-hierarkis. Orientasi ini masih sangat berpengaruh terhadap kemandirian masyarakat dalam proses demokrasi, terutama dalam pengambilan sikap politik pada saat pemilu.

[5]Sharan B, Merriam & Robin S. Grenier, 2019, "Qualitative Research in Practice, Examples for Discussion and Analysis" San Francisco, Ca: Jossey-Bass. Diakses pada e-resources.perpusnas.go.id pada Selasa 19 November 2019

[6]Rizal Mawardi, 2018, disampaikan dalam overview "Penelitian Kualitatif Pendekatan Naratif". tersedia pada http://dosen.perbanas.id. Diakses pada Selasa 19 November 2019

[7]"Sekilas Jawa Timur". Tersedia pada http://jatimprov.go.id/. Diakses pada 5 November 2019

[8]ibid.

[9]ibid.

2. Profil Pemilih dalam Pemilu Serentak 2019 di Jawa Timur

Mempunyai wilayah terluas di pulau Jawa, tercatat hingga 29 Oktober 2018 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur sebanyak 39.292.972 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa.[10] Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019 sebanyak 30.912.994 jiwa dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 15.226.058 jiwa dan pemilih perempuan sebanyak 15.686.936 jiwa. Jumlah DPT tersebut tersebar di 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 8.497 desa, dan sebanyak 130.012 TPS. Jika diklasifikasi berdasarkan usia pemilih, sebanyak 2.287.176 berusia <20 tahun dengan prosentase sebesar 7%, sebanyak 6.061.778 berusia antara 21-30 tahun dengan prosentase sebesar 20%, sebanyak 6.573.179 berusia antara 31-40 tahun dengan prosentase sebesar 21%, sebanyak 6.208.333 berusia 41-50 tahun dengan prosentase sebesar 20%, sebanyak 5.115.410 berusia 51-60 tahun dengan prosentase sebesar 17%, dan sebanyak 4.667.118 berusia >60 tahun dengan prosentase sebesar 15%. Bila dikelompokkan dalam tiga besar prosentase pemilih pemula sebesar 7%, pemilih muda 61%, dan pemilih yang berusia di atas 51 tahun sebanyak 32%. Artinya dibutuhkan suatu teknik komunikasi dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi pemilih.

3. Angka Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019 di Jawa Timur

Secara umum tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Timur pada Pemilu 2019 melebihi target partisipasi nasional yaitu 77,50%. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat juga dialami semua jenis pemilihan, rata-rata dari pemilihan tersebut mengalami peningkatan sebesar 7-10%. Jika dicermati lebih rinci, berikut data tingkat pasrtisipasi masyarakat Jawa Timur pada Pemilu 2019. Pertama, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) sebesar 82,53%, dengan selisih kenaikan partisipasi sebanyak 10,38% dibandingkan dengan Pilpres 2014 yang sebesar 72,15%. Kedua, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar 82,27%, dengan selisih kenaikan partisipasi sebanyak 7,19% dibandingkan dengan Pileg 2014 dengan partisipasi sebesar 75,08%. Ketiga, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar 82,35%, dengan selisih kenaikan partisipasi sebesar 7,17% dibandingkan dengan Pileg 2014 dengan partisipasi sebesar 75,15%. Keempat, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi sebesar 82,26%, dengan selisih kenaikan partisipasi sebesar 7,10% dibandingkan dengan Pileg 2014 dengan partisipasi sebesar 75,15%. Kelima, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota sebesar 82,18%, dengan selisih kenaikan partisipasi sebesar 6,98% dibandingkan Pileg 2014 dengan partisipasi sebesar 75,20%.[11]

Tabel Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat Jawa Timur pada Pemilu 2014 dan 2019 (Sumber: KPU Jawa Timur 2019)

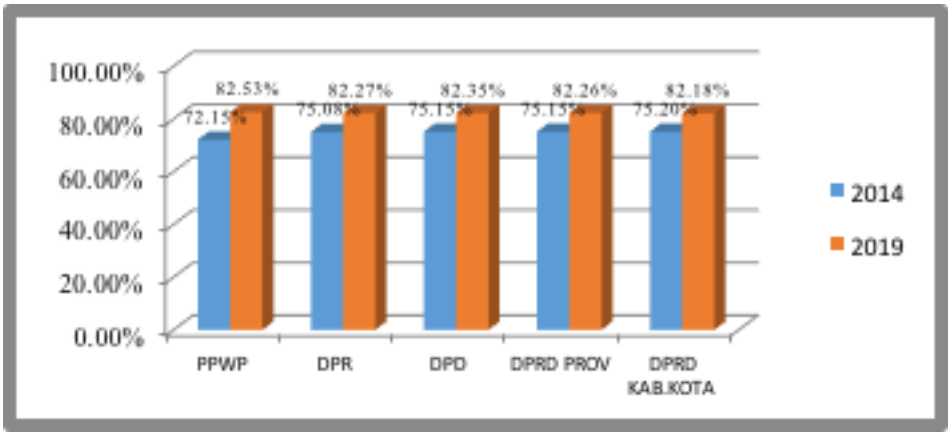

Lebih detail, jika dilihat per kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan angka partisipasi. Namun, terdapat empat kabupaten/kota yang tingkat partisipasinya belum memenuhi target partisipasi nasional sebanyak 77,5%. Pertama, Kota Surabaya sebesar 76,12%, namun selisih kenaikannya sebesar 12,88%, cukup signifikan dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2014. Kedua, Kabupaten Jember sebesar 76,05%, dengan selisih kenaikan yang cukup signifikan yaitu 7,18%. Ketiga, Kabupaten Banyuwangi sebesar 75,99%, dengan selisih kenaikan yang cukup signifikan sebesar 7,79%. Keempat, Kabupaten Pacitan sebesar 75,90%. Tingkat partisipasi Kabupaten Pacitan juga menjadi tingkat partisipasi terendah dibandingkan 37 kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur. Tingkat partisipasi Kabupaten Pacitan sekaligus mengalami selisih peningkatan partisipasi yang kurang signifikan, yaitu 5,03%.

Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat Jawa Timur pada Pemilu 2019 di setiap Kabupaten/Kota.

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Parmas Pemilu 2014	Rata-Rata Parmas Pemilu 2019	Selisih
1.	Kota Malang	68.99%	82.62%	13.64%
2.	Kota Kediri	76.87%	89.94%	13.07%
3.	Kota Surabaya	63.24%	76.12%	12.88%
4.	Kabupaten Malang	68.44%	80.10%	11.66%
5.	Kabupaten Sidoarjo	75.17%	85.73%	10.56%
6.	Kabupaten Pasuruan	75.23%	85.73%	10.50%
7.	Kabupaten Pame-kasan	83.33%	92.49%	9.16%

[10]ibid.

[11]Dokumen KPU Jawa Timur sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 pada 12 Mei 2019

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Parmas Pemilu 2014	Rata-Rata Parmas Pemilu 2019	Selisih
8.	Kabupaten Lumajang	71.79%	80.52%	8.73%
9	Kabupaten Bojonegoro	74.26%	82.85%	8.58%
10	Kabupaten Lamongan	70.15%	78.53%	8.39%
11	Kota Batu	82.34%	90.16%	7.82%
12	Kabupaten Banyu-wangi	68.21%	75.99%	7.79%
13	Kota Pasuruan	80.22%	87.68%	7.46%
14	Kabupaten Situbondo	78.00%	85.37%	7.37%
15	Kabupaten Ponorogo	73.19%	80.55%	7.35%
16	Kabupaten Jember	68.88%	76.05%	7.18%
17	Kabupaten Sumenep	75.51%	82.65%	7.14%
18	Kabupaten Jombang	75.45%	83.50%	8.06%
19	Kota Madiun	74.71%	81.71%	7.00%
20	Kabupaten Nganjuk	73.69%	80.68%	6.98%
21	Kabupaten Magetan	74.69%	81.48%	6.79%
22	Kota Probolinggo	82.17%	89.30%	7.13%
23	Kota Blitar	78.66%	85.23%	6.57%
24	Kabupaten Tuban	75.39%	81.84%	6.45%
25	Kota Mojokerto	82.96%	89.39%	6.43%
26	Kabupaten Gresik	78.75%	85.18%	6.42%
27	Kabupaten Probolinggo	77.58%	83.77%	6.19%
28	Kabupaten Bondowoso	79.51%	85.51%	6.01%
29	Kabupaten Madiun	75.19%	81.12%	5.93%
30	Kabupaten Tulungagung	74.75%	80.52%	5.78%
31	Kabupaten Ngawi	73.77%	79.45%	5.68%
32	Kabupaten Blitar	75.56%	81.22%	5.66%
33	Kabupaten Mojokerto	82.23%	87.53%	5.29%
34	Kabupaten Pacitan	70.87%	75.90%	5.03%
35	Kabupaten Kediri	78.39%	82.84%	4.45%
36	Kabupaten Trenggalek	76.50%	80.81%	4.31%
37	Kabupaten Sampang	91.85%	96.11%	4.26%
38	Kabupaten Bangkalan	89.56%	91.96%	2.40%

Dilihat secara umum dari data di atas, dapat dikatakan adanya kerelaan masyarakat dalam memutuskan kehadiran mereka ke TPS untuk berpartisipasi sangat baik. Respon positif tersebut juga menunjukkan masyarakat mengetahui dan memahami berbagai informasi tahapan pemilu. Hal ini dapat dilihat dari prosentase tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan paling tinggi di antara empat jenis pemilihan lainnya, yaitu sebesar 82,53%. Salah satu alasan yang memungkinkan karena banyak dari masyarakat yang memproses formulir A5.KWK, agar mereka tetap bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS ditengah berbagai aktivitas diluar daerah pemilihan masing-masing. Mereka ini disebut sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Disusul tertinggi kedua adalah prosentase Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 82,35%. Sangat logis bila dilihat dari kebijakan penggunaan formulir A5.KWK harus dalam satu wilayah daerah pemilihan (dapil). Jadi, semakin luas dapil maka kemungkinan partisipasi pemilih DPTb semakin tinggi.

KPU Jawa Timur Sebagai Aktor Komunikasi Publik

Membangun kesadaran politik para pemilih agar turut berpartisipasi dalam Pemilu memang bukan hal yang mudah. Dalam sebuah riset, beberapa bukti di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang apatis terhadap pemilu dilatarbelakangi berbagai hal yang tidak rasional, janji politik yang seringkali tidak dipenuhi oleh kontestan terpilih, kurangnya informasi, dan belakangan disebabkan adanya kampanye SARA, politik identitas, hingga maraknya berita hoaks.

Derasnya arus disinformasi menjelang Pemilu 2019 sangat jelas mengganggu berbagai aktivitas demokrasi kita. Bahkan menjelang hari pemungutan, hoax tidak hanya digunakan untuk menyerang kepada sesama kontestan, namun juga menyerang tatanan dan teknis penyelenggaraan Pemilu hingga berupaya melemahkan integritas KPU.

Oleh karena itu, sikap acuh masyarakat terhadap pemilu dan demokrasi harus segera diantisipasi. Apalagi beredarnya berita hoax, sudah pasti menjadi konsen KPU untuk hadir memberikan jawaban atas pemberitaan tidak yang benar.

Berbagai kondisi yang terjadi di atas, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Jawa Timur turut hadir memberikan inisiatif dalam melibatkan publik dalam pemilu. Minimnya anggaran bukan menjadi alasan bagi KPU untuk tidak melaksanakan sosialisasi secara maksimal. Beragam inovasi harus dilakukan. Salah satu kuncinya adalah melalui komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu kemampuan institusional yang paling vital untuk dimiliki setiap lembaga publik, termasuk KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pola komunikasi yang sifatnya

memperkuat koordinasi menjadi salah satu kunci sukses dalam keberhasilan pelaksanaan pemilu. Kemampuan komunikasi ini harus dikembangkan dengan melibatkan media, lembaga akademik, organisasi masyarakat sipil, bahkan kepada partai politik sebagai mitra KPU untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.[12]

Jika diingat-ingat, kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub) 2018 juga tidak terlepas dari faktor komunikasi. KPU Jawa Timur telah menunjukkan upaya proaktif dalam membangun komunikasi yang efektif terhadap publik, termasuk kepada stakeholders terkait.

Selain fungsi koordinasi, komunikasi juga menyangkut tentang kualitas informasi, kaitannya dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disampaikan kepada publik. Dalam hal ini yang dimaksud adalah media massa. KPU harus selalu berupaya memberikan informasi yang tepat dan utuh untuk menghindari berbagai perbedaan media dalam menerjemahkan langkah KPU. Hal ini tidak akan terjadi bila informasi yang diberikan sudah tepat dan bangunan komunikasi KPU dengan media massa sangat efektif. Karena sesungguhnya, hubungan KPU dengan media massa merupakan kunci membangun dan mempertahankan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

Sasaran Komunikasi Publik

Publik yang dilayani oleh KPU di Jawa Timur beragam karakteristik dan kebutuhannya. Berbagai pendekatan harus dilakukan agar publik dapat menerima informasi secara utuh. Sebab hal itu, KPU Jawa Timur dalam melakukan pendekatan kehumasan melalui komunikasi publik menyasar pada empat komponen, yaitu internal penyelenggara pemiilu, stakeholder terkait, masyarakat pemilih, dan partai politik sebagai peserta pemilu.

Pertama, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai susunan yang bersifat hierarkis struktural. Artinya keberadaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan kepanjangan tangan dari KPU dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu. Sehingga dapat secara jelas dikatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan lembaga yang bernama KPU. Maka dari itu, dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan olek KPU Jawa Timur, lembaga yang pertama kali disasar adalah lembaga dibawahnya, yaitu KPU Kabupaten/Kota, dan seterusnya. Kedua, dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui

[12]Panduan Media center untuk Optimalisasi Penyelenggara Pemilu", 2015. Tersedia di http://perludem.org. Diakses pada 5 November 2019

jdih.kpu.go.id

sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU Jawa Timur menyadari belum sepenuhnya mampu mengembangkan pola komunikasi secara mandiri. Butuh peran dari berbagai lembaga terkait yang dapat dimanfaatkan sebagai jembatan strategis yang menghubungkan antara lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat pemilih. Ketiga, masyarakat pemilih. Berbagai inovasi sosialisasi dilakukan oleh KPU Jawa Timur dalam rangka berkomunikasi dengan masyarakatnya secara langsung. Adapun jenis-jenis komunikasi publiknya akan dijelaskan pada sub bagian akhir. Keempat, partai politik. Posisi partai politik sebagai peserta pemilu yang mempunyai kepentingan terhadap masyarakat sangat strategis membantu KPU dalam melakukan pendidikan politik. KPU berharap, partai politik hadir sebagai agen pencerahan yang membawa peran dan fungsinya dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Jenis-jenis Sasaran Komunikasi Publik yang Dilakukan

1. Website/Blog

Mempunyai website bagi lembaga publik sudah menjadi keharusan. Keberadaan website dalam sebuah lembaga digunakan untuk menyediakan berbagai informasi dan data yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terlebih bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, website sangat penting mengingat informasi dan data yang dimiliki oleh KPU memiliki konsekuensi terhadap hukum dan politik.

Selain penyediaan data, penyampaian informasi kepemiluan juga menjadi prioritas bagi KPU Jawa Timur. Hal ini tercermin dari program 'Kata Setia' yang dibuat oleh KPU Jawa Timur. Kata Setia merupakan kependekan dari Kabar Berita Setiap Hari Kerja. KPU Jawa Timur mengharuskan menyampaikan informasi berupa berita minimal 1 berita setiap hari kerja. Dalam hal ini KPU Jawa Timur sudah memberikan contoh bagi KPU Kabupaten/Kota dengan menerapkan program 'Kata Setia' sebagai produk kehumasan KPU.

Dalam menunjukkan kesungguhannya dalam mengelola website, KPU Jawa Timur secara berkala melakukan evaluasi peliputan dan pemberitaan atau keaktifan website KPU kabupaten/kota setiap bulan. Sebagai contoh berikut adalah evaluasi keaktifan website pada bulan September tahun 2019.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 17 kabupaten/kota kategori sangat patuh dengan jumlah berita lebih dari 21 setiap bulan, 18 Kabupaten/Kota kategori patuh dengan jumlah berita 9 – 20 setiap bulan, 1 Kabupaten/Kota kategori kurang patuh dengan jumlah berita 1- 8 setiap bulan,

jdih.kpu.go.id

Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat Jawa Timur pada Pemilu 2019 di setiap Kabupaten/Kota.

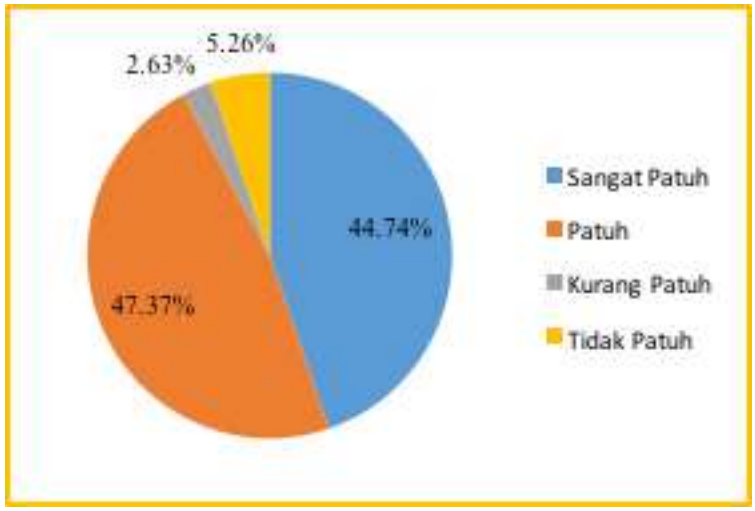

dan 2 kabupaten/kota tidak patuh tanpa update berita atau tidak mengirimkan laporan.

2. Media Massa

Sangat disadari bahwa dalam menjalankan fungsi kontrol, posisi media menjadi corong suara publik dalam turut serta menciptakan tatanan demokrasi yang berkualitas. Penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara demokratis apabila media massa berperan aktif dalam pemilu. Mengingat peran strategis itu, KPU Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan media massa baik media massa cetak, online, televisi, maupun radio. Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin dan memelihara hubungan secara berkesinambungan dengan media. Tujuan tersebut teraplikasikan dalam bentuk kegiatan penayangan iklan sosialisasi tahapan pemilu, *talkshow*, *media gathering*, bimtek media, hingga penandatanganan MoU pelaksanaan debat publik Pilkada 2018.

Tidak hanya fungsi koordinasi, tujuan lain yang juga penting adalah kualitas informasi. Untuk memenuhi tujuan tersebut, KPU bekerja sama dengan media massa dalam membangun sudut pandang dalam suatu isu tertentu sekaligus menyediakan informasi yang valid. Bentuk kegiatan dari kerjasama ini melalui *press release* dan *press conference* yang dilakukan setiap tahapan krusial.

3. Media Sosial

Saat ini media sosial diyakini sebagai salah satu medium komunikasi yang paling efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan humas lembaga penyelenggara pemilu (KPU) harus memanfaatkan media sosial agar lebih

dekat dengan publiknya dalam berkomunikasi secara langsung dan memberikan respon dengan segera.

KPU Jawa Timur telah memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti:

- youtube (KPU JAWA TIMUR);
- instagram (kpu_jatim));
- facebook page (KPU JAWA TIMUR); dan
- twitter (@KPU_JATIM).

Berbagai platform di atas difungsikan untuk meningkatkan reputasi lembaga, memberikan informasi, serta menggali aspirasi publik. Kebijakan penggunaan media sosial tidak hanya berhenti di tingkat provinsi. Selain KPU RI mengintruksikan pengunaan media sosial resmi lembaga, KPU Jawa Timur juga senantiasa mengontrol pemanfaatan media sosial, bahkan mewajibkan seluruh komisioner untuk mengaktifkan akun media sosial minimal facebook, twitter, dan instagram.

4. Alat Peraga Sosialisasi dan Bahan Sosialisasi

Sebagian orang menganggap pemasangan alat peraga dan bahan sosialisasi saat ini kurang efektif dalam memberikan informasi kepemiluan. Posisi alat peraga dan bahan sosialisasi sebagai bahan komunikasi memiliki jangkauan terbatas serta memerlukan perhatian khusus dibandingkan adanya media sosial yang dirasa lebih cepat dan mudah diakses. Namun, pemanfaatan alat peraga dan bahan sosialisasi yang didesain dengan menarik juga dapat menyentuh ranah afeksi dan *behavior* masyarakat.

Pada pemilu 2019, KPU Jawa Timur memanfaatkan alat peraga sosialisasi dalam bentuk baliho dan spanduk serta bahan sosialisasi dalam bentuk spesimen surat suara dalam melakukan sosialisasi di masyarakat. Baliho dan spanduk didesain dalam bentuk infografis dan menggunakan gambar serta tulisan singkat dan lugas yang mudah dipahami oleh masyarakat.

5. Sosialisasi Gelar Seni Budaya

Melihat kondisi Jawa Timur yang terbagi menjadi beberapa subkultur, memerlukan teknik sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berbeda di setiap wilayah. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh KPU Jawa Timur melalui sosialisasi gelar seni budaya. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh KPU Jawa Timur di delapan titik sesuai dengan pembagian subkultur di Jawa Timur meliputi subkultur Arek diselenggarakan di Kota Surabaya, subkultur Mataraman diselenggarakan di

Kabupaten Ngawi, subkultur Panaragan diselenggarakan di Kabupaten Ponorogo, sub kultur Madura diselenggarakan di Kabupaten Sumenep, sub kultur Pantura diselenggarakan di Kabupaten Gresik, subkultur Malangan diselenggarakan di Kota Batu, sub kultur Pandhalungan diselenggarakan di Kabupaten Jember, dan sub kultur Osing diselenggarakan di kabupaten Banyuwangi.

Pada sosialisasi ini biasanya acara dikemas dalam bentuk parade budaya dengan menyelipkan pesan-pesan kepemiluan dan demokrasi dalam setiap kegiatannya.

6. KKN Tematik Kepemiluan dengan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi

Program KKN Tematik Kepemiluan ini menjadi terobosan baru KPU Jawa Timur dalam program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Adanya kegiatan tersebut secara langsung memanfaatkan mahasiswa sebagai agen perubahan sebagai kepanjangan tangan KPU dalam mengedukasi masyarakat hingga lapisan bawah. Sampai dengan selesainya tahapan Pemilu 2019, kegiatan ini baru satu kali dilakukan, bekerja sama dengan dengan mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membagi mahasiswa beberapa kelompok dan ditempatkan di berbagai titik di wilayah Jawa Timur.

7. Lomba Pembuatan Poster Pemilu bekerja sama dengan Perguruan Tinggi

Selain KKN Tematik, agenda inovatif lainnya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan mahasiswa adalah penilaian pembuatan poster. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Universitas Airlangga dengan membuat poster bertajuk kepemiluan dan demokrasi. Mekanisme pelaksanaan kegiatan diawali dengan mahasiswa melakukan riset kepada masyarakat. Riset bertujuan untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pemilu dan demokrasi. Setelah itu, hasil riset diolah sehingga muncul solusi berupa iklan layanan masyarakat (ILM) yang dituangkan dalam poster. Hingga pada tahap akhir, hasil berupa poster dipresentasikan dihadapan dosen dan komisioner KPU Jawa Timur untuk dilakukan penilaian, pemberian rekomendasi yang secara langsung ditindaklanjuti mahasiswa untuk disempurnakan.

Hasil ILM tersebut dipasang di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan serta dimanfaatkan sebagai konten buletin Ide KPU Jawa Timur. Berikut beberapa contoh ILM mahasiswa ilmu komunikasi Unair:

jdih.kpu.go.id

Gambar 1 – 3. Hasil ILM Mahasiswa Unair yang telah direvisi
(Sumber: KPU Jawa Timur 2019)

8. Pemilu Expo

Bisa dikatakan penyelenggaraan pemilu expo merupakan bagian dari pengenalan dan promosi (*branding*) Rumah Pintar Pemilu kepada masyarakat. Melalui pemilu expo, KPU Jawa Timur telah mengupayakan pendidikan pemilih dilakukan dengan cara-cara yang fleksibel. Pemilu expo diyakini dapat mengenalkan pemilu dan demokrasi kepada masyarakat dengan cara-cara yang mudah dan menyenangkan. Dalam kegiatan ini, pengunjung dapat menikmati berbagai *games* seperti ular tangga demokrasi, simulasi mencoblos melalui maket TPS, dart *game* tipologi pemilih, swafoto kepemiluan, film pendek pemilu, berkonsultasi tentang hak pilih dan pindah pilih hingga secara langsung mengecek nama dalam DPT di portal lindungihakpilihmu.kpu.go.id.

Pemilu expo diselenggarakan KPU Jawa Timur dalam rangka hari jadi ke-73 Provinsi Jawa Timur selama 6 hari mulai tanggal 9 s.d 14 Oktober 2019 di Grand City Surabaya. Selama kegiatan tersebut jumlah pengunjung stand KPU Jawa Timur mencapai 1.751 orang yang terdiri dari lintas segmen pemilih. [13]

9. Berbagai Pelatihan Kehumasan untuk Kabupaten/Kota

Dalam rangka menata alur kerja kehumasan yang lebih terkonsolidasi, KPU Jawa Timur mengadakan diklat atau bimbingan teknis kehumasan secara rutin. Pelatihan ini diselenggarakan untuk menunjang kapasitas dalam kinerja kehumasan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Bimtek kehumasan dilakukan dengan pembekalan berbagai materi, di antaranya adalah materi jurnalistik, teknik komunikasi dengan media, teknik

fotografi, *public speaking*, teknik presentasi, hingga materi hoax pemilu dan strategi menangkal hoax melalui meme. Pelaksanaan bimtek ini selalu dikemas dengan forum menyenangkan dan semiformal agar peserta dapat memunculkan ide dan strategi baru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

10. Penerbitan Buletin

Salah satu metode penyebarluasan berbagai informasi kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur melalui penerbitan buletin. Buletin KPU Jawa Timur yang dinamai dengan Buletin iDe (Inspirasi Demokrasi) ini terbit secara berkala setiap bulan. Buletin iDe selalu hadir dengan tema aktual penyelenggaraan pemilu.

Dalam penerbitan buletin, KPU Jawa Timur juga menggandeng KPU Kabupaten/Kota untuk penulisan salah satu rubrik, yaitu opini. Selain opini beberapa konten buletin iDe di antaranya wawancara khusus, bingkai daerah, lensa Jawa Timur, galeri demokrasi, profil, dan berbagai infografis pemilu.

Penutup

Menelusuri berbagai aktivitas komunikasi publik dalam penyelenggaraan pemilu, dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, kondisi masyarakat di Jawa Timur sangat beragam. Secara kultural masih didominasi oleh orientasi nilai-nilai budaya patronase, sehingga sedikit banyak memengaruhi proses berdemokrasi masyarakatnya. Maka dari itu, dibutuhkan teknik komunikasi publik yang efektif untuk menjangkau seluruh masyarakat. Kedua, terlihat sangat jelas bahwa komunikasi publik menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sudah dibuktikan melalui dua kali pemilihan di Jawa Timur dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang cukup signifikan dan minimalnya konflik pada pemilihan. Ketiga, karena komunikasi publik berkaitan erat dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih harus terus diupayakan cara-cara yang inovatif dan fleksibel tanpa meninggalkan *local contain*, mengingat perubahan kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan semakin berkembang.

[13]"Pengunjung Pemilu Expo Tembus 1.751 Orang, Gogot: Energi Positif Yang Harus Terus Dijaga". Tersedia di https://kpujatim.go.id. Diakses pada 5 November 2019

Daftar Pustaka

jatimprov.go.id. [Online]. Diakses pada 5 November 2019 17:46 WIB. Tersedia di http://jatimprov.go.id/

jatim.antaranews.com. Whisnu Sakti: Sosialisasi Pemilu Minim Picu Tingginya Golput di Surabaya. [Online]. Selasa, 8 Januari 2019 7:58 WIB. Diakses pada Selasa, 5 November 2019 17:29 WIB. Tersedia di https://jatim.antaranews.com/berita/269494/whisnu-sakti-sosialisasi-pemilu-minim-picu-tingginya-golput-di-surabaya

kpujatim.go.id. [Online]. "Pengunjung Pemilu Expo Tembus 1.751 Orang, Gogot: Energi Positif Yang Harus Terus Dijaga". Diakses pada 5 November 2019 17:48 WIB.

Nurhasanah, L. 2012. "Demokrasi dan Budaya Politik Lokal di Jawa Timur Menurut R. Zuhro, dkk". 1(8):21-23. Januari-Juni 2012.

Perludem.org. Panduan Media Center untuk Optimalisasi Penyelenggaraan Pemilu. [Online]. Diakses pada 5 November 2019 17:50 WIB. Tersedia di http://perludem.org/tag/buku-panduan-media-center/

Rizal Mawardi. 2018. "Penelitian Kualitatif Pendekatan Naratif". Tersedia pada http://dosen.perbanas.id. Diakses pada Selasa 19 November 2019

santrinews.com. Pemilu dalam Bayang-Bayang Golput Pemilih Pemula [Online]. Rabu, 20 Maret 2019 14:00 WIB. Diakses pada Selasa, 5 November 2019 17:32 WIB. Tersedia di https://santrinews.com/Fikrah/9014/Pemilu-dalam-Bayang-Bayang-Golput-Pemilih-Pemula

Merriam & Grenier. 2019. "Qualitative Research in Practice, Examples for Discussion and Analysis" San Francisco, Ca: Jossey-Bass. Tersedia di e-resources. perpusnas.go.id. Diakses pada pada Selasa 19 November 2019

Versi Survei SSC: Publik Belum Mengetahui Jadwal Pemilu 2019 Digelar. [Online]. Rabu, 09 Januari 2019 16:24:13. Diakses pada , 5 November 2019 17:36 WIB. Tersedia di https://jatimnow.com/baca-11011-versi-survei-ssc-publik-belum-mengetahui-jadwal-pemilu-2019-digelar

Wijanarko, W. 2017. "Memahami Khalayak: Sebuah Prasyarat Komunikasi Publik Pendidikan Tinggi". Tersedia di https://ristekdikti.go.id. Diakses pada 5 November 2019.

Sosialisasi Pemilu 2019 Bersama Kelompok Tani Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Pemilih Tangguh Bencana: Strategi Pendidikan Pemilih di Bumi Tadulako Sulawesi Tengah

Oleh Sahran Raden
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Abstrak

Tulisan ini menguraikan pengalaman sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 di daerah bencana. Sulawesi Tengah (Sulteng) adalah daerah yang sangat terdampak pada saat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi terjadi pada tanggal 28 September 2018. Bencana Sulteng terjadi beririsan dengan pelaksanaan tahapan pemilu 2019. Salah satu problem pemilu di daerah bencana adalah bagaimana memulihkan trauma pemilih yang begitu akut untuk memiliki ketangguhan dan kesadaran dalam memilih saat pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2019. Meski demikian, tingkat partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah pada pemilu serentak 2019 mengalami kenaikan yang signifikan dari pemilu sebelumnya yakni 83,90%. Tingginya angka partisipasi pemilih ini sebagai bukti bahwa pemilih di Sulteng benar benar tangguh dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengagregasikan pilihan dan keputusannya pada Pemilu 2019.

Kata Kunci : Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Daerah Bencana,

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang rentan terhadap bencana alam, baik gempa bumi, tsunami, tanah longsor, tanah bergerak atau likuifaksi. Salah satu daerah bencana yang beririsan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 yakni daerah di Sulawesi Tengah. Pada tanggal 28 September 2018 terjadi gempa dahsyat yang berkekuatan 7,4 SR yang meluluh lantakan Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong. Gampa yang diikuti oleh tsunami dan likuifaksi telah menelan ribuan korban dan rusaknya sarana dan prasarana publik di empat daerah tersebut. Bencana alam tersebur bersamaan dengan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota tengah melaksanakan sejumlah tahapan Pemilu 2019. Pemilu 2019 di daerah bencana, menjadi tantangan tersendiri bagi Penyelenggara Pemilu. Pemilu yang beririsan dengan musibah bencana berdampak pada kesiapan warga mengikuti Pemilu, berdampak pada tingkat partisipasi dan tata kelola penyelenggaraan pemilu, termasuk didalamnya Data Pemilih, Kampanye dan Calon yang meninggal. Beberapa Tahapan Penting Pemilu di Daerah Bencana yang tersisa yakni ; Pendaftaran Pemilih, Kampanye, Distribusi Logistik, Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri yang harus melekat pada negara yang menganut paham demokrasi. Pemilihan umum menjadi arena yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan kenegaraan, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan. Pemilihan umum menjadi sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Rakyat mempunyai hak untuk memilih dengan bebas wakil-wakilnya di pemerintahan. Salah satu jaminan konstitusional dalam pemilu yakni memberikan, warga negara atas hak politiknya berupa hak memilih dalam pemilu. Hak yang sangat berharga ini memberikan pemilih memiliki peran yang yang sangat penting, yaitu memilih siapa yang akan memerintah mereka dan menjalankan kebijakan publik.

Hak memilih bahkan dipandang sebagai jenis hak asasi manusia yang paling penting karena pelaksanaan berbagai jenis hak asasi manusia lainnya dapat dijamin melalui penggunaan hak pilih tersebut. Selanjutnya tugas negara yang diatribusikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah memberikan akses bagi setiap warga untuk berpartisipasi dalam pemilu. Baik selama tahapan pemilu maupun pada saat pemungutan suara di TPS.

Pemilu 2019 di Sulawesi Tengah beririsan dengan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang meluluhlantakan Kota Palu, Kab Sigi, Kab Donggala dan sebagian Kab. Parigi Moutong yang terdampak bencana. Gempa dahsyat

jdih.kpu.go.id

berkekuatan 7.4 Skala Richter pada 28 September 2019, telah menghempaskan seluruh harapan masyarakat dalam berpemilu termasuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kab/Kota. Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019, bahwa bulan September beberapa tahapan pemilu yang dilaksanakan yakni tahapan Kampanye, Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Sosialisasi dan Tahapan menghadapi hari *voting day* atau pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.

Bencana berupa gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi telah menghilangkan beberapa kelurahan dan desa di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Tercatat korban yang meninggal dan hilang sekitaran 5000 dan yang terluka berat dan ringan, ada ratusan TPS yang hilang di Kota Palu dan Kab. Sigi serta Kab. Donggala. Menghadapi pemilu serentak tahun 2019 masyarakat sangat trauma dengan kejadian ini.

Tahapan Pemilu 2019 yang beririsan dengan bencana yang datang silih berganti berdampak pada berbagai sisi di daerah yang terkena bencana. Mulai dari infrastruktur hingga psikis warga. Apakah warga siap menyongsong Pemilu 2019. Bagaimana tingkat partisipasi. Kemudian, bagaimana peserta pemilu mulai dari caleg DPR RI Dapil Sulteng dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota menyikapinya. Bagaimana pula KPU menyikapi jika ada caleg yang menjadi korban meninggal. Pertanyaan diatas menjadi tantangan penyelenggara pemilu yang melaksanakan pemilu beririsan dengan bencana alam terutama KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Tantangan terberat adalah bagaimana memulihkan psikis masyarakat pemilih untuk tetap tangguh menghadapi pemilu 2019.

Berdasarkan itulah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki strategi sosialisasi di daerah bencana untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 terutama berkaitan dengan hari Pemungutan dan Penghitngan suara.

Pemilu di Daerah Bencana Sulawesi Tengah.

Bencana yang diakibatkan oleh Gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu pada tangal 28 September 2018 terjadi beririsan dengan tahapan Pemilu 2019. Bencana tersebut diketahui disebabkan oleh aktivitas sesar Palu Koro. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis Gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Palu Koro, yang dibangkitkan oleh deformasi dengan mekanisme pergerakan dari struktur sesar mendatar mengiri (slike-slip sinistral). Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan bahwa sesar Palu Koro adalah patahan yang membelah Sulawesi menjadi dua, dimulai dari batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar hingga ke Teluk Bone. Sesar ini dikatakan sangat aktif hingga pergerakannya mencapai 35 sampai 44 milimeter per tahun. Kota Palu berkembang di atas sesar Palu Koro.[2] Sesar Palu Koro merupakan

patahan dengan pergerakan terbesar kedua di indonesia, setelah patahan Yapen, Kepulauan Yapen, Papua Barat, dengan pergerakan mencapai 46 milimeter per tahun. Sesar Palu Koro adalah daerah rawan gempa dengan kemampuan mitigasi yang sangat minim. Gempa ini bukan yang pertama terjadi. Pada tahun 1927, Kota Palu pernah mengalami gempa serupa yang menyebabkan 14 orang meninggal. Kemudian pada tahun 1930, gempa menimbulkan tsunami dua meter dan tidak menyebabkan korban. Kemudian 1996 di selat Makassar, gempa menimbulkan tsunami dengan tinggi 3,4 meter. Lalu tahun tahun 2005 dan 2008 juga pernah terjadi. Gempa dan Longsor bawah laut di teluk Palu berduet memicu tsunami Palu. Gempah magnitudo gempa 7,7 SR dengan aktivitasnya yang saling menggeser telah menyebabkan tsunami dengan ketinggian 0,5 sampai 5 meter, dan menerjang pantai Talise di Kota Palu dan pantai Barat Donggala. Akibat gempa dan tsunami yang terjadi, komunikasi ke wilayah bersangkutan lumpuh total dan telah mengakibatkan ribuan korban jiwa serta sarana dan prasarana kota rusak total. Bencana di Sulawesi Tengah yang terjadi pada tangal 28 september 2018 yang beririsan dengan pelaksanaan Pemilu 2019 telah berdampak pada korban jiwa sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel Data Korban Jiwa Bencana Sulawes Tengah Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Jiwa			Total Korban Jiwa
		Jiwa Meninggal	Jiwa Hilang	Korban di Kubur Massal	
1	Palu	2.608	570	1.016	4.194
2	Sigi	289	116	0	405
3	Donggala	212	19	0	231
4	Parigi Moutong	15	0	0	15
	Total	3124	705	1016	4845

Sumber Data : Laporan Gubernur Sulawesi Tengah 2018

Selain data korban jiwa tersebut, dampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi telah mengakibatkan ribuan pengungsi di empat kabupaten tersebut. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

[2]Bhakti Satrio Wicaksono, KOMPAS.com, 29 September 2018

Tabel Data Pengungsi Bencana Alam Sulawesi Tengah Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Pengungsi		
		Titik Pengungsi	KK	Jiwa
1	Palu	127	11.165	40.738
2	Sigi	160	29.867	93.187
3	Donggala	98	11.478	36.346
4	Parigi Moutong	15	662	2728
	Total	400	53,172	172.999

Sumber Data : Laporan Gubernur Sulawesi Tengah 2018

Bencana alam gempa, tsunami dan likuifaksi telah memberikan dampak duka mendalam bagi warga Sulawesi Tengah. Duka mendalam tidak saja dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah akan tetapi seluruh Indonesia bahkan negara Negara Arab, Eropa dan Asia turut serta memberi keprihatinan dan membantu untuk penanggulangan bencana yang dahsyat itu. Berdasarkan data yang dikemukakan diatas, bahwa jumlah korban jiwa sebanyak 4.845 dan jumlah pengungsi sebesar 172.999 jiwa. Masyarakat yang terkena likufaksi seperti di daeah Petobo, Balaroa dan Jono Oge memperjuangkan nyawanya hidup dan matinya ditengah-tengah puing-puing dan tanah yang bergerak dibawah lumpur telah mengakibatkan trauma mendalam dan panjang terhadap kehidupannya bagi mereka yang masih hidup. Usai dihamtam gempa, tsunami dan likuifaksi Kota Palu, Kab. Sigi dan Kab. Donggala bagaikan kota mati, sarana dan prasana kota rusak total, jaringan komunikasi terputus selama sebulan, jalan transportasi terisolasi ekonomi masyarakat terpuruk banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Secara umum indeks kualitas hidup masyarakat di Kota Palu, Kab. Sigi dan Kab. Doanggala mengalami penurunan berdasarkan perhitungan *Asian Disaster Prepalendness Center* tahun 2018 menyatakan bahwa kualitas hidup masyarakat di tiga daerah tersebut berkisar 29%-41 % terjadi penurunan kualitas hidup pada pasca bencana.[4] Perekonomian masyarakat lumpuh, pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah turun dikisaran -4,49% dari 6,24 % rata rata pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Tengah sebelum bencana. Inflasi meningkat rata-rata 6,63% dari 3,65% (baseline) menjadi 10,28 %, dampak bencana ini pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah akan bisa naik

[4]Abdullah Khusairi dkk, Sulawesi Tengah Bangkit, Jakarta : BNPB, Cet. I, 2019, h. 132
[5] Ibid, h. 135

dikisaran kurun waktu 4 Tahun kedepan pasca bencana dasyat ini.[5] Berdasarkan kenyataan diatas, kualitas hidup yang menjadi rendah, perekonomian menjadi sulit ditandai dengan harga beli masyarakat rendah dan meningkatnya pengangguran maka ketahanan masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilu 2019 perlu ketahanan mental agar pemilih siap dan tangguh mengikuti Pemilu 2019.

Data Pemilih di Daerah Bencana

Salah satu yang menjadi tantangan tahapan Pemilu 2019 di daerah bencana adalah pelaksanaan tahapan penetapan DPT pemilu. Dimana bencana terjadi saat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah giat melaksanakan penetepan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam bencana alam ini korban jiwa sebanyak 4.845 orang dan jumlah pengungsi mencapai 172.999 orang. Dengan adanya bencana alam tersebut tentu saja memengaruhi dan terjadi perubahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Menurut Fadli Ramdhani, Peneliti Perludem, bahwa persoalan yang rentan mengganggu proses pemilu dilokasi bencana antara lain terkait dengan akurasi data pemilih, hal ini disebabkan karena adanya pemilih yang meninggal dunia, mengungsi dan pindah ke daerah lain.[1] Pada saat terjadinya bencana alam, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disaat yang bersamaan sedang melaksanakan tahapan penetapan DPT untuk Pemilu 2019. Kota Palu merupakan salah satu daerah yang data pemilihnya terbanyak dari daerah lain di Sulawesi Tengah. Sebagaimana dibawah ini data DPT digambarkan sebelum dan sesudah bencana alam sebagai berikut

Tabel Data Pemilih Sebelum Bencana Alam Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT		
		Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Palu	106,135	109,532	215,667
2	Sigi	80,698	77,653	158,351
3	Donggala	101.836	98,876	198,711
4	Parigi Moutong	152,118	145,621	297,739
	Total	400	53,172	172.999

Sumber Data : KPU Provinsi Sulawesi Tengah , Tahun 2018

[1]Aryojati Ardipadanto, Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Pemllu,

Tabel Data Pemilih Sesudah Bencana Alam Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT		
		Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Palu	106,135	109,532	215,667
2	Sigi	80,698	77,653	158,351
3	Donggala	101.836	98,876	198,711
4	Parigi Moutong	152,118	145,621	297,739
	Total	400	53,172	172.999

Sumber Data : KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2019

Melihat data pemilih pada sebelum dan sesudah bencana bahwa Kab Sigi, Donggala mengalami kenaikan data pemilih kecuali Kota Palu yang terjadi penurunan data pemilih. Ini disebabkan adanya kebijakan KPU terkait Data Pemilih Tambahan atau DPTb yang terlihat pergerakan pemilih yang masuk dan keluar dengan menggunakan Form A.5 surat pindah memilih dimana KPU Kabupaten/ Kota memetakan kebutuhan pemilih di derah bencana melalui ketersediaan Form A.5 yang pindah memilih masuk dan keluar daerah pemilihan. Sedangkan Kota Palu selain adanya pergerakan pemilih melalui Form A.5, pemilih yang ada di Kota Palu berkurang akibat korban bencana dimana banyak pemilih yang meninggal dunia. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyadari bahwa Data Pemilih yang akurat dan aktual merupakan syarat bagi penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. Disadari demikian, KPU Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan intensitas sosialisasi terkait dengan Data Pemilih di Kota Palu, Sigi dan Kabupaten Donggala. Dengan sosialisasi secara masif melalui pelibatan mitra KPU yakni Instansi terkait pemerintah seperti Dinas Dukcapil, para Camat, Lurah di daerah terkena bencana. Koordinasi dan sosialisasi yang efektif, cepat dan tepat menjadi strategi kerja perbaikan data pemilih yang terkena dampak bencana alam. Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 sebaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018, tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa menyebutkan dalam pasal 36, ayat:

1. Daftar Pemilih di lengkapi dengan daftar pemilih tambahan

2. Daftar pemilih tambahan terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suaranya di TPS lain.

3. Keadaan tertentu yang dimaksud, adalah :
   a. Menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari pemungutan suara
   b. Menjalani rawat inap dirumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampinginya
   c. Penyandang disabilitas yang mengalami perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi
   d. Menjalani rehabilitasi narkoba
   e. Menjalani tahanan dirumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan
   f. Tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah atau tinggi
   g. Pindah domisili
   h. Tertimpa bencana alam[6]

Pada keadaan tertentu sebagaimana huruf (h) diatas, maka KPU dalam hal ini KPU Provinsi, KPU Kota Palu, KPU Kabupaten Sigi, KPU Kota Donggala melakukan perbaikan data pemilih bagi warga yang tertimpah bencana. Beberapa keadaan pemilih terdampak bencana dimana pengungsi yang di relokasi disuatu tempat yang masih berada di daerah kelurahan tersebut seperti Kelurahan Petobo. Akan tetapi di pengungsian kelurahan Petobo yang direlokasi oleh pemerintah daerah tersebut ada juga penduduk yang berasal dari kelurahan lain atau berasal dari Kabupaten Sigi. Pengungsi yang direlokasi di kelurahan lain, yang disebabkan kelurahan tersebut telah hilang karena disebabkan oleh likuifaksi pada saat gempa yang menimpah penduduk tersebut. Seperti: Kelurahan Balaroa Kota Palu dan Desa Jono Oge Kabupaten Sigi. Penduduk yang berasal dari Kelurahan Balaroa mengungsi ke tempat lain yang berbeda kelurahan. Penduduk yang mengungsi atau pindah domisili secara sporadis yang tinggal di kos-kosan atau tenda-tenda dan bahkan hunian sementara di tempat kelurahan dan desa yang berbeda. Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya memberikan informasi kepemiluan terutama terhadap hak memilih bagi korban bencana di daerah pengungsian dimana TPS asal mereka hilang. Bahwa terhadap kebijakan pendataan di daerah pengungsian akibat tertimpa bencana didasarkan pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No 37/2018. Bahwa secara prosedur administrasi data pemilih, DPTb dalam pengungsian yang tertimpa bencana hendaknya juga mempertimbangkan sistem pemilu yang dianut dalam Pemilu 2019, yakni *Proporsionalitas Terbuka*, juga mempertimbangkan representase keterwakilan daerah pemilihan dimana pemilih dan peserta pemilu serta daerah pemilihan memiliki keterkaitan dalam pemilu.[3]

---

[6]Lihat Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018.

[3]https://sulteng.antaranews.com/, 5 Maret 2019,

Saat turun melakukan sosialisasi Pemilu 2019 di lokasi-lokasi pengungsian, umumnya korban bencana mengeluh mengenai tempat tinggal mereka sebelum dan sesudah bencana yang tidak lagi sesuai dengan letak geografis dan administrasi wilayah. Karena itu, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan seluruh jajarannya melakukan pendataan pemilih korban bencana dimana mereka berada atau mengungsi. Saat bencana gempa, tsunami dan likuifaksi menghantam Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala banyak warga yang termasuk sebagai pemilih kehilangan dokumen kependudukan yang dapat memengaruhi status dalam DPT. Tehadap hal ini KPU menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Atas kerjasama itu, masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, dapat melapor ke Disdukcapil, kemudian organisasi perangkat daerah tersebut akan membuat dokumen yang di butuhkan untuk keperluan penyaluran hak memilih.

Melihat permasalahan pemilih secara administratif, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan sosialisasi atau penyampaian informasi terkait dengan kebijakan data pemilih Pemilu di daerah bencana. Dalam masyarakat demokratis, warga negara memiliki hak memilih. Hak yang sangat berharga ini memberikan pemilih peran yang yang sangat penting dalam keadaan apapun termasuk ditimpah bencana. Salah satu ciri kehidupan demokrasi bagi suatu negara adalah adanya pemilu yang didukung oleh pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif. Prinsip inilah dimana KPU Provinsi dan KPU Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki data pemilih dimana daerah yang terkena dampak bencana. Data pemilih terus dikoreksi dan terus dimutakhirkan oleh KPU Kota dan Kabupaten yang terkena bencana. Hal ini dilaksanakan sebagai jaminan bahwa pemilih yang wilayahnya terdampak bencana terus terjaga sehingga pemilih di daerah bencana tidak kehilangan hak pilihnya atau kesulitan dalam hal akses memberikan suaranya di TPS pada pemungutan suara 17 April 2019. Bahwa mewujudkan hak pilih sebagai hak konstitusional ini sejalan dengan pernyataan umum Hak Asasi Manusia.

Dalam pernyataan umum Hak Asasi Manusia Pasal 21 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas. Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dengan tidak dipisahkan dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu: bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh akses yang sama pada pelayanan oleh pemerintahan dalam negerinya. Hal sejalan dengan Pernyataan umum Hak Asasi Manusia PBB Pasal 21 tersebut di atas, terutama Pasal 3 merupakan penegasan asas demokrasi yaitu bahwa kedaulatan rakyat harus menjadi dasar bagi kewenangan pemerintahan dan kedaulatan rakyat melalui suatu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas,

dan rahasia. Pemilu kini telah menjadi *token of membership*[7] bagi sebuah Negara jika ingin bergabung dalam sebuah masa peradaban yang bernama demokrasi. Dalam konteks ini pemilu adalah salah satu ornament paling penting dalam modernitas politik, semenjak demokrasi dan manifestasi proseduralnya menjadi pilihan yang nyaris bagi penyelenggaraan Negara.

TPS Di Daerah Bencana

Dalam Sidang Dewan Parlemen atau *The Inter Parliementary Union* (IPU) ke 154 di Paris bahwa salah satu deklarasi yang dicetuskan adalah (E*very voter has the right to equal and effective access to a polling station in order to exercise his or her right to vote*) bahwa setiap pemilih mempunyai hak dan akses yang sama pada tempat pemungutan suara untuk dapat mewujudkan hak pilihnya.[4]

Berdasarkan prinisif diatas, maka hak-hak warga wajib untuk difasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya. Penyelenggara pemilu tidak boleh menghambat warga negara sebagai pemilih untuk mengakses tempat pemungutan suara nya untuk mewujudkan hak konstitusionalnya termasuk mereka yang terkena bencana. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang dapat menghambat pemilih untuk mengakses TPS nya dalam pemungutan suara termasuk bencana alam.

Kota Palu sebelum bencana terdapat 1.079 TPS setelah bencana TPS di Palu berkurang menjadi 1.075 TPS. Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan dan Kelurahan Balaroa kecamatan Palu Barat Kota Palu hilang. Sebagian penduduk juga ikut hilang. Daerah tersebut tenggelam oleh lumpur setinggi lima meter. Pengurangan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara otomatis disebabkan penyusutan penduduk. Pengurangan TPS di daerah tersebut disebabkan daerah yang hilang. Bisa juga kedua-keduanya. Itu contoh daerah yang di Pemilu 2019 berkurang TPS-nya. Ada kelurahan terkena tenggelam seperti di Petobo dan Balaroa serta beberapa desa di Kabupaten Sigi. Dusun di Sigi juga ada yang tenggelam. Daerah-daerah tersebut bisa dilakukan *regrouping* TPS. Tugas KPU Palu dan KPU Kab Sigi di hari setelah tanggap bencana mengidentifikasi hal tersebut. Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 350 ayat 1, “Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.” Setelah menimbang efisiensi maka jumlah DPT setiap TPS disusutkan menjadi 300 orang dengan tetap tidak menabrak Undang-Undang tersebut. Hal ini terdapat dalam PKPU No. 11 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (3), Penyusunan Daftar Pemilih

[4] Lihat Tjahyo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, Jakarta : Expose, 2015, h. 36

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memerhatikan : a) Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain; b) Kemudahan Pemilih ke TPS; c) Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; d) Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan e) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Sosialiasasi Pemilih Tangguh Bencana

Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan salah satu kegiatan penting bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemilu, hak memilih dan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kegiatan pendidikan pemilih dilaksanakan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat agar mengetahui tahapan pemilu, cara memilih dan kesadaran pemilih terhadap fungsi pemilu itu sendiri. Berbeda hal nya dengan daerah yang normal, di daerah bencana dimana masyarakat menjadi trauma terhadap kehidupannya maka sosialisasi memerlukan strategi yang lebih arif dan bermartabat.

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Salah satu standar pemilu demokratis yaitu pemilu inklusif. Pemilu yang inklusif artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. selanjutnya dalam pemiliu yang penting adalah penerapan asas bebas dalam Pemilu. Kebebasan pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas.

Prasyarat Pemilu yang demokratis diatas, tentu saja menjadi permasalahan baru bagi daerah yang terkena dampak bencana terutama yang mengalami korban jiwa dan fisik. Syarat Pemilu harus inklusif, dimana pelibatan semua kelompok masyarakat harus terpenuhi, maka penyelenggara pemilu perlu memiliki sejumlah inovasi agar masyarakat pemilih memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dimasa-masa bencana tekanan dan trauma psikologis terus membayang-bayangi akan kejadian yang menimpah mereka. Peluang pemilih untuk datang ke TPS saat pemungutan suara menjadi kekhawatiran semua pihak termasuk KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara pemilu di Sulawesi Tengah.

Salah satu program kegiatan KPU dalam pemilih tangguh bencana yakni melaksanakan fasilitasi trauma *healing election* ke tempat tempat pengungsian warga. Kegiatan ini sebagai salah satu pilar untuk memberikan ketahanan psikologi warga pasca bencana di Sulawesi Tengah. Kegiatan dalam bentuk tatap muka, memberi motivasi terhadap warga terdampak bencana agar mereka tangguh dalam ikut serta berpartisipasi dalam pemilu. KPU Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan KPU Kota Palu, Donggala dan Sigi mengoptimalisasikan sosialisasi pemilu, agar pemilih tangguh terhadap bencana alam di Sulawesi Tengah. Keberadaan pemilih yang berbasis pada kelurahan terus diberikan informasi kepemiluan sebagai upaya meningkatkan mitigasi pemilu di daerah bencana melalui partisipasi pemilih. Dalam kegiatan sosialisasi pemilu, masyarakat berbagai unsur dilibatkan agar pemilih mengetahui pentingnya pemilu meski ditengah-tengah rasa ketakutan dan kecemasan mendalam dari pemilih. Beberapa tempat pengungsian masyarakat menjadi basis sosialisasi penyelenggara pemilu langsung ditemui selain dilaksanakan tatap muka juga dilakukan pembagian berupa bantuan sembako dan alat-alat peraga sosiliasi dengan materi hari pemungutan suara Pemilu 2019.

Nilai Budaya Kaili Penopang Partisipasi

Kearifan lokal merupakan warisan leluhur turun temurun mengandung nilai-nilai positif dan nilai-nilai spritual untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku (*pattern of action*). Masyarakat Kaili merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat suku Kaili memiliki seperangkat pengetahuan lokal yang merupakan pola dari budaya Kaili yang mereka wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar bahwa ungkapan pada umumnya menggambarkan latar belakang kehidupan sosial budaya pada suatu komunitas yang diwariskan secara turun temurun dalam bentuk pertama “sisidu“ atau pantun kilat, kedua, “vaino atau kajori“ bersifat pantun, ketiga “tindua“ bersifat syair. Makna ungkapan itu berupa nasehat misalnya untuk berbuat baik, mematuhi norma-norma adat istiadat, nasehat untuk meninggalkan perbuatan yang tercela, sikap dan perilaku yang bersifat kewenangan dan tidak bertanggung jawab[3]. Pesan-pesan yang disampaikan itu diperuntukkan kepada kelompok-kelompok atau unit-unit sosial termasuk generasi muda (remaja putra-putri) dan anggota masyarakat lainnya.

Secara budaya, masyarakat Kota Palu, Kab. Sigi dan Kab. Donggala adalah suku asli Kaili yang memiliki nilai adat istiadat yang mendukung terhadap demokrasi. Masyarakat suku Kaili meyakini

[3] Lihat Tjahyo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, Jakarta : Expose, 2015, h. 36

terhadap seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab dan amanah untuk mengurus negara dan pemerintahan. Sebagaimana dalam bahasa Kaili yakni;

"*da ri uluna da nasiromu di layanpa Nopenga-pengamo*" artinya dari hulunya masih bersatu, dihilirnya bercabang-cabang. Maksudnya ungkapan ini merupakan nasehat bagi orang-orang yang diserahkan tugas dan tanggung jawab untuk tidak disalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang dipercayakan oleh masyarakat. Sebaliknya jika bertindak "semau gue" menurut kemauan sendiri, merupakan pertanda awal perpecahan yang mengakibatkan kesatuan dan persatuan tak dapat lagi dipertahankan, karena memunculkan terjadinya disharmonisasi dalam perkawanan atau persahabatan baik individu, kelompok maupun masyarakat. Makna ungkapan lebih luas kalau diterjemahkan berupa pesan agar tetap menjaga persatuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara[7].

Bahwa nilai adat ini sebagai suatu kearifan lokal yang menjadi pilar penopang masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu 2019. Nilai budaya suku Kaili ini menjadi sistem kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap kepemimpinan. Sistem kepercayaan ini sangat erat kaitannya dengan doktrin teologi atau nilai sosial budaya yang selaras dengan dukungan terhadap pemilu dan demokrasi. Sistem kepercayaan yang secara idiologis menerima sistem demokratisasi baik secara individual maupun secara sosial yang berkembang dimasyarakat Kaili Kota Palu, Sigi dan Donggala. Sehingga kepercayaan ini menjadi salah satu pendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan demokrasi.

Sosialisasi pemilu serentak 2019 di daerah bencana dengan misi program pemilih tangguh bencana ini dilakukan melalui Relawan Demokrasi yang dibentuk di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Relawan Demokrasi berjumlah 55 relawan setiap Kabupaten dan Kota. Relawan ini secara masif melakukan sosialisasi di tempat-tempat pengungsian masyarakat yang terdampak bencana alam likuifaksi dan tsunami Palu. Saat hari pemungutan suara, warga berbondong-bondong ke TPS disebabkan satu keyakinan.

Melalui Basis Relawan Demokrasi

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU dan dilaksanakan di KPU Provinsi serta KPU Kab/Kota Se Sulawesi Tengah, melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis

[7] Ibid

jdih.kpu.go.id

pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara. Peran strategis relawan demokrasi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala pada pasca Bencana yakni ikut serta membangun semangat dan memulihkan psikologi pemilih.

Untuk membangkitkan semangat masyarakat berdemokrasi pada masa dan pasca Pemilu, KPU Provinsi Sulawesi Tengah membentuk relawan demokrasi yang terdiri atas sebanyak 55 orang di setiap kabupaten/kota. Tugas utama Relawan Demokrasi pada masa Pemilu terutama di daerah bencana adalah meningkatkan kesadaran rakyat tentang pentingnya pemilihan umum, dan mendorong pemilih untuk hadir di TPS pasca bencana dalam menentukan pilihan mengenai partai atau calon yang akan dipilih.[9] Melalui Relawan Demokrasi kualitas penyelenggaraan pemilihan di daerah bencana dapat berjalan demokratis dan masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam mengikuti tahapan pemilu meski ditengah-tengah tertimpa bencana alam.

Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu di daerah bencana. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Keberadaan pemilih Tangguh Bencana, diharapkan bisa memunculkan relawan-relawan dari masyarakat. Pentingnya pemahaman masyarakat mengenai kepemiluan di daerah bencana sangat strategis dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Metode ini dilaksanakan sejak dini pada pasca bencana dan dari level paling bawah, supaya masyarakat lebih peduli terhadap pemilu dan demokrasi dilingkungan tempat tinggal mereka. Harapan penyelenggara pemilu dengan sosialisasi secara masif dilevel paling bawah kepada pemilih terdampak bencana alam, mereka bisa bertahan dan Tangguh Bencana

[9] www. http//Kabar Selebes, id, 18 Januari 2019,

agar bisa meningkatkan peran sertanya menghadapi Pemilu 2019. Warga yang ikut sosialisasi diharapkan dapat menyebarluaskan informasi kepemiluan kepada masyarakat lainnya di tempat tinggal pengungsian. Mereka harus menginformasikan ke masyarakat agar mengenali pemilu di daerah bencana masing-masing. Pembentukan pemilih Tangguh Bencana yang dilakukan melalui relawan demokrasi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala diperlukan sebagai sarana dan wadah bagi masyarakat dan penyelenggara pemilu terhadap informassi kepemiluan. Relawan Demokrasi yang dibentuk menjadi penggerak demokrasi dan pemilu di daerah bencana terutama di tempat tempat pengungsian masyarakat pemilih.

Partisipasi Pemilih di Sulawesi Tengah

Pemilu menjadi aspek penting dalam mengokohkan demokrasi sebagai pilihan rezim terbaik dalam pengorganisasian politik di negara-negara *modern* termasuk di Indonesia. Salah satu problem pengorganisasian politik dalam negara demokrasi adalah rendahnya partisipasi politik masyarakat didalamnya. Padahal partisipasi menjadi instrumen penting dalam mengukur suatu keberhasilan pemilu diluar parameter-perementer lainnya yakni *free and fair*, kemampuan mengelola konflik dalam pemilu dan terpilihnya calon yang kredibel dan berintegritas dalam kontestasi politik pemilu.

Di Indonesia dikenal adanya siklus penyelenggaraan pemilu oleh T*he International IDEA* melihat proses pemilu sebagai sebuah siklus yang tak terputus. Dalam siklus tersebut ada tiga periode, pertama periode pra-pemilu, periode Pemilu, dan periode pasca-pemilu. Dalam siklus tersebut yang termasuk dalam siklus pemilu antara lain misalnya; penyusunan dan perancangan peraturan terkait pemilu, termasuk pembuatan Undang-Undang pemilu, rekrutmen para penyelenggara pemilu, penjadwalan pemilu, proses pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, kampanye, proses pemungutan suara, penghitungan suara, penyelesaian perselisihan hasil pemilu, pelantikan calon terpilih, pelaporan hasil penyelenggaraan Pemilu. Salah satu kesuksesan Pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat atau pemilih dalam setiap tahapan pemilu.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, partisipasi pemilih sangat tinggi. Target partisipasi pemilih dalam pemilu serentak 2019 yakni 77,50%, di Provinsi Sulawesi Tengah capaian tingkat partisipasi pemilih yakni 83.90%. Sebaran angka partisipasi pemilih di Kabupaten /kota se-Sulawesi Tengah sangat tinggi termasuk di daerah yang terkena dampak bencana terparah. Capaian itu dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel Persentase Surat Suara Tidak Sah Pemilu 2019 di Sulteng

No	Kabupaten/Kota	Persentase (%)
1.	Sulawesi Tengah	83,90
2.	Banggai Kepulauan	89,12
3.	Poso	88,8
4.	Kota Palu	86,5
5.	Banggai laut	84,74
6.	Morowali Utara	84
7.	Buol	83,68
8.	Sigi	81,81
9.	Parigi Moutong	80,50
10.	Banggai	80,8
11.	Toli Toli	85,11
12.	Morowali	84,16
13.	Tojo Una Una	81,71
14.	Donggala	80,44

Sumber data : diolah dari laporan Tingkat Partisipasi Pemilih KPU Kabupaten/Kota se Sulteng Tahun 2019

Berdasarkan tabel data diatas, menunjukan bahwa kualitas pemilih di Sulawesi Tengah sangat baik. Disebabkan indikator atau ukuran persentase suara tidak sah dalam mencoblos di TPS saat hari pemungutan suara sangat rendah. Hal ini menunjukan bahwa meskipun tingkat kerumitan atau kesulitan surat suara dirasakan oleh pemilih akan tetapi pengetahuan pemilih dalam mencoblos sangat baik. Apalagi dengan 5 jenis surat suara yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masyarakat dengan pengetahuan yang baik dapat mencoblos surat suara dengan sah.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara pemilu memiliki desain sosialisasi yang dianggap strategis dapat meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam tahapan dan proses pemilu. KPU telah melakukan kebijakan lingkup strategi desain sosialisasi. Dalam setiap struktur dan jenjang KPU diharapkan sebagai lokomotif dalam menyebarkan informasi kepemiluan secara terstruktur, sistematis dan masif. KPU Provinsi Sulawesi Tengah membuat kebijakan bahwa Badan Adhoc penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS dan KPPS dijadikan sebagai duta sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Badan Adhoc diberi tugas untuk secara bersama-sama mensosialisasikan tahapan pemilu di tingkat Kecamatan dan tingkat desa/

kelurahan.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga mengemas program kegiatan yang melibatkan stakeholder lain agar turut serta berpartisipasi dalam pemilu. Misalnya saja Perguruan Tinggi, Pers media, pemerintah, Badan Swasta, kelompok strategis lainnya seperti Ormas, LSM, Penyandang Disabilitas, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh perempuan dan lain sebagainya. Pengemasan aktivitas sosialisasi dan peningkatan partisipasi dalam konsep electiontainment dilakukan dengan membuat materi sosialisasi sederhana, materi nya mudah dipahami oleh masyarakat atau pemilih. Pengemasan produk sosialisasi dilakukan dengan cara yang menghibur, ringan dan ramah.

Konsep dan metode sosialisasi berbasis keluarga menjadi salah satu metode strategis bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada sosialisasi Pemilu 2019. KPU Provinsi mengemas dengan mensosialisasikan sampai menyentuh pada generasi milenial atau pemilih muda. Anak muda umumnya apatis bahkan menganggap politik adalah dunia nista. Paradigma sosialisasi berbasis keluarga sangat efektif dilaksanakan di daerah bencana. KPU Provinsi Sulawesi Tengah memnafaatkan relawan demokrasi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala untuk melaksanakan pendidikan pemilih dari pintu ke pintu warga. Terhadap warga dipengungsian, para relawan demokrasi menelusuri dari barak ke barak pengungsian warga yang tertimpa bencana.

Pemanfaatan *Branding* Sulteng Bangkit

Branding Sulteng Bangkit, menjadi pemantik bagi pemilih tangguh bencana. Ditengah-tengah trauma mendalam bagi warga yang tertimpa bencana, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemetaan warga terutama mereka yang telah memafaatkan kembali media sosial sebagai komunikasi publik. Secara psikologi branding Sulteng Bangkit, dimanfaatkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyasar pemilih yang terdampak bencana. Beberapa sasaran sosialisasi dalam membangkitkan ketahanan pemilih milenial yakni; pemilih milenial atau pemilih muda melalui berbagai bentuk kegiatan yakni konser musik, lomba jingle pemilu, Lombah mural, KPU *Fun Run*. Kegiatan yang sifatnya *electiontaiment* sebagai metode dan strategi menggaet pemilih untuk melupakan beban psikologi setalah bencana terjadi. Generasi milenial berumur antara 17-37 tahun, generasi ini sangat berbeda dari generasi sebelumnya, terutama dalam penguasaan teknologi. Mereka lebih akrab dengan dunia maya, khususnya penggunaan media sosial. Generasi milenial memiliki ciri khas tersendiri, ia terlahir ketika era di mana sudah ada televisi berwarna, telepon seluler dan internet. Sehingga generasi ini mahir dalam memanfaatkan teknologi modern. Program Sulteng Bangkit oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dimanfaatkan oleh KPU Provinsi sebagai sarana sosialisasi pada warga yang terkena dampak bencana. Branding Sulteng Bangkit merupakan modal sosial bagi warga untuk ikut serta berpertisipasi dalam Pemilu. Kemasan Sulteng Bangkit, menjadi pilar sosial bagi warga masyarakat untuk memperbaiki dan bertahan dari keterpurukan akibat bencana alam. KPU Provinsi Sulawesi Tengah memanfaatkan branding Sulteng Bangkit di media sosial dalam sosialisasinya sebagai ikon dalam melaksanakan pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah. Terhadap kehidupan politik, setiap warga mempunyai karakter masing-masing. Perilaku pemilih sangat didorong oleh informasi yang diterima melalui penyelenggara pemilu atau peserta pemilu. Memanfaatkan sosialisasi melalui media dengan branding Sulteng Bangkit telah menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan politik dan pemilu bagi Pemilih. Sosial media merupakan suatu bentuk perubahan dalam cara komunikasi publik dalam menyampaikan pesan kepemiluan.

Penutup

Pemilu di daerah bencana, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah memberi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2019. Salah satu tantangannya yakni upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemilu. KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan sosialisasi pemilu dengan berbagai strategi salah satunya adalah sosialisasi berbasis pemilih tangguh bencana. Pemilih tangguh bencana ini dengan mengadopsi nilai-nilai budaya masyarakat Kaili yang dikemas dalam berbagai materi sosialisasi. Melalui Relawan Demokrasi yang dibentuk oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan sosialisasi di tempat-tempat pengungsian, memberikan ketahanan bagi masyarakat untuk memahami dan menumbuhkan kesadaran terhadap pemilu di Sulawesi Tengah. Strategi itu dilakukan melalui upaya penyebaran bahan media sosialisasi, tatap muka,

jdih.kpu.go.id

Daftar Pustaka

Abdullah Khusairi dkk, Sulawesi Tengah Bangkit, Jakarta : BNPB, Cet. I, 2019,

Aryojati Ardipadanto, Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Pemllu,

Sahran, Raden, *Hukum Pemilu, Pendekatan Interdisipliner dari Dekontruksi sampai Implementasi*, Yogyakrta, : Cakrawala, 2019, h. 45

Sukmawati Saleh, Kearifan Lokal Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah, Tulisan dalam Jurnal Academica FISIP Untad, hal 131, 2013

Sri Budi Eko Wardani, dkk, *Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*, Jakarta : Perludem, 2014, h. 122

Tjahyo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta : Expose, 2015,

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Daftar Pemilih Pemilu 2019

www. http//Kabar Selebes, id, 18 Januari 2019,

https://sulteng.antaranews.com/, 5 Maret 2019

https://hasanuddinali.com// 2018/09/13,

http://kompas.com, 29 September 2018

Kegiatan Sosialisasi Kepemiluan di daerah rawan bencana

Pendistribusian Logistik Pemilu 2019

Relawan Demokrasi: Upaya Membangun Kesukarelaan Warga Dalam Pemilu (Electoral Volunteerism)

Oleh Diana Ariyanti
Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah

Tantangan dan Urgensi Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu melalui pemilihan pemimpin daerah atau pemimpin negara, serta memengaruhi kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung (Budiardjo, 1982: 1-2). Partisipasi dalam Pemilihan Umum (*voter turnover*) merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik, dan merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dalam demokrasi. Partisipasi politik, termasuk didalamnya partisipasi dalam pemilihan umum, adalah tindakan seseorang warga negara biasa yang dilakukan secara sukarela untuk memengaruhi keputusan-keputusan publik (Verba dan Nie, 1972; Parry, Moyser, dan Day, 1992 dalam Mujani, Liddle, dan Ambardi, dalam Morissan, 2016: 96-113),.

Keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik ini dapat dikategorikan ke dalam 4 tingkatan. Pertama, Apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, Spektator yang berarti orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. Ketiga, Gladiator yang berarti mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yaitu sebagai komunikator, aktifis partai, dan sebagainya. Keempat, Pengkritik, yaitu orang-orang yang terlibat dalam bentuk partisipasi non-konvensional (Milbrath dan Goel, 1977 dalam Surbakti, 1992: 142-143).

Gejala apatisme politik di Indonesia telah membuat peningkatan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum (golput). Tidak ikutnya masyarakat dalam pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh politik atau kurang memahami permasalahan politik. Faktor lain adalah ketidakyakinan akan tingkat keberhasilan dalam memengaruhi kebijakan pemerintah melalui Pemilu. Ada pula pertimbangan bahwa ketidakikutsertaan adalah hal yang terpuji karena dirinya kebetulan berada dalam lingkungan (minoritas) sehingga sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih. Gejala tersebut melingkupi budaya politik kontemporer saat ini.

jdih.kpu.go.id

Persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 2004, 2009, 2014, 2019 serta Pemilihan Gubernur tahun 2008, 2013, 2018 di Provinsi Jawa Tengah cenderung dinamis, seperti terlihat pada grafik 1 di bawah. Dibandingkan dengan pencapaian partisipasi pengguna hak pilih pada Pilpres 2019, pencapaian Provinsi Jawa Tengah (80,21 persen) masih berada dibawah rata-rata tingkat nasional yaitu 81,97 persen. Hal serupa juga dialami pada Pemilu DPR RI yaitu 80,04 (Jawa Tengah) dan 81,69 (tingkat nasional). Angkat partisipasi tersebut malampaui target yang ditetapkan secara nasional sebesar 77,5 persen (KPU RI, 2019).

Grafik Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu dan Pilgub Di Provinsi Jawa Tengah

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah (2008, 2013, 2018, 2019).

Menurunnya persentase jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 tersebut melawan trend golput secara nasional pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, tingginya angka golput berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Menguatnya golput dapat berdampak pada penurunan tingkat partisipasi Pemilu pada masa yang akan datang. Tingginya angka golput juga dapat mengurangi tingkat legitimasi moral dari masyarakat terhadap hasil Pemilu, serta berpotensi merembet kepada ketidakpercayaan terhadap pemerintahan terpilih. Apatisme terhadap politik tersebut dapat berakibat pada ketidakmauan warga untuk berpolitik, apalagi masuk partai politik, bahkan dapat mengancam masa depan demokrasi. Apatisme

warga juga ditampakkan pada kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (seperti Partai Politik, DPR, dan Birokrasi). Hasil Survei Indobarometer (Maret 2017) mengungkap sebanyak 62,9 persen masyarakat merasa tidak dekat dengan partai (tempo.co dalam Pubolaksono, 2018: 18). Senada dengan hal tersebut, Survei SMRC (Mei 2017) menunjukkan bahwa DPR dan Partai Politik (Parpol) merupakan lembaga yang paling mendapatkan kepecayaan publik terendah berturut-turut 63 persen untuk DPR dan 56 persen untuk Partai Partai Politik (katadata.com dalam Purbolaksono, 2018: 18). Kepercayaan publik terhadap partai cenderung menyebabkan lemahnya ikatan antara publik dengan partai. Ketidak pedulian warga kepada politik mengancam pada ketidakpedulian warga terhadap kemajuan Negara.

Artikel ini memaparkan upaya yang dilakukan oleh KPU Provinasi Jawa Tengah bersama KPU Kabupaten/Kota dalam rangka menumbuhkan kesukarelaan warga masyarakat terutama dalam partisipasi politik pada Pemilu 2019 melalui Program Relawan Demokrasi. Relawan Demokrasi (Relasi) merupakan anggota masyarakat yang difasilitasi dan dikuatkan sehingga mampu berperan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi terutama di komunitasnya dan bersinergi dengan KPU Kab/Kota dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pada bagian awal artikel ini, penulis ketengahkan konsep Relawan Demokrasi secara sederhana, selanjutnya penulis paparkan pratik-praktik fasilitasi pengelolaan Relasi serta pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan program pada Pemilu 2019.

Upaya Penguatan Partisipasi Melalui Relawan Demokrasi

1. Partisipasi Politik Dalam Pemilu

Partisipasi adalah tindakan, bukan keinginan, maksud, minat, suka, atau sikap pada umumnya. Partisipasi juga bukan bicara, misalnya membicarakan atau mendiskusikan masalah-masalah politik atau pemerintahan. Mujani, Liddle, dan Ambardi (2012: 5) mengutip Brady (1999) dan Conway (2000) menyatakan bahwa minimal empat unsur yang harus hadir dalam suatu entitas yang disebut partisipasi politik, yaitu, (1) tindakan; (2) oleh orang biasa; (3) dilakukan secara sukarela; dan (4) untuk memengaruhi kebijakan publik.

Dalam pemahaman yang sama, Surbakti (1992: 140-142) memberi rambu-rambu atau batasan mengenai partisipasi politik yakni, pertama, partisipasi politik merupakan kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini dikarenakan sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Kedua, kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku

pembuat dan pelaksana keputusan politik. Ketiga, kegiatan yang berhasil dan efektif maupun yang gagal memengaruhi pemerintah. Keempat, kegiatan memengaruhi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui kelompok penekan. Kelima, kegiatan memengaruhi pemerintah dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tanpa kekerasan, seperti terlibat aktif dalam pemilu, mengajukan petisi, menulis surat, maupun kegiatan non-konvensional dan dengan kekerasan (*violence*) seperti demonstrasi pembangkangan, mogok dan sebagainya.

Partisipasi warga dalam politik dapat dilakukan atas kesadaran sendiri (otonom) atau pun dilakukan melalui desakan (intervensi) dan paksaan dari pihak lain (mobilisasi). Huntington dan Nelson (1983) mencermati bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Menurut Max Weber masyarakat melakukan aktivitas politik karena, pertama alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.

Merujuk pada The 1995- 1997 World Trade Survei, Charles Andrain dan James Smith (2006: 67) mengelompokkan tiga bentuk partisipasi, yaitu, pertama partisipasi yang lebih pasif. Di dalam tipe pertama ini, partisipasi dilihat dari keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang itu melihat politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering berdiskusi mengenai isu-isu politik dengan teman. Kedua, partisipasi yang lebih aktif. Fokus perhatiannya adalah sejauh mana orang itu terlibat dalam organisasi-organisasi atau asosiasi- asosiasi sukarela (*voluntary associations*) seperti kelompok-kelompok keagamaan, olah raga, pecinta lingkungan, organisasi profesi, dan organisasi buruh. Ketiga, partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, melakukan boikot, dan demonstrasi.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Ukuran partisipasi bukan sekedar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara (*voter turn out*), melainkan keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan (KPU RI, 2019). Agustino (2009: 189) menyatakan bahwa partisipasi poltik warga disaat pemilihan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaraan masyarakat.

Oleh karena itu partisipasi politik tidak cukup dimaknai sebagai kehadiran warga dalam memberikan suara pada waktu pemilihan secara prosedural, melainkan wujud partisipasi substantif dari pemilih cerdas yang mampu menentukan pilihan pada kandidat yang benar, serta memahami relevansi pemilihan dalam proses demokrasi.

Perilaku pemilih dalam Pemilu menurut Arianto (2011: 53) dapat dibagi menjadi 2 yaitu perilaku memilih (voting behavior) dan perilaku tidak memilih (*non voting behavior*). KPU Kabupaten Pemalang (2019) menemukan sejumlah faktor yang memengaruhi perilaku memilih masyarakat dalam Pemilu 2019 yaitu: (a) keyakinan agama (terutama agama Islam) tentang kewajiban pemeluk agama untuk memilih pemimpinnya yang disampaikan oleh organisasi keagamaan maupun tokoh/pimpinan keagamaan; (b) motivasi warga untuk memenangkan calon yang berasal dari daerah setempat (desa); (c) tingkat pendidikan warga yang berkontribusi pada kemudahan menerima informasi Pemilu; (d) efekifitas sosialisasi Pemilu yang sampai kepada pemilih karena inovasi dalam metode dan kedekatan pelaku sosialisasi dengan sasaran; (e) mobilisasi dengan pembelian suara/politik uang. Sebaliknya faktor yang memperngaruhi perilaku tidak memilih meliputi: (a) pemilih tidak berada di lokasi karena merantau; (b) lanjut usia atau usia tua dan kondisi kesehatan yang lemah serta izin dari keluarga pemilih; (c) apatisme terhadap politik; (d) waktu pelaksanaan Pemilu yang berdekatan dengan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa; (e) Kesulitan administrasi mengurus surat pindah memilih.

Basrianto (2019: 4-5) menjabarkan faktor apatisme terhadap politik dengan lima alasan yaitu: (a) merasa tidak diakomodasi agenda yang hendak diperjuangkan, (b) calon yang ada tidak menjawab ekspektasi mereka (kelompok tidak memilih); (c) kesulitan mengurus surat pindah memilih di TPS lain; (d) desain Pemilu yang didominasi oleh isu-isu Pilpres dan isu Pileg tidak muncul; (e) pesimis terhadap hasil penyelenggaraan pemilu yang tidak berdampak langsung pada dirinya. Basrianto mengusulkan 3 rekomendasi, yaitu: (a) sosialisasi secara lebih maksimal oleh KPU terutama tentang 5 jenis pemilihan pada Pemilu 2019 dan tidak hanya Pilpres yang mendominasi wacana publik; (b) penyadaran kepada publik bahwa Pemilu merupakan salah satu agenda penting yakni metode penggantian kepemimpinan yang sah dalam Negara demokrasi; serta (c) kandidat capres-cawapres harus menampilkan kampanye yang mendidik tidak menyebar hoaks, fitnah dan saling menjelekkan persoalan personal lawan.

Tidak mudah menaikkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang professional dan berintegritas. Perananan kualitas peserta pemilu sangat

berpengaruh, seperti kualitas Daftar Calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Dengan kata lain, partisipasi pemilih dalam Pemilu juga ditentukan oleh kinerja partai politik dan rekam jejak calon/kandidat (KPU RI, 2019: 2).

2. Konsep Relawan Demokrasi

Program Relawan Demokrasi (Relasi) adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program Relasi melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dengan menempatkan mereka sebagai pelopor (pioneer) demokrasi, terutama bagi komunitasnya. Relawan Demokrasi menjadi mitra KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis Kabupaten/Kota. Melalui sinergi peran ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal (KPU RI, 2019: 2).

Trend penurunan partisipasi pemilih secara nasional menginspirasi gagasan program Relawan Demokrasi ini. Relasi dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan mengantisipasi atas sejumlah situasi, seperti: kejenuhan dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaraan masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program Relasi juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi secara substansi yang ditandai dengan penggunaan hak pilihnya secara cerdas, tidak terjebak dalam pragmatisme kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Diantara penyebab pragmatisme pemilih adalah tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (voluntarisme) dalam agenda pencerdasan pemilih, serta masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu (KPU RI, 2019: 2).

Relasi menjadi strategi alternatif untuk membantu menyebarluaskan informasi-informasi mengenai Pemilu, baik pengetahuan tentang teknis dan tata cara pelaksanaan pemilu maupun pendidikan politik bagi warga tentang demokrasi. Relasi juga diharapkan mampu menjembatani antara KPU sebagai penyelenggara Pemilu dengan berbagai elemen masyarakat dalam menyampaian fakta dan informasi lain terkait penyelenggaraan Pemilu.

jdih.kpu.go.id

Srategi fasilitasi peran serta masyarakat menjadi pelopor (pioneer) demokrasi dimulai pada sepuluh basis pemilih sebagai Relawan Demokrasi. Relawan Demokrasi mendapatkan penguatan untuk mampu berperan sebagai penyuluh dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis pemilih. Latar belakang maupun sasaran sosialisasi oleh Relasi fokus pada 10 segmen/basis pemilih. Segmentasi dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU Kabupaten/Kota. Segmentasi juga sebagai strategi baik dari sisi kuantitas jangkauan maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara. Sementara sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota fokus pada segmen dan wilayah yang tidak terjangkau oleh Relasi karena alasan geografis, di luar basis pemilih atau alasan lainnya.

Kesepuluh basis pemilih prioritas tersebut didasarkan pada mandat Pedoman Program Relasi Pemilu Tahun 2019, seperti pada bagan 1 berikut.

Sebelas Basis Pemilih Pada Progam Relasi Pemilu 2019

Sumber: KPU RI, 2019

Pemilihan prioritas 10 basis pemilih juga disandarkan pada sejumlah argumen seperti pada tabel 2 berikut.

No	Basis Pemilih	Argumentasi
1.	Basis Keluarga	• Keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat dan merupakan landasan dasar semua institusi; • Semua basis pemilih akan bersinggungan dan pasti terkait/tidak bisa dilepaskan dari basis keluarga.
2.	Basis Pemilih Pemula (*first time voters*); pemilih usia 17-21 tahun	• Kecenderungan penggunaan hak pilih ditentukan ketika pertama kali memasuki usia pemilih, mereka yang tidak menggunakan hak pilih ketika pertama kali memasuki usia memilih cenderung akan melakukan tindakan serupa pada pemilu berikutnya; • Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi yaitu sebagai penggerak perubahan; • Mahasiswa merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.
3.	Basis Pemilih Muda; pemilih usia 22-30 tahun	• Jumlah mereka cukup signifikan (banyak) dalam komposisi/struktur pemilih; • Mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama; • Dibutuhkan edukasi secara terus menerus agar kepercayaan mereka terhadap pemilu sebagai instrumen demokrasi semakin kuat dan mendalam; • Perilaku mereka rawan tergerus oleh apatisme maupun pragmatisme politik yang akan merusak kualitas demokrasi.

jdih.kpu.go.id

No	Basis Pemilih	Argumentasi
4.	Basis Pemilih Perempuan	• Memiliki peran strategis dalam mendidik anak untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan terutama di keluarganya/ komunitasnya; • Memiliki pengaruh besar dalam membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku anak; • Membangun pengalaman anak dalam pembuatan keputusan keluarga dan perilaku dasar kompetisi politik saat menjadi dewasa; • Jumlah pemilih perempuan berimbang dengan jumlah pemilih laki-laki, namun kapasitas dan pendidikan masih terbatas sehingga mudah dimobilisasi secara politik; • Peran-perannya dikonstruksi secara sosial pada setor domestik dan melupakan peran pada sektor publik.
5.	Basis Pemilih Penyandang Disabilitas	• Terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggara pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbatasan yang mereka miliki • Banyak ragam disabilitas dan perbedaan kebutuhan layanan dari setiap jenis disabilitas.
6.	Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus;	• Wilayah terpencil, penghuni Lembaga Kemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, masyarakat adat; • Minimnya informasi Pemilu yang dapat sampai kepada mereka; • Tinggal di wilayah yang mempunyai kekhususan dari aspek aksesbilitas yang sulit dijangkau dan tidak semua orang bebas memasuki area mereka
7.	Basis Pemilih Marginal	• Tidak memiliki sumberdaya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup sehingga tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik;
8.	Basis Komunitas	• Memiliki ikatan kesamaan nilai, kepentingan dan kemandirian yang kuat sehingga jika dapat merangkul aktor yang berpengaruh dapat mempengaruhi semua anggota komunitas.

Sumber: Diolah dari Pedoman Pelaksanaan Relasi Pemilu Tahun 2019

No	Basis Pemilih	Argumentasi
9.	Basis Keagamaan	• Pendekatan elitis selama ini kepada tokoh-tokoh agama belum menyentuh kepada jamaah karena keterbatasan elit keagamaan; • Memiliki forum-forum keagamaan sebagai saana sosialisasi dan pendidikan pemilih secara popular yang menyentuh jamaah; • Jumlah pemilih yang signifikan, tidak imbang dengan jumlah elit/tokoh.
10.	Basis Warga Internet (Warganet)	• Jumlah pengguna internet yang menggunakan perangkat bergerak (*mobile gadget*) cukup banyak yaitu 70 persen dari pengguna internet (132,7 juta orang) yang diasumsikan sebagai pemilih • Akses informasi melalui internet tanpa terkendala ruang dan waktu dengan intesitas komunikasi dan persebaran informasi yang tinggi; • Diskursus politik, demokrasi dan pemilu di dunia maya harus mampu diimbangi dengan konten/komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik melalui web site dan media sosial.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi diharapkan dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi Pemilu 2019 meningkat secara kuantitas dan kualitas.

3. Fasilitasi dan Pengelolaan Relawan Demokrasi

Fasilitasi dan pengelolaan Program Relasi oleh KPU Kabupaten/Kota diorientasikan agar mampu membangun hubungan kemitraan KPU Kabupaten/Kota dengan Relasi. Tahapan yang dilaksanakan meliputi: (a) rekrutmen Relawan Demokrasi, (b) peningkatan kompetensi dengan metode Training of Trainer (ToT) serta perencanaan sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih, (c) pelaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, (e) monitoring, pengawasan dan evaluasi serta penyusunan laporan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu 2019. Program ini dilaksanakan pada akhir Januari 2019 sampai menjelang hari pemungutan suara, 17 April 2019.

3.1. Pembentukan Relawan Demokrasi

Relawan Demokrasi terbuka bagi semua warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat seperti: (a) berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar namun khusus untuk basis pemilih pemula harus berusia 25 tahun, (b) berpendidikan minimal SLTA atau sederajat, (c) berdomisili di wilayah setempat dan sedapat mungkin setiap kecamatan ada perwakilan warga yang menjadi Relasi, (d) non-partisan tidak menjadi anggota parpol minimal dalam 5 (lima) tahun, (e) memiliki komitmen menjadi relawan, (f) terdaftar sebagai pemilih, (g) memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, (h) bertanggung jawab dan berakhlak baik, (i) bukan bagian dari penyelenggara pemilu, (j) memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan, (k) membuat program kerja yang akan dilaksanakan (KPU RI, 2019: 4-5).

Rekrutmen Relasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota maksimal 55 (lima puluh lima) orang, setiap basis pemilu diupayakan terdiri dari minimal 4 (empat) relawan. Rekrutmen Relasi dilakukan dengan mekanisme pengumuman kepada publik atau instansi strategis setiap basis masyarakat serta rekomendasi dari insatansi strategis setiap basis masyarakat, penyerahan berkas administrasi oleh calon relawan kepada KPU Kab./Kota, seleksi administrasi dan wanacara kompetensi para pendaftar. Rekrutmen dilaksanakan pada pertengahan Januari 2019 dan paling lambat 17 Januari 2019.

Petujuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu Tahun 2019 oleh KPU RI yang diterbitkan menjelang pendaftaran reasi, membantu KPU Kab./Kota dalam melaksanakan seleksi Relasi. Dinamika dalam rekrutmen tidak bisa dihindarkan. Animo masayarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Relasi tidak merata untuk masing-masing basis pemilih. Basis pemilih keagamaan dan organisasi masyarakat (ormas), basis kelompok berkebutuhan khusus, basis warga internet (warganet), basis komunitas, serta basis pemilih marginal minim pendaftar (KPU Kab. Magelang, 2019). KPU Kab./Kota mengembangkan strategi seleksi melalui jalur usulan dan rekomendasi dari organisasi/kelompok komunitas basis pemilih tersebut, serta melakukan jemput bola atau berkirim surat kepada organisasi yang menaungi lima basis pemilih tersebut. Pendaftar dari basis pemula dan pemuda cukup tinggi sehingga KPU meningkatkan standar seleksi administrasi dan wawancara. Petunjuk teknis juga berdampak pada masa pendaftaran seleksi Relasi yang terlalu singkat. KPU Kab./Kota dituntut untuk lebih mengefektifkan publikasi melalui group WA Group, media sosial (facebook, instagram, twitter) bahkan komunikasi antar personal.

Jumlah Relasi pada KPU Kab./Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1915 relawan. Komposisi jumlah laki dan perempuan diupayakan minimal memenuhi kuota 30% perempuan, bahkan pada beberapa basis lebih banyak perempuannya, seperti terlihat pada grafik berikut.

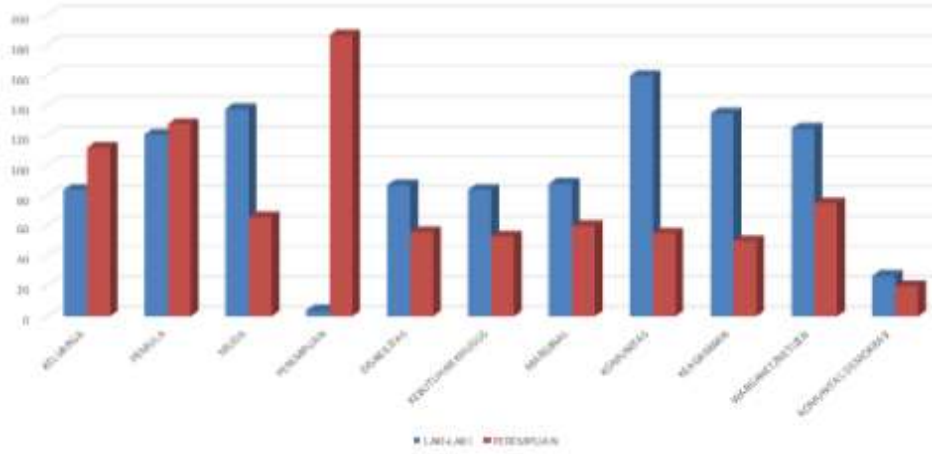

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah, 2019

3.2. Peningkatan Kompetensi

KPU Kab./Kota memfasilitasi peningkatan kompetensi Relawan Demokrasi hasil rekrutmen melalui strategi kegiatan Training of Trainer (ToT). Terdapat lima materi utama dalam TOT yaitu: (a) Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi; (b) Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis; (c) Kode etik relawan; (d) Teknik-teknik berkomunikasi publik; (e) Materi lain yang relevan. Beberapa KPU Kab./Kota menambahkan materi *Planing*, *Organizing*, *Actuating*, *Controling* (POAC) karena relawan demokrasi akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam kurun waktu tiga bulan dan untuk mencapai sasaran kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan. Sasaran tersebut meliputi: peningkatan kualitas proses pemilu, peningkatan partisipasi pemilih, peningkatan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

Pasca peningkatan kompetensi, Relasi melakukan kegiatan persiapan, meliputi: (a) Memetakan varian kelompok sasaran (mapping); (b) Mngidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran; (c) Meng-identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan; (d) Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain; (e) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal; serta (f) Menyusun dan melaporkan kegaiatan kepada KPU Kab/Kota.

Kegiatan pemetaan sasaran, identifikasi kebutuhan dan jadwal idealnya difokuskan pada daerah atau desa yang tingkat partisipasi rendah berdasarkan pemilu sebelumnya. KPU Kab/Kota perlu menyediakan data-data sebagai modal pemetaan sasaran ini misalnya data desa dengan partisipasi terendah di tiap kecamatan, misalnya 2 desa setiap kecamatan (wawancara dengan Agus Setiyanto). Tidak jarang KPU Kab/Kota tidak bisa mengarahkan sasaran Relasi pada daerah dengan tingkat partisipasi rendah karena alasan tidak mampu menyediakan informasi sasaran dimaksud berdasarkan pemilu sebelumya, serta alasan alamat asal relawan tidak sesuai dengan daerah dengan partisipasi rendah serta terlalu jauh dan ekstrim penjangkauanya. Pada kondisi tersebut, kegiatan Relasi diarahkan untuk menjangkau komunitas asal dan sekitarnya, sedangkan daerah/sasaran yang tidak terjangkau oleh Relasi dijadikan sebagai sasaran kegiatan sosialisasi oleh KPU Kab/Kota (wawancara dengan Dwi Endys M).

3.3. Peran Peran Relawan Demokrasi

a. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Relawan Demokrasi melaksanakan tugas melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu Serentak 2019. Peran Relawan Demokrasi adalah menjangkau pada 10 basis pemilih untuk penyebaran informasi Pemilu dalam bingkai sosialisasi dan pendidikan pemilih. Peran ini diharapkan dapat menyuntikkan kesadaran kepada masyarakat bahwa menjadi warga negara yang baik adalah mereka yang mampu berpartisipasi dalam politik secara baik (Fuad, 2015). Strategi ini mampu menjangkau segmen masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh program sosialisasi oleh KPU Kab./Kota. Durasi pelaksanaan sosialisasi efektif mulai Februari 2019 sampai sebelum minggu tenang menjelang pelaksanan pemunguntan suara, 17 April 2019. Meski hanya bertugas efektif selama dua bulan lebih dua minggu, kiprah para agen informasi Pemilu ini mampu menyebarkan informasi pemilu dengan cukup baik.

Sejumlah materi yang disampaikan Relasi kepada sasaran meliputi: (a) Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi; (b) Tanggal, hari dan jam pemungutan suara, (c) Tata cara pemberian suara dalam Pemilu (Jumlah dan Jenis Surat Suara, Tata cara Pencoblosan di TPS, Cara Mencoblos Surat suara); (d) Pengenalan Peserta Pemilu (Pengenalan Parpol, Pengenalan Paslon Presiden/ Wakil Presiden; Pengenalan Calon Anggota DPD); (e) Materi lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih seperti: Cek Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui website: infopemilu.kpu.go.id, tata cara pindah memilih, ajakan anti golput, anti politik uang (No money politics), anti diskriminasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), No Hoax. Relasi dibekali dengan surat tugas, id-card, rompi dan tas punggung Relawan Pemilu Tahun 2019, serta beberapa alat peraga

jdih.kpu.go.id

sosialisasi seperti spesimen suarat suara.

Relasi melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui optimalisasi pertemuan-pertemuan warga dan kunjungan dari rumah ke rumah (gerakan *door to door*). Segmen perempuan dijangkau melalui pertemuan rutin warga, pertemuan PKK, optimalisasi rapat-rapat Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dan lain-lain. Strategi ini efektif menjangkau sasaran dan efisien dari segi anggaran sehingga bisa menjangkau lebih banyak sasaran. Segmen pemilih berkebutuhan khusus di jangkau dengan mendatangi Panti Lanjut Usia, mengumpulkan KTP dan di cek malalui aplikasi Sidalih KPU RI versi android. Sasaran segmen pemilih pemula dengan sosialisasi di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA dan sederajat), dan lain-lain.

b. Pro-Aktif Jemput Bola Fasilitasi Pengurusan Surat Pindah Memilih

Relasi juga mensosialisasikan pengurusan Surat Pindah Memilih (Form A5), terutama ditujukan kepada keluarga yang memilihi anggota tidak bisa pulang pada saat hari pemungutan suara dan kantong-kantong perantau. Relasi bahkan secara pro-aktif jemput bola membantu warga mengurus Form A5 ke balai desa yang dilayani oleh Panitia Pemungutan Suara/ PPS (Setiyanto, 2019).

Kendala yang dihadapi Relasi dalam menjalani peran ini adalah batas waktu pengurusan Form A5 terlalu mepet. Kebijakan ini membuat perantau kebingungan sehingga berujung pada keengganan perantau untuk mengurus Form A5. Ada pula yang hadir ke balai desa (PPS) namun tenggat waktu pelayaan sudah habis. Ada pula yang terhambat pada kesiapan PPS karena Form A5 tidak tersedia di balai desa dan harus fotocopy di luar balai desa (Setiyanto, 2019).

c. Memproduksi dan Menyebarkan Informasi melalui Media Sosial

Relawan demokrasi berbasis warga internet berperanan penting untuk menyampaikan serta memproduksi dan menyebarluaskan ajakan berpartisipasi dalam Pemilu melalui media sosial. Pesan ini untuk menjangkau masyarakat terutama yang gemar bersosial media. Relasi mengedukasi tentang pelaksanaan Pemilu 2019 untuk tidak golput (Channel Widuri, 2019), serta edukasi tentang dampak baik maupun buruk dari penggunaan media sosial dan bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak.

d. Memberikan Pemahaman Tentang Hubungan Agama dan Demokrasi

Pamungkas (dalam Fuad, 2015: 28) menyampaikan bahwa Fenomena golput juga merupakan fenomena teologis. Pilihan golput dalam pandangan penganut teologi ini merupakan kehendak agama. Relawan demokrasi terutama

dari basis keagamaan berperan menyosialisasikan hubungan nilai-nilai demokrasi dan agama, terutama di Kabupaten Banyumas dimana terdapat kultur agama dengan pemahaman tersebut.

e. Sinergi dengan Badan Adhock Penyelenggara Pemilu

Setiap penyelenggara pemilu pada semua tingkatan memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Keterbatasan sumber dana kadang menjadi alasan Badan Adhoc untuk menyelenggarakan kegiatan. Relasi yang dibekali dengan dana terbatas ini diupayakan untuk bisa bersinergi dengan PPK/PPS/KPPS untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikah pemilih. Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Relasi KPU Kab./Kota menyelenggaran kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) setiap bulan dalam kurun waktu tiga bulan penugasan Relasi. Kegiatan tersebut sebagai media kontrol dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih oleh relawan demokrasi kepada segmen masyarakat yang diwakilinya. Kegiatan monev ini juga sekaligus dilakukan untuk penyampaian laporan masing-masing relawan demokrasi baik laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran setiap item kegiatan serta laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi selama satu bulan berjalan.

Relawan dari basis penyandang disabilitas, terutama tuna netra mengalami kesulitan menyesuaikan dengan standar pelaporan kegiatan dan keuangan yang ditentukan KPU RI. Relawan tersebut tidak bisa menulis dan mengambil gambar pelaksanaan kegiatan. Ketiadaan laporan ini menjadikan dirinya tidak bisa menggunakan anggaran/dukungan keuangan untuk biaya peyelenggaraan kegiatan sosialisasi (Wawancara dengan Dwi Endys M., 31 Des 2019).

KPU Kab./Kota mengelola program relasi, terutama setelah perekrutan dan pembekalan, bardasarkan preferensi dan pengalaman yang dimiliki. Pedoman Pengelolaan Program Relasi masih terbatas pada perekrutan dan peningkatan kompetensi. KPU Kab./Kota mengembangkan sendiri strategi dan metode dalam pengelolaan, pengawasan dan monitoring relasi melalui diskusi dan tukar pengalaman antar KPU Kab./Kota. Perkembangan dan keberhasilan pengelolaan program ini sangat bergantung pada kreasi masing-masing KPU Kab./Kota.

4. Kontribusi Relawan Demokrasi

Secara umum tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan. Meski diakui, daya tarik Pemilu Tahun 2019 juga turut terdongkrak dengan diselenggarakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan berbarengan dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota. Daya tarik personal calon presiden dan wakil presiden turut berperan banyak dalam menggerakkan naiknya angka kehadiran pemilih di TPS.

Pada sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah upaya sosialisasi dan pendidikan oleh KPU Kab./Kota bersama Relasi tampak lebih nyata dampaknya. Malam hari menjelang hari pemungutan suara, petugas penyelenggara tingkat kecamatan (PPK) di Kabupaten Pemalang melaporkan bahwa ada fenomena perantau berduyun-duyun pulang untuk mencoblos/menggunakan hak pilihnya. PPK juga menyampaikan bahwa suasana di desa-desa tidak seperti biasa, malam itu sudah mirip Malam Lebaran. Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Pemalang meningkat dari 61,74 persen pada Pemilu 2014 menjadi 72,41 persen pada Pemilu 2019. Terdapat kenaikan lebih dari 10 persen dalam situasi terdapat fakta sekitar 18% dari DPT yang merantau. Ini menunjukkan kenaikan tingkat partisipasi dikontribusi oleh sebagaian perantau yang pulang kampung untuk menggunakan hak pilih (Setiyanto, 2019).

Penelitian Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu tahun 2019 Di Kabupaten Pemalang pada awal November 2019 juga menunjukkan bahwa faktor politik uang masih terjadi pada Pemilu 2019 namun terdapat sikap warga yang bervariasi. Sebagian warga memilih calon kadidiat berdasarkan pada pemberian uang dengan nominal terbesar, sebagian masyarakat menerima uang dari calon kandidat dan memilih sesuai pilihan semula (sesuai hati nurani), sebagian masyarakat lagi memiliki kesadaran cukup tinggi terhadap politik uang sehingga menolak pemberian uang (KPU Kab. Pemalang, 2019).

Analisis dan Pembelajaran

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu 2019 oleh relawan demokrasi cukup membantu KPU Kab./Kota dalam menjangkau basis-basis srategis pemilih. Beberapa hal perlu menjadi perhatian untuk dikembangkan dan disempurnakan pada waktu mendatang, antara lain:

1. Masih terdapat relawan demokrasi yang belum berasal dari segmen yang diwakilinya. Hal ini karena minimnya peminat dari basis pemilih tertentu misalnya basis pemilih marginal. Ketika relasi ingin menggelar kegiatan sosialisasi kepada segmen dimaksud, mereka masih mengalami kendala dalam hal koordinasi. Relawan demokrasi juga masih kebingungan menentukan tema dan cara pendekatan yang harus dipakai agar informasi pemilu bisa tersampaikan dengan baik sesuai tujuan kegiatan. KPU Kab./Kota perlu mengantisipasi permasalahan ini dengan proses seleksi sesuai segmen masyarakat yang diwakilinya dan memastikan kedekatannya dengan basis

jdih.kpu.go.id

pemilih yang diwakili. Kedekatan dengan basis pemilih ini penting untuk percepatan pelaksanaan tugas Relasi, mengingat mereka terjun langsung menyampaikan informasi pemilu dalam waktu yang cukup pendek.

2. Proses seleksi relawan demokrasi juga hendaknya digelar jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu sehingga tidak terkesan berkejar-kejaran dengan tahapan Pemilu lainnya dan agar tampak terpenuhi kuota peserta. Seleksi Relasi dengan kecukupan waktu diharapkan memperoleh relawan yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan baik dari keterwakilan segmentasi dan kapasitas mereka sebagai agen informasi pemilu. Hal ini mengingat peran dan kedudukan Relasi sebagai salah satu kepanjangan tangan KPU dalam upaya menyebarkan informasi dan menumbuhkan kesadaran warga untuk aktif dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia. KPU RI perlu mengantisipasi penerbitan Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) secara lebih awal sehingga KPU Kab./Kota memiliki kecukupan waktu untuk melakukan seleksi secara berkualitas. Basis pemilihan tertentu yang kekurangan pendaftar relawan dapat diberikan kelonggaran waktu pendaftaran atau perlakuan tertentu tanpa melanggar jadwal yang telah ditentukan. Demikian pula pada basis pemilih yang banyak peminatnya perlu dibuat standar penilaian yang baku.

3. KPU Kabupaten/Kota perlu membekali dan memfasilitasi Relawan Demokrasi agar mampu menyelenggarakan sosialisasi Pemilu secara kreatif untuk menciptakan respon antusias dan kesan yang mendalam pada peserta sosialisasi.

4. Perlu pelakuan/kebijakan khusus terhadap standar administrasi pelaporan dan keuangan bagi relawan penyandang disabilitas. Ketidak mampuan relawan disabilitas mencukupi syarat administrasi pelaporan keuangan menjadikan dukungan pendanaan kegiatan yang disediakan tidak bisa dioptimalkan. Strategi lain dengan mempertimbangkan penyusunan tim yang memungkinkan antar sesama relawan dapat saling membantu dalam memenuhi standar administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.

5. Perlu penyempurnaan juknis pedoman pelaksanaan program relasi, terutama pasca pembekalan/peningkatan kompetensi Relasi. Juknis Pedoman Pelaksanaan Program Relasi yang belum memuat pengelolaan, pengawasan menimbulkan perkembangan dan keberhasilan Program Relasi bergantung pada kemampuan KPU Kab./Kota sesuai dengan pengalaman yang dimiliki.

Kesimpulan

1. Peran-peran yang dilakukan Relawan Demokrasi di Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019 antara lain meliputi: (a) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, (b) Pro-Aktif Jemput Bola Fasilitasi Pengurusan Surat Pindah Memilih, (c) Memproduksi dan Menyebarkan Informasi melalui Media Sosial, (d) Memberikan Pemahaman Tentang Hubungan Agama dan Demokrasi, (e) Sinergi dengan Badan Adhock Peyelenggara Pemilu.

2. Peran-peran tersebut telah menimbulkan dampak pada tumbuh dan berkembangnya kesukarelaan warga dalam politik. Antusias warga untuk menggunakan hak pilih seperti ditunjukkan di Kabupaten Pemalang dan di tempat lainnya dimana malam menjelang hari pemungutan suara seperti malam Lebaran, karena banyak perantau yang pulang untuk menggunakan hak pilih. Hal tersebut juga berkontribusi pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. Partisipasi masyarakat secara kualitas pun juga ditunjukkan dengan munculnya respon yang berbeda-beda pada politik uang; sebagian warga memilih calon kadidiat berdasarkan pada pemberian uang dengan nominal terbesar, namun sebagian masyarakat menerima uang dari calon kandidat dan memilih sesuai pilihan semula (sesuai hati nurani), sebagian masyarakat lagi memiliki kesadaran cukup tinggi terhadap politik uang sehingga menolak pemberian uang.

3. Program Relawan Demokrasi memengaruhi tingginya animo masyarakat untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya di TPS baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyempurnaan program ini perlu terus dilakukan berdasarkan pada pengalaman baik *(good practices*) pengelolaan program agar tepat sasaran dalam proses dan hasil. Sasaran hasil berupa peningkatan kualitas dan kuantitas pada partisipasi masyarakat, sementara sasaran proses pada kualitas relawan yang direkrut dan kualitas penyelenggaraan sosialisasi.

jdih.kpu.go.id

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal Ilmiah

Budiarjo, M. (a981), Suatu Pegantar. Dalam *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Edtor M. Budiarjo. Jakarta: Gramedia

Fuad, Zamzam Muhammad (2015), *Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada Relawan Demokrasi Banyumas, Jawa Tengah*), Jurnal Ketahanan Nasional Nomor XXI (1) April 2015, Sumber: https://www.researchgate.net/publication/310738716_Peran_Pemuda_Relawan_Demokrasi_Dalam_Meningkatkan_Partisipasi_Politik_Masyarakat_Pada_Pemilihan_Umum_Legislatif_Tahun_2014_Dan_Implikasinya_Terhadap_Ketahanan_Politik_Wilayah_Studi_Pada_Relawan_Demokr diunduh pada 19 Desember 2019

Agustino, Leo (2009), *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arianto, Bismar (2011), Analisis Penyebab Masyarakat TIdak Memilih Dalam Pemilu dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*

Basrianto, Fadel (2019), Golput dalam Pemilu 2019 dalam *Jurnal Update Indonesia* Volume XIII, No. 2 – Feberuari 2019

KPU Kaupaten Pemalang (2019), *Laporan Akhiar Peneltian Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pemalang*, Pemalang: KPU Pemalang

Morissan (2016), Tingkat Partisipasi Politik Dan Sosial Generasi Muda Pengguna Media Sosial, dalam Jurnal *Visi Komunikasi*, Volume 15, No.01, Mei 2016

Purbolaksono, Arifianto (2017), 20 Tahun Reformasi dan Partai Politik di Indonesia dalam Jurnal *Update Indonesia* Volume XII. No. 4 – Mei 2018, The Indonesian Institute

Purbolaksono, Arifianto (2019), Melihat Perilaku Memilih Anak Muda Jelang Pemilu 2019, dalam Jurnal *Update Indonesia* Volume XIII. No. 6 – Juni 2019, The Indonesian Institute

KPU RI (2019), Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu Tahun 2019, Jakarta: KPU RI

Media Massa dan Media Elektronik

Bayu Setiawan, (2019) Relawan Demokrasi Dibekali Cara Berkomunikasi Efektif, dalam Suara Medeka Edisi 23 Januari 2019, sumber: https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/162247/relawan-demokrasi-dibekali-cara-berkomunikasi-efektif diunduh 19 Desember 2019, diunduh 19 Desember 2019.

Channel Widuri (2019), *Sisi Lain Relawan Demokrasi Basis Warganet* | KPU Pemalang, sumber: https://www.youtube.com/watch?v=h5oUe2zhTww diunduh 19 Desember 2019.

Fajlin, Eka Yulianti (2019), KPU Kota Semarang Bentuk Tim Relasi, Ini Tujuannya, sumber https://jateng.tribunnews.com/2019/01/13/kpu-kota-semarang-bentuk-tim-relasi-ini-tujuannya?page=2. diunduh 19 Desember 2019.

Hangsae (2019), *2.000 Orang Urus Surat Pindah Pemilih ke KPU Pemalang*, sumber: http://suarabaru.id/2019/03/15/2-000-orang-urus-srat-pindah-pemilih-ke-kpu-pemalang/ diunduh 19 Desember 2019.

Kontenapik (2019), *Relawan* Demokrasi KPU Pemalang, sumber: https://www.kontenapik.com/2019/03/relawan-demokrasi-kpu-pemalang.html diunduh 19 Desember 2019.

Massol (2019), *Menakar Kesiapan Pemilu 2019 Di Kecamatan Pemalang*, KPU Pemalang Gelar Rapat Koordinasi sumber:http://www.kabarpemalang.com/2019/03/menakar-kesiapan-pemilu-2019-di-kecamatan-pemalang.html diunduh 19 Desember 2019.

Pw (2019), *Jadi Relawan, Kaum Difabel Ikut Sosialisasikan Pemilu*, sumber: https://www.wawasan.co/news/detail/8602/jadi-relawan-kaum-difabel-ikut-sosialisasikan-pemilu diunduh 19 Desember 2019.

Redaksi (2019), KPU Jamin Relawan Demokrasi Bukan Partisan Politik sumber:https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/162790/kpu-jamin-relawan-demokrasi-bukan-partisan-politik diunduh 19 Desember 2019.

Redaksi GNews (2019), *Relasi KPU Kabupaten Pemalang Digembleng Bimtek POAC*, Media GNews Edisi 07 Maret 2019, Sumber: https://www.g-news.id/2019/03/07/

relasi-kpu-kabupaten-pemalang-digembleng-bimtek-poac/ diunduh 19 Desember 2019.

Rutan Pemalang (2019), *Sosialisasi Pemilu 2019 Fasilitasi Hak Politik WBP Rutan Pemalang*, sumber: http://www.ditjenpas.go.id/sosialisasi-pemilu-2019-fasilitasi-hak-politik-wbp-rutan-pemalang/ diunduh 19 Desember 2019.

Safuan, Akhmad (2019), *Berebut Jadi Relawan Demokrasi Berhonor Rp750 Ribu*, sumber:https://mediaindonesia.com/read/detail/211141-berebut-jadi-relawan-demokrasi-berhonor-rp750-ribu diunduh 19 Desember 2019.
Setiyanto, Agus (2019). Partisipasi Perantau Pemalang di Pemilu 2019 dalam Radar Tegal Edisi Jumat, 20 September 2019.

Yunar Rahmawan (2019), Relawan Demokrasi, Cara KPU Brebes Dongkrak Partisipasi Pemilih, sumber: https://panturapost.com/relawan-demokrasi-cara-kpu-brebes-dongkrak-partisipasi-pemilih/ diunduh 19 Desember 2019.

Dokumen KPU

1. Daftar Inventaris Masalah Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Magelang, tidak diterbitkan.

2. Lapora Kegiatan Relawan Demokrasi KPU Kabupaten Magelang Pada Pemilu Serentah Tahun 2019.

3. Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2019, KPU Provinsi Jawa Tengah, Materi Presentasi Evaluasi Program Relasi.

4. Peraturan KPU RI Nomor: 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

5. Suat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 20/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

6. Notulen Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Tugas Relawan Demokrasi 2019 Di Kabupaten Magelang Periode Bulan Maret 2019.

7. Notulen Pengukuhan Dan Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang

Wawancara

1. Wawancara dengan Agus Setiyanto (Anggota KPU Kab. Pemalang), Provinsi Jawa Tengah.
2. Wawancara dengan Dwi Endys Mindarwoko (Anggota KPU Kab. Magelang), Provinsi Jawa Tengah.

jdih.kpu.go.id

Memenangkan Partisipasi di Era Pasca Kebenaran

Oleh Agus Hilman
Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

Abstrak

Pemilu serentak 2019 mencatatkan angka partisipasi pemilih yang tinggi. Pasca reformasi, khususnya setelah Pemilu 1999, angka partisipasi Pemilu serentak 2019 merupakan rekor tertinggi. Angka partisipasi tinggi menjadi spesial, karena akhirnya pencoblosan berjalan dengan lancar dan damai. Banyak pihak mengkhawatirkan pecahnya konflik horizontal akibat menguatnya gerakan politik identitas, populisme dan fenomena post-truth (pasca kebenaran) sepanjang tahapan Pemilu 2019. Tingginya partisipasi dengan tingkat polarisasi politik yang kuat, tapi berujung damai merupakan wujud KPU dan bangsa Indonesia telah memenangkan partisipasi pada era pasca kebenaran.

Kata kunci: Partisipasi, hoax, Post-Truth, Pasca kebenaran, Pemilu

"Pada akhirnya, inilah tujuan Pemilihan Umum.
Apakah kita berpartisipasi dalam politik sinisme atau harapan?"
- Barack Obama -

Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) 2019, telah menggoreskan sejarah yang harus dicatat dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Ada beberapa alasan mengapa demikian. Pertama, Pemilu 2019 merupakan kali pertama dalam sejarah Pemilu di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung dan serentak untuk memilih legislatif dan Presiden-Wakil Presiden sekaligus. Kedua, perubahan metode konversi suara dengan Pemilu sebelumnya, yakni sistem konversi melalui Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) atau sistem Kuota *Hare* ke model konversi suara *Sainte Lague*. Ketiga, capaian angka partisipasi yang cukup tinggi dibandingkan beberapa Pemilu sebelumnya, sekitar 82 persen. Menukil ungkapan Barack Obama di atas, naiknya partisipasi tersebut, *apakah kita berpartisipasi dalam politik sinisme atau harapan?* Semoga jawabannya adalah kedua; harapan.

Tanpa bermaksud menegasikan alasan pertama dan kedua yang juga penting diulas, tulisan ini merespon capaian angka partisipasi yang meningkat dari beberapa Pemilu sebelumnya. Secara nasional, bahkan hampir seluruh daerah angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 meningkat cukup tajam dibanding Pemilu 2014. Peningkatan angka partisipasi ini juga terjadi di Nusa Tenggara Barat, sebuah provinsi bagian tengah di Indonesia yang memiliki tipologi politik yang dinamis dalam partisipasi politik. Pada Pemilu 2014, tingkat partisipasi pemilih di NTB hanya 76,94 persen atau masih di bawah target partisipasi pemilih Pemilu 2019. Peningkatan partisipasi yang hampir merata di berbagai daerah mendeskripsikan berbagai hal dengan persepktif yang berbeda. Sebagai bagian penyelenggara, peningkatan partisipasi menegaskan demokrasi dan penyelenggara Pemilu berjalan dengan sukses.

Capaian tersebut seolah memutus mata rantai penurunan angka partisipasi Pemilu dari tahun ke tahun setelah reformasi bergulir. Ini menunjukkan KPU sebagai penyelenggara dan seluruh elemen masyarakat pada umumnya, mampu melewati tantangan keserentakan Pemilu 2019. Jangankan penyelenggara, pemilih saja mengakui keserentakan Pemilu 2019 yang digabung pemilihan legislatif dan Presiden-Wakil Presiden sangat menyulitkan.[14] Sehingga, capaian Pemilu 2019 dengan partisipasi yang tinggi, tetapi berjalan dengan damai, merupakan prestasi besar.

Pasca reformasi partisipasi cukup fenomena hanya terjadi pada Pemilu 1999, yakni 92,6 persen. Sebuah angka partisipasi yang luar biasa dan belum dapat terlampaui Pemilu setelahnya hingga saat ini. Angka partisipasi pemilih Pemilu 2019 memang tidak sefenomenal Pemilu 1999. Tetapi, partisipasi Pemilu 2019 menjadi titik balik trend negatif laju partisipasi pemilih yang seolah terus terjun

jdih.kpu.go.id

bebas dari Pemilu 1999 sampai Pemilu 2014.

Ada beberapa perbedaan karakter, Pemilu 1999 dengan Pemilu 2019 untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi pemilih. Diantaranya, pertama, momentum peralihan rezim. Meningkatnya partisipasi pada Pemilu 1999 akibat besarnya animo perubahan masyarakat setelah keluar dari sistem politik Orde Baru. Partisipasi yang mencerminkan semangat perlawanan rakyat melawan rezim *status quo* melalui elektoral. Animo partisipasi Pemilu 1999 mungkin seperti kehendak Pemilu 1955 sebagai Pemilu pertama setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Presiden Ir. Soekarno atau seperti interes Pemilu 1971 setelah tumbangnya demokrasi terpimpin era Soekarno.

Kedua, perubahan sosio-politik masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dengan gejala politik global di beberapa negara demokrasi dunia, fenomena *post-truth*, politik identitas, dan gerakan populisme. Di tengah kondisi sosio-politik tersebut, muncul dua pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga memudahkan polarisasi. Kondisi tersebut memberikan sumbangsih besar mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 karena ditopang dengan menguatnya politik identitas, menggeliatnya gerakan populisme, dan hadirnya gejala pasca kebenaran (*post-truth*). Tiga pergeseran sosial-kultural tersebut berdampak pada peningkatan polarisasi politik dan eskalasi kontestasi yang kemudian menstimulasi para pemilih berbondong-bondong datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

Terlepas dari argumentasi tersebut, menurut penulis, partisipasi pemilih Pemilu 2019 merepresentasikan dua hal penting, yakni 1) menegaskan bahwa rakyat masih percaya terhadap Pemilu sebagai instrumen demokrasi dan 2) rakyat masih percaya terhadap KPU sebagai lembaga negara yang diamanahkan UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu. *Trust* atau adanya kepercayaan semacam ini sangat penting sebagai modal sosial untuk mencapai kemajuan.[15] Dua bentuk rasa percaya terhadap penyelenggaraan Pemilu tersebut sangat mendasar dalam proses penguatan demokrasi di Indonesia. Ini juga sekaligus membuktikan ketahanan demokrasi Indonesia sangat baik dan kokoh.

Pandangan tersebut diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia dan Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) beberapa hari menjelang pemungutan suara, 17 April 2019. Indikator Politik merilis sekitar 65

[14]https://news.detik.com/berita/d-4684237/survei-lipi-soal-pemilu-serentak-2019-74-publik-kesulitan-memilih. Diakses pada November 2019.

persen dari 1.220 responden percaya bahwa KPU netral dalam Pemilu 2019.[16] SMRC pun tidak jauh berbeda hasil surveinya dengan Indikator Politik, yakni publik mayoritas percaya terhadap penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan jujur dan adil.[17] Padahal, KPU diserang berbagai berita bohong (*hoax*) kecurangan secara bertubi-tubi selama penyelenggaraan Pemilu 2019. Ini menarik kita telisik lebih dalam.

Dogma Partisipasi

Selama ini perspektif kita dalam melihat partisipasi pemilih, masih terjebak pada angka. Seolah warisan (*legacy*) dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia hanya berbentuk angka partisipasi. Jika partisipasi rendah, dianggap meninggalkan jejak penyelenggaraan yang kurang berhasil dibandingkan menjejakkan angka partisipasi pemilih yang tinggi. Tahun 1955 misalnya, dianggap sebagai Pemilu paling monumental dalam sejarah kepemiluan di Indonesia karena menorehkan angka-angka partisipasi sekitar 91,4 persen. Padahal, tanpa menafikan capaian besar sejarah demokrasinya, pada Pemilu 1955 seorang anggota TNI dan Polri dapat memilih sehingga memungkinkan partisipasi tinggi.

Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto angka partisipasi lebih fenomenal. Selama beberapa kali Pemilu, berturut-turut angka partisipasi pemilih menembus level rata-rata 96 persen lebih. Angka partisipasi yang melampaui 96 persen tersebut terjadi pada Pemilu 1971, 1976, 1982, dan Pemilu 1987. Tren penurunan partisipasi pemilih pada Pemilu era Orde Baru hanya terjadi pada Pemilu 1992 dan 1997. Tetapi penurunannya tidak sampai empat persen, yakni 95,1 persen pada Pemilu 1992 dan 93,6 persen partisipasi pada Pemilu 1997. Maka dari tiga kali Pemilu pada masa Orde Baru, angka golput rata-rata kurang lebih hanya 3,5 persen saja. Sebuah catatan yang luar biasa jika hanya memotret tingkat dan angka partisipasi pemilih semata.

Setelah terjadi reformasi dimana keterbukaan politik terjadi, angka partisipasi justru mengalami fluktuasi. Capain tertinggi hanya pada Pemilu 1999, yakni sekitar 92,6 persen. Setelah itu, tidak pernah lagi angka partisipasi pemilih melampaui angka 90 persen. Penurunan tingkat partisipasi dan belum pernah sampai menembus angka 90 persen mulai terjadi pada Pemilu 2004 hingga Pemilu

---

[15]Francis Fukuyama,Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran,(Yogyakarta: Penerbit Qalam), 2007, hlm. xiii

[16]https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/03/survei-indikator-mayoritas-publik-percaya-kpu-netral-sebagai-penyelenggara-pemilu. Diakses pada Desember 2019.

[17]Rilis survei Saiful Mujani Research & Consulting, Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional Pasca-Peristiwa 21-22 Mei 2019, Sebuah Evaluasi. Update Temuan Survei Nasional Mei-Juni 2019.

2019. Tetapi, patut diberikan apresiasi dan catatan pada Pemilu 2019, sekalipun tidak mampu mencapai level 90 persen dengan berbagai dinamika sejarahnya, partisipasi meningkat signifikan dibandingkan dengan Pemilu 2014 dengan angka 82 persen.

Partisipasi pemilih senantiasa dijadikan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya Penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu. Jika partisipasi pemilih tinggi, Pemilu atau Pemilihan dianggap sukses. Demikian juga sebaliknya, Penyelenggara Pemilu tidak jarang dianggap gagal menyukseskan Pemilu ketika partisipasi pemilihnya rendah. Akhirnya, aspek capaian kualitas penyelenggaraan justru terabaikan oleh angka-angka fantastis partisipasi. Paradigma dalam melihat partisipasi pemilih seperti ini, sudah seharusnya direfleksikan atau digeser ke arah parameter yang lebih produktif dan tidak menihilkan aspek capaian kualitas, seperti kesadaran hukum tinggi, integritas, saling menghormati perbedaan politik, dan damai.

Partisipasi politik pemilih di dalam Pemilu tidak boleh diceraikan dari kenyataan prinsip-prinsip nilai demokratis yang menopang kekuatan bangunan ketahanan demokrasi (*democratic resilience*) itu sendiri. Nilai-nilai demokratis terebut seperti menghormati perbedaan, saling menghargai sesama warga negara, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, patuh terhadap hukum dan lain sebagainya. Nilai-nilai demokratis tersebut menjadi pengokoh ketahanan demokrasi kita dan tidak bisa dipisahkan ketika mencermati partisipasi pemilih di dalam Pemilu. Pada langgam ini, dua kerangka pandang yang niscaya digunakan KPU, yakni kerangka sosialisasi dan pendidikan pemilih. Angka partisipasi sebagai output hanya dapat dijadikan sebagai parameter mengukur keberhasilan sosialisasi di dalam Pemilu atau Pemilihan, tapi belum dapat dijadikan sebagai keberhasilan pendidikan pemilih. Sementara pendidikan pemilih lebih menekankan pada aspek nilai dan angka kualitas partisipasi, bukan angka kuantitatif. Karena itu, partisipasi pemilih Pemilu 2019 harus dimaknai sebagai hasil dari proses memenangkan partisipasi, yakni partisipasi pemilih yang tinggi di mana kuantitas dan kualitas berjalan selaras.

Dinamika Perubahan Sosial

Sebelum mengulas lebih jauh pergumulan dalam menghadapi tantangan sosial dalam peningkatan partisipasi pemilih, menyingkap sedikit wajah dan konteks sosial pada saat Pemilu dilaksanakan, diperlukan memotret secara utuh Pemilu 2019 dengan pelbagai tantangan dan dinamika partisipasi pemilihnya. Di sini perlu dilihat sejarah Pemilu ke dalam tiga gelombang. Gelombang pertama masa awal pembentukan negara. Kedua, pada rentang masa pemerintahan Orde Baru dengan

jdih.kpu.go.id

jargon developmentalisme-nya dan gelombang terakhir adalah setelah bergulirnya reformasi. Dalam tiga etape tersebut, tantangan Pemilu memiliki karakter sosial, politik, dan budaya yang berbeda-beda.

Pemilu 1955 memiliki tantangan dan karakter setting politik, sosial, dan budaya yang berbeda dengan Pemilu pada masa Orde Baru (Pemilu 1971 s.d 1997). Demikian halnya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya juga membawa tantangan yang berbeda dengan Pemilu pasca-reformasi. Pemilu 1955 misalnya hadir dalam suasana politik, sosial dan budaya masa awal pembentukan negara Indonesia dengan situasi perang dingin politik global, pertarungan ideologi; pan Islamisme, komunisme, dan kapitalisme.[18] Situasi tersebut, Pemilu menjadi instrumen rakyat untuk mengejawantahkan harapan dan mimpinya terhadap negara Indonesia yang baru berusia satu dasawarsa.

Pemilu 1955 menyeruakkan antusiasme rakyat Indonesia untuk berpartisipasi memilih. Bahkan, Herbert Feith mendeskripsikan Pemilu 1955 sebagai capaian demokrasi yang monumental bagi bangsa ini.[19] Namun, penyelenggara Pemilu sepenuhnya dibentuk oleh pemerintah. Penyelenggara di tingkat nasional misalnya, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.[20] Sementara di tiap daerah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.[21] Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Panitia Pemilihan kabupaten dimana Bupati otomatis menjabat sebagai Ketua sekaligus anggotanya.

Pada tahun 1970-an lanskap politik di dalam negeri dan dunia berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada periode ini, kondisi sosial politik bergeser dimana kekuasaan pun beralih. Soeharto diangkat menjadi Presiden melalui Sidang Umum MPRS, 27 Maret 1968. Pemerintahan Orde Baru melaksanakan Pemilu pertama kali pada tahun 1971 dan terakhir Pemilu 1997. Sistem sentralisme yang diterapkan pemerintahan Orde Baru menjadikan dinamika sosial-budaya yang terjadi dalam setiap Pemilu tidak begitu kompleks dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Pada gelombang pertama dan kedua atau paruh masa Pemilu 1955 dan Pemilu 1971-1997, pasti memiliki beberapa perbedaan suasana sosial, budaya, dan politik yang berdampak terhadap pola tantangan sosial berbeda yang mengitari penyelenggaraan Pemilu. Gelombang pertama oleh generasi tradisional (1922-1945), sedangkan gelombang masa Orde Baru disinggahi oleh generasi *baby boomers* (1946-1964) dan dipenghujung era mulai didominasi oleh generasi X (1965-1080). Sekalipun berbeda, secara politik sama-sama sentralistik yang memungkinkan pemegang kekuasaan sebagai pengendali utama situasi politik.

Pemilu	Sistem Pemilu	Sistem Pemerintahan	Sosial-Budaya	Generasi	Teknologi
1955	Tertutup	Sentralisasi	Konstruksional	Tradisionalis (1922-1945)	Media Cetak, Radio, Telegram
1971 – 1997	Tertutup	Sentralisasi	Institusional	*Baby Boomers* (1946-1964) Generasi X (1965-1980)	Media Cetak, Radio, Televisi. Telegram, Pager, telepon, mesin ketik,
1999 - Sekarang	Terbuka	Desentralisasi	Deinstitusiona	Generasi Y (1981-1994) Generasi Z (1995-2010)	Media Cetak, Radio, Televisi, komputer, Internet (Media Sosial), komputer, handphone

Sumber : Dihimpun dari berbagai sumber

Perlu dicermati bahwa reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan lengsernya Orde Baru, bukan hanya menandai bergantinya kekuasaan dan wajah Pemilu semata, tetapi juga mendeskripsikan sebuah tatanan sosial politik dan budaya baru sedang dimulai. Pergeseran bandul kekuasaan dari Orde Baru ke reformasi atau dari sentralisme ke desentralisme pada langgam politik kekuasaan

[18]Pada 3 November 1945, Pemerintah melalui Wakil Presiden, Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X tahun 1945 yang isinya pembentukan partai politik dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu tahun 1946.). Maklumat ini menjadi salah satu maklumat yang menjadi tonggak demokrasi di Indonesia. Lih, Artwijaya. Belajar dari Partai Islam. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). 2014. Setelah diproklamirkan, Indonesia belum dapat sepenuhnya fokus melakukan pembangunan demokrasi karena fakta masih ada agresi militer dari penjajah pada saat itu, sehingga konsentrasi para negara Indonesia terbelah untuk menghadapi serangan penjajah. Tetapi, Pemilu yang semula akan dilaksanakan pada Januari 1946 sebagaimana Maklumat pemerintah tersebut, akhirnya baru dapat digelar Sembilan tahun kemudian dari tahun yang direncanakan dalam Maklumat.

[19]Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), 1999.

[20]Pasal 20 UU No.7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

[21]Pasal 21, ibid.

[22]Pasal 22, ibid

tersebut, secara laten juga diikuti pergeseran yang sama pada ranah sosial dan budaya. Sebuah pergeseran dan perubahan pada ranah sosial dan budaya yang memiliki dampak wajah demokrasi Indonesia masa mendatang.

Generasi dan Keterbukaan Politik

Oleh karena itu, Pemilu 2019 memiliki karakter kerumitan dan tantangan yang jauh berbeda dengan setting sosial budaya yang melingkupi Pemilu-pemilu sebelumnya, terlebih era sebelum Reformasi. Pandangan tersebut bersandar pada beberapa hal, sebagaimana tergambar di dalam Tabel 1 di atas. Diantaranya, Pemilu 2019 dihuni oleh para generasi Y atau dikenal dengan generasi milenial dan generasi Z. Dua generasi tersebut memiliki karakter yang terbuka. Secara statistik, pada tahun 2019 yang masuk dalam generasi tersebut diperkirakan di atas 30 persen dari 268 jumlah penduduk Indonesia. Kelompok anak muda yang juga disebut sebagai generasi *inter-connected* tersebut menentukan hiruk-pikuk penyelenggaraan dan warna partisipasi pada Pemilu.

Sebaran kelompok milenial ini lebih terpusat di pulau Jawa sekitar 53,95 persen dengan perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang tentu jauh lebih maju dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Data proyeksi penduduk BPS untuk tahun 2019, merinci jumlah milenial di Jawa Barat hampir berjumlah 12 juta. Sementara di Jawa Timur sekitar 13,80 persen dari sekitar 35 juta jumlah milenial di Indonesia atau sekitar 8 juta jiwa.[23] Sebaran yang kelompok generasi Y dan Z yang banyak di pulau Jawa ditambah habit kelompok ini dengan media sosial, maka hiruk-pikuk jagad dunia maya riuh lebih mudah menasional dengan cuitan generasi kelompok ini. Di tengah penyebaran generasi milenial tersebut, pertumbuhan pengguna media sosial pun diperkirakan melebihi jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia berjumlah 150 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 130 juta orang mengakses media sosial melalui *gadget*.[24] Artinya, 130 juta lebih penduduk Indonesia terkoneksi secara personal langsung melalui *gadget* atau *smartphone* yang mereka miliki. Mereka ini mengakses menerima, mencerna, dan menyebarkan berbagai bentuk informasi yang berlalulintas di lini massa. Pengguna media sosial, tidak hanya pada generasi milenial semata, tetapi juga dari penduduk yang lahir dari generasi-generasi sebelumnya.

Lalu lintas pertumbuhan media sosial ini dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, menjadi tantangan tersendiri bagi KPU, khususnya dalam meningkatkan

[23]https://tirto.id/sana-sini-ngaku-milenial-bagaimana-peta-milenial-indonesia-cX5W. Diakses pada November 2019.
[24]https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia. Diakses pada Desember 2019

partisipasi pemilih. Jika sebelumnya, berbagai macam informasi lebih banyak diakses melalui media-media konvensional seperti televisi, radio dan media-media konvensional lainnya, namun kini bergeser ke media sosial. Bahkan, masyarakat tidak lagi melulu mengandalkan media konvensional untuk menyebarkan konten yang mereka ingin sebarkan. Kini, setiap orang mampu mengkreasi dan memasifkan penyebaran informasi.

Selain adanya generasi milenial dan perkembangan penggunaan internet, kian menarik ketika ditopang dengan sistem politik yang terbuka. Di tengah pertumbuhan media sosial yang tinggi dan tumbuhnya generasi yang sudah terkoneksi dengan teknologi informasi, sistem politik yang terbuka menggeser ruang publik sebagai arena pertarungan bebas informasi. Berbeda dengan masa Orde Baru yang tertutup, informasi tidak hanya dapat dikontrol melalui kebijakan pemerintah, tetapi lebih banyak dimonopoli negara. Segala bentuk konten informasi media yang dianggap merugikan kepentingan politik pemerintah, acapkali dibredel pada masa pemerintahan Orde Baru.[25] Monopoli tersebut menjadikan informasi sebagai sarana pemerintah memproduksi "pengetahuan".[26]

Keterbukaan politik pada satu sisi dan perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat menciptakan pergeseran di ruang sosial dan budaya. Ketepatan nilai sebuah informasi diberangus oleh kecepatan. Informasi tidak lagi diukur sejauhmana menggambarkan dengan benar dan tepat, melainkan sejauh mana didapatkan dengan tenar dan cepat. Mungkin pada langgam inilah kemudian hadir apa yang disebut oleh Tom Nichols, *the death of expertise*, matinya kepakaran.[27] Masyarakat tidak lagi mencerna apakah informasi yang diterimanya disampaikan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau keahlian. Sepanjang informasi cepat dan tenar, akan dianggap tepat dan benar.

Kenyataan tersebut memunculkan problem serius manakala mencuat kecenderungan yang ngetrend disebut sebagai – *post-truth* atau pasca kebernaran dimana emosionalitas menumbangkan rasionalitas sebagai pengukur kebenaran. Dalam politik, *post-truth* menggambarkan sebuah era dimana kebohongan menjadi sesuatu yang dianggap penting dalam demokrasi yang disebar melalui media jejaring. Semaraknya berbagai berita bohong (*fake news, hoax*) pada Pemilu 2019 yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan Pemilu menjadi gambaran era pascakebenaran.

[25]Abdul Wahid & Dhinar A.P,Masyarakat dan Teks Media, Membangun Nalar Kritis Masyarakat atas Hegemoni Media,(Malang: UBPress), 2017. hlm, 84
[26]Denis McQuail. Teori Komunikasi Massa. (Jakarta: Erlangga), hlm. 40
[27]Tom Nichols,Matinya Kepakaran, The Death of Expertise,(Jakarta: Gramedia), 2018.

Menurut penulis, sebagai fenomena sosial, pasca kebenaran ini merupakan etape keberlanjutan perubahan dari fenomena hiperealitas dalam *post-mondernisme*. Jean Baudrillard menggambarkan masyarakat modern didominasi oleh "media, model sibernetika dan sistem pengemudian, komputer, pemrosesan informasi, industri hiburan dan pengetahuan, dan sebagainya."[28] Baudrillard menegaskan kehidupan *post-modern* ditandai dengan simulasi (*simulacra*) yang dihadirkan melalui televisi. Baginya, televisi tidak lagi menjadi cerminan realitas, melainkan telah menjadi realitas itu sendiri.[29]

Pada era media sosial saat ini pun rasanya demikian. Hiperealitas tidak hanya diciptakan oleh media televisi, tetapi juga mampu dikonstruksi oleh media sosial. Inilah yang disebut sebagai *post-truth*. Masyarakat cenderung menganggap sebagai kebenaran apa yang tersebar viral di media sosial. Informasi yang tersuguhkan di media sosial dicap sebagai realitas kebenaran. Kondisi inilah yang dihadapi dalam penyelenggaran Pemilu 2019. Tantangan KPU sepanjang penyelenggaraan Pemilu 2019 dirasakan sebagai serangan akibat fenomena pasca kebenaran.

Berbeda dengan media televisi, realitas kebenaran di dalam media sosial lebih dialektis, tidak dogmatis dan monologis sebagaimana disuguhkan televisi. Pertarungan informasi di dalam media sosial lebih terbuka, sementara di dunia televisi tertutup. Masyarakat atau individu penerima pesan yang disampaikan televisi pasif, sementara penerima informasi di media sosial lebih interaktif. Seorang penerima pesan dari televisi tidak bisa meng-*counter* melalui televisi. Tapi, pengguna media sosial bisa menggunakan instrumen yang sama untuk melawan informasi tertentu. Oleh karena sifatnya interaktif itulah, maka kontruksi kebenaran di media sosial dirangkai melalui jejaring intensionalitas dan kedalamannya menyentuh emosionalitas (bukan rasionalitas). Disinilah *post-truth* bersemayam.

Media	Pola	Kontruksi Sosial	Ranah
Televisi	Monologis	Hiperealitas	Pertarungan Tertutup

[29]George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015. hlm, 598

[30]George Ritzer, ibid.

Sebagai sebuah lembaga penyelenggara Pemilu, keberadaan KPU terus bermeta-morfosa menjadi lembaga yang mandiri dan independen. Pada Pemilu 1955, penyelenggaraan Pemilu dibentuk badan penyelenggara Pemilu dengan diadakannya Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat nasional dan ditiap daerah terdapat Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh PPI dari berbagai kekuatan politik. Pada masa Orde Baru dibentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak). Pada masa Orde Baru, personel penyelenggaranya lebih banyak dari pemerintah dan Golongan Karya (Golkar) dari unsur PNS. LPU sendiri diketuai langsung oleh Mendagri. Pada awal reformasi, Pemilu 1999 badan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pelaksananya membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat pusat. Tetapi keanggotaan berasal dari 5 (lima) perwakilan dari pemerintah dan 1 (satu) perwakilan dari masing-masing partai peserta Pemilu. Tahun-tahun berikutnya, anggota KPU tidak lagi dari unsur partai politik. Lembaga KPU bermetamorfosa menjadi badan penyelenggara yang semakin mandiri dan independen. Lih, Santoso & Buhdiati,Pemilu di Indonesia. Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan, (Jakarta : Sinar Grafika), 2019.

Media	Pola	Kontruksi Sosial	Ranah
Media sosial	Dialektis	Pasca-kebenaran	Pertarungan Terbuka

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU sebagai penyelenggara teknis pelaksanaan Pemilu mendapatkan serangan *hoax* bertubi-tubi.[30] Tercatat ada beberapa *hoax* yang cukup massif diarahkan kepada KPU pada saat itu. Diantaranya seperti berita *hoax* tujuh juta surat suara sudah tercoblos. Selain itu ada juga kabar bohong bahwa KPU memasukkan 31 juta pemilih siluman dan juga dituduh memasukkan 14 juta orang gila ke dalam DPT. Tidak hanya itu, 17,5 juta pemilih juga dianggap bermasalah. Terakhir yang cukup masif, berita *hoax* yang menuding bahwa server KPU untuk Sistem Pemungutan dan Penghitungan Suara (Situng) sudah disetting siapa yang akan menang.[31]

Serangan berita *hoax* tujuh juta surat suara tercoblos yang dialami oleh KPU merupakan contoh nyata tantangan era pasca kebenaran. Surat suara yang belum dicetak, namun diberitakan sudah dicoblos. Informasi bohong tersebut cukup menggemparkan dan merugikan KPU. Atas beredarnya berita bohong tersebut, para pimpinan KPU langsung merespons dengan melaporkannya kepada pihak berwajib. Selain itu, *counter* juga dilakukan di jagad maya agar publik percaya terhadap berita *hoax* tersebut, karena juga disebarkan oleh orang yang memiliki kapasitas di ruang publik.

Aktor intelektual dibalik berita *hoax* dari berbagai macam kalangan, tidak hanya masyarakat awam, tetapi juga acap kali dibuat dan disebarkan oleh kaum intelektual yang memiliki kedudukan dan kapasitas keilmuan yang mumpuni. Berita *hoax* "server KPU disetting untuk memenangkan paslon tertentu", misalnya disebarkan oleh seorang dosen yang memiliki latar belakang ilmu IT.[32] Di tengah masyarakat *post-truth* dan kecenderungan *banalitas*, pesan akan cenderung dianggap benar oleh publik, karena penyebar utama memiliki legitimasi sosial-kultural dengan latar belakang ilmu IT. Pelaku penyebar berita *hoax* ini ditangkap oleh polisi sebagai tindak lanjut atas laporan yang disampaikan oleh para komisioner KPU RI.[33]

Sekalipun demikian, kecenderungan informasi *hoax* pada era pasca kebenaran sulit untuk dieliminasi dari memori publik. Hasil survei SMRC kurun Mei-Juni 2019, cukup mengejutkan. Survei tersebut menandaskan bahwa 61 persen

[31]ibid.https://nasional.kompas.com/read/2019/04/05/09263981/kpu-kembali-jadi-sasaran-hoaks-kali-ini-soal-settingan-server?page=all
[32]https://news.detik.com/berita/d-4589327/pembuat-hoax-server-kpu-disettingterny ata-dosen-di-solo
[33]Ibid
[34]Rilis survei Saiful Mujani Research & Consulting, Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional Pasca-Peristiwa 21-22 Mei 2019, Sebuah Evaluasi. Update Temuan Survei Nasional Mei-Juni 2019.

masyarakat tidak percaya terhadap berita bohong tujuh surat suara tercoblos tersebut. Namun, terdapat empat persen yang percaya dan sebanyak 35 persen menjawab tidak tahu. Responden 35 persen yang menjawab tidak tahu tersebut menjadi problem karena mereka bisa saja ke depan percaya terhadap berita *hoax*. Selain itu, sekalipun secara kuantitas yang percaya kabar *hoax* tersebut hanya empat persen, tetapi itu akan menjadi membahayakan ketika yang empat persen itu bergerak aktif menyebarkan dan memviralkan pesan-pesan *hoax* tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada Mei 2019 merilis jumlah *hoax* selama bulan April 2019 sebanyak 486 berita *hoax* yang berlalu-lalang di dunia maya. Dari 486 *hoax* tersebut, tercatat sekitar 209 *hoax* berasal dari kategori politik.[35]Jumlah *hoax* tersebut hanya pada bulan April 2019 atau pada saat Pemilu 2019 dilaksanakan. Sejak Agustus 2018 sampai April 2019, Kominfo mencatat total berita *hoax* sebanyak 1.731 *hoax* yang tersebar di masyarakat. Intensitas hilir-mudik *hoax*, *fake news* atau kabar bohong yang meningkat pada saat pelaksanaan Pemilu tersebut benar-benar menjadi tantangan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Mencermati wacana *hoax* yang dilancarkan kepada KPU yang langsung menyerang aspek kredibilitas, dapat disimpulkan memiliki target untuk "mendelegitimasi" segala produk yang dihasilkan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu serentak 2019, khususnya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Konklusi konstruksi yang ingin dibangun adalah "KPU curang". Tapi, cap dan berbagai macam serangan ini berdampak terhadap tekanan psikologis penyelenggara *adhoc* (PPK, PPS, dan KPPS). Beban kerja mereka menjadi berat karena kontruksi "KPU curang" melalui pelbagai serangan hoax itu merembet pada segala proses pelaksanaan yang berkenaan dengan hasil pemungutan suara legislatif dari semua level, baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional.

Tekanan besar itulah salah satunya yang menyebabkan banyaknya penyelenggara badan *adhoc* jatuh korban. Diperkirakan sekitar 440 orang petugas KPPS hingga PPK yang meninggal dunia dan 3.788 orang yang sakit pada Pemilu 2019. Total dari KPU dan Bawaslu jumlah yang meninggal dunia sekitar 554 orang.[36] Jumlah korban penyelenggara terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia sekaligus menunjukkan betapa beratnya penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Menurut penulis, beban kerja fisik, salah satu penyebabnya adalah beratnya tekanan psikis yang dihadapi penyelenggara *adhoc* akibat kontruksi "KPU curang" melalui *hoax* yang tersebar secara masif dan intens.

[23]https://tirto.id/sana-sini-ngaku-milenial-bagaimana-peta-milenial-indonesia-cX5W. Diakses pada November 2019.
[24]https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia. Diakses pada Desember 2019

Menaklukkan Imagoligi

Berbagai kenyataan tantangan perubahan sosial serta kesadaran berbagai tantangan perubahan sosial kontemporer dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dijelaskan di atas, sebagaimana di provinsi lain, KPU Provinsi NTB juga melakukan gerakan menghadapi serangan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui berbagai lini. Berbagai program dan gerakan dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap tahapan Pemilu, tetapi juga untuk meng-*counter* hilir-mudik informasi *hoax* yang datang menyerang.

Pertama, maksimalisasi para relawan demokrasi dan seluruh SDM sampai ke badan penyelenggara *adhoc* untuk memerankan diri seperti pasukan siber (*cyber army*). Hal ini untuk menangkis dan melawan imagolisisasi yang diproduksi di media dan dunia siber. Jumlah relawan di NTB kurang lebih 550 orang dan jumlah anggota badan *adhoc* hingga TPS sebanyak 115.741 orang. Keberadaan mereka menjadi penambah kekuatan sosialisasi lembaga KPU, khususnya dalam menghadapi berbagai serangan di dunia siber.

Tidak hanya turun ke masyarakat dan kelompok pemuda kelas menengah yang secara langsung mengakses media sosial melalui *gadget* mereka. Tetapi juga menyentuh masyarakat marjinal dan terpinggirkan, seperti pemulung sampah, mantan pengguna Narkoba, mantan pekerja seks komersial (PSK), hingga menyentuh kelompok aliran Ahmadiyah. Mereka selama ini terpinggirkan dalam kehidupan sosial politik mainstream. Namun, mereka juga tidak luput terpapar oleh informasi-informasi *hoax* di media sosial. [37]

Kedua, memaksimalkan ruang-ruang siaran publik dengan mendesain iklan-iklan kreatif. KPU Provinsi NTB melakukan sosialisasi dengan desain kreatif dan intensitas massif ke berbagai media, tidak hanya media konvensional, tetapi juga ke media sosial. Berkat kreativitas dan intensitas dalam iklan layanan masyarakat ini, KPU Provinsi NTB mendapatkan penghargaan sebagai juara satu terbaik dalam iklan layanan masyarakat kreatif tingkat nasional oleh KPU RI. Instrumen penyebaran tidak hanya melalui tevelisi dan radio, tetapi memaksimalkan kekuatan media sosial.

Penguatan iklan layanan masyarakat ini pada dasarnya didorong oleh kesadaran pentingnya mengimbangi berbagai kemungkinan informasi atau suguhan konten informasi yang merugikan KPU melalui media konvesioal dan media sosial. Lebih-lebih sebagaimana dijelaskan di atas, -- dalam teori Baudrillard – televisi, cenderung menciptakan hiperealitas. Dan, *post-truth* atau pasca kebenaran tercipta akibat kemunculan media sosial. Karena itu, KPU NTB membuat berbagai

[37]Agus Hilman (Ed). Meruntuhkan Apatisme,(Mataram: KPU NTB), 2019

konten iklan layanan masyarakat yang disampaikan kepada masyarakat berupa audio, audio-visual, dan cetak.

No	Media	Judul Iklan
1	Audio-Visual(Televisi, Youtube, Instagram, dll)	• Sosialisasi di udara (Paralayang) • Sosialisasi di Bawah Laut (Kibar Bendera Bawah Laut) • Ayo ke TPS Pemilu 2019 – KPU NTB
2	Media social	Ayo ke TPS, No Golput Pemilu 2019
3	Poster (Koran, Bilboard, Instagram, dll)	• Cara Mencoblos di Pemilu 2019 • Warna Surat Suara Pemilu 2019 • Peserta Pemilu 2019 • Pindah Memilih Pemilu 2019 • Ucapan Pemilu dari Virzha untuk NTB • Testimoni Masyarakat NTB pada Pemilu 2019 • Jingle KPU NTB Terima Kasih Telah Memilih • Terima Kasih Telah Memilih • GMHP Pemilu 2019 • Jadwal Debat Pilpres 2019 • Jingle Pemilu 2019 • Pindah Memilih Pemilu 2019 • Terima Kasih Telah Memilih • Peserta Pemilu 2019 • Hari Pencoblosan • Pencoblosan pada Surat Suara Pemilu 2019 • Tata Cara Pindah Memilih • Lima Warna Surat Suara Pemilu 2019 • Pemilu Luber dan Jurdil • Money Politics Pemilu 2019 • Poster Pemilu Bukan Permainan • Tata Cara Pencoblosan Surat Suara

Ketiga, menyentuh berbagai basis dengan inovasi kreasi sosialisasi. Kegencaran fenomena *post-truth* melalui informasi hoax yang dikonstruksi melalui pesan kreatif, memaksa kita untuk menggunakan strategi yang sama, yakni kreativitas. Berbagai cara dilakukan, seperti mendesain dan memanfaatkan secara maksimal konser musik "Pemilih Berdaulat, Negara Kuat" yang sudah dianggarkan oleh KPU RI. Konser musik digunakan tidak hanya untuk sosialisasi dan ajakan untuk memilih pada Pemilu 2019, tetapi juga menjadi sarana untuk melawan hoax dengan hiburan yang edukatif. Selain itu juga, KPU NTB melakukan lomba video

speak up your mind "Golput Bukan Pilihan & Tolak *Hoax* Pemilu" bekerja sama dengan beberapa komunitas.

Meroket dan Kokoh

Partisipasi meroket dan demokrasi kokoh. Kalimat tersebut sepertinya relevan dijadikan konklusi penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan berbagai dinamikanya di atas. Berbagai polarisasi akibat fenomena *post-truth* dan menguatnya politik identitas yang tidak hanya bersifat laten, melainkan termanifestasi ke dalam keriuhan dan "kekisruhan" sepanjang Pemilu 2019 di media sosial. Di tengah keriuhan tersebut, Pemilu serentak 17 April 2019 tetap terlaksana dengan partisipasi yang tinggi dan – secara umum – berjalan dengan lancar dan damai di seluruh Indonesia. Tidak terjadi konflik dan kerusuhan sebagaimana dikhawatirkan berbagai pihak sebelumnya.

Penghujung tahun 2018, tujuh bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, beberapa kelompok masyarakat dan elite politik yang terlibat dalam tim pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu, menggelar aksi reuni 212. Aksi yang bermula lahir atas reaksi umat muslim terhadap pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2016. Saat itu, Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Ahok dianggap mengeluarkan pernyataan yang menghina atau menistakan agama. Pada tanggal 2 Desember 2016, jutaan umat Islam turun melakukan aksi di Monumen Nasional (Monas) Jakarta dengan tuntutan agar Ahok dihukum. Inilah nisbat angka 212 yang diambil dari tanggal 2 dan bulan 12 (Desember). Tahun 2018, Ahok terbukti bersalah dan divonis 2 (dua) tahun penjara.[38]

Suasana penyelenggaraan Pemilu 2019 yang penuh dengan *hoax* terhadap penyelenggara Pemilu (KPU) bersamaan dengan bergeliatnya gerakan populisme, polarisasi politik, dan politik identitas mengundang banyak kekhawatiran. Atas kondisi tersebut, banyak kalangan memprediksi partisipasi Pemilu 2019 akan rendah dan potensi konflik tinggi. Bahkan, Kepala Kepolisian Republik Indoensia (Kapolri) pada saat itu menyatakan potensi konflik sosial sebagai ancaman terbesar pada Pemilu 2019.[39] Kesimpulan Kapolri tersebut mungkin didasarkan pada kenyataan di dunia maya dan polarisasi semakin menguat.

Akhirnya, sejarah membuktikan bahwa Pemilu serentak 2019 terlaksana dengan aman dengan partisipasi pemilih yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan upaya memenangkan partisipasi dapat diwujudkan, yakni partisipasi yang tinggi baik secara kuantitas maupun kualitas. Berbagai perkiraan potensi konflik yang akan terjadi pada hari pelaksanan Pemilu tidak terbukti. Pemilu serentak 2019 pertama dalam sejarah Pemilu di Indonesia, berjalan dengan lancar dan aman dari Sabang sampai Merauke.[40] Kenyataan ini menjukkan ketahanan demorkasi

(*democratic resilience*) di Indonesia sudah cukup kokoh.

Di Provinsi NTB, pelaksanaan Pemilu serentak pun berjalan dengan lancar, aman dan menghasilkan partisipasi pemilih yang tinggi. Kedewasaan politik masyarakat Indonesia pada umumnya, dan NTB pada khususnya seolah menegaskan bahwa kita tidak boleh ragu terhadap ketahanan demokrasi di Indonesia. Berbagai ketegangan yang terjadi sebelum pelaksanan Pemilu terjawab dengan pelaksanaan Pemilu yang lancar dan damai. Tapi, ledakan kerusuhan sempat terjadi satu bulan setelah pencoblosan, tepatnya 21 Mei 2019, setelah penetapan hasil rekapitulasi suara di tingkat nasional. Para pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diperkirakan kalah, sebelumnya selalu menggelar demonstrasi. Ribuan para demonstran datang dari berbagai daerah dan menduduki Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat, depan kantor Bawaslu RI.

Saat kerusuhan terjadi, ada kekhawatiran akan berdampak dan merebak ke berbagai daerah. Video dan pesan berantai tentang aksi di Jakarta di media sosial mulai bertebaran dengan cepat. Di NTB, sempat tersebar akan ada aksi ribuan massa yang serupa akan digelar menyusul berita adanya korban dalam demonstrasi di Jakarta dengan titik kumpul berdekatan dengan kantor KPU NTB. Eskalasi di Jakarta kian memanas. Berkat kerjasama dan koordinasi seluruh pihak, mengantisipasi keamaan, demonstrasi dibatalkan. Pemerintah melalui Menko hingga memblokir media sosial agar konten-konten kerusuhan di Jakarta tidak dijadikan bahan hoax dan provokasi. Akhirnya berhasil dikanalisasi sehingga tidak meluas.

Last but no least, memenangkan partisipasi bukanlah hanya hasil kerja kami sebagai penyelenggara Pemilu, tetapi merupakan ikhtiar seluruh anak bangsa untuk kemajuan demokrasi negeri ini. Tingginya partisipasi pemilih dalam Pemilu serentak 2019 patut kita banggakan. Namun yang lebih membanggakan adalah ketika langkah partisipasi pemilih ke bilik suara tidak didorong oleh – apa yang disebut Barack Obama dalam kutipan awal tulisan ini, “politik sinisme”, melainkan digerakkan bait-bait “politik harapan”. Yakni politik yang ditebar dengan cita-cita kemajuan, bukan dilempar dengan kata-kata kebencian.[]

[38]https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/09/10560111/terbukti.menodai.ag ama.ahok.divonis.2.tahun.penjara
[39]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190414010945-12-386165/polri-konflik-sosial-potensi-ancaman-tertinggi-pemilu-2019
[40]https://www.liputan6.com/news/read/3944426/polri-pemilu-2019-aman-dan-kondusif

jdih.kpu.go.id

Daftar Pustaka

Feith, Herbert. 1999. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia)

Fukuyama, Francis. 2007. Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. (Yogyakarta: Penerbit Qalam)

McQuail, Denis. Teori Komunikasi Massa. (Jakarta: Erlangga)
Nichols, Tom. 2018. Matinya Kepakaran, The Death of Expertise. (Jakarta: Gramedia).

Nochols, Tom. 2018. MatinyaKepakaran, The Death of Expertise, PerlawananterhadapPengetahuan yang Telah Mapan dan Mudaratnya. (Terjem). Ruth Meigi P. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Ritzer, George. 2015. Teori Sosiologi Modern. 2015.
Santoso, Topo &Budhiati. 2019. Pemilu Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.Jakarta: SinarGrafika.

Undang-undang No.7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Wahid, Abdul& Dhinar. 2017.Masyarakat dan Teks Media, Membangun Nalar Kritis Masyarakat atas Hegemoni Media. (Malang: UBPress).

Zeigler, Harmon. 1993. Political Parties in Industrial Democracies. USA: Peacock Publishers
Hilman, Agus. 2019. Meruntuhkan Apatisme. (Mataram: KPU NTB). 2019.
https://news.detik.com/berita/d-4684237/survei-lipi-soal-pemilu-serentak-2019-74-publik-kesulitan-memilih. Diakses pada November 2019.

https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/03/survei-indikator-mayoritas-pu blik-percaya-kpu-netral-sebagai-penyelenggara-pemilu

Rilis survei Saiful Mujani Research & Consulting, Kondisi Demokrasi dan Ekonomi

Politik Nasional Pasca-Peristiwa 21-22 Mei 2019, Sebuah Evaluasi. Update Temuan Survei Nasional Mei-Juni 2019.

https://tirto.id/sana-sini-ngaku-milenial-bagaimana-peta-milenial-indonesia-cX5W. Diakses pada November 2019.

jdih.kpu.go.id

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia. Diakses pada Desember 2019

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/05/09263981/kpu-kembali-jadi-sasaran-hoaks-kali-ini-soal-settingan-server?page=all

https://news.detik.com/berita/d-4589327/pembuat-hoax-server-kpu-disettingterny ata-dosen-di-solo

https://news.detik.com/berita/d-4532182/kominfo-identifikasi-486-hoax-sepanjang-april-2019-209-terkait-politik

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019

https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/09/10560111/terbukti.menodai.agama.ahok.divonis.2.tahun.penjara

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190414010945-12-386165/polri-konflik-sosial-potensi-ancaman-tertinggi-pemilu-2019

https://www.liputan6.com/news/read/3944426/polri-pemilu-2019-aman-dan-kondusif

Melawan Perusak Demokrasi

Oleh Hariyadi Hamid
Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara

ABSTRAK

Tulisan ini mengurai permasalahan yang seringkali merusak tatanan demokrasi dalam pemilihan umum. Hasil indentifikasi terdapat 4 (empat) variabel yang kerap dijumpai, yaitu politik uang, politik identitas, hoaks pemilu, dan ujaran kebencian dalam pemilu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif. Pengumpulan data menggunakan studi literatur dan dokumentasi guna menjawab permasalahan yang diajukan. Temuan lapangan berupa data dan fakta yang disajikan menemukan bahwa politik uang, politik identitas, hoaks pemilu, dan ujaran kebencian dalam pemilu mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Kesimpulannya, perlu upaya perlawanan secara bersama-sama dengan melakukan strategi pencegahan dan penindakan untuk memberantas hal-hal yang dapat merusak demokrasi sehingga mampu mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Kata kunci
Politik Uang, Politik Indentitas, Hoaks, Ujaran Kebencian, Pemilu

jdih.kpu.go.id

Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan sistem demokrasi. Menurut Solihah dan Witianti (2017), demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, yakni sebuah sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*).

Kebebasan yang dimaksud dapat diartikan kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial dan politik. Maka prinsip tersebut sangat melekat dalam kedaulatan rakyat sebagai basis utama penerapan kehidupan berdemokrasi.

Pemilu menjadi salah satu ciri dalam suatu sistem demokrasi, selain keberadaan partai politik. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat bukan berarti segala-galanya tentang demokrasi, melainkan sebagai sarana pengimplementasian asas dan sendi-sendi demokrasi (Pratiwi, 2017). Pemilu bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menakar kadar demokrasi suatu sistem politik.

Dengan demikian, Pemilu bertujuan untuk menghasilkan para pemimpin yang amanah di lembaga eksekutif dan legislatif. Sistem demokrasi dipilih karena dianggap lebih baik dalam menghasilkan para pemimpin bangsa. Namun pada praktiknya, ancaman terhadap demokrasi di Indonesia pada setiap momen Pemilu begitu nyata dan membahayakan.

Indentifikasi ancaman yang dapat merusakkan tatanan demokrasi di negeri ini terkait praktik politik uang, politik identitas, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian terhadap peserta Pemilu. Penelusuran lebih mendalam terkait variabel-variabel tersebut menjadi sangat penting diangkat dalam suatu studi tersendiri.

Tulisan ini mencoba mengurai upaya yang dapat kita lakukan agar ancaman yang merusak demokrasi itu bisa kita berantas dan tidak terjadi lagi. Banyak temuan-temuan disajikan sebagai data dan fakta. Kerangka konseptual upaya perlawanan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, coba ditawarkan sebagai alternatif solusi yang dapat kita tempuh bersama. Sinergitas semua elemen terkait, mulai dari penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), pemerintah, relawan pemantau Pemilu, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum sangat diperlukan guna melawan hal-hal yang dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Menjawab permasalahan yang diajukan, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif. Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan studi literatur dan dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan memberi ulasan (review) terhadap berbagai literatur yang berkenaan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mencari data dan fakta berkenaan dengan variabel-variabel penelitian.

Diskusi dibangun dengan cara melakukan telaah dan analisis secara kritis terkait data dan fakta yang ditemukan. Setiap permasalahan akan dikaji secara mendalam. Tawaran konsepsional penyelesaian masalah diajukan sebagai rekomendasi-rekomendasi hasil penelitian yang diharapkan mampu menjawab setiap permasalahan yang diajukan.

Dasar Teori

1. Politik Uang

Definisi politik uang masih sumir dari berbagai literatur. Rujukan tentang politik uang yang selalu digunakan adalah UU No. 10/2016 (biasa disebut UU Pilkada) termuat pada pasal 73 ayat 1 bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Ada batas kepatutan dalam pemberian uang atau materi lainnya yang diperbolehkan selama masa kampanye. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2017 pasal 71 ayat 3 sampai 5 memberikan batasan: 1). Biaya makan, minum, dan transpor tidak boleh dalam bentuk uang; 2). Hadiah hanya boleh diberikan dalam kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk perlombaan; 3). Hadiah harus dalam bentuk barang; 4). Dan nilai hadiah tersebut paling tinggi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Definisi para ahli juga masih senada dengan aturan tersebut. Menurut Kumolo (2015) mendefinisikan politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk memengaruhi suara pemilih.

Bentuk politik uang saat ini sudah semakin meluas. Tidak hanya menyangkut pemberian sejumlah uang atau materi menjelang hari pencoblosan, atau biasa dikenal dengan istilah "serangan fajar". Namun, bentuk politik uang juga dapat berupa pemberian materi yang melebihi batas kepatutan pada saat kampanye hingga hari pemilihan, membeli "perahu parpol" pengusung, menyuap atau memberi janji jabatan kepada penyelenggara Pemilu, dan biaya pengganti administrasi dukungan KTP bagi calon perseorangan.

Permasalahan politik uang menjadi momok dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Politik uang merusak sendi-sendi demokrasi. Politik uang menyebabkan hasil Pemilu melahirkan pemimpin koruptor. Dengan adanya praktik politik uang dapat mengancam proses pembangunan yang selama ini telah berjalan.

2. Politik Indentitas

Pelaksanaan Pemilu seringkali mengalami tantangan dari berbagai permasalahan. Setiap tantangan dalam Pemilu tersebut dapat menurunkan kadar kualitas demokrasi. Itu menjadi semakin kompleks manakala masalah yang dahulu ada pada Pemilu sebelumnya tidak terselesaikan dan menambah masalah pada Pemilu berikutnya. Salah satu tantangan yang bisa menjadi masalah Pemilu saat ini, baik Pilkada 2018 hingga Pemilu Serentak (Pileg dan Pilpres) tahun 2019 adalah meningkatnya politisasi identitas dalam setiap pelaksanaan momentum Pemilu dan Pemilihan.

Politik identitas merupakan cara-cara politik dengan manipulasi pemahaman dan pengetahuan dengan menggunakan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) demi kepentingan politik tertentu. Menurut Herdiansyah (2017), politik identitas merupakan sikap politik yang fokus pada subkelompok dan merujuk pada aktivisme atau pencarian status yang dilandaskan pada kategori ras, gender, etnisitas, orientasi budaya, dan identifikasi politik lainnya.

Fenomena politik indentitas mengemuka sebagai konsekuensi dari penerapan sistem demokrasi negara dengan struktur masyarakatnya yang sangat pluralistik. Menurut Adiwilaga, et.al. (2017), politik identitas terbentuk sebagai wujud dari interaksi antara nilai-nilai demokrasi yang menjadi mainstream dengan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai lain yang sudah terbentuk sebagai sebuah struktur sosial di masyarakat. Persinggungannya membuat politik identitas tumbuh subur dan berkembang secara pesat sehingga menjadi bagian dari proses perkembangan demokrasi itu sendiri. Bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi dalam memilih

pemimpinnya, tentu saja akan menghadapi tantangan praktik politisasi indentitas. Keberagaman etnis, suku, agama, dan budaya pada struktur sosial masyarakatnya menjadi lahan empuk penggunaan politik identitas yang dilakukan oleh oknum-oknum aktor demi mengapai kepentingan politiknya. Hal ini akan mengancam kehidupan berdemokrasi dan merusak siklus kepemimpinan nasional. Bahaya yang ditimbulkan dari politik identitas etnis tidak hanya menjadi ancaman terhadap keberlangsungan demokrasi, namun lebih jauh lagi dapat menyebabkan masyarakat terpecah belah dan mengarahkan negara pada keadaan *failed state* (Adiwilaga, et.al., 2017). Tentu saja hal ini tidak boleh kita biarkan terus-menerus terjadi sehingga diperlukan upaya perlawanan bersama yang bertujuan untuk memberantas praktik politik identitas.

3. Hoaks Pemilu

Tema terkait hoaks masih menjadi topik diskusi yang menarik untuk disimak, dan tetap menjadi bahan perbincangan yang hangat. Dalam upaya memerangi hoaks, mengundang berbagai reaksi banyak kalangan. Ada pihak yang menganggap hoaks akan menjadi ancaman, apabila isi yang diberitakan memuat unsur-unsur provokatif dan SARA. Pada sisi yang lain, banyak pula kalangan menilai hoaks hanya merupakan bentuk dari ketakutan sebuah rezim yang berkuasa.

Sesungguhnya, hoaks adalah berita bohong. Hal tersebut didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahkan hoaks diartikan lebih jauh lagi menyangkut unsur perbuatan jahat. Dalam Oxford English Dictionary,hoax didefinisikan sebagai "*malicious deception*" atau "kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat".

Hoaks adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu, atau mengakali pembaca/pendengarnya agar mempercayai sesuatu. Asal kata "hoaks" diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni ""ocus" dari mantra "hocus pocus", frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa "sim salabim" (Andarningtyas, 2017).

Hoaks sangat berbahaya jika dibiarkan terjadi karena berpotensi memecah belah eksistensi sebuah negara. Terlebih lagi, perguliran hoaks begitu sangat masif seiring dengan momentum Pemilu. Tentu kita masih ingat Pilkada DKI Jakarta 2017, semakin memanas di saat hoaks mulai bertebaran sehingga konflik dan perselisihan atas nama SARA dapat dengan mudah bisa meletus.

Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM), Arie Sujito mengatakan hoaks dan ujaran kebencian yang mengkomodifikasi etnis dan agama kian masif menjelang momentum Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Hoaks bisa berbahaya bagi demokrasi

dan kebangsaan Indonesia jika tak dihentikan (Putri, 2018).

Bahkan hoaks dan ujaran kebencian telah terbukti menyebabkan konflik antarkelompok dan krisis kepercayaan yang mengancam kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Krisis kepercayaan yang meluas menciptakan keresahan publik sehingga masyarakat semakin susah membedakan informasi benar dan salah. Dari sanalah kemarahan dan konflik sosial bisa mengemuka karena hoaks.

4. Ujaran Kebencian Pemilu

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Dalam proses Pemilu, ujaran kebencian merupakan bagian dari model kampanye hitam yang bertujuan membentuk framing negatif dengan melakukan stigmatisasi terhadap lawan politiknya.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Individu dan/atau kelompok masyarakat yang dijadikan sasaran terkait perbedaan aspek menyangkut suku, agama, aliran keagamaan, kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual.

Kemunculan dan berkembangnya ujaran kebencian di Indonesia karena dipengaruhi 2 (dua) faktor kunci (Widodo, 2017). Pertama, konteks sosial masyarakat Indonesia sendiri yang sangat plural. Kedua, konteks demokrasi, otonomi daerah, dan pemilihan umum eksekutif secara langsung. Alih-alih membuka deliberasi seluas-luasnya, kontestasi elektoral ini justru kemudian sering membawa pada segregasi sosial yang cukup tajam. Hal ini diperparah dengan tingkat budaya literasi masyarakat Indonesia yang sangat rendah.

Ujaran kebencian sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan karena merusak praktik berdemokrasi. Menurut Widodo (2017), ujaran kebencian akan menjadi cara seleksi yang tidak sehat bagi proses elektoral maupun dalam kebijakan publik. Ujaran kebencian akan menyingkirkan kemungkinan munculnya pilihan terbaik dalam proses demokrasi dan pemerintahan. Sedangkan dalam perspektif pembangunan bangsa, ujaran kebencian berbasis politik identitas akan menimbulkan pembelahan-pembelahan dan merusak integrasi bangsa.

Hasil dan Pembahasan

1. Temuan dan Strategi Perlawanan Politik Uang

Walau begitu sangat banyak dugaan politik uang dalam pelaksanaan pemilu, namun yang bisa diproses masih sangat sedikit. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap 600 temuan politik uang selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 (Ramdhani, 2017). Angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan praktek politik uang yang begitu sangat marak pada pelaksanaan Pilkada.

Menjelang hari pencoblosan pada Pemilu 2019, Bawaslu menemukan 25 kasus politik uang (Andriyani, 2019). Bentuk politik uang mulai dari sogokan sembako hingga pemberian uang tunai. Temuan ini merupakan hasil patroli Bawaslu pada masa tenang kampanye. Walau faktanya di lapangan praktik politik uang sedemikian masif, namun penanganan pelanggaran politik uang masih sangat kecil pada Pemilu 2019.

Kesulitan pengungkapan kasus politik uang disebabkan banyak faktor. Rahmat Bagja, anggota Bawaslu RI mengatakan, setidaknya ada 2 (dua) faktor utama yang seringkali menjadi kendala dalam pengungkapan politik uang (Aziz, 2018). Pertama, pihaknya kesulitan untuk mendengarkan keterangan saksi atau sulit mencari saksi yang bersedia membongkar adanya politik uang. Kedua, Bawaslu juga mengalami kesulitan karena keterbatasan waktu.

Upaya penanganan politik uang, sebagaimana penanganan pelanggaran pidana Pemilu selama ini melibatkan 3 (tiga) lembaga terkait, yaitu Bawaslu (penyelenggara Pemilu), Kepolisian (penyidik) dan Kejaksaan (penuntut) yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Namun, jika kita cermati hasilnya maka peran Sentra Gakkumdu yang selama ini dilakukan tidak optimal dalam mengungkap kasus adanya praktik politik uang.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas politik uang, khususnya dengan cara melakukan penindakan secara tegas para pelakunya. Pada kenyataannya, politik uang tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan hukum. Paling ideal dengan dilakukan dengan mencegah terjadinya politik uang.

Pencegahan harus melibatkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan kultural. Pendekatan hukum merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*), jika berbagai upaya pencegahan tidak berhasil. Pendekatan hukum dalam politik uang membutuhkan waktu dalam proses penyelesaiannya.

Strategi pencegahan dioptimalkan melalui sosialisasi terkait bahaya politik uang beserta cara melawannya. Porsi utama tentu saja menjadi tugas penyelenggara Pemilu dan pemerintah. Sosialisasi dapat dilakukan dengan tatap muka, kampanye monologis dan dialogis, penyebarluasan pamflet dan spanduk. Media sosial dan media massa juga dapat dijadikan saluran penyebarluasan informasi sebagai bentuk perlawanan politik uang.

Merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kalangan akademisi juga dapat membantu pembentukan opini agar kampanye anti politik uang dilakukan secara massal. Kerjasama dengan relawan pemantau Pemilu maupun elemen masyarakat lainnya, turut serta menangkal penyebaran politik uang di masyarakat.

Jika transaksi politik uang terjadi selama proses Pemilu, maka upaya penindakan harus dilakukan secara tegas. Peran lembaga Bawaslu sebagai institusi resmi yang diberikan kewenangan harus bisa memproses dan menindak segala macam bentuk praktik politik uang. Tidak boleh ada pandang bulu, tidak boleh ada rasa iba, dan tidak boleh ada sikap kompromistis dalam menindak seluruh aktor yang terlibat dalam politik uang.

Sangat penting untuk melakukan perbaikan regulasi dan kebijakan berkenaan dengan penanganan pelanggaran politik uang. Jika memungkinkan, prosedur penanganan pelanggaran politik uang bisa lebih disederhanakan lagi, khususnya terkait alat bukti awal. Durasi waktu proses pembuktiannya dapat ditambah. Begitu juga personel yang khusus menanganinya harus diperbanyak.

Bawaslu juga harus mampu memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimilikinya. Perangkat personel di setiap struktur dapat diberdayakan secara optimal. Misalnya, peran pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa dijadikan ujung tombak dalam memantau dugaan praktik politik uang yang sering terjadi di masyarakat.

Peran pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa bisa diperluas tugasnya sebagai intelejen yang memasok informasi penting aktor-aktor pelaku politik uang. Para aktor yang sering terlibat dalam politik uang pada umumnya tidak jauh berbeda di setiap momen pemilu dan pemilihan. Bawaslu harus memberi pengawasan ekstra terhadap aktor tersebut, mencari waktu lengahnya, dan menangkap tangan manakala dia melakukan transaksi politik uang.

Cara seperti itu lebih efektif dibanding menunggu laporan dugaan tindak pidana politik uang. Jika diproses sekalipun, kadangkala alat buktinya sangat kurang. Apalagi para pelapor sangat jarang yang mau dijadikan sebagai saksi. Perlu

jdih.kpu.go.id

ada terobosan baru. Perlu ada strategi dan taktik yang jitu dalam memberantas masifnya politik uang yang kerap terjadi di masyarakat.

2. Temuan dan Strategi Perlawanan Politik Indentitas

Politisasi identitas dilakukan sebagai upaya untuk menggunakan, mengeksploitasi, atau memanipulasi identitas, apakah bentuknya berbasis agama, etnik, atau penganut ideologi tertentu untuk menimbulkan opini dan stigma negatif ke masyarakat dengan tujuan kepentingan politik. Praktik seperti ini sangat lazim ditemukan pada sistem demokrasi liberal. Terkhusus di Indonesia, tarikan politik identitas semakin menguat pasca Pemilu 2014.

Banyak fakta yang dapat disajikan pasca politik pemilu 2014, marak bermunculan diskursus yang mengaitkan agama dan politik. Intensitasnya semakin meningkat tatkala pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, ditandai dengan gelombang unjuk rasa yang berjilid-jilid. Tentu banyak kalangan berpendapat, hal ini mengarah pada pertarungan Pemilihan Presiden 2019.

Studi Sweinstani dan Hasanah (2017) mengungkap pelaksanaan Pilkada 2017 di Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat telah terjadi polarisasi pertarungan dengan menggunakan politik identitas. Pertarungan di Pilkada Maluku Utara terkait isu primodial memilih putra daerah dan pendatang (bukan putra daerah). Sementara pada Pilkada DKI Jakarta memanfaatkan identitas dengan isu etnis (pribumi versus non pribumi) dan isu agama (Islam versus Kristen). Kasus Pilkada di Kalimantan Barat menyangkut pertarungan etnis melayu dan etnis dayak.

Temuan yang sama juga telah banyak diungkap oleh berbagai peneliti yang lain. Sebagai bahan renungan, pada banyak kasus Pilkada ditemukan telah terjadi polarisasi pertarungan dengan menggunakan politik identitas. Hal ini sungguh sangat membahayakan bagi keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia.

Kristalisasi politik identitas memuncak pada Pemilu Serentak 2019, khususnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Drama pertarungan politik pengulangan Pilpres 2014 tersaji kembali pada Pilpres 2019. Politik identitas semakin kental dan menjadi jargon perjuangan masing-masing kubu. Kampanye berbasis politik identitas ditampilkan pada berbagai saluran yang tersedia.

Tentu hal ini tidak kita inginkan terjadi secara terus menerus. Untuk itu, perlunya upaya bersama semua komponen anak bangsa melakukan perlawanan terhadap penggunaan politik identitas. Pendekatan yang dipilih dapat berupa pencegahan dan penindakan. Keterlibatan ini tidak hanya dilakukan oleh

penyelenggara Pemilu, namun juga dapat dilakukan oleh pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Strategi pencegahan sebagai bagian perlawanan terhadap politik identitas dimulai dengan melakukan sosialisasi secara masif terkait pentingnya memilih pemimpin dengan pendekatan rasional, tanpa melihat latar belakang SARA. Masyarakat dalam memilih pemimpin diarahkan dengan melihat, mengkaji, dan memutuskan berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan, apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai pembanding, rekam jejak (*track record*) dari calon pemimpin yang hendak dipilih dapat dijadikan rujukan.

Bentuk pencegahan lain yang dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan peran tokoh kunci strategis. Bisa tokoh masyarakat, tokoh agama, pengamat politik, dan kalangan akademisi. Tokoh kunci strategis seringkali dijadikan rujukan masyarakat dalam bersikap dan menanggapi berbagai persoalan yang mereka hadapi. Pembentukan opini bermula dari tokoh kunci strategis itu dapat membendung penyebaran politik identitas. Lebih efektif lagi jika mampu menggandeng kalangan media massa dan penggiat media sosial.

Upaya penindakan terhadap politik identitas dalam Pemilu lebih banyak menjadi porsi kewenangannya Bawaslu. Peraturan perundang-undangan telah memberikan larangan terhadap kampanye yang bernuansa SARA, dengan sanksi tegas menyertainya. Peran Bawaslu sangat dinanti untuk memproses dan menindak semua kasus pelanggaran pidana Pemilu yang bermotif politik identitas. Jika bukti sangat kuat, sanksi diskualifikasi pasangan calon (paslon) dalam Pilkada bisa dijadikan pembelajaran sebagai efek jera bagi calon yang lain.

Kalangan masyarakat dapat pula berperan dalam melakukan penindakan terhadap politik identitas. Pelaku bisa diberikan sanksi sosial berupa pengucilan, penutupan akses pemberian bantuan, dan tidak akan memilihnya jika mencalonkan diri dalam suatu pertarungan politik. Hukuman itu tidak hanya ditimpakan kepada calon tersebut, akan tetapi juga harus diberlakukan kepada tim suksesnya.

3. Temuan dan Strategi Perlawanan Hoaks Pemilu

Sejumlah data menyajikan bahwa penyebaran hoaks terkait Pemilu begitu sangat masif di Indonesia. Data yang dirilis oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kominfo, Niken Widiastuti menyampaikan penyebaran hoaks sangat tinggi, angkanya mencapai 800 ribu konten per tahun (Juliawati, 2018). Hal ini turut pula meningkatkan hoaks dalam banyak kasus di Pilkada. Hoaks makin masif di Pemilu 2019. Penyebaran hoaks juga tumbuh sangat subur di media sosial. Data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat peningkatan

jdih.kpu.go.id

situs berita bohong terjadi sejak Oktober sampai pertengahan Desember 2016. Selain berita bohong, ditemukan juga peningkatan jumlah konten bermuatan SARA, provokasi, dan ujaran kebencian. Tak hanya melalui situs web, penyebaran terjadi lewat 300 lebih akun media sosial (Agung, 2016).

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang membuat subur munculnya hoaks di media sosial, yaitu regulasi yang belum menjangkau pemberantasan hoaks, pembiaran yang dilakukan oleh pasangan calon, dan lambannya respons dari lembaga penyelenggara Pemilu (Suryowati, 2017). Pernyataan ini harus diseriusi oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan untuk menyelematkan demokrasi di negeri ini.

Lebih lanjut, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), jenis berita hoaks yang paling sering diterima oleh masyarakat terkait dengan isu sosial-politik, seperti pemerintah dan Pilkada, terlihat dari 91,80% masyarakat yang menyatakan hal ini. Selain isu tersebut, 88,6% masyarakat juga menyatakan paling sering menerima berita tidak tepat tentang SARA (Gerintya, 2018).

Maraknya penyebaran berita hoaks berbau politik juga diakui oleh Ketua Kelompok Masyarakat Anti Hoax Indonesia, Septiaji Eko Nugroho, yang menyatakan bahwa pertumbuhan berita hoaks meningkat seiring dengan akan diadakannya Pilkada Serentak (Fauzi, 2017). Banyak pihak yang sudah menjadi korban dengan adanya berita hoaks selama proses Pemilu berlangsung.

Pada Pemilu tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) diterpa hoaks dalam berbagai bentuk. Paling sering dipermasalahkan terkait data pemilih. Mulai 31 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau pemilih siluman. Kemudian disusun rincian bahwa ada 17,5 juta DPT yang dianggap bermasalah dan 6,1 juta DPT yang diduga bermasalah hingga orang gila dimasukkan dalam DPT.

Faktanya tidak ada data 31 juta DPT siluman. Penyusunan DPT Pemilu 2019 dilakukan secara terbuka, transaparan, dan akuntabel. Proses pemutakhiran data dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dilakukan dari rumah ke rumah. Penetapannya juga disaksikan oleh peserta Pemilu, Bawaslu, dan stakeholder melalui rapat pleno terbuka. Mulai rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) hingga 3 (tiga) kali.

Begitu juga dengan dengan hoaks 17,5 juta dan 6,1 juta yang faktanya berbeda dengan sebenarnya terjadi. Laporan salah satu tim pemenangan paslon

Pilpres 2019 yang menyatakan bahwa terdapat 17,5 juta data bermasalah dan 6,1 juta data diduga ganda disikapi secara serius oleh pihak KPU. Bahwa terdapat 17,5 juta data pemilih lahir 1 Juli dan 31 Desember adalah wajar dan apa adanya sesuai regulasi/kebijakan pencatatan sipil serta hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan ahli demografi dan statistik dari kampus-kampus terpandang di Indonesia. Temuan lapangan KPU Kabupaten/Kota terhadap sampel sebanyak 1.604 mengkorfirmasi bahwa 1.584 (98,75%) terverifikasi faktual, dan sisanya sebanyak 20 sampel (1,25%) tidak memenuhi syarat dan telah dihapus dalam DPT.

Data yang diduga ganda sebanyak 6,1 juta berdasarkan laporan salah satu tim pemenangan paslon Pilpres 2019 hanya diserahkan sebanyak 3.165.093. Data tersebut kemudian dilakukan pencocokan, dan hasilnya hanya 137.743 pemilih yang ditemukan ganda. Sementara data yang diklaim sebanyak 2.536.112 tidak memiliki sumber yang jelas.

Begitu juga dengan kabar bohong bahwa orang gila masuk dalam DPT, padahal faktanya tidak ada. KPU hanya melakukan pendataan pemilih disabilitas mental sesuai amanat undang-undang Pemilu, bukan orang gila yang berkeliaran di jalanan atau rumah sakit jiwa.

Hoaks berkenaan dengan tahapan kampanye menyasar pada debat Pilpres 2019. Disebarkan kabar bohong bahwasanya pada debat Pilpres 2019 tidak ada penyampaian visi dan misi, sementara faktanya debat Pilpres dilakukan penyampaian visi dan misi. Berita bohong lainnya terkait waktu acara debat Pilpres yang dimulai pukul 18.00 WIB, namun faktanya pada pukul 20.00 WIB. Ada juga hoaks kebocoran soal debat Pilpres 2019. Faktanya, soal debat pilpres dibuat dan disusun oleh tim panelis yang kredibel dan berintegritas.

Pada Pemilu 2019 juga menyerang personal Ketua KPU, Bapak Arief Budiman. Mulai dari berita bohong bahwa bapak Arief Budiman adalah saudara kandung Soe Hoek Gie. Nama yang sama tapi orang berbeda. Hoaks berkenaan terpilih bapak Arief Budiman sebagai Ketua KPU dengan suara voting DPR yang terkecil dibandingkan dengan komisioner KPU yang lain. Padahal faktanya, pemilihan Ketua KPU dilakukan secara musyawarah mufakat oleh anggota KPU terpilih bukan didasari oleh perolehan suara di DPR.

Tentu data dan fakta ini membuat kita menjadi sangat mengkhawatirkan. Upaya perlawanan harus segera dilakukan. Upaya itu tidak cukup dengan cara menindak para pelaku yang terlibat, namun lebih jauh lagi strategi pencegahan menjadi sangat penting. Khalayak ramai harus diberi pemahaman dan konsep agar mereka bisa mengambil peran dalam gerakan anti hoaks yang saat ini sedang digelorakan.

Peran masyarakat dengan cara swasensor ternyata efektif menangkap penyebaran hoaks. Swasensor adalah bagian dari literasi media di mana pengguna media sosial atau warganet (netizen) harus selektif memilah mana informasi yang bohong dan yang benar. Informasi yang diterima seharusnya dibandingkan dengan sumber berita lain, salah satunya yang dipublikasi media mainstream (arus utama). Agar tidak mudah terpancing dengan berita hoaks, Ketua Masyarakat Anti Hoax Indonesia, Septiaji Eko Nugroho menyarankan melakukan hal-hal berikut ini bila mendapat informasi yang diduga hoaks, yaitu 1). Cek judul dan isi berita; 2). Lihat alamat website; 3). Cek fakta; 4). Cek foto; dan 5). Ikut komunitas antihoaks (Andarningtyas, 2016).

Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama juga sangat penting dalam pencegahan hoaks di masyarakat. Keterlibatannya sangat bermanfaat dalam sosialisasi yang dilakukan untuk membendung penyebaran hoaks. Pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama, berupa fatwa, pernyataan sikap, dan opini selalu dijadikan rujukan kalangan masyarakat bawah yang rendah tingkat pendidikan, pengetahuan, dan literasinya.

Pelaku hoaks yang terbukti harus ditindak secara tegas. Peran aparat hukum sangat penting untuk melakukan penindakan. Sanksi hukuman bagi para pelaku hoaks harus diberi ganjaran yang berat. Kalangan masyarakat juga dapat memberikan sanksi sosial terhadap oknum-oknum yang terlibat secara nyata, baik pembuat dan penyebar hoaks. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku di masa depan.

Bagi penyelenggara Pemilu, upaya perlawanan dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas kewenangannya. Temuan pelanggaran pidana Pemilu yang berhubungan secara spesifik masalah hoaks harus diproses dengan mekanisme yang berlaku. Jika dimungkinkan, perlu perbaikan regulasi kepemiluan untuk menangkal penyebaran hoaks sehingga Pemilu yang dihasilkan bisa lebih berkualitas.

4. Temuan dan Strategi Perlawanan Ujaran Kebencian Pemilu

Kasus ujaran kebencian meningkat tajam seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Data menunjukkan terjadi peningkatan pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2005 hanya sekitar 16 juta pengguna, pada tahun 2016 jumlahnya menjadi 132 juta pengguna. Seiring dengan lonjakan tersebut, produksi dan distribusi ujaran kebencian berbasis politik identitas menjadi fenomena masif. Data yang dirilis oleh Kapolri Jenderal Tito Karenavian, Polri juga telah menangani 3.325 kasus kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*). Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 kasus (Medistiara, 2017). Sebagian besar kasus tersebut berasal dari media sosial.

Kejadian seperti ini tidak boleh terus menerus dibiarkan terjadi. Perlu upaya perlawanan dari berbagai elemen masyarakat. Apalagi saat ini sudah banyak kasus ujaran kebencian bernuansa politik identitas yang dilakukan dengan tujuan dan agenda kepentingan politik tertentu. Terjadi eskalasi yang cukup signifikan temuan kasus ujaran kebencian selama momentum Pilkada dan Pemilu Serentak tahun 2019.

Upaya perlawanan terhadap ujaran kebencian Pemilu sudah harus dimulai saat ini. Peneliti Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, Irfan Abubakar mengungkapkan, ada 2 (dua) strategi yang bisa dilakukan dalam memerangi ujaran kebencian dan hoaks, yakni penindakan hukum yang berimbang dan peranan masyarakat sipil jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 (Rachman, 2018).

Penanganan ujaran kebencian melibatkan aparat penegak hukum karena mereka sebagai pihak netral dalam konteks pertarungan politik. Polri harus adil dan berimbang dalam penindakan hukumnya. Sementara peranan organisasi masyarakat keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang mampu melakukan perlawanan terhadap narasi-narasi kebencian yang bisa menimbulkan polarisasi di masyarakat.

Ranah penindakan terhadap praktik ujaran kebencian memang sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian. Namun, jika ditelisik peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan, peran penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu juga bisa mengambil peran penindakan sesuai dengan batas-batas kewenangannya.

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2017 pasal 68 ayat 1 huruf b dan c, memuat larangan kampanye Pilkada bernuansa SARA, dan kampanye yang sifatnya menghasut, memfitnah, dan mengadu domba. Hal ini tidak hanya berlaku pada kampanye umum, namun juga kampanye di media sosial sebagaimana yang diatur pada pasal 73. Peran Bawaslu melakukan pengawasan secara ketat dan menindaknya jika ada peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran selama proses kampanye berlangsung.

Sangat penting pula strategi pencegahan terhadap ujaran kebencian untuk dilakukan. Program sosialisasi harus lebih diintensifkan. Gerakan perlawanan terhadap ujaran kebencian dalam Pemilu perlu melibatkan banyak pihak. Tidak hanya di kalangan organisasi kemasyarakatan yang dirangkul, juga para relawan pemantau Pemilu, kalangan perguruan tinggi, pegiat media sosial, dan kalangan media massa.

jdih.kpu.go.id

Pada akhirnya, jika banyak kalangan masyarakat yang menyadari tentang bahaya ujaran kebencian, maka akan muncul kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. Gerakan perlawanan terhadap ujaran kebencian dalam Pemilu dapat memutus sebagian mata rantai siklus perusak demokrasi di negeri ini. Memang tidak mudah melawannya, namun jika sedari awal kita memulainya maka untuk momentum Pemilu dan pemilihan di masa akan datang, kita dapat memberantasnya. Semoga harapan itu bisa terwujud, dan demokrasi di negara kita akan tetap berdiri kokoh.

jdih.kpu.go.id

Simpulan

Pemilihaan Umum (Pemilu) sejatinya merupakan proses seleksi dari pergantian kepemimpinan nasional dan daerah. Cara ini dianggap sebagai bagian dari penerapan demokrasi suatu bangsa. Kasuistik di Indonesia, banyak faktor yang dapat merusak sistem demokrasi yang sedang berlangsung di negeri ini.

Hasil identifikasi menunjukkan 4 (empat) variabel penting mencuat ke permukaan yang bisa merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Variabel tersebut adalah praktik politik uang, politik identitas, hoaks Pemilu, dan ujaran kebencian dalam Pemilu. Data dan fakta yang dipaparkan mengarah pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Penerapan demokrasi masuk ke dalam zona yang membahayakan, dan bisa mengancam harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Temuan di lapangan juga menunjukkan adanya saling keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pelaku ujaran kebencian seringkali menggunakan cara-cara penyebaran hoaks untuk menyerang lawan politiknya. Begitupun dengan praktik politik identitas selalu menggunakan metode ujaran kebencian yang menyerang etnis, suku, agama, dan budaya tertentu untuk meraih kepentingan politiknya. Manakala politik uang dan politik identitas tidak diberantas sesegera mungkin, akan berakibat pada menurunnya kadar kualitas demokrasi di Indonesia.

Upaya perlawanan terhadap variabel-variabel yang dapat merusak demokrasi dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode. Pertama, strategi pencegahan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Bisa dilakukan melalui peran kelembagaan maupun individual. Kedua, strategi penindakan dilakukan oleh institusi-institusi yang diberikan kewenangan. Pihak pemerintah, aparat hukum, dan penyelenggara Pemilu bisa memainkan peran penindakan sesuai porsi yang diberikan oleh aturan perundang-undangan.

Akhirnya, kombinasi strategi pencegahan dan penindakan yang dilakukan secara kreatif, terukur, dan berkesinambungan akan mampu mengurangi hal-hal yang dapat merusak demokrasi di negeri ini. Harapan untuk melahirkan para pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap pembangunan bisa dihasilkan dalam setiap momentum Pemilu dan Pilkada. Semoga hal ini bisa terwujud di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Adiwilaga, R., Ridha.,dan Mustofa, M.U. (2017). Pemilu dan Keniscayaan Politik Indentitas Etnis di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis. Jurnal Bawaslu, 3(2), hlm. 269-284.

Agung, B. (2016). Asal Mula Situs Hoax Berkembang di Indonesia. Diakses darihttps://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161230125808-185-183096/asal-mula-situs-hoax-berkembang-di-indonesia.

Andarningtyas, N. (2016). Agar Tidak Termakan Berita Hoax, Ini Caranya. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/599306/agar-tidak-termakan-berita-hoax-ini-caranya.

Andarningtyas, N. (2017). Apa Itu Hoax? Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/605171/apa-itu-hoax.

Andriyani, F. Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako hingga Uang Tunai. Diakses dari https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/16/bawaslu-tangkap-25-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019-mulai-sogokan-sembako-hingga-uang-tunai.

Aziz, A. (2018). Amunisi Anti-Politik Uang di Pilkada: Bawaslu dan Satgas Polri-KPK. Diakses dari https://tirto.id/amunisi-anti-politik-uang-di-pilkada-bawaslu-dan-satgas-polri-kpk-cDWT.

Fauzi, M.P. (2017). Lebih dari 90% Berita Hoax di Indonesia Bermuatan Politik. Diakses dari https://techno.okezone.com/read/2017/02/13/207/1616892/lebih-dari-90-berita-hoax-di-indonesia-bermuatan-politik.

Gerintya, S. (2018). Hoaks dan Bahaya Rendahnya Kepercayaan terhadap Media. Diakses dari https://tirto.id/hoaks-dan-bahaya-rendahnya-kepercayaan-terhadap-media-cKAx.

Herdiansah, A.G. (2017). Politisasi Indentitas Dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. Jurnal Bawaslu, 3(2), hlm. 169-183.

Kumolo, T. (2015). Politik Hukum Pilkada Serentak. Jakarta, Indonesia: Expose Publika, Mizan.

Juliawanti, L. (2018, March 14). Angka Penyebaran Hoax Capai 800 Ribu Konten,

di Pilkada Terus Meningkat. Diakses dari https://www.idntimes.com/news/indonesia/linda/angka-penyebaran-hoax-capai-800-ribu-konten-di-pilkada-terus-meningkat/full.

Medistiara, Y. (2017). Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pratiwi, O.C. Menjaga Kualitas Pemilu Yang Demokratis. JurnalBawaslu, 3(3), hlm. 323-333.

Putri, B.U. (2018). Sosiolog Ingatkan Bahaya Hoax di Tahun Politik. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1069818/sosiolog-ingatkan-bahaya-hoax-di-tahun-politik.

Rachman, D.A. (2018). Dua Strategi dalam Memerangi Ujaran Kebencian dan Hoaks di Tahun Politik. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2018/03/28/18202521/dua-strategi-dalam-memerangi-ujaran-kebencian-dan-hoaks-di-tahun-politik.

Solihah, R dan Witianti, S. (2017). Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Bawaslu, 3(1), hlm. 13-33.

Surat Edaran Kapolri No: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Suryowati, E. (2017). Mengapa "Hoax" Lestari dalam Pemilihan Umum di Indonesia? Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2017/05/03/20162671/mengapa.hoax.lestari.dalam.pemilihan.umum.di.indonesia.

Sweinstani, M.K.D dan Hasanah, R.U. (2017). Integrasi Nasional dan Ekslusionaris Identitas dalam Pilkada 2017: Studi Kasus Pilkada Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat. Jurnal Bawaslu, 3(2), hlm. 185-198.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Widodo, I. (2017). Analisis Kelembagaan Baru Penangan Muatan Kebencian Berbasis Politik Indentitas di Internet di Indonesia: Sebuah Kajian Awal. Jurnal Bawaslu, 3(2), hlm. 253-267.

Pengiriman Logistik Pemilu 2019

Pengiriman Logistik Pemilu 2019

Cara Gila Mengepung Pemilih

Oleh Yosafat Koli
Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

ABSTRAK

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2019 menggariskan kekuatan sosialisasi berbasis keluarga yang lebih kreatif dan masif. Kreatif karena pola yang dilakukan menggunakan berbagai metode pendekatan. Masif karena dilakukan lebih luas sampai ke berbagai segmen kelompok basis, hingga merambah masuk ke desa-desa melalui relawan demokrasi dan entitas masyarakat lainnya seperti pekerja seni, tokoh agama, kampus, dan sebagainya. Trend rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Nusa Tenggara Timur dapat disimak pemilu dan pemilihan pada lima tahun terakhir. Mulai dari Pemilihan serentak tahun 2015. Dari 9 (sembilan) Kabupaten di NTT yang menyelenggarakan pemilihan, partisipasi Pemilih rata-rata mencapai 72% atau dibawah target nasional 77,5%. Tiga kabupaten yang tingkat partisipasinya sangat menyolok dibawah target nasional yaitu TTU (64,68%), Belu (63,55%), dan Malaka (61,59%). Pemilihan serentak Tahun 2017 tiga kabupaten/kota rata-rata mencapai 76%. Pada pemilihan Gubernur NTT 2018 rata-rata partisipasi mencapai 73,89%. Pada Pemilu 2019 melonjak naik di atas 8,15 0%. Garis kebijakan KPU RI melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu 2019 menorehkan prestasi yang membanggakan dan perlu diapresiasi. Kisah sukses yang patut dicatat menjadi pelajaran yang baik bagi masa depan demokrasi Indonesia. Cara Gila Mengepung Pemilih adalah judul untuk menggambarkan kreasi tak biasanya seluruh entitas penyelenggara membangun kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilih di TPS. Namun usaha ini tidak boleh berhenti di sini saja karena perlu kerja keras terus menerus dengan kreasi yang lebih untuk mendekati pemilih, menyampaikan pesan kepada mereka hingga menemukan habitus baru bahwa demokrasi adalah kepastian, dan saling menghormati dalam perbedaan adalah keniscayaan. Pendidikan Pemilih dan Kewarganegaraan (Voter and Civic Education) adalah alternatif jawaban untuk program masa depan.

Kata Kunci: Pendidikan Pemilih, Partisipasi

Latar Belakang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2019 menggariskan sosialisasi yang lebih kreatif dan masif. Kreatif karena pola yang dilakukan menggunakan berbagai metode, dan masif karena dilakukan lebih luas merambah masuk sampai ke desa-desa melalui relawan demokrasi, dan entitas masyarakat lainnya seperti pekerja seni. Judul tulisan ini adalah Cara Gila Mengepung Pemilih (CGMP).

CGMP, berangkat dari konsep dan refleksi metode sosialisasi pada Pemilu 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cara diartikan 1. jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dsb), sesuatu; 2. gaya; ragam (spt bentuk, corak); 3. adat kebiasaan; perbuatan (kelakuan) yg sudah menjadi kebiasaan; 4. bahasa; logat (dialek); 5. jalan yg harus ditempuh; 6. usaha; ikhtiar.[41] Dalam konteks tulisan ini adalah usaha atau ikhtiar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan gila, dijelaskan 2. tidak biasa; tidak sebagaimana mestinya, berbuat yang bukan-bukan (tidak masuk akal); *benar-benar – masakan dia dapat melompat setinggi itu*.[42] Mengepung, dasar katanya kepung dalam KBBI dijelaskan, kepung v kitari hingga tidak lolos, mengepung v mengelilingi sesuatu sehingga yang dikelilingi atau yang ada di dalamnya tidak dapat meloloskan diri.[43] Pemilih menurut UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan CGMP, adalah ikhtiar atau usaha secara kreatif, tidak biasanya untuk menyampaikan pesan Pemilu tahun 2019 kepada pemilih. Mengepung Pemilih dapat diartikan usaha secara terstruktur, sitematis, dan masif yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada pemilih dengan berbagai cara yang kreatif hingga pemilih semakin sadar ke TPS tanggal 17 April. Metode penyampaian yang berbeda, lebih beragam, kreatif dan tidak bertumpu pada metode konvensional yang mengumpulkan tokoh strategis lalu diberikan ceramah.

Relawan demokrasi setiap kabupaten dialokasi sebanyak 55 relawan, menangani 11 basis pemilih. Jumlah relawan tiap basis dialokasikan 5, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan tergantung mayoritas kelompok basis yang dipandang perlu digalakkan sosialisasinya.

---

[41]Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia, 2013, hal. 245
[42]Ibid, hal. 451
[43]Ibid, hal. 673

Dengan begitu pelaku sosialisasi dan pendidikan pemilih juga lebih beragam elemen masyarakatnya, baik remaja, tokoh agama, tokoh masyarakat, pegiat seni, pegiat IT dan sebagainya. Perhatikan syarat menjadi anggota relawan demokrasi semakin lengkap untuk mendorong ketika menilik dari syarat menjadi relawan demokrasi. Tidak sebagai penyelenggara, nonpartisan sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak menjadi anggota partai politik. Hal ini dapat dipahami karena perbedaan latar belakang pemilih baik dari aspek pekerjaan, tingkat pendidikan yang berbeda. Tidak semua informasi yang disampaikan searah dapat diterima dengan baik,

Menyimak PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosiliasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, sasaran program ini meliputi komponen pemilih yang berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus; kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet (netizen). Komponen masyarakat umum, Media Massa, Partai Politik Peserta Pemilu, pengawas, Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri; Organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, dan Instansi pemerintah. Sasaran sosilisasi sangat lengkap karena menyentuh seluruh entitas masyarakat. Tak peduli kalangan manapun tetap disasar pegiat sosilisasi.

Materi Sosialisasi Pemilu mencakup: tahapan penyelenggaraan Pemilu terdiri atas: perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; kampanye dan dana kampanye Pemilu; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil Pemilu; dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

PROFIL NUSA TENGGARA TIMUR

Provinsi NTT terletak di antara 80 – 120 Lintang Selatan dan 1180 – 1250 Bujur Timur, dengan batas-batas: Utara – Laut Flores, Selatan – Samudera Hindia, Timur – Negara Timor Leste, Barat – Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores.

Menurut data NTT Dalam Angka 2019[45], luas wilayah daratan NTT adalah seluas 47.931,54 km2 dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.732,35 km2).Wilayah administrasi di NTT tahun 2018 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 km2 (14,61%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km2 (11,53%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27km2 (0,38%).

Provinsi NTT terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota yang terletak di tujuh pulau besar, yaitu (1) Pulau Sumba: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah; (2) Pulau Timor: Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang; (3) Pulau Flores: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. (4) Pulau Alor: Alor (5) Pulau Lembata: Lembata; (6) Pulau Rote: Rote Ndao; dan (7) Pulau Sabu: Sabu Rajua.

Jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 5.371.519[46] terdiri dari laki-laki 2.660.613 perempuan 2.710.906 dengan tingkat laju pertumbuhan sebesar 1,67% per tahun.

PARTISIPASI PEMILIH

Komisi Pemilihan Umum menetapkan target partisipasi nasional dalam Renstra KPU RPJMN 2015-2019 menetapkan target tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5%. Tak pelak seluruh Satker Komisi Pemilihan Umum/KIP, Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indoensia memecut tingkat partisipasinya. Demikian halnya di Nusa Tenggara Timur. Tingkat capaian yang fluktuatif memicu gerakan sosilisasi ini perlu digalakkan bahkan dengan cara gila. Nusa Tenggara Timur pada Pemilu 2014 rata-rata mencapai 76,56% untuk pemilihan DPD.[47] Pemilih yang terdaftar dalam DPT ketika itu sebanyak 3.228.694 dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.471.940. Sementara pada Pilpres 2014, jumlah pemilih DPT 3.185.121 yang

[41]NTT Dalam Angka 2019 hal. 5
[42]Ibid. Hal. 89
[43]Laporan Hasil Pemilu 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur

jdih.kpu.go.id

menggunakan hak pilihnya 2.274.079 atau sebesar 71,40%.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2015 terdapat 9 Kabupaten di NTT yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Rata-rata tingkat partisipasi Pemilih mencapai 72% sebagaimana tergambar tabel 1. Meskipun demikian beberapa kabupaten di atas target nasional yaitu Ngada 79,99, Sabu Raijua 78,47%, Manggarai 78,21. Paling menyolok adalah 3 (tiga) kabupaten yang paling rendah tingkat partisipasinya yaitu Timor Tengah Utara (64,68%), Belu (63,55%), dan Malaka (61,59%).

Tabel Data Partisipasi Pemilih Pemilihan Serentak 2015

No	Kabupaten	Pemilih Terdaftar	Pengguna Hak Pilih	Parmas%
1.	Timor Tengah Utara	166.896	107.276	64,28
2.	Belu	138.253	87.862	63,55
3.	Sabu Raijua	52.152	40.926	78,47
4.	Ngada	96.540	77.226	79,99
5.	Manggarai Barat	158.417	116.349	73,44
6.	Manggarai	188.230	147.210	78,21
7.	Sumba Barat	77.956	57.466	73,72
8.	Sumba Tmur	154.715	119.431	77,19
9.	Malaka	140.237	86.366	61,59
	Rata-rata	**1.173.396**	**840.112**	**72**

Sumber: Hasil Kompilasi laporan KPU Kabupaten 2015

Sementara pada Pemilihan serentak 2017, terdapat 3 (tiga) Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan, dengar rata-rata tingkat partisipasi pemilihnya 76%. Dua Kabupaten yang melebihi target nasional yaitu Lembata (86%) dan Flores Timur (79%). Sementara Kota Kupang pada 70%, di bawah target nasional.

Tabel Data Partisipasi Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2017

No	Kabupaten	Pemilih Terdaftar	Pengguna Hak Pilih	Parmas%
1.	Lembata	73.891	63.702	86
2.	Flotim	156.602	123.585	79
3.	Kota Kupang	238.711	167.225	70
	Rata-rata	469.204	354.512	76

Sumber: Hasil Kompilasi laporan KPU Kabupaten 2017

Pada Pemilihan Serentak 2018, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, belum juga mendongkrak tingkat partisipasi pemilih pada angka rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana pada Tabel 3, tingkat partisipasi hanya mencapai 73,89%. Sejmulah Kabupaten naiknya cukup signifikan Ende (83,77) Alor (83,08), Sikka (82,57) dan Nagekeo (81,02).

Tabel Data Partisipasi Pada Pemilihan Gubernur NTT Tahun 2018

No	Kabupaten	Pemilih Terdaftar	Pengguna Hak Pilih	Parmas%
1.	Alor	136.887	113.732	83,08
2.	Belu	125.826	80.707	64,14
3.	Ende	167.043	139.938	83,77
4.	Flores Timur	152.557	118.567	77,72
5.	Kupang	211.310	165.678	78,41
6.	Kota Kupang	232.901	168.165	72,2
7.	Lembata	76.930	57.083	74,2
8.	Malaka	121.136	75.312	62,17
9.	Manggarai	194.746	138.740	71,24
10.	Manggarai Barat	157.593	108.341	68,75
11.	Manggarai Bimur	189.587	146.386	77,21
12.	Nagekeo	95.376	77.274	81,02
13.	Ngada	104.905	78.396	74,73
14.	Rote Ndao	86.660	66.602	76,85
15.	Sabu Paijua	51.820	35.429	68,37
16.	Sikka	194.443	160.551	82,57
17.	Sumba Barat	75.836	45.456	59,94
18.	Sumba Barat Daya	220.191	148.875	67,61
19.	Sumba Ten-gah	49.061	38.087	77,63
20	Sumba Timur	156.862	109.012	69,5
21.	Timor Tengah Selatan	286.025	212.923	74,44
22.	Timor Tengah Utara	163.679	117.153	71,57
	Total	**3.251.374**	**2.402.407**	**73,89**

Sumber: Hasil kompilasi Model DB-KWK

Dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Rata-rata partisipasi pemilih di Nusa Tenggara Timur telah mencapai 80,15 % atau dari 3.391.616 pemilih terdaftar, sebanyak 2.718.463 yang menggunakan hak pilih.

Tabel Data Partisipasi Pemilu 2019

No	Kabupaten	Pemilih Terdaftar	Pengguna Hak Pilih	Parmas%
1.	Alor	136.718	116.079	84,90
2.	Belu	134.122	101.323	75,55
3.	Ende	168.266	147.946	87,92
4.	Flores Timur	158.860	134.267	84,52
5.	Kupang	222.020	180.525	81,31
6.	Kota Kupang	252.128	201.052	79,74
7.	Lembata	82.312	68.663	83,42
8.	Malaka	122.361	92.310	75,44
9.	Manggarai	209.839	167.140	79,65
10.	Manggarai Barat	167.880	138.724	82,63
11.	Manggarai Timur	199.335	151.326	75,92
12.	Nagekeo	100.493	80.115	79,72
13.	Ngada	107.427	84.545	78,70
14.	Rote Ndao	88.853	71.335	80,28
15.	Sabu Raijua	53.812	42.020	78,09
16.	Sikka	197.823	171.330	86,61
17.	Sumba Barat	79.319	61.166	77,11
18.	Sumba Barat Daya	225.200	174.495	77,48
19.	Sumba Tengah	49.249	38.700	78,58
20	Sumba Timur	167.712	131.696	78,53
21.	Timor Tengah Selatan	299.838	230.740	76,95
22.	Timor Tengah Utara	168.049	132.966	79,12
Total		**3.391.616**	**2.718.463**	**80,15**

Sumber: Kompilasi dokumen rekapitulasi tingkat Provinsi NTT

Cara Gila Mengepung Pemilih

Komisi Pemilihan Umum menetapkan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Sejumlah kegiatan digagas dengan apik. Semuanya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Metode yang digunakan juga tidak konvensional, tatap muka tetapi kreatif melibatkan berbagai pihak dengan target sejumlah basis. Semuanya digerakkan secara masif untuk mengepung pemilih.

1. RELAWAN DEMOKRASI

Relawan Demokrasi (Relasi) dibentuk dengan dasar surat KPU Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019. Latar belakang pembentukkannya oleh kecenderungan partisipasi pemilih yang menurun. Empat Pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan Pemilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada Pemilu nasional misalnya, yaitu Pemilu 1999 (92%), Pemilu 2004 (84%), Pemilu 2009 (71%), Pemilu 2014 (73%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019.[48]

Karakteristik geografis, sosial budaya kemasyarakatan, sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur terbentuk sebuah tatanan baru dalam proses demokrasi yang khas. Berikut beberapa catatannya.

Dari Pecah Ban, Hingga Jatuh Motor

Suatu hari di bulan April, pagi-pagi benar. Langit Sumba mendung. Adhe Ina Sriningsih (20) Relawan Demokrasi dari Kabupaten Sumba Tengah dengan tenang memoles tipis bedak di wajahnya. Meski nampak tenang, tak kuasa menutup gelisah wajah dibalik cermin. Gelisah karena mendung pertanda hujan akan turun. Adhe dan teman-teman akan menggempur kelompok basis marginal di Desa Weeluri, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, 25 kilometer dari Ibukota Waibakul. Bayangan masyarakat yang butuh informasi Pemilu membuatnya mantap menstater sepeda motor yang dia sewa (rental) usai berias.

Seperti pengalaman sebelumnya, setibanya Adhe dan tim relawan di lokasi, mereka berbagi diri ke segenap penjuru desa mengendus mengepung pemilih. Di mana ada kerumunan orang, ke sana mereka pergi. Meminta waktu, menyampaikan informasi Pemilu kepada warga. Sikap warga kadang beragam. Menerima dengan ramah dan mendengarkan kabar tentang Pemilu, tetapi terkadang mereka ditolak. Atau diberikan kesempatan bicara namun di

[48]Juknis Pedoman Pelaksanaan Relasi, hal. 2

saat bicara relawan tidak dihiraukan. Tantangan yang paling dirasakan yaitu ketika komunikasi yang gagal karena pemilih yang menggunakan bahasa daerah setempat. Bicara seputar Pemilu dengan sedikit bumbu minta maaf jika informasi yang diberikan sudah lebih dipahami para tetua.

Hari itu di Desa Weeluri berlangsung lancar hingga hari menjelang siang. Perut lapar mulai terasa. Ingin meminta makan rasanya segan karena khawatir merepotkan. Kira-kira pukul 14.00. Sontak semilir angin disertai gerimis kecil. Awan hitam pekat di atas langit Sumba tak kuasa menahan ribuan kubik air. Blukkk, hujan deras tumpah ruah membuyarkan kerumunan warga. Orang-orang lari lintang pukang berhamburan hiruk pikuk menyelamatkan diri. Adhe ikut dalam rombongan itu tetapi bergerak mendapati sepeda motornya di tepi jalan. Tak ada pilihan lain, dia harus pulang, teman-temannya sudah bergerak ke desa lain. Adhe basah kuyup. Tak ada jalan lain dia harus kembali ke Waebakul, tertatih-tatih seperti melompat dari batu ke batu karena jalanan yang rusak.

Baru saja keluar dari batas desa Weeluri dengan basah kuyup, tiba-tiba ban oleng membuatnya nyaris terjatuh. Untung masih bisa dikendalikan. Ternyata ban belakang pecah terkena beling. Tak ada rumah yang dekat untuk meminta bantuan. Setidaknya sekedar menepi karena hujan. Pilihan terburuk adalah mendorong motornya. Hampir dua setengah jam mendorong sepeda motor di bawah guyuran hujan dan jalanan yang rusak. Lapar dan haus ditahan hingga menempuh perjalanan lima belas kilometer, hampir masuk kota. Bantuan datang ketika ada keluarga yang melihatnya dan membantu mendorong mencari bengkel motor.

Kisah tentang kegigihan relawan demokrasi menerabas batas pengahalang hampir sama di seantero Nusa Tenggara Timur. Kendala paling utama adalah jauhnya jarak antar desa serta infrastruktur jalan yang belum semuanya beraspal. Dibutuhkan cara-cara gila untuk menjangkau pemilih.

Pendekatan Adat di Alor

Therlince Loisa Mau, relawan demokrasi basis disabilitas di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dia harus mengarungi medan terjal dan curam untuk menemui pemilih disabilitas. Selain perjalanan yang jauh kisah menemui pemilih berkebutuhan khusus ini juga menjadi masalah tersendiri.

Dikisahkan Therlince. Adalah Maimuna Maro, warga Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, seorang penyandang disabilitas yang diasingkan kedua orang tuanya dari masyarakat sekitar sehingga sangat sulit untuk ditemui. Oleh PPK dan

PPS setempat, mereka pernah diusir oleh ayah Maimuna pada Pemilihan 2018 yang lalu, gara-gara ingin menemui Maimuna untuk sosilisasi.
PPK dan PPS menyarankan agar Therlince tidak menemui Maimuna namun demi tugasnya tetap bersikukuh menemui Maimuna. Dan semuanya terjadi. Therlince dilarang menemui Maimuna bahkan diumpat dan dimarahi.

”Kamu kurang kerjaan ka? Kenapa musti ganggu anak saya? Pergi, jangan ganggu kami lagi!” teriak Ibu Maimuna.

Tak kehilangan akal, Therlince menyiapkan jurus jitu. Dari dalam tas dikeluarkannya sirih pinang, disorongkannya kepada ibu Maimunah. Dan benar saja. Ibu Maimuna luluh, wajah sangarnya berubah ramah, sirih pinang dikunyah bibirnya memerah dan suasana menjadi cair. Herlince juga bebas menyampaikan informasi Pemilu kepada Maimuna. Sirih pinang adalah simbol persahabatan masyarakat Alor. Sesulit apapun masalahnya akan selesai dengan pendekatan adat ini.

Kabupaten Alor sebagai salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NusaTenggara Timur adalah wilayah kepulauan dengan 15 pulau yaitu 9 pulau yang telah dihuni dan 6 pulau lainnya belum atau tidak berpenghuni. Luas wilayah daratan 2.864,64 km², luas wilayah perairan 10.773,62 km² dan panjang garis pantai 287,1 km. Secara geografis daerah ini terletak di bagian utara dan paling timur dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 8º6’LS - 8º36’ LS dan123º48’ BT - 125º48’ BT. Batas alam Kabupaten Alor di sebelah utara dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Selat Ombay, sebelah timur dengan Selat Wetar dan perairan Republik Demokratik Timor Leste dan sebelah barat dengan Selat Alor (Kabupaten Lembata).

Berdasarkan fakta tersebut tak pelak kunjungan ke sebagian wilayah Kabupaten Alor harus menggunakan moda transportasi laut. Inilah pengalaman suatu saat ketika Herlince bertugas ke Pulau Pantar. Perjalanan ke Pulau Pantar dapat ditempuh sekitar satu jam. Namun dalam bulan tertentu kadang arus deras menghadang di tengah perjalanan sehingga lama perjalanan bisa menjadi lebih dari satu jam. Apalagi jika mesin motor mati di tengah laut.

”Ketika hendak menyeberang menggunakan perahu untuk menemui para penyandang disabilitas di Pulau Pantar, tiba-tiba kami diterpa gelombang besar. Beberapa detik setelah hantaman gelombang, mesin dari perahu yang kami tumpangi mendadak mati. Penumpang lain telah mengosongkan jerigen untuk dijadikan pelampung. Nakhoda meminta kami untuk duduk menyebar dan merata di sisi kanan kiri perahu sambil meminta berdoa agar menghilangkan perasaan

jdih.kpu.go.id

panik. Sementara pada saat yang sama arus dan gelombang menyeret kami jauh dari posisi awal," cerita Herlince.

Kejadian tersebut berlangsung kurang lebih 20 menit. Sampai pada akhirnya mesin perahu dihidupkan setelah nakhoda menghitung dengan matang lipatan-lipatan gelombang. Kendati demikian, gelombang masih menerpa, akan tetapi juragan perahu sudah mampu mengatasinya sampai tiba di tujuan dengan selamat.

Tergugah Karena Ayat Alkitab

Pendeta John Mozes Hendrik Wadu Neru, Relawan Demokrasi basis agama dari Sabu Rajua menemukan simpul penting. Dari kesibukan memberikan informasi kepada pemilih basis agama, ternyata masalahnya bukan sekadar 'membangun kapasitas pemilih', bukan sekadar memberi tahu kapan, di mana dan bagaimana memilih. Tetapi juga menjadi pemilih yang cerdas berhati nurani. Kebanyakan pemilih yang dijumpai adalah pemilih yang hanya mengikuti sosialisasi Pemilu dengan motivasi mendapatkan uang duduk tanpa sebuah kesadaran bahwa suara mereka dapat menentukan arah demokrasi dengan memilih pemimpin sesuai kepentingan nasional atau daerah. Ketika mengetahui bahwa sosiliasi yang digalang oleh Relawan Demokrasi tanpa uang maka semakin sedikit orang yang duduk berlama-lama mendengarkan ceramah yang dianggap tidak ada keuntungan ekonomisnya.

Kesulitan ini membuatnya harus mencari jalan lain agar banyak orang mengikuti setiap materi sosialisasi dengan serius. Maka ajakan mendengarkan sosialisasi Pemilu pada kesempatan berikutnya menggunakan cara tak lazim, yaitu menggunakan kapasitas sebagai pendeta dengan sedikit ancaman-ancaman dosa dan cerita cerita Alkitab tentang apatisme kepada jemaat untuk mendorong mereka mengikuti sosialisasi.

Sebab menurut Pendeta John, pemahaman sejumlah jargon yang seperti 'Pemilih Berdaulat Negara Kuat' atau 'Ayo Coblos dan Jangan Golput' di desa-desa bukan perkara yang terlalu sulit. Menjumpai mereka dan memberi informasi tentang penyelenggaraan Pemilu 17 April, tahapan tahapan dan mekanismenya sebuah perkara yang mudah. Persoalannya adalah bagaimana membangun pemahaman yang ada di dalam jargon-jargon tadi. Dalam berbagai percakapan dengan warga desa, sebagian besar pemilih bahkan tidak mau ambil pusing dengan siapa yang terpilih. Kalaupun mereka ikut memilih sebenarnya ada kenyataan proses penyelenggaraan Pemilu yang jauh dari kejujuran dan keadilan.

Faktanya bahwa selama 8 tahun sejak Kabupaten Sabu Raijua otonom dan menyelenggarakan pemilihan entah itu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan

Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak membawa perubahan yang signifikan di desa. Misalnya, kebutuhan masyarakat akan listrik tetapi hingga saat ini di sejumlah desa belum memiliki jaringan listrik. Calon-calon legislatif kebanyakan terpilih karena ikatan kekeluargaan, status sosial, penggarap lahan hingga memilih karena alasan uang. Maka Luber dan Jurdil seperti utopia. Kompleksitas persoalan pembangunan, infrastruktur dan sebagainya memang telah menorehkan rasa ketidakadilan tersendiri bagi sejumlah pemilih seperti di Desa Matei. Tidak mudah mengajak mereka yang secara umum apatis dan pesimis tentang demokrasi.

Mengajak memilih saja tidak cukup dengan informasi. ”Terkadang saya kemudian berpikir sangat pragmatis, bahwa tugas saya hanya memberikan informasi. Lebih daripada itu ‘terserah’. Namun segera muncul ’gugatan’ ayat Kitab Suci, ”Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, (Kolose 3:23).” Di titik kesadaran inilah Pendeta John tetap terpanggil menggugah pemilih agar menggunakan hak pilihnya.

Tugas relawan demokrasi bukan sekedar ’menginformasikan’ tetapi ’membelajarkan’. Bukan hanya menyampaikan informasi tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana menggunakan hak suara. Tetapi bagaimana memberikan pelajaran mengapa harus memilih.

Lain lagi kisah Richard. F. J. Joseph, Koordinator Relawan Basis Pemuda dan Keluarga Kota Kupang. Awal menjadi relawan demokrasi sulit mengatur dan beradaptasi dengan waktu dalam tim. Masing-masing relawan memiliki agenda atau tugas pekerjaan mereka seperti mahasiswa yang sulit disesuaikan untuk melaksanakan tugas sebagai relawan demokrasi. Dengan usaha dan kerja keras penyesuaian dapat dilakukan dengan baik.

Masalah dalam menjalankan tugas selaku relawan demokrasi di lapangan ternyata banyak sekali. Paling menantang adalah kesulitan ketika bertemu masyarakat. Bagaimana mengajak masyarakat perkotaan untuk terlibat aktif dalam tahapan Pemilu. Berbicara soal kapasitas, jika dilihat dari ilmu pengetahuan dan bahan sosialisasi.

”Soal pengetahuan, saya rasa belum karena waktu itu bimtek yang berikan KPU pada kami para relawan hanya dilakukan selama beberapa jam yang terkesan buru-buru dan seadanya, sehingga pengetahuan yang saya dapat atau relawan lain dapatkan masih terasa kurang sekali. Karena itu ketika kami mendapat pertanyaan dari warga tentang beberapa hal yang tidak kami dapat di bimtek kami hanya bisa meminta warga tersebut untuk menanyakan langsung ke KPU atau anggota

Bawaslu setempat," ujar Rikard.

Tugas menuntut profesionalitas dalam bekerja. Namun bagaimana jika sang petugas terbawa perasaan alias baperan ketika bertemu mantan pacar? Paling tidak inilah pengalaman Rikard saat sosialisasi di rumah sang 'mantan'. Kikuk dan salah tingkah hingga pengetahuan demokrasi dan Pemilu seakan hilang dari isi batok kepala. Apalagi sang mantan lebih reaktif menanyakan kondisi sang relawan ketimbang materi sosialisasi?

"Apa baik-baik saja? Sehat-sehat kan? Kok kurusan? Duh, pertanyaan yang langsung menohok ke ulu hati," Rikard tersipu-sipu.

Rekomendasi Relawan Demokrasi (Relasi)

Dalam kurun waktu yang singkat sejak direkrut Januari 2019 dan efektif bekerja hingga April 2019, seluruh relawan demokrasi mengikuti sesi pelatihan singkat tentang tugas dan kerja Relasi plus pengetahuan Pemilu dan demokrasi. Tujuan kehadiran relawan adalah (1). meningkatkan kualitas proses Pemilihan Umum; (2). meningkatkan partisipasi pemilih; (3). meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi; (4). membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilihan Umum dan demokratisasi. Tujuan yang sangat mulia ini tentu tidak mudah dilaksanakan relawan demokrasi.

Relasi seperti sebuah oase. Harapan baru yang muncul ketika sebagian pemilih mulai apatis ke TPS karena menyaksikan pemimpin dan atau wakilnya banyak yang terlibat korupsi atau menyalahgunakan kewenangannya. Mengembalikan kepercayaan tidak mudah karena itu tidak cukup dilakukan sosialisasi. Dibutuhkan cara yang lebih persuasif untuk membangun optimisme pemilih melalui pendidikan pemilih.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah dua hal yang berbeda. Merujuk pada pasal 1 poin 24 Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan poin 25 menjelaskan Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu. Karena itu sosialisasi tidak membutuhkan waktu lama untuk dipelajari. Lain halnya dengan pendidikan pemilih yang membutuhkan metode pembelajaran yang sistematis.

Bagi relawan demokrasi, peningkatan kapasitas baik pengetahuan dan kreasi metode menyampaikan pesan Pemilu penting untuk dilakukan. Mereka perlu dibekali pengetahuan lain selain Pemilu dan demokrasi, ketatanegaraan,

perbandingan sistem Pemilu dan sebagainya. Mereka perlu dibekali teknik fasilitasi, *public speaking* dan sebagainya. Selanjutnya kreasi mereka yang biasanya sangat kreatif menyesuaikan dengan situasi di lapangan.

Relasi adalah ide cerdas yang tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Jumlah yang direkrut setiap kabupaten sebanyak 55 relawan tidak sebanding dengan jumlah penduduk atau pemilih yang mendapatkan pendidikan pemilih dan sosialisasi.

Festival NTT Memilih: Dari Konser Musik hingga Aksi Coret-Coret

Melalui Festival NTT Memilih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memadukan empat event sekaligus Lomba Mural (3-5 April) Lomba Band Jingle Pemilu (4 April) Konser Musik (5 April) dan Pemilu Run (6 April). Pesan Pemilu tidak hanya dilakukan dengan tatap muka secara konvesional tetapi dengan cara yang lebih kreatif. Bisa melalui media komunikasi audio, atau audio visual, bisa juga dengan pentas seni menampilkan pekerja seni seperti penyanyi, band hingga aksi coret-coret.

1. Lomba Mural

Aksi coret-coret di dinding itu bernama mural. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:941) Mural berarti lukisan pada dinding. Dalam praktiknya mural hampir sama dengan grafiti, menggambar pada media tembok. Namun, grafiti lebih menekankan pada keindahan tulisan bukan untuk menyampaikan kritik sosial. Grafiti juga hanya berupa tulisan-tulisan. Selain memiliki tujuan yang berbeda, mural dan grafiti juga memiliki alat gambar yang berbeda. Para pembuat mural kerap kali menggunakan cat tembok atau pewarna lain. Nah, para bomber (sebutan untuk pembuat grafiti) sering menggunakan cat semprot dalam menggambar. Dalam praktiknya mural dibuat dengan pesan-pesan moral sosial tertentu sesuai maksud dan tujuan pembuatan. Karena itu tidak semua orang memiliki keahlian menuangkan kreasinya dengan mural karena membutuhkan keterampilan menggambar mengunakan kuas, alat semprot, cat, tiner dan sebagainya.

Di NTT, program ini banyak diminati oleh pegiat seni mural alias bomber. Sejak pengumuman dikeluarkan akhir Maret 2019, sedikitnya 28 peserta mendaftar memperebutkan Uang tunai Rp 22.500.000, piagam penghargaan dan plakat. Lomba yang sama pernah diselengggarakan oleh sejumlah instansi di Kota Kupang. Namun bagi KPU Provinsi NTT tahun 2019 pertama kalinya. Lomba ini menyedot perhatian luar biasa dari publik Kota Kupang yang melintasi lokasi yang tersebar di 22 titik. Paling tidak pesan seperti anti golput, anti politik uang,

jdih.kpu.go.id

anti politik SARA, perangi hoaks, hari dan tanggal pemungutan suara dan pesan toleransi keberagaman tersampaikan.

2. Lomba Band, Konser Musik, dan Pemilu Run

Kegiatan Lomba Band Pentas Jingle Pemilu digelar pada 4 April. Sejak dibuka pendaftaran 27 Maret – 2 April 2019 sedikitnya tiga puluh pelamar mendaftarkan diri. Dari jumlah ini akhirnya mengikuti lomba sebanyak dua puluh dua band yang berasal dari Kota Kupang dan kabupaten sekitarnya seperti dari Kabupaten Belu. Sasaran kegiatan ini kaum muda, pemilih pemula, dan umum. Sementara konser musik pada 5 April menghadirkan Dewi-Dewi didukung sejumlah artis Kota Kupang, Grup Zumba, Grup Dance.

Acara ini disaksikan ribuan penonton, memudahkan penyampaian pesan-pesan Pemilu, ajakan memilih, imbauan menolak hoaks, politisasi isu SARA. Sementara Pemilu Run diselengarakan pada 6 April mengusung Tema 'Satu Tujuan Melangkah Bersama Pemilu Serentak Damai 2019'. Festival NTT Memilih menyedot perhatian publik NTT. Pesan Pemilu yang disampaikan tentu menjadikan masyarakat semakin serius untuk memutuskan ke TPS pada tanggal 17 April .

Berbagai bentuk kegiatan di atas mengacu pada PKPU 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, khususnya terminilogi mobilisasi sosial pada pasal 1 poin 26 yang menjelaskan bahwa mobilisasi sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka sosialisasi Pemilu dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih. Festival NTT Memilih telah menyedot perhatian publik untuk menyaksikan kegiatan ini.

Voter and Civic Education Program

Pengalaman melaksanakan berbagai sosialisasi dan pendidikan pemilih tahun 2019 hingga partisipasi pemilih yang mencapai 81,93 % secara nasional menarik untuk dikaji demi perkembangan Pemilu pada masa mendatang.

Berdasarkan pengamatan dan kajian selama pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu 2019, informasi bagi pemilih terbagi dalam dua metode yaitu pendidikan pemilih (*Voter Education*) dan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Fokus materi Pendidikan Pemilih yaitu berkaitan dengan proses Pemilu, prosedur, partai politik, kandidat, kampanye, metode pemberian suara, metode konversi suara, dan ajakan ke TPS.

Kedua, materi yang menekankan tentang tanggung jawab sebagai warga negara, tidak berhenti saat pemilihan umum, tetapi ikut mengawal bahkan sampai sesudah pemilihan umum. Ini ditujukan kepada seluruh entitas warga negara termasuk mereka yang mulai apatis untuk ke TPS karena berbagai alasan. Misalnya maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah, anggota legislatif, penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik. Akibatnya munculnya sikap apatis warga untuk tidak memedulikan aktivitas apapun yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, karena setiap Pemilu memilih wakil atau pemimpinnya tidak ada perubahan yang signifikan.

Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah melaksanakan pendidikan pemilih (*voter education*) dan pendidikan kewarganegaraan (civic education). Kita dapat belajar dari sejumlah negara yang telah melaksanakan seperti Nigeria, India, Ghana, dan India.

Okechukwu dan Nkwachukwu dalam bukunya, *Approaches to Civic and Voter Education: Nigeria's Experience in Comparative Perspective*[49] menjelaskan bahwa Voter Education (Pendidikan Pemilih) berfokus pada peran warga negara sebagai pemilih. Termasuk pengetahuan tentang tugas dan kewajiban pemilih, prosedur pemilihan, partai politik dan kandidat, pelanggaran Pemilu, prosedur penghitungan, tanggung jawab dari badan pengelola Pemilu dan perlindungan mandat. Pendidikan pemilih dirancang untuk membekali warga negara dengan pengetahuan tentang keseluruhan proses pemilihan.

Sementara konsep Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) lebih secara luas dan didefinisikan sebagai proses menanamkan kepada warga keterampilan, nilai-nilai dan perilaku yang ada dianggap perlu untuk demokrasi yang stabil dan efektif kepada warga negara. Menurut USAID, ada tiga sasaran yaitu[50]:

a. Memperkenalkan kepada warga negara tentang aturan dasar, bentuk, dan sistem kelembagaan politik yang demokratis dan untuk memberi mereka pengetahuan tentang hak dan praktik demokrasi;
b. Menyampaikan seperangkat nilai tertentu yang dianggap penting bagi warga negara sikap yang demokratis seperti toleransi politik, kepercayaan pada proses demokrasi, penghormatan terhadap supremasi hukum, dan kompromi; dan
c. Mendorong partisipasi politik yang bertanggung jawab dan terinformasi,

[49]Okechukwu, Nkwachukwu, *Approaches to Civic and Voter Education: Nigeria's Experience in Comparative Perspective, Independent National Electoral Commission* (INEC) (2014: hal 13)
[50] Ibid, Hal 13

didefinisikan sebagai sekelompok kegiatan termasuk pemungutan suara, bekerja dalam kampanye, menghubungi pejabat, mengajukan keluhan, menghadiri pertemuan, dan menyumbang uang.

Pendidikan pemilih di sisi lain dapat dianggap sebagai bagian dari pendidikan sipil, dengan fokus pada peran warga negara sebagai pemilih. Ini akan mencakup pengetahuan tentang beberapa masalah termasuk tugas dan kewajiban pemilih, prosedur pemungutan suara, partai politik dan kandidat, pelanggaran Pemilu, prosedur penghitungan, tanggung jawab badan pengelola pemilu dan perlindungan mandat. Dalam akta, pendidikan pemilih dirancang untuk membekali warga negara dengan pengetahuan tentang keseluruhan proses pemilihan.

Pendidikan Pemilih dan Kewarganegaraan menurut Almond dan Verba (1989) sebagaimana dikutip Okechukwu[51] memiliki aspek penting untuk diperhatikan yaitu bahwa keduanya tidak terbatas pada pengetahuan sebagai orientasi kognitif tetapi juga orientasi afektif dan evaluasi. Pendidikan kewarganegaraan dan pemilih adalah penanaman orientasi positif terhadap struktur dan objek demokrasi pada tingkat kognitif, afektif, dan evaluatif. Dengan orientasi kognitif berarti ada pengetahuan dan kepercayaan tentang demokrasi khususnya pada proses pemilihan. Orientasi afektif mengacu pada perasaan, kepercayaan diri dan tingkat kepercayaan dalam proses pemilihan, sedangkan orientasi evaluatif berkaitan dengan penilaian terhadap demokrasi dan proses pemilihan. Orientasi ini menuju sistem secara keseluruhan, objek input, objek output dan menuju diri sebagai objek demokratis. Mengenai objek input dan output, orientasi positif mungkin menuju peran, struktur, pemain lama atau kebijakan (Almond dan Verba, 1989: 14 - 15)[52] Pada tabel berikut ini tiga aspek indikatif pendidikan pemilih.

	Objek Sistem Secara Umum	Objek Input	Objek Output	Pribadi sebagai Objek
Kognisi	Pengetahuan tentang kerangka kerja hukum pemilihan dan keyakinan bahwa mereka dijamin kebebasan, bertindak adil dan dipercaya dalam Pemilihan umum	Pengetahuan tentang fungsi dan peran Badan Penyelenggara Pemilu (*Election Management Body*) seperti INEC dan keyakinan bahwa struktur lembaga itu memadai untuk menjamin kebebasan, adil dan dipercaya dalam pemilihan umum	Pengetahuan tentang proses ajudikasi pemilu dan peran berbagai lembaga di dalamnya	Pengetahuan tentang peran seseorang dalam proses pemilihan - pemilih, jajak pendapat pekerja, kandidat, dll

	Objek Sistem Secara Umum	Objek Input	Objek Output	Pribadi sebagai Objek
Afeksi	Perasaan percaya diri dan kepercayaan pada demokrasi dan sistem pemilu semata, tidak hanya sebagai sarana untuk kesejahteraan berakhir seperti pekerjaan, dll.	Perasaan percaya diri dan percaya pada lembaga penyelenggara Pemilu dan lembaga lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu	Merasa percaya diri dan percaya pada lembaga peradilan dan lainnya yang terlibat dalam ajudikasi pemilihan	Keyakinan dan kapasitas seseorang untuk berbeda
Evaluasi	Penilaian bahwa pengadilan Pemilu dalam sistem pemilihan menjamin pemerintahan yang kuat dan demokratis	Penilaian bahwa lembaga Penyelenggara pemilu (EMB) dan agen lainnya cukup menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, adil dan dipercaya.	Putusan bahwa peradilan dan lembaga peradilan lainnya efektif.	Penilaian bahwa partisipasi seseorang penting dan dapat mengarah pada peningkatan proses pemilihan untuk pemerintahan yang demokratis.

Sumber : Almond and Verba, 1989: 15.[53]

Tabel di atas menunjukkan tiga dimensi pendidikan pemilih yaitu kognisi, afeksi dan evaluasi. Dari aspek koginisi pemilih mendapatkan pengetahuan tentang kerangka kerja hukum dan jaminan agar pemilih percaya pada proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu. Kepada pemilih diperkenalkan tentang peran, tugas,

dan fungsi badan penyelenggara Pemilu dan meyakinkan pemilih bahwa dengan struktur organisasi yang ada efektif menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu yang bebas, adil, dan dipercaya. Pemilih juga diberikan informasi tentang proses ajudikasi yang diselenggarakan oleh badan peradilan pemilu serta badan lainnya. Diinformasikan juga tentang peran setiap pemilih secara pribadi untuk bertanggung jawab untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, atau berpartisipasi dalam jajak pendapat atau bahkan sebagai kandidat.

Dari dimensi afeksi, pendidikan pemilih menimbulkan rasa percaya diri dan kepercayaan pada demokrasi serta sistem Pemilu, tidak semata hanya sebagai

[51] Opcit, hal 13
[52] Ibid, Hal 13
[53] Opcit, hal 14

sarana untuk kesejahteraan berakhir seperti pekerjaan. Perasaan percaya diri dan percaya pada lembaga penyelenggara Pemilu dan lembaga lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu. Merasa percaya diri dan percaya pada lembaga peradilan dan lembaga lainnya yang terlibat dalam ajudikasi Pemilihan Umum. Pada akhirnya muncul rasa percaya diri serta kapasitas yang memungkinkan seseorang tampil berbeda dalam berpilihan politik dan sebagainya. Kepercayaan yang sama juga hendaknya kepada lembaga peradilan Pemilu maupun peradilan umum untuk memberikan kepastian hukum.

Pada dimensi evaluasi, munculnya penilaian bahwa pengadilan Pemilu dalam sistem pemilihan menjamin pemerintahan yang kuat dan demokratis. Penilaian bahwa lembaga penyelenggara Pemilu (*Election Management Body*) dan lembaga lainnya menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum yang bebas, adil dan dipercaya. Juga putusan peradilan dan lembaga peradilan lainnya efektif. Penilaian bahwa partisipasi seseorang adalah penting dan dapat mengarah pada peningkatan dalam proses pemilihan dan pemerintahan yang demokratis.

Pendidikan pemilih dan kewarganegaraan menjadi penting untuk mengisi kebutuhan pada dimensi pengetahuan, afeksi, dan evaluasi pemilih. Berdasarkan uraian di atas pertanyaannya bagaimana meletakkan pendidikan pemilih dan kewarganegaraan dalam suatu siklus Pemilu di Indonesia? Dalam siklus Pemilu sebagaimana pada gambar dibagi dalam tiga periode besar yaitu periode pra Pemilu (*pre electoral period*), periode Pemilu (*electoral period*), dan Periode sesudah Pemilu (*Post Electoral Period*).

Pendidikan pemilih (*voter education*) dan kewarganegaraan (*civic education*) saling berkaitan namun jika dapat dibedakan maka penekanannya pada periode pemilu. Pendidikan pemilih dilaksanakan pada masa pra pemilu (*pre electoral period*) dan periode pemilu (*election period*) dengan penekanannya pada tanggung jawab sebagai pemilih. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan pada masa sesudah pemilu (*non election period*) dengan penekanan pada tanggung jawab sebagai warga negara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan diperlukan intervensi program peningkatan partispasi masyarakat yang telah digagas oleh KPU dalam dua periode sebagaimana dapat dilihat pada gambar [54]

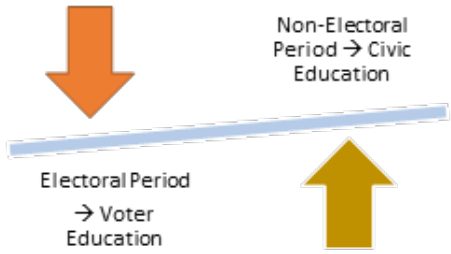

Sumber : Presentasi Partisipasi Masyarakat KPU RI 2015

Program peningkatan partisipasi masyarakat atau program *Voter* and *Civic Education Sustainabelity* dibedakan menjadi dua periode yaitu periode Pemilu dan periode non pemilu. Pada periode Pemilu maka dilakukan pendidikan pemilih yang menekankan tentang hak dan kewajiban warga negara sebagai pemilih. Muatan materinya tentang kerangka aturan pemilihan umum seperti penetapan jumlah kursi, pembagian daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan perolehan suara partai dan penetapan calon terpilih.

Sedangkan pada periode sesudah Pemilu digalakkan program pendidikan kewarganegaraan. Pada periode *non electoral* ini muatan materinya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Kedua program ini menjadi program pendidikan pemilih dan kewarganegaraan berkelanjutan. Mendidik warga negara menjadi kritis pada saat Pemilihan Umum, ikut menentukan pilihan wakil rakyat, pemimpin lokal, daerah dan nasional secara bijak, memercayai lembaga penyelenggara Pemilu seluruh tingkatan, percaya terhadap lembaga peradilan, ajudikasi dan keputusan yang menjadikan demokrasi dan pemerintahan semakin dipercaya. Maka tujuan pendidikan pemilih dan kewarganegaraan (*Voter and civic education*) berkelanjutan mencapai terwujudnya literasi politik warga dan voluntarisme politik warga. (*)

jdih.kpu.go.id

Daftar Pustaka

Ibeanu, Okechukwu; Orji, Nkwachukwu, Approaches to Civic and Voter Education: Nigeria's Experience in Comparative Perspective, SN - 978-978-51933-5-8, 2014, Published by Independent National Electoral Commission (INEC) and With support from the Ford Foundation

KPURI, "Desain Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu" Presentasi pada Rakor Divisi Parmas KPU Provinsi se-Indonesia di Jakarta (2015)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia, 2013

Laporan Hasil Pemilu 2014, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

NTT Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur

PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosiliasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

https://www.inibaru.id/infografik/sering-dianggap-sama-begini-perbedaan-mural-dan-grafiti diunduh Minggu, 12/1, pukul 08.30

BAGIAN 2

POTRET PENDIDIKAN PEMILIH

jdih.kpu.go.id

jdih.kpu.go.id

Pada bagian kedua buku ini, membahas pengalaman potret pendidikan Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Indonesia. Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak pertama pada 17 April 2019. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak ini merupakan amanat dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Melalui putusan tersebut, Pemilu Serentak dinilai dapat menjadikan penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas dan peningkatan partisipasi masyarakat nyata sebagai upaya kesadaran dalam membangun demokrasi di Indonesia. Dalam studi demokrasi dan pemilu, partisipasi pemilih merupakan salah satu hal yang penting dalam pemilu. Pentingnya studi partisipasi pemilih, karena studi tersebut berkaitan erat dengan legitimasi suatu pemilu dan suksesnya penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pemilu.

Studi Partisipasi pemilih dalam pemilu tidak terlepas dari faktor perubahan sistem pemilu dari sistem perwakilan menjadi pemilihan langsung dan berbasis suara terbanyak, berdampak pada pola sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dimana pemilu berjalan secara dinamis. Ketika sistem pemilu terbuka, maka objek dan sasaran pemilih menjadi luas dan memiliki dinamika tersendiri dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dengan informasi kepemiluan.

Hampir 15 tahun terakhir ini bangsa Indonesia melaksanakan dan mengikuti praktek proses proseduralisme demokrasi melalui pemilihan langsung secara terbuka. Maka menarik memotret dan mengkaji strategi sosialisasi dan peningkatan partisipasi pemilih.

Pemilu serentak tahun 2019, oleh Pemerintah melalui Bappenas menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,5 %. Target ini selanjutnya dijadikan sebagai program utama bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mencapainya sebagai upaya membangun kesadaran berpemilu bagi masyarakat di Indonesia.

Berbagai program kegiatan sosialisasi diluncurkan oleh KPU sebagai upaya mencapai target prosentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019.

Bagian ini akan memotret beberapa provinsi sebagai perwakilan dalam pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu 2019.

jdih.kpu.go.id

Hoax Marak, Mimbar Jumat Sebagai Solusi

Oleh Akmal Abzal
Anggota Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh

Pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bertujuan untuk mengisi lima jabatan politik ; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kabupaten (DPRD/K), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), DPR RI, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Meski pelaksanaannya berbarengan, tetapi ruang publik lebih riuh di isi informasi tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akibatnya isu tentang pemilu legislatif menjadi inferior, kurang bergairah dan tidak hangat dalam diskursus publik.

Tantangan KPU/KIP Aceh untuk membangun rasionalitas pemilih di negeri "Serambi Mekkah" tidaklah mudah manakala ruang publik dikepung oleh hoax/ berita bohong. Pemilu sebagai sarana untuk menentukan pemimpin, sering kali "digoreng" oleh sejumlah pihak menjadi isu berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Akibatnya nalar dan rasionalitas publik menjadi rusak. Kepercayaan dan kejujuran menjadi langka. Polarisasi dan intoleransi sedemikian mudah terjadi. Saling menuding, bahkan menghujat karena beda pilihan mewarnai dinamika kontestasi pemilu kita.

Daya rusak hoax makin ganas, manakala penyebar hoax adalah tokoh masyarakat yang memiliki otoritas dan legitimasi baik secara struktural maupun kultural. Penyebaran hoax tidak saja masuk ke dalam ruang maya, tetapi juga menyebar melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti acara pesta. Polarisasi dibentuk sedemikian rupa dengan mengedepankan figur kandidat dibanding menguliti visi, misi dan program yang mereka tawarkan. Kita terjebak pada aspek yang bersifat artifisial dibanding substansial.

"Pemilu kali ini pilihan kita hanya dua; pilih pasangan Islam sejati atau pasangan Islam munafik" demikian kalimat yang disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat pada sebuah acara pesta di wilayah Aceh Besar. Sungguh narasi yang sangat mengejutkan dan mengerikan di tengah sebagian masyarakat kita yang masih awam politik dan rentan berkonflik. Beruntung KIP Aceh cepat menetralisir pernyataan keliru tersebut.

Pekerjaan makin berat karena KIP Aceh tidak saja harus menetralisir narasi yang berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang berkembang di tingkat lokal. KIP Aceh bersama relawan demokrasi juga harus meluruskan sejumlah

hoax yang berkembang secara nasional seperti geger hoax 7 (tujuh) kontainer surat suara tercoblos di Jakarta, rekaman video surat suara tercoblos di Sumatera Utara dan sejumlah hoax lainnya.

Sembari menangkal hoax, KIP Aceh harus menyelesaikan berbagai persoalan domestik seperti keterlambatan cetakan, pengambilalihan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Pidie, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Aceh Jaya dan khususnya Kabupaten Simeulue sampai tulisan ini dibuat komisionernya belum dilantik oleh Bupati. Kondisi tersebut menguras tenaga dan pikiran untuk mengelola tahapan agar tetap sesuai aturan dan tepat waktu.

Sebagai penyelenggara, KIP Aceh tak boleh menyerah, apalagi kalah dengan berbagai persoalan tersebut, termasuk dalam membendung serangan hoax, fitnah dan ujaran kebencian karena prinsip hidup adalah kebenaran harus disampaikan kendati pahit. Prinsip ini yang kemudian menghantarkan KIP Aceh tetap sabar dan terus berikhtiar untuk melahirkan kreasi dan inovasi dalam mengedukasi pemilih di tengah gempuran hoax yang maha dahsyat.

Relasi Menembus Jantung Pemilih

Tak ada kesulitan tanpa solusi, tak ada kayu rotan pun jadi. Demikian kata bijak yang sering kita dengar dari orang tua di masa lalu. Pembentukan relawan demokrasi sebanyak 55 orang di setiap kabupaten/kota memperkuat jejaring dan simpul KIP Aceh untuk menembus jantung pemilih di 11 basis yang menjadi sasaran. Kehadiran relawan demokrasi di tengah-tengah masyarakat mampu mengimbangi narasi yang bersifat hoax, berita bohong dan ujaran kebencian.

Peran Relasi tak terbatas pada aspek teknis pemilu, tetapi lebih menukik pada aspek substantif. Upaya mendongkrak partisipasi dilakukan melalui pendekatan yang sistematis. Pendidikan pemilih tidak hanya menekankan pada aspek kognitif semata, tetapi memastikan adanya sentuhan pada aspek afektif dan psikomotorik. Relasi didorong untuk turut membangun karakter pemilih yang memiliki tata krama dan adab yang agung dalam berdemokrasi.

Menghilangkan pragmatisme dalam kontestasi politik merupakan salah satu target relasi seperti politik uang. Upaya itu dilakukan melalui semua ruang yang tersedia seperti gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dari rumah ke rumah, penyebaran brosur dan berselancar di dunia maya. Dalam masa tiga bulan Relasi bekerja di bawah kendali divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat KIP Aceh, mampu memberi kontribusi nyata berupa meningkatnya

jdih.kpu.go.id

partisipasi pemilih tahun 2019, sebesar 81,81 %, melebihi target nasional sebesar 77,5 %.

Mimbar Jum'at sebagai Solusi

Ide menjadikan mimbar Jumat untuk mengatasi hoax Pemilu dan menebarkan narasi kebenaran, berawal ketika penulis yang sering didaulat menjadi khatib Jumat di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya. Dalam setiap kesempatan khutbah Jumat, penulis selalu menekankan perlunya menjaga toleransi dalam keberagaman. Kepentingan bangsa dan negara tidak boleh ditempatkan di bawah kepentingan politik pragmatis. Sesungguhnya Indonesia ada dan bersatu atas dasar perbedaan dan keberagaman suku, ras, agama dan golongan.

Mimbar Jumat ternyata cukup efektif sebagai media sosialisasi dan edukasi untuk membangun karakter pemilih yang rasional, beradab dan toleran terhadap perbedaan pilihan politik. Mimbar Jumat mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap esensi pemilu seutuhnya, membuka cakrawala berpikir positif, membangun sentuhan nurani untuk melawan hoax dan meninggalkan ujaran kebencian.

Beragam dalil dan cuplikan cerita singkat kerap penulis gunakan sebagai materi khutbah untuk menyentuh nurani para jamaah. Suatu hal lumrah, respon positif sekaligus juga ada respon negatif dari jamaah, sudah barang tentu harus dihadapi. Perdebatan kecil usai shalat Jumat selalu saya sikapi dengan kapala dingin. Ruang diskusi dan pencerahan diberikan untuk memastikan jamaah memahami secara utuh pesan yang disampaikan, meski ada saja jamaah yang sok tahu tentang tahapan, menyalahkan penyelenggara tanpa mau menerima keterangan dan penjelasan apapun.

Secara perlahan, beberapa tokoh mulai memahami esensi pemilu yang sesungguhnya. Hal-hal yang tadinya meragukan dan membuat mereka tidak percaya dengan penyelenggara menjadi jelas dan terang benderang, termasuk isu surat suara tercoblos. Mereka secara individual dapat menerima dan memahami informasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu, kendati saat bersamaan yang bersangkutan mengakui sulit tampil beda dengan pandangan mayoritas publik. Butuh keberanian untuk menyuarakan kebenaran karena belum tentu mendapat dukungan.

Dari waktu ke waktu, sejak komisioner KIP Aceh menggunakan mimbar Jumat untuk mengedukasi publik dan meluruskan berbagai informasi yang menyesatkan pemilih tentang Pemilu, sentimen negatif terhadap KPU di Provinsi Aceh perlahan menurun. Mengubah opini publik tidak mudah, butuh proses untuk menghilangkan benih-benih hoax yang sudah tertanam, tumbuh dan berurat akar di dalam memori publik.

Menariknya khatib memiliki kemerdekaan menggunakan mimbar Jumat dalam menyampaikan materi tanpa dapat di intervensi, protes apalagi berdebat. Otoritas khatib dijamin seratus persen selama di atas mimbar. Khatib dapat menyampaikan kebenaran kepada jamaah dengan dalil dan referensi yang kuat dan akurat. Nilai, kualitas materi dan profesionalitas dikelola dengan baik demi memelihara esensi dan sakralitas mimbar Jum'at sebagai ibadah mingguan bagi umat Islam.

Pemilu 2019 mendidik kita untuk menjadi lebih dewasa dan sekaligus kreatif. Dalam mengedukasi pemilih, tak cukup ruang kelas kita kunjungi, tak terhitung meja kafe dan warung yang kita datangi, banyak komunitas telah kita sambangi, tetapi mimbar Jum'at dapat menjadi solusi dalam mendidik publik tentang pentingnya pemilu yang nyaman, damai dan beradab.

No	Tanggal	Alamat	Materi / Referensi
1.	4-Jan-19	Masjid Al Islahiyah lam-buk Ule Kareng Banda Aceh	QS. An Nahlu 114, QS Al Baqarah 168, QS Al Maidah 88 Intinya bekerja dan mengabdi pada Negeri harus berlandaskan tujuan beribadah dengan mengedpan rezeki yang hal dan baik.
2.	18-Jan-19	Masjid Babussalam Kreung Barona Jaya Aceh Besar	
3.	25-Jan-19	Masjid Miftahul Jannah Punge Ujung Banda Aceh	
4.	1-Feb-19	Masjid Rahmatullah Lampuuk Lhoknga Aceh Besar	

No	Tanggal	Alamat	Materi / Referensi
5	8-Feb-19	Masjid Sing Rukoh Darusalam Banda Aceh	QS Alhujurat 6, 10, 12 dan 13 pada Intinya Keberagaman adalah sebuah sunnatullah dan jauhi saling membenci karena beda persepsi dalam kehidupan
6	15-Feb-19	Masjid Kecamatan Ala-pan Simeulu	
7	22-Feb-19	Masjid Al Muttaqin Peunayong Kota Banda Aceh	
8	15-Mar-19	Masjid At Thahirah LAMCOT Bayu Aceh Besar	
9	22-Mar-19	Masjid Asyifa Kesdam IM Kota Banda Aceh	
10	29-Mar-19	masjid Al-Furqan Beurawe Kota Banda Aceh	
11	12-Apr-19	Masjid Aljihad Jeulingke Kota Banda Aceh	
12	03 Mai 19	Masjid Ar Rahman Mer-duati Kota Banda Aceh	
	10 Mai 19	Masjid At Taqwa Sp Surabaya Banda Aceh	
	17 Mai 19	Masjid Sabilil Jannah Doi Ule Kareng Banda Aceh	
	24 Mai 19	Masjid Mukim Lamteng-oh Aceh Besar	QS Alhujurat 6, 10, 12 dan 13 pada Intinya Keberagaman adalah sebuah sunnatullah dan jauhi saling membenci karena beda persepsi dalam kehidupan
	31 Mai 19	Masjid Baitul Alam Kuta Alam Kota Banda Aceh	
	7-Jun-19	Masjid Jamik Mukim Lamrabo Aceh Besar	
	14-Jun-19	Masjid Babun Najah Surien Kota Banda Aceh	

No	Tanggal	Alamat	Materi / Referensi
	21-Jun-19	Masjid Al Ikhlas Kp Keurama Kota Banda Aceh	
	28-Jun-19	Masjid Al Muttaqin Peunayoeng Kota Banda Aceh	
	12-Jul-19	Masjid Baburrahah Lamteumeun Timur Kota Banda Aceh	
	19-Jul-19	Masjid Miftahul Jannah Punge Ujung Banda Aceh	
	26-Jul-19	Masjid Al Falah Lam-jumpok Ingin Jaya Aceh Besar	
	2-Aug-19	Masjid Rahmatullah Lampuuk Lhoknga Aceh Besar	
	9-Aug-19	Masjid Babul Jannah Ajun Peukan Bada Aceh Besar	
	16-Aug-19	Masjid Jamik Mukim Lamreung Darul Imarah Aceh Besar	
	23-Aug-19	Masjid Mukim Aneuk Batee Suka Makmur Aceh Besar	
	30-Aug-19	Masjid Asyifa Kesdam IM Kota Banda Aceh	

No	Tanggal	Alamat	Materi / Referensi
	6-Sep-19	Masjid Babussalam Kreung Barona Jaya Aceh Besar	QS Alhujurat 6, 10, 12 dan 13 pada Intinya Keberagaman adalah sebuah sunnatullah dan jauhi saling membenci karena beda persepsi dalam kehidupan
	13-Sep-19	Masjid Sing Rukoh Darusalam Banda Aceh	
	27-Sep-19	Masjid Mukim Lamteng-oh Aceh Besar	
	4-Oct-19	Masjid Besar Sibreh Suka Makmur Aceh Besar	
	11-Oct-19	Masjid Jamik Mukim Lampisang Kec Lhoknga Aceh Besar	
	18-Oct-19	Masjid Nurul Huda Penyerat Kota Banda Aceh	
	25-Oct-19	Masjid At Thahirah LAMCOT Bayu Aceh Besar	
	01 Nov 19	Masjid Aljihad Jeulingke Kota Banda Aceh	
	15 Nov 19	Masjid Baburrahah Lamteumeun Timur Kota Banda Aceh	QS. Al Ambiya 107, QS An Nisa 170 dan QS Al Ahzab 21 tentang Ketauladan Rasulullah untuk Kehidupan diera modern ini. Perilaku Rasul harus di transfer dalam kehidupan kita yang beragam
	22 Nov 19	Masjid At Taqwa Sp Surabaya Banda Aceh	
	29 Nov 19	Masjid Jamik Mukim Lamrabo Aceh Besar	
	6-Dec-19	Masjid Al Ikhlas Kp Keurama Kota Banda Aceh	
	13-Dec-19	Masjid Ar Rahman Mer-duati Kota Banda Aceh	
	20-Dec-19	Masjid Al Iktibar Deah Raya Kota Banda Aceh	
	27-Dec-19	Masjid Babul Jannah Ajun Peukan Banda Aceh Besar	

Partisipasi Pemilih Meningkat

Kreasi dan inovasi sosialisasi Pemilu oleh KIP Aceh berbuah manis. Partisipasi pemilih Pemilu 2019 di Provinsi Aceh mencapai 81,81%, melebihi target nasional 77,5 %. Ini membuktikan bahwa tak ada usaha yang sia-sia. Selain masifnya sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara dan relasi, peningkatan partisipasi pemilih juga berkat dukungan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait yang bergiat di bidang pemilu dan demokrasi.

Kerja keras semua pihak dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 memberi kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi pemilih rasional. Dimensi ruang dan waktu dimanfaatkan secara optimal untuk mengetuk pintu hati pemilih, termasuk menggunakan mimbar Jum'at sebagai media edukasi dan klarifikasi atas berita hoax yang menghegemoni ruang publik.

Perbandingan Partisipasi Pemilih di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pada Pemilu 2014 dan 2019

1. **Pemilu tahun 2019**
   DPT : 3.523,774
   Partisipasi : 2.882.901
   Persentase : 81.81 %
   Suara sah : 2.660.914
   Suara tidak sah : 221.987
   Persentase : 7.80 %

2. **Pemilu tahun 2014**
   DPT : 3.357.159
   Partisipasi : 2.061.084
   Persentase : 61,4 %
   Suara sah : 2.002.599
   Suara tidak sah : 58.485
   Persentase : 2,84 %

jdih.kpu.go.id

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KIP ACEH Pada Pemilu 2019

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KIP ACEH Pada Pemilu 2019

Merebut Hati Pemilih di Ranah Minang

Oleh Gebril Daulai
Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat

Pengantar

Pemilih merupakan aktor utama Pemilihan Umum. Partisipasi pemilih menjadi bagian integral dari upaya menciptakan demokrasi elektoral yang bergizi. Karenanya, penting mengatur pola konsumsi informasi pemilih agar mereka tidak terperangkap oleh *hoax*, *fake news* dan *hate speech*. Mampu berpikir jernih dan terhindar dari jebakan sikap primordialisme, fanatisme dan rasisme. Menyikapi pilihan politik berbeda secara dewasa, elegan dan tak main paksa.

Partisipasi pemilih erat kaitannya dengan legitimasi. Kehadiran pemilih pada keseluruhan tahapan Pemilu akan mempersempit bahkan menutup celah kecurangan. Parlemen dan pemerintahan yang lahir dari Pemilu jujur dan adil akan dipercaya dan mendapat dukungan publik. Mereka diyakini dapat menjembatani kepentingan politik warga demi terwujudnya cita-cita keadilan sosial sebagaimana mandat konstitusi. Mengelola pemerintahan dengan orientasi utama kepentingan publik, bukan golongan, apalagi elit semata.

Partisipasi pemilih juga menggambarkan gairah, optimisme dan kegembiraan kita dalam berdemokrasi. Optimisme yang dibangun atas dasar realitas objektif kondisi politik bangsa, bukan optimisme buta tanpa peta. Gairah berdemokrasi yang tumbuh dan membiak di atas kesadaran akan keberagaman sehingga tidak memupuk kebencian. Dan kegembiraan berdemokrasi yang tumpah di atas kedewasaan. Pada titik inilah pentingnya penyebaran informasi dan edukasi Pemilu agar pemilih semakin matang dalam berdemokrasi.

Mengerek Partisipasi Pemilih

Tak mudah mengerek partisipasi pemilih dalam pemilu di Provinsi Sumatera Barat. Dengan modal partisipasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada pemilu 2014 sebesar 70,79 persen dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 65,19 persen, KPU Provinsi Sumatera Barat butuh jurus tak biasa menembus target partisipasi nasional 77,5 persen. Belum lagi jika berkaca pada partisipasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2015 hanya 59,58 persen.

Capaian Partisipasi Pemilih di Sumatera Barat pada Pemilu 2014 di bawah target nasional sebesar 75 persen. Menempatkan Provinsi Sumatera Barat dengan

tingkat partisipasi terendah nomor tiga di Indonesia, setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sumatera Utara. Namun, satu hal yang menggembirakan, tren partisipasi pada Pemilu Legislatif di Sumbar cenderung meningkat meskipun peningkatannya tidak signifikan. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, tingkat partisipasi pemilih 70,45 persen, meningkat menjadi 70,79 persen di Pemilu 2014.

Peta partisipasi pemilih yang demikian menjadi cambuk bagi KPU Provinsi Sumatera Barat merumuskan program dan kegiatan sesuai kebutuhan pemilih. Untungnya, setelah Pemilu 2014, KPU RI membuat program riset pemilu tentang *voting behavior*/perilaku pemilih di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hasilnya penyumbang terbesar kelompok pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di Provinsi Sumatera Barat adalah pemilih pemula dan pemilih muda.

Jumlah mereka jika dibanding keseluruhan pemilih cukup signifikan sehingga berpotensi mengancam legitimasi Pemilu kita ke depan. Mereka yang kini berstatus sebagai pemilih pemula akan mendominasi struktur pemilih pada pemilu berikutnya. Sejumlah riset menunjukkan pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilih pada usia pertama mereka memiliki hak, cenderung tidak memilih pada pemilu selanjutnya. Pelan tapi pasti, pemilih yang demikian akan menjadi kelompok yang tidak menggunakan hak pilih secara permanen.

Riset Pemilu 2014 mengungkap sejumlah alasan kenapa pemilih pemula di Sumatera Barat enggan bersuara. Mereka berargumen memilih bukan kewajiban, tidak mengubah keadaan negara, tidak memberikan manfaat secara langsung, tidak mengenal partai politik/calon serta tidak peduli dan lebih mementingkan kesibukan sehari-hari. Temuan lainnya, sosialisasi dan pendidikan pemilih dari KPU masih dianggap biasa-biasa saja. Dampaknya, kondisi pengetahuan dan pemahaman pemilih tentang Pemilu, menjadi sedang-sedang saja.

Pemilih pemula adalah pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilih. Mengacu pada rentang usia, pemilih pemula berusia 17 sampai 21 tahun. Dan satu hal yang patut kita catat, mereka lahir pada rentang tahun 1998 sampai 2002. Era di mana penggunaan telepon genggam dan media *online* sebagai alat komunikasi dan interaksi mulai tumbuh di Indonesia. Tepat di usia mereka sedang mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar pada tahun 2010-an, penggunaan *smartphone* sebagai media komunikasi makin menggurita. Jadilah mereka *iGeneration* atau generasi internet. Generasi yang lahir dan dibesarkan di era digital dengan aneka teknologi lengkap dan canggih.

Usung Konsep IEF

Mendekati pemilih pemula yang berstatus sebagai Gen Z, KPU Provinsi Sumatera Barat mengusung konsep *information, education and fun* (IEF) untuk mendekatkan pemilu dengan anak muda. KPU Provinsi Sumatera Barat menggandeng seorang *YouTuber* Minang, PACAHPARUIK. Program YouTube PACAHPARUIK digawangi Teguh Prasetyo, akrab disapa Praz Teguh, seorang komika Sumatera Barat, finalis 4 (empat) besar *Stand Up Comedy* Indonesia Tahun 2014. Channelnya cukup dikenal dan digemari warga Sumatera Barat. *Subscribers* akun *YouTube* Praz Teguh mencapai 324 ribu dan setiap tayangan videonya ditonton lebih satu juta bahkan dua juta penonton/*viewers*.

Bersama Pras Teguh, KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun naskah *PACAHPARUIK* Episode-23, bertema Pemilu 2019. *PACAHPARUIK* merupakan Bahasa Minangkabau, berarti Pecah Perut, maksudnya menghibur hingga mengocok perut penonton. Ada 7 (tujuh) *scence* atau adegan dalam program tersebut, yaitu hari dan tanggal pemungutan suara, pentingnya mengenali peserta pemilu dan calon, lawan politik uang, memilih di TPS sesuai alamat KTP, prosedur memberikan suara di TPS, membuka surat suara dengan sempurna sebelum mencoblos dan larangan selama pemungutan dan penghitungan suara.

Komedi Pemilu berdurasi sekitar 15 menit ini mendapat antusiasme netizen. Tercatat PACAHPARUIK-23 bertema Pemilu 2019 ditonton 1.231.955 kali. Sebanyak 23 ribu orang menyatakan suka atau 97,9 persen, hanya 485 orang yang menyatakan tidak suka. Episode ini juga mendapat 1.679 komentar dari pengguna *YouTube* dan sebagian besar komentarnya positif. Data ini menunjukkan, KPU Provinsi Sumatera Barat mampu mengubah informasi Pemilu, kerap dianggap publik sesuatu yang rumit menjadi informasi ringan dan mudah dimengerti. Lebih dari itu, KPU Provinsi Sumbar mampu meletakkan pemilu dalam persepsi publik sebagai ajang yang menggembirakan, bukan sesuatu yang menegangkan, apalagi menakutkan.

Di luar itu, penonton video tersebut didominasi usia muda, yaitu 18 sampai 24 tahun mencapai 51,5 %, disusul usia 25 sampai 34 tahun sebanyak 23,3 % dan seterusnya usia 13 sampai 17 tahun sebanyak 13 %. Ini sesuai target basis pemilih, yaitu pemilih pemula dan pemilih muda yang jumlahnya cukup signifikan pada pemilu 2019. Pemilih berusia 17 sampai 21 tahun sebanyak 506.082 orang, sementara pemilih berusia 22 sampai 30 tahun sebanyak 496.966 orang. Pemilih pemula dan pemilih muda mencapai 26,97 persen dari keseluruhan jumlah pemilih di Sumatera Barat.

Banyaknya jumlah penonton komedi pemilu tersebut juga berkat kerja jejaring relawan demokrasi di kabupaten/kota di Sumatera Barat yang aktif mempromosikannya di berbagai akun media sosial mereka. PACAHPARUIK episode 23 tersebut menjadi materi yang kerap disampaikan dan diputar ulang relawan demokrasi ketika melakukan pertemuan tatap muka dengan basis pemilih pemula dan pemilih muda. Dengan demikian konten pemilu program PACAHPARUIK yang beredar di YouTube tidak hanya diperbincangkan di ruang publik digital, tetapi di bawa ke ruang publik nyata sehingga penyebarannya semakin intensif dan masif.

Penggunaan media internet, khususnya chanel *YouTube* untuk penyebaran informasi pemilu relevan dengan kondisi Sumatera Barat, di mana tingkat penetrasi penggunaan internet mencapai 84,2 persen, tertinggi nomor dua di Pulau Sumatera (APJII, 2018). Lebih lanjut, data secara nasional menunjukkan pengguna internet didominasi usia 15 sampai 19 tahun (91%), disusul usia 20 sampai 24 tahun (88,5%) dan seterusnya usia 25 sampai 29 tahun (82,7%). Dan alasan mereka menggunakan internet sebagai besar untuk bersosial media, komunikasi lewat pesan, mengisi waktu luang dan menonton film/video. Dan media sosial yang paling sering dikunjungi selain *facebook* dan *instagram* adalah *YouTube*.

Jemput Bola Pindah Memilih

Selain menyediakan konten sosialisasi kekinian, untuk mengurangi jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak di kelompok pemilih muda, KPU memberi kemudahan mengurus pindah memilih bagi mahasiswa. KPU Provinsi Sumatera Barat memetakan salah satu kelompok pemilih penyumbang 'golput' adalah mahasiswa dari luar Kota Padang dan luar Provinsi Sumatera Barat. Mereka enggan mudik ketika pemungutan suara karena hari libur singkat. Persoalan lain, para mahasiswa tersebut kurang mendapatkan informasi tentang waktu, lokasi dan mekanisme pengurusan pindah memilih. Karena itu, KPU Kota Padang melakukan aksi jemput bola dengan membuka *counter* layanan pindah memilih di 13 kampus di Kota Padang.

Tantangan berikutnya adalah para pegawai pemerintah, terutama lembaga vertikal, pegawai badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik swasta yang bekerja di Kota Padang dan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Karena sibuk mengurus pekerjaan, mereka kerap lupa dengan urusan pemilu. Bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak mengetahui mekanisme pengecekan data pemilih secara *online.* Akibatnya sebagian dari mereka tidak mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebagai syarat untuk mengurus pindah pemilih.

Untuk mencegah mereka jatuh dalam 'pelukan' golput, KPU Kota Padang mendatangi sejumlah instansi vertikal di Provinsi Sumatera Barat, memperkenalkan aplikasi pemilu 2019 dan memastikan mereka sudah terdaftar sebagai pemilih di daerah asalnya. Pada tahapan selanjutnya KPU Kota Padang *door to door* mendatangi sejumlah kantor instansi vertikal, menemui pimpinannya dan menyosialisasikan mekanisme pindah memilih bagi yang sudah terdaftar dalam DPT di daerah asalnya. Terdapat 15 instansi vertikal yang 'digedor' KPU Kota Padang dan semua menyambut dengan gembira dan tangan terbuka.

Dilema Kaum Pedagang

Selain pemilih pemula dan pemilih muda, tantangan KPU Provinsi Sumatera Barat adalah masyarakat Minang yang identik dengan kaum pedagang dan sehari-harinya di pasar. Belum lagi hari Rabu di sejumlah tempat di Sumatera Barat merupakan hari pekan/pasar. Ada kemungkinan pelaku ekonomi di sejumlah pasar, terutama pedagang memprioritaskan berdagang dibanding menggunakan hak pilih ke TPS. Apalagi sejumlah pasar mulai beroperasi sejak dini hari. Sangat mungkin mereka lupa dengan aktivitas pemungutan suara.

Menjawab persoalan itu, KPU Sumatera Barat menggandeng Komunitas Pemusik Jalanan (KPJ) Kota Padang untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pedagang dan pengunjung pasar tradisional. KPU Provinsi Sumatera Barat menginginkan pasar bukan sekadar arena transaksi ekonomi, tapi juga transaksi ide untuk membangun peradaban demokrasi yang lebih matang. Mengutip Belshaw (1981), pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politik dan lain-lain, tempat pembeli dan penjual saling bertemu untuk mengadakan tukar menukar. Karenanya, jangan heran, obrolan di pasar tidak saja berkaitan dengan jual beli dan untung rugi, tetapi mencakup aspek kehidupan lain seperti pendidikan, keagamaan, kebudayaan dan realitas sosial-politik yang mengitari kehidupan mereka.

Obrolan tentang kontestasi politik bukan sesuatu yang asing bagi para penghuni pasar. Los ikan, daging, sayur dan buah serta kedai kopi di pasar bahkan menjadi ruang publik yang nyaris tak pernah absen dari perbincangan politik. Sayang, politik bagi mereka baru sebatas perbincangan, belum termediasi menjadi gerakan untuk melahirkan perubahan. Misalnya gerakan menggunakan hak pilih karena jengah dengan kondisi pasar yang kurang representatif. Ruang kosong tersebut diisi KPU Provinsi Sumatera Barat. Menyelami denyut nadi kehidupan pasar, memberi informasi dan mengedukasi mereka agar optimis menyikapi sirkulasi politik lima tahunan yang sedang berlangsung.

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan melalui kesenian jalanan dengan mendatangi pasar di 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kegiatan ini dilabeli dengan 'Gerebek Pasar'. Pemusik jalanan menghibur pedagang dan pengunjung pasar dengan tembang bertemakan Pemilu dan motivasi memilih. Petugas KPU, PPK, PPS dan relawan demokrasi mendampingi pemusik jalanan sembari menyebarkan bahan sosialisasi dan berinteraksi singkat dengan pedagang dan pengunjung pasar. Kegiatan gerebek pasar dimeriahkan kuis pemilu untuk menguji pengetahuan pemilih dengan cara yang lebih riang.

Mendekati Kaum Urban

Mendekati pemilih urban, berbeda pula caranya. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih disesuaikan dengan gaya hidup mereka. Belakangan, masyarakat urban membangun interaksi melalui kegiatan seperti olahraga, traveling, kuliner, ngopi dan komunitas hobi. Salah satu yang lagi tren di Kota Padang, kegiatan *car free day* (hari bebas kendaraan bermotor). KPU Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan kegiatan *car free day* yang digelar setiap minggu untuk menyebarkan informasi pemilu kepada publik.

KPU Provinsi Sumatera Barat membuka *stand* di arena *car free day* sebagai ruang interaksi dengan warga kota yang membutuhkan informasi kepemiluan. Untuk mengoptimalkan penyebaran informasi, KPU menggandeng Radio Republik Indonesia (RRI) melakukan *talk show* secara langsung dari arena *car free day.* Kegiatan ini dikolaborasikan dengan Kelompok Pemusik Jalanan untuk menghibur warga kota dengan lirik-lirik lagu berisi ajakan menggunakan hak pilih.

KPU Provinsi Sumatera Barat juga menyasar pusat perbelanjaan untuk sosialisasi Pemilu. Alasannya, pusat perbelanjaan atau *mall* merupakan salah satu elemen kota yang memiliki fungsi penting. *Mall* berperan sebagai pusat interaksi dan komunikasi masyarakat perkotaan. Mereka datang ke *mall* untuk berbelanja, menikmati fasilitas atau rekreasi, bertemu dan bercengkerama dengan teman, membincang perkembangan usaha dengan rekan bisnis, *ngobrolin* perkembangan politik dan lainnya.

Meskipun akses ke pusat perbelanjaan terbatas pada kelompok ekonomi menengah ke atas tetapi jumlah pengunjungnya cukup signifikan, terutama di akhir pekan. Karena itu *mall* masih merupakan tempat strategis melaksanakan

kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu. Beberapa kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di sejumlah *mall* di Kota Padang seperti sosialisasi daftar pemilih sementara (DPS) di Plaza Andalas dan Pemilu Fest di Transmart.

Kegiatan Pemilu Fest di Transmart mengedepankan partisipasi warga melalui sejumlah lomba seperti mewarnai, mural bersama menggunakan media kaos, games berhadiah, *talk show* Pemilu, *beat box*, *stand up comedy* dan pemilu *corner* sebagai layanan informasi. Pemilu dikenalkan bukan saja kepada pengunjung yang memiliki hak pilih, tetapi kepada pra-pemilih. Regenerasi tidak saja diperlukan untuk mengisi struktur kekuasaan. Regenerasi pemilih yang rasional, sukarela dan mandiri penting untuk menyehatkan demokrasi kita agar tidak terciderai sikap politik primordial dan transaksional.

Efektif Tekan Suara Tidak Sah

Serangkaian kegiatan tersebut membawa dampak signifikan terhadap pengetahuan, kesadaran dan kemampuan teknis pemilih. Meski tak setinggi daerah lain di Indonesia, tingkat partisipasi pemilih di Sumatera Barat mampu melampaui target nasional 78,78 persen untuk pemilu anggota DPR, 78,82 persen untuk Pemilu Anggota DPD dan 78,98 persen untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan dibanding Pemilu 2014 tersebut bukan semata faktor sosialisasi dan pendidikan pemilih dari KPU. Peserta pemilu, pemerintah, media dan organisasi masyarakat sipil yang bergiat di bidang pemilu dan demokrasi memiliki andil menumbuhkan kesadaran pemilih untuk memberikan suara di TPS.

Meskipun partisipasi pemilih di Provinsi Sumatera Barat tergolong rendah secara nasional, tapi pengetahuan dan keterampilan pemilih dalam memberikan suara termasuk terbaik di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang mampu menekan *invalid vote*/suara tidak sah yang dikhawatirkan melonjak pada Pemilu 2019. Suara tidak sah untuk Pemilu Anggota DPR 6,89 persen, peringkat 8 (delapan) secara nasional. Suara tidak sah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 1,37 persen, peringkat 7 (tujuh) secara nasional. Angka statistik di atas menunjukkan sosialisasi KPU dan jajarannya sampai ke level KPPS tentang tata cara pemberian suara yang benar/absah cukup berhasil.

Di tengah meningkatnya antusiasme pemilih mendatangi bilik suara pada pemilu 2019, penyelenggara pemilu menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Pemilu kita bergerak di tengah gelombang *hoax*, *fake news* dan *hate speech*. Keadaban kita dalam membangun komunikasi dan interaksi di media sosial mengalami terjun bebas. Komunikasi disesaki dengan diksi konfrontatif dan destruktif yang menunjukkan betapa miskinnya kita dalam membangun imajinasi yang positif dan konstruktif. Mirisnya lagi, akibat fenomena *eco chamber*, sebagian kaum terdidik terperangkap dalam *hoax* dan *fake news*. Mereka yang diharapkan sebagai pelopor gerakan literasi untuk menyehatkan ruang publik digital kita justru terjebak pada tindakan yang *absurd*, ironi dan jauh dari esensi intelektualitas dan rasionalitas.

Pers sebagai kekuatan keempat demokrasi yang diharapkan memberi informasi alternatif di tengah maraknya *hoax* juga terbawa dalam euphoria kontestasi politik. Pers mengalami situasi dilematis antara sebagai sumber informasi alternatif yang mencerahkan publik dan orientasi bisnis-politik. Akibatnya terjadi krisis kepercayaan terhadap pers. Publik beranggapan pers milik swasta tidak netral. Bahkan publik lebih percaya akan netralitas media milik pemerintah. Survei Paska Pemilu 2019 yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengkonfirmasi hal tersebut. Sebanyak 90,8 persen responden menilai media milik swasta berpihak dan 72,3 persen responden menilai media milik pemerintah netral.

Di luar itu, media massa kini tak lagi dominan sebagai sumber informasi kepemiluan bagi publik. Media arus utama seperti koran, majalah, tabloid dan sejenisnya mulai bersaing dengan media sosial. Survei KPU Provinsi Sumatera Barat setelah Pemilu 2019 menunjukkan 9,18 persen responden menyatakan media massa (koran, majalah, tabloid dan sejenisnya) sebagai sumber informasi kepemiluan bagi mereka, berada di urutan kedua setelah keluarga (11 persen). Angka ini nyaris sama dengan media sosial yang berada di urutan ketiga dengan persentase 8,86 persen.

Membangun Kecerdasan Masyarakat Digital

Menguatnya posisi media sosial sebagai sumber informasi kepemiluan, maka tantangan KPU ke depan adalah membangun kecerdasan masyarakat digital atau literasi digital. Literasi digital merupakan gabungan dari beberapa bentuk literasi yaitu : komputer, informasi, teknologi, visual, media dan komunikasi. Karena itu, literasi digital membutuhkan kemampuan penguasaan teknologi, kompetensi menganalisa informasi, kemampuan berkomunikasi efektif dan menikmati karya visual. Literasi digital membuat masyarakat dapat mengakses, memilah dan memahami berbagai jenis informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Literasi digital dengan konten kepemiluan dapat mendekatkan pemilih dengan isu-isu pemilu. Mereka tidak akan kagetan lagi ketika KPU mendata warga negara dengan gangguan jiwa. Publik dapat menerima saat KPU memilih kotak suara berbahan karton kedap air. Begitu juga pemilih dengan tanggal lahir yang sama dalam jumlah signifikan sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam hal administrasi kependudukan bagi warga negara yang lupa tanggal lahir. Bahkan para level tertentu mereka dapat memahami detail administrasi pemilu seperti pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, pencalonan, kampanye, pemungutan dan pengitungan suara serta rekapitulasi dan penetapan calon terpilih. Hal ini penting karena warga negara yang berselancar di ruang maya tersebut ada kalanya akan menjadi bagian dari penyelenggara pemilu.

Pentingnya memperkuat literasi kepemiluan membutuhkan desain anggaran sosialisasi dan pendidikan pemilih yang tidak berbasis tahapan. Literasi sebagai bagian dari sosialisasi dan pendidikan pemilih sifatnya berkelanjutan. Program literasi melekat dan menjiwai semua siklus pemilu baik pada tahap *pre-election*, *election* dan *post election*. Ketika tahapan pemilu usai, alokasi anggaran untuk kegiatan literasi kepemiluan di semua satuan kerja penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota) tetap tersedia dalam jumlah yang cukup. Karenanya program sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan kompetensi kepemiluan bagi setiap warga negara harus masuk dalam komponen belanja rutin.

Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden			
		Suara Sah		Suara Tidak Sah	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
	Provinsi Sumatera Barat	2.896.494	98,63	40.225	1,37
1	Kabupaten Pesisir Selatan	266.942	98,73	3.442	1,27
2	Kabupaten Solok	206.063	98,16	3.872	1,84
3	Kabupaten Sijunjung	125.717	98,66	1.713	1,34
4	Kabupaten Tanahdatar	198.128	98,47	3.072	1,53
5	Kabupaten Padangpariaman	214.486	98,29	3.730	1,71

No	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden			
		Suara Sah		Suara Tidak Sah	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
6	Kabupaten Agam	257.081	98,52	3.853	1,48
7	Kabupaten Limapuluh Kota	210.927	98,19	3.893	1,81
8	Kabupaten Pasaman	160.359	98,43	2.558	1,57
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	50.327	99,08	465	0,92
10	Kabupaten Dharmasraya	126.341	98,63	1.760	1,37
11	Kabupaten Solok Selatan	93.131	98,20	1.710	1,80
12	Kabupaten Pasaman Barat	218.061	98,69	2.887	1,31
13	Kota Padang	470.189	99,22	3.693	0,78
14	Kota Solok	40.565	98,97	422	1,03
15	Kota Sawahlunto	38.418	98,46	600	1,54
16	Kota Padangpanjang	31.638	98,93	341	1,07
17	Kota Bukittinggi	62.907	99,04	609	0,96
18	Kota Payakumbuh	73.972	98,65	1.009	1,35
19	Kota Pariaman	51.242	98,85	596	1,15

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu Anggota DPR Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pemilihan Anggota DPR			
		Suara Sah		Suara Tidak Sah	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
	Provinsi Sumatera Barat	2.727.387	93,11	201.921	6,89
1	Kabupaten Pesisir Selatan	252.929	93,65	17.157	6,35
2	Kabupaten Solok	193.765	92,34	16.070	7,66
3	Kabupaten Sijunjung	119.054	93,40	8.408	6,60
4	Kabupaten Tanahdatar	188.391	93,92	12.191	6,08
5	Kabupaten Padangpariaman	201.086	92,34	16.673	7,66
6	Kabupaten Agam	244.968	94,21	15.048	5,79
7	Kabupaten Limapuluh Kota	201.087	93,71	13.501	6,29
8	Kabupaten Pasaman	149.199	91,69	13.520	8,31
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	49.140	96,89	1.577	3,11
10	Kabupaten Dharmasraya	118.048	92,30	9.852	7,70

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pemilihan Anggota DPR			
		Suara Sah		Suara Tidak Sah	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
11	Kabupaten Solok Selatan	86.560	91,31	8.237	8,69
12	Kabupaten Pasaman Barat	203.571	92,10	17.463	7,90
13	Kota Padang	441.245	93,72	29.563	6,28
14	Kota Solok	37.428	91,68	3.398	8,32
15	Kota Sawahlunto	35.133	90,14	3.841	9,86
16	Kota Padangpanjang	29.450	92,67	2.328	7,33
17	Kota Bukittinggi	60.071	95,23	3.011	4,77
18	Kota Payakumbuh	69.071	92,38	5.692	7,62
19	Kota Pariaman	47.245	91,50	4.391	8,50

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Daftar Pustaka

Belshaw, Cyril S. (1981). Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Moderen. Jakarta. PT Gramedia.

LIPI. (2019). Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Jakarta : Pusat Penelitian Politik LIPI.

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
KPU Provinsi Sumatera Barat,
pada Pemilu 2019

Sosialisasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada
pengunjung Plaza Andalas Kota Padang

Sosialisasi Kepemiluan yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Acara Senam Massal

MENYASAR PEMILIH USIA MUDA DI SUMUT DENGAN METODE DIGITALISASI PEMILU

Yulhasni
Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara

Pengantar

Pada pemilu pertama era reformasi pada 1999, partisipasi pemilih mencapai 92,6 persen dengan golput 7,3 persen. Namun angka fantastis ini mengalami koreksi dalam pemilu-pemilu berikutnya: 2004 (pemilihan legislatif 84,1 persen dengan golput 15,9 persen; pemilihan presiden putaran I 78,2 persen dengan golput 21,18 persen; dan pemilihan presiden putaran II 76,6 persen dengan golput 23,4 persen); 2009 (pemilihan legislatif 70,7 persen dengan golput 29,3 persen dan pemilihan presiden 71,7 persen dengan golput 28,3 persen); dan 2014 (pemilihan legislatif 75,2 persen dengan golput 24,8 persen dan pemilihan presiden 70,9 persen dengan golput 29,1 persen). Pada Pemilu 2019 angka partisipasi kembali naik tajam sebesar 81 persen.

Namun angka-angka partisipasi tersebut tidak serta merta kemudian masuk ke wilayah daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terkhusus terhadap daerah yang mengalami 'guncangan politik' akibat sejumlah kepala daerahnya tersangkut kasus hukum. Tingkat apatisme pemilih begitu menguat manakala dihadapkan pada perhelatan pesta demokrasi berskala lokal.

Begitulah nasib yang dialami Sumatera Utara pasca 2009 setelah sejumlah gubernur, bupati, dan walikota berurusan dengan aparat penegak hukum. Kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun yang kemudian berimplikasi terhadap penyelenggara Pemilu atau Pilkada karena dinilai bagian dari proses itu sendiri.

Berbagai upaya terus dilakukan dalam upaya memulihkan kepercayaan publik tersebut. Pada satu sisi, ada semangat untuk perbaikan terhadap proses pemilihan kepala daerah, terlebih lagi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah semakin ketat. Namun di sisi lain, proses pemulihan tersebut memerlukan cara dan teknik yang informatif agar publik memahami bahwa proses Pilkada memerlukan dukungan semuah pihak. Pada bagian inilah diperlukan kreasi sosialisasi oleh penyeleggara Pemilu.

KPU Sumatera Utara memiliki tantangan besar saat menyambut Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Rendahnya partisipasi pemilih tahun 2009 dan 2013

senantiasa disorot publik. Bahkan menjelang itu, Pilkada Kota Medan Tahun 2015 menjadi perbincangan banyak pihak di Indonesia karena menempati urutan paling rendah tingkat partisipasinya.

Hal tersebut memerlukan pemikiran yang mendalam agar tingkat partisipasi dapat ditingkatkan. Diyakini ada dua faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap proses peningkatan partisipasi yakni kualitas pendataan pemilih dan sosialisasi yang bersifat massif. Pada bagian sosialisasi bersifat massif tersebut diperlukan media yang mampu menjangkau semua kalangan. Di era teknologi digital sekarang, pilihan menggunakan jejaring sosial dan sosial media adalah pilihan yang dianggap bijak.

Mencari Solusi Partisipasi

Masalah yang paling menghantui pada setiap perhelatan pesta demokrasi baik Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara, salah satunya yakni minimnya partisipasi masyarakat. Tulisan ini sengaja mengambil studi kasus sejak Pemilu Tahun 2009. Data KPU Sumut menunjukkan tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu legislatif kian menurun pada Pemilu 2009. Dari 9.180.973 orang pemilih tetap di Sumatera Utara, yang menggunakan hak partisipatifnya berjumlah 5.732.551 orang (65%). Ini berarti, pada Pemilu Legislatif 2009 terdapat golput sebanyak 3.181.017 orang (35%) di Sumatera Utara. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. tingkat Partisipasi pemilih di Provinsi Sumatera Utara hanya mencapai 68,31% dari target Nasional KPU RI yang 75%.[1]

Hal yang sama terjadi pada dua daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Sumatera Utara, yakni Kota Medan dan Deli Serdang. Kota Medan dengan jumlah pemilih sebesar 1,767.247 pada Pemilu 2014 angka partisipasi hanya mencapai 51,83 % atau sebanyak 915.930 pemilih.[2] Di Deli Serdang dengan jumlah pemilih sebesar 1.338.124 orang, angka partisipasi hanya mencapa 57,21 %.[3]

Pada pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara, angka partisipasi menjadi momok yang menakutkan. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2008, hanya terdapat 5.011.377 pemilih yang menggunakan hak politiknya atau hanya 59,1 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak

[1]Berita Acara Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 Tingkat Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 13 Mei 2014

[2] Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Medan pada 26 April 2014

[3] Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Deli Serdang pada 26 April 2014

8.475.026 pemilih.[4] Lebih memprihatinkan Pilkada berikutnya tahun 2013. Pada Pemilihan Gubernur Sumut secara langsung tahun 2013 tercatat hanya 5.001.430 orang yang menggunakan hak suaranya. Angka ini hanya 48,5 persen dari total 10.310.872 pemilih pada DPT Sumut.[5]

Sama halnya dengan provinsi, dua daerah penyumbang jumlah pemilih terbesar Sumut yakni Medan dan Deli Serdang, angka partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah 'terjun bebas.'' Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Medan Tahun 2015 menempatkan Medan sebagai daerah paling rendah partisipasnya diantara 170 kabupaten dan 26 kota yang melaksanakan Pilkada Serentak pertama di Indonesia. Tercatat hanya sekira 507.351 warga kota yang menggunakan hak pilihnya. Jumlah itu hanya sekira 25,56 persen dari jumlah warga kota yang memiliki hak pilih dan terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai 1.985.096 pemilih. Pengguna hak pilih hanya sekira 25,5 persen, sisanya sekira 1.477.475 pemilih, atau sekira 74,44 persen, tidak menggunakan hak pilihnya atau golput (tak gunakan hak pilih).[6]

Berbagai analisis mengerucutkan persoalan ini pada aspek hilangnya kepercayaan publik kepada hasil pemilihan, terutama terkait kasus korupsi para pejabat. Hal ini dapat dibenarkan mengingat tingginya jumlah pejabat di Sumatera Utara. Laporan akhir Tahun Indonesia *Corruption Watch* (ICW) merilis daftar provinsi yang kepala daerahnya paling banyak terjerat kasus korupsi di KPK. Hasilnya, Sumatera Utara menempati posisi kedua setelah Jawa Timur untuk provinsi dengan kepala daerah terbanyak jadi tersangka korupsi sebanyak 12 kepala daerah.[7]

Faktor Eksternal dan Internal

Dalam mencari akar masalah tingkat partisipasi pemilih memerlukan kajian yang mendalam. Studi kasus kemudian dilakukan oleh KPU Sumut, KPU Medan dan KPU Deli Serdang. Hasil riset KPU Sumut berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kehadiran Pemilih di TPS* pada Pemilu 2014 menyebutkan

---

[4] Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut pada pada 24 April 2008

[5]Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut pada 15 Maret 2013

[6] Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 pada 16 Desember 2015

[7]Provinsi Juara Kasus Korupsi Versi ICW: Jatim Pertama, Sumut Kedua dalam https://news.detik.com/berita/4346603/provinsi-juara-kasus-korupsi-versi-icw-jatim-pertama-sumut-kedua

sekurangnya ada sepuluh faktor yang membuat pemilih enggan datang ke TPS. Jika merujuk hasil riset, faktor eksternal disebutkan bahwa pemilih kecewa dengan hasil pemilihan sebelumnya, kinerja tim kampanye partai politik, dan kecewa pada pemerintahan. Hal yang menarik yakni tentang kinerja penyelenggara Pemilu menggalang kehadiran pemilih menjadi salah satu faktor yang dominan selain kecewa dengan hasil pemilihan sebelumnya.[8] Sementara hasil Riset KPU Deli Serdang dengan judul *Partisipasi Pemilih : Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter Turn-Out) Pemilu Tahun 2014 di Deli Serdang* disimpulkan sosialisasi yang intens dengan menggunakan media-media kreatif yang mudah dijangkau/ diakses oleh Pemilih dapat meningkatkan partisipasi pemilih.[9] Berbeda dengan riset KPU Kota Medan, faktor internal dijadikan alasan yakni persoalan administrasi kepemiluan terutama daftar pemilih.[10]

Digitalisasi Sosialisasi Pemilu

Diperkirakan dalam setiap pemilu, 30 persen dari total jumlah pemilih adalah pemilih muda dengan usia 17 hingga 30 tahun. Di Sumatera Utara jumlah pemilih berusia 30 tahun dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 9.787.820 sebesar 4.621.212. persentasenya lebih dari 50 persen.[11]

Demografi ini tentunya sangat signifikan dan partisipasi mereka akan sangat berpengaruh dalam menentukan hasil pemilu. Berdasarkan teori itu, para sosiolog yang bias Amerika Serikat membagi manusia menjadi sejumlah generasi: Generasi Era Depresi, Generasi Perang Dunia II, Generasi Pasca-PD II, Generasi *Baby Boomer* I, Generasi *Baby Boomer* II, Generasi X, Generasi Y alias Milenial, lalu, **Generasi Z.**

Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 masehi. Generasi Z adalah generasi setelah Generasi Y, generasi ini merupakan generasi peralihan Generasi Y dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa diantaranya merupakan keturunan dari Generasi X dan Y. Disebut juga *iGeneration*, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan Generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, *browsing* dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan *headset*. Apapun

[8]Riset KPU Sumut : Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketidakhadiran Pemilih di TPS pada Pemilu 2014 di Sumatera Utara

[9]Riset KPU Deli Serdang : Partisipasi Pemilih, Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter Turn-Out) Pemilu 2014 di Deli Serdang

[10]Riset KPU Kota Medan berjudul Perilaku Pemilih di Kota Medan pada Pemilu 2014

[11]Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu 2019

yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan *gadget* canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka.[12]

Dalam mendekati generasi ini perlu strategi khusus. Berbagai pertanyaan akan muncul seperti formulasi apa yang tepat untuk pendidikan politik generasi ini, bagaimana caranya agar anak-anak tidak gampang menyerukan untuk "bunuh-bunuh" karena perbedaan pilihan, bagaimana ranah politik praktis mampu memberikan ruang partisipasi bagi generasi Z yang menuju gerbang kedewasaan, dan tentu saja isu yang lebih populer adalah yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Pada konteks Pemilu dan Pilkada, terutama dalam usaha mendongkrak partisipasi pemilih metode sosialisasi terhadap mereka tentu menggunakan konsep digitalisasi Pemilu. Manusia digital, yakni mereka telah mengalihkan fungsi cetak dan sebagainya ke bentuk digital dengan *smartphone* untuk akses Twitter, Facebook, Instagram, dan Path.

Digitalisasi Pemilu dimaknai sebagai bentuk kegiatan yang menggunakan jejaring sosial pada konteks pemilih. Sarah Hartshorn dalam Loina Lalolo (2018) menjelaskan jejaring sosial merupakan sebuah cara untuk terlibat *(an act of engagement)* dengan kelompok individu dengan minat yang sama, saling terhubung dalam situs jejaring sosial dan membangun hubungan melalui komunitas yang terbentuk. Jejaring sosial merupakan sebuah lokasi untuk dikunjungi berdasarkan topik, masalah, atau atmosfer yang sedang berkembang. Dari aspek komunikasi, jejaring sosial percakapan menjadi lebih kaya, lebih bertujuan, dan lebih personal.[13]

Generasi Z karena mereka suka dengan berbau cepat, maka informasi Pemilu harus segera mereka dapatkan. KPU membentuk tim cyber di seluruh satuan kerja (Satker) yang membantu percepatan informasi Pemilu dan melawan Hoax Pemilu. KPU Sumut juga memberi dukungan penuh terhadap komunitas yang mendukung Pemilu. Di Sumatera Utara telah terbentuk Komunitas Peduli Pemilu. Komunitas Peduli Pemilu adalah anak-anak muda yang peduli terhadap Pemilu di Sumatera Utara. Mereka awalnya adalah Duta Netizen Pilgubsu 2018 yang dibentuk oleh KPU Provinsi Sumatera Utara.

Dicermati bahwa generasi ini menghabiskan banyak waktu untuk berselancar di dunia maya dengan perangkat pintarnya. Dari situlah mereka dihujani banyak informasi di seluruh dunia. Mereka sekarang lebih aktif untuk beropini di media sosial mengenai berita yang sedang hangat dibicarakan. KPU

[12]https://id.wikipedia.org/wiki/Generasi_Z diakses tanggal 17 November 2019

[13]Perangin-angin, Loina Lalolo Krina,.& Zainal, Munawaroh. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial. Jurnal ASPIKOM. Volume 3

Sumut menangkap peluang ini dengan merangkul mereka sebagai bagian dari Relawan Demokrasi. Sebanyak 99% Relawan Demokrasi KPU adalah generasi Z, generasi yang *update* informasi harus disuguhkan informasi cepat, akurat, dan terpercaya.

KPU Sumatera Utara mencoba mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dengan mencari metode baru sosialisasi. Disadari bahwa metode sosialisasi yang konvensional seperti tatap muka, ceramah, dan pertemuan terbatas tidak memberikan dampak yang signifikan. Meski metode sosialisasi menggunakan media massa (cetak, elektronika, dan media jejaring) tetap dilakukan, akan tetapi kuantitasnya sangat terbatas karena berbasis anggaran. Apalagi di tengah munculnya 'senja kala media massa cetak'—masyarakat tidak lagi mengonsumsi informasi melalui koran, maka pilihan menggunakan sosial media merupakan langkah yang dianggap efektif.

KPU Sumatera Utara kemudian memulai gagasan kreasi sosialisasi yang sudah dimulai sejak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dengan membentuk **Duta Netizen Pilgubsu 2018**, yakni konsep yang menggandeng anak-anak muda yang melek internet (netizen) untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, khususnya pemilih berusia muda. Konsep ini yakni menyasar pemilih dengan menggunakan *smartphone*. Hasilnya berdampak signifikan terhadap partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur Sumut yang naik 16% dari Pilkada tahun 2013 sebesar 63,3%.

Langkah positif tersebut diteruskan dengan meneruskan konsep tersebut pada Pemilu 2019 dengan melebarkan konsep sosialisasi dalam tajuk **Sobat Pemilu 2019**. Salah satu konsep sosialisasi yang tertuang dalam Peraturan KPU No 10 Tahun 2018 menyasar warga internet atau mereka yang melek internet. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hampir separuh dari total pengguna internet di Indonesia merupakan masyarakat dalam kelompok usia 19-34 tahun (49,52%).

Secara spesifik tidak disebutkan bentuk dan kegiatan seperti apa yang harus dilakukan KPU untuk menyasar pemilih kategori tersebut. KPU Sumatera Utara menggagas kreasi Pemilu 2019 dalam konsep **Pemilihan Sobat Pemilu 2019** yang bertujuan melakukan sosialisasi melalui media internet dengan menyasar pemilih pemula dan pemilih berusia muda.

KPU Sumut lantas membentuk ***Duta Peduli Pemilu 2019***. Para duta ini kemudian mendirikan ***Komunitas Peduli Pemilu***, sebuah lembaga yang didirikan KPU Sumut. Komunitas ini adalah suatu perkumpulan anak-anak muda di Sumatera Utara yang peduli terhadap penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi

terhadap pemilih pemula dan pemilih muda guna mengurangi angka golput dan meningkatkan partisipasi anak muda dalam penyelenggaraan pemilu.

Komunitas yang dibentuk KPU Sumut kemudian ditugaskan menyelenggarakan Pemilihan Sobat Pemilu 2019 dan mencari 20 orang pemilih berusia muda (pria dan wanita) untuk dinobatkan sebagai ***Sobat Peduli Pemilu*** yang bertugas melakukan Sosialisasi Pemilu melalui sosial media.

Selain bertugas melakukan sosialisasi tahapan Pemilu 2019 melalui sosial media, Sobat Pemilu 2019 juga ditugaskan melakukan sosialisasi ke berbagai basis pemilih dan juga ke tempat-tempat umum. Setiap kegiatan mereka kemudian diunggah ke sosial media masing-masing. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, KPU Sumut kemudian menobatkan 20 orang menjadi Sobat Pemilu 2019.

Idenya untuk menyebarluaskan Pemilu 2019 pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemilih pemula. Hasil dari kegiatan tersebut berdampak secara signifikan terhadap partisipasi pemilih di Sumatera Utara. Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 di Sumatera Utara melampaui target nasional yakni sebesar 78,03% sedangkan target di tingkat nasional sebesar adalah 77,5%.

Tidak hanya tingkat partisipasi yang meningkat, persentase suara tidak sah di TPS juga cenderung menurun dibanding Pemilu sebelumnya. Dari data yang diperoleh setelah rekapitulasi hasil Pemilu 2019, angka persentase suara tidak sah di Sumatera Utara rata-rata mencapai **6%.** Ini dipahami bahwa sosialisasi dengan menggunakan metode sosial media memberikan pemahaman masyarakat terhadap Pemilu 2019 lebih baik.

Tabel Persentase Suara tidak Sah pada Pemilu 2019

Jenis Pemilihan	Jumlah DPT	Jumlah Suara Tidak Sah	Persentase Suara Tidak Sah
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	9.786.005	111.925	1,14%
Pemilihan DPR RI	9.786.005	914.328	9,34%

Sosialisasi yang dilakukan Sobat Pemilu 2019 berlangsung sejak mereka memulai ikut kompetisi. Ketika pendaftaran rekruitmen **Sobat Pemilu 2019** dibuka KPU Sumatera Utara pada 18 Januari-14 Februari 2019, sebanyak **306** ikut mendaftar. Kegiatan yang mereka lakukan adalah melakukan sosialisasi di sosial

media dengan kelompok sasaran Pemilih Pemula dan Pemilih berusia muda.

1. Sosialisasi Rekruitmen **Sobat Pemilu** 2019 melalui brosur dengan melibat berbagai media partner. Pada kegiatan ini telah dilakukan sosialisasi.

2. Pada tanggal 18 Januari 2019, panitia memilih sebanyak 100 orang yang akan dinilai dari kreasi sosialisasi, metode sosialisasi, dan konten sosialisasi.

3. Selama 1 (satu) bulan, 100 orang peserta tersebut melakukan sosialisasi melalui sosial media. Kegiatan tidak hanya di sosial media, tetapi juga sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat kemudian diunggah di sosial media. Panitia membuat tema sosialisasi yakni **Ajakan Memilih, Mengenal Jenis Surat Suara dan Cara Mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT).**

4. Pada tanggal 23 Maret 2019, KPU Sumatera Utara mengumumkan 20 orang finalis **Sobat Pemilu 2019**. Mereka terbagi atas 10 orang pria dan 10 orang wanita yang kemudian dinobatkan sebagai Sobat Pemilu 2019. Mulai tanggal 7 April-16 April 2019, Sobat Pemilu 2019 melakukan sosialisasi di sosial media dan tempat-tempat umum.

5. Sebelum dipilih 20 orang Sobat Pemilu 2019, para peserta diwajibkan memposting/mengupload informasi seputar Pemilu/DesainGrafis/ Meme/Animasi Video Pendek (18 Februari-16 Maret 2019). Kegiatan ini dilaksanakan oleh 100 finalis terpilih di media sosial Instagram. Berikut dokumentasi beberapa hasil karya sosialisasi peserta

6. Sobat Pemilu 2019 melakukan sosialisasi melalui akun sosial media mereka masing-masing. Sosialisasi tersebut disesuaikan dengan Tahapan Pemilu 2019. Jika ada pertanyaan dan komentar dari pengunjung akun mereka kemudian dikonsultasikan dengan KPU Sumatera Utara.

7. Sobat Pemilu 2019 tidak hanya melakukan sosialisasi dalam bentuk penyebaran informasi melalui sosial media, tetapi mereka juga ikut dalam berbagai kegiatan sosialisasi di tempat-tempat umum. Mereka juga terlibat dalam kegiatan sosialisasi dalam kegiatan Relawan Demokrasi yang dibentuk secara nasional oleh KPU.

KOMUNITAS PEDULI PEMILU
PEMILIHAN SOBAT PEMILU 2019
Syarat Peserta
1. Hanya untuk penduduk Sumatera Utara
2. Berusia 17-25 Tahun
3. Memiliki E-KTP
4. Tidak Bergabung dalam Parpol
5. Bersedia ikut serta menyosialisasikan Pemilu 2019
6. Jumlah Pengikut di Social Media Instagram dan Facebook minimal 300 orang
Teknis Perlombaan
1. Peserta wajib follow akun Instagram @Pedulipemilu_
2. Peserta wajib registrasi keikutsertaan yang dapat di akses di bit.ly/sobatpemilu2019
3. Peserta wajib mempublikasikan foto dengan twibbon Sobat Pemilu 2019 yang dapat diakses melalui bit.ly/sobatpemilu2019 dan wajib tag @pedulipemilu_ serta mengajak teman untuk ikut serta dengan tag minimal 10 teman. Buat caption semenarik mungkin dengan hashtag #pemilu2019 #pedulipemilu2019 #sobatpemilu2019 #milenialmemilih #pemilihpemula #pemilihmuda
4. 50 peserta yang lolos tahap administrasi akan mengikuti babak selanjutnya berupa sosialisasi materi Pemilu 2019 di media sosial setiap pekan. Materi akan diberitahukan setelah pengumuman.
5. Berdasarkan penilaian juri, akan dipilih 10 Putera dan 10 Puteri untuk diundang menghadiri pelatihan sekaligus penganugerahan sebagai Sobat Pemilu 2019 di KPU Provinsi Sumatera Utara.
6. Sobat Pemilu 2019 terpilih tersebut akan menjabat hingga periode berikutnya.
Hadiah
1. Setiap pemenang akan mendapatkan uang tunai dengan total puluhan juta rupiah
2. Setiap pemenang akan mendapatkan Pelatihan Gratis dan Souvenir menarik
3. Setiap peserta akan mendapat kan Sertifikat Elektronik sebagai partisipan dan pemenang.
4. Setiap Peserta akan sah sebagai bagian dari Komunitas Peduli Pemilu Sumut.
SOBAT PEMILU 2019
Media Partner
PERS MAHASISWA SUARA USU
Xpresi.co
mz!

Penutup

Era digital telah menciptakan manusia yang senantiasa membutuhkan informasi kekinian (update). Informasi terkini tentang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berkompetisi dengan berbagai informasi lain yang berseliweran di jagat sosial media. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Sumut memandang hal ini sebagai tantangan untuk mencari konsep baru metode sosialisasi yang informatif ke publik. Masyarakat yang apolitis cenderung enggan untuk singgah ke laman pemerintah, termasuk KPU, yang hanya berisi berbagai macam pengumuman kegiatan kelembagaan. Pemilih berusia muda bahkan lebih ekstrim jika mereka tidak menjadi bagian dari prosesi pemilihan, cenderung menjauhinya.

Oleh karena itu, menyasar pemilih berusia muda diperlukan strategi khusus. Metode sosialisasi konvensional seperti intensitas tatap muka harus dikreasikan dengan cara-cara yang tidak membosankan. Langkah tersebut juga harus dimodifikasikan melalui proses interaksi di jejaring sosial. Pilihan menggunakan konsep sosialisasi di jejaring sosial lewat Duta Netizen dan Sobat Pemilu serta membentuk Komunitas Peduli Pemilu adalah salah satu metode kreasi untuk menaikkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

jdih.kpu.go.id

Daftar Pustaka

Generasi Z dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Generasi_Z diakses tanggal 17 November 2019

KPU Sumatera Utara. 2019. Berita Acara (BA) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu 2019

Perangin-angin, Loina Lalolo Krina,.& Zainal, Munawaroh. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial. Jurnal ASPIKOM. Volume 3

Provinsi Juara Kasus Korupsi Versi ICW: Jatim Pertama, Sumut Kedua dalam https://news.detik.com/berita/4346603/provinsi-juara-kasus-korupsi-versi-icw-jatim-pertama-sumut-kedua

KPU Sumatera Utara. 2014. Berita Acara (BA) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 Tingkat Provinsi Sumatera Utara .

KPU Kota Medan. 2014. Berita Acara (BA) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 Tingkat Kota Medan

KPU Deli Serdang. 2014. Berita Acara (BA) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Deli Serdang

KPU Sumatera Utara. 2008. Berita Acara (BA) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2008

KPU Sumatera Utara. 2013. Berita Acara (BA) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2013

KPU Kota Medan. 2015. Berita Acara (BA) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015

KPU Sumatera Utara. 2015. Riset Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketidakhadiran Pemilih di TPS pada Pemilu 2014 di Sumatera Utara

KPU Deli Serdang. 2015. Riset Partisipasi Pemilih, Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter Turn-Out) Pemilu 2014 di Deli Serdang

KPU Kota Medan. 2015. Riset Perilaku Pemilih di Kota Medan pada Pemilu 2014

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sumatera Utara, pada Pemilu 2019

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Daerah Rawan Bencana Alam

Sosialisasi Surat Suara: KPU Kota Binjai, Sumatera Utara melibatkan relawan demokrasi untuk melaksanakan sosialisasi jenis surat suara Pemilu 2019. (foto : dokumentasi KPU Kota Binjai)

Memanfaatkan Alam: KPU Kabupaten Pakpak Bharat melakukan rapat dengan relawan demokrasi Pemilu 2019 dengan memanfaatkan keindahan alam daerah tersebut. (foto: dokumentasi KPU Pakpak Bharat)

Lomba Jingle Pemilu 2019 : KPU Sumatera Utara menggelar Festival Band Jinggle Pemilu 2019 dalam rangka menyambut Pemilu 2019 (foto : dokumentasi KPU Sumut)

Lomba Mural: Dua orang peserta terlihat melukis dinding di salah satu sudut kota Medan dalam rangka Lomba Mural Pemilu 2019 yang diadakan KPU Sumatera Utara (foto : dokumentasi KPU Sumut)

Potret Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat di Sulawesi Selatan pada Pemilu 2019

Oleh Faisal Amir
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Pengantar

Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak pertama yang menggabungkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Keserentakan tersebut melahirkan dinamika baru, tak terkecuali pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat. KPU mesti memformat ulang strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih agar target partisipasi secara nasional 77,5 persen dapat terwujud.

KPU Provinsi Sulawesi Selatan berdiskusi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun strategi sosialisasi untuk mencapai target partisipasi 77,5%. Diskusi kelompok terfokus digelar untuk mengevaluasi proses sosialisasi pada Pemilu sebelumnya. KPU menarik benang merah dari fakta-fakta partisipasi masyarakat dalam Pemilu mulai dari pemetaan kultur masyarakat, jenis budaya, kecenderungan dalam bersikap, data partisipasi masyarakat, potensi/peluang dan tantangan/ancaman partisipasi pemilih di tengah masyarakat yang dapat dielaborasi untuk bersinergi meningkatkan partisipasi masyarakat.

KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 mempunyai 24 Satuan Kerja (Satker). Semua bersinergi meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, Relawan Demokrasi, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, dan stakeholders di Kabupaten/Kota masing-masing. Semua potensi dioptimalkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang mempunyai perhatian, kesadaran minat yang tinggi terhadap politik pemerintah. Di mana individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses *input* (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses *output* (melaksanakan, menilai, dan mengkritik terhadap kebijakan

dan keputusan politik pemerintah). Partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik ke pemerintah. Jika kepercayaan publik kepada pemerintah menurun, keinginan masyarakat untuk menggunakan hak pilih akan terpengaruh. Demikian pula sebaliknya karena pemerintahan terbentuk dari hasil Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Tanpa partisipasi atau keikutsertaan pemilih, maka sesungguhnya Pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara, melainkan keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan Pemilu.

Pemilu 2019 merupakan peristiwa politik yang kompleks karena pertama kali digelar secara serentak (Pemilu Presiden dan Legislatif). Tiga Pemilu sebelumnya, pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden digelar di waktu yang berbeda. Keserentakan pemilu dan semua perubahan aspek teknisnya tentu saja perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Pemilih akan disuguhkan dengan lima jenis surat suara sekaligus. Waktu untuk memberikan pilihan di dalam bilik suara berpotensi menjadi lebih lama. Bahkan surat suara tidak sah berpotensi meningkat jika tidak cermat dan teliti sebelum mencoblos. Informasi lainnya adalah partai politik yang akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden bukan dari partai politik hasil pemilu 2019, melainkan partai politik hasil Pemilu 2014.

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilu. ***Pertama*** dari masyarakat pemilih itu sendiri. Dalam konteks masyarakat pemilih, partisipasi dalam memilih dipengaruhi oleh dua faktor yakni mal-administrasi dan teknis. Faktor mal-administrasi disebabkan karena pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan/atau tidak memiliki KTP Elektronik. Sedangkan faktor teknis disebabkan karena saat hari pemungutan suara sedang tidak ada di tempat (luar daerah, sekolah/kuliah di luar dan sebagainya), mencari nafkah, sakit, dan apatis (tidak mau memilih karena belum memahami pentingnya Pemilu). ***Kedua***, faktor dari kandidat, bisa berupa ketidak percayaan masyarakat terhadap kandidat karena programnya tidak menjawab masalah dan kebutuhan masyarakat, ketidakmampuan kandidat memanfaatkan waktu kampanye dan tidak efektifnya menggunakan sarana komunikasi politik untuk berdialog dengan publik. Di samping itu, masyarakat pun hanya menunggu kandidat mengenalkan dirinya. Mereka tidak proaktif untuk mengenali kandidatnya lebih dalam.

Untuk memperbaiki kualitas Pemilu maka pemilihnya harus cerdas. Salah satu indikator kecerdasan itu lahirnya sikap proaktif pada setiap tahapan Pemilu, misalnya pada masa pemutakhiran data pemilih, aktif memastikan dirinya terdaftar di daftar pemilih, pada masa kampanye aktif mengikuti kegiatan kampanye semua peserta Pemilu, mencari tahu tentang sosok calon wakilnya, baik kapasitas maupun rekam jejaknya. Di luar itu, ciri pemilih yang proaktif ditandai dengan upaya memperkaya wawasan tentang Pemilu dari waktu ke waktu seperti menonton debat, berdiskusi dengan orang lain tentang kandidat dan kegiatan dialogis lainnya.

Potret Partisipasi Pemilih di Sulawesi Selatan

Pesta demokrasi 17 April 2019, telah terlaksana dengan baik di Indonesia. Salah satu tantangan Pemilu bagi penyelenggara adalah partisipasi, baik proses maupun angka. Partisipasi proses adalah masyarakat terlibat dalam proses sebagai badan penyelenggara Pemilu adhoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), relawan demokrasi bahkan menjadi Pengawas Pemilu. Sedangkan partisipasi dari aspek kuantitatif dalam demokrasi prosedural adalah jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya ke TPS.

Berdasarkan data KPU Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah pemilih yang terdaftar, 6.159.375 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan memilih seorang Presiden dan Wakil Presiden, 24 anggota DPR RI, 4 (empat) Anggota DPD, 85 anggota DPRD Provinsi dan 895 anggota DPRD Kota/Kabupaten. Dalam pemilu 17 April lalu, pemilih sudah menyalurkan hak pilihnya untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 5.025.189 atau 78,2 % dan DPR sebanyak 5.018.582 atau 78,1 %.

Pencapaian angka partisipasi tersebut merupakan bentuk keberhasilan penyelenggara Pemilu meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pencapaian tersebut tak lepas dari peran Relawan Demokrasi (Relasi) yang berjumlah 55 orang per kabupaten/kota. Mereka bagian dari tim kerja KPU untuk menjangkau 11 basis pemilih strategis, yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi.

Relasi, sebelum turun melakukan sosialisasi terlebih dulu diberikan pemahaman tentang kepemiluan, keterampilan dan sikap diri melalui pelatihan selama tiga hari. Secara berkala, KPU menggelar pertemuan dengan relasi untuk evaluasi dan proyeksi kegiatan. KPU menyadari tidak mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Keberadaan Relasi sebagai perpanjangan tangan KPU mempercepat aliran informasi dan membuat kegiatan pendidikan pemilih menjadi

lebih masif. Total relasi di Sulawesi Selatan berjumlah 1.320 orang.

Selain membentuk relawan demokrasi, KPU Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kursus singkat kepemiluan bekerja sama dengan pemerhati Pemilu seperti Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI Sulsel). Kursus yang digelar selama tiga hari ini dimentori oleh KPU dan mantan penyelenggara Pemilu dari JaDI Sulsel. Kursus bertujuan membangun simpul, jejaring, agen dan kelompok yang peduli terhadap Pemilu. Kursus kepemiluan sekaligus ajang untuk melakukan rekrutmen badan penyelenggara adhoc.

KPU Provinsi Sulawesi Selatan menggagas kegiatan sosialisasi untuk daerah strategis pulau, kampung adat dan komunitas. Kegiatan ini bekerja sama dengan Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), organisasi ekstra kampus mahasiswa (HMI, PMII, GMNI, IMM) dan organisasi masyarakat. KPU menyasar keluarga melalui forum warga di kampung-kampung di 24 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sementara dengan media massa televisi, radio dan cetak juga dilakukan kerja sama dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM) agar penyebaran informasinya lebih massif.

Kegiatan yang bersifat massif dan melibatkan orang banyak dalam bentuk *fun* seperti sosialisasi melalui lomba-lomba seperti lomba musik, lomba melukis mural, lomba jingle dan vlog, Pemilu RUN, konser musik dan pentas seni budaya sukses dilaksanakan di 24 kabupaten/kota. Gerakan serentak 7 April menjadi puncak dari gerakan KPU Sulawesi Selatan untuk mengingatkan kembali pemilih agar datang ke TPS pada 17 April 2019. Gerakan “Ayo ke TPS 17 April “ terbukti sukses dibuktikan dengan tingginya kehadiran masyarakat di TPS.

KPU Sulawesi Selatan bersama KPU Kabupaten/kota mendesain beberapa kegiatan strategis dan inovatif. Sosialisasi tata muka dalam bentuk seminar di kampus, warkop demokrasi di cafe-cafe. Selain kursus singkat Pemilu, forum warga dan relasi merupakan program nasional, KPU daerah di Sulawesi Selatan juga membuat kegiatan strategis dalam bentuk workshop kepemiluan di kecamatan. Materi yang diberikan tentang demokrasi, regulasi Pemilu, data Pemilu dan aspek-aspek teknis kepemiluan. Outputnya mempersiapkan calon badan penyelenggara Pemilu adhoc dan agen sosialisasi di lingkungan masing-masing.

KPU Kabupaten/Kota juga terus berinovasi untuk menghadirkan Pemilu yang nyaman dan menyenangkan bagi semua pihak. KPU Gowa misalnya membuat *branding* Gapura Pasar dan pemasangan *standing banner*, sosialisasi pasar demokrasi dengan menggunakan Oto Carade. Oto Caradde adalah transformasi Rumah Pintar Pemilu (RPP). Jika KPU Kabupaten/kota membuat RPP di kantor, KPU Gowa mendesain RPP di mobil pintar sebagai perpustakaan Pemilu dan informasi berbasis IT.

KPU Gowa mengemas sosialisasi tak sebatas materi kepemiluan tetapi mengombinasikannya dengan game untuk menghadirkan sosialisasi yang edukatif sekaligus menghibur. KPU Kabupaten Enrekang dan KPU Kabupaten Bantaeng menginisiasi kegiatan kemah Pemilu, khususnya pelajar SMA. Materi kepemiluan diberikan dengan metode simulasi seperti lomba pembuatan TPS.

KPU Sulawesi Selatan bekerja sama dengan KPU Pangkep dan JaDI Sulsel menjangkau komunitas Bissu. Kaum bissu ini adalah pendeta yang tidak mempunyai golongan gender dan kepercayaan tradisional Tolatang. Golongan bissu ini mengambil peran gender laki-laki dan perempuan bertindak sebagai separuh manusia dan separuh dewa dalam tradisi Bugis. Mereka tinggal di kecamatan Sigeri. KPU Sulsel dan KPU Pangkep mampu mengajak mereka turut serta dalam kegiatan sosialisasi.

Di Kabupaten Soppeng, KPU 'menggarap' kelompok Waria. Sementara di KPU Bulukumba melakukan sosialisasi kepada pemilih berkebutuhan khusus. Sosialisasi kepada pemilih difabel, lanjut usia dan pemilih buta huruf dilakukan menggunakan angka dan gambar. Di Kabupaten Bulukumba, KPU menyasar kalangan masyarakat adat Kajang. Amma Toa, sebagai tetua adat memiliki peran yang vital dalam mengedukasi masyarakat untuk memilih. Tidak ada intervensi menggunakan kekuasaan adat. Amma Toa senantiasa menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan menolak sogokan (*manre pasoso*).

Menariknya Amma Toa tidak menggunakan hak pilihnya karena menganggap semua calon adalah anak atau cucunya yang harus diperlakukan secara sama. Meski tak menggunakan hak pilih, tapi keterlibatan Amma Toa dalam mengedukasi masyarakatnya mampu mengerek partisipasi pemilih secara signifikan. Angka partisipasi di kalangan adat sebesar 75,21%.

Dalam merancang strategi partisipasi, KPU Sulsel memadukan pola kerja KPU dengan pendekatan partisipatif ke pemilih. Ada enam pola gerakan yang dibangun oleh KPU Sulawesi Selatan agar mampu mendekati pemilih dan peserta politik secara maksimal.

Membangun Kemitraan Strategis

Tanpa kawan strategis, KPU Sulsel akan bermain ladang sendiri. Sejatinya, KPU mampu bermitra dengan semua pemangku kepentingan, terutama lembaga pemerhati Pemilu. Pengalaman mereka dalam berorganisasi, cara mereka berinteraksi dengan komunitas dampingan menjadikan mereka sebagai relasi strategis untuk penguatan kapasitas masyarakat. KPU Sulsel sadar untuk mendekati 6 (enam) juta pemilih di Sulawei Selatan, butuh pelibatan semua pihak

sebagai mitra strategis.

Sebanyak lima lembaga pemantau pemilu menjadi mitra stategis dalam melakukan pendidikan Pemilu. Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulsel, Lembaga Advokasi dan Penddikan Anak Rakyat (LAPAR), Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan dan Forum Informasi Komunikasi (KIP Ornop) Sulawesi Selatan.

JaDI Sulsel, fokus pada pendidikan pemilih di daerah yang potensi pelanggaran Pemilu dan rawan konflik. Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Jeneponto berbasis rawan konflik, sementara Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara masuk kategori daerah dengan potensi pelanggaran Pemilu. Pemetaan ini berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu RI dan data Kepolisian Daerah Sulsel. IPK diukur berdasarkan empat dimensi yakni konteks sosial politik, penyelenggara yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi.

Dua daerah menjadi fokus perhatian bagi sosialisasi rawan konflik adalah Jeneponto dan Tana Toraja. Berdasarkan data IPK Bawaslu RI menyebutkan Tana Toraja daerah tertinggi rawan konflik. Secara historis, terjadi konflik kekerasan antar pendukung dikarenakan hasil Rekapitulasi KPU Tana Toraja dan hasil survei berbeda. Satu orang tewas menjadi korban kekerasan pada Pilkada 2013. Meski pada Pemilu 2014, Pilkada 2015 dan Pemilu 2019, KPU Tana Toraja berhasil menjalankan mandat penyelenggaraan tanpa konflik dan tanpa ada pelanggaran administratif.

Catatan, secara karateristik, Tana Toraja terkenal dengan kekuatan kelompok atau klan keluarga. Masih tingginya dengan transaksi politik. Umumnya orang Toraja punya tabiat merantau dan berhasil, ketika pulang ke kampung ke Toraja ikut dalam kontestasi baik sebagai calon legislatif dan calon kepala daerah. Politik uang dinilai relatif tinggi. Misalnya uang perantau Kalimantan 200 ribu, uang perantau Malaysia 35 ribu dan uang perantau Papua sebanyak 500 ribu.

Kawasan terpencil merupakan salah satu penyumbang angkat golput di Kabupaten Tana Toraja seperti Masanda, Rantetayo dan Makale. Untuk mengerek partisipasi di tiga kecamatan tersebut, KPU menggandeng JaDI untuk mengedukasi pemilih di sana. Pendekatan sosialisasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka dengan memperbanyak simulasi, game dan penyebaran bahan sosialisasi.

Kota Palopo, menjadi lokasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk kawasan potensi pelanggaran Pemilu. Hal ini berkaca dari kasus pelanggaran Pilkada 2018 yang berujung pada pemecatan 5 (lima) komisioner. Selain itu pelibatan ASN juga cukup tinggi dikarenakan pertarungan antara Incumbent walikota dengan incumbent wakil walikota.

Upaya meningkatkan pemahaman tentang kepemiluan, KPU Sulsel bersama Lembaga LAPAR melakukan sosialisasi di pulau-pulau terluar. Salah satunya adalah Pulau Lae-lae. Daerah ini dipilih dikarenakan masyarakat umumnya bekerja sebagai pelaut. Mereka lebih memilih melaut daripada menggunakan hak pilih pada hari pelaksanaan pemungutan suara.

Pemangku Adat dan Partisipasi

Amma Toa, pemangku tertinggi masyarakat adat Kajang memberikan kontribusi besar dalam mendorong partisipasi setiap pemilihan baik Pemilu maupun Pilkada di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Pesan Amma Toa untuk mendorong partisipasi masyarakatnya untuk menggunakan hak pilih begitu kuat. *"Harus ki appile, apa 'kite tp' ji la'bajui pamarentayya"* (kita harus memilih karena kita sendiri yang perbaiki pemerintahan).

Pesan Amma Toa tersebut mampu meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan. Pada Pemilihan Gubernur 2018, jumlah Pemilih DPT 2.760 pemilih dan partisipasi di desa Tanah Towa sebesar 99,54 %. Untuk Pemilu 2019, Jumlah DPT di desa Tana Towa 2.904 dengan jumlah 11 TPS. Secara keselurahan untuk kecamatan Kajang total pemilih di DPT 38.755 orang. Partisipasi pemilih sebanyak 75,21 %, meningkat dibandingkan Pemilu 2014, hanya 62,57 %.

Pelibatan pemangku adat dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih juga dilakukan KPU Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten Pangkajenne Kepulauan (Pangkep). KPU menggandeng Ketua Bissu Nani Puang Matoa untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Dalam tradisi dan sejarah lontara Bugis-Makassar, Bissu dianggap sebagai pendeta agama dan orang suci kepercayaan Raja. Bissu memberikan peran penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hingga kini Bissu dilestarikan oleh pemerintah setempat. Dalam Pemilu pun, Bissu memiliki hak politik dan terdaftar sebagai pemilih.

Sebagai pemangku adat yang bermukim di Kecamatan Sigeri, Bissu kerap kali menjadi penasehat atau diminta pandangan dari pemerintah setempat. Di Kecamatan Sigeri jumlah DPT Pemilu 2019 berjumlah 15.225 Pemilih, pengguna hak pilih 11.938 pemilih atau 78 ,41 % naik dari Pemilu 2014 sebesar 70 %. Peningkatan ini tak lepas dari peran Bissu dalam mengedukasi masyarakat.

Kerja Sama sosialisasi KPU Sulsel dengan komunitas adat Bissu digelar pada 30 Maret 2019 di Kecamatan Sigeri. Kegiatan dimulai dengan Tari Mabissu atau dikenal dengan tari Maggiring. Selain komunitas Bissu dari berbagai daerah di Sulsel di antaranya Bissu Pangkep, Bissu Bone, Bissu Sopeng, Bissu Wajo dan Bissu Luwu, Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana, Ketua dan anggota KPU Sulsel dan KPU Kab Pangkep, Dewan Penasehat Bissu DR. Halilintar Latief. Di akhir tarian,

Bissu Nani mengingatkan menjelang pemilihan ada tiga hal sifat dalam falsafah Bugis yang harus diingat yakni *Lempu* (Lempu), *Getteng* (tegas/konsisten) dan *Ada Tongeng* (menyatakan yang benar). Ajaran *lempu* diharapkan bisa meredam politik uang dan menyalurkan suara di bilik suara sesuai nurani. Ajaran *Getteng* tidak ragu dalam mengambil keputusan. *Ada Tongeng,* bagi para kontestan politik untuk memberikan janji dan tidak mengingkari janji jika terpilih. Siapapun para kandidat mereka yang terpilih berdasarkan sifat pemilihnya *Lempu* dan *Getteng.*

Mendongkrak Partisipasi Pemilih

Perilaku *non-voting* (tidak menggunakan hak pilih) masih membayangi Pemilu 2019 di Sulawesi Selatan. Terdapat 16 daerah dengan partisipasi di bawah angka 70%. Daerah yang paling rendah adalah Kabupaten Jeneponto 58%, Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba 60%, Palopo 62%, Bantaeng 64% dan Wajo 65. Sementara pada Pemilu Legislatif 2014, hanya Makassar yang angka di bawah 70%. Dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT 1.020.587 hanya 627,156 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau 61%.

Berbekal data pemilu 2014 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, daerah dengan partisipasinya ditangani secara khusus. Peran relawan demokrasi dioptimalkan dan volume sosialisasi ditambah. Ada enam daerah yang partisipasinya rendah yakni Desa Sinaga, Kecamatan Herlang, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang, Desa Caramming, Kecamatan Bonto Tiro dan Desa Tana Harapan, Kecamatan Rilau Ale dan Garanta, Kecamatan Ujung Loe.

Tingginya golput di sejumlah daerah tersebut dikarenakan sejumlah hal seperti karakteristik pemilih belum sepenuhnya menyadari penting menggunakan hak politik atau mencoblos kontestan pada hari pelaksanaan pemilu. Mesti diliburkan, warga yang sebagian besar pencariannya buruh musiman dan petani lebih memilih bekerja daripada pergi mencoblos. Faktor itu bisa dikategorikan apatisme atau ketidakpercayaan (*distrust*) di kalangan pemilih. Diasumsikan siapapun terpilih tidak akan merubah keadaan. Selain itu banyak penduduk perantau yang terdata dalam daftar pemilih tidak kembali pada saat hari pencoblosan.

Upaya meningkatkan partisipasi dimulai dari perbaikan data pemilih bekerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil). Dalam merapikan data Disdukcapil membuat aturan bahwa pemilih yang telah merantau 8 (delapan) tahun ke atas dikeluarkan dari data kependudukan. Sementara KPU Kabupaten Gowa memetakan daerah dengan tingkat partisipasi rendah di wilayahnya.

Tiga kecamatan yang partisipasi pemilihnya rendah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 yaitu Kecamatan Somba Opu 65,67 %, Kecamatan Palangga 68,62 % dan Kecamatan Biringbulu 71,16 %. Dengan menggunakan mobil sosialisasi "*Oto Caradde*" modifikasi dari Rumah Pintar Pemilu (RPP), KPU Gowa gencar sosialisasi di kantong-kantong massa, fasilitas umum yang ramai (car freeday, pasar, dsb) serta sekolah-sekolah. Selain itu workshop 18 kecamatan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan kepemiluan juga bagian dari aktivitas untuk mendongkrak suara di daerah partisipasi rendah.

Kota Makassar adalah daerah paling rendah tingkat partisipasinya di Sulawesi Selatan sementara merupakan daerah paling tinggi jumlah pemilihnya. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menjawab masalah tersebut KPU Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan KPU Kota Makassar membuat berbagai strategi untuk mendongkrat angka partisipasi pemilih di Makassar. Ada dua Kecamatan terbesar pemilihnya di Makassar justru terendah tingkat partisipasinya. Contoh pada Pemilihan Walikota Makassar 2018 tingkat partisipasi di Kecamatan Tamalate (47,98%) dan Panakkukang (50,83%). Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar adalah daerah paling rendah partisipasinya yaitu 36,46%.

KPU Provinsi Sulawesi Selatan fokus pada Kecamatan Tamalate dan Panakkukang. Kegiatan sosialisasi untuk daerah terendah partisipasinya dilaksanakan di dua kecamatan tersebut. Setiap minggu KPU Provinsi melaksanakan sosialisasi di pusat keramaian melalui kegiatan-kegiatan yang menghibur seperti senam dan kuis Pemilu di *car free day* setiap hari minggu, sosialisasi di pasar segar, sosialisasi di mall dan tempat keramaian lainnya. Program sosialisasi di car free day didesain dengan senam Jingle Pemilu. KPU menyiapkan instruktur khusus memandu senam kesehatan dengan musik jinggle Pemilu.

Berbagai kegiatan tersebut mampu mendongkrak partisipasi pemilih di daerah dengan partisipasi rendah di Kota Makassar, misalnya di kelurahan Masale dari angka 36,46% menjadi 46,76%, kecamatan Panakkukang dari 50,83% menjadi 63,76%, dan kecamatan Tamalate dari 47,98% menjadi 63,95%. Secara keseluruhan tingkat partisipasi Kota Makassar meningkat dari 58,98% menjadi 75,05%.

Tabel Data Daerah dan Angka Partisipasi Pemilih Terendah

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	PILGUB 2018			PEMILU 2019			
			PEMILIH DPT	PENGGUNA DPT	PERSENTASE	PEMILIH DPT	PENGGUNA DPT	PERSENTASE	KENAIKAN PERSENTASE
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	HERLANG	SINAGA	2,621	1,266	48.30%	2,644	1,745	66.00%	17.70%
2	KAJANG	BONTO BAJI	3,129	1,507	48.16%	3,265	2,388	73.14%	24.98%
3	GANTARANG	BONTO MASILA	2,707	1,310	48.39%	2,691	1,562	58.05%	9.65%
4	BONTO TIRO	CARAMMING	1,643	794	48.33%	1,720	909	52.85%	4.52%
5	RILAU ALE	TANAH HARAPAN	2,758	1,342	48.66%	2,741	1,641	59.87%	11.21%
6	UJUNG LOE	GARANTA	3,262	1,611	49.39%	3,209	2,179	67.90%	18.52%

Sosialisasi Lewat Film Pendek

Untuk mendekati pemilih pemula dan pemilih muda, KPU Kabupaten Pangkep menginisiasi pembuatan film pendek dengan mengangkat persoalan Pemilu dan ajakan politik sehat. Film dapat menyampaikan pesan secara efektif dan komunikatif kepada publik. Pembuatan film pendek dilakukan dengan menggandeng youtuber, Arman Pio sedangkan konten dan ide berasal dari KPU Pangkep. Selain disebar di media sosial, film pendek tersebut juga menjadi bahan sosialisasi di setiap pertemuan tatap muka.

Sementarai di KPU Enrekang, KPU membuat konten video dan vlog melalui lomba. Peserta lomba berasal dari kalangan SMA Sederajat se-Kabupaten Enrekang. Sebanyak 7 (tujuh) karya berhasil dihimpun dari kegiatan lomba tersebut. Sejumlah tema yang diangkat dalam lomba film, film tersebut adalah ajakan memilih 17 April, politik uang dan tata cara mencoblos. KPU Gowa juga membuat lomba Vlog untuk kalangan pelajar.

Relasi Simpul Gerakan KPU Sulsel

Sebanyak 55 orang per kabupaten/kota direkrut sebagai bagian dari tim kerja KPU untuk menyasar 11 basis pemilih. Relawan demokrasi disingkat Relasi sebelum turun melakukan sosialisasi diberikan pengetahuan kepemiluan, keterampilan dan sikap diri dalam pelatihan selama tiga hari. Mereka nantinya bertugas menjadi penyuluh pemilu dan demokrasi di tengah-tengah masyarakat.

KPPD Sebagai *Agen Of Power* Pemilu 2019

Sejak dibentuk 15 Agustus 2017 dalam kegiatan Jambore Komunitas Demokrasi di Bogor Jawa Barat, KPPD Sulsel terus aktif berkegiatan untuk mengedukasi pemilih. Di Sulsel, KPPD sudah menjalankan mandat kerja untuk dua event pemilihan yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

KPPD sebagai kaum muda *agent of power*, juga menyasar kelompok pemilih muda dan pemilih baru. Kegiatannya adalah *Goes to Campus* dan *Goes To School*. Selain itu, sosialisasi di setiap keramaian dan lokasi *car free day* yang dilaksanakan di beberapa titik di Kota Makassar setiap hari Sabtu dan Minggu.

Proses Pelantikan
55 Relawan Demokrasi
pada Pemilu 2019

Sosialisasi Kepemiluan yang dilakukan Relawan Demokrasi basis Keagamaan pada acara Pengajian Warga

Sosialisasi Pemilu Berbasis Keluarga Di Kecamatan Pinogu Provinsi Gorontalo

Oleh Selvi Katili
Anggota KPU Provinsi Gorontalo

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan metode sosialisasi forum warga berbasis keluarga di Kecamatan Pinogu dalam kaitannya dengan strategi komunikasi, kendala/hambatan yang dihadapi, serta implikasinya terhadap angka partisipasi pemilih di Kecamatan Pinogu pada Pemilu tahun 2019. Penulisan ini berjenis kualitatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan sumber penulisan berupa bahan primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan penulisan dilakukan melalui observasi dan studi dokumen/bahan pustaka.

Berdasarkan analisis dan pembahasan diperoleh hasil bahwa: (1) penerapan metode sosialisasi forum warga berbasis keluarga di Kecamatan Pinogu dilakukan berdasarkan teori strategi komunikasi Melvin D. Fleur berupa Social Categories Theory dan Social Relationship Theory dengan mempertimbangkan karakteristik penduduk, kondisi sosial kemasyarakatan, dan kewilayahan, serta melibatkan tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, dan aparatur desa yang memiliki sumber daya tarik dan kepercayaan masyarakat setempat, serta muatan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Pinogu; (2) kendala/hambatan yang dihadapi mencakup hambatan sosiologis, geografi, antropologis, psikologis, dan mekanis; dan (3) penerapan metode sosialisasi forum warga berbasis keluarga berimplikasi pada angka partisipasi pemilih di Kecamatan Pinogu pada Pemilu tahun 2019, yang mana pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 angka partisipasi pemilih meningkat sebesar 6,14%, pada Pemilu DPR RI tahun 2019 angka partisipasi pemilih meningkat sebesar 0,15%, pada Pemilu DPD RI tahun 2019 angka partisipasi pemilih meningkat sebesar 0,15%, dan pada Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2019 angka partisipasi pemilih menurun sebesar 0,12%.

Kata Kunci: Strategi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih, dan Masyarakat Daerah Terpencil.

Pendahuluan

Salah satu nilai yang mendasari demokrasi adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succesession of rules*) dengan menafikkan pergantian atas dasar keturunan atau dengan jalan mengangkat diri sendiri ataupun melalui *coup d'etat* karena dianggap sebagai hal yang tidak wajar dalam kehidupan demokrasi.[14] Di kebanyakan negara penganut paham demokrasi, Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, Pemilu menjadi satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari bingkai negara demokrasi, yakni sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat agar tercipta suatu tatanan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan efisien, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat.

Di Indonesia, pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. KPU memiliki salah satu tugas yaitu menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat (*vide* Pasal 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Hal tersebut merupakan tanggung jawab KPU untuk menjaring partisipasi dari masyarakat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan Pemilu, salah satunya adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk menggunakan hak pilih (*voting*) dalam pelaksanaan pemungutan suara. Pemilu tidak dapat dikatakan sukses tanpa keterlibatan partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih dalam Pemilu sangatlah penting karena merupakan bentuk partisipasi politik warga negara yang memberikan dampak cukup penting terhadap tatanan politik dan kelangsungan hidup suatu negara, terutama dalam mendekati tujuan yang hendak dicapai (ideal negara).[15] Dengan demikian, sosialisasi Pemilu dan pendidikan pemilih menjadi hal yang bersifat imperatif untuk dilaksanakan oleh KPU untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih, karena pada prinsipnya masyarakat berhak atas aksesibilitas informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 18 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Salah satu sasaran KPU Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu adalah masyarakat di Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango yang dapat dikategorikan sebagai pemilih berbasis berkebutuhan khusus (masyarakat di

[14]Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Hlm. 119.

[15]Sahya Anggara. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung. Hlm. 149.

wilayah perbatasan atau terpencil). Masyarakat di Kecamatan Pinogu merupakan masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi leluhur. Letak geografi yang berada di pusaran Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menjadikannya sebagai salah satu Kecamatan yang tertinggal di Kabupaten Bone Bolango yang ditandai dengan minimnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Melihat fakta empiris tersebut, sosialisasi Pemilu harus dilakukan berdasarkan strategi pendekatan yang koheren dengan ciri dan karakteristik dari masyarakat di Kecamatan Pinogu agar dapat mencapai tujuan sasarannya secara efektif dan efisien, yaitu melalui penerapan metode sosialisasi forum warga berbasis keluarga. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis dan pembahasan lebih lanjut mengenai: 1. bagaimanakah penerapan metode sosialisasi forum warga berbasis keluarga di Kecamatan Pinogu dalam kaitannya dengan strategi komunikasi? 2. apa kendala/hambatan yang dihadapi dalam penerapan metode sosialisasi forum warga berbasis keluarga di Kecamatan Pinogu? dan 3. apakah penerapan metode sosialisasi forum warga berbasis keluarga di Kecamatan Pinogu berimplikasi pada angka partisipasi politik pemilih di Kecamatan Pinogu pada Pemilu tahun 2019?

A. Metode Penulisan

Metode penulisan dibutuhkan sebagai alat analisis bagi penulis, sehingga penulis memiliki suatu pedoman tentang tata cara untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami sumber-sumber penulisan yang tersedia secara komprehensif dan konsekuen. Dengan demikian, kerangka penyajian hasil penulisan dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis secara ilmiah. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan kualitatif yakni prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.[16] Penulisan ini diperlukan dalam pemecahan masalah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, antara lain:[17]

1. Untuk memahami isu-isu yang sensitif.
2. Untuk keperluan evaluasi.
3. Untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui.
4. Untuk meneliti sesuatu secara mendalam.

Dalam penulisan ini, penulis berusaha untuk menggali, menemukan fakta-fakta, dan menyelami pokok persoalan yang dihadapi sehingga dapat dihasilkan suatu argumentasi sebagai preskripsi atas penerapan metode sosialisasi forum warga berbasis keluarga di Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango. Penulisan ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data keadaan subyek

[16] Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. Hlm. 5.

[17] *Ibid*. Hlm. 7.

atau obyek penulisan dan gejala-gejala lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.[18] Penulisan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penulisan, untuk kemudian berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi situasi ataupun fenomena tertentu.[19]

Penulis menggunakan bahan-bahan penulisan yang bersumber dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer adalah bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, yang merupakan sejumlah data, fakta, atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang menjadi obyek penulisan.[20] Sumber bahan primer dalam penulisan ini meliputi: Camat Pinogu, aparatur desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat Kecamatan Pinogu. Sementara bahan sekunder adalah bahan yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang memiliki relevansi dengan masalah yang dikaji. Bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan ini mencakup: 1) bahan-bahan yang bersifat autoritatif (sumber dokumen resmi negara) seperti peraturan perundang-undangan; dan 2) bahan publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti: buku-buku teks, jurnal, karya ilmiah, laporan penelitian, makalah, dan bahan lainnya yang relevan dengan fokus penulisan.

Gambaran Umum Obyek dan Lokasi

a. Keadaan Geografi

Luas Kecamatan Pinogu secara keseluruhan adalah 405,96 (empat ratus lima koma sembilan enam) km^2. Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Bone Bolango, luas kecamatan ini sebesar 20,5% (dua puluh koma lima persen).[21] Permukaan tanah di Kecamatan Pinogu sebagaian besar adalah dataran tinggi dan pegunungan. Kecamatan Pinogu berada pada pusaran hutan produksi dengan luas 3.767 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) hektar dan hutan suaka alam dan pelestarian alam yaitu Taman Nasional Bogani Nani Wartabone seluas 43.783

[18] Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Hlm. 10.

[19] Burhan Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Hlm. 68.

[20] Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Hlm. 12.

[21] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango. 2018. *Kecamatan Pinogu dalam Angka 2018*. Bone Bolango: BPS Kabupaten Bone Bolango. Hlm. 5.

(empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar.[22] Batas wilayah administrasi Kecamatan Pinogu antara lain sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
2. Sebelah Timur : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Bone Raya dan Kecamatan Bone
4. Sebelah Barat : Kecamatan Suwawa Timur

b. Pemerintahan

Kecamatan Pinogu terdiri dari 5 (lima) desa, yaitu: Desa Pinogu (luas wilayah 65,24 km^2), Desa Bangio (luas wilayah 120,40 km^2), Desa Pinogu Permai (luas wilayah 82,68 km^2), Desa Dataran Hijau (luas wilayah 92,90 km^2), dan Desa Tilonggibila (luas wilayah 45,44 km^2).[23] Total dusun yang terdapat di Kecamatan Pinogo sebanyak 15 (lima belas) dusun yang tersebar di masing-masing desa sebanyak 3 (tiga) dusun. Status pemerintahan desa-desa di Kecamatan Pinogu adalah desa swadaya yang status hukumnya sudah tergolong definitif.

c. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Pinogu tahun 2017 adalah 2084 (dua ribu delapan puluh empat) jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1081 (seribu delapan puluh satu) jiwa dan penduduk perempuan 1003 (seribu tiga) jiwa.[24] Kepadatan penduduk Kecamatan Pinogu pada tahun 2017 sebesar 5 (lima) jiwa per km^2, yang mana Desa Pinogu sebagai desa yang paling padat penduduknya dengan 8 (delapan) jiwa per km^2, sementara yang terendah adalah Desa Bangio yaitu sebesar 2 (dua) jiwa per km^2. Terkait dengan data jumlah pemilih di Kecamatan Pinogu dalam Pemilu tahun 2019, jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua) orang, di antaranya pemilih berjenis kelamin laki-laki sebanyak 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) orang dan pemilih berjenis kelamin perempuan sebanyak 703 (tujuh ratus tiga) orang. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebesar 36 (tiga puluh enam) orang, di antaranya pemilih berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan pemilih berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 (sebelas) orang. Pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebesar 12 (dua belas) orang, di antaranya pemilih berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 (lima) orang dan pemilih berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 (tujuh) orang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan pemilih di Kecamatan Pinogu adalah sebesar 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) pemilih.

---

[22] *bid*. Hlm. 81.

[23] *Ibid*. Hlm. 6.

[24] *Ibid*. Hlm. 31.

d. Sosial

Pendidikan

Pada tingkat Sekolah Dasar dan sederajat tahun ajaran 2017/2018 jumlah murid dan guru adalah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) murid dan 18 (delapan belas) guru. Pada tingkat SMP dan sederajat terdapat 105 (seratus lima) murid dan 10 (sepuluh) guru. Pada tingkat SMA dan sederajat terdapat 50 (lima puluh) murid dan 7 (tujuh) guru.[25]

Metode Sosialisasi Berbasis Keluarga dalam kaitannya dengan strategi komunikasi

Menurut kacamata sosiologi, sosialisasi didefinisikan sebagai proses dalam diri seseorang ketika mereka belajar mengenai nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat, sehingga mereka mampu memainkan peran masing-masing dengan tepat dalam masyarakat (*socialization is the process through which people learn attitudes, values, and actions appropriate for members of a particular culture*).[26] Melalui proses sosialisasi, diharapkan setiap anggota masyarakat dapat belajar untuk mengetahui nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan keyakinan tersebut. Dalam konteks Pemilu, Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu (*vide* Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Sosialisasi Pemilu berdasarkan teori sosialisasi dapat diklasifikasikan sebagai sosialisasi ekualitas. Sosialisasi ekuitas merupakan proses sosialisasi yang didasari oleh kesamaan dan kerjasama antara para pihak yang melakukan sosialisasi dengan sasaran sosialisasi. Dalam sosialisasi ini, kedua pihak memiliki hubungan yang sederajat, sehingga tidak dapat dilakukan proses sosialisasi dengan paksaan yang memanfaatkan kewenangan atau otoritas yang dimiliki satu pihak. Sosialisasi ini dibangun dengan mengajak sasaran untuk memiliki hubungan kerjasama secara koordinatif dan kooperatif.[27] KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan badan *adhoc* Pemilu selaku penyelenggara Pemilu memiliki kewajiban etis untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemilih terkait demokrasi dan kepemiluan, yang mana antara penyelenggara Pemilu dan pemilih berada dalam posisi tawar yang sama, sehingga keberhasilan Pemilu dan demokrasi

[25] *bid*. Hlm. 47.

[26] Richard T. Schaefer. 2007. *Sociology*: *A Brief Introduction*. New York. Hlm. 96.

[27] Elly. M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Hlm. 159.

ditopang oleh sinergisitas kedua pihak tersebut dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu meliputi komponen: pemilih (berbasis keluarga, pemula, muda, perempuan, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet), masyarakat umum, media massa, Partai Politik Peserta Pemilu, pengawas, Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Luar Negeri, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, dan instansi pemerintah (*vide* Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum). Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilu antara lain: forum warga, komunikasi tatap muka, media massa, bahan sosialisasi, alat peraga sosialisasi, mobilisasi sosial, pemanfaatan budaya populer, pemanfaatan budaya lokal/tradisional, laman, dan papan pengumuman, media sosial, media kreasi, dan/atau bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilu dengan baik (*vide* Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilu (*vide* Pasal 1 angka 25 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum). Pendidikan pemilih dilakukan dengan tujuan untuk: a. membangun pengetahuan pemilih; b. membangun kesadaran pemilih; c. meningkatkan partisipasi pemilih; dan d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu (*vide* Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum). Sasaran pendidikan pemilih meliputi: keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan/atau warga internet (*vide* Pasal 15 ayat (1) KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum). Pendidikan pemilih tidak hanya dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, melainkan juga dapat dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik (*vide* Pasal 26 ayat (2) KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Berdasarkan gambaran umum mengenai ciri dan karakteristik dari masyarakat di Kecamatan Pinogu, baik dari sudut sosial ekonomi kemasyarakatan,

budaya, dan struktur kewilayahan, maka kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kecamatan Pinogu harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang koheren melalui strategi komunikasi efektif. Strategi komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah proses gabungan antara perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) yang dilakukan secara terukur untuk mencapai suatu tujuan. Konteks dari perencanaan dan manajemen komunikasi di sini adalah bahwa sebelum dilakukan komunikasi terlebih dahulu harus sudah mengetahui pendekatan seperti apa yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat sasaran, sehingga komunikasi yang berlangsung akan menjadi lebih efektif. Strategi berkorelasi dengan misi organisasi, mengingat strategi merupakan salah satu instrumen yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuan.[28] Dalam konteks sosialisasi Pemilu dan pendidikan pemilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota harus menetapkan suatu strategi komunikasi, karena strategi komunikasi akan berkorelasi langsung dengan pencapaian Misi KPU, yaitu **"Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih dalam Pemilu, Pemilih Berdaulat Negara Kuat"**. Terdapat 2 (dua) fungsi yang dapat diperoleh dengan membuat suatu strategi komunikasi, yaitu:[29]

a. Dapat menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada masyarakat sasaran sehingga memperoleh hasil yang optimal.

b. Menjembatani kesenjangan budaya (*cultural gap*).

KPU Provinsi Gorontalo menerapkan metode sosialisasi forum warga berbasis keluarga kepada masyarakat Pinogu sebagai instrumen untuk menebarkan bibit demokrasi dan kepemiluan di Kecamatan Pinogu. Metode forum warga merupakan bentuk sosialisasi secara kolektif dengan mengumpulkan warga masyarakat Kecamatan Pinogu di Desa Pinogu, yang dipadukan dengan sasaran basis keluarga. Metode ini sangat efektif untuk diterapkan karena melihat karakteristik wilayah/kondisi geografi dari Kecamatan Pinogu yang kepadatan penduduknya rata-rata hanya berkisar 5 (lima) jiwa per km^2, sehingga agar mudah dalam proses komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan mengoptimalkan masing-masing kepala keluarga agar mengajak anggota keluarganya atau sebagai wakil keluarga untuk menghadiri sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Setiap wakil keluarga yang menghadiri sosialisasi akan meneruskan penyampaian materi sosialisasi yang telah diterimanya kepada keluarga atau sanak saudara di rumah. Selain itu, KPU Provinsi Gorontalo juga melihat karakteristik

[28] John M. Bryson. 2003. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta. Hlm. 189.

[29] Onong Uchjana Effendy. 1986. *Dinamika Komunikasi*. Bandung. Hlm. 35.

bahwa adanya suatu kedekatan emosional di antara sesama anggota masyarakat di Kecamatan Pinogu, yang memiliki rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang cukup erat, dan merupakan satu rumpun yang adat istiadatnya masih sama dalam 1 (satu) kerajaan, sehingga metode forum warga sangat efektif untuk diterapkan. Hal tersebut merefleksikan pendekatan KPU Provinsi Gorontalo menerapkan strategi komunikasi berdasarkan teori strategi komunikasi (Teori Melvin D. Fleur) berupa *Social Categories Theory*. Dalam teori ini diasumsikan bahwa masyarakat yang memiliki sikap, keyakinan, dan pola hidup yang sama cenderung memberikan tanggapan yang sama terhadap sebuah isu/pesan yang dilontarkan pada mereka.[30]

KPU Provinsi Gorontalo menerapkan strategi komunikasi berdasarkan Teori Melvin D. Fleur, yaitu *Social Relationship Theory,* yang mana komunikasi akan menjadi lebih efektif apabila dilakukan dalam dua tahap. *Pertama*, pesan dikomunikasikan terlebih dahulu terhadap sekelompok masyarakat yang merupakan *opinion leader* dalam kelompoknya. Selanjutnya, para *opinion leader* akan menyampaikan kembali pesan tersebut terhadap masyarakat. Kedekatan secara sosial antara *opinion leader* dan masyarakatnya akan membangkitkan rasa percaya terhadap pesan yang disampaikan, walaupun dalam penyampaiannya disisipi dengan interpretasi dan pendapat pribadi dari para *opinion leader*.[31] Maka dari itu, KPU Provinsi Gorontalo melibatkan tokoh adat/tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparatur desa setempat yang memiliki sumber daya tarik dan sumber kepercayaan bagi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, sehingga hal tersebut dapat memangkas rasa skeptis dan apatisme dari masyarakat Pinogu untuk menghadiri kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018 bertempat di Aula Rumah Dinas Camat Pinogu (Bapak Nail Amstrong). Dalam kegiatan sosialisasi, KPU Provinsi Gorontalo menyampaikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Pinogu, seperti:

a. Sejarah Pemilu, pentingnya Pemilu dan demokrasi, sistem Pemilu, dan profil penyelenggara Pemilu.

b. Materi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, menyangkut: konsep dasar tentang memilih, tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, jenis-jenis daftar pemilih, dan peran serta masyarakat dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

c. Partai politik peserta Pemilu yang telah ditetapkan dalam DCT, di dalamnya

[30]Onong Uchjana Effendy. 1981. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung. Hlm. 19-20.

[31]*Ibid*.

menyangkut peran serta masyarakat pada pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi Gorontalo, dan DPRD Kabupaten Bone Bolango.

d. Calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan, di dalamnya menyangkut peran serta masyarakat pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

e. Jumlah kursi dan pembagian daerah pemilihan dan masing-masing calon DPD, DPR, DPRD Provinsi Gorontalo, dan DPRD Kabupaten Bone Bolango, serta peran serta masyarakat dalam penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.

f. Masa kampanye, meliputi: jadwal kampanye, visi misi dan program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

g. Mekanisme pemungutan/pencoblosan dan penghitungan suara, mencakup: tata cara pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Hambatan yang Dihadapi

Penulis mengidentifikasi kendala/hambatan-hambatan yang ditemui pada saat melakukan sosialisasi forum warga berbasis keluarga di Kecamatan Pinogu, di antaranya sebagai berikut:

a. Hambatan Sosiologis

Hambatan sosiologis dikarenakan masyarakat terdiri dari berbagai golongan dan lapisan yang menimbulkan perbedaan dalam status sosial, agama, ideologi, tingkat pendidikan, kekayaan, dan lain sebagainya.[32] Tidak banyak penduduk di Kecamatan Pinogu yang mengenyam pendidikan tinggi, sehingga sedikit banyak di antaranya masih bersifat konservatif, skeptis, dan apatis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan. Hal tersebut membuat mereka menjadi enggan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

b. Hambatan Geografi

Hambatan ini berkaitan dengan medan dan bentang dan kondisi alam yang didapati penulis dan tim dalam perjalanannya menuju ke lokasi

[32] Onong Uchjana Effendy. *Op.Cit.* 1986. Hlm 5.

jdih.kpu.go.id

sosialisasi dan pendidikan pemilih. Untuk menuju Desa Pinogu, tim harus menempuh perjalanan kurang lebih 40 (empat puluh) kilometer dalam waktu 9 (sembilan) jam menggunakan kendaraan roda dua berupa ojek yang bertarif sampai dengan Rp 1.000.000. (terbilang: satu juta rupiah). Medan yang dilalui terbilang cukup berat, karena harus menembus hutan Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone dengan beberapa puluh anak sungai. Kondisi jalan yang hanya merupakan jalan setapak dan belum adanya perkerasan permukaan jalan (jalan belum beraspal/beton dan masih berupa tanah) membuat tim semakin sulit manakala dalam perjalanan menemui hujan yang mana kondisi jalan menjadi berlumpur. Hal tersebut cukup menguras tenaga sehingga tim mengalami kelelahan yang berdampak tidak optimalnya penyampaian materi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.

c. Hambatan Antropologis

Hambatan antropoligis berupa perbedaan dalam hal suku bangsa, ras, gaya hidup, norma, kebiasaan, dan bahasa.[33] Masyarakat di Kecamatan Pinogu dalam kesehariannya berinteraksi dengan bahasa lokal/daerah setempat (bahasa Bone/Bonda), dan sebagian besar tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga fasilitator/narasumber acapkali kesulitan untuk menyampaikan pesan dan memberikan pemahaman karena keterbatasan bahasa.

d. Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis terjadi ketika terdapat prasangka terhadap komunikator, karena dengan memiliki prasangka maka komunikan sudah bersikap menentang komunikator.[34] Setidaknya terdapat 4 (empat) hal penyebab adanya golongan putih/*abstain* (orang yang tidak memberikan suara pada hari pemungutan suara), antara lain: *pertama*, persoalan administratif. Seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi seperti tidak terdaftar dalam daftar pemilih, tidak memiliki kartu identitas (KTP-el), dan lain sebagainya. *Kedua*, persoalan teknis. Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan, dan lain sebagainya. *Ketiga*, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (*political engagement*). Seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik dengan politik, skeptis, dan tidak memandang Pemilu sebagai hal yang

[33] *Ibid*.

[34] *Ibid*.

penting. *Keempat*, kalkulasi rasional. Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih. Pemilu dipandang tidak ada gunanya dan tidak akan membawa perubahan berarti.[35] Keempat hal tersebut menggambarkan problematika yang membelenggu masyarakat di Kecamatan Pinogu menjelang Pemilu. Mayoritas penduduk di Kecamatan Pinogu bermatapencaharian sebagai petani/berkebun, sebagian dari mereka berpendapat bahwa berkebun memberikan dampak langsung kepada sumber-sumber penghidupan dibandingkan dengan mengurusi permasalahan demokrasi, politik, dan Pemilu. Hal tersebut membuat mereka menjadi enggan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

e. Hambatan Mekanis

Dijumpai pada media yang digunakan dalam melancarkan komunikasi, misalnya suara yang tidak jelas, huruf yang kabur, gambar yang tidak sempurna, dan lain sebagainya.[36] Tim memiliki keterbatasan alat peraga seperti: contoh surat suara, brosur, selebaran, pamflet, buku kecil/poster, stiker, spanduk, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya alat transportasi pengangkutan yang memadai untuk menjangkau lokasi Kecamatan Pinogu, yaitu hanya bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor roda dua. Beberapa alat peraga mengalami penurunan kualitas setiba di lokasi karena minimnya proteksi dalam pengangkutan.

Implikasi terhadap Angka Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*), kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam Pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contracting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*, dan sebagainya.[37] Menurut Alexander Abe, partisipasi adalah hak, bukan suatu kewajiban, oleh karenanya sebagai sebuah hak partisipasi dapat ditemukan dalam dokumen pernyataan hak asasi manusia seduna pada Pasal 21 yakni: a. setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; b. setiap orang berhak

[35]Arianto dan Bismar. 2011. *Analisis Penyebab Tidak Memilih dalam Pemilu*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji Vol. 1, No. 1. Hlm. 55.

[36]Onong Uchjana Effendy. *Loc.Cit.* 1986.

[37]Miriam Budiarjo. *Op.Cit.* Hlm. 367.

atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya; dan c. kemauan rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan yang berkala dan jujur yang didasarkan pada hak pilih yang umum dan sama diselenggarakan dengan pemungutan suara yang bersifat rahasia atau tata cara pemungutan yang bebas bagi semua orang.[38]

Mochtar Mas'oed dan Colin MacAdrews membagi bentuk partisipasi politik menjadi dua hal yaitu kegiatan politik konvensional (bentuk partisipasi yang normal dalam demokrasi modern) dan kegiatan politik non-konvensional (berbentuk petisi penuh kekerasan dan revolusioner). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.[39] Partisipasi politik konvensional meliputi: pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dalam administratif. Sementara partisipasi politik non-konvensional berbentuk: pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, dan pembakaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan), dan perang gerilya atau revolusi.[40]

Dalam konteks kepemiluan di Indonesia, Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat (*vide* Pasal 448 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilu (*vide* Pasal 1 angka 22 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum). Setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum). Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dilakukan dalam bentuk: a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu; b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilu; c. sosialisasi Pemilu; d. pendidikan pemilih; dan e. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu (*vide* Pasal 20 ayat (2) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum). Masyarakat juga dapat melibatkan diri dalam penyelenggaraan pemilu, seperti: a. keterlibatan dalam penyusunan

[38]Alexander Abe. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo. Hlm. 34.

[39]Mohtar Mas'oed dan Colin MacAndrews. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta. Hlm. 47.

[40] *Ibid*.

kebijakan atau peraturan; b. keterlibatan dalam tahapan pemilu; dan/atau c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu (*vide* Pasal 21 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

Penerapan metode sosialisasi forum warga berbasis keluarga di Kecamatan Pinogu berimplikasi pada angka partisipasi pemilih di Kecamatan Pinogu pada Pemilu tahun 2019. Materi-materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi cukup efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kecamatan Pinogu, terutama terkait pengenalan terhadap jenis-jenis surat suara dan mekanisme penyaluran hak pilih. Berikut ini disajikan data perbandingan pemilih, pengguna hak pilih, dan penggunaan surat suara di Kecamatan Pinogu pada Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019:

jdih.kpu.go.id

Tabel Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, dan Penggunaan Surat Suara di Kecamatan Pinogu pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

No.	Tahun Pemilu	Data Pemilih				Pengguna Hak Pilih				Penggunaan Surat Suara	
		DPT	DPTb	DPK	DPKTb	DPT	DPTb	DPK	DPKTb	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**2014**	1.367	14	0	2	1.079	14	0	2	1.082	13
2.	**2019**	1.462	36	12	-	1.252	32	12	-	1.270	26

Sumber: Formulir DB1-PPWP Tahun 2014 dan 2019

Tabel Presentase Partisipasi Pemilih dan Penggunaan Surat Suara Sah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

No.	Tahun Pemilu	Jumlah Data Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	PresentasePartisipasi Pemilih (%)	Jumlah Penggunaan Surat Suara	Presentase Surat Suara Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**2014**	1.383	1.095	79,17	1.095	98,81
2.	**2019**	1.510	1.296	85,31	1.296	97,99

Sumber: hasil olahan penulis.

Tabel Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, dan Penggunaan Surat Suara di Kecamatan Pinogu pada Pemilu DPR RI

No.	Tahun Pemilu	Data Pemilih				Pengguna Hak Pilih				Penggunaan Surat Suara	
		DPT	DPTb	DPK	DPKTb	DPT	DPTb	DPK	DPKTb	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**2014**	1.371	26	4	6	1.164	26	3	6	1.160	39
2.	**2019**	1.462	36	12	-	1.252	25	12	-	1.238	51

Sumber: Formulir DB1-DPR ahun 2014 dan 2019

Tabel Presentase Partisipasi Pemilih dan Penggunaan Surat Suara Sah pada Pemilu DPR RI

No.	Tahun Pemilu	Jumlah Data Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	PresentasePartisipasi Pemilih (%)	Jumlah Penggunaan Surat Suara	Presentase Surat Suara Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**2014**	1.407	1.199	85.21	1.199	96,74
2.	**2019**	1.510	1.289	85,36	1.289	96,04

Sumber: hasil olahan penulis.

Tabel DData Pemilih, Pengguna Hak Pilih, dan Penggunaan Surat Suara di Kecamatan Pinogu pada Pemilu DPD RI

No.	Tahun Pemilu	Data Pemilih				Pengguna Hak Pilih				Penggunaan Surat Suara	
		DPT	DPTb	DPK	DPKTb	DPT	DPTb	DPK	DPKTb	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**2014**	1.371	26	4	6	1.164	26	3	6	1.160	39
2.	**2019**	1.462	36	12	-	1.252	25	12	-	1.270	26

Sumber: Formulir DB1-DPD Tahun 2014 dan 2019

Tabel Presentase Partisipasi Pemilih dan Penggunaan Surat Suara Sah pada Pemilu DPD RI

No.	Tahun Pemilu	Jumlah Data Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Presentase Partisipasi Pemilih (%)	Jumlah Penggunaan Surat Suara	Presentase Surat Suara Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**2014**	1.407	1.199	85,21	1.199	96,74
2.	**2019**	1.510	1.289	85,36	1.289	98,52

Sumber: hasil olahan penulis.

jdih.kpu.go.id

Tabel Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, dan Penggunaan Surat Suara di Kecamatan Pinogu pada Pemilu DPRD Provinsi

No.	Tahun Pemilu	Data Pemilih				Pengguna Hak Pilih				Penggunaan Surat Suara	
		DPT	DPTb	DPK	DPKTb	DPT	DPTb	DPK	DPKTb	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	**2014**	1.371	26	4	6	1.164	26	3	6	1.152	46
2.	**2019**	1.462	36	12	-	1.252	21	12	-	1.228	57

Sumber: Formulir DB1-DPRD Provinsi ahun 2014 dan 2019

Tabel Presentase Partisipasi Pemilih dan Penggunaan Surat Suara Sah pada Pemilu DPRD Provinsi

No.	Tahun Pemilu	Jumlah Data Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Presentase Partisipasi Pemilih (%)	Jumlah Penggunaan Surat Suara	Presentase Surat Suara Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	**2014**	1.407	1.199	85,21	1.199	96,08
2.	**2019**	1.510	1.285	85,09	1.285	95,56

Sumber: hasil olahan penulis.

Berdasarkan tabel di atas dapat dicermati bahwa presentase partisipasi pemilih di Kecamatan Pinogu pada Pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Presentase partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 adalah sebesar 85,31% (delapan puluh lima koma tiga satu persen), meningkat sebesar 6,14% (enam koma satu empat persen) dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dengan angka presentase partisipasi pemilih sebesar 79,17% (tujuh puluh sembilan koma satu tujuh persen). Penggunaan surat suara sah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mencapai 97,99% (sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan persen) dari total surat suara yang digunakan, turun sebesar 0,82% (nol koma delapan dua persen) dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang berada pada angka presentase 98,81% (sembilan puluh delapan koma delapan satu persen) dari total surat suara yang digunakan. Presentase penggunaan surat suara tidak sah yang pada Pemilu tahun 2014 tercatat sebesar 1,18% (satu koma satu delapan persen), pada Pemilu tahun 2019 naik sebesar 0,82% (nol koma delapan dua persen) yakni menjadi 2,00% (dua koma nol nol persen) dari total penggunaan surat suara.

b. Presentase partisipasi pemilih pada Pemilu DPR RI tahun 2019 adalah sebesar 85,36% (delapan puluh lima koma tiga enam persen), meningkat sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) dari Pemilu DPR RI tahun 2014 dengan angka presentase partisipasi pemilih sebesar 85,21% (delapan puluh lima koma dua satu persen). Penggunaan surat suara sah mencapai 96,04% (sembilan puluh enam koma nol empat persen) dari total surat suara yang digunakan, turun sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) dari Pemilu DPR RI tahun 2014 yang berada pada angka presentase 96,74% (sembilan puluh enam koma tujuh empat persen) dari total surat suara yang digunakan. Presentase penggunaan surat suara tidak sah yang pada Pemilu DPR RI tahun 2014 tercatat sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen), pada Pemilu DPR RI tahun 2019 naik sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) yakni menjadi 3,95% (tiga koma sembilan lima persen) dari total penggunaan surat suara.

c. Presentase partisipasi pemilih pada Pemilu DPD RI tahun 2019 adalah sebesar 85,36% (delapan puluh lima koma tiga enam persen), meningkat sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) dari Pemilu DPD RI tahun 2014 dengan angka presentase partisipasi pemilih sebesar 85,21% (delapan puluh lima koma dua satu persen). Penggunaan surat suara sah mencapai 98,52% (sembilan puluh delapan koma lima dua persen) dari total surat suara yang digunakan, naik sebesar 1,78% (satu koma tujuh delapan

persen) dari Pemilu DPD RI tahun 2014 yang berada pada angka presentase 96,74% (sembilan puluh enam koma tujuh empat persen) dari total surat suara yang digunakan. Presentase penggunaan surat suara tidak sah yang pada Pemilu DPD RI tahun 2014 tercatat sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen), pada Pemilu DPD RI tahun 2019 turun sebesar 1,24% (satu koma dua empat persen) yakni menjadi 2,01% (dua koma nol satu persen) dari total penggunaan surat suara.

d. Presentase partisipasi pemilih pada Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2019 adalah sebesar 85,09% (delapan puluh lima koma nol sembilan persen), turun sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) dari Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2014 dengan angka presentase partisipasi pemilih sebesar 85,21% (delapan puluh lima koma dua satu persen). Penggunaan surat suara sah mencapai 95,56% (sembilan puluh lima koma lima enam persen) dari total surat suara yang digunakan, turun sebesar 0,52% (nol koma lima dua persen) dibandingkan dengan Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2014 yang berada pada angka presentase 96,08% (sembilan puluh enam koma nol delapan persen) dari total surat suara yang digunakan. Presentase penggunaan surat suara tidak sah yang pada Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2014 tercatat sebesar 3,83% (tiga koma delapan tiga persen), pada Pemilu DPD RI tahun 2019 naik sebesar 0,6% (nol koma enam persen) yakni menjadi 4,43% (empat koma empat tiga persen) dari total penggunaan surat suara.

jdih.kpu.go.id

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan metode sosialisasi forum warga berbasis keluarga di Kecamatan Pinogu dilakukan berdasarkan teori strategi komunikasi strategi komunikasi Melvin D. Fleur berupa *Social Categories Theory* dan *Social Relationship Theory* dengan mempertimbangkan karakteristik penduduk, kondisi sosial kemasyarakatan, dan kewilayahan, serta melibatkan tokoh masyarakat/ adat, tokoh agama, dan aparatur desa yang memiliki sumber daya tarik dan kepercayaan masyarakat setempat, serta muatan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Pinogu.

2. Terdapat 5 (lima) hambatan dalam penerapan sosialisasi forum warga berbasis keluarga di Kecamatan Pinogu, yaitu hambatan sosiologis, hambatan geografi, hambatan antropologis, hambatan psikologis, dan hambatan mekanis.

3. Penerapan metode sosialisasi forum warga berbasis keluarga berimplikasi pada angka partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2019, di antaranya:

    a. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 angka partisipasi pemilih sebesar angka partisipasi pemilih sebesar 79,17% (tujuh puluh sembilan koma satu tujuh persen), sementara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 angka partisipasi pemilih sebesar 85,31% (delapan puluh lima koma tiga satu persen), terjadi peningkatan sebesar 6,14% (enam koma satu empat persen).

    b. Pada Pemilu DPR RI tahun 2014 angka partisipasi pemilih sebesar 85,21% (delapan lima koma dua satu persen), sementara pada Pemilu DPR RI tahun 2019 angka partisipasi pemilih sebesar 85,31% (delapan lima koma tiga satu persen), terjadi peningkatan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

    c. Pada DPD RI tahun 2014 angka partisipasi pemilih sebesar 85,21% (delapan lima koma dua satu persen), sementara pada Pemilu DPD RI tahun 2019 angka partisipasi pemilih sebesar 85,31% (delapan lima koma tiga satu persen), terjadi peningkatan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

jdih.kpu.go.id

d. Pada Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2014 angka partisipasi pemilih sebesar 85,21% (delapan lima koma dua satu persen), sementara pada Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2019 angka partisipasi pemilih sebesar 85,09%, terjadi penurunan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen).

Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada KPU Kabupaten/Kota:

a. Melakukan pemetaan ciri dan karakteristik masing-masing masyarakat di wilayahnya.

b. Membuat strategi dan pendekatan-pendekatan khusus yang relevan, efektif, dan efisien dalam menyosialisasikan informasi kepemiluan kepada masyarakat sesuai dengan ciri dan karakteristiknya masing-masing.

c. Membekali para Relawan Demokrasi secara terpadu dan berkesinambungan terkait strategi komunikasi/pendekatan-pendekatan sosialisasi kepada masing-masing segmentasi sasaran sosialisasi yang koheren dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

d. Membuat program sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dalam artian tidak hanya dilakukan pada saat menginjak tahapan Pemilu pada tahun politik saja.

2. Kepada Relawan Demokrasi dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar selalu merangkul aparatur desa setempat, para tokoh/pemuka adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial masyarakat, pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber daya tarik dan sumber kepercayaan bagi masyarakat setempat.

3. Kepada badan *adhoc* penyelenggara Pemilu, seperti KPPS, PPS, dan PPK agar proaktif untuk memberikan informasi menyangkut dinamika situasi sosial kemasyarakatan di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota dan Relawan Demokrasi, serta bersinergi untuk menyosialisasikan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Buku
   a. Alexander Abe. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo.
   b. Burhan Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta.
   c. Elly. M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta.
   d. John M. Bryson. 2003. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta.
   e. Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung.
   f. Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta.
   g. Mohtar Mas'oed dan Colin MacAndrews. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta.
   h. Onong Uchjana Effendy. 1981. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung.
   i. Onong Uchjana Effendy. 1986. *Dinamika Komunikasi*. Bandung.
   j. Richard T. Schaefer. 2007. *Sociology*: *A Brief Introduction*. New York.
   k. Sahya Anggara. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung.
   l. Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.
   2. Jurnal/Publikasi Ilmiah
   a. Arianto dan Bismar. 2011. *Analisis Penyebab Tidak Memilih dalam Pemilu*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji Vol. 1, No. 1.
   b. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango. 2018. *Kecamatan Pinogu dalam Angka 2018*. Bone Bolango: BPS Kabupaten Bone Bolango.
   3. Peraturan Perundang-Undangan
   a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
   b. Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
   c. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Banjir, Tidak Menyurutkan semangat warga datang ke TPS untuk memilih pada Pemilu 2019

Petugas KPPS sedang membantu Pemilih disabilitas memasukan Surat Suara ke dalam Kotak Suara

Tour D'Election, Menyasar Pemilih di 900 Kilometer

Oleh Adi Arwan Alimin
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat

PEMILU selalu ditentukan oleh tingkat partisipasi. Kalimat yang sanggup meletakkan dua tangan seorang komisioner Divisi Sosialisasi di punggung, atau bahkan diantara diafragmanya. Ungkapan itu seperti dengung genderang yang ditabu prajurit bahwa serangan dari negeri api sedang bertiup. Angka kesertaan pemilih di setiap pemilihan model apapun memang seperti bara di tangan. Partisipasi itu seperti abstraksi, yang tak dapat diukur kecuali suksesi telah usai
.

Tiada nilai apapun dari sebuah Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah bila tingkat keikutsertaan warga pemilih berada di titik rendah. Seluruh satuan kerja di Komisi Pemilihan Umum pasti mengalami perasaan yang mengambang dalam setiap tahapan. Sebaik apapun data dikelola atau logistik dapat menjangkau pelosok paling terpencil, jika tingkat partisipasi berada di titik terendah, publik jelas akan menagih legitimasi pemilihan yang minim kesertaan. Bayangkan bila sebuah kontestasi dihadiri tidak lebih dari setengah warga yang berhak memilih, lalu partisipasi itu pun dirundung sertaan karena setengah warga yang hadir tidak menentukan pilihan secara tepat.

Indonesia dengan keragaman pemilih dan demografi yang tak kalah luasnya, memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Sulawesi Barat dengan profil wilayah yang sebagian besar merupakan ketinggian, dan tingkat kepadatan pendudukan yang jarang membutuhkan metode atau pendekatan kreatif. Setiap satker tentu memiliki program sosialisasi yang beragam, atau bahkan relatif sama dengan daerah lain. Pada wilayah tertentu yang bersifat urban atau perkotaan dan dijangkau jaringan internet pola sosialisasi cenderung stabil dan mudah dirancang. Selain karena warga mudah ditemui atau bahkan dikumpulkan dalam even tertentu, penyediaan sarana pun amat membantu setiap gelaran. Lalu bagaimana dengan wilayah dengan tingkat kerumitannya tersendiri? Tantangan seperti itu seringkali mengubah kegalauan divisi menjadi kreatifitas syarat visi.

Indonesia dengan 34 provinsi dan 500-an satuan kerja KPU, sama berarti *lansdkap* yang memajang kolase program sosialisasi yang amat beragam. Agenda di KPU harus dibuat *update* dan merangsang minat publik, apalagi anak-anak muda era milenial. Dari sisi inilah daya kreasi dan ide brilian diperlukan. Tantangannya amat jelas. Publik yang makin kritis dan sumber daya yang seringkali tidak seimbang dengan bobot kegiatan. Namun tiada yang mesti dilakukan selain melaksanakan kegiatan dalam optimasi untuk merebut minat warga.

jdih.kpu.go.id

Di Sulawesi Barat, dipilih salah satu *best practice Tour d'Election*. Program sosialisasi yang sebenarnya digagas untuk memaksimalkan beberapa rangkaian agenda. Pada Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Sulawesi Barat mengetengahkan program ini sebagai unggulan dari sekian puluh program sosialisasi yang didesain mengikuti tahapan pemilihan umum. Museum Rekor Indonesia (MuRI) memberi sertifikat untuk agenda ini. Sosialisasi ini meraih predikat sebagai Metode Sosialisasi Pemilu Terpanjang di Indonesia. Jarak tempuhnya menyusuri trans Sulawesi sejauh 774 kilometer. Di sepanjang perjalanan itu KPU Sulbar menggelar sedikitnya 22 kegiatan yang melibatkan partisipasi warga di setiap titik yang disinggahi.

Di Pemilu 2019, KPU Provinsi Sulawesi Barat kembali memakai program ini, *Tour d'Election Part II*. Jaraknya lebih jauh 900 kilometer. Kali ini tidak ada upaya memecahkan rekor tahun 2014, sebab pencapaian itu belum digapai satker yang sama atau pihak lain dengan acara sosialisasi.

Apa yang dapat dicapai atau didengungkan dari *Tour d'Election*? Kegiatan ini selain dapat menyelesaikan beberapa program di setiap titik kabupaten yang dilewati, konvoi kendaraan yang menarik pengendara dan warga paling tidak dapat memantik pengetahuan awal mengenali agenda besar Pemilu 2019. Tour seperti ini yang juga ditautkan dengan monitoring sekaligus, juga memberi gairah bagi *adhoc* yang berkumpul di even ini.

Sebagai contoh, di sejumlah desa tanpa listrik apalagi jaringan internet yang dilewati, para penyelenggara di tingkat KPPS, dan PPS sangat antusias. Mereka merasa begitu dihargai karena dikunjungi gelombang penyelenggara lainnya yang selama ini amat sulit bertemu. Kegiatan tidak hanya untuk kepentingan sosialisasi ke masyarakat, tetapi juga ibarat suplemen penting bagi penyelenggara yang berada di tempat-tempat terjauh.

Secara umum KPU Sulawesi Barat telah melakukan rangkaian program untuk meningkatkan kesertaan pemilih. Sebut saja, agenda yang melibatkan peran pelajar dalam sekian banyak pertemuan, maupun kehadiran mahasiswa di berbagai kegiatan *goes to campus*. Secara rutin pun digelar pertemuan awal pekan dengan hadir di sekolah sebagai pembina upacara. Momen ini amat praktis, dengan biaya yang sangat minim tapi dapat bertatap langsung dengan ratusan bahkan ribuan peserta didik, yang sebagian besar merupakan calon pemilih pemula.

Aktivitas di semua komunitas juga rutin. Setiap acara tradisi yang digelar selalu dimanfaatkan komisioner atau jajaran *adhoc* untuk melakukan sosialisasi, termasuk penyebaran brosur di masjid pada Jumat atau hadir dalam kegiatan kebaktian. Segala arah dan mata kegiatan nyaris telah dilakukan yang tentu saja mengedepankan pendekatan kultur dan kebiasaan setempat. Jajaran KPU

melakukan semua ini dengan tumpuan utama bahwa partisipasi atau sasaran pendidikan pemilih kita tercapai.

Suatu ketika, penulis mendatangi warga Desa Mammi, di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Meski medan tempuhnya amat menanjak karena berada hampir 1000 dari permukaan laut, penulis ditemani komisioner KPU Polewali Mandar, PPK Binuang serta anggota Panwascam. Kedatangan kami untuk memastikan apakah beberapa orang pemilih yang lebih banyak berdiam di kebun kakao, dan durian itu benar terdaftar sesuai laporan PPS. Momentum seperti ini bukan hanya untuk memindai keberadaan pemilih yang sulit ditemui di musim buah atau panen, tetapi juga ingin menegaskan ke masyarakat pemilih bahwa jajaran adhoc hingga PPDP itu telah bekerja secara patut.

Kembali ke *Tour d'Election*. Pada mulanya agenda ini dianggap menggunakan porsi anggaran yang amat besar. Namun bila dicermati puluhan program yang dirangkai dalam tour ini sesungguhnya semacam "tali tasbih" yang merangkum kegiatan yang berkesinambungan dari Kabupaten Mamasa, Polewali Mandar, Majene, Kota Mamuju, Mamuju tenggah hingga Pasangkayu yang berbatasan langsung dengan Donggala, Sulawesi Tengah. Sebagai *tour* dari satu titik ke titik lain di enam kabupaten di Sulawesi Barat, KPU ingin membuat sebuah efek massa berupa perhatian publik pada setiap kali even sosialisasi dilaksanakan.

Misalnya, dari titik Kecamatan Tinambung Polewali Mandar yang menggelar agenda kesenian daerah dan diakhiri dengan naik belasan dokar atau bendi tradisional ke perbatasan Kabupaten Majene yang berjarak sekitar empat kilometer. Di perbatasan Polman-Majene peserta yang dari komunitas dijemput menggunakan sarana transportasi berupa "Odong-Odong" memasuki Kota Majene yang berjarak sekitar lima kilometer. Odong-odong di Majene familiar sebagai wahana bermain anak-anak berupa rangkaian kereta mini yang kerap keliling kota sambil mendendangkan lagu. Di kota pun digelar festival jalanan dengan sambutan *drumband*. Pola ini mampu mengumpulkan perhatian massa di sepanjang jalan dalam gegap kemeriahan yang berakhir di titik agenda selanjutnya.

Tour d'Election pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 selalu dipilih sebagai *grand* program yang dianggap mampu menarik perhatian dan apresiasi masyarakat secara luas. Konser musik tentu memilik efek besar bagi komunitas muda atau milenial, pergelaran seni tradisi pun demikian bagi peminat seni budaya di daerah. Sementara *Tour d'Election* ibarat panggung besar yang dapat menampung seluruh gagasan dalam urusan sosialisasi tatap muka.

Sulawesi Barat memiliki keunggulan secara geografi karena provinsi yang mekar dari Sulawesi Selatan ini memiliki garis pantai sejauh 800 kilometer. Dari

wilayah Paku yang berbatas dengan Kabupaten Pinrang, Sulsel dan Suremana yang hanya diantarai sungai dengan Donggala, Sulawesi Tengah. Kemeriahan berupa konvoi besar ini pada Pemilu 2019 mengambil rute timur trans Sulawesi, yakni start dari Kota Mamuju-Bonehau, lalu menyeberang ke Aralle-Mambi-Kota Mamasa, Polewali-Wonomulyo, Majene-Malunda, Mamuju-Tarailu, Topoyo Mamuju Tengah, lalu finish di Pasangkayu.

Dalam program skala mikro rekan komisioner di kabupaten adapula yang melakukan tour tersendiri meski menggunakan sepeda motor menyambangi semua desa di kabupatennya. Jadi ikhtiar kita dalam beragam model sosialisasi telah cukup optimal. Usaha KPU Sulbar serta jajaran hingga ke *adhoc* terdepan amatlah sungguh-sungguh. Semua ini tentu saja dilakukan dalam skala prioritas dan terukur, dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Role model sosialisasi dan pendidikan pemilih di pemilihan berikutnya tentu akan memiliki tantangan dan peluang yang berbeda. Di setiap daerah pun demikian. Namun secara umum kita telah melakukannya secara optimal. Pemilih pemula yang tinggal di kota-kota besar, tidak pernah dapat dibanding dengan sebaran pemilih pemula di pelosok atau pedalaman. Pemilih di wilayah urban dan homogen memerlukan kecerdasan tinggi divisi sosialisasi. Semua ini hanya memerlukan cara menampung dan mengadaptasi kebutuhan pemilih di setiap daerah. Untuk sementara kita telah memiliki Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang di Sulawesi Barat kami sebut "Boyang Manarang" Pemilu, perannya sebagai laboratorium pengetahuan dini mengenai kepemiluan bagi generasi muda pemilih. Ke depan RPP harus dirancang lebih elastis hingga pergerakannya dapat *mobile* ke pelosok dusun atau desa.

Penulis ingin mengatakan, tiada standar sosialisasi dan pendidikan pemilih paling nomor wahid. Sebab selalu tergantung apakah program itu dapat berterima dan memiliki daya ungkit tingkat partisipasi. Apakah strateginya relevan dan mewakili pikiran publik. Sementara kesertaan pemilih di bilik-bilik suara pada hari H disertai beragam motif berbeda pula.

Tugas kita pada dasarnya melayani merekalah yang memilih. Data partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014 Sulawesi Barat sebanyak 74 persen lebih. Sementara Pemilu 2019 angkanya mencapai 85 persen. Pencapaian ini diperoleh melalui upaya program sosialisasi yang masif. Sementara tantangan strategi sosialisasi di era digital sangatlah penuh tantangan. Angka partisipasi di Pemilu 2019 yang melewati sistem yang cukup rumit, sebenarnya pekerjaan berat untuk pemilihan selanjutnya.

Pertanyaan pendeknya, *tagline*, atau apa yang bisa dimanfaatkan agar sosialisasi mengenai sasaran serta berdampak. Dalam catatan sependek ini, penulis ingin mengusulkan agar *Tour d'Election* sebagai *best practice* dari Tanah Mandar, dapat dijadikan sebagai model nasional agar gempitanya lebih membahana. Di daerah penyelenggara Pemilu telah menjangkau setiap sudut wilayah, hampir tak ada lagi titik yang tak didatangi. Dalam sebuah kesempatan di Pasangkayu, Mamuju Utara, penulis bersama komisioner KPU Pasangkayu, PPK, PPS, Relawan Demokrasi duduk bersama dengan warga Suku Da'a, menyerap harapan komunitas masyarakat yang jauh dari banyak akses. Itu menunjukkan upaya amat serius jajaran KPU hingga level paling terdepan.

Pada September 2019, skala regional Sulawesi dimulai. Bersama KPU Sulawesi Barat, KPU Provinsi Sulteng, KPU Gorontalo, dan Manado sebuah Touring bertajuk "Knowledge Sharing Election" melintasi 3000 kilometer jalan darat dari Mamuju ke Manado. Puluhan tulisan memuai dari perjalanan panjang ini, kekerabatan sesama penyelenggara pun makin karib. Penulis yakin bila even seperti ini dikelola secara nasional, maka atmosfirnya akan lebih mengangkasa. Tour Pemilu selanjutnya jelas lebih bernas.

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
yang memecahkan Rekor Muri
untuk melihat lebih lengkap dapat di mengunjungi link berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=uYAIQtkNlXM&feature=youtu.be

Para pemilih disabilitas mengecek calon yang akan dipilih

Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu 2019

Menembus Badai Menuju Perbatasan Australia dan Timor Leste

Oleh Hanafi Renwarin
Anggota KPU Provinsi Maluku

Tantangan tantangan penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak hanya terkait beban tugas penyelenggara Pemilu, namun juga membutuhkan edukasi pendidikan pemilih yang memadai. Dari aspek edukasi pemilih, serangkaian kegiatan sosialisasi dan strategi pendidikan pemilih dilakukan menghadapi keadaan yang unik dan khas. Pendidikan pemilih misalnya, menyasar 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, warga internet, dan relawan demokrasi.

Di Provinsi Maluku sasaran pendidikan pemilih dilakukan dengan kegiatan sosialisasi terhadap pemilih perempuan dan pemilih disabilitas; Forum Warga, KPU *Goes to Campus* dan KPU *Goes to School*, jalan santai, *dance jingle* pemilu, dan Konser Pemilu Tahun 2019. Kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya universitas, pihak sekolah, lembaga keagamaan, pers dan organisasi kemasyarakatan.

KPU juga melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dalam tahapan Pemilu, sejak ditetapkan dan diumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) melalui selebaran, media massa, media elektronik dan spanduk maupun baliho. Kegiatan ini dilakukan untuk sosialisasi dan memperkenalkan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Calon Presiden dan Wakil Presiden, jenis surat suara, tatacara mencoblos, tata letak TPS, serta mekanisme pindah memilih.

Di Maluku, Pemilu 2019 angka angka partisipasi mengalami kenaikan yang signifikan. Dari 199.987.870 pemilih terdaftar, sebanyak 158.012.506 pemilih menggunakan hak pilih atau sebanyak 81 persen melampaui target nasional sebesar 77,5 %. Bahkan temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Maluku, angka golput atau mereka tidak menggunakan hak pilih di Pemilu 2019, hanya sebesar 19,24 % terendah dalam Pemilu di era reformasi. Bandingkan dengan angka golput Pemilu 2004 sebanyak 23.30 %, Pemilu 2009 sebanyak 27.45 % dan Pemilu 2014 sebanyak 30.42 %.

Sosialisasi di Pulau Perbatasan

Provinsi Maluku terbagi atas 9 kabupaten dan 2 kota dan terdiri dari 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.198 desa dan negeri. Di antara seluruh kabupaten dan kota, ibu kota provinsi, Kota Ambon terpadat menurut jumlah penduduk dan Maluku Tengah merupakan yang terbesar menurut luas wilayah. Luas wilayah Maluku sebagian besar terdiri dari 93 % laut, sehingga terdiri dari gugusan pulau, yang memiliki tantangan tersendiri bagi sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Masih banyak daerah di Provinsi Maluku yang belum terjangkau jaringan internet. Bahkan aliran listrik juga masih belum menjangkau seluruh daerah pelosok. Hal ini berpengaruh pada strategi dan pendidikan pemilih yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Kondisi ini semakin rumit karena kondisi alam yang tidak menentu di daerah kepulauan, seperti cuaca ekstrem, rentan kendali dan apatisme masyarakat.

Berikut ini beberapa kisah unik dan menantang dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih di Provinsi Maluku.

Menembus Badai di Kecamatan Kei Besar Utara Timur

Maluku Tenggara secara geografis merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari satu gugusan pulau, yang diantaranya terdiri dari 2 buah pulau yang berukuran besar (Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil) dan 81 pulau yang berukuran kecil. Dari ke-83 pulau tersebut, hanya terdapat 14 pulau yang didiami sedangkan 69 lainnya tidak didiami.

Kecamatan Kei Utara Timur terletak di Pulau Kei Besar. Dari Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara, di Watdek di Pulau Kei Kecil, menuju Kecamatan Kei Besar Utara Timur hanya dapat ditempuh dengan *speedboat*, *katinting* atau perahu layar. Tim KPU Kabupaten Maluku Tenggara dalam kegiatan sosialisasi di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, menggunakan angkutan laut perahu layar, karena biaya sewa *speedboat* sangat mahal. Perjalanan dengan perahu layar ditempuh tiga jam.

Dalam perjalanan keadaan cuaca yang cerah, berubah menjadi mendung. Tiba-tiba hujan turun deras, disertai gelombang tinggi dan angin kencang. Hal itu terjadi setelah perjalanan berada di tengah-tengah selat yang memisahkan Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar. Pilihanya, terus melanjutkan perjalanan atau memutar balik haluan. Namun perjalanan terus dilakukan menerobos gelombang

dan angin kencang. Di tengah ujian alam seperti itu, perahu layar dapat tiba dengan selamat di Kecamatan Kei Besar Utara Timur untuk melakukan kegiatan sosialisasi Pemilih.

Sosialisasi di Perbatasan Australia

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari tiga gugusan kepulauan, yakni kepulauan Terselatan, kepulauan Lemola, dan Kepulauan Barbar dengan 16 buah pulau didiami dan 32 pulau tidak berpenduduk. Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan dengan karakteristik etnik yang unik.

Mdona Hiera adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Benua Australia. Salah satu kegiatan sosialisasi Pemilih, yang paling berkesan di Mdona Hiera yakni dilakukan di Pulau Meti Marang, salah satu dusun di Mdora Hiera yang berada di pulau kecil, yang terpisah dari Pulau Luang dan Pulau Sermatang, dua pulau besar di Kecamatan Mdona Hiera.

Untuk menuju Mdona Hiera hanya dapat menggunakan transportasi laut. Dengan kapal Pelni waktu tempuh dari Pulau Moa, ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya, selama 12 jam perjalanan. Namun masyarakat di sana lebih banyak menggunakan perahu tradisional, yang sering disebut *Jolor.* Jolor adalah perahu mesin yang dikemudikan masyarakat di Mdona Hiera.

Jean Saleky, relawan demokrasi yang bertugas di Mdona Hiera, mengisahkan sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk memberikan sosialisasi. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Mdora Hiera, adalah sebagai nelayan. “Masyarakat kalau mendengar ada kegiatan mereka susah datang. Walaupun sudah dipanggil dengan pengeras suara, yang datang hanya 1 atau 2 orang,” tutur Jean kepada penulis.

Karena itu, lanjut Jean, upaya untuk melakukan sosialisasi harus dilakukan dengan strategi tertentu. Salah satu cara yang paling umum yakni dengan bekerja sama dengan pengurus gereja, sehingga kegiatan sosialisasi dapat dilakukan bersamaan dengan aktivitas ibadah di gereja.

“Selain itu kami juga melebur dengan aktivitas masayarakat sambil menceritakan sosialisasi Pemilu dan Pemilih,” ungkap Jean. Aktivitas sosialisasi antara lain dilakukan saat ada kegiatan kumpul batu dan pasir untuk pembangunan gereja. Sebagian lagi dilakukan saat ada kegiatan latihan paduan suara gereja.

Dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, diantaranya tidak semua warga memiliki televisi dan aliran listrik, cara yang dilakukan Jean dan rekannnya yang lain, dapat diterima dengan baik masyarakat. Apalagi daerah ini kategori daerah *blank spot* ---tidak ada jaringan internet—sehingga tidak banyak sumber informasi kepada masyarakat, kecuali melalui aktivitas alternatif dengan aktivitas warga seperti yang dilakukan Jean.

Jumlah pemilih terdaftar di Mdona Hiera sebanyak 3.513 pemilih yang terdiri dari 1.754 pemilih laki-laki dan 1.759 pemilih perempuan. Dari jumlah itu sebanyak 3.126 menggunakan hak pilih di TPS atau dengan persentase pengguna hak pilih sebanyak 88,98 %.

Jean bersyukur dipercayakan menjadi relawan demokrasi, sehingga bisa memberikan konstribusi bagi peningkatan pendidikan pemilih. “Namun kedepan saya berharap agar sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat ditata dengan baik. Karena setiap daerah berbeda satu dengan yang lainnya,” usul Jean.

Nyaris Tenggelam Menuju Perbatasan Timor Leste

Wetar Barat adalah kecamatan yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, bahkan jarak ke Timor Leste lebih dekat dari Tiakur, Pulau Moa, Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya. Karena itu untuk layanan kesehatan dan pembelian kebutuhan pokok, tak jarang masyarakat Wetar Barat, berbelanja dan berobat ke Timor Leste.

Karel Tahilolo, relawan demokrasi yang bertugas di Wetar Barat, menuturkan, bahkan saat Sekretaris PPK Wetar Barat yang meninggal dunia saat pelaksanaan Pemilu, untuk pengawetan jenazah formalin dibeli dari Timor Leste. “Karena formalin di sini habis,” ujar Karel kepada penulis.

Untuk menjangkau 5 desa di Kecamatan Wetar Barat, Karel dan rekan-rekannya, menggunakan *katinting*, perahu kecil yang menggunakan mesin baling-baling untuk mendorong laju perahu. “Kami pakai katinting, karena biaya sewa *speedboat* per desa Rp1 juta rupiah,”terang dia.

Waktu kunjungan di desa-desa disesuaikan dengan kesediaan waktu dari warga. Sebab umumnya pekerjaan warga disana sebagai nelayan, sehingga kegiatan sosialisasi dapat dilakukan di siang hari. “Sebagian besar melaut di waktu malam, sehingga sosialisasi dapat kami lakukan di siang hari,” jelas Karel.

Sekali waktu dalam gelombang tinggi, *katinting* yang ditumpangi Karel dan rekan-rekannya diterjang ombak. Katinting sempat oleng, dan 1 baling-baling

katinting perahu lepas. “Kami hampir tenggelam. Kami hanya pasrah, beruntung kami bisa selamat,” tutur Karel mengenang.

Upaya dari relawan demokrasi menemui hambatan, terkait bahasa dan apatisme warga. Sebagian besar orang tua di desa-desa di Wetar Barat tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka hanya bisa berbahasa daerah setempat. “Selain hambatan itu warga juga susah diajak berkumpul mendengarkan sosialisasi. Mereka lebih memilih bekerja melaut,” ungkat Karel.

Jumlah pemilih terdafar di Kecamatan Wetar Barat 1.171 pemilih yang terdiri dari 627 perempuan dan 544 laki-laki. Dari jumlah itu sebanyak 582 laki-laki menggunakan hak pilihnya di TPS, dan 463 perempuan datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Angka persentase partisipasi pemilih di Kecamatan Wetar Barat sebanyak 89,24 %. Dengan katan lain, Karel dan rekan-rekannya mampu memberikan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di daerah perbatasan dan terpencil.

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Maluku, pada Pemilu 2019

Penutup

Kerja-kerja sosialisasi pendidikan pemilih telah berhasil mengangkat tingkat partisipasi. Dari sisi basis pendidikan pemilih umumnya dilakukan dengan strategi yang cukup terukur. Hal ini terbukti dengan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkorelasi dengan tinggi angka partisipasi hak pilih ke TPS. Bahkan angka partisipasi penggunaan hak pilih ini, cukup tinggi di daerah-daerah perbatasan dan terisolir.

Relawan demokrasi yang melakukan aktivitas sosialisasi tatap muka di daerah yang tidak ditunjang aliran listrik dan internet, telah menutup kesenjangan pendidikan pemilih bagi warga di daerah-daerah *blank spot*—tanpa adanya jaringan internet. Karena itu relawan demokrasi ini eksistensinya harus tetap ada dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Alternatif pendekatan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, dari gambaran yang ada di Mdona Hiera dan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, dapat menjadi pendekatan alternatif yang dapat direplikasi di daerah lain, yang memiliki karakteristik *sosiologis identic* dengan apatisme tinggi.

Perlunya perencanaan anggaran yang bersifat *buttom up* dalam intervensi kegiatan pendidikan pemilih. Sebab di daerah kepulauan, dengan jangkauan transportasi laut, biaya mobilisasi sumber daya dalam pendidikan pemilih sangat tinggi.

Mengingat tingginya bahaya alam bagi relawan demokrasi dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, sehingga perlunya ada asuransi bagi relawan demokrasi.

jdih.kpu.go.id

Metode Sosialisasi di Maluku Utara

Oleh Safrina
Anggota KPU Provinsi Maluku Utara

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum tahun 2019 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Tulisan ini membahas tentang tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pemilu maupun Pemilihan sebelumnya. Peningkatan partisipasi ini tidak terlepas dari metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara untuk dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban politiknya dalam pemilu 2019.

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung atau tidak langsung untuk menentukan sebuah kebijakan bernegara. Dalam pemilihan umum, masyarakat melakukan aktivitas politik karena, pertama alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 tingkat partisipasi masyarakat Maluku Utara dalam menggunakan hak pilihnya mencapai 81,94%, sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, partisipasinya hanya 67,36%. Salah satu contoh adalah di Kota Ternate dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) 153.807 jiwa namun masih terdapat 45,08% dari jumlah tersebut yang tidak menggunakan hak pilihnya (Sumber : data KPU Provinsi Malut). Salah satunya alasan adalah tidak ada keuntungan bagi mereka, karena figur/tokoh yang menjadi calon tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga masyarakat lebih memilih memanfaatkan waktu untuk kegiatan perekonomian/sehari-hari pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden berlangsung.

Dari kondisi tersebut, pada pemilihan umum tahun 2019 KPU Provinsi Maluku Utara melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Problem Tingkat Partisipasi Masyarakat

Pemilu seringkali dipahami sebagai arena persaingan terbuka antar peserta pemilu untuk memobilisasi dukungan suara pemilih. Akibatnya terjadi interaksi yang relatif intens antara warga/pemilih dengan peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara, lembaga pengawas pemilu, dan juga pemantau. Dalam interaksi ini, pemilih berada pada posisi yang sejajar/setara dengan elemen lainnya, jika tidak harus mengatakan pada posisi diuntungkan. Peserta pemilu membutuhkan dukungan pemilih, begitu juga dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berusaha meningkatkan keterlibatan pemilih dalam pemilu.

Persoalan partisipasi dan keinginan orang memilih atau tidak, akan dipengaruhi oleh tokoh dan sosok yang akan dipilih, apakah mampu merepresentasikan atau mengakomodir kepentingan pemilih atau tidak melalui program program yang ditawarkan (visi dan misi). Artinya ketika kepentingan tidak bisa terakomodir dalam pemilu maka keinginan pemilih untuk berpartisipasi akan sangat rendah.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga penyelenggara pemilu ditingkat provinsi bertanggung jawab memfasilitasi pemilih sehingga dapat memberikan suaranya secara mudah (akses geografis), aman (tanpa ancaman), dan tepat (paham cara menandai surat suara). KPU memastikan bahwa pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan suaranya dapat terfasilitasi secara baik dan menjamin bahwa suara pemilih dihitung dengan jujur. Artinya tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah memfasilitasi dan menjamin aspek teknis pemilih yang memutuskan untuk memberikan suaranya. KPU sebagai penyelenggara pemilu lebih bertanggung jawab terhadap persoalan partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh persoalan teknis penyelenggaraan pemilu. Ketika pemilih tidak menggunakan hak pilihnya akibat absennya informasi tentang mekanisme pemilihan atau hari pemungutan suara maka tentu menjadi tanggung jawab penyelenggara.

Berdasarkan hal itu maka menjadi tidak cukup relevan jika kemudian soal tinggi rendahnya partisipasi pemilih hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara di tingkat pusat hingga daerah namun menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara, peserta dan juga pemilih. Begitu juga dengan target tingkat partisipasi pemilih hingga 75 % atau lebih. KPU Provinsi Maluku
Utara mengambil tindakan cepat untuk melakukan pendidikan pemilih dalam

memastikan bahwa pemilih memperoleh informasi yang memadai terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu dengan menggandeng berbagai pihak baik dari media, masyarakat sipil dan relawan demokrasi yang ada di kabupaten/kota.

Partisipasi dari Setiap Pemilu

Partisipasi masyarakat Maluku Utara dalam pemilu dan pemilihan sejak tahun 2013 hingga 2019 dapat dilihat pada table yang di tampilkan. Berikut ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu baik itu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.

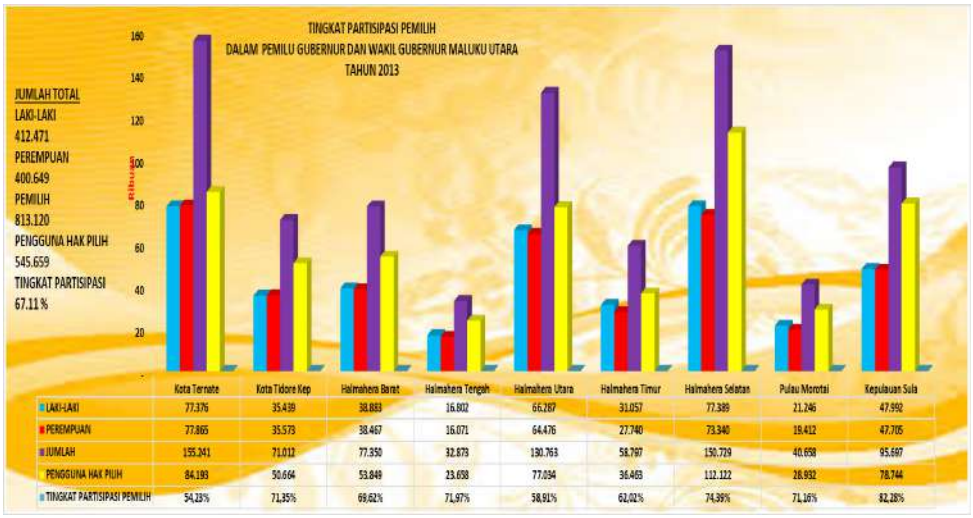

Sumber : DC1 – KWK.KPU

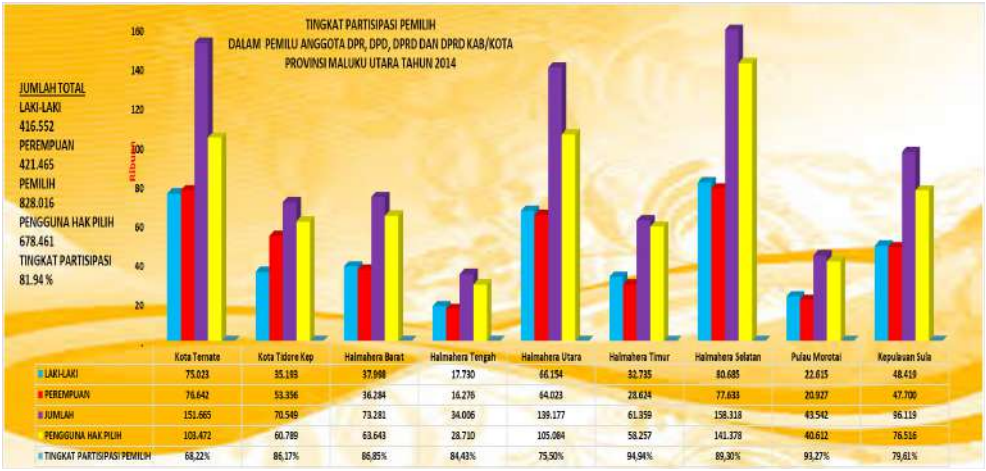

Sumber : DC1 DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota, Pemilu 2014

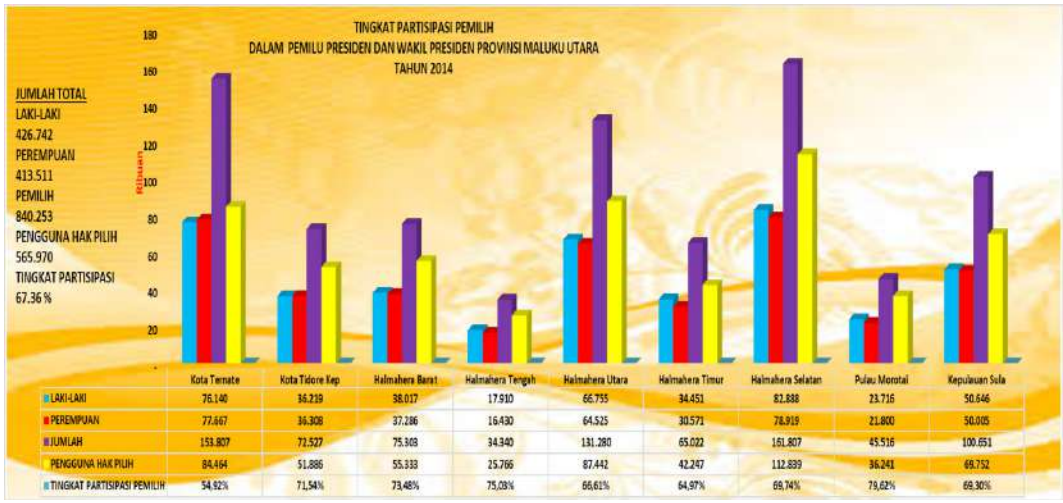

	Kota Ternate	Kota Tidore Kep	Halmahera Barat	Halmahera Tengah	Halmahera Utara	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Pulau Morotai	Kepulauan Sula
LAKI-LAKI	76.140	36.219	38.017	17.910	66.755	34.451	82.888	23.716	50.646
PEREMPUAN	77.667	36.308	37.286	16.430	64.525	30.571	78.919	21.800	50.005
JUMLAH	153.807	72.527	75.303	34.340	131.280	65.022	161.807	45.516	100.651
PENGGUNA HAK PILIH	84.464	51.886	55.333	25.766	87.442	42.247	112.839	36.241	69.752
TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH	54,92%	71,54%	73,48%	75,03%	66,61%	64,97%	69,74%	79,62%	69,30%

Sumber : DC1 PPWP, Pemilu 2014

Jika dilihat dari diagram di atas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diwilayah Provinsi Maluku Utara menurun sangat signifikan hingga mencapai 67,36% dibandingkan pada pemilu legislatif tahun 2014 yakni 81,94%, artinya selisih penurunan partisipasi pemilih sebanyak 14,58%. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tahun 2013 adalah 82,28%. Artinya bahwa di setiap pelaksanaan pesta demokrasi ini terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat.

Ada 5 (lima) faktor penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu yakni :

1. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap partai politik sebagai bentuk perlawanan terhadap perilaku koruptif para elite politik. Alih-alih menjadi harapan bagi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, partai politik kini justru lebih menjadi sumber masalah akibat perilaku koruptif sejumlah elite mereka.
2. Daya kritis dapat menganalisis hasil dari pemilu-pemilu sebelumnya dalam merealisasikan janji-janji saat kampanye. Tingkat realisasi dari janji kampanye yang relatif rendah serta tidak dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi dasar alasan untuk golput.
3. Faktor administrasi Pemilu. Pemilih tidak dapat memberikan suaranya pada TPS tempat tinggalnya karena orang tersebut terdaftar di TPS daerah lain. Misalnya adalah orang-orang yang merantau ke daerah lain baik untuk mencari nafkah, menuntut ilmu, maupun keperluan lain.
4. Kurangnya sosialisasi pemilu oleh lembaga pemilihan umum sehingga masyarakat tidak mengetahui seberapa besar manfaat dari keterlibatan

pada pemilu itu sendiri.

5. Kurangnya peran parpol dalam sosialisasi politik sehingga masyarakat tidak mengetahui secara jelas apa visi, misi atau bahkan tidak mengenal profil dari bakal calon yang diusung oleh parpol itu sendiri.

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi angka partisipasi pemilih yakni, kurangnya sosialisasi dari KPU Provinsi Maluku Utara akibat dari keterbatasan anggaran, mengingat Maluku Utara adalah wilayah kepulauan di mana untuk menjangkau dari satu desa ke desa lainnya cukup sulit.

Langkah Sosialisasi

Untuk meningkatkan tingkat Partisipasi masyarakat dalam setiap Pemilu, penyelenggara Pemilu dituntut proaktif dalam mencari partisipasi aktif dari setiap masyarakat antaa lain dengan memberikan informasi kepada masyarakat, mengidentifikasi mengapa partisipasi masyarakat sangat penting, dan bagaimana cara masyarakat dapat secara partisipatif terlibat dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. KPU Provinsi Maluku Utara maupun KPU Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara telah berupaya maksimal dalam melaksanakan berbagai cara diantaranya :

1. Melaksanakan dialog-dialog interaktif di beberapa media-media elektronik yakni RRI dan beberapa radio swasta guna memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih,
2. Melaksanakan sosialisasi berupa penayangan iklan di radio-radio milik pemerintah maupun swasta, guna memastikan bahwa pemilih dapat memahami secara tepat langkah dan proses Pemilu;
3. Membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu melalui Website KPU Provinsi Maluku Utara;
4. Memberikan arahan dan pemahaman pada penyelenggara tingkat bawah agar dapat merancang tempat pemungutan suara senyaman mungkin sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk memberikan suaranya;
5. Bekerja sama dengan media massa lokal dalam penerbitan setiap informasi tentang kepemiluan.
6. Bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dalam melakukan Riset Partisipasi Dalam Pemilu di Provinsi Maluku Utara.

Intensitas dan Kreativitas Sosialisasi

Dalam melaksanakan tugas, khususnya sosialisasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019, KPU Provinsi Maluku Utara berpedoman pada tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia. Secara umum rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu pada tahun anggaran 2018 hingga 2019 di Provinsi Maluku Utara dapat berjalan lancar. Masalah-masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan langkah koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2019, KPU Provinsi Maluku Utara melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi berdasarkan evaluasi jangka panjang pada pembelajaran melalui Pemilu dan pilkada sebelumnya. Bercermin pada menurunnya angka partisipasi masyarakat pada Pemilu sebelumnya, KPU Provinsi Maluku Utara terus berupaya melakukan berbagai terobosan dan kreasi berkelanjutan seperti melibatkan Komunitas Peduli Pemilu dan Relawan Demokrasi yang pernah dibentuk tahun 2016 dengan tujuan utama yaitu dapat menjadi acuan atau dasar bagi embrio komunitas-komunitas yang peduli dengan isu-isu pemilu dan demokrasi sehingga menjadi mitra strategis KPU dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi.

Tidak hanya Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi, KPU Provinsi Maluku Utara juga menggandeng beberapa elemen organisasi maupun komunitas perempuan untuk ikut menanamkan pendidikan politik pada masyarakat khususnya di lingkungan keluarga masing-masing. Sebab keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua insitusi.

Pemilu RUN 2019 (Ternate, 7 April 2019)

Selain itu KPU Provinsi Maluku Utara juga melakukan berbagai metode sosialisasi dengan menggunakan beberapa cara yaitu:

Metode Tatap Muka

Dengan metode ini, KPU Provinsi Maluku Utara dapat menyampaikan materi sosialisasi tentang pemilu tahun 2019 secara langsung kepada kelompok sasaran melalui beberapa sosialisasi dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Saat menerapkan metode ini KPU Provinsi tidak menargetkan seberapa banyak peserta yang hadir dan selalu optimis bahwa apa yang disampaikan mampu mendorong tingkat partisipasi pemilih saat pemilu berlangsung, karena kami yakin dengan adanya tatap muka dan terjun langsung kemasyarakat selain jelas akan informasi kepemiluan masyarakat pun akan mudah memahami seluruh informasi yang disampaikan.

Tatap muka sekaligus sosialisasi tentang seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, sosilasasi pindah memilih, sosialisasi 5 jenis surat suara, ajakan ayo memilih, seruan anti politik uang dan anti politisasi SARA (Segmen Masyarakat umum/kelompok nelayan). (14 Desember 2018)

Sosialisasi di Media Elektronik dan Cetak

Dalam era digital, KPU Provinsi Maluku Utara memanfaatkan media elektronik seperti televisi maupun radio untuk menyosialisasikan seluruh tahapan kepemiluan. Karena dianggap televisi dan radio sudah menjadi kebutuhan pokok setiap masyarakat terutama masyarakat Kota Ternate.

Keberadaan media cetak/massa menduduki posisi yang sangat strategis terutama dalam memberikan akses bagi mereka yang membutuhkan informasi. Sesuai sifat kodrat manusia yakni rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu, kehadiran media massa dianggap dapat membantu masyarakat dalam memberikan akses bagi

orang-orang untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, peran media pun semakin berkembang. Media tidak hanya berperan memberikan akses informasi semata, namun secara tidak sadar media dapat memengaruhi opini publik dan menggiring persepsi masyarakat sesuai tujuannya.

Pada pemilihan umum tahun 2019, KPU Provinsi Maluku Utara memanfaatkan hal itu dengan mengandeng media-media cetak maupun media online untuk menyosialisaikan seluruh tahapan pemilu serta memberikan pemahaman dan pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui iklan-iklan tentang hari pencoblosan, tata cara pindah memilih, pengenalan jenis surat suara dan lain-lain.

Penggunaan Bahan Sosialisasi

Selain sosialisasi melalui media cetak, KPU Provinsi Maluku Utara juga melakukan sosialisasi dengan mencetak berbagai bahan sosialisasi seperti baliho, spanduk, pin, gantungan kunci, stiker, payung dan lain-lain untuk dibagikan kepada masyarakat dengan maksud agar masyarakat selalu ingat waktu pelaksanaan pemungutan suara, tata cara pindah memilih dan jenis-jenis surat suara.

Media Sosial dan Website.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi berbasis internet, maka semakin penting peran media sosial sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan efek positif dalam peningkatan partisipasi pemilih. Media sosial adalah sebuah media online yang menggunakan teknologi berbasis internet yang mendukung interaksi sosial, sehingga mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif yang timbal balik. Dalam perkembangannya, media sosial menjadi penting sebagai sarana yang efektif dalam proses komunikasi politik, khususnya dalam konteks pemilu yang dapat menjadi perantara para penyelenggara dan masyarakat, masyarakat dapat membangun komunikasi jarak jauh secara masif dengan penyelenggara, oleh karena itu KPU Provinsi Maluku Utara memanfaatkan media ini dengan menyampaikan pesan-pesan serta ajakan-ajakan untuk menggunakan hak pilihnya di hari pencoblosan, memberikan edukasi dan pemahaman tentang pendidikan politik agar masyarakat nantinya dapat menggunakan hak politiknya dan tidak golput. Selain itu untuk membangun kepercayaan publik dan demi transparansi serta keterbukaan informasi pemilu, KPU Provinsi Maluku Utara pada websitenya selalu menyuguhkan berita-berita terbaru, produk hukum, dokumentasi serta dokumen pendukung untuk menciptakan pemilu yang

berkualitas dan berintegritas.

Sosialisasi di Berbagai Segmen

Pendidikan pemilih adalah salah satu bagian penting yang harus jadi perhatian KPU. Walaupun tugas ini juga semestinya menjadi perhatian partai politik sebagai peserta pemilu, ataupun pemerintah daerah sebagai stake holder. Pendidikan pemilih menjadi tanggung jawab bersama demi terciptanya pemilih cerdas untuk pemilu yang berkualitas. Bagi KPU sendiri, pendidikan pemilih merupakan upaya memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat. KPU Provinsi Maluku Utara gencar mensosialisasikan ke berbagai segmen di antaranya:

a. Segmen Pemilih Pemula

Gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih diorientasikan kepada pemilih pemula atau first time voters. Sejumlah riset menunjukkan pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih, mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilu berikutnya. Sebaliknya mereka yang tidak menggunakan hak pilih ketika pertama kali memasuki usia memilih, kecenderungannya akan melakukan hal yang serupa pada pemilu berikutnya. Oleh karen itu KPU Provinsi Maluku Utara gencar melakukan sosialisasi tatap muka dan pendidikan pemilih ke berbagai sekolah SMA/SMK yang ada di Kota Ternate.

b. Segmen Pemilih Muda

KPU Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan sosialisasi menjadikan basis ini sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.

Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum/tidak bekerja penting mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama. KPU Provinsi Maluku Utara selalu memberikan edukasi

secara terus menerus agar kepercayaan mereka terhadap pemilu sebagai instrumen demokrasi makin kuat dan mendalam. Bagi kebiasaan mereka memilih harus dipupuk dan disemai agar tidak tergerus oleh apatisme maupun pragmatisme politik yang pada akhirnya akan merusak kualitas demokrasi.

c. Segmen Perempuan

Basis pemilih perempuan menjadi salah satu sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Provinsi Maluku Utara karena mereka tidak hanya akan memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga. Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya. Perempuan yang berstatus ibu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pengetahuan, sikap dan tingkah laku anak. Pengaruh kehidupan keluarga yang didominasi oleh peran ibu baik langsung maupun tidak langsung merupakan struktur sosialisasi politik pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal.

Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan yang lebih luas.

jdih.kpu.go.id

Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Perempuan (Tatap Muka) Perkumpulan Arisan Azzahra Ternate,(2 Maret 2019)

Selain perempuan sebagai sosok sentral dalam mendidik anak, alasan lain menjadikan perempuan sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah:

- jumlah pemilih perempuan berimbang dengan jumlah pemilih laki-laki, namun kapasitasnya masih terbatas dibanding laki-laki;
- pemilih perempuan rentan dimobilisasi ketika pemilu maupun di luar pemilu;
- tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki;
- pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran-peran domestik sehingga urusan publik terabaikan, padahal banyak menyangkut kepentingan perempuan.

d. Segmen Disabilitas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggaraan pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbasan yang mereka miliki. Untuk itu, KPU Provinsi Maluku Utara gencar melakukan sosialisasi tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas ke berbagai sekolah penyandang disabilitas serta ke organisasi penyandang disabilitas. Dari hasil kerja keras dalam melakukan sosialisasi, terbukti tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Provinsi Maluku Utara mencapai 93% sebagaimana yang tergambarkan dalam diagram berikut dibawah ini :

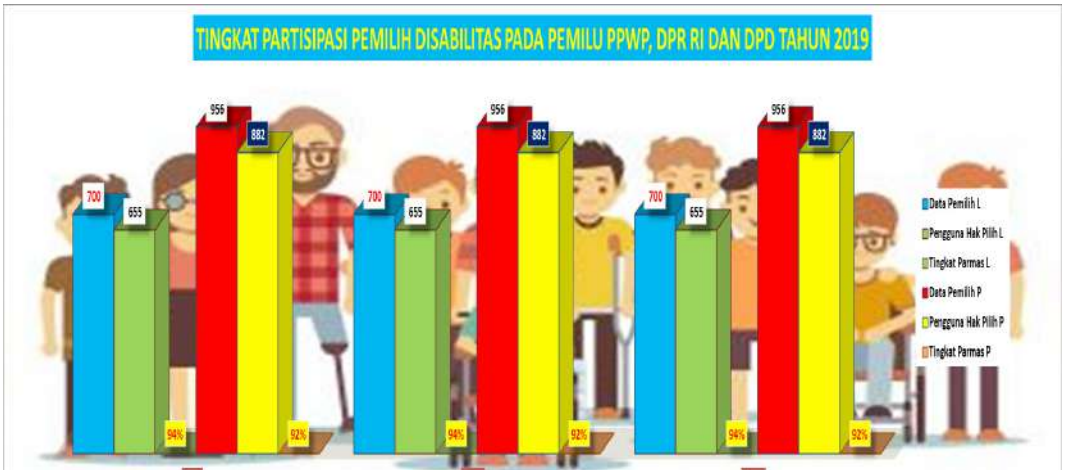

Sumber : DC1 PPWP, DPR, DPD, , Pemilu 2019

Sumber : DC1 DPRD Prov, Pemilu 2019

Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Disabilitas di SMA LB Kota Ternate

e. Segmen Warganet

Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah setiap tahun. intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi didunia maya sehingga menjadi alasan bagi KPU Provinsi Maluku Utara untuk menyasar basis warga internet sebagai basis gerakan

sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU Provinsi Maluku Utara membentuk dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperti website dan media sosial seperti twitter, facebook, dan platform media sosial lainnya. KPU Provinsi Maluku Utara berupaya mengimbangi diskursus politik, demokrasi dan pemilu di dunia maya melalui status, kicauan dan komentar-komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik.

f. Segmen Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Komunitas secara umum jauh dari aktivitas politik, tetapi mereka bukan berarti mereka miskin informasi politik. Tak jarang pula para anggota komunitas membahas isu-isu politik terkini di tengah mereka menjalankan aktivitas di komunitasnya. Komunitas juga memiliki tingkat kemandirian yang tinggi karena pada umumnya mereka sudah mapan dari aspek pendidikan, finansial dan pemikiran. Jika kita dapat merangkul dan memberi pemahaman kepada satu atau dua orang yang memiliki pengaruh di suatu komunitas maka anggota lainnya akan lebih mudah diajak untuk mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih, berdasarkan hal tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara mengandeng beberapa komunitas untuk turut mensosialisasikan dan memberikan pemahaman pendidikian politik yang santun kepada sesama anggota komunitas serta masyarakat dilingkungannya masing-masing.

Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tentunya akan sangat bermanfaat bagi beberapa pemangku kepentingan.

Manfaat terpenting dari setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah semakin banyak masyarakat umum tahu dan mengerti tentang kepemiluan sehingga Pemilu yang dilaksanakan akan lebih berkualitas. Hal paling penting lainnya adalah tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019 makin meningkat.

Sumber : DC1 PPWP, DPR, DPD, , Pemilu 2019

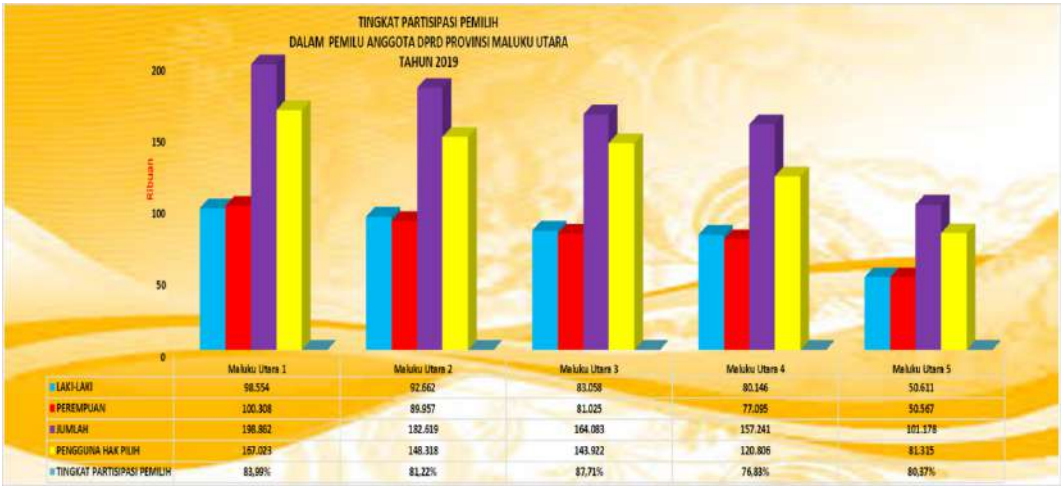

Sumber : DC1 DPRD Prov , Pemilu 2019

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu serentak tahun 2019 untuk wilayah Maluku Utara mencapai 82,79% dan melewati batas yang ditargetkan oleh KPU RI yakni 77,5%. Kenaikan partisipasi pemilih yang paling signifikan adalah pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang naik hingga mencapai 82,79%, dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan wakil Presiden sebelumnya yakni 67,36%, hal ini tentu sangat membanggakan bagi KPU Provinsi Maluku Utara atas semua usaha dan kerja keras dalam meningkatkan partisipasi pemilu pada Pemilihan Umum tahun 2019, semoga dengan capaian ini mampu memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan Pemilu yang lebih berkualitas.

Kejadian Unik yang terjadi di TPS, Pemilih datang ke TPS dengan memakai kostum super hero pada saat pemilu 2019

Lintasi Sungai, KPPS Distribusikan Logistik Pemilu ke Daerah Pedalaman

Runtuhkan Golput dengan Semangat ''Isen Mulang"

Oleh Eko Wahyu S
Anggota KPU Kalimantan Tengah

Sejarah singkat terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah setelah diresmikannya tiga Provinsi di Kalimantan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Januari 1957, Presiden Soekarno membuat keputusan untuk menambah satu Provinsi lagi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan tersebut menjadi awal peresmiaan kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri.

RTA Milono selaku Gubernur menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat residen dari Departemen Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1957, dengan keluarnya UU Darurat Nomor 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut menjadi akhir dari Jabatan RTA Milono sebagai Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah dan sekaligus penunjukan dan pengangkatan RTA Milono sebagai Gubernur Kalimantan Tengah definitif oleh Pemerintah Pusat. Dua bulan kemudian Palangka Raya ditetapkan sebagai ibukota Kalimantan tengah. ***Palangka Raya*** memiliki arti ***tempat yang suci, mulia, dan besar.*** Namun Presiden Soekarno baru meresmikan dan melakukan pemancangan tiang pertama pada tanggal 17 Juli 1957.

Pada saat itu, Provinsi Kalimantan tengah hanya memiliki 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin. Selanjutnya Kabupaten tersebut dimekarkan daerah Tingkat II yaitu menjadi 5 kabupaten :

1. Kabupaten Barito Utara dengan Ibukota Muara Teweh
2. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibukota Buntok
3. Kabupaten Kapuas dengan Ibukota Kuala Kapuas
4. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibukota Sampit
5. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibukota Pangkalan Bun
6. Kota Palangka Raya dengan Ibukota Palangka Raya

Seiring berjalannya waktu, Kabupaten yang semula hanya 5 Kabupaten dimekarkan lagi menjadi 13 Kabupaten dan 1 Kota pada tanggal 2 juli 2002. Delapan Kabupaten Baru tersebut yaitu :

1. Kabupaten Katingan dengan Ibukota Kasongan
2. Kabupaten seruyan dengan Ibukota Kuala Pembuang

jdih.kpu.go.id

3. Kabupaten Sukamara dengan Ibukota sukamara
4. Kabupaten Lamandau dengan Ibukota Nanga Bulik
5. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibukota Kuala Kurun
6. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibukota Pulang Pisau
7. Kabupaten Murung raya dengan Ibukota Puruk Cahu
8. Kabupaten Barito Timur dengan Ibukota Tamiang Layang

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Umum pada Tahun 2019 adalah Pemilihan Umum Serentak pertama kali pasca reformasi 1998 yang menyelenggarakan secara serentak atau bersama-sama Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi di Indonesia.

Pelaksanaan Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari tanggung jawab KPU Provinsi Kalimantan Tengah sendiri agar dapat menyelenggarakan proses Pemilu dengan suasana kondusif dan lancar. KPU Provinsi Kalimantan Tengah diharakan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih. Partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu tergambar dari banyak tidaknya masyarakat yang memilih golput. Golput dapat juga disebut apatis (acuh), tidak berpartisipasi dengan kegiatan memilih pemimpin atau wakil rakyat. Perilaku acuh tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir setiap Pemilu ikut berpartisipasi memilih, namun merasa bahwa hasil Pemilu tidak memberikan banyak perbaikan nasib.

Tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu 2019 lebih berat karena semakin kompleksnya penyelenggaraan Pemilu. Untuk pertama kalinya, Indonesia mengadakan pemilihan Presiden (pilpres) dan legislatif secara bersamaan. Pemilih akan berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS. Butuh kecermatan pemilih untuk memastikan tata cara pemberian suara yang benar di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih massif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah atau *invalid vote* dalam Pemilu.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, agar Penyelenggara dan masyarakat bisa berpartisipasi untuk meningkatkan tingkat pemilih agar tidak golput dan bisa menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hal tersebut KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih agar masyarakat

jdih.kpu.go.id

ikut berpartisipasi menuju bangsa yang benar-benar adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta semangat *Isen Mulang* runtuhkan Golput.

Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dilatar belakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan Pemilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada Pemilu Nasional misalnya, yaitu pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%), pemilu 2009 (71%), pemilu 2014 (73%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, maladministrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah muncul juga dilatar belakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.

Pemilu 2019 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi pemilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud.

Pada Pemilu 2019 berjalan dengan lancar, tertib dan aman di Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat partisipasi untuk Pileg tahun 2004 mencapai 78.51%, tahun 2009 mencapai 69.10%, tahun 2014 mencapai 72.54% dan *tahun 2019 mencapai* ***78.99%.*** sedangkan Pilpres tahun 2004 (1) mencapai 71.38% dan tahun 2004(2) mencapai 68.65%, tahun 2009 mencapai 65.99%, tahun 2014 mencapai 64.50 dan *tahun 2019 mencapai* ***79.95%***. Meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan ini didapatkan dengan soliditas dan kerja-kerja maksimal yang dilakukan oleh penyelenggara dari seluruh tingkatan dan

kerjasama aktif dengan *stakeholder* dan berbagai pihak lainnya.

Dalam hal pelaksanaan Sosialisasi, Kalimantan Tengah memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Faktor geografis wilayah dan penduduk yang tersebar sangat jarang di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang luasnya mencapai 1,2 kali Pulau Jawa (luas Kalimantan Tengah 153.564 km^2 dan luas Pulau Jawa 128.297 km^2) wilayah terluas ke dua di Indonesia setelah Papua menjadi tantangan terbesar KPU. Tantangan lain adalah sarana transportasi dan komunikasi yang di daerah-daerah tertentu termasuk masih sulit diperoleh dengan baik.

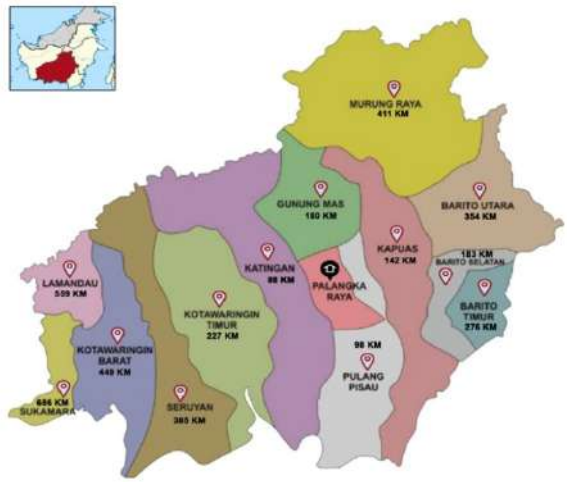

Keterangan : Jarak tempuh dari Ibu Kota Provinsi dengan Perjalanan Darat

Geografi terletak di Daerah Khatulistiwa antara 0’44’45 LU s/d 3’47’47’70 dan 110^19 s/d 115^47^36^ BT. Batas Daerah:

1. Sebelah Timur : Kaltim dan Kalsel
2. Sebelah Barat : Kalbar
3. Sebelah Utara : Kalbar dan Kaltim
4. Sebelah Selatan : Laut Jawa.

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif Tahun 2019 dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019. Pada Pemilihan Umum 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan peran dan partisipasi masyarakat untuk ikut menyukseskan Pemilihan Umum ini. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, efektif, melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

April Memanggil

Sebulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 KPU RI semakin gencar menyuarakan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih yang bijak. Segala macam cara yang dilakukan bukan hanya melalui poster, penyuluhan hingga iklan berbayar. KPU juga menggunakan cara baru melalui media audio visual lainnya berupa film panjang.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah tampaknya tak pernah kehabisan cara untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terlebih pemilih pemula dan pemilih muda. Hal ini terlihat, saat KPU Provinsi Kalimantan Tengah di bumi Pancasila (sebutan untuk Kalteng) Khusus di Kota Palangka Raya melaksanakan berbagai kegiatan positif. Selain mengelar sosialisasi melalui diskusi, lembaga penyelenggara pemilu ini juga punya cara jitu untuk membuat para generasi milennial melek dengan politik. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar acara nonton bareng film "Suara April" di Studio 21 Palma Palangka Raya. Acara nonton bareng diikuti oleh para ketua dan anggota KPU, forkopimda, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) dan mahasiswa di Kota Palangka Raya.

Sebelum nonton bareng dimulai dijelaskan terlebih dahulu (sosialisasi) melalui film berjudul ***"Suara April***" ini merupakan salah satu upaya KPU untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, khususnya pemilih milenial dan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dengan adanya media film seperti ini dapat berdampak positif agar masyarakat menyalurkan aspirasi, dan menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak serta meruntuhkan angka Golput.

Mendirikan Posko Pindah Memilih

Untuk ikut berperan dalam Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) serentak yang dicanangkan KPU RI pada 17 Oktober 2018, KPU Kalimantan Tengah juga membuka posko-posko pindah memilih di berbagai tempat. Misalnya, KPU Kalimantan Tengah membuka posko untuk memudahkan mahasiswa mengurus pindah memilih, baik yang dari luar Kota Palangka Raya atau luar Provinsi Kalimantan Tengah. KPU Provinsi Kalimantan Tengah memetakan salah satu kelompok pemilih penyumbang 'golput' adalah mahasiswa dari luar Kota Palangka Raya dan luar Provinsi Kalimantan Tengah. Mengingat waktu libur hanya satu hari, dikuatirkan mahasiswa enggan pulang kampung saat pemungutan suara. Selain jarak yang jauh juga masalah biaya transpor bagi mereka. Mahasiswa juga masih kurang mendapatkan informasi tentang waktu, lokasi dan mekanisme pengurusan pindah memilih. Karena itu, KPU kabupaten/Kota melakukan aksi membuka posko-posko layanan pindah memilih di setiap kampus di masing-masing Kabupaten/Kota.

Tembok selanjutnya yang harus diruntuhkan adalah para pegawai/pekerja (Perkebunan Swasta Besar). Banyaknya perkebunan sawit dan pertambangan di Kalimantan Tengah yang memperkerjakan/melibatkan banyak orang sehingga merupakan suatu tantangan tersendiri dalam memberikan pemahaman pentingnya hak pilih yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dan juga memberikan pemahaman kepada para pemilik/manajemen perusahaan agar memberikan hari libur/ waktu bagi para bekerja di PBS tersebut untuk dapat datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Upaya KPU Kabupaten/Kota adalah berusaha salah satunya bekerja sama dengan pemerintah daerah. KPU Kabupaten/Kota meminta untuk difasilitasi oleh pemerintah daerah agar dapat mengumpulkan para pemilik/ manajemen PBS dalam rangka pendataan Pekerja dan upaya agar para pekerja yang nantinya pada tanggal 17 April 2019 dapat datang ke TPS serta menggunakan hak pilihnya.

Selain itu karena sibuk mengurus pekerjaan, mereka kadang kala lupa dengan urusan pemilu. Bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak mengetahui mekanisme pengecekan data pemilih secara *online.* Akibatnya sebagian dari mereka tidak mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebagai syarat untuk mengurus pindah pemilih. Dalam upaya meruntuhkan angka golput maka KPU Kabupaten/Kota berupaya memperkenalkan aplikasi Pemilu 2019 dan memastikan mereka sudah terdaftar sebagai pemilih di daerah asalnya.

Tidak luput pula KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kota Palangka Raya membuka Posko di area *Car Free Day (CFD)* digelar setiap minggu di alun-alun kota Palangka Raya atau Bundaran Besar (BB), bak gula yang manis, laris diserbu warga *kota cantik (sebutan untuk Kota Palangka Raya)* sebagai satu ruang /tempat interaksi dengan warga kota yang membutuhkan informasi / jendela kepemiluan.

Car Free Day (CFD) di Goyang Zumba

Sejak sebelum dimulainya masa kampanye, hingga mendekati hari pemilihan di Pemilu Serentak 17 April 2019 KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah melalui media sosial, madia daring, media cetak, media elektronik maupun sosialisasi melalui secara tatap muka, demi meningkatkan kesadaran dan meruntuhkan tembok Golput masyarakat akan pemilu dan juga partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak.

Di hari Puncak sosialisasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah pun melaksanakan kegiatan yang tak kalah menariknya. Mengambil tempat di halaman Gedung KONI Kalteng, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggelar senam zumba diselingi dengan sosialisasi hari pemungutan suara di kawasan *car free day* (CFD) di

Kota Palangka Raya. Sosialisasi yang melibatkan banyak komunitas yang ada dikota Palangka Raya di awali dengan zumba bareng dengan masyarakat sekitar alun-alun (Bundaran Besar) dan juga penampilan dari berbagai komunitas.

Sasaran Pemilih Perempuan

Banyak cara yang bisa dilaksanakan untuk menggaet masyarakat melek terhadap politik dan juga pelaksanaan Pemilu 2019. KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menyongsong Serentak 2019, lembaga Penyelenggara ini mensosialisasikannya melalui Lomba Senam Kreasi "Jinggle Pemilu 2019" yang dilaksanakan di Taman Pasuk Kameluh (Kantong Semar) Palangka Raya.Sebelum lomba dimulai dilaksanakan terlebih dahulu sosialisasi tentang Pemilu Serentak 2019 dan juga di sela-sela perlombaan yang di pandu oleh seorang host yang energik, sehingga Peserta dan masyarakat yang menyaksikan perlombaan diberikan terlebih dahulu informasi-informasi tentang kepemiluan. Para peserta sangat antusias mengikuti Lomba Senam Kreasi "Jinggle Pemilu 2019". Dengan cara yang berbeda dan tidak membosankan ini diharapkan dapat menjadi komunikasi agar lebih interaktif dengan masyarakat karena masyarakat dapat tetap senang dengan bernyanyi dan juga menjadi tahu pesan-pesan informasi mengenai pemilu.

Kaum hawa juga tidak luput dari target KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan partisipasi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Organisasi wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilih perempuan menjadi salah satu segmen pemilih strategis dalam sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU. Dilihat dari grafik persentasenya, tingkat partisipasi perempuan dalam pemilu dari tahun ke tahun terus meningkat. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan kepada ibu-ibu untuk dapat menularkan pengetahuan tentang kepemiluan yang di dapat kepada keluarga, masyarakat sekitar. Karena keluarga merupakan masyarakat terkecil dalam suatu negara dan bangsa.

Pemilih perempuan harus ambil bagian dalam menyukseskan pemilu dan dapat turut serta membantu mengingatkan akan pentingnya pemilu baik tentang hari pemungutan suara tanggal 17 april 2019, pentingnya perekaman KTP Elektronik (bagi yang belum perekaman), 5 jenis pemilihan serentak termasuk warna untuk memudahkan mengenal jenis pemilihan, datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, dilingkungan rumah maupun tempat beraktivitas atau kerja. Penting juga untuk semua pihak dalam mengawal proses pungut hitung di TPS serta rekap hitung di PPK dan KPU. Hal ini untuk menjaga bahwa surat suara yang digunakan dan dinyatakan sah dapat tersalur sesuai dengan peruntukannya.

Menyasar Pemilih Millenial

Posisi generasi milenial sangat diperhitungkan pada tahun-tahun politik sekarang ini. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih milenial mencapai 70 juta-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Artinya sekitar 35-45 % memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu dan menentukan siapa pemimpin pada masa mendatang. Mereka adalah bagian dari penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan jumlah yang cukup signifikan tersebut sangat disayangkan apabila tidak digunakan dalam Pemilu. Dengan peran generasi milineal sebagai pemilih yang memiliki sumbangsih terhadap suara hasil pemilihan yang cukup besar, maka posisi generasi milenial menjadi sangat strategis untuk menjadi objek sasaran pemungutan suara.

Dilihat dari sisi usia, sebagian besar mereka diantaranya adalah pengguna sosial media. Gaya hidup generasi milenial terlihat dari mereka yang tidak bisa lepas dari teknologi informasi, terutama internet. Karakter generasi milenial ialah melek informasi. Hidupnya lebih banyak dicurahkan untuk berselancar didunia maya. Oleh karena itu dalam menjangkau para pemilih yang masuk dalam generasi milenial, KPU Provinsi Kalimantan Tengah merangkul dan melibatkan para admin media sosial dan media massa dalam upaya untuk meningkatkan partisifasi masyarakat khususnya pemilih pemula dari kalangan pemilih milineal. KPU Provinsi Kalimantan Tengah membuat suatu kegiatan dengan tajuk “Milennial Voter Road to Election 2019” dengan harapan para admin media sosial dan media massa dapat mendongkrat angka partisipasi pemilih pemula dari kalangan pemilih mileneal dikarenakan jumlah pengguna media sosial dari kaum milennial cukup banyak di Kalimantan tengah serta dengan memerhatikan followers atau pengikutnya. Salah satu target kegiatan adalah mereka yang saat ini sedang bersekolah atau kuliah di luar tempat asal. Meski tidak semua kaum milineal berada di domisili asalnya tapi tidak menjadi alasan mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Menyasar Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu. Mereka bisa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun namun sudah menikah. Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17 s/d 21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengelar kegiatan yang menyasar pemilih pemula yang kali ini jadi sasaran adalah Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang ada di Palangka Raya. Ratusan mahasiswa dimasing-masing Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta antusias mengikuti kegiatan "Talk Show Pemilu 2019" yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Thema Pemilih (Muda) Cerdas Pemilu Berkualitas. Para insan cendekia terlihat begitu bersemangat mengikuti kegiatan. Mereka pun turut aktif dengan menjawab berbagai pertanyaan seputar Pemilu. Apalagi, jika bisa menjawab maka akan diberikan souvenir. Kita mengajak kepada para pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu dan menjadi agen Pemilu untuk bisa aktif menyampaikan materi tentang pemilu baik bagi kerabat, keluarga hingga di media sosial.

Ke depan bukan lagi hanya sebatas pemilih saja melainkan lebih aktif lagi mensosialisasikan tentang Pemilu di media sosial masing-masing. Diharapkan pula kaum muda para generasi milenial lebih aktif lagi dalam proses demokrasi dan jangan sampai kehilangan hak pilih, terlebih apabila hak suara disalahgunakan.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan sosialisasi di kawula muda yang memiliki bakat dan minat dalam bermain musik dan bernyanyi dalam bentuk "*Indenpendence Music on the Street Road to Election* 2019 bersama komunitas musik Kota Palangka Raya. Dalam kegiatan ini para generasi milenial diajak untuk mengekspresikan diri kearah yang positif serta memahami tentang Pemilu 2019.

Merangkul Tokoh Agama, Masyarakat dan Wanita

Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 ditujukan kepada semua elemen masyarakat. Bahkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh wanita pun dirangkul oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu seluruh pihak terkait untuk saling bekerja sama, berkoordinasi dan bersinergi dalam membangun kesadaran politik masyarakat sehingga mengetahui hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara agar nantinya dapat meruntuhkan angka golput. Dengan harapan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh wanita dapat menggerakan warganya dan anggotanya untuk menyalurkan hak pilihnya dengan baik pada Pemilu 2019.

Menembus Daerah Pedalaman

KPU Provinsi Kalimantan Tengah giat melakukan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat umum. Kegiatan sosialisasi ini sebagai salah satu upaya KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Kabupaten/Kota, Relawan Demokrasi

(Relasi) dan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) Provinsi Kalimantan tengah dalam memberikan pemahaman tentang Pemilu 2019 dan meningkatkan partisipasi masyarakat di ***Daerah Kecil***. Sosialisasi perlu menyasar ke semua lapisan masyarakat, khususnya warga di daerah terpencil karena daerah tersebut dimungkinkan minim menerima informasi sehingga harus mendapat prioritas sebagai target sasaran sosialisasi.

Upaya dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Pemilu dan pentingnya hak pilih, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi tidak hanya terfokus pada daerah-daerah perkotaan tapi sampai daerah-daerah kecil/terjauh/terisolir juga menjadi sasaran sosialisasi, bekerja sama dengan pihak Relawan Demokrasi (Relasi) yang tersebar di Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang Pemilu dan luasnya wilayah dengan persebaran penduduk yang tidak merata tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meruntuhkan tembok Golput

Salah satu contoh melaksanakan kegiatan sosialisasi ke desa tapal batas yaitu Desa Dambung di Kecamatan Dusun Tengah. Desa ini hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda dua dengan ban rimba. Desa Dambung pada pemilu 2019 tergolong dalam kategori “rawan”. Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan ini memiliki DPT hanya 136 orang dengan 1 TPS, karena kondisi desa ini menjadi perhatian khusus dari KPU Kabupaten Barito Timur dan Relawan untuk menjadwalkan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih ke Desa Dambung. Kegiatan Sosialisasi ini dapat terwujud dengan bantuan dan kerjasama dari Kapolres Barito Timur Bapak AKBP Zulham Effendy, S.I.K., M.H yang memfasilitasi dengan bantuan 45 sepeda motor trail dan1 unit mobil *double garden kompoy*-an menuju desa Dambung. Dan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan terbayarkan dikarenakan baru kali ini desa Dambung mendapatkan sosialisasi tentang kepemiluan dari KPU Kabupaten Barito Timur dan Relawan Demokrasi berserta Kapolres Kabupaten Barito Timur dan Rombangan.

KPU Barito Timur dan relawan demokrasi menuju Desa Dambung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur

Mendengar Sosialisasi Pemilu di Sela-sela Gemuruh Mesin Penyedot Emas

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan terjauh yang ada ada di Kabupaten Seruyan, yakni di Kecamatan Suling Tambun. Untuk dapat sampai ke Kecamatan Suling Tambun harus menempuh perjalanan selama 2 (dua) hari, menggunakan mobil *Hilux jenis 4x4*, dengan medan yang sangat berat kemudian dilanjutkan dengan *speed boat* melalui sungai memakan waktu 3 jam. Dan hampir semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah memiliki daerah kecil/pedalaman.

Ini salah satu kelompok pekerja tambang emas yang didatangi untuk diberikan sosialisasi kepemiluan di Kecamatan Sumber Barito. Sosialisasi dilakukan di sela-sela kesibukan para pekerja diantara gemuruh suara mesin penyedot emas yang sedang menyala. Meskipun keadaan seperti itu, para pekerja sangat antusias dengan informasi yang sampaikan. Mereka sebagian besar menghentikan kegiatannya dan ada juga yang tetap melanjutkan kegiatannya sambil mendengarkan informasi yang disampaikan. Untuk menjangkau tempat-tempat yang seperti ini, menggunakan kapal motor kecil yang biasa disebut CIS (perahu motor kecil). Menggunakan CIS memiliki resiko yang sangat besar terhadap keselamatan jiwa tim dan staf yang ikut serta dalam kegiatan karena harus melalui riam yang cukup terjal. Oleh karena tantangan itu sangat bangga dan salut kepada tim dan staf yang berani melewati rintangan ini demi tersampaikannya informasi kepemiluan kepada masyarakat

Selain pekerja tambang, dilakukan juga sosialisasi kepada karyawan perusahaan batu bara di Kecamatan Tanah Siang Selatan. Kesibukan bekerja

pada mereka membuat sulit untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan. Melakukan sosialisasi kepada mereka dengan mengunjungi perusahaannya merupakan solusi untuk menyebarluaskan informasi pemilu.

Sosialisasi Bersama Penambang emas

Sosialisasi dengan Konsep Ritual Lewu Hante

KPU Kabupaten Barito Timur menjadi salah satu tempat bagi team dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat umum di Kawasan Adat Kegiatan ini dilaksanakan di Kawasan Adat Paju Epat di Desa Telang Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur yang merupakan citus sejarah serta rumah pertama bagi suku dayak maanyan Paju Epat.

Setelah mendapat izin dari Camat Paju Epat, kemudian berkoordinasi dengan Kepala Desa Telang Bapak Rianto untuk memfasilitasi kegiatan tersebut sehingga dapat dilaksanakan di “Lewu Hante” (Rumah Besar) dengan daya tampung 400 orang. Ternyata tidak bisa sembarangan untuk bisa melakukan kegiatan di *Lewu Hante*, harus ada izin bukan hanya secara administrasi tetapi ada ritual adatnya. Ritual adat dilakukan sehari sebelum kegiatan dan pada hari H sebelum kegiatan dimulai dengan menyampaikan maksud dan meminta izin kepada leluhur untuk mengadakan kegiatan di lewu hante.

Kegiatan yang sudah dengan apik disusun dihadiri oleh Camat Paju Epat dan jajarannya, kapolsek dan kepala desa, masyarakat adat Desa Telang dan Siong serta relawan demokrasi. Dalam Sambutannya Camat Paju Epat mengapresiasi kegiatan ini dan mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilu untuk ikut berperan aktif, tidak termakan hoax dan isu SARA dalam pelaksanaan pemilu yang hanya tinggal hitungan hari dan menyimak dengan baik sosialisasi ini.

Materi sosialisasi dipaparkan melalui kolaborasi antara team dari Provinsi dan Komisioner Parmas Barito Timur dengan metode pembelajar orang dewasa untuk tidak menggurui dan berupaya agar peserta memahami dan mengerti terhadap kepemiluan.

Pada kesempatan sosialisasi ini Damang Adat Paju Epat Bapak Dalius mengucapkan terima kasih, karena kegiatan ini dapat melestarikan kearifan lokal dan memberdayakan ***"lewu hante"*** (rumah besar) sebagai sarana berkumpul untuk meningkatkan peranan dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, karena turut serta dalam menyukseskan Pemilu 2019 dan menciptakan suasana damai di Barito Timur. Damang adat berpesan kepada masyarakat adatnya untuk berprilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum. Siapapun nantinya yang akan terpilih mereka adalah pemimpin kita.

Sosialisasi ke Daerah Rawan Banjir

Wilayah Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana banjir tahunan yang ada di Kalimantan Tengah, bahkan jika intensitas hujan tinggi maka DAS katingan pun dapat dipastikan akan meluap yang mengakibatkan beberapa desa diwilayah Kecamatan Katingan Tengah dan sekitarnya akan berdampak banjir yang mencapai ketinggian dua meter bahkan pada daerah dataran rendah akan lebih tinggi lagi. Walaupun banjir di wilayah tersebut tidak memakan waktu lama debit air akan kembali surut, biasanya sekitar satu pekan atau dalam waktu 7 hari paling lama air sungai katingan akan kembali normal dan paling cepat 4 hari jika intensitas hujan mulai berkurang air sungai akan cepat kembali normal, meski demikian Pada Tahun 2017 saja wilayah Tumbang samba dan sekitarnya mengalami 3 kali dampak banjir besar.

Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi pemilu serentak 2019, wilayah Tumbang Samba dan sekitarnya yang rawan terkena dampak bencana banjir Tahunan, menjadi perhatian khusus oleh KPU Kab. Katingan dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Pada umumnya. Yaitu dengan turun langsung di Kecamatan Katingan Tengah Tumbang Samba bertempat di ruang pertemuan Desa Samba Bakumpai melakukan sosialisasi pendidikan Pemilih kepada warga masyarakat setempat.

Sosialisasi di Daerah Lokalisasi

Lokalisasi juga tidak luput dari sasaran sosialisasi, karena tempat khusus dan pemilihnya dikategorikan sebagai pemilih marginal. KPU Kalteng melaksanakan sosialisasi di lokalisasi di Kabupaten Muara Teweh. Rata-rata masyarakat penghuni kawasan lokalisasi adalah mereka yang berada di luar daerah.

Menyasar Pemilih Disabilitas

Salah satu agenda kegiatan sosialisasi KPU Kalteng dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Agar sosialisasi tercapai, KPU Kalteng menggunakan penerjemah bahasa isyarat.

Tingkat Partisipasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Kab/Kota	Daftar Pemilih (DPT)			Tingkat Partisipasi Pemilih (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Katingan	59.050	54.217	113.267	78,85%	80%	79,54%
2	Gunung Mas	42.233	38.491	80.724	77,84%	80%	78,67 %
3	Palangka Raya	90.404	91.498	181.902	82,75%	85%	83,78%
4	Kotawaringin Timur	141.783	132.406	274.189	77,38%	78%	77,64%
5	Seruyan	58.386	52.024	110.410	73,43%	73%	73,22%
6	Kotawaringin Barat	92.230	86.825	179.055	79,49%	81%	80,42%
7	Lamandau	35.639	30.736	66.375	73,62%	76%	74,83%
8	Sukamara	20.268	18.521	38.789	88,87%	88%	88,24%
9	Barito Selatan	48.146	46.846	94.992	82,57%	85%	83,56%
10	Barito Timur	38.708	37.773	76.481	88,90%	89%	89,13%
11	Barito Utara	53.537	49.837	103.374	76,70%	77%	77,05%
12	Murung Raya	39.944	36.803	76.747	85,94%	85%	85,50%

No	Kab/Kota	Daftar Pemilih (DPT)			Tingkat Partisipasi Pemilih (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
13	Kapuas	133.528	128.401	261.929	75,37%	79%	77,06%
14	Pulang Pisau	49.154	45.836	94.990	80,96%	85%	82,74%
	Total	**903.010**	**850.214**	**1.753.224**	**80,51%**	**82%**	**81,21%**

Tingkat Partisipasi pada Pemilu Anggota DPR RI Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Kab/Kota	Daftar Pemilih (DPT)			Tingkat Partisipasi Pemilih (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Katingan	59.050	54.217	113.267	77,97%	80%	78,94%
2	Gunung Mas	42.233	38.491	80.724	78,12%	80%	7 8,87%
3	Palangka Raya	90.404	91.498	181.902	81,99%	84%	83,08%
4	Kotawaringin Timur	141.783	132.406	274.189	75,51%	77%	76,19%
5	Seruyan	58.386	52.024	110.410	69,63%	70%	70,00%
6	Kotawaringin Barat	92.230	86.825	179.055	78,64%	81%	79,75%
7	Lamandau	35.639	30.736	66.375	71,38%	75%	73,04%
8	Sukamara	20.268	18.521	38.789	83,66%	85%	84,26%
9	Barito Selatan	48.146	46.846	94.992	82,36%	84%	83,41%
10	Barito Timur	38.708	37.773	76.481	88,01%	89%	88,53%
11	Barito Utara	53.537	49.837	103.374	75,56%	77%	76,36%
12	Murung Raya	39.944	36.803	76.747	85,04%	85%	84,95%
13	Kapuas	133.528	128.401	261.929	75,13%	79%	76,88%
14	Pulang Pisau	49.154	45.836	94.990	80,17%	84%	82,23%

	Total	903.010	850.214	1.753.224	77,93%	80%	78,99%

Daftar Tingkat Partisipasi pada Pemilu Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Kab/Kota	Daftar Pemilih (DPT)			Tingkat Partisipasi Pemilih (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Katingan	59.050	54.217	113.267	7 7,97%	80%	7 8,94%
2	Gunung Mas	42.233	38.491	80.724	78,12%	80%	78,87%
3	Palangka Raya	90.404	91.498	181.902	81,99%	84%	83,08%
4	Kotawaringin Timur	141.783	132.406	274.189	75,65%	77%	76,34%
5	Seruyan	58.386	52.024	110.410	69,63%	70%	70,00%
6	Kotawaringin Barat	92.230	86.825	179.055	78,64%	81%	79,75%
7	Lamandau	35.639	30.736	66.375	71,31%	75%	73,00%
8	Sukamara	20.268	18.521	38.789	83,66%	85%	84,26%
9	Barito Selatan	48.146	46.846	94.992	82,36%	84%	83,41%
10	Barito Timur	38.708	37.773	76.481	88,18%	89%	88,71%
11	Barito Utara	53.537	49.837	103.374	75,56%	77%	76,36%
12	Murung Raya	39.944	36.803	76.747	85,10%	85%	84,99%
13	Kapuas	133.528	128.401	261.929	75,13%	79%	76,88%
14	Pulang Pisau	49.154	45.836	94.990	80,17%	84%	82,23%
	Total	903.010	850.214	1.753.224	77,95%	80%	79,02%

Tingkat Partisipasi pada Pemilu DPRD Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Kab/Kota	Daftar Pemilih (DPT)			Tingkat Partisipasi Pemilih (%)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Katingan	59.050	54.217	113.267	77,84%	80%	78,85%
2	Gunung Mas	42.233	38.491	80.724	79,24%	80%	79,42%
3	Palangka Raya	90.404	91.498	181.902	81,68%	84%	82,77%
4	Kotawaringin Timur	141.783	132.406	274.189	75,29%	77%	76,04%
5	Seruyan	58.386	52.024	110.410	69,36%	70%	69,77%
6	Kotawaringin Barat	92.230	86.825	179.055	78,65%	81%	79,78%
7	Lamandau	35.639	30.736	66.375	71,25%	75%	72,92%
8	Sukamara	20.268	18.521	38.789	83,41%	85%	84,09%
9	Barito Selatan	48.146	46.846	94.992	82,30%	84%	83,38%
10	Barito Timur	38.708	37.773	76.481	88,10%	89%	88,66%
11	Barito Utara	53.537	49.837	103.374	75,46%	77%	76,25%
12	Murung Raya	39.944	36.803	76.747	84,80%	85%	84,73%
13	Kapuas	133.528	128.401	261.929	75,11%	79%	76,86%
14	Pulang Pisau	49.154	45.836	94.990	80,09%	84%	82,15%
	Total	903.010	850.214	1.753.224	77,79%	80%	78,88%

Sosialisasi Pemilu di Pedalaman Way Haru dan Kuala Mesuji

Oleh: Antoniyus
Anggota KPU Provinsi Lampung

Pengantar

Provinsi Lampung, terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kotamadya. Hampir di semua kabupaten yang terletak di ujung selatan pulau Sumatera ini, memiliki daerah pedalaman.

Ada dua titik lokasi di dua kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki daerah pedalaman dengan geografis yang sulit ditempuh yang menjadi tempat untuk penelitian dan sebagai sumber primer dalam tulisan ini, terkait dengan hipotesa, berhasil serta meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 lalu.

Dua daerah di Provinsi Lampung itu yakni, Kuala Sindang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji dan Wayharu, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat.

Partisipasi masyarakat di dua daerah pedalaman itu, menarik dianalisis karena meningkat cukup signifikan pada Pemilu 2019 setelah KPU Provinsi Lampung melakukan beberapa inovasi dan strategi dalam sosialisasi ke tengah masyarakat. Selain membentuk relawan demokrasi, komisioner KPU Lampung juga berkunjung dan mendatangi langsung daerah-daerah pedalaman tersebut, melibatkan PPS dan tokoh masyarakat secara lebih intensif sebagai ujung tombak suksesnya pemilu di Provinsi Lampung.

Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu, penting untuk terus ditingkatkan oleh semua elemen masyarakat. Terutama bagi penyelenggara dan peserta Pemilu. Sebab, partisipasi masyarakat merupakan parameter yang paling substansial dan sangat penting untuk keberhasilan demokrasi, disebut juga sebagai syarat mutlak untuk terwujudnya pemilu yang adil serta berintegritas[41].

[41] Ramlan Surbakti; "*Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*", *Kompas, 30 Juli 2014*

Didorong dari pemahaman akan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang adil, berintegritas dan terus meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi. Daerah-daerah di pedalaman mesti diperhatikan secara lebih ekstra.

Bagi masyarakat pedalaman, sempat muncul anggapan dan pendapat; "Pemilu merupakan ajang memilih kucing dalam karung karena tidak ada yang peduli dengan warga pasca pemilu[42]. Elit politik, dianggap hanya butuh suara ketika pemilu dan lupa pada warga di pedalaman pasca hajatan demokrasi itu selesai. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan Pemilu 2019 lalu[43]. Selain penyelenggara pemilu menggelar sosialisasi, melibatkan tokoh masyarakat, beberapa peserta pemilu juga menggelar berbagai kampanye di pelosok-pelosok desa. Termasuk di dalamnya, di Pekon Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat dan di Desa Kuala Sindang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji yang menjadi kajiurai pada tulisan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Judul penelitian ini mengambil tema, "Keberhasilan Meningkatkan" yang berarti juga, sukses dalam sebuah tugas, menjadi lebih baik dan "meningkatkan". Artinya, secara simultan "berhasil" membawa "perbaikan" di bidang, "Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019" lalu.

Daerah pedalaman, dimaksudkan sebagai sebuah permukiman masyarakat yang berada di pelosok desa. Pekon Way Haru misalnya, mencapai lokasi desa itu bisa memutar dengan menunggu laut surut atau mendaki lewat jalan tanah yang berlumpur dengan hanya bisa ditempuh memakai sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Mengikatkan rantai besi di dua roda sepeda motornya. Jika ingin masuk ke pekon itu, hanya ada jasa ojek sebagai transportasi utama dengan ongkos sampai Rp.500 ribu per-orang. Begitu juga dengan Desa Kuala Sindang di Mesuji, harus menyeberangi muara atau sungai menggunakan perahu.

Sementara, makna "partisipasi" sendiri memiliki beberapa pengertian. Jika ditinjau dari asal kata "participation" yaitu, kegiatan yang membangkitkan perasaan dan ikut serta ambil bagian dalam sebuah kegiatan. Sehubungan dengan "Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019" merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan pada proses, sejak dari tahapan, pembentukan kepanitiaan pemilihan yang dalam arti, ikut mengawasi netralitas dan integritas penyelenggara Pemilu di daerah pedalaman yang ada di Provinsi Lampung. Sampai dengan terlibat aktif untuk memberikan hak pilihnya

[42]Wawancara dengan Pak Anwar, tokoh masyarakat Pekon Way Haru.

[43]Wawancara dengan Pak Zainan, mantan anggota PPK Bengkunat.

jdih.kpu.go.id

sesuai dengan pilihan mereka masing-masing dan berlangsung secara adil, jujur, serta rahasia.

Jika ditilik pada definisi partisipasi masyarakat sendiri, menurut Teguh Yuwono dalam buku; "*Manajemen Otonomi Daerah; Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*." (2001:124), harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat ikut serta dan memiliki motivasi. Dimana terdapat beberapa rincian tentang partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
4. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.[44]

Dari pemaknaan partisipasi masyarakat tersebut di atas, penulis menarik benang merah, terhadap keputusan masyarakat pada ikut serta menyukseskan Pemilu 2019. Terutama di daerah-daerah pedalaman. Meski pun terdapat beberapa fakta, banyak daerah di pedalaman yang partisipasi masyarakatnya dalam menggunakan hak pilih meningkat. Seperti di Pulau Tabuan, Kabupaten Tanggamus, dari partisipasi 69,50 persen pada Pemilu 2014 dan jadi 81,20 persen pada Pemilu 2019[45]. Namun, daerah tersebut tidak menjadi pembahasan utama dalam makalah singkat ini.

Sebagai upaya mewujudkan keberhasilan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019, KPU Provinsi Lampung berinisiatif dan mengembangkan kreatifitas dari seluruh pemangku kepentingan agar terlibat

[44]Teguh Yuwono, editor dalam buku; "*Manajemen Otonomi Daerah; Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*." (Hal.124)

[45] Wawancara mendalam dengan Ketua PPK Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Bahyuti yang membawahi Pulau Tabuan. Ada 10 TPS dengan mata pilih 2600, dengan pemilih 2002. Sekitat 77 persen. Pemilu sebelumnya, partisipasi masyarakat di Pulau Tabuhan hanya sekitar 65 persen.

dalam beragam sosialisasi kepemiluan[46].

Partisipasi Masyarakat di Daerah Pedalaman Lampung pada Pemilu 2019 ini, memiliki pengertian, sebagaimana sebagaimana diungkapkan M. Slamet dalam buku; "*Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*" yang menyebutkan; terdapat tiga konsep utama partisipasi dalam masyarakt yang demokratis. Yaitu, *Pertama*, partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada "memengaruhi" dan "mendudukkan wakil-wakil rakyat" atau "memilih kepala daerah, DPD dan Presiden-Wakil Presiden" dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses kepemerintahan itu sendiri.

Kedua, partisipasi sosial (*social participation*) partisipasi ditempatkan sebagai *beneficiary* atau pihak di luar proses pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus kepemiluan.

Ketiga, partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*) yang menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Partisipasi warga juga telah mengalihkan konsep partisipasi dari sekedar kepedulian menjadi bentuk keikutsertaan.

METODE PENULISAN

Penelitian yang berjudul, menjadi semacam kesimpulan ini; "Keberhasilan Meningkatkan" sengaja penulis pilih, sebagai diksi yang meski pun terkesan subjektif, namun mewujudkan gambaran **data skunder** dari dokumen KPU.
Sementara itu, **data primer** seperti wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang ikut menjadi saksi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 lalu, tetap kami pergunakan untuk mencari faktor-faktor yang memengaruhi meningkatnya jumlah partisipasi pemilih. Terutama di dua lokasi yang jadi objek penelitian ini:

1. Desa Kuala Sindang, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji

2. Pekon Wayharu Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif.

[46]Wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono.

jdih.kpu.go.id

A. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Banyak daerah pedalaman di Provinsi Lampung. Baik itu yang berada di pulau-pulau kecil (Tabuan, Pulau Sekopong, Legundi, dll), pulau besar seperti Pulau Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan. Pulau Pisang, Pulau Sebuku, dan lain-lain, fokus penelitian ini hanya melihat data perolehan suara dan jumlah partisipasi masyarakat dalam dua lokasi yang dapat disebut pedalaman dengan jarak tempuh yang juga mesti naik perahu dan atau sepeda motor yang kedua rodanya harus diberi rantai agar tidak berputar ditempat karena jalanan berlumpur. Dua lokasi itu adalah:

1. WAY HARU KECAMATAN BENGKUNAT

Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah termuda di Provinsi Lampung. Pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat[47] ini merupakan daerah pesisir pantai yang berjuluk *Negeri Para Saibatin dan Ulama*.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki jumlah penduduk, 155.497 jiwa dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019, sebanyak 112.343 jiwa. Daerah ini terdiri dari 11 kecamatan, 116 pekon[48] dan 2 kelurahan.

Di Kabupaten Pesisir Barat ini, terdapat daerah pedalaman yang sulit dijangkau kendaraan roda empat namun memiliki jumlah penduduk yang lumayan banyak. Terletak di pesisir barat laut dan berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), yaitu Kecamatan Bengkunat. Kecamatan Bangkunat, merupakan daerah pedalaman dengan jumlah penduduk paling padat. Tercatat, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019 sebanyak 19.063 jiwa. Sementara itu, pengguna hak pilih pada Pemilu lalu, sebesar 15.845 jiwa (84,85%) di tingkat kecamatan bahkan di level Pekon Way Haru, partisipasi pemilih sampai 91,60 persen. Angka ini sangat fantastis dan tinggi mengingat Kecamatan Bangkunat adalah wilayah paling ujung kabupaten, dengan sumber daya manusia yang masih minim dan pada Pemilu sebelum-sebelumnya, kebanyakan penduduk yang berprofesi sebagai petani perkebunan ini (lihat tabel 1), banyak yang apatis dengan pemilu. Hal tersebut, dibuktikan dengan banyaknya warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.

[47] Kabupaten yang disahkan berdasarkan UU No.22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada 25 Oktober 2012 dan diresmikan pada 22 April 2013.

[48] Pekon adalah nama lain dari Desa atau Kampung.

jdih.kpu.go.id

Tabel Hasil Pemilu 2009-2019 Pekon Way Haru

Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Pemilihan Umum					
	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pilgub 2014	Pilbup 2017	Pilgub 2018	Pemilu 2019
Data Pemilih	1162	1179	1182	1140	1107	1143
Data Pengguna Hak Pilih	770	821	1063	1048	942	1047
Persentase Pengguna Hak Pilih Way Haru	66,26%	69,63%	89,93%	91,93%	85,09%	91,60%
Persentase Pengguna Hak Pilih Kabupaten Lambar/Pesisir Barat						75,81%

**) Sumber KPU Lampung Barat dan KPU Pesisir Barat*

Pekon Way Haru yang terdiri dari 5 TPS ini, memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 dengan rincian. TPS 1 terdapat DPT, 288 jiwa. Di TPS 2, ada 277, 211, 210, dan ada 115 jiwa di TPS 5.

Dari DPT di Pekon Way Haru di data Pemilu 2019 itu, ada total 1.101 pemilih. Kemudian menjadi 1143 orang, lantaran ada daftar pemilih dalam DPTb, 33 orang dan jumlah pemilih dalam DPK, ada 6 orang.

Berhasil naiknya secara signifikan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya itu, setelah Komisi Pemilihan Umum melalui jajarannya, sampai ke Petugas Pemungutan Suara, intensif melakukan pendataan pemilih, juga adanya keterlibatan warga di Kecamatan Bengkunat, termasuk di Pekon Way Haru, ikut serta meningkat. Angka partisipasi yang sampai 91,60% ini, menjadi sebuah capaian keberhasilan Pemilu 2019 sekaligus membuktikan, suksesnya jajaran KPPS dan PPS yang berada di pedalaman yang disebut anggota PPK Bengkunat, Zainan lantaran melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam kepanitiaan pemungutan suara. Meski diakui juga, ketika Pilgub Lampung 2018 lalu, persentase partisipasi warga menurun karena memang bertepatan dengan musim panen kopi. Sekadar pembanding, selain Pekon Way Haru di Kecamatan Bengkunat, juga ada Pekon Siring Gading, Bandar Dalam, dan way Tyas yang medan dan kondisi permukiman warga juga berada di tengah hutan dan berbatasan langsung dengan TNBBS. Partisipasi masyarakat di pekon-pekon pedalaman itu juga meningkat

signifikan pada Pemilu 2019 dibanding dengan Pemilu 2014 dan 2009.

2. KUALA SINDANG KECAMATAN RAWAJITU UTARA

Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji terdiri dari 13 desa dengan jumlah TPS pada Pemilu 2019, total berjumlah 72 TPS. Terdapat 2 (dua) TPS yang terletak di daerah perairan dengan akses yang sangat sulit. Yaitu TPS 5 dan 6, di Desa Sungai Sidang yang sering disebut juga dengan Kuala Sidang.
Daerah pedalaman seperti Kuala Sidang di Kabupaten Mesuji merupakan salah satu daerah terpencil di Provinsi Lampung yang membutuhkan perhatian lebih dibanding desa lain.

Di Kuala Sindang, permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi pada setiap pemilihan umum adalah kecilnya tingkat partisipasi pemilih, susahnya merekrut badan *adhoc* pemilu dan beratnya proses distribusi logistik.
Beberapa hal yang menjadi permasalah di daerah terpencil seperti Kuala Sidang ini, diakui Fajarullah[49] antara lain; Pertama, sulitnya akses informasi dan sikap apatis warga terhadap proses demokrasi. Susahnya akses informasi seperti tidak adanya jaringan listrik PLN dan sinyal ponsel selular, menyebabkan warga tidak mendapatkan informasi yang cepat terkait penyelenggaraan Pemilu.

Kedua, susahnya jalan masuk dan buruknya akses jalan menuju Desa Kuala Sindang. Pada proses pelaksanaan sosialisasi Pemilu oleh jajaran KPU juga, terkendala beratnya medan yang harus ditempuh untuk mencapai lokasi.

Statistik menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di daerah Kuala Sidang sangatlah rendah, jauh di bawah standar partisipasi pemilih tingkat nasional. Para warga lebih memilih untuk melakukan kegiatan sehari-hari daripada harus menuju TPS. Sikap apatis terhadap pemilihan umum terjadi karena *mindset* warga yang tidak peduli dengan pemilihan umum yang selama ini diselenggarakan. Berikut ini adalah persentase pemilih di Kuala Sidang, TPS 5 Desa Kuala Sidang dari 3 (tiga) pemilu terakhir.

[49] Wawancara dengan Fajarullah, Panwas Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji.

Tabel Hasil Pemilu 2009-2019 TPS 5 Kuala Sindang.

Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Pemilihan Umum					
	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pilgub 2014	Pilbup 2017	Pilgub 2018	Pemilu 2019
Data Pemilih	262	273	262	262	137	115
Data Pengguna Hak Pilih	70	74	69	70	78	80
Persentase Pengguna Hak Pilih Kuala Sidang	26,71%	27,10%	25,33%	26,71%	56,93%	69,56%
Persentase Pengguna Hak Pilih Kabupaten Mesuji/Tuba	69,20%	71,40%	72,42%	75,37%	70,72%	75,81%

Di TPS 5 Kuala Sindang itu, tak jauh berbeda dengan capaian partisipasi masyarakat di level Kecamatan Rawajitu Utara. Dimana partisipasi masyarakat yang diberikan, jauh lebih rendah dibanding partisipasi masyarakat di tingkat kabupaten.

Tabel di atas menunjukan bahwa persentase pemilih di Kuala Sidang, selalu lebih rendah daripada persentase pemilih total Kabupaten Mesuji. Bahkan persentase pemilih pada Pilkada 2017 menyentuh titik terendah yaitu 26,71%. Peningkatan partisipasi pemilih mulai terjadi secara signifikan terlihat pada Pemilihan Gubernur Lampung 2018, dimana tingkat partisipasi menyentuh 56,93%. Baru pada Pemilu 2019 terlihat naik lagi, meski angka 69,56% juga di bawah capaian kabupaten yang sampai 75,81%.

Kenaikan persentase partisipasi masyarakat di Kuala Sindang ini secara simultan dicapai berkat adanya kegigihan jajaran KPU Mesuji dan KPU Provinsi Lampung yang turun dan mengawal sosialisasi tentang kepemiluan di tengah-tengah masyarakat pedalaman.

Partisipasi pemilih di Kuala Sidang selalu menjadi perhatian khusus jajaran penyelenggara di KPU Kabupaten Mesuji dikarenakan angka partisipasinya yang masih dapat dibilang sangat kecil. Kecilnya persentasi pemilih ini terjadi sebab sosialisasi pemilu tidak dapat menjangkau hingga ke seluruh pelosok daerah terpencil. Perjalanan menuju Kuala Sidang menempuh jarak yang sangat jauh dengan medan yang sangat sulit. Belum lagi harus melewati sungai yang hanya bisa dilewati menggunakan perahu membuat perjalanan memakan banyak waktu. PPS Desa Sungai Sidang yang membawahi beberapa dusun termasuk Kuala Sidang terhambat aksesnya dalam penyampaian informasi-informasi penting, menurut mereka, sekadar untuk bertukar pesan melalui telepon seluler saja, masih terkendala jaringan, begitupun penyampaian informasi secara langsung, terkendala jarak yang harus ditempuh dengan perahu yang memakan biaya tidak sedikit. Alhasil, banyak informasi yang terlambat tersampaikan ke Kuala Sidang.

PENTINGNYA PARMAS DI PEDALAMAN

Fakta dari ketertarikan dan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat di pedalaman Lampung, terutama di Wayharu dan Kuala Sindang itu menjadi kajian dan harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kesadaran berpartisipasi maupun berperan serta dalam menyukseskan Pemilu yang berkualitas. Karena, menurunnya jumlah pemilih dalam pemilu adalah problem demokrasi dan menjadi kegelisahan banyak pihak. Bahkan, pernah menjadi keprihatinan banyak negara di dunia. Menurunnya jumlah pemilih yang berarti juga meningkatnya angka golput menunjukkan, sebagian warga mempertimbangkan pemilu sebagai mekanisme untuk melegitimasi kontrol partai politik atas keputusan politik.

Fakta ini juga menunjukkan bahwa warga mempunyai sedikit ketertarikan atas partai politik sebagai instrumen demokrasi representatif. Jumlah pemilih adalah salah satu indikator penting bagaimana warga berpartisipasi dalam pemerintahan di sebuah negara. Tingginya jumlah suara pemilih adalah tanda vitalitas demokrasi. Sementara jumlah pemilih yang rendah, sering dikaitkan dengan pemilih apatis dan ketidakpercayaan pada proses politik[50].

Dalam penelitian ini, terungkap, keterbatasan informasi, akses dan ketidak tahuan warga dalam agenda-agenda electoral seperti Pemilu karena berada di daerah pedalaman, berpengaruh banyak pada rendahnya partisipasi politik. Daerah pedalaman menjadi faktor dominan atas rendahnya tingkat keterlibatan warga dalam menggunakan hak pilihnya. Terutama, jika tidak ada keterlibatan peserta Pemilu yang berusaha menggelar kampanye dan atau memberikan penyadaran pada warga akan pentingnya suara mereka sebagai penentu siapa

[50] Eko Sulistyo, *"Partisipasi Pemilih dalam Pemilu"*, Koran Sindo, 5 Maret 2019

yang bakal berkuasa dalam kultur demokrasi elektoral.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara geografis maupun topografis, daerah-daerah pedalaman tersebut menjadi ujung tombak hadirnya pemerintah. Sosialisasi kepemiluan tidaklah mudah dilaksanakan di Kuala Sidang selain daerahnya yang sulit dijangkau, masyarakat tidak *aware* dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Keadaan ekonomi yang sulit memaksa warga tetap menjalankan aktivitas seperti mencari ikan daripada harus mengikuti kegiatan yang diselenggarakan KPU dengan alasan bahwa kegiatan KPU tidak memiliki nilai ekonomi atau dalam kata lain tidak ada imbalan yang setimpal dengan waktu yang mereka korbankan.

KPU perlu melakukan sosialisasi *on the spot* ke daerah terpencil sehingga masyarakat daerah terpencil tidak perlu mendatangi suatu lokasi untuk mendapatkan informasi kepemiluan. Masyarakat masih tetap mendapatkan informasi kepemiluan saat melakukan kegiatan sehari-hari. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana diperlukan banyak orang dalam mensosialisasikan pemilu serta memerlukan banyak waktu karena pelaksanaannya tidak dilakukan pada 1 (satu) tempat.

KPU sebenarnya sudah membuat inovasi dengan dibentuknya relawan demokrasi untuk lebih menjangkau masyarakat lebih luas. Namun sayangnya di Kabupaten Mesuji tidak ada satupun warga dari daerah Kuala Sidang yang mau mendaftarkan diri sebagai relawan demokrasi. Hal ini dikarenakan ketidakmauan warga, atau tidak sampainya informasi kepada mereka. KPU masih harus memikirkan cara yang lebih baik untuk menggenjot partisipasi pemilih di seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil karena bukan tidak mungkin, dengan sosialisasi yang lebih berkualitas partisipasi pemilih di daerah terpencil dapat meningkat secara signifikan.

jdih.kpu.go.id

PENUTUP

Bahwa jumlah dan tingginya partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 memang tidak bisa disebut sebagai ukuran ideal dan atau satu-satunya faktor untuk menyimpulkan bahwa pemilu itu berkualitas[51]. Namun setidaknya, capaian dari keberhasilan meningkatnya partisipasi warga di pedalaman yang ikut memilih pada Pemilu, menjadi salah satu faktor dan variabel penting dalam mewujudkan demokrasi substansial di daerah.

Warga di pedalaman yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan dan pergulatan wacana di media. Mereka, di pedalaman yang selama ini banyak yang apatis namun mulai merasa sebagai warga Negara karena terlibat aktif dalam proses menentukan siapa Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2019 ini, dalam beberapa wawancara penulis dengan sejumlah tokoh di dua daerah pedalaman Lampung itu, diakui, lantaran ada Pilpres 2019 yang digelar secara serentak bersama Pileg. Pemilu serentak itulah yang disebut, menjadi pendorong utama tentang banyaknya warga yang menggunakan hak pilihnya. Tidak seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, dimana banyak warga yang lebih memilih pergi ke ladang, ke kebun, atau ke laut guna mencari nafkah dibanding mesti ikut antre mengunjungi TPS.

[51] Eko Sulistyo, *"Partisipasi Pemilih dalam Pemilu"*, Koran Sindo, 5 Maret 2019

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Budiarjo, Miriam, (2009).
Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta; TP.GPU
Slamet, M, (2003).

Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan; Bogor;IPB Press
Surbakti, Ramlan, (1999).

Memahami Ilmu Politik, Jakarta; Grassindo
Yuwono, Teguh, (2004).

"*Manajemen Otonomi Daerah;*
Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru." Diponegoro, University.

WAWANCARA:

1. Peratin Wayharu, Zainan. Beliau juga mantan PPK Bengkunat
2. Ketua PPK Cukuh Balak, Bahyuti
3. Fajarullah, mantan Panwas Kecamatan Rawajitu Utara.
4. Marliani, anggota KPU Pesisir Barat
5. Ali Yasir, Ketua KPU Mesuji
6. Handi Mulyaningsih, KPU Provinsi Lampung
7. Nanang Trenggono, KPU Provinsi Lampung

jdih.kpu.go.id

Arung Jeram Demokrasi

Oleh: Mukhasan Ajib
Anggota KPU Kalimantan Timur

Latar Belakang

Demokrasi sudah menjadi keniscayaan. Tapi belum ada bentuk ideal demokrasi yang bisa diberlakukan secara universal. Praktik demokrasi antar satu negara dengan negara lainnya berbeda-beda, namun salah satu prasyaratnya adalah diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) secara berkala untuk mengisi anggota parlemen (DPR/DPRD) dan kepala negara (presiden).

Pemilu Serentak 2019 di Kalimantan Timur (Kaltim), meski sesuatu yang baru, tapi bagi penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi Kaltim (KPU Kaltim) yang juga sekaligus koordinator KPU Kabupaten/Kota se-Kaltim, tidak menjadi "momok" karena pada tahun 2015 sukses menyelenggarakan Pemilukada Serentak di 9 kabupaten/kota se-Kaltim, kemudian di Juni 2018 baru saja menyelesaikan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan berjalan aman dan lancar. Pemilukada Serentak 2015 dan Pemilihan Gubernur 2018 tersebut menjadi bekal berharga melaksanakan setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Dari pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada Juni 2019, KPU Kaltim menetapkan data pemilih sebagai basis memperbarui daftar pemilih untuk Pemilu Serentak Tahun 2019, begitu pula dengan pola distribusi logistik, jumlah TPS dan petugas yang diperlukan serta aparat pengamanan (TNI-Polri) menjadikan Pilgub Kaltim sebagai bahan menentukan model pengamanan yang pas untuk Pemilu Serentak Tahun 2019.

Tantangan Geografis

Meski secara mental dan teknis seluruh komisioner KPU di Kaltim siap menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2019, tantangan terberat tetap pada faktor geografis. Pemilih yang jumlahnya berdasarkan DPTb 2.492.565 orang tersebar di daratan seluas 129.066,64 km^2, atau rata-rata 19 pemilih/km^2 di 7 kabupaten dan 3 kota. Jumlah pemilih di Kaltim apabila dibandingkan dengan di DKI Jakarta, hampir sama dengan jumlah pemilih di wilayah administratif Jakarta Selatan.

Untuk memberikan hak pilih (terdaftar di DPT) warga negara Indonesia di Kaltim, yang paling sulit, mendebarkan, penuh tantangan, sekaligus bertaruh nyawa adalah di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Jumlah pemilih di Mahulu di Pemilu 2019 tidak banyak, hanya 23.970 orang, tersebar di 50 kampung (desa) di 5 kecamatan di wilayah seluas 15.315 km^2 atau tiap 1 km^2 rata-rata hanya ada 1,5 orang pemilih. Untuk memastikan Pesta Demokrasi 2019 di Mahulu sukses, petugas penyelenggara pemilu maupun petugas pengamanan pemilu di setiap tingkatan benar-benar mempertaruhkan nyawanya.

Jarak Mahulu dari ibu kota Provinsi Kaltim, Samarinda lebih kurang 285 km. Perjalanan dari Samarinda ke ibu kota Mahulu, Ujoh Bilang bisa ditempuh menggunakan jalan darat hingga ke Melak, ibu kota Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya, karena belum ada jalan darat dari Melak ke Ujoh Bilang, petugas pemilu dan logistik pemilu menempuh menggunakan angkutan sungai (Mahakam), dimana harus melintasi jeram yang arusnya sangat deras, bisa menenggelamkan atau memutar balik arah *long boat* atau *speed boat*. Jeram yang paling berbahaya yang dilintasi petugas penyelenggara pemilu dan logistik pemilu dinamakan penduduk setempat dengan sebutan *Riam Udang,* selain itu masih ada jeram lainnya, seperti *Riam Halog* dan *Riam Panjang.*

Setelah logistik pemilu sampai di gudang KPU Kabupaten Mahulu di Ujoh Bilang, bukan berarti pekerjaan petugas penyelenggara sudah selesai, karena yang dikerjakan baru 50 persen dari seluruh pekerjaan yang harus dituntaskan sebelum 17 April 2019. Logistik pemilu untuk Mahulu masih harus didistribusikan ke dua kecamatan, Long Apari dan Long Pahangai yang letaknya lebih ke hulu Sungai Mahakam. Long Apari adalah wilayah yang letaknya berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, sedangkan Long Pahangai, wilayahnya di bagian pedalaman Mahulu yang berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Jumlah pemilih di Kecamatan Long Apari tidak banyak, hanya 2.807 orang tersebar di 10 TPS dan di Kecamatan Long Pahangai 3.592 orang yang akan menggunakan hak pilihnya di 17 TPS, atau bila dijumlah di dua kecamatan itu terdapat 6.399 pemilih. TPS di Kecamatan Long Apari ada 10 buah dengan jumlah pemilih lebih kurang 2.807 pemilih, sedangkan di Long Pahangai ada 17 TPS dengan jumlah pemilih (saat itu) 3.592 pemilih, atau lebih kurang 30 persen dari total pemilih di Mahulu.

Persoalan demokrasi bukan soal angka-angka, tapi bagaimana memastikan semua hak-hak warga negara diberikan dan dilayani di hari pemungutan suara. Pengiriman logistik Pemilu ke Long Apari dan Long Pahangai tidak bisa lewat darat karena belum ada jalan. Pilihan yang tersedia hanya dua, yakni lewat sungai atau udara. Awalnya, direncanakan pengiriman logistik ke Long Apari dan Long Pahangai melalui sungai, tapi karena hingga bulan Maret terjadi kemarau, air sungai dangkal, akhirnya diputuskan melalui udara. Logistik Pemilu diangkut dari Ujoh Bilang ke Long Apari dan Long Pahangai menggunakan helikopter TNI-AD yang difasilitasi Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Subiyanto.

Pengiriman logistik Pemilu 2019 juga sempat membuat was-was komisioner KPU Kaltim dan bagian logistik sekretariat KPU Kaltim, saat kapal pengangkut logistik Pemilu tidak bisa langsung sandar di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau Balikpapan karena harus antri menunggu sandar ke pelabuhan lebih kurang 1,5 hari. Kapal baru bisa sandar ke pelabuhan setelah KPU Kaltim melakukan koordinasi dengan Kepala Polda Kaltim, Irjen Pol, Priyo Widyanto dan berkomunikasi dengan pengelola Pelabuhan Kariangau.

Tidak itu saja, peti kemas berisikan logistik Pemilu untuk Kabupaten Kutai Timur, dalam perjalanan menuju Sangatta, terguling dari truk pengangkutnya di ruas jalan antara Bontang-Sangatta, tepatnya di Teluk Pandan. Dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa dan kerusakan pada logistik. Kecelakaan itu hanya menyebabkan logistik terlambat 8 jam di gudang logistik Pemilu KPU Kutai Timur di Sangatta.

DPT Persoalan Krusial

Dari Pemilu ke Pemilu, dari Pemilukada ke Pemilukada di Kaltim, persoalan krusial yang dihadapi komisoner KPU Provinsi Kaltim adalah soal jumlah pemilih tetap yang akan ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT). Penyebabnya, pertama; calon pemilih walau hanya dikisaran dua jutaan, tapi tersebar di wilayah seluas 129.066,64 km2 atau hampir setara dengan luas pulau Jawa 128.297 km2.

Kedua; arus migrasi (perpindahan penduduk), terutama pencari kerja di sektor perkebunan, pertambangan batubara, sektor jasa dan perdagangan lainnya dari luar (Sulawesi dan Jawa) ke Kaltim sangat tinggi.

Penduduk pindahan yang rata-rata sudah mempunyai hak pilih di Pemilu itu, setibanya di Kaltim tersebar di wilayah pedalaman (Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat) yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit dan tambang batubara tidak melaporkan kedatangannya. Dokumen kependudukannya belum dimutasi dari daerah asalnya, sehingga menyulitkan petugas pendaftar pemilih, apalagi penduduk pindahan ada yang datang setelah masa pendaftaran calon pemilih selesai dilaksanakan.

Penetapan DPT dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) berbasis KTP-elektronik (KTP-el) meski sudah diantisipasi KPU Kaltim bersama 10 KPU Kabupaten/Kota se-Kaltim setahun sebelum masa penetapan DPT dan DPTb, tetap saja "menakutkan" penyelenggaran Pemilu di setiap tingkatan, karena proses pencetakan KTP-el seperti diketahui secara nasional, terhambat persoalan tidak tersedianya blangko KTP-el setiap waktu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill Kabupaten/ Kota se-Kaltim. Kemudian, pemilih pindahan yang sudah memiliki KTP-el yang diterbitkan pemerintah daerah asalnya, setibanya di Kaltim belum memutasi KTP-el karena tidak membawa surat pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asalnya.

Berkaitan dengan pemilih yang belum memiliki KTP-el ini, KPU se- Kaltim cukup terbantu dengan gerakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Kaltim, membuka tempat-tempat pencetakan KTP-e di luar kantor dengan jam layanan yang fleksibel, juga membawa peralatan pencetakan KTP-e ke rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimatan Timur.

Sebelum tenggat waktu penetapan DPT dan DPTb berkat partisipasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Kaltim, penduduk yang sudah mempunyai hak pilih bisa diakomodir dalam DPT maupun DPTb, kecuali yang memang benar-benar secara administratif tidak bisa diproses penerbitan KTP-e nya karena tak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

jdih.kpu.go.id

Masa Bakti Komisioner Berakhir Mendekati Pemilu

Pada tataran organisasi, saat menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kaltim, juga ada persoalan. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan 17 April, pada tanggal 4 Pebruari masa bakti komisioner KPU Kaltim Periode 2014-2019 berakhir. Sempat terjadi kekosongan lebih kurang 22 hari di KPU Kaltim sebelum KPU Pusat menetapkan Komisioner KPU Kaltim Periode 2019-2024 pada tanggal 26 Pebruari 2019. Penetapan komisoner baru tidak tepat waktu karena ada kesalahan tim panitia seleksi saat melaksanakan seleksi, sehingga ada tahapan yang harus diulang, sehingga tenggat menyelesaikan seleksi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan KPU Pusat.

Lima komisioner KPU Kaltim Periode 2019-2024 yang ditetapkan KPU Pusat pada tanggal 26 Pebruari 2019, beranggotakan Rudiansyah, SE (kemudian terpilih sebagai ketua), Suardi, S.Sos., Iffa Rosita, SE., Mukhasan Ajib, S.Sos, M.I.Kom dan Fahmi Idris, SE. Dari kelima komisioner KPU Kaltim itu, satu orang, Rudiansyah adalah mantan komisioner periode 2014-2019, empat lainnya adalah orang baru, tapi sebelumnya sudah menjadi komisioner di sejumlah KPU Kabupaten/Kota di Kaltim. Kelima komisoner baru tersebut memikul beban menyelesaikan semua pekerjaan dan persoalan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 tanggal 17 April dalam tenggang waktu kurang lebih 50 hari.

Meski terjadi kekosongan komisoner di KPU Kaltim lebih kurang 22 hari, Sekretaris KPU Kaltim, Drs. H Syarifuddin Rusli, M.Si., (almarhum) yang ditugaskan KPU Pusat memimpin KPU Kaltim, proses persiapan menuju pemungutan suara berjalan lancar, sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan berbagai peraturan yang sudah disahkan KPU Pusat.

Almarhum Syarifuddin Rusli dengan pengalamannya sebagai sekretaris KPU dan menghadapi Pemilu sebelumnya dan Pemilukada Serentak tahun 2015 dibantu para kepala bagian, kepala sub bagian, dan staf berhasil menopang kerja-kerja komisioner KPU Kaltim Periode 2014-2019 dan Periode 2019-2024 sampai pemungutan suara bisa terlaksana dengan aman, lancar, dan sukses.

Komisoner KPU Kaltim di Pemilu Serentak Tahun 2019 memikul beban ganda, karena saat tahapan Pemilu Serentak dimulai, juga menyelenggarakan Pemilukada (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim) Periode 2018-2019, dimana pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dan keseluruhan prosesnya selesai pada tanggal 23 Juli 2018, setelah KPU Kaltim menetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Kaltim terpilih saudara H Isran Noor – H Hadi Mulyadi.

Kerja Komisioner KPU Kaltim Periode 2019-2024 selama 50 hari di Pemilu Serentak tahun 2019 sukses melampaui target. Target partisipasi masyarakat yang ditetapkan KPU Pusat 77,5 persen, dan alhamdulillah terealisasi untuk Pilpres 80,73 persen, DPR-RI 80,14 persen, DPD-RI 80,11 persen dari jumlah DPT 2.480.741 orang. Pencapaian partisipasi masyarakat melampaui target yang ditetapkan KPU Pusat adalah buah dari kerja keras seluruh penyelenggara Pemilu di Kaltim, KPU Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, KPU Kabupaten Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Berau, Paser, dan KPU Penajam Paser Utara, seluruh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan petugas KPPS se-Kaltim.

Menangkal Hoaks Lewat Sosialisasi

Meski kegiatan sosialisasi Pemilu 2019 di Kaltim didukung personil yang kompeten dan berpengalaman, tetap saja melaksanakan sosialisasi pekerjaan yang tidak mudah karena faktor geografi dan demografi. Kondisi geografis Kaltim yang sangat luas, infrastruktur jalan darat yang masih minimalis di kawasan pedalaman dan perbatasan, kegiatan sosialisasi lewat tatap muka memerlukan energi dan biaya besar, apa lagi menggunakan angkutan sungai, selain lambat juga jauh lebih mahal dibandingkan menggunakan angkutan darat.

Kondisi demografi juga menjadi tantangan berat yang harus ditaklukkan penyelenggara Pemilu dan relawan melakukan sosialisasi. Pemilih di wilayah pedalaman dan perbatasan yang aktivitas sehari-harinya di sektor pertanian (berladang), dalam keseharian waktunya banyak dihabiskan di ladang yang jauh dari kampung, sehingga untuk mencari waktu agar bisa mengikuti sosialisasi di perkampungan diperlukan perencanaan dari sisi waktu.

Kemudian melakukan sosialisasi ke pemilih di perkotaan, hambatannya bukan pada sulitnya transportasi, tapi juga pada penetapan waktu dan hari dilaksanakannya sosialisasi. Karena, pemilih di perkotaan sebagian besar bekerja di sektor informal (buruh, berdagang, dan pertokoan), pemilih sudah berangkat bekerja pagi hari dan malam hari baru pulang. Sosialisasi ke pemilih yang bekerja di sektor formal, misalnya perkantoran pemerintah dan swasta, disesuaikan dengan waktu liburnya.

Selain itu, KPU Kaltim sebagai koordinator penyelenggaraan Pemilu serentak di Kaltim juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan mengadakan beberapa kegiatan, seperti lomba Mural (menggambar dengan media dinding) mengambil lokasi di pagar dinding Folder Air Hitam Samarinda Ulu, kontes musik, Pemilu Run

ada *doorprize* di sana, beberapa FGD tentang kepemiluan dan demokrasi dengan ormas, mahasiswa dan pemerhati Pemilu, dan beberapa kegiatan lainnya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Semua perjuangan itu ternyata tidak sia-sia hasilnya bisa melampaui targat nasional. Kedepannya KPU Kaltim berharap angka tersebut bisa dipertahankan kalau bisa naik lagi.

Kerjasama dengan Media Massa

Untuk melengkapi kegiatan sosialisasi melalui tatap muka, KPU Kaltim juga bekerja sama dengan media massa, baik cetak, elektronik (televisi dan radio), serta media online. Jumlah media massa yang telibat dalam kerja sama mensosialisasikan Pemilu Serentak Tahun 2019 ada sekitar 20 media, dimulai sejak September 2018 hingga berakhirnya tahapan Pemilu 2019.

Kegiatan sosialisasi lewat media massa tidak hanya berkutat pada masalah teknis pencoblosan agar suara pemilih sah untuk dihitung, tapi sekaligus sebagai forum menangkal hoaks berkaitan dengan Pemilu dan isu-isu *miring* tentang sistem penghitungan suara yang bertebaran di media sosial maupun dugaan-dugaan negatif yang disampaikan tokoh-tokoh politik yang mendiskreditkan penyelenggara Pemilu di media *mainstream,* televisi dan media cetak nasional.

Melalui media massa yang sudah bekerja sama dengan KPU Kaltim, komisioner hampir setiap hari mengeluarkan rilis untuk dipublikasikan agar diketahui masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, termasuk hal-hal berkaitan dengan sanksi pidana Pemilu.

Melalui kerja sama dengan media massa, meski setiap hari bertebaran isu *miring* tentang Pemilu dan penyelenggara Pemilu, utamanya di media sosial, baik sebelum mapun sesudah masa pencoblosan, penghitungan suara, dan rekapitulasi, termasuk di Kaltim, tidak berdampak negatif dan menimbulkan hambatan dalam penyelenggaran Pemilu. Tidak ada masyarakat yang jadi “korban” dalam Pemilu 2019 di Kaltim.

Isu-isu Sensitif

Isu-isu sensitif dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kaltim, seperti politik identitas selama kampanye tertutup maupun kampanye terbuka lebih dominan pada Pilpres, menyangkut dua sosok yang bersaing merebut kursi

Presiden, antara Prabowo Subianto dengan Joko Wododo sebagai kelanjutan dari persaingan Pilpres tahun 2014. Saling melempar isu negatif antara kedua pendukung lebih banyak di dunia maya, di media sosial (medsos) seperti facebook dan dalam group-group percakapan, misalnya WhatsApp, tapi tidak sampai merambah ke dunia nyata.

Saling melempar isu negatif antar kedua pendukung calon presiden (Capres) tersebut, meski dapat dikatakan "menyeramkan", tapi tidak menjadi konflik terbuka di dunia nyata, karena partai politik pendukung kedua Capres tidak masuk ke dalam pusaran perbedaan antar kedua pendukung Capres. Parpol lebih konsentrasi pada targetnya, bagaimana memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam rangka mengamankan posisinya dengan ketentuan baru (*parlemen thereshold*) yaitu memperoleh kursi 4% di DPR RI. Supaya lolos *parlemen thereshold,* partai berusaha menjauhkan diri dari keberpihakan terang-terangan terhadap kedua Capres saat melakukan kampanye tertutup maupun terbuka agar mendapatkan suara atau dukungan dari kedua pendudkung Capres.

Persaingan "keras" antar kedua pendukung Capres di dunia maya maupun dunia nyata bisa dieliminir hanya menjadi sebatas perbincangan karena pemilih "mengambang" juga aktif melakukan kampanye agar masyarakat lebih cerdas dalam menentukan pilihan terhadap Capres dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Netralitas ASN dan TNI-Polri

Terselenggaranya Pemilu Serentak 2019 dalam situasi dan kondisi yang kondusif, aman dan lancar sejak dari masa persiapan, di masa pemungutan suara, perhitungan suara di TPS dan rekapitulasi perolehan suara masing-masing partai peserta Pemilu dan kedua Capres, tidak terlepas dari faktor intensifnya para pejabat tinggi di pemerintahan, lingkungan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Polisi Republik Indonesia) mengkampanyekan netralitasnya terhadap Parpol maupun kedua Capres.

Petinggi Pemerintahan, TNI dan Polri dalam setiap kesempatan bertemu dengan masyarakat maupun kegiatan di internal institusinya selalu menekankan kewajiban untuk netral (tidak memihak) dalam Pemilu Serentak, serta memberitahukan kepada seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun prajurit TNI, dan Anggota Polri sanksi-sanksi yang akan diterima oknum yang tidak netral dalam Pemilu.

jdih.kpu.go.id

Kampanye keharusan ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri netral dalam Pemilu tidak hanya di perkotaan, hingga ke pelosok desa. Hasilnya sangat efektif, dimana di Kaltim tidak ada aduan masyarakat ke Bawaslu Kaltim dan ke KPU Kaltim terkait ketidaknetralan ASN, Prajurit TNI dan Anggota Polri di Pemilu Serentak 2019 di Kaltim.

Keberadaan petugas pengamanan Pemilu (TNI-Polri) pada hari pemungutan suara di sekitar TPS tanggal 17 April 2019 juga bisa diterima pemilih maupun pendukung kedua Capres sebagai sesuatu yang wajar, kebutuhan bersama agar proses pemungutan suara dan penghitungan suara bisa berjalan lancar, bisa aman dari kemungkinan munculnya gangguan dari oknum atau kelompok tertentu yang ingin mengacaukan Pemilu.

Pemungutan Suara dan Rekapitulasi

Proses pemungutan suara pada Pemilu Serentak 2019 di Kaltim berlangsung di 10.909 TPS, 1.827 desa/kelurahan, 103 kecamatan di 10 kabupaten/kota dapat dinilai berlangsung aman dan lancar, tidak ada keributan maupun protes dari saksi Parpol dan saksi kedua Capres di TPS yang berujung terhambatnya pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Kondisi demikian bisa diciptakan karena, Pertama; pendistribusian logistik Pemilu ke TPS-TPS tepat waktu. Kedua; kualitas kertas suara juga bagus, bahkan dapat dikatakan tidak ada kertas suara yang cacat, sebab penyortiran kertas suara di gudang-gudang KPU berlangsung sangat ketat, kertas suara yang cacat sudah dikesampingkan di gudang KPU sebelum didistribusikan.

Ketiga; jumlah pemilih di tiap TPS di Pemilu Serentak 2019 yang hanya untuk 250-300 pemilih di tiap TPS juga sangat membantu lancarnya pemungutan suara. Antusiasme pemilih untuk datang ke TPS juga cukup tinggi. Pemilih berusaha datang ke TPS sepagi mungkin, sehingga tidak terjadi penumpukan di barisan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

Keempat; kehadiran saksi partai dan saksi kedua Capres di TPS yang tepat waktu, atau sejak TPS dibuka juga membuat pelaksanaan pemungutan suara bisa dilaksanakan tepat waktu. Para saksi Parpol dan Capres, rata-rata terdiri dari saksi yang sudah kompoten, sudah menjadi saksi dalam beberapa Pemilu sebelumnya, atau dapat disimpulkan sudah berpengalaman dalam urusan mengawasi proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Kelima; Parpol dan tim sukses kedua Capres juga menyiapkan saksi dua lapis di Pemilu Serentak 2019 untuk mengantisipasi waktu yang diperlukan lebih panjang mengawasi proses pemungutan suara dan penghitungan suara karena ada

5 (lima) kertas suara yakni (Presiden & Wakil Presiden serta DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang harus dihitung setelah pemungutan suara di masing-masing TPS. Saksi Parpol dan Capres secara bergantian mengawasi proses pemungutan suara maupun penghitungan suara di TPS.

Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Parpol dan Capres di TPS, tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga ke provinsi, meski ada satu dua TPS yang harus dihitung ulang di rekapitulasi tingkat kecamatan, tapi dapat disimpulkan secara keseluruhan berjalan lancar dan aman, tidak ada gangguan berarti.

Pengamanan Pemilu

Lancar dan amannya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kaltim, tentu tidak bisa dilepaskan dari peran petugas pengamanan Pemilu 2019 dari unsur TNI-Polri. Keaktifan TNI-Polri mengawal tahapan-tahapan Pemilu meski dalam posisi pasif dan sepanjang waktu menunjukkan sikap tidak memihak terhadap partai tertentu dan atau salah satu Capres, membuat suasana kondusif hingga tahapan akhir Pemilu di daerah selesai, ditandai penetapan rekapitulasi perolehan suara partai dan Capres.

Status Kaltim dalam Pemilu Serentak 2019 tidak termasuk dalam daerah rawan konflik, tapi daerah "hijau", meski demikian, Panglima Kodam VI Mulawarman, Mayjend TNI Subiyanto menyiapkan sebanyak 4.180 prajurit untuk pengamanan Pemilu, dan 3.075 prajurit diantaranya dibawah kendali operasi Polda Kalimantan Timur.

Sedangkan Bawaslu Kaltim menyiapkan pengawas sebanyak 11.970 orang ditiga tingkatan. Panwaslu kecamatan ada 103 orang atau 1 orang tiap kecamatan. Di tingkat desa/keluarahan juga masing-masing 1 orang atau se-Kaltim berjumlah 1.038 orang. Kemudian pengawas TPS ada sebanyak 10.829 orang.

Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kaltim atau Kabupaten/Kota dari unsur Perlindungan Masyarakat yang juga berpartisipasi mengamankan Pemilu Serentak 2019 di Kaltim seluruhnya 21.706 orang. Rinciannya; di Kabupaten Kutai Kartanegara 4.248 personil, Kutai Barat 1.018, Kabupaten Paser 1.586, Kutai Timur 1.942. Bontang 1.032, Samarinda 5.124 , Penajam Paser Utara 1.030, Balikpapan 4.110, Berau 1.386, dan Mahulu 230 personil.

Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI, Subiyanto dan Kepala Polda Kaltim, Irjen Pol, Priyo Widyanto, danrem 091/ASN, Brigjen TNI, Widi Prasetijono bersama

jdih.kpu.go.id

KPU Kaltim, Bawaslu Kaltim, Tokoh Parpol, Tokoh Masyarakat, Adat, dan Agama, bahu membahu menyerukan ke masyarakat sama-sama berpartisipasi agar Pemilu berjalan damai dan mengeliminir isu-isu negatif seputar Pemilu agar tidak menjadi sumber konflik.

Selain itu, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI, Subiyanto dan Kepala Polda Kaltim, Irjen Pol, Priyo Widyanto, danrem 091/ASN, Brigjen TNI, Widi Prasetijono bersama Dandim, Kapolres, bupati/walikota se-Kaltim juga intensif melakukan sidak ke sejumlah TPS-TPS sehari sebelum pemungutan suara.

Hasil Akhir Pemilu Serentak 2019

Hasil akhir dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kaltim disahkan dalam Rapat Pleno KPU RI tanggal 13 Mei 2019 pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional, seluruh saksi Parpol dan saksi kedua Capres tidak ada yang keberatan dan dalam waktu yang sama, sama-sma membubuhkan tandatangan.

Dalam Rapat Pleno KPU RI dipimpin Komisioner KPU RI, Viryan Azis, juga hadir saksi dari pasangan calon Pilpres 01, I Gusti Putu Artha dan 02, Ferry Mursidan Baldan. Dalam sidang, I Gusti Putu Artha, memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan Pemilu di Kaltim dengan segala tantangan geografisnya, utamanya dalam upaya pendistribusian logistik yang serba terbatas waktu.

Sementara, Ferry Mursidan Baldan juga memberikan apresiasi atas kelancaran Pemilu di Kaltim dan berterima kasih atas seluruh pihak di Kaltim.

Presentasi hasil pemungutan suara di Kaltim dimulai pukul 16.48 dan berakhir 17.46 WIB dapat dikatakan hingga saat ini merupakan penyampaian yang paling singkat dan lancar dengan penerimaan seluruh saksi yang hadir.

Atas nama KPU Kaltim, Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah mewakili KPU Kabupaten/Kota se-Kaltim tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih mendalam kepada Panglima Kodam VI Mulawarman dan Kapolda Kaltim beserta seluruh jajaran yang sangat maksimal memberikan rasa aman dalam Pemilu 2019 di Kaltim dan bantuan teknisnya dalam kelancaran tahapan selama ini.

Hal yang sama juga disampaikan Rudiansyah kepada Pemprov Kaltim, atas segala supportnya yang turut serta meningkatkan partisipasi pemilih di Kaltim, juga Perguruan Tinggi serta Ormas di Kaltim yang tak kenal lelah memberikan kritik, saran dan dukungan untuk kelancaran Pemilu di Kaltim," sambungnya.

KPU Kaltim juga menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan media cetak, elektronik dan online yang selalu memberikan dukungan positif atas pemberitaan yang mampu memberikan energi positif bagi kelancaran pemilu 2019.

Dari pemilih di Kaltim mencapai 2.662.476 orang, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.988.674 orang, dan sebanyak 246.127 suara dinyatakan tidak sah, sehingga jumlah suara sah mencapai 1.742.547 suara.

Berikut data rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu legislatif Provinsi Kaltim menurut nomor urut partai politik: PKB: 78.000. Partai Gerindra 194.259. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 333.404 4. Partai Golkar 350.829 5. Nasdem 137.593, Partai Garuda 4.852 7. Partai Berkarya 41.907 8. PKS 159.557, Perindo: 67.635, PPP 98.401, PSI 24.247, PAN: 95.40, Partai Hanura 28.034, Demokrat: 112. 987, PBB: 12.55 , Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 2.883. Sedangkan untuk Pilpres, Jokowi-Ma'ruf mendapat suara 1.094.845, sedangkan Prabowo-Sandi mendapat 870.443 suara.

Menyasar Pemilih Kelompok Pemulung di Kalimantan Barat

Oleh: Lomon
Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Terwujudnya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 merupakan pencapaian penyebaran luasan informasi.

Dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam seluruh tahapan, program dan jadwal dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Sukses berpemilu merupakan bagian penting dari pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Kata Kunci : Sosialisasi Pemilu

Pendahuluan

Pemilihan Umum serentak digelar di seluruh Indonesia pada Rabu 17 April 2019, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR RI, DPRD Povinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, yaitu pada 34 Provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pemilu kali ini diyakini paling bersejarah bagi tatanan demokrasi Negara Indonesia, karena pertama kali diadakan secara serentak seluruh jenis Pemilu baik legislatif maupun eksekutif.

Negara Indonesia sebagai negara yang paling cepat melaksanakan Pemilu serentak dibanding Negara-negara maju lainnya, menjadi *pilot project*/ percontohan bagi negara yang mengedepankan semangat demokrasi. Indonesia yang sudah beberapa kali melewati masa pendewasaan demokrasi ini hingga saat ini masih terus belajar dan berjuang menegakkan demokrasi, sebagaimana idealnya cita-cita demokrasi dalam mengawal proses Pemilihan di Negara tercinta ini. Sehingga dengan kematangan dalam menerjemahkan regulasi dan efektifnya sistem Penyelenggara yang berpedoman pada Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan, KPU Provinsi Kalimantan Barat dapat melaksanakan peran dan fungsinya dalam memberikan edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman dan kopetensi kepemiluan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dengan kesadaran yang tinggi mau melibatkan diri dalam menyalurkan aspirasi/ hak politiknya dalam proses pergantian kekuasaan secara periodik. Idealnya KPU Provinsi Kalimantan Barat, sebagai penyelenggara di tingkat Provinsi tidak kesulitan dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan karena memperoleh dukungan masyarakat dan partisipasi yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dan ukuran kualitas penyelenggaraan Pemilihan sangat ditentukan oleh tingginya angka partisipasi pemilih. Fakta tingginya angka partisipasi Pemilih menjadi indikator suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sebagaimana Pemilu serentak yang kita lewati pada 17 April 2019, seluruh rangkaian Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Legislatif telah dilaksanakan dengan keadaan aman dan lancar dalam sistem kendali KPU RI secara hirarkhis. Meningkatkan hubungan dan koordinasi yang dinamis dengan para *stakeholder*, merupakan salah satu poin penting yang sangat menentukan kelancaran dan keamanan penyelenggaraan sehingga harus terus dipertahankan guna membentuk *network* yang solid dalam rangka mengawal proses penyelenggaraan Pemilu di Kalimantan Barat. Adapun poin lain yang tak kalah penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan di Kalimantan Barat adalah komitmen KPU Kalbar untuk berupaya seoptimal mungkin meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan sebagaimana yang

dicita-citakan.

Efektifitas Kegiatan Sosialisasi

Strategi dalam menentukan metode dan materi sosialisasi serta kemampuan berkreasi menjadi hal prinsip yang harus diperhatikan dalam meracang kegiatan sosialisasi. Kepekaan hati nurani dan kemampuan berinstusi menjadi modal dasar bagi seorang perancang metode sosialisasi, selain kearifan bersikap dan keluwesan bertingkah laku yang dapat melancarkan proses komunikasi dan dialog.

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pada kelompok tertentu/ termarjinalkan, memerlukan persiapan yang matang untuk mengantisipasi terjadinya kendala dilapangan. Tidak jarang proses sosialisasi diawali dengan survei lokasi dan pendekatan dengan salah satu yang mewakili kelompok yang akan disasar. *Surveior* terlebih dahulu melakukan pendekatan dan dialog untuk mendapat persetujuan/izin melakukan sosialisasi. Memerhatikan struktur sosial budaya dan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang serta berpegang pada pepatah dimana bumi di pijak disitu langit dijujung, dijadikan bekal dalam proses pendekatan tersebut.

KPU Provinsi Kalimantan Barat bersama jajarannya berkomitmen menjadikan program sosialisasi sebagai garda terdepan dalam upayanya menyukseskan setiap tahapan penyelenggaran pemilihan, yang pada akhirnya diharapkan mampu mengangkat angka partisipasi dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Dalam proses perancangan kegiatan sosialisasi Pemilihan Konten/materi yang menarik dan metode/cara yang akan digunakan harus mampu merepresentasikan keinginan/ minat/animo segmantasi yang di sasar/dituju. Memerhatikan *style* yang sedang marak dan digemari oleh generasi dalam situasi kekinian serta efektifitas sarana penunjang yang digunakan dalam mendukung kegiatan sosialisasi harus diperhitungkan dalam menyusun strategi sosialisasi, guna menekan angka golput dan bisa memberikan penanaman norma sosial sehingga mampu meminimalisir *black campaign*.

Dalam menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2019 KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sosialisasi dengan berbagai metode. Merangkul media dalam rangka mendukung kegiatan sosialisasi tahapan penyelenggaraan menjadi pilihan yang tepat dalam mempublikasikan setiap agenda kegiatan penyelenggaran pemilihan serentak Tahun 2019. Masyarakat dalam berbagai segmantasi adalah target dalam memperoleh dukungan dan partisipasi setinggi-tingginya.

KPU Provinsi Kalimantan Barat melalui Divisi Sosialisasi telah mengagendakan suatu kegiatan sosialisasi berupa media *gathering* yang melibatkan beberapa media untuk mengambil bagian dalam mempublikasikan/menggaungkan "Hari dan Tanggal Pemungutan Suara" serta agenda-agenda rutin dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan, yang pada prinsipnya wajib dipublikasi ke masyarakat. Dalam agenda tertentu KPU Provinsi Kalimantan Barat juga mengundang pihak media baik lokal maupun nasional untuk mempublikasi berbagai aktivitas dan produktifitas yang telah di hasilkan dalam proses penyelenggaraan.

Sebagaimana program sosialisasi KPU RI yang dicanangkan serentak secara Nasional, KPU Provinsi Kalimantan Barat telah sukses melaksanakan kegiatan sosialisasi Coklit serentak yang melibatkan seluruh penyelenggara Badan Adhoc se-Kalimantan Barat, Deklarasi Kampanye Damai, Mural, Gerakan Melindungi Hak Pilih, Konser Pemilih Berdaulat Negara Kuat, Nonton Bareng Debat Publik dan Film Suara April, serta Pemilu Run yang diikuti masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya. Selain program nasional tersebut, juga dilaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi yang dianggap bisa mendorong tingkat partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih inilah yang mengindikasikan apakah masyarakat mengikuti, memahami, melibatkan diri serta menaruh apresiasi atau minat dalam pesta demokrasi.

Pelaksanaan Sosialisasi yang Unik dan Menarik

Demi menjamin tersosialisasinya pelaksanaan pesta demokrasi pemilu serentak 2019, di Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan kegiatan sosialisasi dengan sagmentasi tertentu/sasaran tertentu sebagai upaya untuk menyentuh/ merambah semua kalangan dan lapisan masyarakat tanpa terkecuali termasuk kelompok termarjinalkan. Kegiatan unik dan menarik seperti bersosialisasi ke tempat komunitas masyarakat pemulung, komunitas waria dan sosialisasi kepada pengunjung kafe dengan menghadirkan para komika dalam *stand up comedy*, mewarnai agenda sosialisasi KPU Provinsi Kalimantan Barat. Dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, ada hal menarik yang dapat diungkap dalam sajian karya tulis ini. Mendatangi lokasi tempat tinggal kumuh bertemu dengan komunitas pemulung menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Provinsi Kalimantan Barat dan jajaran untuk benar-benar menyampaikan amanah sosialisasi tentang penyelenggaraan pesta demokrasi ini kepada mereka.

Ada kiat tersendiri yang harus diperankan dalam bersosialisasi ke komunitas pemulung di lokasi kumuh ini. Berdasarkan hasil survei dan wawacara dengan ketua kelompok komunitas ini, diperoleh informasi bahwa masyarakat komunitas pemulung ini kurang kepeduliannya dengan urusan pemerintahan, gampang protes dan mudah tersinggung, karena mereka menganggap Pemerintah tidak memerhatikan dan tidak berpihak pada kepentingan mereka. pada proses

penyampaian misi sosialisasi di lokasi masyarakat kumuh ini diperlukan metode pendekatan yang sederhana dan justru paling efektif dan sangat diharapkan oleh mereka. Lebih banyak diantara mereka berpendapat bahwa yang paling penting dari kegiatan Sosialisasi adalah mendapatkan upah atau hadiah. Ada sesuatu hal yang menjadi strategi dalam menyampaikan pesan sosialisasi kepada kemunitas ini, menyiapkan doorprize berupa sembako bagi 20 orang yang hadir lebih awal/ tepat waktu, ternyata sangat tepat dan efektif menarik animo dan respon positif dari seluruh anggota komunitas pemulung tersebut.

Dialog yang dilakukan diawali dengan perkenalan dan mendengarkan aspirasi dari beberapa wakil komunitas pemulung. Misi sosialisasi muncul dengan cara menghimbau dan menawarkan solusi positif melalui ajakan untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu, memilih dan mencobos calon wakil rakyat/pemimpin yang dianggap dapat mewakili dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Ternyata animo untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu terlihat saat berdialog dengan mereka, bahkan ada diantara mereka yang menyatakan ingin menjadi petugas KPPS yang mewakili komunitas masyarakat pemulung. Berdialog dengan masyarakat komunitas pemulung memiliki makna dan keunikan tersendiri, selain cukup menantang kegiatan Sosialisasi membawa aura positif di komunitas tersebut. Metode Sosialisasi melalui pola persuasif dengan memberikan penjelasan dan pemahaman, justru menjadi penyejuk hati dan sekaligus membantah asumsi dan merubah paradigma negatif tentang pemerintah.

Untuk menyukseskan program sosialisasi pada kelompok tertentu, juga diagendakan kegiatan sosialisasi pada kelompok waria. Keunikan yang terlihat dari kegiatan sosialisasi ini terlihat pada saat dialog dengan mereka. Dibukanya sesi dan ruang dialog ternyata banyak mengungkap fakta terkait proses pendaftaran sebagai pemilih dengan nama yang tercantum pada KTP, justru sering menimbulkan kesulitan bagi petugas pemutakhiran data di lapangan. Menggunakan nama tersendiri yang identik dengan nama wanita bagi komunitas waria menjadi hal yang biasa, hidup berpindah-pindah mengikuti komunitas, telah berpengaruh pada status demografi mereka. Sehingga melalui kegiatan sosialisasi ini mereka berkomitmen untuk berperan aktif dan ikut dalam menyukseskan pemilu. Upaya yang ditawarkan adalah kemudahan pelayanan pada proses pemutakhiran data yang dilakukan petugas pantarlih di wilayah mereka berdomisili. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan dengan melibatkan lebih dari 40 orang anggota komunitas. Melalui proses dialog, misi Sosialisasi telah mengubah asumsi negative mereka terhadap program pemerintah yang dianggap sering tidak berpihak pada kepentingan dan nasib mereka. Dengan melibatkan organisasi komunitas waria yang jumlahnya cukup signifikan, misi KPU Provinsi untuk menjaring dukungan

dan partisipasi mendapat respon positif, jiwa solidaritas dan kekompakan pada komunitas ini dapat dimanfaatkan sebagai perpanjangan tangan dalam penyampaian informasi kepada anggota kelompok komunitas yang masih berada diwilayah pelosok Kalimantan yang belum dapat dijangkau.

Mengangkat budaya dan kearifan lokal dalam nuansa sosialisasi menjadi strategi untuk dapat beradaptasi dengan kelompok atau komunitas yang disasar. Sosialisasi yang mampu merepresentasi unsur segmentasi dalam masyarakat Kalimantan Barat, telah memberikan ruang dan peluang bagi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menyampaikan ide dan pesan sosialisasinya. Sebagaimana kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada kelompok masyarakat nelayan di Kecamatan Kakap wilayah Kabupaten Kubu Raya, ternyata sangat mendapat respon yang sangat besar, mengingat dari hasil pengamatan angka partisipasi pemilih di wilayah ini masih fluktuatif. Masyarakat di lingkungan pesisir ini masih ada yang tidak peduli dan lebih mengutamakan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pada meluangkan waktu hanya untuk sekedar mengecek nama di daftar pemilih dan pergi mencoblos ke TPS. Dengan menyajikan format hiburan kepada masyarakat dalam model Sosialisasi ini, ternyata dapat menarik perhatian dan keikutsertaan penduduk di wilayah ini. Sosialisasi dengan menyajikan hiburan kepada mereka telah menepis paradigma dari sebagian masyarakat diwilayah tersebut. Bahwa ikut berpartisipasi dalam pemilu hanya menyita waktu dan tidak membawa pengaruh/manfaat pada nasib mereka. Keharusan pergi mencari ikan dilaut adalah upaya mempertahankan keberlangsungan hidup bagi keluarga mereka.

Respon mereka untuk hadir ke tempat sosialisasi, semula untuk mencari hiburan, dimanfaatkan oleh Tim Sosialisasi untuk menyampaikan pesan pemilu kepada masyarakat tersebut. Melalui pembawa acara dan para penyanyi pada acara hiburan tersebut dititipkan muatan sosialisasi kepada masyarakat, sekaligus pemberian kuis dan *doorprize* ringan untuk menguji atensi mereka pada pesan-pesan sosialisasi.

Dalam setiap even yang diselenggarakan oleh pihak lain, KPU Provinsi Kalimantan Barat selalu turut serta berpartisipasi dalam event yang terselenggara seperti expo Hari Jadi Kota Pontianak, *Millennial Road Safety Festival*, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh BKMT, Senam Zumba dan *aerobic* di beberapa tempat serta membuka stand Cek Data Pemilih di area *car free day* tiap minggunya dengan memberikan *doorprize* menarik kepada para pengunjung sebagai apresiasi kepeduliannya dalam pesta demokrasi yang berlangsung. Selain itu, moment hari nasional juga menjadi sarana bagi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam menyampaikan pesan-pesan pemilu kepada masyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat *Smart Competition for Election* 2019 tingkat SMA dan Perguruan Tinggi mendapat antusias peserta yang sangat tinggi dengan jumlah peserta yang membludak hampir 400 peserta. Lomba tersebut dikemas seperti Kuis "Ranking I" yang pernah disiarkan oleh salah satu stasiun TV. Lomba ini merupakan adu ketepatan dalam menjawab pertanyaan, tidak hanya pertanyaan pengetahuan umum yang diberikan kepada peserta tetapi juga pengetahuan seputar Pemilu mulai dari sejarah demokrasi hingga pesta demokrasi yang sedang berlangsung. Semua peserta saling berkompetisi menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar hingga tersisa satu kontestan.

Kegiatan sosialisasi lain yang tak kalah unik dan menariknya adalah even yang diselenggarakan untuk kelompok sasaran anak-anak TK dan pelajar. Dalam rangka mengenalkan dan memberi pengetahuan dasar tentang apa itu pemilu. KPU Provinsi Kalimantan Barat mengadakan ajang lomba dengan memanfaatkan keluwesan anak-anak menyalurkan bakat dan potensi dirinya dengan melalui sarana

sosialisasi. Melibatkan anak-anak pada usia dini menjadi strategi bagi KPU Provinsi untuk mengenalkan dan mengedukasi anak-anak ini menjadi perintis generasi/ kader pemilih yang berkualitas di masa yang akan datang. Kegiatan Sosialisasi melalui ajang penyaluran bakat dan prestasi di kelompok anak-anak ini, memang tidak secara langsung berpengaruh pada upaya peningkatan angka partisipasi. Namun melalui ajang ini, diharapkan dapat menularkan animo kepada kelompok remaja, dewasa dan orang tua. Sebagaimana kegiatan lomba menggambar dan mewarnai bertemakan *Menuju Pemilu 2019* yang dilaksanakan di salah satu mall di wilayah Kalimantan Barat mampu menjaring animo pengunjung yang luar biasa. Dengan cara mengelaborasi lomba menggambar dan mewarnai yang diselingi dengan pesona *dancer* dan *fashion show* telah membius perhatian pengunjung mall.

Sejak awal tahapan Pemilu Serentak 2019, KPU Provinsi Kalimantan Barat menggunakan balon sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan pemilu. Media balon ini menjadi cara unik dan berbeda dalam mensosialisasikan Pemilu Serentak Tahun 2019. Balon yang diberikan kepada anak-anak menjadi jalan untuk menyentuh perhatian orang dewasa dan orang tua. Tak jarang dalam setiap even sosialisasi yang dilaksanakan, balon yang dibagikan selalu habis diserbu masyarakat terutama anak-anak. Dari tangan anak-anak itulah pesan hari dan tanggal pemungutan suara serta pesan pemilu lainnya disampaikan kepada masyarakat.

Jelang 1 hari pemungutan suara, malam harinya KPU Kalbar kembali melakukan aksi turun ke jalan mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS esok hari mulai pukul 07.00 wib hingga pukul 13.00 WIB. Aksi ini dilakukan di beberapa persimpangan lampu merah dan tempat keramaian, tak ayal aksi tersebut menyita perhatian masyarakat sekitar. KPU Provinsi Kalimantan Barat mencoba mengemas aksi tersebut agar menjadi menarik dengan memberikan bingkisan kepada masyarakat yang bisa menjawab kuis seputar pemilu.

jdih.kpu.go.id

Hambatan yang Dijumpai dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Dari seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kalimantan Barat, ada beberapa hal yang menjadi kelemahan hingga pada akhirnya memengaruhi tingkat partisipasi pemilih untuk semua jenis pemilihan. Jika dilihat dari komparasi partisipasi pemilih dari seluruh jenis Pemilu terlihat bahwa animo dan partisipasi masyarakat untuk setiap jenis pemilihan berbeda bahkan kecenderungan hanya tertuju pada satu jenis Pemilu yang digandrungi atau diinginkan. Seperti halnya Pemilu Presiden dianggap menarik animo masyarakat, hingga dibandingkan dengan Pemilu lain jumlah partisipasinya terlihat lebih tinggi. Sementara untuk Pemilu legislatif ditingkat nasional masih dapat mengimbangi, namun tidak untuk partisipasi pemilu legislatif tingkat Kabupaten/Kota. Berikut grafik tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.

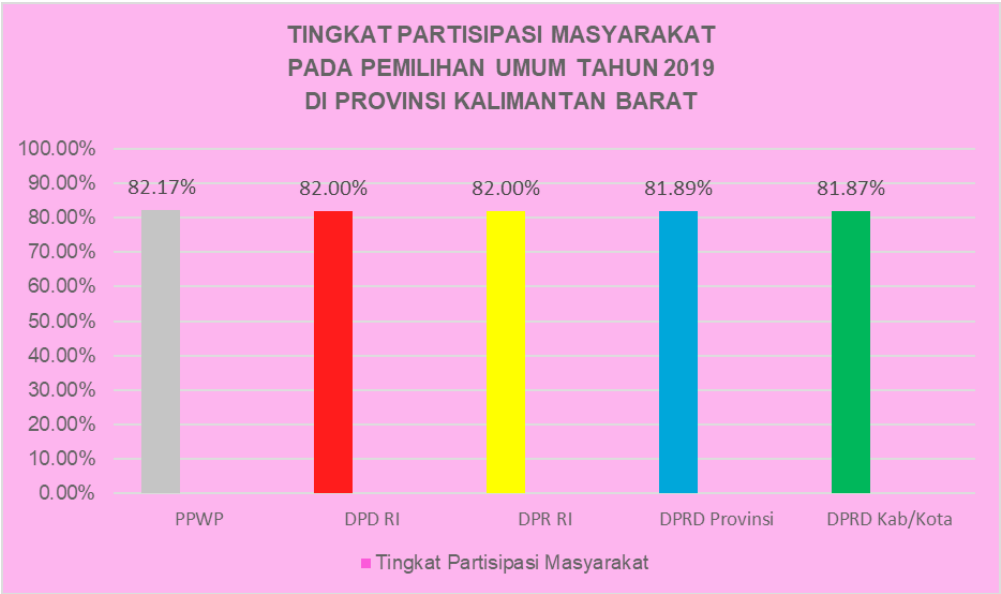

Ada beberapa hal mampu memengaruhi terjadinya angka berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaran pemilihan umum. Efektifitas sosialisasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat menentukan tingginya keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pesta demokrasi, selain perancangan metode sosialisasi yang efektif, sarana teknologi Informasi dan dukungan sumber daya manusia yang trampil dalam berkomunikasi sangat menunjang efektifnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara.

Kondisi nyata yang dihadapi dan dijumpai di lapangan yang berpengaruh dan menjadi kendala pada pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terutama

di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu ***Pertama*** terbatasnya sarana komunikasi dan kondisi geografis yang menjadi penyebab kurang efektifnya program Sosialisasi, Metode Pengenalan dan Sosialisasi yang sifatnya nasional, dalam penerapannya masih menghadapi kesulitan karena adanya perbedaan kultur dan budaya. ***Kedua*** pemahaman dan kesadaran masyarakat secara utuh terkait pentingnya Pemilu sering dikalahkan dengan prinsip atau pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat bahwa masyarakat belum seluruhnya memahami betapa penting partisipasinya untuk menentukan masa depan bangsa ini, sehingga masih ditemukan masyarakat yang abai untuk berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya pergi ke TPS karena lebih tertarik dan mementingkan bertani atau mencari ikan kelaut demi kelangsungan hidupnya. ***Ketiga***, masyarakat juga belum seutuhnya memahami bahwa pentingnya pengetahuan dan kompetensi tentang kepemiluan berpengaruh pada kualitas aspirasi yang disampaikan. Mengingat masih ditemukan adanya anggota masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah bahkan masih ditemukan anggota masyarakat yang buta huruf.

jdih.kpu.go.id

Penutup

Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat dapat diselenggarakan dengan aman dan lancar berjalan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal namun demikian terdapat catatan perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Secara nasional, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 yaitu 81 persen lebih atau meningkat hampir 10 persen jika dibandingkan pada Pemilu 2014. Capaian target partisipasi pemilih yang dicanangkan oleh KPU RI sebesar 77,5 persen dapat dicapai dan melebihi target yang telah ditentukan.

Catatan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 menorehkan angka tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang penyelenggaraan pemilu yakni mencapai 82 persen, di mana partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mencapai angka 82,17 persen, Pemilu DPR RI dan DPD RI mencapai angka 82 persen, DPRD Provinsi sebesar 81,89 persen, dan DPRD Kabupaten/Kota sebesar 82,87 persen. Angka tersebut meningkat 5 hingga 8 % jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 lalu, Pileg (73,63 persen) dan Pilpres (76,60 persen). Pencapaian ini tidak telepas dari kerja keras penyelenggara pemilu dan berbagai pihak terkait yang terlibat dalam pemilu. Pencapaian ini diharapkan menjadi tolak ukur untuk penyelenggaraan pemilu yang akan datang agar lebih baik dan partisipasi masyarakat semakin meningkat.

Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu yaitu salah satunya konsep sosialisasi dan pendidikan pemilih yang perlu menjadi perhatian bersama untuk terus dimaksimalkan sebagai sarana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dari pemilu ke pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

R.I., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

R.I., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang "Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum, 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Jurnal

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, *Suara KPU Kalbar*, Pontianak (Edisi 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun 2019)

Makalah

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, *Deskripsi Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Barat*, Pontianak (September 2019)

Modul

Komisi Pemilihan Umum, 2010, *Modul 1 : Pemilu untuk Pemula*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum, 2010, *Modul 2 : Siap menjadi Pemilih*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum, 2010, *Modul 3 : Memilih dengan Cerdas & Cermat*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id

Pesta Demokrasi bagi Pemilih Disabilitas di DKI Jakarta

Oleh: Marlina
Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta

Usai sudah pesta demokrasi tahun 2019. Layaknya sebuah pesta, tentunya seharusnya semua pihak bergembira. Tentunya kegembiraan ini punya catatan tersendiri mulai dari masa persiapan, pelaksanaan sampai dengan terpilihnya pemimpin-pemimpin negeri ini baik di badan eksekutif maupun di badan legislatif.

Pemilu serentak tahun 2019 menimbulkan banyak kontroversi. Banyak kalangan menilai bahwa penyelenggaraan pemilu kali ini adalah pemilu yang paling rumit di dunia dan menimbulkan permasalahan yang kompleks baik bagi penyelenggara, peserta pemilu maupun bagi pemilih. Hal ini dikarenakan digabungkannya dua jenis pemilihan sekaligus yakni pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bagi penyelenggara, kesulitan terutama dirasakan oleh penyelenggara di tingkat kecamatan yang disebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), penyelenggara di tingkat kelurahan yang disebut Panita Pemungutan Suara (PPS) dan penyelenggara di tingkat TPS yang disebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

PPK misalnya. Kendala yang dialami oleh PPK adalah pada saat melaksanakan Rekapitusi Hasil Pemungutan Suara dari TPS. Selain terkendala waktu yang sangat singkat sementara jumlah TPS yang harus direkap cukup besar, juga terkendala dengan masalah gudang untuk menyimpan kotak suara yang berasal dari TPS. Sementara kendala yang dialami oleh PPS adalah ketika merekrut KPPS. Pembatasan dua periode bagi penyelenggara untuk setiap tingkatan cukup menyulitkan PPS. Selain perekrutan KPPS, PPS juga cuup kesulitan melakukan Bimtek kepada KPPS. Dengan hanya membimtek satu kali untuk empat orang KPPS tidaklah cukup untuk memberikan pemahaman yang mumpuni untuk memahami tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, apalagi dengan jumlah surat suara yang harus diberikan kepada pemilih yang cukup beragam, dan tata cara pengisian Berita Acara. Untuk KPPS sendiri juga cukup kesulitan memahami jenis pemilih dan jenis surat suara yang harus diberikan kepada setiap pemilih tersebut. KPPS sangat kesulitan ketika pengisian Berita Acara. Bahkan ada KPPS yang menyelesaikan pengsian Berita Acara di tanggal 18 April 2019.

Meskipun menemukan banyak kendala namun semua bisa teratasi berkat kesigapan para pimpinan KPU RI melalui regulasi-regulasi yang bisa mengatasi

setiap permasalahan di semua tingkatan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa meskipun pemilu kali ini adalah pemilu paling rumit tapi tidak sedikit pihak juga yang mengatakan bahwa pemilu 2019 adalah pemilu yang sukses.

Kesuksesan pemilu serentak tahun 2019 di DKI Jakarta bukan hanya sekedar bisa mengantarkan para anggota dewan sampai ke Kebon Sirih, akan tetapi juga bisa dilihat dari tingkat partisipasi yang meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya. Target capaian tingkat partisipasi yang KPU RI sebesar 77,5 % bisa terlampaui, sebagaimana tabel di bawah ini,

No	PEMILU	Tahun 2009	Tahun 2014	Tahun 2019
1	PILEG	58,13 %	66,48 %	78,42 %
2	PILPRES	69,11 %	72,33 %	79, 23 %

Semua elemen masyarakat dalam pemilu mempunyai hak konstitusional yang sama, baik dipilih ataupun memilih, kecuali beberapa kasus hukum yang telah mendapatkan hasil Inchraht yang menyebabkan seseorang tidak layak untuk dipilih, karena melanggar nilai dan norma hukum positif di sebuah Negara, khususnya Indonesia. Kaum penyandang disabilitas adalah segmen potensial yang menentukan tingkat keterpilihan seseorang atau tingkat partisipasi pemilu disuatu daerah.

KPU Provinsi DKI Jakarta bersama KPU Kabupaten/Kota sangat massif melaksanakan sosialIsasi. Kami harus memastikaan bahwa semua elemen masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar tentang pelaksanaan pelmuli tahun 2019 tersebut.

Sesuai amanat PKPU 10 Tahun 2019 , terdapat sembilan kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi. Kelompok ini harus dipastikan mendapatkan materi sosialiassi yang utuh terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019

Kelompok sasaran yang dimaksud adalah:

a. Pemilih yang berbasis: keluarga; Pemilih pemula; Pemilih muda; Pemilih perempuan; Pemilih Penyandang disabilitas; . Pemilih berkebutuhan khusus; kaum marjinal; komunitas; keagamaan; relawan demokrasi; dan warga internet (netizen);
b. masyarakat umum;
c. media massa;
d. Partai Politik Peserta Pemilu;

e. Pengawas; Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri;
f. organisasi kemasyarakatan;
g. masyarakat adat; dan
h. instansi pemerintah.

Adapun materi sosialisasi pemilu yang disampaikan mencakup:

a. Seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:

Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; .pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu; .penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; kampanye dan dana kampanye Pemilu; .pemungutan dan penghitungan suara; .penetapan hasil Pemilu; dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;dan

b. Materi lain terkait tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam melakukan dan menyanapaikan materi sosialisasi, KPU DKI menggunakan metode forum warga; komunikasi tatap muka; media massa; bahan sosialisasi; alat peraga sosialisasi; Mobilisasi Sosial; pemanfaatan budaya popular ; pemanfaatan budaya lokal/tradisional; laman , KPU Provinsi DKI Jakarta dan juga laman KPU Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta; media sosial; media kreasi; dan bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilu dengan baik, misalnya dengan bekerja sama dengan pengurus tempat-tempat ibadah.

Capaian tingkat partisipasi yang tinggi ini tentunya bukan hanya berkat kerja keras para penyelenggara, akan tetapi juga berkat kerjasama dan kontribusi dari para pemangku kepentingan, terutama dalam hal ini peserta pemilu dan media.

KPU Provinsi DKI Jakarta bukan hanya sukses dalam peningkatan tingkat partisipasi pemilih saja, akan tetapi pada saat Konsolidasi Nasional yang dilaksanakan oleh KPU RI dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 September, tetapi juga mendapatkan penghargaan Terbaik II Provinsi Tingkat Nasional Kategori Pemilu Akses Tahun 2019.

jdih.kpu.go.id

Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, KPU Provinsi DKI Jakarta sangat massif dan cukup intens melakukan sosialisasi terhadap pemilih disabilitas. Walaupun banyak issue negatif yang ditujukan kepada KPU dan jajarannya cukup membuat telinga panas berkaitan dengan dibolehkannya pemilih disabilitas mental menggunakan hak pilihnya. Banyak pihak menilai ahwa ketentuan KPU yang mengakomodir penyandang disabilitas mental untuk memilih di Pemilu 2019 menuai pro kontra. Bagi yang pro tentu berargumen sebagaimana KPU menyatakan bahwa hak itu diberikan atas dasar putusan MK tahun 2015 dan atas kualifikasi sakit jiwanya apakah permanen atau tidak. Bagi yang kontra jelas pada 'sakit jiwa' jenis apapun dia terganggu kejiwaannya. Meski dapat membedakan partai politik atau orang, tapi atas pilihan dari jiwa yang tak sehat jelas tak bisa dipertanggung jawabkan. Walau banyak pihak yang mencaci dan memaki, KPU khusus KPU Provinsi DKI Jakarta tidak bergeming, dan tetap memfasilitasi pemilih disabiltas mental dengan baik. Kami harus memastikan bahwa semua pemilih bisa terlayani dengan baik termasuk pemilih diabilitas. Kami harus memastikan bahwa pemilih disabilitaspun bisa mengakses dan melaksanakan seluruh proses pemungutan suara di TPS secara mandiri dalam menggunakan hak pilihnya.

Menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas *(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)*, istilah "disabilitas" mengacu pada kelompok orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau keterbatasan kemampuan sensorik jangka panjang. Kondisi disabilitas bisa muncul karena kelainan sejak dalam kandungan, atau karena kecelakaan dan penyakit-penyakit tertentu. Mereka juga kerap menghadapi berbagai hambatan dari lingkungannya atau pihak lain, sehingga sulit berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan kegiatan.

Keberagaman pemilih disabilitas bukanlah sebuah alasan untuk menelantarkan hak politik mereka. Tentu saja, akan ada warna tersendiri dari keaksesibilitasan yang mesti dipersiapkan di lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Berbicara aksesibilitas untuk disabilitas Netra, tentunya akan berbeda pelayananya dengan akses disabilitas untuk disabilitas tuna daksa. Demikian juga bagi disabilitas rungu, *down syndrome* atau disabilitas lainnya perlakuan pelayanan juga ikut berbeda.

Pelayanan pemilih disabilitas secara umum dimulai sejak pemutakhiran data pemilih. Pelayanan ini dilakukan dari rumah ke rumah untuk memastikan dan mencatat anggota keluarga yang memiliki hak pilih termasuk kaum disabilitas agar tercatat dengan baik. Terlebih lagi di DKI Jakarta, terdapat tempat khusus yakni banyak Panti Sosial yang menampung pemilih disabilitas, terutama disabilitas mental.

Infografis DPT DKI Jakarta

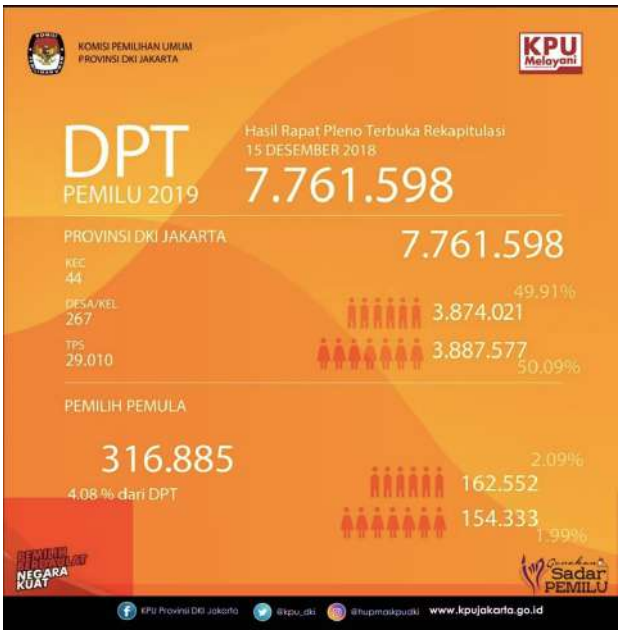

Setelah melakukan Pleno, KPU Provinsi DKI Jakarta mendapatkan data pemilih disabilitas sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Infografis Data Pemilih Disabilitas DKI Jakarta Pemilu 2019

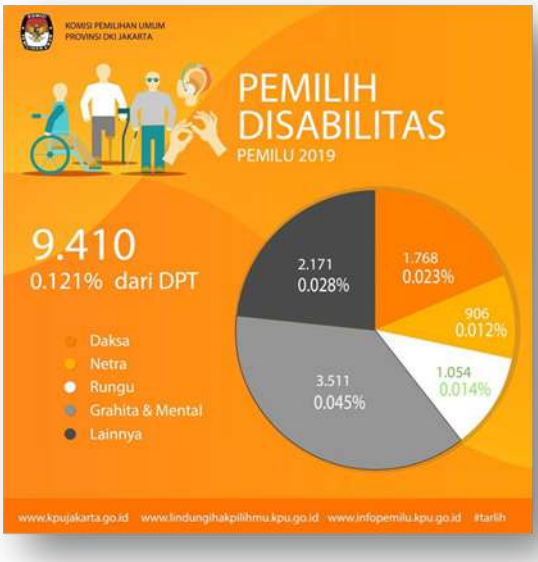

Walaupun teman-teman Pantarlih sudah melakukan pemutakhiran dan mendata pemilih disabilitas, akan tetapi data ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan jumlah riil pemilih disabilitas terutama yang tersebar dalam masyarakat. Hal ini disebabkan terkadang ada keluarga yang memiliki anggota keluarga yang disabilitas khususnya disabilitas mental dianggap sebagai suatu aib. Namun, angka yang didapatkan adalah suatu upaya yang sudah dilakukan oleh Pantarlih dalam rangka perbaikan pelayanan Pemilih di TPS terhadap kaum disabilitas.

Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan, selain untuk pemetaan pelayanan yang dilakukan oleh KPU, data yang dimaksud dapat juga memberikan gambaran kebutuhan sosialisasi dan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana disampaikan dalam Bimtek PPK, PPS dan KPPS secara spesifik KPU DKI Jakarta selalu menekankan beberapa hal dalam bentuk pelayanan mereka di TPS, yang juga dapat menjadi *best practises* antara lain:

a. Tersedianya template Braille untuk tuna netra walaupun masih terbatas untuk jenis Pemilihan Presiden Wakil Presiden dan Pemilu DPD;

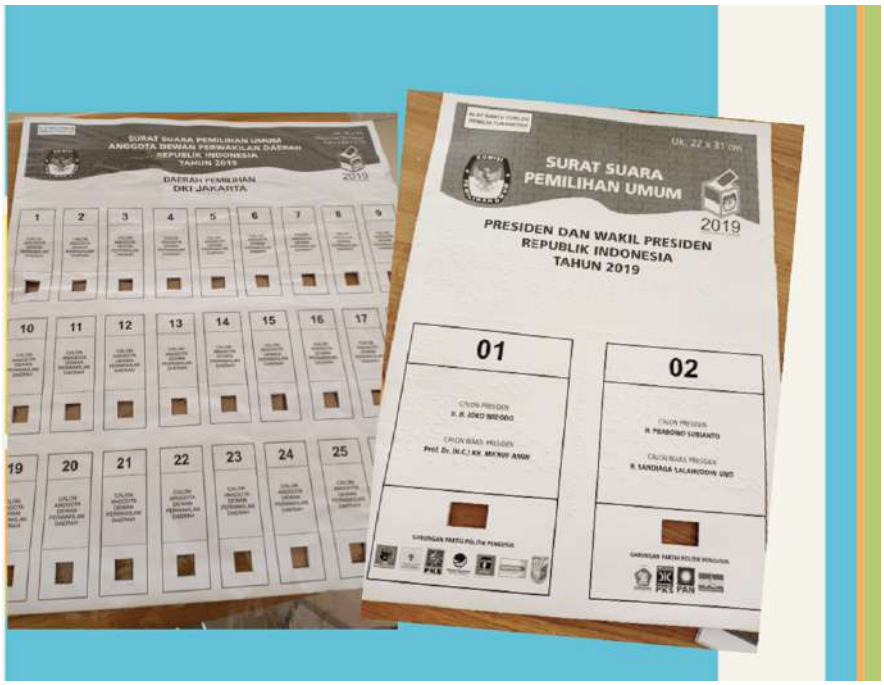

b. Lebar pintu minimal 100 cm untuk kemudahan pemilih tuna daksa yang masuk menggunakan kursi roda atau tongkat; Posisi meja untuk mencoblos dan tempat menyimpan botol tinta, maksimal 90 cm, Posisi kotak suara tidak lebih diletakkan meja yang tingginya maksimal 80 cm;

c. Pendirian TPS diusahakan di tanah yang datar dengan tidak bertangga/ berundak-undak atau berbatu dan berumput tebal . Untuk kondisi geografis DKI Jakarta, yang memiliki banyak gang kecil dan sempit tentu menemukan kondisi ini dan masih menemuka kendala. Namun, KPPS diminta untuk memastikan TPS terdekat akses yang ramah bagi pemilih disabilitas di lingkungan yang bersangkutan;

d. KPPS diminta untuk menepuk pundak yang bersangkutan dalam hal pelayanan pemilih tuna rungu atau tuna wicara di TPS dalam hal memanggil yang bersangkutan masuk TPS.

e. Bagi pemilih disabilitas netra, KPPS diminta menawarkan Form C3 jika pemilih disabilitas membutuhkan pendamping masuk ke dalam bilik untuk mencoblos. Form C3 ini adalah surat pernyataan bagi pendamping disabilitas netra yang berisi kesediaan sukarela atas persetujuan pemilih yang bersanagkutan dengan tetap menjaga kerahasiaan pilihan yang didampingi tersebut.

f. Materi sosialisasi dengan huruf braille untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Caleg Anggota DPD.

g. Memfasilitasi penggunaan aula KPU DKI Jakarta untuk rapat, kelas politik dan Trainning For Trainer untuk teman-teman pengurus Perhimpunan Jiwa Sehat yang diketuai Yeni Rosa. Kelas politik yang dimaksudkan disini lebih menekankan kepada tata cara penggunaan hak pilih dan seputar informasi tentang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Dalam forum ini Perhimpunan Jiea Sehat menghadirkan Narasumber dari Perludem dan Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta. Peserta Forum ini menyasar kepada para pengurus Perhimpunan Jiwa Sehat. Para peserta diharapkan akan menjadi narasumber di wilayahnya masing-masing.

h. Memberikan peluang sebesar-besarnya kepada disabilitas untuk menjadi penyelenggara pemilu pada Badan Adhoc dan relawan demokrasi.

i. Dengan alasan mendekatkan pemilih ke TPS dan atas permintaan pihak pengelola Panti, KPU Provinsi DKI Jakarta juga memutuskan mendirikan TPS di dalam atau terdekat dari Panti Sosial yang dimiliki DKI Jakarta. Selain memudahkan pemilih disabilitas mental menggunakan hak pilihnya, juga mempertimbangkan faktor keamanan. Dengan adanya TPS di dalam panti para pemilih disabilitas tetap bisa terpantau. Pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, KPU Provinsi DKI Jakarta baru bisa menjangkau panti-panti yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni yang berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Di Jakarta Barat bernama Panti Laras 1 dan Panti Laras 3. Di Panti Laras 1didirikan 3 TPS dan di Panti Laras 3 didirikan 4 TPS. Di Jakarta Timur bernama Panti Laras 2. Di Panti Laras 2 ini didirikan….TPS

jdih.kpu.go.id

j. Melayani tamu mancanegara yang bergabung dalam Election Observer di beberapa panti sosial di DKI Jakarta.

KPU DKI Jakarta amat menyadari bahwa pemilih disabilitas tetap memiliki hak yang sama dalam mengikuti pemilu dan menyumbangkan suaranya setiap kali proses Pemilihan Umum. Keikutsertaan pemilih disabilitas dalam pemilu diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain menegaskan hak politik disabilitas, UU tersebut juga menjelaskan bahwa mereka berhak mendapatkan ketersediaan akses untuk menyalurkan hak pilihannya. Didalam Penjelasan Pasal 5 menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'kesempatan yang sama' adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat".

Selain yang disebut di atas, ada juga *best practises* KPU DKI Jakarta dalam mengantisipasi lebih dini terkait merespon definisi Pemilih, yang semula didefinisikan bahwa selain yang berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah, namun juga ditambah dengan "sedang tidak terganggu jiwanya" (termaktub dalam PKPU 11/208, tetapi tidak secara spesifik ada dalam UU 7/2017.

KPU Provinsi DKI Jakarta kemudian mengusahakan agar pendataan pemilih dengan klausul "sedang tidak terganggu jiwanya" dapat dimaknai dengan baik, sementara kondisi DKI Jakarta memiliki banyak panti sosial psikotik dengan jumlah warga binaan sekitar 2000-an jiwa. Untuk mengantisipasi bahwa pemilih yang terdaftar adalah yang sedang tidak terganggu jiwanya (sesuai PKPU 11/2018), KPU DKI Jakarta menyadari bahwa hal ini dapat menjadi potensi persoalan di DKI Jakarta mengingat banyak sekali panti sosial psikotik yang berada dalam lingkup kerja Provinsi DKI Jakarta.

Dikarenakan tidak ada pembiayaan terkait pemeriksaan kesehatan jiwa dalam hal pembuktian terkait "sedang tidak terganggu jiwanya" mengingat ada beberapa spektrum penyakit kejiwaan, KPU DKI Jakarta merasa perlu untuk meminta bantuan Pemerintah Daerah DKI Jakarta (c.q Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Dukcapil) untuk dapat membantu mengoordinasikan Warga Binaan dengan dilengkapi NIK/NKK serta surat keterangan kesehatan jiwa. Kerja sama ini dilakukan selama sebulan yang mendatangkan dokter spesialis kejiwaan untuk masuk ke dalam panti sosial dan melakukan pemeriksaan disertai dengan kelengkapan kewarganegaraan dengan mengidentifikasi Warga dan melengkapi NIK/NKKnya.

KPU DKI Jakarta sesungguhnya sudah mendapatkan data pemilih dengan klausul sedang tidak terganggu jiwanya dan telah ditetapkan dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu. Namun kemudian, muncul protes dari NGO/LSM terhadap diberlakukannya klausul ini

dengan argumentasi bahwa PKPU tidak sejalan dengan klausul UU di atasnya. Kemudian KPU RI mengeluarkan Edaran KPU Nomor 1401 tanggal 13 November 2018 tentang Pendaftaran Pemilih bagi Penyandang Disabilitas Grahita/Mental untuk menindaklanjutinya. Setelah dipelajari bahwa ternyata definisi antara Disabilitas Tuna Grahita/mental dengan "pemilih yang terganggu jiwanya" adalah berbeda. Menurut beberapa literatur, definisi Tuna Grahita adalah orang dengan kecerdasan dibawah rata-rata atau disebut dengan keterbelakangan mental; sementara definisi gangguan mental adalah berbagai kondisi dengan suasana hati, berpikir dan berperilaku (depresi mayor, kecemasan, bipolar dst). Hal inilah yang tidah banyak difahami banyak orang. Mereka tidak membedakan antara keterbelakangan mental dan gangguan mental.

Pasca keluarnya Edaran KPU RI 1401, KPU DKI Jakarta menyesuaikan dengan memasukkan kembali data pemilih sesuai ketentuan, yakni sepanjang yang bersangkutan adalah penduduk Indonesia yang memiliki eKTP dimasukkan dalam data Pemilih DKI Jakarta.

Lebih lanjut disampaikan, pasca diskusi di KPU RI terkait pemilih disabilitas, KPU DKI Jakarta bekerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang berjuang untuk pemilih disabilitas dalam hal melakukan beberapa kali sosialisasi di Pertuni, melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk masuk ke dalam Panti Sosial Psikotik, SLB (Sekolah Luar Biasa), kelompok disabilitas lainnya. Demikian pula dengan Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia dalam hal memfasilitasi kegiatan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang melakukan edukasi Pemilu. Ke depannya, pelayanan yang ramah dan santun tentunya sangat diharapkan oleh seluruh pemilih tidak kecuali. Pihak penyelenggara pemilu yang di tempatkan di TPS hendaknya mempersiapkan diri untuk segala bentuk peserta pemilih. Pemilu akses bagi para pemilih bukan hanya ditujukan untuk pemilih disabilitas, tetapi juga akses untuk ibu hamil, dan lansia di TPS, yakni dengan mendahulukan kesempatan memberikan hak pilih kepada mereka jika terdapat antrian di TPS.

Apabila semua pemilih terlayani dengan baik tentunya berefek kepada keberhasilan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Sebuah kondisi yang nyaman dan aman dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Pesta demokrasi tidak lagi diskriminasi. Satu suara sangat berarti. Satu suara akan membantu menciptakan sebuah perubahan, serta turut menentukan pemimpin walau hanya satu pemilih disabilitas sekalipun.

Berikut kami sampaikan tingkat partisipasi Pemilih Disabilitas berdasarkan DPT untuk 3 Dapil DPR RI di DKI Jakarta.

Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas DKI Jakarta Pemilu 2019

NO	PEMILIH	PEMILU					% HASIL PILPRES DAN DPR
		PILPRES	DAPIL DPR				
			DPR I	DPR II	DPR III	TOTAL	
1	JUMLAH PEMILIH	10,095	3,598	2,565	3,932	10,095	
2	PENGGUNA HAK PILIH	8,265	2,798	1,962	3,025	7,785	
% TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH		**81.87%**				**77.12%**	**79.49%**

Dari tabel terlihat bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas DKI Jakarta sangat tinggi untuk karakteristik masyarakat perkotaan, yakni 79,49%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi mereka meningkat dari Pemilu sebelumnya, juga Pilgub DKI Jakarta 2017. Tingkat kesadaran pemilih untuk datang ke TPS memperlihatkan kepedulian pemilih, termasuk pemilih dengan disabilitas di DKI Jakarta.

Sebagai bahan pertimbangan KPU RI dalam melakukan penilaian lebih lanjut, disampaikan daftar isian instrumen penilaian yang terdiri atas (dokumen pendukung terlampir):

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	INDIKATOR	PENILAIAN					NILAI	KETERANGAN (DOKUMEN PENDUKUNG)
			SKOR						
			1	2	3	4	5		
			Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali		
1	Pemilu/Pemilihan yang akses	Aksesibilitas dan fasilitas tempat pemungutan suara					Baik Sekali		Dokumentasi foto
		Persentase pemilih disabilitas yang dilayani					Baik Sekali (79,5%)		Form DC 1
		Adanya template untuk penyandang disabilitas					Baik Sekali		Dokumentasi

Dokumentasi Foto Sosialisasi KPU Provinsi DKI Jakarta
Pemilu Akses

Sosialisasi bagi Komunitas Waria Jakarta Selatan di Kantor LSM Srikandi Drop In (Komunitas Waria/Community Best Center

Sosialisasi Bagi Warga Binaan
Panti Bina Laras Sentosa 1

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU CALL CENTER
DKI JAKARTA
KPU DKI 081317293700
KPU JAKTIM 085210691918
KPU JAKUT 081250494550
KPU JAKSEL 082299932023
KPU JAKPUS 08979073692
KPU JAKBAR 081381618182
KPU P. SERIBU 081513160551

PETA PARTISIPASI PEMILIH RIAU PADA PEMILU 2019

Oleh: Nugroho Noto Susanto
Anggota KPU Provinsi Riau

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan secara deskriptif peta tingkat partisipasi pemilih Riau di Pemilu 2019. Obyek utama tulisan ini tentunya data pemilih dan partisipasi pemilih pemilu 2019. Tulisan ini menemukan fakta bahwa data pemilih laki-laki di Riau lebih tinggi daripada perempuan. Namun tingkat partisipasi perempuan justru lebih tinggi. Tingginya partisipasi pemilih perempuan di Riau, tidak berhubungan positif dengan keterpilihan calon perempuan. Tulisan ini juga menemukan fakta bahwa suara tidak sah tertinggi adalah pemilu DPD RI, sedangkan suara tidak sah terendah adalah pemilu presiden/wakil presiden.

Penulis merekomendasikan perlunya penguatan pendidikan pemilih perempuan agar keterpilihan perempuan menjadi signifikan. Kemudian politisi perempuan juga perlu menguatkan kapasitas kepemimpinan publiknya. Sedangkan pendidikan pemilih terkait teknis pencoblosan lebih ditingkatkan lagi agar suara tidak sah lebih bisa ditekan. Secara kualitatif, tantangan partisipasi pemilih seperti politik uang, mobilisasi, politik klientelisme, konsumsi informasi bohong, masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya hilang.

Kata Kunci : Partisipasi Pemilih, Pendidikan Pemilih, Pemilih Perempuan, Pemilih Laki-laki, Pemilih Disabilitas, Suara sah dan Tidak Sah, Kualitas Partisipasi Pemilih

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Salah satu ciri negara demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah terdapatnya pemilihan umum. Pemilu pertama dilaksanakan pada 1955, dan paling terakhir adalah pemilu 2019. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama diterapkan di Indonesia. Keserentakan tersebut karena menggabungkan antara pemilihan presiden/wakil presiden, dan pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebelum 2019, pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan legislatif selalu dipisahkan.

Salah satu isu strategis yang berkembang dalam studi demokrasi dan pemilu adalah partisipasi pemilih. Pentingnya studi partisipasi pemilih, karena studi tersebut berkaitan erat dengan kesuksesan suatu penyelenggaraan pemilu. Sederhananya, semakin tinggi partisipasi pemilih, maka tingkat kesuksesan pemilu terhitung baik. Sebaliknya, semakin rendah partisipasi pemilih, maka rendah pula tingkat kesuksesan penyelenggaraan pemilu.

Kehadiran atau tidak tidak hadirnya pemilih tidak selamanya karena faktor peran penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, namun bisa juga ada variabel lain seperti ideologi yang dianut oleh pemilih. Di Indonesia urgensi partisipasi pemilih termaktub dalam UUD 1945, undang-undang pemilu No.7 tahun 2017, Peraturan KPU tentang sosialisasi pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat.

Hasil pemilu 2019 sudah dapat dibaca oleh semua pihak. Kita tahu bahwa partisipasi pemilih pemilu 2019 mengalami peningkatan. Tingkat partisipasi nasional pemilu 2019 mencapai 81%, sedangkan di tingkat Provinsi Riau mencapai 84%. Artinya Partisipasi pemilih Riau lebih tinggi daripada rata-rata nasional.

Menurut penelusuran penulis, belum banyak peneliti atau penulis yang menganalisis hasil pemilu 2019 di Riau dari aspek partisipasi pemilihnya. Berangkat dari kondisi tersebut, penulis akan memetakan data partisipasi pemilih di Riau, khususnya hasil pemilu 2019. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dan analisis peta partisipasi pemilih Riau pada pemilu 2019.

A. Batasan Teoritis Partisipasi Pemilih

Merujuk pendapat Verba dan Nie (1974) partisipasi politik warga adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara untuk memengaruhi pilihan orang-orang untuk menduduki posisi-posisi pemerintahan dan atau untuk memengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah". Menurut Brady (1999), partisipasi politik pemilih mencakup empat konsep dasar yaitu adanya aktivitas atau aksi, dilakukan oleh warga negara biasa, tentang politik, dan pengaruh. Verba,Scholazman, dan Brady menekankan partisipasi politik pemilih sebagai tindakan suka rela, yang berarti bahwa para warga tidak dipaksa untuk melakukannya. (1995:38-39)

Menurut Kaase dan Marsh (1979:41) partisipasi politik terdiri dari dua jenis yaitu konvensional dan tidak konvensional. Bentuk konvensional mencakup segala aktivitas oleh warga negara biasa untuk memengaruhi hasil akhir dari proses politik yang sesuai dengan prosedur atau aturan baku, seperti pemungutan suara seorang calon untuk menduduki jabatan tertentu atau kampanye menjelang pemilu. Sementara partisipasi politik yang tidak konvensional adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh warga negara biasa untuk memengaruhi hasil akhir politik yang tidak berhubungan dengan norma-norma hukum dan kebiasaan yang mengatur partisipasi politik di bawah suatu rezim tertentu seperti demonstrasi, mogok kerja, boikot, dan penandatangan petisi.

Dari definisi Verba dan Nie, Kaase dan Marsh, kita menjadi mengerti bahwa partisipasi warga dalam politik merupakan tindakan suka rela, tindakan sadar, dan tindakan tersebut dituangkan dalam dua sisi yakni konvensional (pemilu) dan tidak konvensional (kontrol publik di luar pemilu). Untuk membatasi pembahasan, tulisan ini hanya mengulas partisipasi pemilih konvensional yang tertuang dalam prosedur baku demokrasi yakni pemilu.

Menurut Schumpeter, salah seorang ilmuwan ilmu politik terkemuka, keikursertaan warga negara dalam pemilu yang demokratis merupakan elemen dasar dari sebuah rezim demokrasi.(Schumpeter,1954) Dukungan warga negara di sini dapat dimaknai salah satunya dengan kehadiran warga dalam bilik suara untuk memberikan hak pilihnya. Artinya tanpa kehadiran warga dalam bilik suara secara signifikan tentu akan mengganggu kualitas dan integritas pemilu dan demokrasi.

Dari sini kita menjadi mengerti, bahwa partisipasi pemilih sesungguhnya hal paling mendasar dari tiap perbincangan tentang demokrasi dan pemilu. Mengingat filosofi fundamental dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka wajar saja jika perihal partisipasi pemilih merupakan ruh

dari perhelatan pemilu. Bahkan Schlozman, dan Brady (1995:1) menyebutnya sebagai "jantung demokrasi". Dapat kita bayangkan bagaimana jika jantung dalam tubuh kita tak berfungsi, tentulah tubuh akan mati. Begitupun demokrasi, jika pemilu tak mampu menghadirkan partisipasi pemilih secara esensial dan signifikan, maka bisa saja hakikat demokrasi menjadi mati.

Untuk itu, negara harus memberikan kebebasan bagi setiap warga untuk menyalurkan aspirasinya, pilihan politiknya. Pakar demokrasi, Cf Kaase dan Marsh (1979:28) mengingatkan, "demokrasi tidak dapat dibayangkan tanpa kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses bernegara". Pendapat ini menitikberatkan pada perlunya jaminan kebebasan yang diberikan negara dalam memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Tanpa jaminan kebebasan tersebut, maka demokrasi akan menemui jalan berliku dan terjal.

Bersyukur Indonesia dengan penduduk terbesar ke empat di dunia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, telah menjamin dalam konstitusi dan regulasi pemilu tentang kebebasan warga untuk memberikan aspirasi politiknya. Bahkan salah satu asas dari penyelenggaraan pemilu adalah asas kebebasan yang dianyam dalam satu akronim popular "Luber Jurdil" (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Partisipasi pemilih juga berkaitan dengan legitimasi perhelatan pemilu. Kaase dan Marsh (1979:30) menitikberatkan partisipasi pemilih berhubungan dengan legitimasi demokrasi. Legitimasi berkenaan dengan keabsahan kepemimpinan yang terpilih secara politik. Semakin tinggi partisipasi warga maka makin tinggi pula legitimasi hasil pemilunya. Makin tinggi legitimasi politiknya, maka makin tinggi kualitas demokrasi dan keabsahan pemimpin politik yang terpilih. Dalam kata lain, selain kebebasan warga untuk menuangkan aspirasi politiknya, luaran pilihan yang diberikan warga adalah pemimpin yang absah, memiliki legitimasi yang kuat. Dengan pemimpin yang demikian kuat di mata rakyat, maka harapan rakyat yang ditumpangkan ke wakil-wakil rakyat di eksekutif atau legislatif, akan terwujud.

B. Potret Partisipasi Pemilih Nasional

Sebelum mengurai tentang peta sederhana partisipasi pemilih pemilu 2019 di Riau, terlebih dulu saya akan gambarkan potret partisipasi pemilih pemilu nasional dari periode pemilu awal hingga paling terkini. Partisipasi pemilih dalam setiap pagelaran pemilu selalu berubah dan dinamis. Sejak era reformasi digelar, tren partisipasi pemilih cenderung menurun. Partisipasi pemilih kembali meningkat

jdih.kpu.go.id

pada pemilu serentak 2019. Itupun angkanya belum mencapai tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 1999, pemilu pertama pasca reformasi diberlakukan. Namun, partisipasi pemilih 2019 merupakan *Reborn* dari tingginya espektasi publik untuk ikut serta menentukan arah kepemimpinan bangsa melalui pemilu.

Jika kita tarik ke belakang lagi, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Orde Lama (1955) dan Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997, kemudian Orde Reformasi tahun 1999 cukup tinggi. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 1955 mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen. Baru pada era non-demokratis Orde Baru golput menurun. Pada Pemilu 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4 persen. Sementara Pemilu tahun 1977 dan Pemilu 1982 hampir serupa. Yakni, partisipasi pemilih sampai 96,5 persen dan jumlah golput mencapai 3,5 persen. Pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,4 persen dan jumlah golput hanya 3,6 persen. Pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi pemilih mencapai 95,1 persen dan jumlah golput mencapai 4,9 persen. Untuk Pemilu 1997 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6 persen dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen. (Nugroho Noto Susanto: 2015)

Pasca rezim reformasi diberlakukan, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih mencapai 92,6 persen dan jumlah Golput 7,3 persen. Eforia publik tentang kebebasan berpolitik benar-benar termanifestasi pada bilik suara. Namun hingga pemilu terakhir di era pasca reformasi, partisipasi pemilih ke Bilik Suara belum mampu naik kembali di angka 90-an persen.

Angka partisipasi pemilih Pemilu 2004 tercatat di angka 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi pemilih semakin menurun dengan bertengger di angka 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi pemilih hanya 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen. Sementara itu, pada pileg 2014 partisipasi pemilih mengalami kenaikan sedikit. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 75,11 persen. Sementara itu partisipasi pemilih di pilpres 2014 hanya di angka 70 persen.

Kabar baiknya, pada Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih baik pileg maupun pilpres mengalami peningkatan drastis. Meski belum menyamai tingkat partisipasi pemilih di pemilu 1999, ataupun pemilu legislatif 2004, namun pemilu serentak 2019 dengan tingkat kerumitan yang jauh lebih berat dibanding

model pemilu sebelum-sebelumnya, justru partisipasi pemilihnya menunjukkan peningkatan signifikan. Pada pemilu 2019, baik pemilu kategori pileg, maupun pemilihan presiden mengalami kenaikan yakni 81,69 persen untuk tingkat partisipasi pileg, dan 81,97 persen untuk pemilu Pilpres. Selanjutnya lihat tabel di bawah ini.

Tingkat Partisipasi Pemilih Nasional Pemilu Pasca Reformasi

(Olah Data Penulis Dari Berbagai Sumber)

Kategori	Kehadiran (%)	Ketidakhadiran (%)
Pileg 1999	**92,6**	**7,4**
Pileg 2004	**84,1**	**15,9**
Pilpres 2004 (Putaran I)	78,2	21,8
Pilpres 2004 (Putaran II)	76,6	23,4
Pileg 2009	70,9	29,1
Pilpres 2009	71,7	28,3
Pileg 2014	75,11	24,89
Pilpres 2014	70	30
Pilpres 2019	**81,97**	**18,03**
Pileg 2019	**81,69**	**18,31**

C. Peta Partisipasi Pemilih Riau

Tulisan ini akan mengurai tentang peta partisipasi pemilih yang masih sederhana di Provinsi Riau. Peta partisipasi pemilih yang akan digambarkan adalah perbandingan data pemilih laki-laki dan perempuan, dan partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan, baik abilitas maupun disabilitas. Kemudian ulasan ini juga menggambarkan suara sah dan tidak sah. Mengingat keterbatasan sumber data, peta partisipasi pemilih ini baru dapat menggambarkan hal tersebut.

Secara umum, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat provinsi, partisipasi pemilih pemilu 2019 mengalami kenaikan signifikan. Tingkat partisipasi pemilih nasional pemilu 2019 tersebut melampaui target nasional yang ditetapkan 77,5%. Angka partisipasi pemilih nasional juga melonjak 11 % dari capaian partisipasi pemilih pemilu 2014 yang berada di angka 70%. Sementara partisipasi pemilih pada pemilu presiden/wakil presiden 2019 di Riau mencapai 84,68%. Angka tersebut mengungguli target nasional dan capaian partisipasi pemilih nasional. Dibanding partisipasi pemilih pemilu presiden/wakil presiden 2014, pemilih Riau pada pemilu 2019 melonjak tinggi. Pada pemilu 2014, partisipasi pemilih Riau kategori pemilihan presiden/wakil presiden hanya berada di 62,75%, sehingga terdapat kenaikan partisipasi 21,93%.

C.1. Partisipasi Pemilih Laki-laki dan Perempuan

Untuk menguraikan peta partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan di pemilu 2019, khusus di Provinsi Riau, penulis sajikan tabel di bawah yang mendokumentasi tentang data pemilih dan partisipasi pemilih Riau pada pemilu 2019. Merujuk dari data pemilih tetap pemilu 2019 di provinsi Riau, terdapat 3.863.305 pemilih terdiri dari 1.963.287 pemilih laki-laki dan 1.900.018 pemilih perempuan. Artinya pemilih laki-laki lebih besar dari pemilih perempuan dengan perbandingan 51% pemilih laki-laki dan 49% pemilih perempuan. Dibanding data pemilih pemilu 2014, pemilih pemilu 2019 di Riau mengalami penurunan. Pada pemilu 2014, data pemilih mencapai 4.079.513 (KPU Riau:Laporan Hasil Pemilu 2014, h. 80).

Salah satu penjelas mengapa terjadi penurunan data pemilih tersebut adalah karena adanya peningkatan kualitas akurasi data pada pemilu 2019. Seperti diketahui, data pemilih juga punya potensi persoalan yang menyertainya seperti pemilih ganda, belum cukup umur, pindah domisili, meninggal dunia, terdaftar sebagai anggota TNI/Polri, dan data tidak dikenal. Jika data pemilih berkurang pada pemilu 2019, bisa dipahami sebagai berkurangnya persoalan yang terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Memang, penyelenggara pemilu tidak menutup mata juga atas masih terdapatnya pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada pemilu 2019. Data DPK memberi isyarat masih ada pemilih yang belum terdaftar di DPT. Namun harus dipahami pula, bahwa basis DPT adalah indentitas kartu tanda penduduk elektronik. Sehingga terdapatnya pemilih DPK, menandakan masih banyak pula penduduk yang belum memperoleh KTP elektronik.

Dari data partisipasi pemilih pemilu 2019 kategori pemilihan presiden/wakil presiden, pemilih perempuan justru lebih tinggi dari pada pemilih laki-laki baik dari sisi jumlah pemilihnya, maupun dari sisi persentase. Pemilih perempuan

yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai 1.641.153 pemilih, sedangkan laki-laki 1.630.377 pemilih. Dilihat dari persentase, pemilih perempuan menempati posisi 50,2%, sedangkan laki-laki berada di posisi 49,8%. Dari data ini, dari pemilu presiden 2019 dapat kita ambil simpulan bahwa tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Padahal jumlah data pemilih perempuan lebih rendah dari pada pemilih laki-laki. Selanjutnya lihat tabel berikut ini.

jdih.kpu.go.id

KATEGORI	DAPIL	DATA PEMILIH (DPT)			PENGGUNA HAK PILIH (DPT + DPTb + DPK)			TINGKAT PARMAS (%)		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
PILPRES	RIAU	1.963.287	1.900.018	3.863.305	1.630.377	1.641.153	3.271.530	83,04	86,38	84,68
DPD RI	RIAU	1.963.287	1.900.018	3.863.305	1.624.470	1.635.552	3.260.022	82,74	86,08	84,38
DPR RI	RIAU I	1.116.840	1.086.588	2.203.428	936.735	954.273	1.891.008	83,87	87,82	85,82
	RIAU II	846.447	813.430	1.659.877	687.949	681.762	1.369.711	81,27	83,81	82,52
DPRD PROVINSI	RIAU 1	250.082	257.131	507.213	227.886	248.764	476.650	91,12	96,75	93,97
	RIAU 2	241.054	234.381	475.435	204.412	207.187	411.599	84,80	88,40	86,57
	RIAU 3	159.427	155.219	314.646	138.694	137.311	276.005	87,00	88,46	87,72
	RIAU 4	202.936	194.939	397.875	160.035	158.095	318.130	78,86	81,10	79,96
	RIAU 5	364.132	346.427	710.559	291.359	294.143	585.502	80,01	84,91	82,40
	RIAU 6	246.349	233.962	480.311	210.955	204.941	415.896	85,63	87,60	86,59
	RIAU 7	240.147	225.218	465.365	177.286	169.177	346.463	73,82	75,12	74,45
	RIAU 8	259.161	252.740	511.901	213.538	215.295	428.833	82,40	85,18	83,77

Dari tabel di atas, untuk kategori pemilu DPD RI, terdapat 1.624.470 pemilih laki-laki (82,74%) yang menggunakan hak pilihnya, berbanding 1.635.552

pemilih perempuan (86,08%). Secara keseluruhan terdapat 84,38% atau sebanyak 3.260.022 pemilih yang menggunakan hak suara. Sementara yang tidak hadir ke TPS terdapat 603.283 pemilih (15,62%).

Pada pemilu DPR RI, dari dua belas Kabupaten/Kota yang ada, Riau hanya dibagi ke dalam dua Dapil saja. Dua dapil tersebut adalah Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan kota Dumai masuk pada wilayah dapil satu, dan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, masuk dalam wilayah dapil Riau dua.

Pada dapil Riau satu terdapat pemilih laki-laki sebanyak 1.116.840, dan pemilih perempuan 1.086.588. Jumlah keseluruhan pemilih di dapil satu adalah 2.203.428. Dalam catatan KPU Riau, pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 936.735 jiwa (83,87%), sedangkan pemilih Perempuan 954.273 (87,82%). Jumlah total kehadiran baik laki-laki dan perempuan adalah 1.891.008 (85,82%). Di Dapil Riau satu tampak pemilih perempuan lebih sedikit daripada pemilih laki-laki. Namun pengguna hak pilih di Dapil satu, justru jumlah pemilih dan tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih besar daripada pemilih laki-laki. Hanya saja, di Dapil 1, tidak ada satupun keterwakilan perempuan yang melenggang ke senayan.

Di dapil Riau dua, terdapat pemilih laki-laki sebanyak 846.447, dan Perempuan 813.430. Total pemilih di Dapil dua sebesar 1.659.877 jiwa. Dari sejumlah pemilih tersebut, pemilih Laki-laki yang memberikan hak suara sebanyak 687.949 jiwa (81,27%), dan pemilih perempuan yang nyoblos di TPS sebanyak 681.762 jiwa (83,81%). Total kehadiran pemilih di Dapil Riau dua adalah 1.369.711 (82,52%). Dari data pengguna hak pilih di Dapil Riau dua, kita kembali dikonfirmasi bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi secara persentase.

Namun, serupa dengan wajah keterwakilan politik di Dapil Riau satu, tidak ada satupun calon perempuan yang menduduki kursi wakil rakyat di Senayan. Empat calon terpilih di dapil Riau untuk pemilu DPR RI adalah laki-laki. Kalau kita kumulatifkan kehadiran pemilih di pemilu kategori DPR RI Dapil Riau, terdapat 3.260.719 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dengan tingkat partisipasi sebesar 84,17%. Sementara yang tidak hadir ke TPS berjumlah 602.586 pemilih, dengan tingkat ketidakhadiran 15,83%.

Sementara itu, pada pemilu serentak 2019 kategori pemilu DPRD Provinsi, di Riau terdapat 8 daerah pemilihan yang terdiri Kota Pekanbaru (Dapil 1), Kabupaten Kampar (Dapil 2), Kabupaten Rokan Hulu (Dapil 3), Kabupaten Rokan Hilir (Dapil 4), Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Dapil 5),

Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan (Dapil 6), Kabupaten Indragiri Hilir (Dapil 7), dan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi (Dapil 8).

Dari delapan dapil pemilu DPRD Provinsi Riau tersebut, pemilih laki-laki lebih besar daripada pemilih perempuan. Terdapat pemilih laki-laki sebesar 1.963.288, dan pemilih perempuan 1.900.017. Dari total pemilih itu, justru pemilih perempuan lebih banyak yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih perempuan mencapai 1.634.913 yang hadir menggunakan hak pilihnya, berbanding 1.624.165 pemilih laki-laki. Kalau dipersentasekan maka terdapat 85,94% pemilih perempuan, dan 82,96% pemilih laki-laki.

Total partisipasi pemilih di kategori pemilu DPRD Provinsi adalah 3.259.078 jiwa, setara dengan 84,36% dari keseluruhan jumlah data pemilih. Dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwa pemilih yang tidak hadir ke TPS adalah 604.227 pemilih, yang setara dengan 15,64% dari total data pemilih. Namun uniknya, tingginya partisipasi pemilih perempuan di Pemilu DPRD Provinsi tahun 2019, tidak berbanding lurus dengan keterpilihan calon perempuan. Bahkan calon perempuan yang terpilih di DPRD Provinsi Riau mengalami penurunan. Jika sebelumnya, terdapat 18 wakil rakyat berasal dari calon perempuan, pemilu 2019 hanya menyisakan 12 calon perempuan yang berhasil duduk di kursi DPRD Provinsi Riau. Artinya, untuk kontek pemilu DPRD Provinsi Riau tidak ada hubungan signifikan antara tingginya pemilih perempuan dengan keterpilihan calon perempuan.

Kembali ke soal tingkat parmas Pemilu DPRD Provinsi Riau, jika dibandingkan antar delapan dapil di Riau, maka partisipasi pemilih di Kota Pekanbaru (dapil 1) menempati posisi tingkat parmas tertinggi yakni 93,97%. Sebaliknya dapil tujuh yaitu Kabupaten Indragiri Hilir menempati posisi paling bawah (74,45%). Secara berurutan, tingkat partisipasi tertinggi ke terendah untuk pemilu DPRD Provinsi Riau 2019 adalah *pertama* Dapil Riau 1 (93,97%), *kedua* Dapil Riau 3 (87,72%), *ketiga* Dapil Riau 6 (86,59%), *keempat* Dapil Riau 2 (86,57%), *kelima* Dapil Riau 8 (83,77%), *keenam* Dapil Riau 5 (82,40%), *ketujuh* Dapil Riau 4 (79,96%), dan terakhir *kedelapan* Dapil Riau 8 (74,45%).

C.2. Peta Partisipasi Pemilih Disabilitas

Pada pemilu 2019, terdapat 5416 pemilih disabilitas yang terdiri 2730 pemilih laki-laki, dan 2686 pemilih perempuan. Pemilih laki-laki lebih besar dari pada pemilih perempuan. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, pemilih laki-laki yang menggunakan hak suaranya berjumlah 1220, sedangkan pemilih perempuan 1356. Bila dipersentasekan, terdapat 44,69% tingkat partisipasi pemilih laki-laki disabilitas, dan 50,48 pemilih perempuan disabilitas. Total tingkat kehadiran pemilih disabilitas pemilu presiden adalah 47,56%.

Dari data ini, pemilih perempuan, baik abilitas ataupun disabilitas menempati tingkat partisipasi pemilih di atas pemilih laki-laki. Namun patut dicatat, bahwa untuk pemilih disabilitas, persentase atau jumlah pengguna hak pilih lebih rendah daripada yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dari 5416 pemilih disabilitas, terdapat 2840 pemilih (52,44%) yang tidak hadir di TPS, berbanding 2576 pemilih (47,56%) yang menggunakan hak suaranya. Penyelenggara pemilu perlu mengevaluasi, mengapa pemilih disabilitas yang tidak hadir ke TPS lebih besar daripada yang hadir pada pemilu presiden/wakil presiden 2019.

Sementara itu, untuk kategori pemilu DPD RI, terdapat 1284 pemilih laki-laki (56,59%) yang menggunakan hak pilihnya, dan 1370 pemilih perempuan (57,41%). Dari data partisipasi pemilih pemilu DPD RI dapil Riau tersebut, lagi-lagi tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi daripada pemilih laki-laki. Dan dari 27 calon DPD RI di provinsi Riau, dimana terdapat 3 perempuan calon DPD RI dapil Riau, pemilih di Riau telah menentukan dua calon perempuan berhasil melenggang ke senayan, dua calon terpilih lainnya adalah calon laki-laki. Dari sini, kita dikonfirmasi bahwa besarnya partisipasi perempuan di pemilu DPD RI Dapil Riau 2019, berhubungan positif dengan keterpilihan calon perempuan.

Peta pemilih disabilitas pada pemilu DPR RI berbeda dengan pemilu Presiden/wakil presiden dan pemilu DPD RI. Pada pemilu DPR RI di Dapil Riau 1, terdapat pemilih disabilitas Laki-laki 1286, dan pemilih Perempuan 1377. Total pemilihnya berjumlah 2663 jiwa. Dari sejumlah data pemilih disabilitas di Dapil Riau 1 tersebut, terdapat kehadiran pemilih laki-laki sebanyak 769 orang (59,80%), dan pemilih Perempuan 905 orang (85,72%). Total kehadiran pemilih disabilitas pada pemilu DPR RI Dapil Riau 1 adalah 1674 (62,89%). Dari data tersebut, pemilih perempuan disabilitas lebih tinggi daripada pemilih laki-laki. Namun, tingginya pemilih perempuan tersebut konsisten dengan tingkat kehadiran pemilih perempuan di TPS. Artinya partisipasi perempuan tetap lebih tinggi daripada pemilih laki-laki.

Sementara itu, data pemilih disabilitas di Dapil Riau 2, pemilih perempuan lebih besar dari pemilih laki-laki dengan perbandingan pemilih laki-laki sebanyak 1075, dan pemilih perempuan 1105. Total pemilih disabilitas di Dapil Riau dua adalah 2180 jiwa. Dari sejumlah pemilih tersebut, tingkat partisipasi pemilih disabilitas perempuan juga lebih besar daripada pemilih laki-laki. Data kehadiran pemilih disabilitas laki-laki berjumlah 525 orang (48,60%), sedangkan pemilih perempuan sebanyak 537 orang (48, 84%). Total kehadiran pemilih disabilitas adalah 1062 orang (48,72%). Dibanding tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Dapil Riau satu, tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Dapil Riau dua lebih rendah.

Untuk pemilu kategori DPRD Provinsi Riau, Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya mencapai 1.351 pemilih (63,94%), berbanding 1.188 pemilih laki-laki (59,64%). Total kehadiran pemilih disabilitas adalah 2.539 jiwa yang setara dengan 61,79% dari total pemilih disabilitas. Dilihat dari sebaran partisipasi pemilih disabilitas antara daerah pemilihan DPR D Provinsi di Riau, ternyata tingkat parmas pemilih disabilitas memiliki potret yang berbeda dengan figur tingkat partisipasi pemilih secara umum.

Untuk partisipasi pemilih kategori disabilitas, tingkat partisipasi tertinggi berada di Kabupaten Rokan Hulu (Dapil Riau 3). Konsistensi partisipasi terendah ada di kabupaten Indragiri Hilir (Dapil Riau 7). Data tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Riau untuk pemilu DPRD Provinsi Riau secara berurutan dari tingkat tertinggi ke terendah dapat dilihat berikut yaitu *pertama* Dapil Riau 3 Rokan Hulu (84,56%), *kedua* Dapil Riau 5 Kepulauan Meranti (78,54%), *ketiga* Dapil Riau 8 Kuantan Singingi (76,38%), *keempat* Dapil Riau 6 Pelalawan (75,32%), *kelima* Dapil Riau empat Rokan Hilir (71,56%), *keenam* Dapil Riau 2 Kampar (47,90%), *ketujuh* Dapil Riau 1 Pekanbaru (37,67%), dan *kedelapan* Dapil Riau 7 Indragiri Hilir (22,81%). Di bawah ini ditampilkan tabel data pemilih dan partisipasi pemilih disabilitas pemilu 2019 di Riau.

jdih.kpu.go.id

Pemilu	DAPIL	DATA PEMILIH DISABILITAS			PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS			TINGKAT PARMAS DISABILITAS (%)		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	% Total
PILPRES	RIAU	2.730	2.686	5.416	1.220	1.356	2.576	44,69	50,48	47,56
DPD RI	RIAU	2.269	2.354	4.623	1.284	1.370	2.654	56,58	58,20	57,40
DPR RI	RIAU I	1286	1.377	2.663	769	905	1.674	59,80	65,72	62,86
	RIAU II	1075	1.105	2.180	525	537	1.062	48,84	48,60	48,72
DPRD PROV.	RIAU 1	659	663	1.322	240	258	498	36,42	38,91	37,67
	RIAU 2	215	213	428	103	102	205	47,91	47,89	47,90
	RIAU 3	124	161	285	99	142	241	79,84	88,20	84,56
	RIAU 4	108	110	218	71	85	156	65,74	77,27	71,56
	RIAU 5	293	378	671	230	297	527	78,50	78,57	78,54
	RIAU 6	249	225	474	177	180	357	71,08	80,00	75,32
	RIAU 7	340	335	675	76	78	154	22,35	23,28	22,81
	RIAU 8	255	270	525	192	209	401	75,29	77,41	76,38

C.3. Peta Suara Sah dan Tidak Sah

Ulasan berikut ini membentangkan data suara sah dan tidak sah. Dari batasan yang diadobsi oleh KPU, suara sah dan tidak sah adalah ekspresi kehadiran pemilih ke TPS. Artinya meskipun terdapat suara tidak sah di TPS, suara itu tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih. Terdapat setidaknya dua motif dari tidak sahnya suara di TPS, *pertama* faktor tidak sengaja karena ketidaktahuan pemilih tentang teknis pencoblosan yang benar; *kedua* sengaja dibuat tidak sah karena motif ideologis. Pada motif kedua, pemilih secara sengaja membuat coblosannya menjadi rusak, atau memang tidak dicoblos yang pada akhirnya tetap tersimpulkan tidak sah berdasar regulasi kepemiluan.

Jika kita bandingkan antara kategori pemilu 2019, suara tidak sah tertinggi di Riau ada di kategori pemilu DPD RI. Sedangkan suara tidak sah terendah adalah pemilu kategori presiden dan wakil presiden. Secara berurutan dari peringkat terendah hingga tertinggi, suara tidak sah pemilu serentak di Riau adalah sebagai berikut *pertama* pemilu presiden/wakil presiden sebesar 47.530 (1,45%), *kedua* pemilu DPRD Provinsi Riau sebesar 268.967 (8,27%), *ketiga* pemilu kategori DPR RI sebesar 339.490(10,49%), dan *keempat* pemilu DPD RI sebesar 497.895 (15,27%). Tingginya suara tidak sah di pemilu DPD RI, penting menjadi catatan bagi penyelenggara pemilu. Jumlah suara tidak sah yang mencapai 497.895 (15,27%), patut menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi KPU di Riau mengapa sampai terdapat suara tidak sah sebanyak itu.

Analisis awal dari data kualitatif yang bersumber dari informasi dari komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Riau yang penulis himpun, di antara jawaban mengapa tingginya suara tidak sah di kategori DPD RI adalah kebanyakan pemilih tidak terlalu antusias dengan pemilu kategori DPD RI. Di antara banyak batasan yang menyebabkan tidak sahnya suara yang telah diberikan, batasan surat suara berupa “tidak dicoblosnya” surat suara menempati posisi teratas. Akibatnya memang surat suara dihitung tidak sah.

Faktor yang menyebabkan tidak tingginya antusiasme warga pada pemilu kategori DPD RI, adalah tidak riuhnya ruang kampanye yang dimanfaatkan oleh calon DPD RI. Dapil yang begitu besar, dimana calon DPD tidak memiliki struktur organisasi yang rapi seperti partai politik, membuat banyak warga tidak mengenali calon DPD RI dengan baik. Hal itu berbeda dengan calon presiden/wakil presiden yang memang terkabarkan secara luas dan massif ke desa-desa. Akibatnya pemilih banyak mengenali calon presiden/wakil presiden, sehingga suara tidak sah untuk pemilu presiden/wakil presiden sangat kecil (1,45%). Tentu saja asumsi ini harus dikaji secara lebih mendalam, utamanya dengan penelitian yang komprehensif.

KATEGORI PEMILU	DAPIL	SUARA SAH DAN TIDAK SAH			
		SAH	TIDAK SAH	JUMLAH	SUARA TIDAK SAH (%)
Presiden/ WakilPresiden	RIAU	3.224.000	47.530	3.271.530	1,45
DPD RI	RIAU	2.762.127	497.895	3.260.022	15,27
DPR RI	RIAU I	1.702.605	188.403	1.891.008	9,96
	RIAU II	1.218.624	151.087	1.369.711	11,03
DPRD PROVINSI	RIAU 1	450.334	26.316	476.650	5,52
	RIAU 2	375.184	36.415	411.599	8,85
	RIAU 3	256.134	19.871	276.005	7,20
	RIAU 4	290.487	27.643	318.130	8,69
	RIAU 5	533.888	51.614	585.502	8,82
	RIAU 6	381.628	34.268	415.896	8,24
	RIAU 7	312.570	33.893	346.463	9,78
	RIAU 8	389.886	38.947	428.833	9,08

C.4. Peta Partisipasi Pemilih Antar Kabupaten/Kota

Uraian di bawah ini akan mengulas soal tingkat partisipasi pemilih pemilu 2019 berbasis data komparasi antar Kabupaten/Kota. Dilihat dari data partisipasi pemilih pemilu 2019 di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau secara umum terdapat peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dibanding dengan pemilu 2014. Pada pemilu 2014, tingkat partisipasi pemilu presiden tertinggi di Riau terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (69,62%) dan terendah berada di Kabupaten Indragiri Hilir (55,02%). Sementara daerah lain tingkat partisipasinya hanya di angka 50-60an persen saja. Secara berurutan dari tertinggi ke terendah tingkat partisipasi pemilih pada pemilu presiden tahun 2014 adalah sebagai berikut Rokan Hulu (69,62%), Rokan Hilir (67,81%), Bengkalis (66,48%), Kuantan Singingi (65,25%), Kampar (65,08), Siak (64,35%), Pelalawan (61,87%), Dumai (60,64%), Kepulauan Meranti (60,3%), Pekanbaru (59,94%), Indragiri Hulu (55,02%), dan Indragiri Hilir (55,02%).

Tingkat partisipasi pemilih pemilu legislatif 2014 memang terdapat satu kabupaten yang signifikan angkanya yakni Rokan Hulu (82%). Kalau dikomparasikan dengan pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih di Rokan Hulu pada kategori pemilu legislatif tidak jauh berbeda. Sedangkan di Kabupaten/Kota lain, tingkat partisipasinya di bawah angka 80 persen. Namun dibanding tingkat partisipasi pemilihan presiden, pemilu legislatif 2014 masih lebih tinggi. Secara berurutan, dari tertinggi ke terendah, angka partisipasi pemilih di Riau pada pemilihan legislatif 2014 sebagai berikut: Rokan Hulu (82%), Kuantan Singingi (79%), Rokan Hilir (76%), Bengkalis (76%), Siak (76%),Kampar (75%), Kepulauan Meranti (74%), Indragairi Hulu (72%), Indragiri Hilir (71%), Dumai (69%), dan Pekanbaru (62%).

Hal yang mengejutkan, dan tentu menggembirakan, tingkat partisipasi pemilih di seluruh Kabupaten/Kota se-Riau pada pemilu serentak pertama 2019 mengalami peningkatan signifikan. Rata-rata tingkat partisipasi pemilih pemilihan presiden/wakil presiden berada di angka 84%, sedangkan untuk kategori pemilihan DPR RI 84,40%, DPD RI 77,88%, DPRD Provinsi 78,03%, dan DPRD Kabupaten Kota 79,99%. Kalau kita bandingkan, posisi tingkat partisipasi pemilih pemilu presiden pada pemilu 2019 bergeser ke Kuantan Singingi (81,95%). Sebelumya pada pemilu 2014 rekor tersebut dipegang Rokan Hulu (69,62%). Sedangkan posisi terendah berada di Kabupaten Indragiri Hilir (70,69%). Namun, posisi terendah itu, bahkan lebih tinggi dari capaian partisipasi pemilu presiden/wakil presiden pada 2014. Pada pemilu kategori DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi, tingkat partisipasi pemilih sama dengan pemilu presiden, yakni dipegang oleh Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan rekor terendah, bertengger di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk pemilu DPRD Kabupaten/Kota, posisi tingkat partisipasi pemilih tertinggi dipegang oleh Rokan Hulu (87,7%), dan posisi terendah tetap bertahan di Indragiri Hilir. Berikut, disajikan tabel partisipasi pemilih pemilu serentak 2019 di Provinsi Riau.

Partisipasi Pemilih Per Kabupaten/Kota se Riau Pemilu 2019

NO	PROV/KAB/ KOTA	PERSENTASE (%)				
		PILPRES	DPR RI	DPD RI	DPRD PROV	DPRD KAB/ KOTA
1	RIAU	84,68	84,40	77,88	78,03	79,99
2	PEKANBARU	78,89	78,17	78,03	78,00	78,00
3	KAMPAR	80,72	80,63	80,63	80,63	80,65
4	ROHUL	81,47	81,35	81,35	81,34	87,71
5	ROHIL	76,33	76,25	76,25	76,23	80,06

NO	PROV/KAB/ KOTA	PERSENTASE (%)				
		PILPRES	DPR RI	DPD RI	DPRD PROV	DPRD KAB/ KOTA
6	DUMAI	80,32	80,09	80,08	80,05	79,40
7	BENGKALIS	78,02	77,52	77,51	77,51	82,50
8	MERANTI	71,98	71,76	71,79	71,77	73,74
9	SIAK	78,68	78,57	78,63	78,55	85,60
10	PELALAWAN	81,09	80,65	80,63	80,59	80,47
11	INHU	79,37	79,31	79,33	79,30	79,35
12	KUANSING	**81,95**	**81,84**	**81,87**	**81,83**	**81,70**
13	INHIL	**70,69**	**70,57**	**70,56**	**70,54**	**70,66**

C.5. Peta Keterwakilan Perempuan di DPRD

Secara umum data perwakilan perempuan di Riau, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengalami penurunan. Keterwakilan yang menggembirakan bagi perempuan adalah dari pemilu kategori DPD RI. Dari 4 kursi DPD RI di Dapil Riau terdapat 2 kursi yang berhasil diwakili perempuan. Untuk wakil perempuan di DPD RI, Hasil pemilu 2019 serupa dengan hasil pemilu 2014. Sementara itu untuk hasil pemilu DPR RI, tidak ada satupun wakil perempuan Riau di senayan.

Sementara untuk keterwakilan perempuan DPRD Provinsi Riau, hasil pemilu 2019 justru mengalami penurunan. Kabar gembira naiknya partisipasi perempuan pada pemilu 2019, tidak berbanding lurus dengan peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Riau. Dari 65 anggota DPRD Riau, pada pemilu 2014 terdapat 18 orang wakil perempuan. Namun pada pemilu 2019, kursi yang ditempati perempuan menurun menjadi hanya 12 orang.

Untuk kategori pemilu DPRD Kabupaten/Kota, dibanding hasil pemilu 2014 untuk kategori yang sama, keterwakilan perempuan di DPRD lebih variatif. Namun secara umum keterwakilan perempuan mengalami penurunan. Terdapat memang peningkatan perwakilan perempuan di tiga daerah yakni (i) di Kabupaten Indragiri Hilir dari 4 orang (pemilu 2014) menjadi 6 orang (pemilu 2019), (ii) Kota Pekanbaru dari 7 orang (pemilu 2014) menjadi 9 orang (pemilu 2019), dan (iii) Kabupaten Rokan Hilir 3 orang (2014) menjadi 8 orang (2019). Terdapat pula angka perwakilan perempuan yang sama di Bengkalis (4 wakil perempuan). (Nugroho Noto Susanto:2020)

Sedangkan di 8 daerah lainnya mengalami penurunan yakni (1) Indragiri Hulu dari 5 orang (2014) menjadi 1 orang (2019), (2) Kampar dari 7 orang (2014) menjadi 4 orang (2019), (3) Kepulauan Meranti 5 orang (2014) menjadi 4 orang (2019), (4) Kuantan Singingi dari 3 orang (2014) menjadi 1 orang (2019), (5) Pelalawan dari 2 orang (2014) menjadi 0 orang (2019), (6) Rokan Hulu dari 6 orang (2014) menjadi 2 orang (2019), (7) Siak dari 2 orang (2014) menjadi 1 orang (2019), dan (8) Kota Dumai dari 5 orang (2014) menjadi 3 orang (2019). Dari data tersebut, ada kabar gembira seperti di Rokan Hilir dimana terdapat kenaikan persentase perwakilan perempuan dari 7% menjadi 18%. Berikut itu disajikan tabel keterrwakilan perempuan untuk DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilu 2014 dan pemilu 2019.

DPRD PROV/KAB/ KOTA	PEMILU 2014			PEMILU 2019		
	Anggota DPRD LAKI-LAKI	Anggota DPRD PEREMPUAN	PERSENTASE WAKIL PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PERSENTASE WAKIL PEREMPUAN
PROVINSI RIAU	47	18	28%	53	12	18%
Bengkalis	41	4	9%	41	4	9%
Indragiri Hilir	41	4	9%	39	6	13%
Indragiri Hulu	35	5	13%	39	1	3%
Kampar	38	7	16%	41	4	9%
Kepulauan Meranti	25	5	17%	26	4	13%
Kuantan Singingi	32	3	9%	34	1	3%
Pelalawan	33	2	6%	35	0	0%
Rokan Hilir	42	3	7%	37	8	18%
Rokan Hulu	39	6	13%	43	2	4%
Siak	38	2	5%	39	1	3%
Kota Dumai	25	5	17%	27	3	10%
Kota Pekanbaru	38	7	16%	36	9	20%

PENUTUP

REFLEKSI DAN EVALUASI PARTISIPASI PEMILIH PEMILU 2019

Salah satu kajian yang berkembang dalam wacana partisipasi pemilih adalah peta partisipasi pemilih. Penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau pemilu, akademisi, dan warga perlu memberikan perhatian tentang peta partisipasi pemilih. Terlebih bagi penyelenggara pemilu seperti KPU. Peta partisipasi pemilih membantu kita tentang data yang berhubungan dengan naik turunnya tingkat partisipasi pemilih, studi perbandingan antar daerah, analisis perbandingan subyek partisipasi pemilih seperti pemilih laki-laki dan perempuan, pemilih disabilitas, pemilih milenial, pemilih pemula, pemilih berbasis agama, suku, wilayah, dukungan politik, pekerjaan, dan bahkan dari ideologi.

KPU menurut saya perlu mengembangkan suatu sistem informasi partisipasi pemilih berbasis digital untuk membaca peta partisipasi pemilih baik skala nasional, provinsi, atau kabupaten/kota bahkan hingga desa/kelurahan. Jika Bawaslu memiliki indeks kerawanan pemilu (IKP), sebagai suatu alat pencegahan untuk mendeteksi potensi kerawanan, maka Peta Partisipasi Pemilih merupakan alat antisipasi sekaligus pendalaman untuk membaca tren partisipasi, dan sekaligus rancang bangun strategi sosialisasi, dan pendidikan pemilih dalam menghadapi momentum elektoral berikutnya. Dalam penyusunan peta partisipasi pemilih, keikutsertaan akademisi dan pemantau pemilu yang fokus di isu pemilu menjadi sangat penting.

Di antara refleksi yang perlu diajukan dalam tulisan terkait isu partisipasi pemilih adalah apakah tingginya partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 tersebut telah mencerminkan "kedaulatan pemilih" seperti yang sering dislogankan oleh KPU berbunyi "pemilih berdaulat, negara kuat." Agaknya, pertanyaan tersebut perlu diperdalam lagi dengan kajian yang komprehensif tentang perilaku pemilih, motivasi pemilih, dan berbagai faktor yang melatari pemilih datang ke TPS.

Secara umum, dari sisi statistik, angka partisipasi 84% di Provinsi Riau, memang menggembirakan, begitupun angka 81% di tingkat nasional. Namun kita tidak dapat menutup mata bahwa masih banyak terjadi praktik mobilisasi massa baik melaluai model patron klien, birokrasi, maupun dorongan uang (vote buying). Memang, riset tentang tantangan partisipasi ini masih harus dilakukan secara lebih mendalam. Namun dari banyak referensi dan pengakuan banyak pihak di saat atau pasca pemilu, masih terdapat motivasi pemilih ke TPS selain dari faktor kesadaran.

Di sisi lain, dalam konteks pemilu serentak 2019, masih bayak kita rasakan merebaknya praktik penyebaran informasi bohong, politisasi SARA, persekusi,

bahkan saling intimidasi yang muaranya terjadi gangguan terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Hal-hal serupa inilah yang masih harus dievaluasi dan ditingkatkan upaya pendidikan pemilihnya. Di situlah, saya kira pekerjaan rumah yang tidak ringan untuk dilakukan oleh KPU.

Sementara itu, dari pembahasan tulisan tentang peta partisipasi pemilih di atas, tampak bahwa data pemilih laki-laki lebih besar daripada pemilih perempuan. Namun, besarnya pemilih laki-laki di Riau, tidak bergaris lurus dengan tingginya tingkat partisipasi pemilihnya. Sebaliknya, perempuan yang data pemilihnya lebih rendah, tingkat partisipasinya justru lebih tinggi di Provinsi Riau. Potret tersebut juga terjadi di pemilih disabilitas. Pemilih laki-laki lebih besar daripada pemilih perempuan. Dan pemilih perempuan disabilitas memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi daripada pemilih disabilitas laki-laki.

Dari hasil pemilu 2019 di Riau, kita dikonfirmasi bahwa keterpilihan perempuan secara umum ternyata lebih rendah daripada laki-laki. Keterpilihan perempuan yang menggembirakan hanya terdapat di pemilu kategori DPD RI dimana terdapat dua calon perempuan yang berhasil menduduki kursi DPD RI. Selebihnya, baik di DPR RI, DPRD Provinsi Riau, keterpilihan perempuan tidak menggembirakan. Untuk pemilu DPR RI, tidak satupun perempuan yang terpilih, sedangkan pemilu DPRD Provinsi, terdapat calon perempuan terpilih, namun jumlahnya menurun drastis dari capaian pemilu 2014.

Dari sisi suara tidak sah, data menunjukkan bahwa suara tidak sah di kategori pemilu DPD RI tinggi sekali, berbanding terbalik dengan pemilu presiden yang rendah sekali suara tidak sahnya. Hal ini tentu menjadi catatan bagi penyelenggara pemilu. Realitas ini perlu dijawab dengan riset yang mendalam mengapa di DPD RI suara tidak sah tinggi.

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, beberapa hal perlu penulis sampaikan sebagai saran bagi pemangku kepentingan kepemiluan di Indonesia. Beberapa saran tersebut adalah :

1. Perlu sosialisasi dan pendidikan pemilih di kelompok pemilih laki-laki agar bisa menggunakan hak suaranya dengan semaksimal mungkin;
2. Perlu pendidikan politik yang massif di tengah pemilih perempuan dan perlu mengoreksi kebijakan *afirmatif action* di dalam undang-undang pemilu terkait pencalonan perempuan. Apakah sejauh ini telah memenuhi unsur subtansi kualitas perempuan atau masih sebatas formalitas saja. Jika belum diperlukan upaya meningkatkan kualitas calon perempuan, khususnya oleh

   partai politik. Di sisi lain, perlu juga dipertimbangkan pemberlakukan 30% nomor urut tinggi diduduki caleg perempuan. Saat ini memang berlalu

jdih.kpu.go.id

zipper system yang menempatkan 1 perempuan dari 3 caleg yang tersedia. Namun nomor urut 1, atau 2 belum diprioritaskan bagi caleg perempuan;

3. Perlu sosialisasi dan melakukan pendidikan pemilih yang lebih intensif kepada pemilih disabilitas. Data ketidakhadiran pemilih disabilitas ternyata lebih tinggi daripada yang hadir. Pelayanan yang diberikan penyelenggara pemilu kepada pemilih disabilitas hendaknya makin ditingkatkan agar antusiasme pemilih disabilitas makin baik;
4. Penyelenggara pemilu seperti KPU perlu mengevaluasi terkait pendidikan pemilih atau sosialisasi pemilih terkait pencoblosan sehingga tidak terdapat suara tidak sah yang tinggi. Di riau, tingginya suara tidak sah di pemilu kategori DPD RI menimbulkan persoalan. Padahal terdapat gambar pada surat suara ketegori DPD RI.

DAFTAR PUSTAKA

Brady, Hendry E. 1999. *Political Participation, Measure of political attitude.* Edited by John R.Robinson, Philip R.Shaver, and Lawrence S.Wrightsman. San Diego:Academic Press.

Kaase, Max, dan Alan Marsh. 1979. *Political Action : Theoritical Perspective. Political Action: mass participation in Five Western Democracies.* Edited by Samuel H.Barnes and Max Kaase. Beverly Hills, CA.: Sage Publications.

KPU RIAU, Laporan Kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2019, dapat diunduh di alamat https://drive.google.com/file/d/15ESd9bpBfA_P8-WQwol9nGTd_PdM45OZ/view

KPU Riau, *Laporan Hasil Pemilu 2014.*

Nie, Norman H., Sidney Verba, Jae-on Kim. 1974. *Political Participation and the life Cycle" Comparative Politics 3:319-340*

Nugroho Noto Susanto (2015), *Partisipasi Pemilih Warga Negara Rokan Hulu:Studi Kasus Pemilihan DPRD Kabupaten dan Pemilihan Presiden tahun 2014*

Nugroho Noto Susanto (2020), *Hari Perempuan Internasional dan Keterwakilan Perempuan*, https://www.riaumandiri.id/read/detail/81853/hari-perempuan-internasional-dan-keterwakilan-perempuan

Schumpeter,Yoseph.1942 *Capitalisme, Sosialisme and Democracy.* Newyork:Harper.

jdih.kpu.go.id

Potret Sosialisasi Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara (Dari Mentari Kota Sampai Ke Sinaran Desa)

Oleh: Al Munardin
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang potret sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Berdasarkan hasil pemilu 2019 bahwa tingkat partisipasi pemilih di Sulawesi Tenggara mencapai 79,33%. Tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pemilu 2019, mengalami kenaikan secara signifikan mencapai angka 79,33 persen melampaui target nasional yaitu 77,5%. Pemilu Serentak di Sulawesi Tenggara telah berjalan aman, tertib dan damai. Sengketa Pemilu berkurang dan Partisipasi Pemilih di Sultra meningkat.

Berbagai kebijakan sosialisasi KPU, selanjutya diimplementasikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara masif dengan tujuan agar terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara. Peningkatan partisipasi pemilih di Sultra diakibatkan oleh pengaruh masifnya KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam melaksanakan sosialisasi. Peningkatan partisipasi pemilih di Sutra selain masifnya dilaksanakan dari Kota hingga pemilih tradisional di desa-desa juga dipengaruhi oleh Pertama, tingkat kesadaran politik yaitu kesadaran hak dan kewajiban warga negara. kedua, menyangkut penilaian warga negara terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Sulawesi Tenggara

Pengantar

Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan menjadi momentum terbaik untuk mengukur bagaimana partisipasi politik masyarakat yang merupakan keniscayaan dalam negara penganut paham demokrasi seperti Indonesia. Masyarakat selalu dituntut untuk secara sukarela berpartisipasi aktif di setiap tahapan Pemilu/Pemilihan, partisipasi politik merupakan bagian penting bagi setiap warga negara sebagai pemilik kedaulatan untuk terlibat dalam proses demokrasi, partisipasi politik haruslah tercermin pada terlaksananya peran-peran masyarakat secara sukarela pada tahapan Pemilihan Umum maupun pemilihan serentak, paling tidak kehadiran masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih di TPS untuk menyalurkan hak pilihnya.

Peningkatan angka partisipasi masyarakat menjadi harapan besar bagi penyelenggara, mengingat hal ini dapat menjadi salah satu indikator bahwa kerja-kerja lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi terpercaya oleh publik.

Besarnya harapan akan meningkatnya partisipasi masyarakat dari masa ke masa tidak selalu berbanding lurus dengan upaya-upaya edukasi politik dan penyebaran informasi kepemiluan yang dilakukan. Disatu sisi, penyelenggara selalu mengharapkan peran-peran dan partisipasi masyarakat demi tercapainya target angka partisipasi, disisi lain patut kita semua bertanya, apakah upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui program-program sosialisasi telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat? ataukah informasi kepemiluan yang merupakan "nutrisi" agar partisipasi masyarakat membaik dapat tercapai hanya dengan tercukupinya kebutuhan informasi tahapan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan cukup kepada masyarakat perkotaan? Tentu saja tidak, masyarakat yang berada di wilayah-wilayah desa dan pedalaman yang memiliki keterbatasan dalam hal geografis, keterbatasan akses informasi dan jauh dari keriuhan aktivitas kepemiluan juga wajib mendapat pendidikan politik, memperoleh informasi terkait kepemiluan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi oleh semua pihak khususnya bagi KPU sebagai penyelenggara, yang muaranya demi tercapai dan berkualitasnya angka partisipasi masyarakat yang telah ditargetkan.

Sosialisasi Berbasis Keluarga dalam Peningkatan Partisipasi

Meningkatnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara sebagaimana dilihat dari aspek kesadaran masyarakat dan aspek pemerintahan turut serta menjadi variabel berpengaruh dalam meningkatnya partisipasi pemilih. Bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat sangat berkaitan

erat dengan kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan menyangkut penilaian warga negara terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya terlihat dari para kandidat baik calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun calon DPRD Kabupaten/Kota.

Mengacu kepada dua variabel tersebut, penulis menilai bahwa meningkatnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara menandakan semakin tingginya kesadaran politik warga negara tentang hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik salah satunya diimplementasikan melalui berpartisipasi dalam pemilu.

Modal sosial diatas dianggap sebagai potensi dan kekuatan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lebih masif menggunakannya dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Olehnya itu, salah satu metode/upaya yang perlu dilakukan lebih awal adalah menanamkan cara pandang bahwa "Sosialisasi Ibarat Sinar Mentari yang tidak hanya Menyinari Kota tetapi juga wajib Menyinari Pedesaan". Kesadaran cara pandang seperti ini, sehingga pada Pemilu tahun 2019, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Sosialisasi Keluarga Sadar Pemilu dan Demokrasi dengan menyasar Kelompok Pemilih Berbasis Keluarga yang berada di wilayah-wilayah yang masih minim penyebarluasan informasi kepemiluan. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga adalah salah satu program unggulan KPU RI dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Program ini selanjutnya dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sampai ke tingkat desa dan kelurahan dengan membuat forum warga berbasis RT/RW.

Dalam konteks penyelenggara pemilu, bahwa pendidikan pemilih merupakan upaya memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat. Pendidikan pemilih sebagai upaya pemberian informasi kepemiluan secara simultan kepada warga agar tumbuh kesadaran berpemilu. Warga disampaikan informasi kepemiluan agar suara mereka di TPS di hari pemilihan disalurkan dengan konstitusional. Undang-Undang telah menjamin hak suara tiap warga negara. Menggunakan hak suara dengan baik dan benar membuktikan bahwa kita adalah warga negara yang baik.

Dalam pemilu serentak 2019 ini, KPU Sulawesi Tenggara melaksanakan sosialisasi gerakan sadar pemilu. Dimana seluruh warga negara yang cinta negeri ini sudah harus menyadari perannya masing-masing dalam proses berdemokrasi.

Gerakan sadar pemilu, dapat dimaknai sebagai sebuah pendekatan yang lebih persuasif, lebih menyentuh naluri dengan sebuah pengharapan warga masyarakat sadar bahwa memilih itu adalah hak konstitusi mereka. Pendekatannya

jdih.kpu.go.id

lebih persuasif sebab langsung menemui pemilih dari pintu ke pintu.

Memberikan penyadaran yang paling mudah tentu dimulai dari kelompok terkecil dan mendasar di masyarakat itu sendiri yaitu, keluarga. Keluarga adalah ujung tombak pembentukan karakter, pola berpikir hingga perilaku. Keluarga punya kewenangan besar membentuk sebuah pemahaman dan sikap. Ini menjadi semangat KPU memberikan pendidikan pemilih berbasis keluarga.

Dengan memaksimalkan fungsi keluarga sebagai pusat pendidikan dan pengetahuan antar anggota keluarga. Memperkaya pemahaman keluarga tentang proses demokrasi dan pemilu pada warga Sulawesi Tenggara. KPU Sulawesi Tenggara terus-menerus memberikan informasi-informasi yang benar tentang pemilu pada keluarga, menyematkan sebuah harapan bahwa keluarga bisa menjadi akar berjayanya demokrasi, hingga kesadaran masyarakat akan pemilu sedikit demi sedikit akan terus hidup dan bertumbuh.

KPU Sulawesi Tenggara melirik keluarga sebagai bagian penting dalam pendidikan pemilih untuk membangun demokrasi. Dimana KPU meyakini keluarga mampu membentuk pemilih-pemilih cerdas yang bisa menentukan pilihan-pilihan terbaik mereka pada 17 April 2019.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berasumsi bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kegiatan sosialisasi tidak boleh difokuskan pada ibu kota provinsi tetapi juga harus menjangkau Kabupaten dalam wilayah kerja KPU Provinsi. Sebagai contoh yang dilakukan di desa Latompe Kabupaten Muna Barat. Bukan tidak mungkin kebijakan ini turut memengaruhi capaian tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 sebesar 79,33% dan melebihi target angka partisipasi secara nasional dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang hanya mencapai 69,51%.

Jika melihat angka partisipasi 2019, kita patut bersyukur karena terjadi peningkatan. Pun demikian, membandingkan beberapa tingkat partisipasi masyarakat di Sulawesi Tenggara, ternyata masih terdapat beberapa Kabupaten/ Kota yang capaian tingkat partisipasinya masih di bawah 77,5% yang notabene merupakan target angka partisipasi masyarakat di pemilu 2019. Di antara daerah di Sulawesi Utara yang masih berada di bawah angka target partisipasi nasional adalah Kabupaten Muna 74,56%, Baubau 71,19%, Buton Selatan 73,68%, Wakatobi 71,57%, dan Buton Tengah 63,40%. Di bawah ini penulis sajikan perbandingan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019 dan pemilihan terakhir.

PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN/PEMILU TERAKHIR (PILKADA) DENGAN PEMILU 2019 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	KPU PROVINSI/KAB/KOTA	PARTISIPASI PEMILIH			
		ANGKA PARTISIPASI	PEMILIHAN TERAKHIR	ANGKA PARTISIPASI	PEMILU TERBARU
1	2	3	4	5	6
1	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	69,51%	PILKADA 2018	79,33%	PEMILU 2019
2	KOTA KENDARI	79,8 %	PILKADA 2017	79,40 %	PEMILU 2019
3	BOMBANA	78,7%	PILKADA 2017	82,52%	PEMILU 2019
4	KONAWE SELATAN	74%	PILKADA 2015	83,26%	PEMILU 2019
5	BUTON UTARA	81,9%	PILKADA 2015	86,71%	PEMILU 2019
6	MUNA	62,9%	PILKADA 2015	74,56%	PEMILU 2019
7	MUNA BARAT	83,8%	PILKADA 2017	81,88%	PEMILU 2019
8	BAUBAU	71,84%	PILKADA 2018	71,19%	PEMILU 2019
9	BUTON	70,4%	PILKADA 2017	78,23%	PEMILU 2019
10	BUTON SELATAN	73%	PILKADA 2017	73,68%	PEMILU 2019
11	BUTON TENGAH	62,3%	PILKADA 2017	63,40%	PEMILU 2019
12	WAKATOBI	78,5%	PILKADA 2015	71,57%	PEMILU 2019
13	KOLAKA	75,25%	PILKADA 2018	77,71%	PEMILU 2019
14	KOLAKA TIMUR	77,5%	PILKADA 2015	84,28%	PEMILU 2019
15	KOLAKA UTARA	78%	PILKADA 2017	90,02%	PEMILU 2019
16	KONAWE	83,19%	PILKADA 2018	85,38%	PEMILU 2019
17	KONAWE UTARA	88,7%	PILKADA 2015	90,02%	PEMILU 2019
18	KONAWE KEPULAUAN	80,5%	PILKADA 2015	88,13%	PEMILU 2019

Sosialisasi ke Pemilih Milenial

Berdasarkan Data KPU Republik Indonesia, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 jumlah pemilih dengan klasifikasi kelompok usia menunjukan pemilih usia milenial menjadi target sasaran yang sangat potensial untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Sebagaimana data yang ada pada KPU, pemilih dengan kelompok usia 17–20 Tahun kurang lebih sebanyak 17 Juta, dan Kelompok pemilih dengan usia 21-30 tahun secara jumlah menyentuh angka dikisaran 42 Juta orang, sedikit di bawah jumlah pemilih terbanyak yaitu kelompok usia 31-40 tahun dengan kisaran jumlah 43 juta Pemilih.

Pernyataan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni yang termuat pada salah satu media online nasional tanggal 15 Agustus 2018 bahwa jika indikator pemilih muda dikategorikan berada pada usia hingga 35 Tahun, maka jumlahnya pada Pemilu 2019 sebanyak 50% dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap yaitu mencapai 79 Juta. Jumlahnya yang signifikan tentu saja perlu memberikan fokus tersendiri dalam melakukan kegiatan sosialisasi

dan pendidikan pemilih.

Generasi milenial yang memiliki kecendurungan apatis dalam hal politik, dengan jumlahnya yang mendominasi tentu sangat rentan dampaknya pada tidak tercapainya target angka partisipasi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, agar jumlah pemilih milenial yang sangat signifikan ini berdampak positif pada peningkatan partisipasi masyarakat, semua pihak seperti KPU wajib memberikan perhatian khusus kepada generasi milenial, kelompok ini wajib dicukupkan informasi kepemiluannya, wajib diberikan pendidikan politik yang berkualitas dan tentu saja dengan kemasan yang lebih kreatif, inovatif dan sesuai perkembangan zaman serta sesuai dengan selera generasi milenial dengan harapan mereka para generasi milenial bersedia untuk turut berpartisipasi pada proses-proses politik seperti Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Serentak.

"Berkaca" pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, adanya program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih seperti Konser Musik, Festival Musik *Jingle* Pemilu, KPU *Goes to Campus*, KPU *Goes to School*, Produksi dan Pemutaran Film Pemilu secara nasional, Lomba Mural, Lomba Swafoto di TPS, Pemilu *RUN* dan sebagainya dilakukan oleh KPU dari pusat hingga daerah merupakan kebijakan strategis untuk "merayu" para generasi milenial untuk turut berkontribusi menjadi bagian penting dari penyelenggaraan Pemilu serta menggugah kesadaran agar mereka bersedia secara sukarela berpartisipasi aktif pada setiap tahapan penyelenggaraan, paling tidak menyalurkan hak pilih pada hari Pemungutan Suara.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara turut menerjemahkan kebijakan KPU RI, salah satunya dengan menggelar Konser Musik yang sepenuhnya melibatkan komunitas band lokal di kota Kendari, yang tampil dalam bentuk parade band di mana terdapat 14 band lokal yang tampil dan memainkan alat musik secara bersamaan dengan memainkan lagu-lagu kebangsaan didukung dengan penampilan *Marching Band* pelajar dan alat musik tradisional. Dalam konteks Sulawesi Tenggara, jumlah Pemilih terbanyak berdasarkan klasifikasi usia juga didominasi generasi milenial 21–30 Tahun sebanyak 442.779 orang atau kurang lebih 25,6% dari total jumlah DPT Se Sulawesi Tenggara, sehingga upaya mengejar angka partisipasi dengan gaya dan cara milenial dapat menjadi solusi. Di bawah ini penulis tampilkan gambar kategori usia pemilih pada pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara.

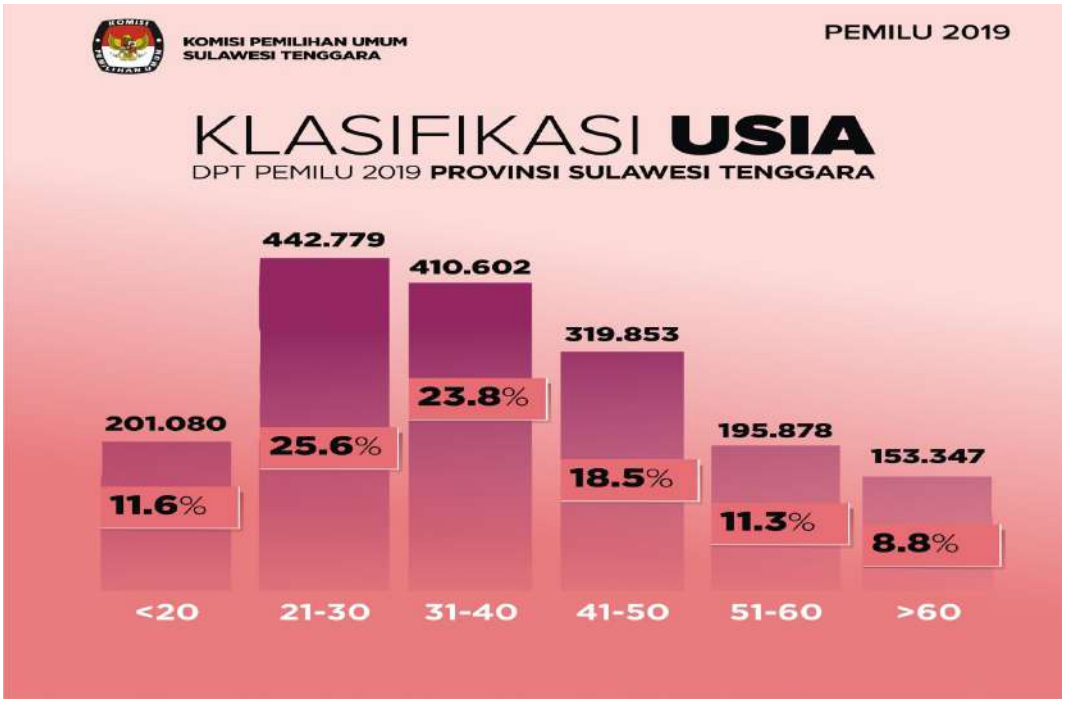

Membangun Citra Melalui Turun ke Jalan

Berdasarkan hasil survei oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang dipublis pada Media Indonesia tanggal 24 Februari 2019 menggambarkan bahwa di beberapa wilayah Indonesia jumlah pemilih yang tahu pada 17 April 2019 merupakan tanggal pelaksanaan pemilu masih di bawah 50%.

Keadaan ini tidak boleh dibiarkan, harmonisasi kerja-kerja secara berjenjang dari pusat hingga lokal harus ditingkatkan, kerjasama semua pihak harus dibangun dan lebih intensif, program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih harus mampu dikemas berbeda, yang lebih mudah diakses dan diterima oleh masyarakat luas, sosialisasi yang dilakukan harus mencerminkan interaksi antara penyelenggara dengan pemilih dan juga yang tidak kalah pentingnya harus mampu menarik perhatian masyarakat sehingga bisa menjadi pusat pembicaraan untuk semua kalangan.

Menyadari hal ini, pada Pemilu Tahun 2019, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membuat program sosialisasi yang tidak seperti biasanya. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mencoba menarik perhatian masyarakat pengguna jalan dalam kota Kendari dengan berkeliling mengitari ruas-ruas jalan protokol, tidak hanya sampai disitu, rute jalan telah ditentukan hingga menuju wilayah Kabupaten Konawe dengan menyasar penduduk yang bermukim sepanjang jalan poros Kendari–

Konawe dengan menggunakan mobil tronton yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dilengkapai dengan atribut/simbol kepemiluan, alat musik dan pengeras suara.

Sinar mentari pagi di tanggal 8 Maret 2019 turut memberi semangat, semua personil telah berkumpul di halaman Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Mobil tronton yang telah dihias dengan spanduk dan atribut kepemiluan serta dilengkapi dengan peralatan musik dan pengeras suara telah dipersiapkan oleh Event Organiser yang telah ditunjuk menjadi mitra kerja.

Pukul 9 pagi, 8 Maret 2019 perlahan-lahan mobil yang digunakan meninggalkan halaman parkir Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, *Jingle* Pemilu Tahun 2019 merupakan lagu pertama yang dinyanyikan oleh group band pengiring dan cukup membuat pengguna jalan lainnya menoleh ke arah kami.

Setelah Jingle Pemilu terhenti, penulis ikut orasi dengan dukungan melalui pengeras suara berisi soal isu Kepemiluan. Tim sosialisasi lainnya membagi-bagikan poster kepada pengguna jalan. Aktivitas orasi kepemiluan, lantunan musik, hingga bagi-bagi poster yang berisikan informasi hari pemungutan suara terus menggema selama mengelilingi jalan protokol hingga finis kembali di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Setelah ibadah jumat, kegiatan Sosialisasi dilanjutkan dengan rute kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menuju lokasi rest area pengguna jalan trans Sulawesi, tepatnya dikawasan penjual jagung rebus yang lebih popular disebut PJR. Tempat ini memang menjadi lokasi favorit bagi pengendara roda empat dan roda dua yang melintasi jalur trans Sulawesi untuk sejenak beristirahat setelah menempuh perjalan jauh, sehingga sangat tepat dijadikan lokasi kegiatan sosialisasi kepemiluan.

Setibanya di lokasi tujuan, rombongan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah ditunggu oleh KPU Kabupaten Konawe bersama Relawan Demokrasi untuk bersama-sama melakukan sosialisasi, baik itu kepada pedangan maupun pengunjung yang datang silih berganti. Interaksi tatap muka sambil memperlihatkan informasi-informasi pemilu yang ada pada bahan sosialisasi menyasar ratusan gerai dagangan yang ada di lokasi ini. Tidak ada suasana ruang ber AC, tidak ada pemandangan podium *ballroom* hotel, tidak ada kesan eksklusif dari penyelenggara pemilu.

Melintasi jalan raya dengan jarak tempuh 37 Km/Jam, alunan musik dan orasi kepemiluan tidak henti-hentinya dikumandangkan silih berganti, kurang lebih 5000 lembar poster bahan sosialisasi telah disebar semenjak pagi dimulainya kegiatan

ini, tekad memang sudah bulat agar seluruh kalangan masyarakat termasuk di wilayah pedesaan juga memperoleh informasi kepemiluan secara lebih dekat dengan cara yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Kita berharap aksi turun kejalan ini membuktikan bahwa tidak ada yang eksklusif dari Penyelenggaraan Pemilu termasuk juga bagi Penyelenggaraanya, panas terik dan lelah tidak menjadi hambatan, seluruh warga harus menyambut pesta demokrasi dengan riang gembira, untuk itu KPU wajib mencukupkan informasi seluruh tahapannya kepada publik, dengan begitu jumlah masyarakat yang mengetahui hari dan tanggal pemungutan suara dapat terus bertambah dan tidak sekedar hanya menjadi harapan.

Menjemput Suara Pemilih Disabilitas

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 telah berlalu, tentu saja banyak momen-momen penting yang terdokumentasikan melalui cerita, gambar dan tulisan yang begitu menyisakan kerinduan untuk kembali mendengar, membaca dan/atau melihatnya. Bagi penyelenggara, tentunya memiliki kepuasan tersendiri jika masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih secara sukarela menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Kualitas penyelenggaraan Pemilu tidak hanya di ukur dari tinggi rendahnya angka partisipasi tetapi salah satunya juga di ukur dari terlaksananya Pemilu yang inklusif dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penyelenggara Pemilu harus menjamin pelaksanaan tahapan sesuai dengan asas aksesibilitas sehingga masyarakat yang berkebutuhan khusus dan pemilih difabel dapat lebih mudah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan Pemilu.

Salah satunya bapak Ali Sahid, merupakan salah satu warga Kota Kendari yang terdaftar sebagai pemilih pada TPS 17 Kelurahan Anggoeya Kota Kendari saat Pemilu 2019 yang lalu. Menjalani aktivitas keseharian menggunakan kursi roda tidak mengurangi semangatnya untuk menyalurkan hak politiknya pada TPS yang berjarak 500 meter dari tempat tinggalnya. Tidak hanya itu, Ali Sahid seringkali menarik perhatian warga saat menghadiri kegiatan-kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara maupun maupun kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan lembaga atau kelompok relawan demokrasi. Semangatnya untuk berpartisipasi dalam tahapan Pemilu sangat terlihat pada saat menghadiri kegiatan Pemilu RUN yang diselenggarakan menyongsong Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai pemilih disabilitas Pak Ali sangat percaya diri membaur dengan peserta lainnya dari awal star hingga kembali finish.

Bapak Ali Sahid sangat inspiratif, "Baginya Memilih itu Bukanlah Hak tetapi Kewajiban" sehingga dia tidak pernah absen menyalurkan suaranya pada setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan, dengan harapan pemimpin yang nantinya terpilih dapat berpihak pada kepentingan masyarakat khususnya kaum disabilitas. Kesukarelaannya bersama teman-teman disabilitas lainnya berpartisipasi dalam Pemilu 2019 terpantau oleh media-media nasional.

Komentarnya di media kompas.com yaitu "dirinya tidak merasa kesulitan saat menyalurkan hak pilihnya. Karena selama ini, ia bersama rekan disabilitas yang lain sudah mendapatkan penjelasan dan arahan dari KPU tentang tata cara memilih", (kompas.com, 17 April 2019). Sebuah pernyataan yang cukup membanggakan bagi kita penyelenggara Pemilu, bahwa kerja-kerja sosialisasi yang telah kita laksanakan mendapat apresiasi dari penyandang disabilitas seperti mereka.

Bisa jadi slogan Internasional Pergerakan Difabel di seluruh dunia sangat terpatri dalam benak bapak Ali Sahid bersama rekan-rekannya bahwa Nothing about us without us yang artinya "tidak ada tentang kami tanpa keikutsertaan kami". Sehingga kaum difabel merasa berkewajiban dengan suaranya menentukan siapa pemimpin terbaik yang nantinya akan lebih peduli dengan kesetaraan penyandang disabilitas, yang terpenting KPU secara kelembagaan harus tetap konsisten memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk berpartisipasi, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan ; "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

jdih.kpu.go.id

Tantangan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat: Jejak Demokrasi di Serambi Utara Indonesia

Oleh: Salman Saelangi
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara

Pendahuluan

Sebagian besar negara di dunia menggunakan Pemilihan Umum sebagai instrumen demokrasi. Indonesia sendiri telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak tahun 1955 walaupun di beberapa daerah telah melakukan pemilu lokal beberapa tahun sebelumnya. Seperti yang dilakukan di Minahasa tahun 1948 dan 1951, Yogyakarta tahun 1951 dan Sangihe Talaud pada tahun 1952.

Sampai hari ini Partisipasi pemilih masih merupakan indikator utama suksesnya penyelenggaran Pemilu di suatu negara, namun partisipasi pemilih di sini bukan hanya diartikan sebagai aktivitas pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara dan menggunakan hak pilihnya namun lebih luas lagi masyarakat diajak masuk dan berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu itu sendiri sehingga dapat dihasilkan penyelenggaran pemilu yang berkualitas.

Untuk menghadirkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam setiap tahapan pemilu itu sendiri guna mendorong peningkatan minat peran publik untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam tahapan pemilu dan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tentunya juga dibutuhkan gerak sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi electoral, mengajak dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu dan dari sisi penyelenggara tentunya juga harus membuka ruang-ruang untuk pelibatan publik di dalam penyelenggaraan.

Tak kalah penting untuk mengakomodir kearifan lokal tentang potensi demokrasi elektoral sebagai modal awal partisipasi pemilih itu sendiri sehingga *starting* sosialisasi dan Pendidikan pemilih bukan lagi dimulai dari angka nol tetapi kemudian mengasah dan melanjutkan potensi-potensi tersebut. Sesungguhnya nilai-nilai kearifan lokal demokrasi elektoral telah ada di beberapa wilayah Indonesia, hal ini sulit dihapus karena tercatat sebagai sejarah yang kemudian bisa di telusuri. Sulawesi Utara sendiri telah mencatat hal ini semenjak abad ke 11 Masehi walau masih perlu dilakukan kajian sejarah yang lebih mendalam tentang jejak cikal bakal demokrasi elektoral itu sendiri.

Gambaran Umum Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas 13.852 km², kondisi geografis Sulawesi Utara terletak di semenanjung utara Pulau Sulawesi atau tepatnya 0°LU - 3°LU dan 123°BT - 126°BT serta merupakan salah satu daerah yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa, wilayahnya sangat beragam yaitu wilayah pegunungan dan dataran, wilayah pesisir pantai hingga wilayah kepulauan. Terdapat 297 pulau yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut 283 pulau sudah memiliki nama. Jumlah pulau terbanyak ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dan Kabupaten Minahasa Utara serta Kota Manado, di samping itu beberapa kabupaten di Sulut memiliki koleksi pulau terluar. Wilayah kabupaten Kepulauan Talaud berbatasan langsung dengan negara tetangga, Filipina.

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2018 adalah 2.484.392 jiwa, hasil rekapitulasi DPT Pemilu 2019, jumlah pemilih di Sulawesi Utara adalah: 1.908.115 Pemilih, dengan rincian berdasarkan jenis kelamin: Laki-laki: 965.444 dan Perempuan: 942.671. Jumlah pemilih tersebut tersebar di 12 Kabupaten dan 3 Kota, 171 Kecamatan, 1.838 Desa/Kelurahan serta 7.824 TPS.

Secara umum Provinsi Sulawesi Utara memiliki beberapa etnis besar yaitu Suku Minahasa, Suku Bolaang mongondow, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Siau, Serta banyak subetnis pecahan dari etnis etnis besar tersebut. Suku Minahasa dan Bolaang Mongondow menyebar hampir di seluruh wilayah daratan Sulawesi Utara. Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Siau berada di Kepulauan Sangihe Talaud, dan Pulau Lembeh, serta di wilayah wilayah pesisir Sulawesi Utara.

Suku Bantik tersebar di kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolang Mongondow umumnya tersebar di pesisir barat 3 kabupaten ini. Suku Wawontehu tinggal di sebagian wilayah Kecamatan Bunaken dan Bunaken Kepulauan Kota Manado, bagian utara semenanjung Sulawesi tepatnya di Kabupaten Minahasa Utara menetap Suku Bajo. Etnis Tionghoa juga cukup banyak beberapa tempat, diikuti dengan Suku Gorontalo, Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Bali dan Suku Ternate. Suku Gorontalo dan bugis biasanya tinggal dekat dengan lokasi pasar sebab mata pencaharian utama mereka adalah pedagang, Suku Jawa dan Bali mereka umumnya tinggal di daerah transmigran karena awalnya sebagai petani namun suku jawa banyak juga yang datang ke Sulut untuk mencari nafkah dengan cara berdagang.

Jika dilihat dari sisi administratif pemerintahan, sebagaian besar kabupaten berada pada wilayah daratan semenanjung utara pulau Sulawesi begitu pula dengan penduduknya, daratan di bagian sebelah barat ada 2 kabupaten yang berbatasan

langsung dengan wilayah daratan Provinsi Gorontalo sehingga pengaruh budaya serta aktivitasnya masih banyak berasosiasi dengan Provinsi Gorontalo, beberapa kabupaten di wilayah daratan ini juga masih memeliki penduduk yang berada di pedalaman dimana aktivitas untuk melakukan sosialisasi serta Pendidikan pemilih di daerah tersebut harus di tempuh dengan berjalan kaki melewati kebun dan hutan serta melintasi sungai.

Inilah kemudian yang menjadi tantangan awal dimana pendekatan sosialisasi serta Pendidikan pemilih juga harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat dengan etnis dan sub etnisnya masing-masing, memahami antropologi sosial dan budaya dari masyarakat berbagai sub etnis ini merupakan modal yang sangat penting dimana jika kemudian dilakukan agenda Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gelaran pemilu maupun pilkada

Pemilih Sapi Pisang

"Warga Negara Entah Berantah" ungkapan ini pantas ditujukan kepada Ribuan Nelayan turunan *Sapi* = Sanger Philipin (Filipina) atau Pisang = Philipin Sanger yang berada di Bitung (Indonesia) dan Saranggani (Filipina), yang hidupnya bergantung pada Sumber daya hasil laut. Keberadaan warga entah berantah ini bermula dari hubungan dagang antara warga Sanger (Kep. Marore, Kab. Sanger) yang melakukan perjalanan ke kota Bato (daerah sekitar General Santos City) dengan membawa hasil Bumi dan hasil Perikanan untuk di jual/barter dengan barang dari kota Bato. Sejarah dagang ini kemudian berbalas kunjungan dari masyarakat kota Bato. Alhasil rutinitas ini pada akhirnya disertai dengan menatapnya kedua masyarakat tersebut di daerah yang dikunjungi. Proses pembauran terjadi dengan sangat cepat dan menghasilkan turunan (anak) dari pembauran tersebut yang makin lama makin banyak.

Info tidak resmi dari staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao tahun 2017 ada sekitar 20.000 warga Indonesia di Filipina yang berdomisili di Saranggani. Inipun dibenarkan oleh para Anak Buah Kapal (ABK) *Sapi* yang berada di Bitung. Menumpuknya warga *Sapi* di Bitung sebagai akibat kebutuhan ABK berkebangsaan Indonesia oleh perusahan penangkap dan pengolah perikanan, hanya saja kehadiran mereka dipersoalkan karena kurangnya dokumen penunjang identitas. Hal ini juga terjadi di Saranggani. Di antara penyebab terjadinya fakta itu adalah :

1. Tidak paham/mengerti tentang arti kewarganegaraan.
2. Takut memilih warga negara karena terlahir di Filipina dan tidak mengetahui silsilah keluarga di indonesia.
3. Cemas tentang perlindungan hak keluarga.

4. Terlanjur menjadi pekerja di perusahan Filipina disertai jaminan sosial dan identitas pekerja sebagai warga Filipina.
5. Kurangnya sosialisasi hak kewarganegaraan (dalam pergaulan keseharian) sebagai akibat ketidakpahaman bahasa Indonesia.
6. Biaya pengurusan dokumen Identitas yang cukup berat serta jarak konsulat (di Davao) dengan mereka yang jauh sangat memengaruhi keinginan untuk memproses identitas diri. (Jauh, mahal, sementara penghasilan mereka kecil). Inilah kemudian mengakibatkan mereka tidak memiliki dokumen Identitas diri baik sebagai warga Negara Indonesia ataupun Filipina (Warga negara Entah Berantah).

Pemerintah Bitung coba menyikapi hal ini dengan melakukan *hearing* di DPRD Bitung untuk mencari kejelasan sejarah warga entah berantah ini hingga akhirnya memunculkan SK Kementerian Hukum dan HAM bagi mereka untuk mendapat kepastian kewarganegaraan. Selain di kota bitung pemilih sapi pisang ini juga menyebar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro hal ini juga memang sulit dipastikan jumlahnya mereka karena terus hidup berpindah pindah dan kebanyakan menghabiskan waktunya di laut.

Pada gelaran pemilu 2019 di Kota Bitung, waktu akan dilakukan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kecamatan 14-15 Agustus 2018, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembeh Utara mendapat info dari Lurah Batukota bahwa ada 9 warganya yang indikasi diduga keturunan *Sapi Pisang* dan Kartu keluarganya ditarik oleh Dinas Dukcapil Kota Bitung. PPK Lembeh Utara langsung verifikasi ke Lurah Batukota dan langsung factual ke 9 warga yang dimaksud. Berdasarkan keterangan dari Lurah Batukota dan hasil verifikasi factual, maka PPK Lembeh Utara pun langsung melakukan eksekusi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan agar penetapan DPT sudah tidak terdaftar lagi untuk 9 warga yang dimaksud.

Tanggal 21 September 2018 keluarlah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-33.AH.10.01.Tahun 2018 tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan 9 warga yang dimaksud diatas hanya 1 warga yang sudah mendapat penegasan Status Kewarganegaraan Republik yaitu Angga Mamuno. Setelah SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-33.AH.10.01.Tahun 2018, PPK Lembeh Utara dalam Rapat Pleno Penetapan DPTHP2 pada tanggal 9 November 2018 melakukan eksekusi MS untuk Angga Mamuno sedangkan 8 warga yang lain masih TMS karena belum ada SK dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Beberapa gambaran di atas bagian dari tantangan pelaksanaaan pemilihan umum di Sulawesi Utara namun dibalik tantangan yang ada sesungguhnya masyarakat telah memiliki modal yang panjang tentang demokrasi elektoral itu sendiri sehingga ini menjadikan peluang untuk kemudian di anggkat dan dihidupkan kembali tentang kearifan-kearifan lokal pada masyarakat Sulawesi Utara

Jejak Demokrasi di Tanah Minahasa

Sulawesi Utara sebenarnya telah memiliki rekam jejak yang sangat panjang tentang demokrasi electoral, hal ini dapat di telusur dengan bukti-bukti sejarah yang ada pada etnis Minahasa, Jejak demokrasi di Minahasa (dahulu Kota Manado dan Kota Bitung juga bagian dari Tanah Minahasa) di pengaruhi beberapa era yaitu, Era Walak dan Pakasaan, Era Minahasa Raad, sebelum kemudian memasuki Era Modern.

Era Walak dan Pakasaan, kurang lebih sekitar abad ke 11 Masehi, rakyat Minahasa dalam subetnis yang ada atau dengan komunitas komunitasnya berkembang sistem/unit-unit politik yang disebut walak, walak adalah satu kesatuan masyarakat yang tergabung dalam satu kelompok desa di Minahasa, walak biasanya di pimpin oleh seorang kepala walak.

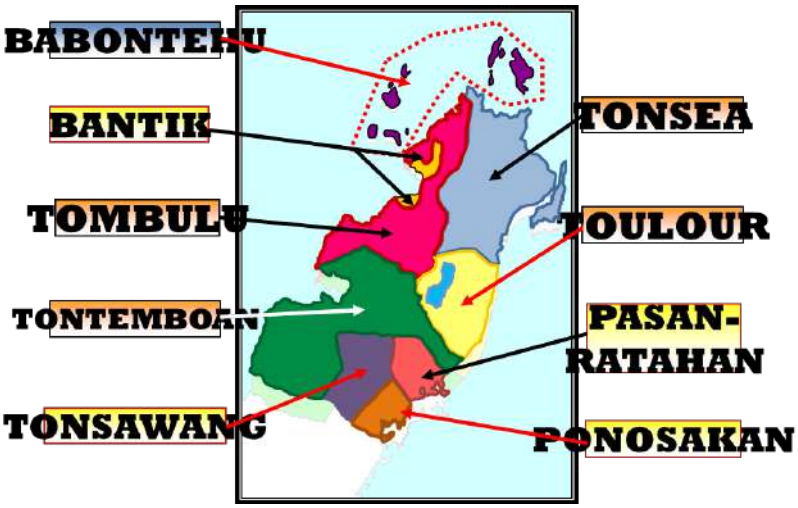

Pakasaan dan Walak di Tanah Minahasa

Pakasan adalah persekutuan antar Walak dan Dewan Wali Pakasaan merupakan Peserta musyawarah tertinggi di lokasi Batu (watu) Pinabetengan, batu simbolik Minahasa yang teletak di Desa Pinabetengan, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa.

Batu Pinabetengan merupakan titik kumpul dimana sembilan subetnis Minahasa menggunakan konsep demokrasi elektoral untuk keperluan seperti musyawarah untuk pembagian wilayah serta menyelesaikan problem-problem sosial yang ada, dalam perjalanannya kemandirian demokrasi yang di praktikkan masyarakat Minahasa di Watu Pinabetengan sangat berperan dalam setiap aspek kehidupan, adat dan pemerintahan yang berjalan beberapa abad lamanya di tanah Minahasa.

Begitu pula dengan istilah "Kumtua" istilah yang di gunakan untuk kepala desa di Minahasa yang diserap dari kata "Hukum Tua", sejak abad ke 19 Masehi telah terjadi pemilihan Hukum Tua dengan pola pemilihan langsung dan pemenangnya adalah pemilik suara terbanyak serta yang dilibatkan sebagai pemilih adalah kaum pria yang sudah mencapai usia 20 tahun.

Era Minahasa Raad, Sejak tahun 1918 rakyat Minahasa telah membentuk Dewan Rakyat Minahasa (*Minahasa Raad*) sebagai transformasi demokrasi elektoral yang lebih modern dari sebelumnya yang berbentuk Dewan Wali Pakasaan.

Gedung Minahasa Raad 1938

Pada saat itu telah lahir regulasi yang mendasari adanya ciri demokrasi elektoral modern yakni pengaturan tentang Hak Memilih, Daftar Pemilih, Pemilihan, Kandidat, Keanggotan dan Pengaturan Kunci. Bukti peninggalan sejarah Gedung Minahasa Raad itu sendiri sekarang berada di Kota Manado di samping tugu zero point.

Pasca kemerdekaan telah dilakukan pemilihan umum untuk Dewan Minahasa tanggal 22 Maret 1948 pemilih saat itu berjumlah 173.000 dengan 135.824 suara, dan kemudian pemilu 1951 yang merupakan bagian dari pilot projek pemilu di Indoenesia sebelum pemilu 1955, yang di laksanakan pada tanggal 14 Juni 1951 dengan pemilih berjumlah 209.992 orang dimana yang ikut 155.454 orang dengan 151.982 suara sah dan memperebutkan 25 kursi dewan.

Wilayah Kepulauan Sulawesi Utara

Daerah kepulauan di Sulawesi Utara memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sosialisasi, kurangnya sarana transportasi yang dapat menjangkau terutama pulau-pulau perbatasan membuat pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan pemilih harus mencocokkan waktu dengan alur pelayaran kapal feri perintis KM. Sabuk Nusantara yang mengelilingi pulau-pulau tersebut, memang dibutuhkan beberapa hari perjalanan untuk sampai di tujuan itupun jika kondisi laut tidak bergelombang, kadang pada waktu-waktu tertentu penundaan/pembatalan rute pulau yang di singgahi karena tingginya gelombang sehingga KM. Sabuk Nusantara tidak bisa menyeberang, maklum perairan laut Sulawesi ini berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Alternatif lainnya jika laut sedang bersahabat pulau-pulau tersebut dapat di jangkau dengan sewa perahu motor namun biayanya agak lumayan besar.

Pernah terjadi di saat pengiriman logistik pemilu 2014 ke pulau-pulau perbatasan karena ingin mengejar waktu agar tidak terjadi keterlambatan logistic yang akan digunakan pada hari pemungutan Suara, kapal motor sewaan yang di tumpangi oleh salah seorang komisioner Kabupaten kepulauan Sangihe beserta staf sekretariat dan polisi pengawalan kehilangan kontak lebih dari 24 jam, mereka terdampar di pulau tidak berpenghuni karena adanya gangguan mesin di akibatkan cuaca yang tidak bersahabat di tengah perjalanan

Untuk Kabupaten Kepulauan Talaud selain tantangan geografis sendiri, masih belum terlupakan oleh masyarakat di sana kejadian yang terjadi pada gelaran pilkada tahun 2013 saat itu terjadi pemasangan bendera asing di dua Desa Yaitu desa Riung dan Riung Utara Kecamatan Tampan'ama dengan maksud memboikot pelaksanaan pilkada karena calon mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, hal ini juga memang salah satunya di akibatkan adanya ketimpangan ekonomi di daerah tersebut. Tak kalah serunya aksi aksi demonstrasi yang dilkukan pada saat pilkada 2013, 2018 dan pemilu 2019 di Kabupaten Talaud, ada problematik yang berbeda di setiap penyelenggaraan iven pemilu maupun pemilihan tersebut

Pulau Miangas

Pulau Miangas adalah satu pulau terdepan yang ada di Sulawesi Utara dimana pulau ini berada di Laut Sulawesi dan berbatasan langsung dengan Filipina. Secara geografis pulau ini terletak pada 050 34' 30" LU dan 1260 35' 35" BT dan termasuk dalam gugusan Kepulauan Nanusa, memang pulau ini jaraknya lebih dekat ke Filipina di bandingkan ke Melonguane ibukota Kabupaten Kepulauan Talaud apalagi ke Kota Manado ibu kota provinsi Sulawesi Utara, secara administrasi Pulau Miangas mendapatkan perlakuan khusus dimana sebelumnya masih satu kecamatan dengan kecamatan Nanusa kemudian dimekarkan menjadi Kecamataan Miangas, dan hanya memiliki satu desa yaitu desa Miangas, di pulau ini juga hanya terdapat 2 TPS, dan 529 pemilih.

Untuk menuju ke sana jika menggunakan pesawat komersil kurang lebih 45 menit perjalanan lewat udara ke ibu kota kabupaten Kepulauan Talaud dan transit kurang lebih 30 menit, kemudian melanjutkan perjalanan 45 menit ke pulau paling utara Indonesia itu, jika kita mengambil perjalanan dengan transportasi laut dari ibukota provinsi kurang lebih semalam sampai d ibukota Kabupaten Talaud dan selanjutnya untuk ke miangas kurang lebih memakan waktu semalam. Belakangan ini pulau Miangas mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan berbagai program pengembangan daerah perbatasan

Pernah KPU provinsi melakukan sosialisasi daerah perbatasan di pulau Miangas bekerja sama dengan Polda Sulawesi Utara tanggal 10 Februari 2019, dengan menggunakan transportasi pesawat penumpang komersil yang biasanya hanya singgah kurang lebih 30 menit untuk aktivitas naik dan turun penumpang di pulau ini dengan jadwal penerbangan sekali seminggu, tapi pada saat itu pesawat penumpang tersebut singgah selama 2 jam di pulau Miangas sehingga waktu untuk melakukan sosialisasi lebih leluasa, pada pelaksanaan sosialisasi masyarakat sangat antusias mengikuti karena sangat jarang agenda agenda seperti ini dilakukan di pulau tersebut berbagai pertanyaan di sasar oleh masyarakat dan memang Pendidikan Pemilih harus terus di lakukan di pulau ini agar supaya terbentuk partisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan.

Sebelumnya juga pernah Komisioner KPU RI Bapak Viryan Azis mengunjungi pulau ini untuk memonitoring kesiapan penyelenggran pemilu 2019, Beliau menginjakkan kakinya di pulau terdepan Indonesia dan mencatatkan diri sebagai Komisioner KPU RI pertama yang berkunjung ke pulau ini.

Sosialisasi Daerah Terpencil

Seperti sosialisasi yang dilakukan di daerah terpencil di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu di Desa Pomoman, Kecamatan Poigar. Desa Pomoman secara geografi merupakan desa terpencil karena berada di tengah hutan, desa ini berdiri sejak tahun 1983, namun baru pada tanggal 23 Desember 2018 mendapat pasokan listrik dari PLN, karena memang PLN juga agak kesulitan membangun transmisi listrik ke desa ini.

Desa Pomoman berjarak ± 56 km dari Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow, jarak tempuh dari Ibukota Kecamatan Poigar sekitar 20 km. Tidak ada transportasi umum berjadwal yang secara langsung menuju ke desa Pomoman, untuk menuju ke sana dari Ibukota Kecamatan Poigar hanya bisa ditempuh oleh dua jenis kendaraan yaitu Sepeda Motor yang telah dimodifikasi menjadi semitrail dan Mobil jenis Offroad, Jasa transportasi menuju desa Pomoman untuk ojek diatas Rp. 100.000 pergi pulang dan mobil kurang lebih Rp. 700.00 untuk sekali pengataran. Biaya tranportasi yang mahal memang sepadan dengan medan yang akan dilalui. Hal ini dikarenakan medan/jalan yang sangat sulit dimana jalan yang belum diaspal serta harus melewati 7 kali anak sungai dan hanya ada satu jembatan sehingga enam kalinya harus menceburkan diri di sungai. Dimusim penghujan desa Pomoman akan terisolir dikarenakan akses menuju ke sana rawan bencana longsong dan banjir bandang sehingga hanya bisa diakses melaui udara.

Sosialisasi dan Pendidikan pemilih *goes to community* dimana yang disasar adalah komunitas petani di wilayah pedalaman sehingga mereka mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang Demokrasi Electoral itu sendiri. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 13 April 2019 hadiri oleh 101 warga masyarakat desa Pomoman yang sudah wajib pilih termasuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah DPT Desa Pomoman pada Pemilu 2019 berjumlah 217 Orang, sehingga hampir separuh yang datang mengikuti sosialisasi, masyarakat di desa ini memang sangat jarang mendapatkan informasi kepemiluan sehingga nampak wajah antusias mengikuti sosialisasi walupun memang di akhir banyak pertanyaan dan sedikit menyatakan kekecewaan yang wajar karena kurangnya sentuhan pembangunan di desa terpencil ini.

Begitu juga dengan beberapa desa terpencil di kabupaten Bolangmongondow Timur seperti Desa Kokapoy, dan Desa Jiko Belanga adalah dua desa di antara beberapa desa terjauh di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang jarak tempuh dan medan jalannya paling sulit.

Desa Kokapoy dan Kokapoy Timur adalah desa ex-transmigrasi dari Maluku Utara tahun 2006 terletak di dataran tinggi kecamatan Mooat. Untuk akses ke kecamatan Mooat membutuhkan waktu lebih dari dua jam dari ibu kota kabupaten Boltim yaitu kecamatan Tutuyan. Masih terdapat kerusakan jalan di beberapa titik, dengan Medan menanjak dan menurun yang curam dengan hanya punya 1 akses jalan masuk maupun keluar, untuk jaringan telpon, hingga saat ini desa Kokapoy masih terkategori *blank spot* (tidak ada jaringan internet).

Sementara Desa Jiko Belanga dari segi keterbatasan akses jalan sedikit lebih baik dari Kokapoy. Namun dalam kondisi cuaca hujan, masih ada titik yang tidak bisa di lewati yaitu jalan yang melintasi sungai dan belum dibangun jembatan. Jiko Belanga juga adalah wilayah *blank spot* untuk telpon selular

Pada daerah terpencil maupun daerah perbatasan yang menjadi respon warga ketika di lakukan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih memang masih berputar pada tataran bagaimana penggunaan hak pilih dan apakah pemilih tersebut telah masuk atau belum pada daftar pemilih, hal ini menjadi hal yang wajar karena keterbatasan informasi yang mereka terima serta jarangnya mereka disentuh oleh penyelenggara dengan agenda Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

Untuk itu perlu untuk terus dibangun pemahaman partisipasi aktif serta pelibatan-pelibatan dalam tahapan pemilu maupun pemilihan untuk konteks masyarakat di daerah daerah tepencil maupun daerah perbatasan karena mereka juga warga negara yang mempunyai hak yang sama dalam bingkai demokrasi Indonesia, walaupun sekali lagi dengan usaha yang luar biasa ekstra untuk aksebilitas karena minimal mereka telah memiliki jejak demokrasi elektoral yang sama di mana sejak awal telah melakukan pemilihan kepala desa secara langsung sama seperti desa-desa lainnya di Sulawesi Utara

Daftar Pustaka

Mewoh, A.R.M, dkk. 2015. "Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara,'' Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Talumewo, B.G. "Gedung Minahasaraad, Objek Sejarah-Demokrasi Minahasa Yang Hampir Terlupakan," *Walela Minahasa Edisi 3 Tahun I, Agustus 2010.*

Ulaen, A.J. "Miangas Dalam Dinamika Wilayah Perbatasan Bahari," *Jejak Nusantara Volume 03 Agustus 2015 (21-35).*

jdih.kpu.go.id

jdih.kpu.go.id

jdih.kpu.go.id

Partisipasi pemilih tidak hanya diukur pada kehadiran pemilih menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Partisipasi positif pemilih dapat berlangsung pada berbagai tahapan Pemilu dengan beragam bentuk. Partisipasi positif bagian dari cara sadar masyarakat berperan dalam kehidupan politik kepemiluan. Tanpa adanya partisipasi, Pemilu tidak bermakna demokratis.

Tingginya partisipasi pemilih berbanding lurus dengan legitimasi pemilih terhadap proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu. Bagian ketiga buku ini berisi uraian potret partisipasi pemilu tahun 2019. Termasuk upaya penyelenggara Pemilu mengaktivasi dan meningkatkan antusias masyarakat untuk berpartisipasi secara positif sehingga terselenggara Pemilu yang demokratis, aman, damai, sesuai asas dan prinsip Pemilu. Terutama upaya Komisi Pemilihan Umum di berbagai tingkatan dalam berbagai perspektif dan pendekatan sesuai *civic culture* di masing-masing *locus*.

Upaya KPU tentu bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, memberikan literasi *electoral*, menumbuh-kembangkan kesukarelawan masyarakat dalam Pemilu, mengembangkan atmosfer demokrasi partisipatif dan memberikan pemahaman yang memadai untuk penguatan kualitas demokrasi Indonesia. Terdeskripsi dari meningkatnya kuantitas dan kualitas partisipasi dari *stakeholder* utama, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* pendukung Pemilu. Secara faktual terdeskripsi adanya peran aktif Remaja Sahabat KPU di Bengkulu; Kualitas manajemen Relawan Demokrasi dan tingkat partisipasi pemilu di Jawa Barat; Potret peran Pemangku Adat dan partisipasi pemilih di Bali; Kontradiksi *coattail effect* dan meningkatnya partisipasi pemilih Pemilu di Bumi Antasari, Kalimantan Selatan; Upaya KPU meningkatkan kualitas partisipasi dan watak partisipatif masyarakat di DI Yogyakarta; serta Kegigihan Relawan Demokrasi dan meningkatnya partisipasi pemilih di Bumi Sepucuk, Jambi.

jdih.kpu.go.id

Peran dan Kiprah Remaja Sahabat KPU dalam Sosialisasi

Oleh: Darlinsyah
Anggota KPU Provinsi Bengkulu

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menyelenggarakan pemilihan umum setiap 5 (lima) tahun sekali dengan memegang prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila untuk memilih Presiden dan Wakil dan legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahapan pemilihan umum tentu harus ada pemilih dan yang dipilih, salah satunya Pemilih Pemula. Pemilih Pemula adalah pemilih yang pertama kali memiliki kesempatan untuk memilih pada Pemilu dengan rentang usia 17 sampai dengan usia 21 tahun. Pemilu Pemula terdiri atas pelajar, mahasiswa dan pemuda.

Sejauh ini pemilih pemula masih menjadi penyumbang angka golput dalam setiap Pemilu. Ketidaktahuan akan pentingnya Pemilu merupakan salah satu penyebab utama angka golput di kalangan pemilih pemula. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Provinsi Bengkulu gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di kalangan pemilih pemula. Upaya yang dilakukan KPU Provinsi Bengkulu adalah dengan membentuk Forum Remaja Sahabat KPU. Forum ini terbentuk pada tahun 2016 yang menjadi perpanjangan tangan KPU Provinsi Bengkulu dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula untuk tingkat pelajar SMA sederajat.

Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan bertujuan untuk menyebarkan informasi Tahapan, Jadwal, dan Program dan juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemilu. Dalam melaksanakan sosialisasi setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media cetak atau elektronik harus bekerja sama dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Keanggotaan Forum Remaja Sahabat KPU Provinsi Bengkulu terdiri dari pelajar SMA sederajat di Provinsi Bengkulu. Forum yang terbentuk ini merupakan inisiasi dari pelajar yang peduli akan pentingnya pendidikan demokrasi sejak dini

jdih.kpu.go.id

bagi generasi pemilih pemula. Apresiasi KPU Provinsi Bengkulu sangatlah baik terhadap Forum Remaja Sahabat KPU karena di Indonesia hanya terdapat di Provinsi Bengkulu. Usia Forum Remaja Sahabat KPU sudah memasuki usia angkatan ketiga. Forum ini telah banyak memberikan banyak kontribusi kepada KPU Provinsi Bengkulu dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA sederajat, walaupun tidak memiliki anggaran namun program kerja yang jelas selama ini menjadikan forum ini tetap ada dan bertahan hingga saat ini. Forum ini memiliki jargon *"Kami Pelopor Pemilih Pemula, Kami Pejuang Demokrasi".* Jargon ini memiliki arti yang sangat mendalam di mana semangat peran sebagai pelopor/ pencetus pemilih pemula untuk menegakkan demokrasi bangsa ini.

Tujuan dibentuknya Forum Remaja Sahabat KPU adalah membantu KPU Provinsi Bengkulu dalam mensosialisasikan tahapan pemilihan umum dan meningkatkan partisipasi pemilih kepada kalangan pemilih pemula tingkat pelajar dari SMA/sederajat di Provinsi Bengkulu; dan memberikan wadah bagi para pelajar yang terhimpun dalam Remaja Sahabat KPU untuk berdiskusi, bersosialisasi dan turun kelapangan untuk melakukan Pendidikan Pemilih, yaitu membangun pengetahuan politik, menumbuhkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi politik.

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokratis, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Pemilu merupakan salah satu upaya dalam memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya. Pemilihan Umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dan sampai sekarang Pemilu dilakukan sebanyak 12 kali yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Terbentuknya Remaja Sahabat KPU

Remaja usia sekolah yang sudah memenuhi persyaratan Pemilih, tenaga yang energik, kecerdasan dan daya kritis yang luar biasa, dan keingintahuan mereka terhadap sesuatu yang baru. Potensi ini harus dimanfaatkan secara positif. Salah satu inisiasinya adalah mengajak mereka untuk lebih mengenal pendidikan politik, memberikan pengetahuan peran bahwa generasi dalam pembangunan demokrasi di Indonesia khususnya tentang Pemilihan Umum.

Pembentukan Forum Remaja Sahabat KPU bermula pada saat KPU Provinsi Bengkulu dalam melakukan sosialisasi dan simulasi pemungutan. KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan sosialisasi fasilitasi pendidikan pemilih untuk

pemilih pemula dengan melibatkan kurang lebih 300 pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA sederajat di Kota Bengkulu pada tanggal 26 Juli 2016 bertempat di Gedung Bapelkes Provinsi Bengkulu. Setiap sekolah diminta untuk mengutus perwakilan sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Melalui forum KPU *Goes to School*, salah satu kegiatan KPU Provinsi untuk menyampaikan sosialisasi Tahapan dan pendidikan pemilih kepada para pelajar, tentunya narasumber yang kita hadirkan adalah dari unsur komisioner, ASN KPU Provinsi menyampaikan materi mengenai simulasi pemungutan dan penghitungan suara guna memberikan gambaran dan meningkatkan pemahaman kepada para pemilih pemula. Untuk memperjelas maka dibuatlah simulasi pemilihan umum yang dimulai dari tahap pencalonan, kampanye, pemungutan hingga penghitungan suara.

Pada momentum kegiatan KPU *Goes to School* inilah permulaan dibentuk Remaja Sahabat KPU. Proses pembentukan forum ini berlangsung secara bertahap. Setelah disepakati nama forum, dilanjutkan dengan proses pembentukan pengurus forum.

Hasil diskusi untuk membuat sebuah wadah bagi siswa dan siswi ini bukan hanya penerima informasi Pemilu dari KPU tapi mereka berkeinginan menjadi bagian dari yang menerima dan menyebarkan informasi kepada masyarakat khususnya kepada pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah, kampus-kampus dan lingkungan tinggal mereka. Akhirnya, seluruh peserta sepakat untuk dibentuknya forum yang diberi nama *Remaja Sahabat KPU*. Forum ini berperan dalam membantu KPU Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula dan kelompok pra pemilih mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau sederajat dan perguruan tinggi.

Ketua Angkatan Pertama Forum Remaja Sahabat KPU adalah Rahayu Oktaviani dari SMAIT IQRA. Forum Remaja Sahabat KPU melaksanakan kegiatan pertama kali, yaitu sosialisasi ke SDN 20 Kota Bengkulu. Mereka sudah mengenalkan Pemilu kepada adik-adik dari tingkat SD.

Perekrutan anggota yang akan dijadikan pengurus baru, dilakukan oleh pengurus angkatan sebelumnya dengan melakukan pengumuman dan pendaftaran secara online melalui media sosial instagram *"sahabatkpubkl"* pada akhir tahun. Setelah pendaftaran pengurus, melakukan seleksi administrasi kemudian seleksi tes wawancara dan pengumuman kelulusan. Sistem rekrutmen yang dilakukan hampir menyerupai seleksi anggota KPU, hal ini menunjukan bahwa semangat yang dimiliki oleh generasi milenial sangatlah besar dalam membangun bangsa ini di masa yang akan datang. Pembentukan dan pelantikan pengurus baru dilakukan oleh

jdih.kpu.go.id

pengurus sebelumnya yang disaksikan oleh Ketua dan Anggota serta Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu.

Peran dan Cara Remaja Sahabat KPU dalam Sosialisasi

Keberadaan dan peran Remaja Sahabat KPU sangatlah strategis untuk membantu KPU Provinsi Bengkulu dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Peran dan cara Remaja Sahabat KPU dalam melaksanakan sosialisasi, yaitu (a) *Roadshow* ke sekolah-sekolah SMA sederajat dan kampus-kampus dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih yang ada di Provinsi Bengkulu; (b) Remaja Sahabat KPU ikut bersama KPU Provinsi Bengkulu setiap kegiatan sosialisasi yang dibuat dalam bentuk drama musikal dan *dance* jingle KPU; dan (c) Keanggotaan Remaja Sahabat KPU tersebar dari beberapa sekolah di Kota Bengkulu dan Kabupaten, maka dalam beberapa kesempatan mereka secara mandiri melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi dilingkungan sekolah dan lingkungan tinggal masing-masing.

Pada angkatan pertama Forum Remaja Sahabat KPU melakukan *roadshow* di sekolah-sekolah di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu pada tanggal 18-20 Desember 2017. Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran *roadshow* adalah SMKN 2 Bengkulu Tengah, SMPN 1 Bengkulu Tengah, SMAN 3 Bengkulu Tengah, SMPN 4 Kota Bengkulu, SMAN 6 Seluma, dan Pondok Pesantren Hidayatullah Bengkulu. Peserta *roadshow* berjumlah 275 orang. Kegiatan *roadshow* sendiri dibuat semenarik mungkin meliputi perkenalan Forum Remaja Sahabat KPU, pertunjukan drama dan yel-yel, pembagian *doorprize* dan masih banyak lagi. Selain itu juga, setiap kegiatan sosialisasi Forum Remaja Sahabat KPU menyanyikan lagu mars yang mereka buat dan aransemen sendiri dengan lirik "*Kami Remaja Sahabat Kpu Pelopor Demokrasi, Kita Generasi Penerus Bangsa Indonesia, Nasib Bangsa Ditangan Kita, Ayo Kita Memilih Berpartisipasi Suara Untuk Negeriku".*

Pada tahun kedua angkatan 2018 forum remaja sahabat KPU ikut serta dalam kegiatan KPU Provinsi Bengkulu yang menyasar pemilih pemula tingkat sekolah SMA sederajat. Kegiatan tersebut di antaranya pelantikan pengurus baru angkatan kedua yang dibarengkan dengan acara pagelaran seni budaya pada tanggal 21 April 2018 di Bencoolen Mall Bengkulu.

jdih.kpu.go.id

Pada tahun ketiga angkatan 2019 kegiatan Forum Remaja Sahabat KPU Provinsi Bengkulu lakukan di antaranya open rekrutmen pengurus baru pada tanggal 6-8 Januari 2019 dan deklarasi pengurus baru pada tanggal 2 Februari 2019 di Bencoolen Mall yang digelar bersama kegiatan KPU Provinsi Bengkulu yaitu Lomba Festival Band Beken dan Lomba Mural. Forum remaja sahabat KPU diikutsertakan dalam kegiatan KPU Provinsi Bengkulu, yaitu Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang menyasar pemilih pemula SMA dan perguruan tinggi di Kota Bengkulu dengan tema gerakan cerdas memilih karena memilih itu juara.

Selain itu juga dilaksanakan *roadshow* ke 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 Maret 2019 yang didampingi langsung oleh Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu. Sekolah yang dikunjungi adalah SMKN 4 Kepahiang, Pondok Pesantren Darussalam Kepahiang, SMAN 1 Rejang Lebong dan SMAN 4 Rejang Lebong. Kegiatan *roadshow* selain memperkenalkan forum remaja sahabat KPU juga melakukan sosialisasi pemilihan umum tahun 2019 yang dibarengi dengan pembagian *doorprize*. Sosialisasi yang dilakukan di antaranya mengajak pemilih pemula untuk menggunakan hak pilih, jenis surat suara, tata cara mencoblos, hari pemungutan suara, suara sah tidak sah, dan sebagainya.

Kendala yang dihadapi

Berbeda dengan Relawan Demokrasi yang didukung ketersediaan anggaran di setiap KPU Kabupaten/Kota, Remaja Sahabat KPU ini tidak ada mata Anggaran khusus, namun semangat juang forum sangat diapresiasi dan diacungi jempol karena hanya mengandalkan dana pribadi pengurus forum. Peran tersebut terlihat jelas ketika KPU Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan yang berhubungan dengan

tahapan, pengurus forum remaja diundang dan diajak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Meskipun tanpa adanya anggaran forum ini memiliki program kerja yang jelas salah satunya dengan melaksanakan *roadshow* ke sekolah-sekolah tingkat SMA/sederajat di Provinsi Bengkulu untuk melakukan sosialisasi pemilihan umum dan pemilihan. Namun, KPU Provinsi Bengkulu tidak tinggal diam tetap mensupport kegiatan yang dilaksanakan oleh forum remaja sahabat KPU dalam melakukan sosialisasi. Kendala lain yang dihadapi adalah karena mereka semua adalah pelajar, waktu yang dimiliki sangat terbatas, tugas pokok mereka adalah belajar di sekolah.

Output Sosialisasi Remaja Sahabat KPU

Untuk mengukur output dari sosialisasi, terlebih awal menguraikan data pemilih. Akurasi data pemilih menjadi variabel penting originalitas pengukuran tingkat partisipasi pengguna hak pilih. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Bengkulu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu dalam rapat pleno terbuka tanggal 12 April 2019 adalah ***1.399.108*** (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan) dengan rincian laki-laki sebanyak ***708.242*** (tujuh ratus delapan ribu dua ratus empat puluh dua) jiwa dan perempuan sebanyak ***690.866*** (enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh enam) jiwa.

Jumlah DPT Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019

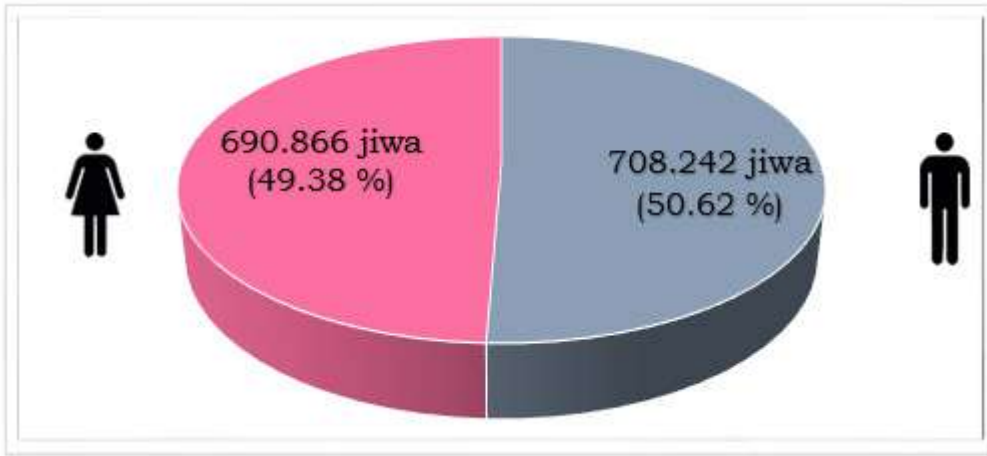

Berdasarkan data pemilih yang telah ditetapkan, partisipasi pemilih dalam Pemilu terjadi peningkatan. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2019 di Bengkulu dapat tergambarkan pada grafik rekapitulasi suara sah dan tidak sah berikut ini.

Rekapitulasi Suara Sah dan Tidak Sah Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu

Output sosialisasi yang gencar dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dan peran Remaja Sahabat KPU terbukti dengan meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di Provinsi Bengkulu. Partisipasi pemilih Pemilihan Umum tahun 2019 di Provinsi Bengkulu mencapai angka di atas 85%. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mencapai angka partisipasi pemilih sebesar 85.51%; Partisipasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebesar 85.37%; Partisipasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebesar 85.36%; dan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebesar 85.32%. Berikut diagram tingkat partisipasi pemilih Pemilu tahun 2019

Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu

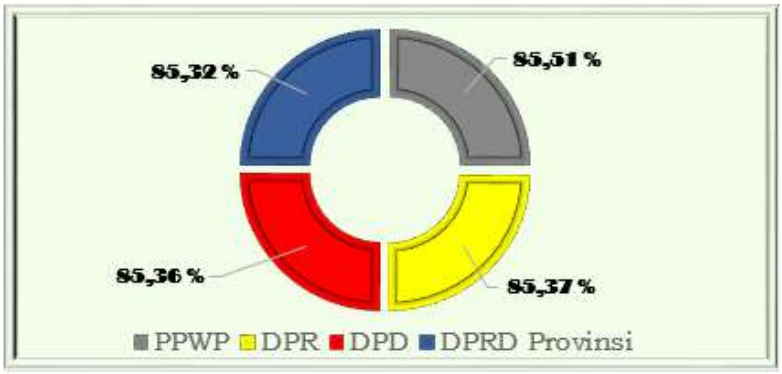

Kesimpulan dan Saran

Dari kegiatan yang dilakukan oleh forum remaja sahabat KPU Provinsi Bengkulu dapat disimpulkan bahwa: (a) Forum Remaja Sahabat KPU merupakan wadah bagi pemilih pemula untuk ikut andil menyosialisasikan tahapan Pemilu dan Pemilihan dalam meningkatkan partisipasi pemilih; dan (b) keberadaan Forum Remaja Sahabat KPU yang beranggotakan para pelajar dari sekolah-sekolah menengah atas atau sederajat memberikan motivasi kepada pemilih pemula yang lain untuk menambah pengetahuan tentang demokrasi, tentang pemilu dan pemilihan sehingga pendidikan pemilih yang merupakan bagian dari tujuan dibentuknya agen Remaja Sahabat KPU tercapai.

Forum Remaja Sahabat KPU Provinsi Bengkulu diharapkan ke depannya tetap eksis dan memberikan kontribusi yang positif dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih khususnya kepada pemilih pemula. Saran untuk masa mendatang diperlukan penguatan melalui regulasi untuk memayungi keberadaan Forum Remaja Sahabar KPU di tingkat Provinsi, seperti Relawan demokrasi.

Daftar Pustaka

C.S.T. Kansil dan Christine S.T, 1997. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Joko J. Prihatmoko, 2005. *Pemilihan Kepala daerah langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mariam Budiharjo, 1998. *Partsisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Morissan, 2005. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakasa.

Muhammad Rusli Karim, 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Suhartono, 2009. *Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School-Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat).* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

jdih.kpu.go.id

Optimalisasi Manajemen Relawan Demokrasi: Perspektif Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif (Studi Kasus: Provinsi Jawa Barat)

Oleh: Idham Holik
Anggota KPU Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK

Kerelawanan Elektoral (electoral volunteering) menjadi indikator penting Pemilu partisipatif - merepresentasikan keterlibatan masyarakat sipil (civil society). Dalam teori partisipasi relawan (Haddad, 2007), partisipasi relawan dalam sebuah komunitas merupakan bentuk tanggung jawab kewarganegaraan (civic responsibility). Keberadaan relawan atau yang disebut relawan demokrasi (relasi) dalam pemilu menjadi energi tambahan yang kuat (the powerful additional energy) bagi penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih dan menekan abstensi. Oleh karena itu, mengoptimalkan manajemen relasi menjadi salah satu kunci sukses mewujudkan hal tersebut. Optimalisasi manajemen tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat melalui penggunaan pendekatan manusiawi (the humane approach) dan Model P.E.C. (Preparation, Execution, Complation). Hasil (output) dari implementasi pendekatan dan model tersebut berdampak positif terhadap peningkatan populasi pemilih yang terinformasikan dengan baik (well-informed voters), yang menjadi basis peningkatan pemilih rasional dimana mereka dapat memahami konsep kedualatan dalam memilih (sovereignty in the voting). Pemberdayaan pemilih yang dilakukan relasi menjadi bagian penting bagi penguatan demokrasi elektoral.

Kata kunci: volunteering, pemilu, manajemen relawan.

Latar Belakang

Praktek demokrasi yang baik menuntut partisipasi aktif rakyat yang dilandasi atas kesadaran politik, bukan mobilisasi politik. Pembentukan kesadaran politik rakyat tentunya tidak instan, membutuhkan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) dan sosialisasi politik berkesinambungan yang dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi pihak pemerintah dan agen-agen lainya seperti lembaga pendidikan, media, NGO/LSM[1], keluarga dan lain sebagainya. Semua pihak terlibat dalam membentuk partisipasi politik yang sehat yang dilandasi literasi kewarnegaraan dan politik yang baik.

Dalam pemilu, aktivasi dan peningkatan partisipasi pemilih serta penurunan prosentase abstensi[2] (golput) menjadi hal yang sangat esensial bagi suksesnya penyelenggaran Pemilu 2019, apalagi di tengah ancaman apatisme sebagai efek negatif dari politik pasca-kebenaran[3] (*post-truth politics*) fenomena politik ini sebenarnya telah ada sejak tahun 2017[4]. Politik pasca-kebenaran tidak sekedar menumbuhkan emosionalitas dan irrasionalitas perilaku politik pemilih, tetapi polarisasi politik antar pendukung kandidat presidensial yang semakin tajam dan ketidakpercayaan politik pemilih (*voter's political distrust*) kepada penyelenggara pemilu –efek serangan kabar bohong (*hoax*) dan berita palsu (*fake news*). Politik pasca-kebenaran telah menjadi ancaman serius tidak hanya bagi suksesnya Pemilu Serentak 2019, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas yaitu demokrasi partisipatif (*participatory democracy*) di Indonesia.

Selain politik pasca-kebenaran, praktek komunikasi politik kontestan elektoral di Pemilu Serentak 2019 juga didominasi oleh gaya politik populisme[5]

---

[1] Non-Government Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

[2] Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

[3] Ralph Keyes (2004) mengemukakan bahwa ketika orang tanpa bersalah (*guilt-free*) dengan sengaja merusak kebenaran melalui penalaran (*rationales*), itulah yang disebut pasca-kebenaran (*post-truth*). Kemudian pada tahun 2016, Oxford Dictionaries mempredikati kata pasca-kebenaran sebagai Word of the Year 2016. Oxford Dictionaries menyebutnya sebagai adjektif dan mengartikannya sebagai *relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief* (berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada menyerukan emosi dan kepercayaan pribadi). Jadi politik pasca-kebenar merupakan politik yang menggunakan ketidakbenaran atau kebohongan dengan rasa tidak bersalah dengan tujuan membentuk emosi dan keyakinan politik publik. Politik ini dilakukan dengan cara mendiseminasikan kabar bohong (*hoax*), berita palsu (*fake news*), disinformasi, dll.

[4] Selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2017, menurut Pratiwi Utami (2018), informasi bohong (*hoax information*) tersirkulasi di media sosial dengan pendekatan praktek memetik (*a memetic practice approach*). Konsekuensinya, kebohongan (*hoaxes*) telah menciptakan budaya politik dan menjadi potensial sebagai sarana partisan politik (*a means of political partisanship*). Dengan kecendrungan mengalahkan kebenaran dan mengarahkan orang menjauh dari fakta yang meyakinkan (*believing facts*), kebohongan dapat menjadi ancaman bagi demokrasi partispatif (*a threat to participatory democracy)*.

[5] Peter Wiles menjelaskan bahwa populisme adalah sindrom politik yang ditandai oleh beberapa ciri dasar

(*style of populism politics*) bagi pemilih kritis, ini berpotensi menciptakan sinisme politik. Itulah kenapa Kapfere & Theodossopoulos (2019) mempredikati populisme sebagai paradoks demokrasi (*democracy's paradox*). Suatu situasi yang kurang sehat, seharusnya komunikasi politik tersebut didominasi oleh gaya kampanye programatik (*programmatic campaign*), dimana rancangan program-program politik dan pembangunan menjadi pesan utama dalam berkampanye. Politik populisme semakin diperkuat dengan personalisasi politik[6] –dimana politik elektoral diidentifikasi hanya pada persoalan figur atau individu kandidat lebih dominan dalam keputusan pemilih daripada program-program yang ditawarkan. Politik populisme dan personalisasi politik hanya memperkuat emosionalitas pemilih, bukan rasionalitas pemilih. Politik populisme dan personalisasi politik menjadi hambatan berarti dalam upaya mendaulatkan pilihan politik pemilih dan ini juga berdampak pada kerentanan demokrasi elektoral.

Oleh karena itu, penyelenggara pemilu, khususnya di Jawa Barat, tertantang bagaimana dapat mengoptimalkan kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih sebagai fondasi partisipasi pemilih. Partisipasi tersebut tentunya tidak hanya dalam bentuk pemberian suara di hari pemungutan suara (*vote casting*) saja, tetapi juga keterlibatan pemilih pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu seperti pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, dan proses rekapitulasi serta yang terpenting pemilih dapat memahami eksistensi politiknya sehingga mereka memahami dan dapat mengaktualisasikan prinsip kedaulatan dalam memilih.

Deskripsi tersebut di atas menegaskan tentang pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengaktivasi dan memperkuat partisipasi pemilih melalui kegiatan kerelawanan, apalagi dari pemilu ke pemilu, adanya tuntutan perbaikan partisipasi dalam upaya mewujudkan pematangan atau penguatan demokratisasi elektoral. Hal ini ditegaskan juga dalam norma-norma yang terdapat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, sebagai regulasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam memaknai hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan bahwa *tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna*. Partisipasi tersebut menjadi indikator kesuksesan penyelenggaran pemilu dan secara kuantitatif, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan target kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebesar 77,5%[7] untuk Pemilu Serentak 2019.

yaitu populisme lebih pada persoalan moralistik bukan programatik; ideologinya lemah dan longgar, karena ideologi dipahami tak bermanfaat; anti-intelektual; tidak berdisiplin (*undisciplined*) dan terorganisasi dengan buruk (*badly organized*); menentang ilmu pengetahuan dan teknokrasi, bersifat nostalgia, dll (Ionescu & Gellner, 1969:166-180; Anselmi, 2018:20-21).

6 Salah satu konsekuensi utama dari personalisasi politik terletak pada peran pemimpin politik sebagai jangkar interpretasi dan evaluasi pemilih (Hotlz-Bacha, Lessinger, & Hettesheimer, 1998; Garzia, 2014:8).

7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki populasi pemilih terbesar se-Indonesia[8], target partisipasi tersebut sangatlah menantang, apalagi di Pemilu Legislatif 2014, tingkat partisipasi pemilih hanya sebesar 71,39%[9] dan Pemilu Presiden 2014, sebesar 70,93%[10] serta Pilgub Jabar 2018 sebesar 71,62%[11]

KPU Provinsi Jawa Barat menyambut baik kebijakan KPU RI yang memerintahkan KPU Kab/Kota membentuk kembali Relawan Demokrasi (Relasi) yang dilibatkan selama tiga bulan jelang pemungutan suara Pemilu serentak 2019.

Sebenarnya program Relasi dalam Pemilu di Indonesia tidak hanya pada Pemilu Serentak 2019[12] saja, karena program ini telah diadakan sejak Pemilu 2014[13] dengan pertimbangan adanya kecenderungan peningkatan populasi pemilih abstensi dan diharapkan dapat memulihkan inflasi kualitas memilih. Kesuksesan program tersebut di Pemilu 2014, kemudian berlanjut dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak 2015, 2017, & 2018[14].

Program Relasi tersebut merupakan gerakan sosial untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih melalui kegiatan sosialisasi elektoral dan pendidikan pemilih berbasiskan komunitas. Mereka diharapkan menjadi pelopor gerakan voluntirisme elektoral (*the pioneers of electoral volunteerism movement*). Program Relasi tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya inflasi kualitas memilih

[8] Berdasarkan Lampiran Keputusan KPU RI No.: 860/PL.02.1-Kpt/01KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana jumlah pemilih Jawa Barat sebanyak 33.276.905 atau sebesar 17,44% dari total pemilih dalam negeri se-Indonesia (sebanyak 190.779.969 orang) dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 16.727.451 orang dan perempuan sebanyak 16.549.454 orang.

[9] Pemilih pengguna hak pilih di TPS sebanyak 23.712.918 dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jawa Barat 33.215.872.

[10] Pemilih pengguna hak pilih di TPS sebanyak 23.990.089 dari total jumlah DPT sebanyak 33.821.378 orang.

[11] Pemilih pengguna hak pilih di TPS sebanyak 22.724.333 dari total jumlah DPT sebanyak 31.730.042 orang.

[12] Surat Edaran KPU RI No. 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 09 Januari 2019 dengan perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019. Surat Edaran tersebut sebagai kebijakan turunan dari Peraturan KPU RI No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya Pasal 15 ayat 2 huruf f.

[13] Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 609/KPU/IX/2013 tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014. Relawan Demokrasi (Relasi) tersebut bertugas untuk 5 (lima) segmen pemilih yang berstrategis yaitu kelompok pemilih pemula, agama, penyandang disabilitas, dan pinggiran (marginal). Jumlah Relasi di setiap Kabupaten/Kota sebanyak maksimal 25 orang dengan rincian setiap segmen terdiri dari 5 (lima) orang relawan atau disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

[14] Peraturan KPU RI No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 15 ayat 1 huruf e yang berbunyi: "*Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui: … pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi;*". Regulasi tersebut kemudian direvisi dan dimuat kembali dengan teks yang sama dalam Pasal 16 ayat 2 huruf e Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2017.

dengan ditandai adanya pragmatisme politik pada pemilih. Setidak-tidaknya ada tiga faktor kontibutor atas menguatnya pragmatisme pemilih tersebut adalah *pertama*, literasi politik yang rendah; *kedua*, melemahnya voluntirisme elektoral masyarakat dalam agenda pencerahan atau pencerdasan berdemokrasi; dan *ketiga*, masifnya politik tuna ide dari kontestan elektoral.

Tema kontribusi atau fungsi kegiatan kerelawanan (*volunteering*) terhadap pengembangan demokrasi merupakan hal menarik untuk ditelaah. Mary Alice Haddad (2007: 12-13) pernah melakukan studi tentang asal-usul kegiatan kerelawanan (*volunteering*) dan partisipasi kewarganegaraan (*civic engagement*). Haddad mengemukakan bahwa studi tersebut dapat ditelurusi pada tulisan-tulisan Aristoteles tentang demokrasi, tetapi yang paling sering dipahami publik pada umumnya adalah dimulai dari karya Alexis de Tocqueville, *Democracy in America* (1835) –sebuah karya yang ditulisnya berdasarkan perjalanan ke negara tersebut di awal abad ke-19. Dalam karya tersebut, Tocqueville menegaskan bahwa asosiasi relawan memberikan landasan pelatihan kritis bagi pelaku demokrasi masa depan (*future democracts*); mereka menanamkan nilai-nilai demokratis seperti toleransi, komunikasi, dan kepercayaan; mereka mentransmisikan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) seperti debat dan wacana publik. Menurut pemikirannya, level tertinggi partisipasi kewarganegaraan (*civic engagement*) mampu mentranslasikan demokrasi yang sukses (*successful democracies*) –hal ini telah diuji oleh para sarjana ilmu politik seperti Almond & Verba (1963), Cohen & Arato (1992), Inglehart (1988), Putnam (1993), dan Reuschemyer *et al.* (1992) dengan menggunakan data statistikal baik di negara-negara berkembang ataupun maju dimana hasilnya adalah adanya korelasi yang meyakinkan (*convincing correlations*) antara keterikatan kewarnegaraan (atau kegiatan kerelawanan) dengan demokrasi yang sukses.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitiannya, Putnam (1993) menegaskan bahwa kegiatan kesukarelawanan (*volunteering*) dapat dijadikan indeks partisipasi warga negara (*civic participation*) dan sebaliknya penurunan kegiatan kesukarelawanan menandakan krisis potensial bagi demokrasi (Wilkinson & Bittman, 2002). Jadi kebijakan KPU RI tentang pembentukan Relasi merupakan kebijakan yang penting dan tepat bagi pengembangan praktek berdemokrasi elektoral di Indonesia. Dalam tataran praktis, kebijakan tersebut harus didukung oleh upaya optimalisasi praktek manajemen relawan yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di daerah (KPU Kab./Kota).

Deskripsi tersebut di atas menegaskan bahwa studi atau riset tentang voluntirisme elektoral, termasuk manajemen relawan, bersifat penting –apalagi bagi penyelenggara pemilu. Cuskelly *et al* (2006) mengemukakan bahwa praktek manajemen relawan masih menjadi topik yang mengemuka (*emerging topic*) dalam literatur relawan (al Mutawa, 2015:54). Apalagi di Indonesia, studi atau riset tentang hal tersebut jarang sekali. Oleh karena itu, hasil riset tersebut nantinya

diharapkan dapat menjadi kontribusi yang signifikan khususnya dalam bidang manajemen relawan, partisipasi aktif masyarakat sipil, dan demokrasi atau pemilu partisipatif.

Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada deskripsi latar belakang penelitian tersebut di atas dan pertimbangan bahwa Relawan Demokrasi yang memiliki tugas melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih harus dikelola secara efektif dan efisien agar target partisipasi tercapai, penting bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian yaitu *bagaimana KPU Kab/Kota di Jawa Barat mengoptimalkan praktek manajemen Relasi dalam Pemilu Serentak 2019?*

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian sudah pasti memiliki tujuan yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti terdeskripsi di atas tersebut. Selain dapat memberikan deskripsi komprehensif tentang bagaimana KPU Kab./Kota di Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan praktek manajemen Relasi dalam Pemilu Serentak 2019, penelitian ini juga diharapkan dapat merumuskan pendekatan manajerial dan model manajemen relawan yang lebih aplikatif dalam konteks penyelenggaraan Pemilu atau pemilihan kepala daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan strategis untuk pengembangan manajemen relawan dalam pemilu di Indonesia untuk masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini terkategori sebagai penelitian kualitatif. Ada banyak metode penelitian kualitatif yang dapat dipilih, tetapi untuk konteks penelitian ini, peneliti memiliki metode penelitian studi kasus (*case study research*). Menurut Robert K. Yin (2018: 4-5), penelitian studi kasus pada umumnya dapat ditemukan atau diaplikasikan dalam banyak penelitian disiplin ilmu sosial dan profesi terlatih (*the practicing professions*) seperti ilmu politik, kerja sosial (*social work*), administrasi pemerintahan (*public administration*), perencanaan komunitas (*community planning*), dan lain sebagainya. Kerelawanan dalam pemilu (*electoral volunteering*) atau Relasi dapat dikategorikan sebagai kerja sosial. Selain itu, program Relasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan strategis

sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum –yang merupakan salah satu lembaga kuasi-negara (*state auxiliary body*) yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan (*public administration*). Selanjutnya Kerelawanan tersebut juga dapat dipahami sebagai bagian dari studi perencanaan komunitas (*community planning*), karena fokus kerja Relasi yaitu pada komunitasnya –dimana Relasi memiliki tugas mencerdaskan dan meningkatkan partisipasi pemilih berbasiskan komunitas. Artinya Relasi bertugas merencanakan komunitas pemilih yang cerdas, melalui literasi elektoral. Ini memiliki arti penting di tengah mewabahnya pragmatisme politik (misalnya politik uang) dan politik pasca-kebenaran (*post-truth politics*). Jadi tepat, pilihan metode penelitian ini.

Yin (2018:13) mendefinisikan "*a case study is an empirical method that investigates a contemporary phenomenon (the* "case"*) in depth and within its real-world context, especially when the boundaries between phenomenon and context not be clearly evident*". Sebagai metode empiris, studi kasus dapat membantu para peneliti memahami secara mendalam fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata khususnya ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak nampak jelas. Dalam penelitian ini, metode empiris tersebut dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan tujuan untuk menemukan bukti-bukti (*evidences*) yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang telah ditentukan sebelumnya.

Merujuk pada pemikiran Yin (2018), penelitian ini terkategori sebagai penelitian studi kasus deskriptif dengan kasus tunggal yaitu manajemen relawan. Dalam studi kasus tersebut, peneliti diawali dengan menjelaskan teori atau model deskriptif terkait objek penelitian (manajemen relawan) serta menjelaskan permasalahannya yang terjadi selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu, penelitian harus mencakup kedalaman dan cakupan (*the depth and scope*) dari kasus yang dikaji. Pada akhirnya studi kasus deskriptif diharapkan dapat menyajikan deskripsi lengkap tentang fenomena praktek manajemen relawan dalam konteksnya.

Pelaksanaan penelitian ini sama seperti penelitian-penelitian sosial lainnya diawali dari desain penelitian, perumusan pertanyaan/permasalahan, pengumpulan data, analisis data, sampai kesimpulan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam kepada KPU Kab/Kota di wilayah Jawa Barat selaku *volunteer administrators* atau *volunteer managers* serta didukung dengan teknik pencarian data lainnya seperti pengumpulan dokumen-dokumen kebijakan resmi dan yang mendukung seperti foto, poster, video, atau berita kegiatan kerelawanan.

Theoritical Framework Volunteering

Esensi demokrasi adalah kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Oleh karena itu, partisipasi rakyat menjadi inti dalam berdemokrasi rakyat menjadi subjek politik. Salah satu bentuk partisipasi aktif mereka tersebut biasanya dalam bentuk kegiatan kerelawanan (*volunteering*). Kegiatan tersebut merepresentasikan idealisme dalam berdemokrasi oleh rakyat. Itulah mengapa Wilkinson dan Bittman (2002) menyatakan bahwa kegiatan kesukarelawanan merupakan sebagai wajah manusiawi demokrasi (*the human face of democracy*). Bahkan pada tahun 2001, dalam The Universal Declaration on Volunteering[15] dinyatakan dengan tegas bahwa *volunteering is a fundamental building block of civil society*. Kegiatan kerelawanan merupakan fondasi bagi masyarakat sipil. Tentunya ini menjadi cermin dari kualitas masyarakat sipil di sebuah negara demokrasi. Demokrasi yang baik, atau khususnya pemilu yang demokratis, ditandai dengan partisipasi aktif para relawan.

Dalam konteks penyelenggaran pemilu, untuk memahami dengan baik kegiatan kerelawanan elektoral, menjadi penting terlebih dahulu untuk memahami etimologi kata kegiatan kerelawanan (*volunteering*). Kata *volunteering* atau *volunteered* pertama kali dikenal pada tahun 1630. Kata tersebut berasal dari kata relawan (*volunteer*) yang populer digunakan pada tahun 1600-an dengan makna "orang yang menawarkan diri untuk pelayanan militer" (*military service*). Kata relawan tersebut berasal dari Bahasa Francis Pertengahan (Middle French) yaitu *voluntaire* (orang yang menjadi relawan) yang berasal dari Bahasa Latin *voluntārius* (kehendak bebas seseorang) –dapat dimaknai juga sebagai waktu luang, pilihan, atau (*un-coerced*). Kemudian, pada akhir tahun 1970-an, kata kerelawanan disepadankan dengan frasa pelayanan komunitas (*community service*). Frasa tersebut juga bersamaan atau terkoneksi dengan frasa masyarakat sipil (*civil society*) (Harper, 2003; jocote.org, 2010; Stebbins, 2015:7). Jadi secara leksikal dan dalam konteks sipil, kerelawanan dimaknai sebagai keterlibatan seseorang dalam pelayanan komunitas tanpa dipaksa atau didasarkan kehendak bebasnya.

Dalam perspektif partisipasi, secara sederhana, kegiatan kerelawanan (*volunteering*) dipahami sebagai partisipasi kewarganegeraan. Misalnya pengertian yang dikemukakan oleh Ram A. Cnaan dan Sohyun Park (2016) dimana mereka memahami bahwa partisipasi kewarganegaraan (*civic participation/engagement*) sebagai aktivitas individu, sendiri atau bersama yang lainnya, yang dilakukan di luar batasan keluarga dan rumah tanggal yang secara langsung atau tidak langsung mengupayakan mempromosikan kualitas kehidupan orang lain dan juga membuat kehidupan komunitas atau masyarakat menjadi lebih baik (Smith & Stebbins dalam Smith, Stebbins, & Grotz, 2016:3). Komitmen untuk menciptakan kehidupan

[15]Diadopsi oleh dewan direktur internasional IAVE (the International Association for Volunteer Effort) pada 16th World Volunteer Conference, Amsterdam, the Netherlands, January 2001, the International Year of Volunteers.

bersama yang lebih berkualitas menjadi landasan dari praktek partisipasi kewarganegaraan dalam kehidupan sosial-politik.

Selanjutnya dalam pemikiran Jon Van Til (1988:6), kegiatan kerelawanan diidentifikasi sebagai tindakan menolong dari seorang individu yang dinilai olehnya dan tidak dimaksudkan secara langsung untuk memperoleh materi atau dimandatkan atau dipaksa oleh yang lain. Jadi dalam pengertian umum kegiatan kesukarelawanan adalah aktivitas membantu tanpa paksaan yang keterlibatannya bukan terutama karena memperoleh keuangan (*financial gain*) dan bukan karena paksaan atau mandat. Dengan demikian pengertian kata tersebut berbeda dari pengertian kata kerja (*work*), perbudakan (*slavery*), atau wajib militer (*conscription*). Pengertian tersebut mengandung dua motif prinsipal kegiatan kesukarelawanan yaitu *pertama* menolong orang lain –jadi kesukarelawanan sebagai altruisme; dan *kedua*, membantu orang lain adalah membantu diri sendiri –jadi kesukarelawanan sebagai kepentingan sendiri (*self-interest*) (Stebbins, 2015:8). Orang lain dipandang seperti dirinya sendiri. Kognisi empati menjadi basis tindakan bersukarelawan.

Selanjutnya menurut Safrit & Schmiesing (2012), kegiatan kerelawan yang dilakukan oleh relawan dilandasi oleh paham voluntirisme (*volunteerism*). Selain tanpa paksaan dan tidak adanya motivasi memperoleh keuangan (*financial gain*), seperti dikemukakan terlebih dahulu di atas, voluntirisme juga mengandung dua prinsip fundamental lainnya yaitu keterlibatan aktif (*active involvement*) dan fokus pada kebaikan bersama (*the common good*) (dalam Conors, 2012:6). Jadi, dalam berdemokrasi, para relawan harus memiliki semangat aktivisme yang tinggi (*high spirit of activism*) dan berorientasi kepentingan publik dan negara. Oleh karena itu, pemilu menuntut adanya kegiatan kesukarelawanan atau yang disebut *electoral volunteering* ini merupakan bagian *political volunteering*.

Manfaat voluntirisme juga dijelaskan oleh Milton Boyce (1971:3) dimana voluntirisme dipahami sebagai pengembangan kepemimpinan (*as leadership development*). Proses pengembangan kepemimpinan tersebut merupakan sebuah pendekatan sistematis dimana individu-individu (para relawan) ditawari kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya untuk memengaruhi anggota kelompok sosial (Safrit & Schmiesing dalam Conors, 2012:9). Menjadi relawan adalah kesempatan yang berharga bagi setiap individu dalam mengembangkan kepemimpinan di lingkungan sosial. Boyce (1971) melabeli secara sosial relawan sebagai pemimpin (*leader*).

Dalam konteks yang lebih makro, selanjutnya, Haddad (2007: 12) memandang partisipasi relawan sebagai sebuah jendela menuju masyarakat sipil (*a window into civil society*), sebab selain memilih (*voting*), partisipasi relawan dan organisasi kewarganegaraan (*civic organization*) merupakan salah satu cara paling penting dalam menjelaskan tentang individu dalam mempraktikkan kewarganegaraannya. Organisasi relawan merupakan komponen kritis bagi masyarakat sipil. Melalui

organisasi relawan, selain warga negara dapat menjaga agar pemerintah bertanggung jawab kepada publiknya dan melalui partisipasinya, warga negara juga mengembangkan modal sosial (*social capital*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*).

Dari sisi teoritis, khususnya Teori Partisipasi Relawan (Haddad, 2007), partisipasi relawan dalam sebuah komunitas merupakan bentuk tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*). Ini dilandasi oleh gagasan bahwa warga negara memiliki tanggung jawab individual dan kepemerintahan (*governmental and individual responsibility*) yang berkenaan tentang permasalah sosial dan praktek institusi pemerintah dan sosial. Teori tersebut berangkat dari tiga hal fundamental, yaitu *pertama*, dalam pendekatan negara-dalam-masyarakat (*a state-in-society approach*), Haddad berasumsi bahwa masyarakat dan negara bersifat integral dalam pengembangan masyarakat sipil (*civil society*) dan partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*); *kedua*, penjelasan praktek negara dan partisipasi masyarakat di berbagai negara, kota/prefektur (*prefectures*). Dan *ketiga*, Haddad menunjukan partisipasi yang kuat terjadi pada level komunitas, bukan individual.

Kemudian dalam konteks pemikiran yang sama tentang kemanfaatan atau fungsionalitas kegiatan kesukarelawanan, Danijela Matorčević dan Aleksandra Gligorović (2017:11) mengemukakan bahwa karakteristik sangat penting dari kegiatan kesukarelawanan adalah pengembangan diri dari seseorang (*the self-development of a person*) melalui karya kesukarelawanan (*voluntary work*). Kegiatan kesukrelawanan memberikan kesempatan untuk mengembangkan respek dan respek-diri bagi individu dan kesempatan aktualisasi diri –realisasi semua potensi manusia– menjadi setiap sesuatu yang seseorang dapat lakukan. Melalui aktualisasi diri individu, kegiatan kesukarelawanan memungkinkan pengembangan individu dan sosial. Orang yang teraktualisasi diri (*self-actualised people*) menikmati hubungan personal yang lebih dalam (*deeper personal relations*) dengan beberapa orang daripada hubungan yang lebih dangkal (*more shallow relationship*) dengan banyak orang. Jadi dengan mengembangkan sistem nilai kegiatan kesukarelawanan, dengan cara menginternalisasikan dan merealisasikannya semua potensi manusia, kita telah berkontribusi pada pengembangan komunitas yang sehat dan puas (*healthy and satisfied communities*)

Dalam konteks demokrasi elektoral, relawan memiliki peran menciptakan komunitas pemilih yang sehat atau tercerahkan. Itulah alasan mengapa relawan harus memiliki karakter pribadi yang baik. Dalam perspektif psikologi, David H. Smith (1975, 1994, 2010) mengemukakan sebuah model yaitu yang dikenal sebagai A-EC Model (Active-Effective Character Model) atau sekarang disebut A-PC Model (Active-Prosocial Character Model) (Smith *et al* dalam Smith, Stebbins, & Grotz, 2016:708). Komponen-komponen dari model tersebut diantara mencakup yaitu (1) Sifat personalitas dan motivasi yang kondusif: meliputi (a) altruisme, percaya, sosiabilitas, rasa hasil (*sense of efficacy*); (b) optimisme; (c) orientasi kinerja

(*achievement orientation*); (d) keterbukaan terhadap pengalaman baru; dan sebagainya; (2) Afeksi/emosi kondusif: meliputi misalnya empati, stabilitas emosi, impulsif rendah (*low impulsiveness*), kekhawatiran sosial yang rendah (*low social anxiety*) dan emosi moral dan sosial lainnya; (3) Kapasitas intelektual konsusif: memiliki inteligensi umum serta yang khususnya seperti kapasitas linguistik-verbal, intrapersonal (emosional) dan interpersonal; dan (4) Kognisi kondusif: misalnya keyakinan atau ideologi tentang kebebasan sipil, persepsi nilai atas partisipasi warga negara (*civic participation*), dan lain sebagainya.

Selanjutnya penting untuk mengidentifikasi karakter kepribadian relawan. Florance Littauer (1983/1992) pernah mengemukakan ada empat jenis tipe karakter tersebut yaitu sanguinis popular (*popular sanguines*), melankoli sempurna (*perfect melancholy*), koleris kuat (*powerful cholerics*) dan plegmatik damai (*peaceful phlegmatic*). Secara umum, relawan yang berkepribadian sanguinis popular dan klorik kuat adalah orang berkarakter ekstrovert, sedangkan yang dua lainnya adalah berkarakter introvert –bahkan untuk plegmatik damai tidak sekedar itu saja, tetapi mereka juga adalah penonton (the watcher) dan pesimis.

Pertama, sanguinis popular. Relawan dengan karakter tersebut memiliki berkepribadian menarik (*appealing personality*), rasa ingin tahu yang besar (*curious*), optimistik, antusiasme tinggi, mudah berteman atau bersosialisasi (*high sociability*) dan menghibur (*fun*), suka bercerita atau mengobrol (*talkative or storyteller*), dan terkadang berperilaku narsistik (selau ingin menjadi pusat perhatian). Mereka memandang relawan sebagai pekerjaan. Mereka juga kreatif, menginspirasi orang lain untuk bergabung, dan mampu bertindak dengan cara yang mencolok (*a flashy way*). *Kedua*, melankoli sempurna. Mereka suka berpikir mendalam (*deep and thoughtful*), analitis, serius dan penuh maksud (*purposeful*), idealis, bertalenta dan keratif dan dapat mengorbankan diri (*self-sacrificing*) serta sensitif pada orang lain. Dalam bekerja, mereka berorientasi pada jadwal (*schedule oriented*), perfeksionis (atau standar tinggi), rinci, berupaya mencari solusi kreatif, dan bertekad menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai.

Ketiga, koleris kuat. Mereka memiliki karakter kuat sebagai pemimpin, dinamis, aktif, kebutuhan kompulsif atas perubahan, berkendak kuat dan menentukan (*strong willed and decisive*), dan independen dan mandiri (*self-sufficient*) serta tidak mudah patah semangat (*not easily discouraged*). Dalam bekerja, mereka berorientasi tujuan, mampu melihat dengan gambaran utuh (*the whole picture*), mengorganisasikan dengan baik (organizes well), berupaya mencari solusi praktis, bertindak cepat, dan menstimulasi aktivitas. Dan *keempat*, plegmatik damai. Mereka berkepribadian santai (*easygoing*), tenang, sabar, konsisten, pendiam (*quiet*), baik dan simpatik, dan menyembunyikan emosi. Dalam bekerja, mereka menghindari konflik, memiliki kemampuan administratif, memediasi masalah, berupaya mencari cara mudah, dan baru bisa bekerja baik apabila dalam tekanan.

Deskripsi di sub bab ini menegaskan bahwa kegiatan kerelawan bersifat substansial bagi pengembangan demokrasi atau pemilu partisipasi, karena relawan adalah representasi keterlibatan aktif masyarakat sipil dan mereka menjalankan tugas kewarganegaraannya. Oleh karena itu, pemilu membutuhkan partisipasi aktif relawan yang memiliki kualifikasi karakteristik personal yang baik agar dapat menjalankan semua tugas kerelawannya secara optimal.

Selanjutnya sebagai sumber daya pemilu partisipatif, relawan harus dapat dikelola dengan baik sesuai idealisme demokrasi partisipatif itu sendiri. Hal ini menegaskan adanya kebutuhan pengelolaan (*need for management*) bagi relawan agar mereka dapat bekerja dengan efisien dan efektif dalam mewujudkan pemilu partisipatif. Dalam pandangan Sozanska *et al.* (2004), dalam dunia kontemporer, jika relawan diharapkan produktif, maka mereka harus dikelola dengan efisien dan professional (al Mutawa, 2015:19). Jadi, manajemen relawan (*volunteer management*)[16] bersifat vital.

Manajemen Relawan

Dalam menelaah konsep manajemen relawan dengan baik, sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian manajemen itu sendiri sebagai unsur pokoknya. Kata manajemen pertama kali dipopulerkan oleh Frederick W. Taylor untuk menjelaskan apa yang ia dahulu sebut sebagai studi pekerjaan (*work study*) atau studi tugas (*task study*) (Drucker, 2011:1). Pada dasarnya, apapun kajian tentang pekerjaan yang mesti diselesaikan dengan berbagai cara atau teknik dapat disebut manajemen. Pengertian tersebut fokus pada pekerjaan atau tugas itu sendiri. Berbeda dengan pengertian dasar tersebut, Mary Parker Follet mendefinisikan *management as the art of getting things done through people* (Daft, *et al*., 2010:6). Follet memahami manajemen dalam pengertian seni menggerakkan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan mendapatkan sesuatu. Kemudian senada dengan pemikiran Follet tersebut, Robert Kreitner & Charlene Cassidy (2011:5) menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasional dalam lingkungan yang berubah. Inti proses tersebut adalah penggunaan sumberdaya terbatas (*limited resources*) yang efisien dan efektif.

Selanjutnya Ricky W. Griffin (2013:5) menjelaskan manajemen merupakan serangkaian aktivitas (meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan) yang diarahkan pada sumberdaya organisasi (manusia, keuangan, fisik, dan informasi), dengan maksud

[16]Istilah lainnya disebut juga manajemen sumberdaya relawan (*volunteer resource management*) (Naylor, 1967).

mencapai tujuan-tujuan organisasi dalam cara yang efektif dan efisien. Yang dimaksud efektif adalah membuat keputusan yang benar (*the right decisions*) dan mengimplementasikannya dengan berhasil, sedangkan efisien adalah penggunaan sumberdaya dengan bijak dan dalam *a cost-effective way* (penggunaan biaya yang tepat). Griffin (2013) menekankan pada pencapaian tujuan organisasi melalui cara yang efektif dan efisien. Tanpa cara tersebut, sebuah manajemen dapat dikatakan disfungsional.

Jadi manajemen dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang melibatkan atau seni menggerakan orang lain dengan maksud mencapai tujuan organisasional dengan efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas di dalam lingkungan yang berubah. Manajemen menuntut kemampuan dalam menganalisis baik lingkungan internal ataupun eksternal sebagai landasan penggunaan sumberdaya organisasional yang terbatas.

Penggunaan istilah manajemen relawan mulai mengemuka dimulai pada akhir 1960-an dan awal 1970-an[17], karena pada waktu itu banyak organisasi nirlaba merekrut atau melibatkan relawan untuk program sosial tertentu dan orang-orang menganggap kegiatan kerelawanan sebagai alternatif bekerja. Manajemen relawan dikenal juga dengan istilah yaitu sebagai *volunteer engagement*, *volunteer coordination*, dan *volunteer administration* (McCurley, *et al*, 2012). Safrit & Schmiesing (2012) mendefinisikan manajemen relawan sebagai proses kerja logis dan sistematis dengan dan melalui para relawan untuk meraih tujuan-tujuan organisasi dalam lingkungan yang selalu berubah (*an ever-changing environment*). Inti dari definisi tersebut adalah keterlibatan relawan yang efisien dan efektif (*the effective and efficient engagement of volunteers*) sebagai sumber daya manusia yang dipandang dan dinilai baik dalam tataran kontribusi individual atau kolektifnya terhadap visi dan misi organisasi (dalam Conors, 2012:6).

Dalam konteks pemilu, manajemen relawan juga dapat dipahami sebagai seni melibatkan para relawan sebagai pelaku sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan maksud mencapai target partisipasi pemilih melalui kegiatan aktivasi partisipasi elektoral dan meningkatkannya secara efektif dan efisien dalam lingkungan politik yang dinamis.

Dalam praktek manajemen relawan, penting untuk dapat memahami dengan baik tentang fungsi-fungsi dalam manajemen itu sendiri. Dalam konteks studi manajemen pada umumnya, pada tahun 1916, Henry Fayol mengidentifikasi lima fungsi manajerial yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), perintah (*command*), koordinasi (*coordination*), dan pengawasan (*control*). Fungsi manajerial tersebut kemudian diperbaharui dan dikembangkan oleh para sarjana manajemen lainnya seperti Kreitner & Cassidy (2011: 15-16), sehingga

[17]Manajemen relawan tidak dikenal sebelum tahun 1965 dan menjadi semakin terkenal pada tahun 1990-an (jocote.org, 2010).

ada fungsi-fungsi manajerial baru lainnya –selain yang dikemukakan oleh Fayol tersebut, yaitu pengambilan keputusan (*decision making*), kepegawaian (*staffing*), mengkomunikasikan (*communicating*), memotivasi (*motivating*), dan memimpin (*leading*). Selanjutnya agar lebih aplikatif, implementasi fungsi-fungsi manajerial tersebut harus didukung dengan pemilihan model manajemen yang tepat, karena dapat menjadi faktor yang akan memberikan kontribusi postif terhadap kesuksesan atas implementasi manajemen relawan.

Dalam studi manajemen relawan, ada banyak model manajemen. Misalnya model manajemen relawan L-O-O-P yang dikembangkan oleh Kathryn M. Penrod (1991). Model ini fokus dengan konsep menempatkan (*Locating*), mengorientasikan (*Orientating*), mengoperasikan (*Operating*), dan menghidupkan terus-menerus (*Perpetuating*) relawan dan voluntirisme. Dalam implementasi keempat konsep tersebut, Penrod menyarankan agar para relawan dapat bersatu satu sama lainnya secara integral untuk meraih kesuksesan.

Pertama, tahapan menempatkan (*Locating*) dalam model tersebut adalah tentang langkah-langkah dalam merekrut dan menyeleksi relawan. Konsep tersebut fokus pada menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan keterampilan dan minat relawan. Selain itu, melalui proses seleksi, organisasi dapat menentukan kebutuhan relawan potensial dan menyesuaikannya dengan kebutuhan organisasi.

Steve McCurley (1995) mengemukakan ada empat tipe rekrutmen (Matorčević & Gligorović, 2017: 45-47) yaitu: pertama, *warm body recruitment.* Ini merupakan bentuk rekrutmen massa. Ini diorganisasikan ketika ada kebutuhan relawan dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat serta tidak kualifikasi khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu. Kedua, *targeted recruitment*. Proses rekrutmen dengan tipe ini dimulai dari penentuan profil singkat relawan potensial. Pesan rekrutmen sengaja dikirim kepada khalayak kecil. Bentuk rekrutmen ini fokus pada pencarian relawan potensial yang menjawab banyak ekspektasi yang ditentukan dalam deskripsi pekerjaan. Ketiga, *concentric circle recruitment*. Ini adalah cara tercepat dan termudah dalam merekrutmen relawan. Ini mengandalkan orang-orang yang sudah terkoneksi pada organisasi dan mempersuasi mereka untuk mau menerima tanggung jawab baru di dalam organisasi. Rekrutmen dapat sukses walaupun tak direncanakan dengan baik, tetapi sangat bergantung pada jaringan yang dimiliki personalia organisasi. Dan keempat, *ambient recruitment.* Tipe ini digunakan ketika organisasi ingin menarik atau memikat orang dalam sistem tertutup (*a closed system*). Organisasi yang membutuhkan relawan langsung terhubung dengan lembaga pendidikan, profesi, organisasi tertentu, dan lain sebagainya. Biasanya orang yang berada dalam sistem tertutup memiliki rasa identifikasi diri yang kuat (*strong sense of self-identification*) dengan kelompok dan koneksinya pada anggota sistem lain. Dalam merencanakan kampanye rekrutmen ini penting untuk menciptakan budaya keterlibatan (*culture of involvement*) di antara anggota yang berada di dalam sistem tertutup. Orang-

orang yang direkrutmen harus dapat direkomendasikan sebagai orang yang tepat (*as the* "right thing to do"). Rekrutmen ini hanya tepat untuk program relawan atau posisi spesifik.

Kedua, tahapan pengorientasian (*Orientating*) dilakukan dengan menggunakan strategi mendidikan relawan baru baik melalui proses formal ataupun informal. Proses orientasi formal lebih struktur dan mencakup penjelasan tentang aturan, kebijakan, hukum, dan prosedur operasi baku (*standard operating procedures*). *Ketiga*, tahapan pengoperasian (*Operating*). Tahapan ini dilaksanakan melalui kerja relawan di lapangan. Efektivitas tahapan ini terrepresentasi pada keterlibatan relawan (*volunteer engagement*), dampak relawan dalam komunitasnya, dan dampak kegiatan kerelawanan terhadap pertumbuhan individual relawan. Oleh karena itu, menurut Penron, penting bagi relawan memahami tentang maksud kerjanya bermakna (*meaningful working*) dan kerja yang memiliki dampak. Tahapan ini juga merupakan proses belajar bagi relawan, di sana mereka akan mendapatkan gagasan baru, bertemu orang baru, belajar metode baru, dll. Dan terakhir, *keempat*, tahapan menghidupkan terus-menerus (*Perpetuating*) mencakup evaluasi pengalaman relawan dan pengakuan atas kerja relawan. Walaupun tugas sulit (*difficult task*), evaluasi harus tetap dilaksanakan dan difokuskan pada tugas-tugas yang diselesaikan oleh relawan. Dalam terma umpan balik (*feedback*), evaluasi bersifat konstruktif.

Selanjutnya Ken Culp, Catherine A. Deppe, Jaime X. Castillo, dan Betty J. Wells (1998) mengkonseptualisasikan dan mengembangkan pemikiran model-model manajemen sebelumnya termasuk model L-O-O-P. Model tersebut diilustrasikan dalam sebuah gambar spiral yang menandakan bahwa pengelolaan relawan (*volunteer administration*) merupakan proses berkelanjutan (*ongoing process*). Model tersebut memuat empat kategori konsep yaitu *Generate* (Menciptakan), *Educate* (Mendidik), *Mobilize* (Memobilisasi), dan *Sustain* (Meneruskan) atau disingkat GEMS.

Pertama, *Generate*. Konsep ini mencakup enam tahapan yaitu melakukan penilaian kebutuhan organisasi, menulis deskripsi pekerjaan, mengidentifikasi, merekruit, menyaring (*screening*), dan menseleksi relawan. Kedua, *Educate*. Konsep mencakup empat fase yaitu mengorientasikan (*orienting*), melindungi (*protecting*), memberikan sumberdaya (*resourcing*), dan mengajarkan (*teaching*). Relawan pada dasarnya memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda dengan organisasi dan pekerjaannya. Oleh karena itu, orientasi organisasi dan pekerja menjadi sebuah kebutuhan agar relawan memahami tanggung jawabnya. Relawan terinformasikan (*informed volunteers*) akan merepresentasikan organisasi dengan baik, dapat melaksanakan tanggung jawab dengan efektif, dan memiliki sikap positif terhadap organisasi. Pasca tahapan tersebut mereka diperkenalkan dengan fase perlindungan (*protecting*) dimana relawan dapat belajar tentang startegi manajemen resiko seperti perilaku yang dapat diterima dan sesuai, resolusi konflik, dan kerahasiaan

isu-isu. Setelah itu, mereka memasuki fase pemberian sumber daya (*resourcing*) yang meliputi pemberian sumber daya yang semestinya kepada relawan, agar mereka dapat menyelesaikan tugas keralawanannya. Selain terkait dengan sumber daya manusia (*human resources*), fase ini juga berkaitan dengan sumberdaya pendidikan seperti materi kerelawanan dan sumberdaya keuangan (*financial resources*) seperti sumber pendanaan, petunjuk anggaran (*budgetary guidelines*), dan strategi penggalian dana (*fund-raising strategies*). Selanjutnya fase akhir yaitu pengajaran (*teaching*), mereka berhak atas keterampilan dan pengetahuan khusus terkait pekerjaannya agar mereka terbantu dalam melaksanakan tanggung jawab dengan berhasil. Pendidikan ini dapat dilakukan dengan beragam cara baik dalam bentuk gaya pembelajaran individual, kelompok, ataupun multi.

Ketiga, *Mobilize*. Konsep ini memiliki tiga fase yaitu pelibatan (*engaging*), motivasi (*motivating*), dan supervisi (*supervising*). Relawan diberikan kesempatan untuk terlibat (*engage*) dalam aktivitas atau tugas dengan didukung ketersediaan piranti kerja. Oleh karena itu, mereka harus dimotivasi agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan kerelawanan dengan baik. Pemberian motivasi (*motivating*) dimaksudkan agar mereka dapat meningkatkan pengalamannya dan memperbaiki usia kerja (*longevity*) dan retensi (*retention*) sebagai relawan. Dengan motivasi tersebut, mereka diharapkan dapat bekerja dengan baik. Untuk memastikan hal tersebut berjalan efektif dibutuhkan pengawasan (*supervising*). Fase pengawasan dilakukan dengan cara menentukan seberapa baik relawan menggunakan sumberdaya yang tersedia untuk melaksanakan tugas mereka. Panduan berkelanjutan (*on-going guidance*), dukungan, dan nasehat dari pengawas dapat mengarahkan relawan memiliki pengalaman produktif dan positif.

Dan keempat, *Sustain*. Konsep ini mencakup fase evaluasi, pengakuan, retensi (*retention*), pengalihan (*redirection*) atau pelepasan (*disengagement*). Evaluasi kinerja relawan –baik formal ataupun informal– akan menentukan apakah tujuan organisasional dan individual terpenuhi atau tidak. Evaluasi tersebut penting bagi pengakuan kinerja relawan oleh pihak organisasi dan dapat menciptakan perasaan positif relawan dimana kontribusi relawan bermakna bagi organisasi dan programnya. Selanjutnya relawan yang telah bekerja baik harus diretensi dengan cara memenuhi kebutuhan relawan, memberikan motivasi berkelanjutan, dan menciptakan kesempatan hubungan yang lebih baik lagi antara relawan dan organisasi dan relawan lainnya. Sebaliknya yang tidak berkinerja dengan baik sebaiknya dialihkan ke peran lainnya di dalam organisasi. Relawan yang dialihkan akan mendapatkan tanggung jawab pekerjaan, pengetahuan, dan keterampilan baru yang semestinya untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif. Dalam beberapa kasus, pasca pengalihan (*redirection*), relawan tersebut biasanya meminta berhenti dari organisasi (*disengage*). Biasanya hal ini terjadi karena efek negatif dari faktor seperti perubahan penempatan kerja, kehidupan keluarga, tempat tinggal, minat, kesehatan, atau sebab komitmen lainnya.

Pada akhirnya, deskripsi kerangka teoritis ini akan menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan analisis temuan penelitian dan diharapkan temuan penelitian yang akan dideskripsikan pada sub bab selanjutnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah –dengan didukung pilihan metode penelitian yang tepat.

Temuan Penelitian

Eksistensi Relasi[18] dalam Pemilu Serentak 2019 di Jawa Barat dipandang memiliki peranan yang strategis, karena fungsionalitasnya dalam mensosialisasikan pemilu dan mendidik pemilih. Relasi menjadi kekuatan tambahan yang kuat (*the powerful additional power*) dalam memaksimalkan proses peningkatan angka prosentase dan mutu partisipasi elektoral pemilih –apalagi masih adanya apatisme dan polarisasi politik pemilih efek dari serangan politik pasca-kebenaran (*post-truth politics*) di Jawa Barat yang sangat intens melalui media sosial. 27 KPU Kab./Kota di Jawa Barat mengakui peran Relasi berkontribusi positif dalam meningkatkan prosentase kehadiran pemilih (*voter turnout*) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) –walaupun memang banyak sekali faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih tersebut. Dalam Pemilu Serentak 2019, prosentase pemilih pengguna hak di TPS di Jawa Barat sebanyak 82,30%[19], ada kenaikan sebesar 10,91% –karena pada Pemilu 2014 tingkat partisipasi hanya 71.39%.

Mereka yang terpilih menjadi Relasi[20] mayoritas memiliki semangat aktivisme sosial (*social activism*) yang tinggi untuk terlibat dalam kegiatan kerelawanan dalam pemilu (*electoral volunteering*), karena mereka pada umumnya adalah berasal kelompok aktivis mahasiswa, kepemudaan, perempuan, disabilitas, netizen, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, mereka memiliki semangat untuk mendapatkan pengalaman baru dalam bidang elektoral dan mendedikasikan diri untuk mensukses Pemilu Serentak 2019. Mereka berpandangan juga dimana menjadi Relasi adalah mekanisme mereka beraktulisasi diri di tengah masyarakat. Ini telah menjadi faktor penggerak (*the drive factor*) bagi mereka dalam melaksanakan semua tugas sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasiskan segmen pemilih –dengan tidak mengenal waktu kerja normal dan melampaui kendala geografis dan hambatan

[18] Sebanyak 55 (limpa puluh lima) orang relawan yang mewakili 10 (sepuluh) basis pemilih di setiap Kabupaten/Kota berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Relasi (Relawan Demokrasi) Pemilu Tahun 2019. Setiap basis terdiri minimal 4 (empat) orang relawan. Kesepuluh basis tersebut yaitu: keluarga, pemilih pemula, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, dan warga internet. Dokumen pedoman tersebut disampaikan kepada KPU Kab/Kota seluruh Indonesia melalui surat KPU RI No. 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 09 Januari 2019 dengan perihal yaitu Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.

[19] Ada 27.385.275 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di TPS di wilayah Jawa Barat, sedangkan total data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 33.276.905 orang.

[20] Direkrut dengan metode rekrutmen campuran (*mix recruitment*). Metode tersebut merupakan kombinasi dari tiga tipe rekruitmen relawan yang dikemukakan oleh McCurley (1995) yaitu *warm body recruitment*, *targeted recruitment*, dan *concentric circle recruitment*.

finansial operasional.

Relasi yang berasal dari segmen yang sama (*in-segment volunteers*) diharapkan semakin mengefektifkan proses komunikasi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dalam perspektif psikologi komunikasi, faktor homofili (*homophily*) atau adanya kesamaan sosial antara komunikator dengan komunikate (*communicatee* atau peserta kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih) dapat menghilangkan perbedaan sosial yang mengisolasi dan menciptakan kedekatan interpersonal (*interpersonal intimacy*). Dalam perspektif jaringan komunikasi, Relasi tersebut memiliki pengetahuan dan akses jaringan komunikasi yang luas di dalam segmennya sendiri dan dapat mempermudah dan memperlancar diseminasi pesan sosialisasi pemilu. Selanjutnya dalam konteks pemilu inklusif, khususnya, pertama, pelibatan Relasi perempuan dapat berkontribusi peningkatan kesadaran kesetaraan gender dalam Pemilu –apalagi ada *affirmative action* (keterwakilan perempuan minimal) dalam sistem elektoral; dan *kedua*, pelibatan disabilitas menjadi Relasi sangat baik untuk penyelenggaran pemilu itu sendiri dimana dapat menjamin kesetaraan dalam partisipasi elektoral.

Selain itu, mereka yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki sikap independensi atau imparsialitas politik. Hal ini mereka buktikan dengan menggaransikan dirinya terbebas dari kepentingan politik praktis pemilu yang dibuktikan dengan terbebasnya mereka dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selanjutnya dari sisi faktor moralitas, mereka dipastikan bukanlah orang-orang yang bermasalah secara sosial, karena setiap orang yang menjadi Relasi di Jawa Barat ditekankan memiliki rekam jejak yang bagus (*good track record*). Semangat aktivisme, sikap independensi, dan moralitas yang baik telah menjadi faktor pembentuk kredibilitas diri (*self-credibility*) Relasi selaku komunikator informasi elektoral atau edukator kewarganegaraan (*civic educators*) dalam Pemilu. Dalam studi persuasi komunikasi, kredibilitas diri komunikator tersebut mampu mengefektifkan proses komunikasi elektoral, sehingga Relasi dengan mudah mendapatkan kepercayaan publik (*public trust*) dengan mudah terbangun dari pemilih yang menjadi peserta kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Komunikasi elektoral Relasi yang efektif tersebut ditandai efek yaitu terbangunnya antusiasme politik pemilih untuk menggunakan hak politiknya di hari pemungutan suara (*voting day*).

KPU Kab./Kota di Jawa Barat memang Relasi sebagai mitra kerja strategis (*strategic work partners*) dalam sosialisasi elektoral dan pendidikan pemilih. Analogi sederhana tentang tugas mereka adalah seperti pembawa obor (*the torchbearers*) yang menerangi kegelapan[21]. Mereka menempati posisi strategis dalam menyebarluaskan informasi elektoral dan mencerahkan pemilih di era

[21]Sebuah analogi yang tepat apalagi jika kita mencermati slogan surat kabar terbesar dan tertua di Amerika Serikat, the Wasington Post memiliki slogan *Democracy Dies in Darkness.*

disrupsi politik –internet menjadi kanal utama propaganda komputasional atau politik pasca-kebenaran (*post-truth politics*) dalam Pemilu Serentak 2019. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi manajerial, pendekatan manusiawi (*the humane approach*) lebih dikedepankan oleh KPU Kab/Kota. Dalam berkomunikasi dengan Relasi, tidak sekedar komunikasi interpersonal yang hangat (adanya keramahan dan kedekatan), tetapi KPU Kab./Kota juga mengedepankan komunikasi motivasional dan empatik[22] kepada mereka. Pendekatan manusiawi tersebut menjadi basis praktek manajamen relawan di Jawa Barat.

Selain pendekatan manajerial tersebut di atas dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja Relasi, KPU Kab./Kota mengimplementasikan model manajemen relawan yang berbasiskan pada fungsi-fungsi manajerial. Model tersebut disusun berdasarkan tiga tahapan manajerial (*three managerial stages*) atau disebut *P.E.C Model* yaitu tahapan persiapan (*Preparation stage*), pelaksanaan (*Execution stage*), dan penyelesaian (*Complation stage*).

Dalam tahapan pertama dari *P.E.C Model* tersebut yaitu tahapan persiapan. Di tahapan ini, KPU Kab./Kota melakukan tiga kegiatan manajerial yaitu mengkaji (*studying*), merekrut (*recruiting*), mengorientasikan (*orienting*), dan memilih koordinator (*selecting the volunteers' coordinator*). *Pertama*, kegiatan kajian. KPU Kab/Kota melakukan kajian mendalam atas kebijakan pembentukan Relasi, komposisi segmentasi pemilih (berdasarkan sepuluh basis pemilih), kebutuhan kompetensi relawan, dan lingkungan sosial dan budaya politik. *Kedua*, kegiatan manajerial merekrut. KPU Kab./Kota melakukan seleksi secara terbuka dan berjaring (*networked and open recruitment*). Ini dilakukan dengan mendiseminasikan pengumuman secara massif dan sistematis dengan menggunakan media dan jaringan sosial[23].

Selain seleksi calon Relasi secara tertulis, ada juga KPU Kab./Kota yang melakukan seleksi calon Relasi dengan metode CAT (Computer Assissted Test) dengan Google Forms. Penggunaan CAT tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar dari calon peserta seleksi Relasi. Proses rekruitmen ini juga ditekankan pada kompetensi kepemiluan, kerelawanan, kewarganegaraan, komputasi, dan etis. *Pertama*, kompetensi kepemiluan mencakup pengetahuan sistem politik demokrasi dan pemilu dan regulasinya; *kedua*, kompetensi Kerelawanan mencakup semangat aktivisme elektoral, komunikasi sosial dan publik speaking, kerja tim (*team work*), sikap imparsialitas atau independesi, dan jaringan sosial (*social network*) serta penguasaan teriorial; *ketiga*, kompetensi kewarganegaraan mencakup pengetahuan ideologi negara dan

[22]Misalnya anggota KPU Kab/Kota yangn bertanggung jawab atas kinerja Relasi menjenguk Relasi yang menderita sakit.

[23]Berkomunikasi dengan organisasi kepemudaan dan kemasyarakat serta tokoh masyarakat di setiap Kabupaten/Kota.

komitmen nasionalisme; *keempat*, kompetensi komputasi mencakup penguasaan teknologi komputasi seperti keahlian dalam mengoperasikan beragam aplikasi *office* dan teknologi media baru (internet, media sosial, halaman blog); dan *kelima*, komptensi etis mencakup literasi dan perilaku etis komunikasi. Selain itu juga, KPU Kab./Kota melakukan analisis latar belakang pendidikan, organisasi, dan pekerjaan calon Relasi, serta KPU Kab./Kota memerhatikan masukan dari publik atas profil calon Relasi, pelibatan publik secara luas ini dengan tujuan agar calon Relasi terpilih dapat diterima secara sosial.

Dalam proses seleksi tersebut, mereka yang terpilih diutamakan yang memiliki karakter sosial seperti sanguinis popular (*popular sanguines*), melankoli sempurna (*perfect melancholy*), dan koleris kuat (*powerful cholerics*). *Pertama*, sanguinis popular. Mereka memiliki kemampuan sosiabilitas yang baik –dapat berteman atau bersosialisasi dengan mudah. Oleh karena itu, mereka mampu memengaruhi khalayak pemilih seperti apa yang mereka inginkan, karena mereka dapat memotivasi pemilih secara persuasif. *Kedua*, melankoli sempurna. Pada saat bekerja, mereka berorientasi pada jadwal (*schedule oriented*), berusaha menemukan solusi kreatif (*creative solutions*) atas permasalahan yang ada, dan memiliki semangat untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimulainya (*needs to finish what is started*). Dan *ketiga*, koleris kuat. Mereka mampu melihat dengan gambaran yang utuh (*the whole picture*), berorientasi hasil (*goal oriented*), memiliki kepemimpinan yang kuat, mengenali jawaban yang tepat dan berupaya menemukan solusi praktis (*practical solutions*).

Selanjutnya masih dalam tahapan persiapan, kegiatan yang ketiga yaitu mengorientasikan (*orienting*). Dalam kegiatan tersebut, KPU Kab/Kota memberikan pelatihan singkat (*short training/course*) tentang sistem politik, sistem pemilu, *public speaking* atau retorika, manajemen kegiatan, dan tahapan penyelenggaraan Pemilu serta SOP (Standar Operating Procedure) atau mekanisme pekerjaan relawan dalam Pemilu. Dalam pelatihan tersebut juga diberikan pemahaman tentang urgensi dan signifikansi kerelawanan dalam Pemilu agar Relasi dapat memahami eksistensinya dengan baik serta motivasi berprestasi (*achievement motivation*). Selain Relasi memahami pemahaman demokrasi dan kepemiluan serta mekanisme kerja, kegiatan mengorientasikan tersebut memiliki target terbentuknya pola pikir tumbuh (*growth mindset*) pada setiap diri Relasi dimana mereka mampu berpikir positif dan memiliki optimisme kerja. Pola pikir tersebut diharapkan menjadi basis bekerja secara professional dalam mengaktivasi dan meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam kegiatan ini juga, Relasi diberikan perlengkapan sosialisasi dan pendidikan pemilih seperti modul Relasi dan beragam media cetakan sosialisasi seperti poster, selebaran (*leaflets*).

Output dari kegiatan pelatihan singkat tersebut, Relasi diharapkan mampu merumuskan *action plan* (rencana aksi) secara mandiri dan dapat dikoordinasikan dengan Relasi lainnya dalam basis segmen pemilih yang sama. KPU Kab/Kota

mengarahkan mereka agar memprioritaskan prinsip keterjangkauan pemilih tersegmentasi (*the affordability principle of segmented voters*) menjadi dasar menetapkan pemilih target (*targeted voters*) dalam menyusun rencana aksi tersebut. Rencana aksi tersebut menjadi pedoman Relasi dalam bekerja dan efektivitasnya selalu dievaluasi secara periodik oleh KPU Kab./Kota selaku manajer Relasi.

Terakhir dalam tahap persiapan adalah pemilihan koordinator relawan. KPU Kab./Kota memerintahkan Relasi untuk memilih koordinator untuk setiap basis pemilih. Koordinator Relasi tersebut bertugas mengkoordinasikan semua rencana dan pelaksanaan kegiatan Relasi di setiap basis pemilih. Sebagai kepercayaan (*confidant*), koordinator Relasi sangat fungsional dalam membantu KPU Kab/Kota dalam mendelegasikan manajemen relawan dalam cakupan kelompok Relasi. Koordinator tersebut bertanggung jawab langsung ke KPU Kab./Kota.

Tahapan kedua dalam Model P.E.C adalah pelaksanaan (*execution*). Tahapan ini adalah tahapan kerja Relasi. Ini mencakup *pertama*, merumuskan rencana aksi (*formulating the action plan*). Ini merupakan tahapan perencanaan sebelum Relasi bekerja dan menjadi titik kritis (*the critical point*) bagi kinerjanya. Di tahap ini, Relasi melakukan pemetaan politik pemilih berbasiskan komunitas dengan metode segmentasi dan targeting, sebagaimana mereka peroleh pada saat pelatihan. Relasi menggunakan pendekatan pemasaran sosial (*social marketing approach*) yang mencakup segmentasi dan targeting pemilih. Proses segmentasi pemilih berbasiskan komunitas dilakukan berdasarkan geografis (tempat tinggal pemilih), demografis (misalnya generasi *baby boomer*, X, Y, atau Z), psikografis (mencakup sikap, nilai, motivasi, dan gaya hidup), dan behavioral (aktif atau abstensi). Hasil segmentasi tersebut menjadi dasar Relasi menetapkan pemilih target. Selanjutnya hasil pemetaan politik tersebut juga dikoordinasikan dengan KPU Kab/Kota dengan tujuan agar kegiatan Relasi dapat mengisi kekosongan cakupan sosialisasi elektoral dan pendidikan pemilih. Hasil pemetaan tersebut dijadikan rujukan bagi Relasi dalam menyusun beragam kebutuhan dan rencana jadwal kegiatan sosialisasi elektoral dan pendidikan pemilih.

Kedua, implementasi atau aktualisasi. Di sesi ini, Relasi menyelenggarakan kegiatan sosialisasi elektoral dan pendidikan pemilih berdasarkan apa yang telah dirumuskan dalam rencana aksi tersebut di atas. Konsepsi pemilih berdaulat (*the sovereign voters*) telah menjadi dasar orientasi sosialisasi elektoral dan pendidikan pemilih. Oleh karena itu, selain memperkenalkan konsep demokrasi dan sistem pemilu, Relasi mengkultivasi kesadaran atas hak dan kewajiban pemilih sebagai warga negara serta keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dalam pemilu dengan tujuan agar pemilih dapat tercerahkan dan bersemangat menggunakan hak pilihnya secara rasional. Kultivasi kesadaran elektoral tersebut dilakukan dengan metode pemberian motivasi dimana memilih merupakan bagian dari aktualisasi diri seorang warga negara dalam memajukan negara dan daerahnya. Bahkan, Relasi

basis keagamaan menggunakan penalaran religius untuk memotivasi pemilih. Misalnya memilih pemimpin adalah kewajiban. Apa yang dilakukan oleh Relasi tersebut adalah bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Selanjutnya untuk edukasi keterampilan kewarganegaraan, Relasi menekankan tentang signifikansi independensi dalam pengambilan keputusan elektoral dan apresiasi atas perbedaan pilihan politik. Relasi menstimulasi pemilih agar dewasa dalam berpemilu. Seiring dengan hal tersebut, Relasi juga menekan populasi pemilih yang tidak mau menggunakan hak suaranya (*the abstain voters*) dan memberikan pemahaman atas efek negatif politik partisan dan politik uang atau politik pragmatism, karena politik tersebut dapat yang merugikan baik bagi diri pemilih sendiri ataupun bagi publik dalam tataran yang lebih luas.

Secara teknis, selain menjelaskan tentang tahapan penyelenggaran pemilu, Relasi juga menekankan kepada pemilih tentang pentingnya menggunakan hak suara dengan benar –dengan tujuan menekan jumlah suara tidak sah (*invalid votes*). Pengetahuan teknis tata cara pemberian suara disampaikan dengan rinci oleh Relasi di setiap kali kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan populasi pemilih terinformasikan dengan baik (*well-informed voters*). Selanjutnya untuk memaksimalkan hasil (*output*) kegiatan kerelawanan pemilu, mereka menggunakan beragama metode misalnya metode pertemuan tatap muka, berkunjung ke rumah (*canvassing*), simulasi, media sosial (e-poster, video singkat, atau konten menarik lainnya), ceramah agama (termasuk khutbah jumat), distribusi media cetak (seperti poster, dll), dialog atau diskusi, dll. Khusus untuk sosialisasi dengan metode pertemuan tatap muka, Relasi juga menggunakan pendekatan hadiah (*gift approach*) agar peserta semakin tertarik. Hadiah tersebut dalam bentuk merchandise sosialisasi Pemilu seperti kaos, *mug* (cangkir), *sticker,* dan gantungan kunci dan diberikan kepada peserta yang dapat menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan. Dengan beragam metode, Relasi berupaya menciptakan atmosfir demam pemilu (*election fever*) dimana pemilih penuh antusias dan harapan dalam berpemilu –pemilih memeriahkan pemilu.

Walaupun mereka menyadari bahwa proses pembentuk pemilih berdaulat dan terinformasikan dengan baik tidak dapat direalisasikan dalam waktu singkat, tetapi mereka berkeyakinan bahwa dengan metode sosialisasi elektoral dan pendidikan pemilih yang efektif, hal tersebut akan dapat terwujud. Relasi bekerja dengan optimisme yang tinggi. Selanjutnya untuk menunjang kinerja yang baik, Relasi diarahkan oleh KPU Kab/Kota agar dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu badan *ad hoc* (PPK & PPS), tokoh masyarakat/ budaya/adat, dan organisasi/paguyuban terkait pemilih target agar dapat mempermudah kerja mereka. Koordinasi dan kolaborasi tersebut diharapkan agar Relasi mendapatkan peta jalan (*road map*), jaringan komunikasi (*communication network*), dan dukungan dalam melakukan sosialisasi elektoral dan pendidikan

pemilih.

Kerja Relasi tersebut diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu kegiatan individual dan kegiatan kelompok. Kegiatan individual tidak berbasisikan anggaran operasional yang diberikan oleh KPU Kab./Kota. Kegiatan ini dilakukan setiap saat pada saat Relasi berinteraksi sosial dengan pemilih dalam kehidupan keseharian mereka serta di acara kegiatan sosial yang ada di lingkungan mereka misalnya relawan basis keagamaan menjadi pembicara di majlis ta'lim (kegiatan dakwah Islam) –kegiatan sosialisasi di basis keagamaan tidak hanya untuk pemilih muslim saja, tetapi juga untuk pemilih beragama lainnya. Selanjutnya untuk kegiatan kelompok dilaksanakan berbasiskan anggaran. Ini diadakan minimal dua kali dalam sebulan. Dalam kegiatan ini, Relasi mengumpulkan pemilih berdasarkan basis segmennya masing-masing. Kegiatan ini juga biasanya dikoordinasikan atau dikerjasamakan dengan komunitas atau organisasi terkait.

Ketiga, pengawasan dan asistensi. Pengawasan kerja Relasi dilakukan dengan metode tidak langsung dan langsung. Dalam metode tidak langsung, KPU Kab/Kota selaku manajer Relasi mengawasi semua bentuk laporan baik melalui dokumen tertulis ataupun informasi tekstual yang disampaikan Relasi. Kemudian KPU Kab/Kota mengkoordinasikannya dengan Relasi lainnya dalam kategori yang sama. Pengawasan tidak langsung juga dilakukan dengan cara bertanya melalui telpon/messenger kepada Relasi yang tidak bekerja dengan baik atau tidak sesuai rencana aksi yang mereka buat sendiri. Selanjutnya untuk metode pengawasan langsung, KPU Kab/Kota mendatangi dan menyaksikan secara langsung kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan teknik observasi lapangan (*field observation technique*). Dalam proses pengawasan tersebut, KPU Kab/Kota memberikan asistensi kepada mereka khususnya bagi mereka yang menyelenggarakan kegiatan belum optimal atau tidak menyelenggarakan kegiatan. Asistensi tersebut bertujuan untuk meluruskan atau meningkatkan kinerja kerelawanan mereka agar sesuai target. Asistensi tersebut langsung diberikan pada saat KPU Kab/Kota melakukan pengawasan langsung kegiatan Relasi di lapangan ataupun melalui media sosial. Asistensi tersebut dilakukan dalam bentuk komunikasi konsultatif untuk menyelesaikan semua permasalahan atau kendala kerja Relasi.

Keempat, perbaikan mutu (*quality improvement*). Kegiatan asistensi tersebut dilanjutkan dengan pertemuan perbaikan (*up grading forum*) dengan tujuan meningkatkan kompetensi kerelawanan (*competence of volunteering*). Memperbaiki kompetensi retorika/public speaking, pemahaman regulasi elektoral komunikasi sosial, *ice breaking technique* (teknik pemecah kebekuan forum antara Relasi sebagai pembicara dengan pemilih), penyelesaian masalah (*problem solving*), dan lain sebagainya. Kegiatan peningkatan ini dimaksudkan agar para Relasi semakin memiliki kepercayaan dan dedikasi diri dalam bekerja di lapangan. Dan *kelima*, kolaborasi (*collaboration*). KPU Kab/Kota melibatkan Relasi dalam setiap kegiatan sosialisasi pemilu kolosal yang melibat masa dalam kapasitas besar

seperti konser musik Pemilih Berdualat, Pemilu Run, dll. Relasi diposisikan sebagai bagian penting dari kolaborasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi kolosal. Dalam event kolosal tersebut, Relasi melakukan sosialisasi kepada para peserta dengan cara mendistribusikan pamplet atau poster pemilu serta memperagakan teknik pemberian suara yang benar menurut regulasi.

Tahap terakhir dari Model P.E.C adalah tahapan penyelesaian (*complation stage*). Pelaksanaan tahap ini dilakukan pasca pemungutan dan rekapitulasi suara hasil Pemilu Serentak 2019. KPU Kab./Kota melakukan evaluasi kinerja (*performance evaluation*) dan memberikan apresiasi (*appreciating* atau *rewarding*) kepada Relasi atas kinerjanya selama tiga bulan jelang pemungutan suara. Evaluasi total dilakukan oleh KPU Kab/Kota dengan tujuan untuk mendeskripsikan keberhasilan dan kekurangan Relasi dalam bekerja dan ini menjadi rekomendasi untuk kegiatan kerelawanan di pemilu atau pemilihan mendatang. Sebenarnya secara berkala mayoritas KPU Kab./Kota telah melakukan evaluasi rutin (*regular evaluation*) yang dilakukan setiap dwi minggu atau setiap bulan. Dokumen hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan penting untuk perbaikan mutu kerja atau desain kegiatan kerelawanan di masa mendatang. Setidak-tidaknya ada empat rekomendasi penting dari hasil evaluasi di 27 Kab/Kota di Jawa Barat adalah dimana KPU Kab./ Kota merekomendasikan yaitu *pertama*, persiapan cukup pra-pembentukan Relasi dimana KPU Kab/Kota diberikan pelatihan singkat tentang manajemen relawan; *kedua*, rentang waktu kerja Relasi sebaiknya minimal 6 (enam) bulan; *ketiga*, jumlah relasi secara proporsional mempertimbangkan populasi pemilih dan geografis wilayah kerja; dan *keempat*, pengembangan manajemen Relasi untuk masa mendatang harus diperkuat dengan kebijakan dukungan sumber daya kerja misalnya materi kerelawanan (*voluntary materials*) seperti buku-buku bertemakan demokrasi dan pemilu dan beragam media sosialisasi cetakan seperti poster, leaflet, dll.

Terakhirnya, untuk mengakui dan mengapresiasi kinerja Relasi, KPU Kab./ Kota memberikan sertifikat yang mengapresiasi dedikasi kinerja Relasi dan penghargaan tertentu (*special award*) kepada Relasi memiliki kategori prestasi tertentu misalnya teraktif, terinovatif, terbaik dalam administrasi pelaporan, dan soliditas (kekompakan) dalam bekerja. Rekognisi dan apresiasi tersebut bernilai strategis bagi pengembangan budaya kerelawanan (*voluntary culture*) atau voluntirisme elektoral (*electoral voluntarism*) masyarakat sipil.

jdih.kpu.go.id

Kesimpulan

Penelitian ini berupaya mengisi ruang kosong kajian kerelawanan elektoral (*electoral volunteering*) di Indonesia, sedangkan sejak 2014, gerakan voluntirisme masyarakat sipil sudah memenuhi lanskap elektoral. Penelitian bernilai strategis, karena berdasarkan temuan dari beragam studi atau penelitian yang dilakukan oleh para sarjana ilmu politik ataupun sosiologi politik didapati bahwa kerelawanan elektoral (*electoral volunteering*) menjadi indikator penting bagi terwujudnya pemilu partisipatif –merepresentasikan keterlibatan masyarakat sipil (*civil cociety*). Kerelawanan elektoral menjadi bagian penting dari proses mematangkan demokrasi dimana para relawan atau Relasi berupaya meningkatkan populasi pemilih terinformasikan dengan baik (*well-informed voters*) melalui kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Relasi bertugas memenuhi hak-hak warga atas informasi pemilu dan pendidikan kewarganegaraan.

Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut, Relasi berupaya mewujudkan pemilih yang berdaulat dalam menentukan pilihan politiknya –bukan karena politik partisan (*partisanship politics*) atau bukan karena politik pragmatisme, politik pasca-kebenaran, dan politik populisme. Relasi menempati posisi startegis dalam mengembangkan budaya demokrasi elektoral yang sehat di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, bahkan Relasi telah mengaktivasi dan mengembangkan voluntirisme masyarakat sipil dalam Pemilu. Peran yang dimainkan Relasi sangat strategis dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap demokrasi –di tengah kritik dan ancaman terhadap demokrasi. Oleh karena itu, penting Relasi dikelola dengan baik, agar mereka bekerja dengan efektif dan efisien.

Dalam usaha untuk mengoptimalkan manajemen Relasi, 27 KPU Kab./Kota di Jawa Barat menggunakan pendekatan manajerial manusiawi dan Model P.E.C. (Preparation, Execution, Complation). Pertama, dalam implementasi pendekatan manusiawi tersebut, KPU Kab/Kota tersebut memandang Relasi sebagai mitra kerja strategis dalam kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, karena mereka memiliki energi voluntirisme yang luar biasa dalam upaya mencerdaskan atau memberikan pemahaman yang benar tentang tanggung jawab kewarnegaraan (*civic responsibility*) pemilih dalam pemilu dan memotivasi pemilih untuk berpartisipasi aktif selama tahapan penyelenggaraan pemilu khususnya pada hari pemungutan suara dimana mereka mau datang ke TPS. Pendekatan manusiawi tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme rekognisi eksistensi Relasi menjadi fondasi dalam budaya kerja yang baik dalam sebuah manajemen. *Kedua*, dalam implementasi Model P.E.C., KPU Kab./Kota menjalankan tiga tahapan manajerial yaitu *pertama*, Tahapan Persiapan (*Preparation Stage*) yang mencakup pengkajian, perekrutan, orientasi, dan pemilihan koordinator relawan; *kedua*, Tahapan Pelaksanaan (*Execution Stage*) yang mencakup perumusan rencana

aksi, implementasi atau aktualisasi, pengawasan dan asistensi, perbaikan mutu, dan kolaborasi; dan *ketiga*, Tahapan Penyelesaian (*Complation Stage*) yang mencakup evaluasi kinerja dan pemberian apresiasi. Pada akhirnya, peneliti ingin menegaskan bahwa pendekatan dan model manajerial yang dideskripsikan dalam sub bab temuan penelitian ini telah melengkapi temuan studi manajemen relawan di berbagai negara demokrasi yang telah ada.

Rekomendasi Kontinuasi Riset

Setelah mengelaborasi fakta-fakta tentang kinerja Relasi di Jawa Barat baik dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik atas demokrasi dan pemilu dan mendaulatkan keputusan elektoral pemilih, peneliti memiliki pertimbangan tentang pentingnya diadakan penelitian lanjutan tentang Relasi dalam mengedukasi elektoral pemilih etnis tradisional dan pemilih anti-demokrasi. Misalnya di Kabupaten Indramayu, ada pemilih etnis tradisional Suku Dayak Bumi Segandu –sejak tahun 1970, yang memiliki pandangan politik dengan basis prinsip ngaji rasa –yang tidak boleh menyakiti suatu pihak tertentu dalam pemilu/pemilihan. Memilih dalam Pemilu berarti menyakiti pihak tertentu. Dengan prinsip tersebut, pemilih etnis tradisional tersebut berpotensi menjadi pemilih abstain atau golput. Apalagi di tahun 2020, Kabupaten Indramayu menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya di Jawa Barat, tidak bisa dipungkiri masih ada sebagian kecil sekali warganya yang berpandangan fundamentalisme dimana demokrasi dipandang sebagai *thoghut* atau sistem politik yang kufur. Pandangan fundamentalisme tersebut tentunya mendorong penganutnya untuk tidak mau berpartisipasi elektoral. Dalam melakukan riset tersebut, para penelitian mendatang bisa mendesainnya dengan metodologi entografi atau metodologi riset lainnya. Tema penelitian tersebut juga bisa seputar tentang komunikasi sosialisasi budaya demokrasi, transformasi budaya pratisipasi politik, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Buku

Al Mutawa, Omar (2015). *Impact of Volunteer Management Practice on Volunteer Motivation and Satisfaction to Enhance Volunteer Retention*. A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy at Brunel Business School, Brunel University.

Anselmi, Manuel (2018). Key Ideas. *Populism: An Introduction*. Translated by Laura Fano Morrisey. Oxon, London: Routledge.

Daft, R. L., Kendrick, M., & Vershinina, N. (2010). *Management*. Hampshire, UK: South-Western, Cengage Learning.

Drucker, Peter F. (2011). *Management: Tasks, Responsibilities, Practices*. London & New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Garzia, Diego (2014). Palgrave Studies in Political Psychology. *Personalization of Politics and Electoral Change*. New York: Palgrave Macmillan.

Griffin, R. W. (2013). *Management*. Eleventh Edition. Mason, USA: South-Western, Cengage Learning.

Haddad, M.A. (2007). *Politics and Volunteering in Japan: A Global Perspective*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Kapferer, Bruce & Theodossopoulos, Dimitrios (Edts.) (2019). *Democracy's Paradox: Populism and Its Contemporary Crisis*. New York: Berghahn Books

Keyes, Ralph (2004). *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. New York: St. Martin's Press.

Kreitner, R. & Cassidy, C. M. (2011). *Management*. Twelfth Edition. Mason, USA: South-Western, Cengage Learning.

Littauer, F. (1992). *Personality Plus: How to Understand Others by Understanding Yourself*. Michigan: Fleming H. Revell.

Matorčević, D. & Gligorović, A. (2017). *Volunteer Management Handbook*. Second Edition. Sarajevo: SEEYN (South East European Youth Network).

McCurley, S., Lynch, R. & Jackson, R (2012). *The Complete Volunteer Management Handbook*. Third Edition. London: DCS (Directory of Social Change) in Association with Volunteering England.

Safrit, R. D. & Schmiesing, R. (2012). Volunteer Models and Management. In T. D.

Conors (Edt.). *The Volunteer Management Handbook: Leadership Strategies for Success*. Second Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. pp. 3-30.

Smith, D. H., *et al* (2016). Conducive Motivations and Psyhological Influences on Volunteering. In David Horton Smith *et al* (Edts). *The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations*. Volume 1. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan, pp. 702-747.

Smith, D.H. & Stebbins, R.A. (2016). Introduction. In David Horton Smith *et al* (Edts). *The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations*. Volume 1. Hampshire & New York: Palgrave Macmillan, pp. 1-20.

Stebbins, Robert A. (2015). *Leisure and The Motive to Volunteer: Theories of Serious, Casual, and Project-Based Leisure*. New York: Palgrave Macmillan.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sixth Edition. California: SAGE Publications, Inc.

Jurnal/Makalah

Culp, III, K., Deppe, C.A., Castillo, J.X., & Wells, B.J. (1998). The GEMS Model of Volunteer Administration. *The Journal of Volunteer Administration*. 16 (4), pp. 36-41.

Penrod, K. M. (1991). Leadership Involving Volunteers: The L-O-O-P model. *Journal of Extension*, 29(4), pp. 9–11. https://joe.org/joe/1991winter/a2.php

Utami, Pratiwi (2018). Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy. In *JSP* (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Vol. 22, Issue 2, November 2018 (85-97), doi:10.22146/jsp.34614

Wilkinson, J. & Bittman, M. (2002). *Volunteering: The Human Face of Democracy*. SPRC Discussion Paper No. 114, Januari 2002. Social Policy Research Centre, University of New South Wales, Sydney, Australia.

Dokumen Regulasi/Kebijakan Lembaga

Document of "The Universal Declaration on Volunteering",16th World Volunteer Conference, the International Association for Volunteer Effort Amsterdam, the Netherlands, January 2001.

Formulir Model DC KPU Provinsi Jawa Barat, Pemilihan Anggota DPR RI dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Formulir Model DC KPU Provinsi Jawa Barat, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Formulir Model DC KPU Provinsi Jawa Barat, Pemilihan Anggota DPR RI dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Keputusan KPU RI No.: 860/PL.02.1-Kpt/01KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.

Surat Edaran KPU RI Nomor: 609/KPU/IX/2013 tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014.

Surat Edaran KPU RI No. 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 09 Januari 2019 dengan berperihal tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.

Peraturan KPU RI No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2017.

Peraturan KPU RI No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Webiste

Harper, Douglas (2003). Volunteer. In *Online Etymology Dictionary*. Retrieved at https://www.etymonline.com/word/volunteer accessed at November 13rd, 2019, 06.30 AM

Oxford Dictionaries. *Word of the Year 2016*. Retrieved at https://languages.oup.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 accessed at November 9th, 2019, 06:10 PM.

Volunteer- what's in a word?. Jocote.org. December 23rd, 2010. Retrieved at https://web.archive.org/web/20101227120256/http://jocote.org/2010/12/volunteer-whats-in-a-word/ accessed at November 13rd, 2019, 07:50 AM

Peranan Pemangku Adat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Bali

Oleh: I Gede John Darmawan
Anggota KPU Provinsi Bali

Abstrak

Pulau Bali merupakan salah satu pulau dan provinsi di Indonesia yang memiliki adat dan tradisi yang masih sangat kuat dipertahankan sampai saat ini. Tidak sekadar menjadi daerah pariwisata dengan tingkat kunjungan tertinggi di Indonesia, Bali juga memiliki kekuatan budaya yang menjadi spirit utama daya tarik dari pariwisata. Sebagai bagian dari suatu negara yang menganut paham demokrasi dengan menggunakan cara pemilihan umum (pemilu), Bali turut melaksanakan proses pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota legislatif, dan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Tingkat partisipasi pemilih dalam proses pemilu selalu menjadi tantangan di Bali terkait tingkat pemahaman politik, kedewasaan berpolitik, dan menyesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing kabupaten/kota di Bali. Salah satu pemunculan kearifan lokal tersebut ketika pelaksanaan pemungutan suara bersamaan atau terkait dalam kegiatan keagamaan.

Kata kunci: Pemangku adat, kearifan lokal, partisipasi, pemilih, dan Pemilu

Latar Belakang

Masyarakat Bali memiliki dua jenis desa, yakni desa dinas dan desa adat. Dua sistem pemerintahan desa itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Sama dengan desa dinas, desa adat juga memiliki struktur lembaga adat yang jelas dengan dimulai dari tingkatan terbawah dalam bentuk banjar adat (setingkat RW), kemudian setingkat di atasnya ada desa adat atau desa pakraman, selanjutnya Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP), dan tertinggi Majelis Utama Desa Pakraman di tingkat Provinsi Bali, yang kini diubah namanya menjadi Majelis Desa Adat (MDA). Masing-masing lembaga adat ini memiliki peran untuk memutuskan permasalahan adat dan agama di masing-masing *wewengkon* (wilayah) dengan menggunakan pranata kearifan lokal yang lazim dikenal dengan istilah *desa* (tempat), *kala* (waktu), *patra* (konteks atau keadaan).

Dalam kehidupan sosial masyarakat di Bali, lembaga adat dari semua tingkatan sangat dihormati dan memiliki kuasa pendisiplinan terhadap warga adatnya. Masing-masing lembaga adat juga memiliki hak otonom dalam mengelola urusan di wilayah masing-masing, salah satunya dalam bentuk mengeluarkan aturan atau produk hukum adat yang bersifat internal, yang dikenal dengan istilah *pararem* dan *awig-awig*. Produk hukum tersebut dilahirkan melalui proses musyawarah mufakat yang didahului oleh para pemuka adat, kemudian hasilnya dibawa ke *paruman* (pertemuan) untuk disahkan. Karena sifat otonomnya tersebut, aturan adat di satu tempat tidak mengikat masyarakat yang berada di tempat lain *wewengkon*. Sebagai contoh, aturan adat di suatu banjar tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap warga di banjar yang berbeda. Satu hal yang pasti adalah produk hukum satu lembaga adat tersebut mengatur tentang tata hubungan harmonis antara masyarakat sebagai manusia dengan sesama manusia (*pawongan*), manusia dengan lingkungan (*palemahan*), dan manusia dengan penciptanya (*parahyangan*) yang diberi istilah Tri Hita Karana. Tri berarti tiga, Hita berarti bahagia, dan Karana berarti penyebab. Dengan demikian Tri Hita Karana bermakna tiga hal yang menyebabkan hadirnya kebahagiaan.

Pembahasan

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, penentuan hari pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah ditentukan oleh KPU RI. Hal tersebut dengan pertimbangan pemilu dilaksanakan serentak secara bergelombang di seluruh Indonesia. Dalam konteks nasional, penentuan hari oleh KPU RI tidak menimbulkan persoalan baru bagi jajaran KPU provinsi atau kabupaten/kota. Namun, berbeda

jdih.kpu.go.id

ceritanya bagi KPU Provinsi Bali dengan jajaran KPU kabupaten/kota di Bali, karena menentukan hari pemilihan tidak bisa sesukanya menimbang ada aspek lain yang patut menjadi bahan pertimbangan. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, komisioner KPU di Bali selalu melakukan konsultasi dengan pemangku adat dan para tokoh agama serta *sulinggih* (pendeta utama) terkait penentuan *dewasa ayu* (hari baik) pelaksanaan hari pemungutan suara. Tujuannya, agar hari yang dipilih tersebut tidak bersamaan dengan upacara agama dan kegiatan adat berdasarkan *dewasa ayu* dalam kalender bali.

Berdasarkan catatan data di KPU, pemilu nasional untuk pemilihan calon anggota legislatif pada tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 bertepatan dengan hari *purnama kedasa* dalam kalender bali yang menggunakan tahun Caka. Sebagaimana tradisi yang ada di Bali, pada *purnama kedasa* hampir semua pura besar menyelenggarakan upacara agama yang rangkaian upacaranya dilakukan sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika *purnama kedasa* ini juga berlangsung upacara besar di Pura Besakih, Karangasem yakni upacara Batara Turun Kabeh, di mana seluruh rentetan upacara berlangsung selama 42 hari mulai dari awal sampai pada puncak upacara pada tanggal 9 April tersebut. Di satu sisi masyarakat Bali berhak menjalankan kewajiban agama dan adat mereka pada tanggal tersebut, tapi di sisi lain para pengampu kepentingan politik menginginkan agar tingkat partisipasi masyarakat datang ke TPS tetap tinggi. Di titik inilah persoalan mulai terjadi, karena periode antara masyarakat melaksanakan upacara beririsan waktunya dengan penggunaan hak mereka dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan kelancaran pemilu serta tingkat partisipasi pemilih sesuai yang ditargetkan, KPU Provinsi Bali dan KPU kabupaten/kota se-Bali menjalin komunikasi dengan menemui para pemangku kepentingan seperti kepala daerah, tokoh agama, dan tokoh adat di Bali. Tujuannya satu yakni mencari solusi terbaik untuk tetap mengajak pemilih menyalurkan hak konstitusionalnya sebagai warga negara di bilik TPS, dan pada saat yang sama prosesi upacara agama juga tidak terganggu, sekurang-kurangnya tertunda. Solusi yang diperoleh pada saat itu adalah memundurkan pelaksanaan persembahyangan setelah selesainya waktu pemungutan suara yaitu pukul 13.00.

Selanjutnya pada Pilkada Serentak yang kali pertama diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015, untuk di Bali dilaksanakan di enam kabupaten/kota yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem. Ada kemiripan dengan pemilu legislatif tahun 2009, hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 tersebut selisih satu hari dengan hari *Tilem* (bulan mati). Secara tradisi, pada hari *Tilem* banyak pemilih dengan KTP Denpasar tapi berasal dari luar Denpasar

memilih pulang kampung.

Menginjak tahun 2018, Bali menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni. Lagi-lagi pada tanggal yang sama dengan jadwal pemungutan suara, ada salah satu pura besar di Kabupaten Bangli yakni Pura Jati melaksanakan upacara. Pura Jati, Bangli merupakan pura *kawitan* atau pura induk klan Pasek Kayu Selem yang memiliki anggota puluhan ribu yang tersebar di seluruh Bali, dan di-*empon* atau diampu oleh desa-desa yang ada di Kecamatan Kintamani.

Agar pesta demokrasi lokal tidak terganggu yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi pemilih, komisioner KPU melakukan langkah-langkah koordinasi dengan para pemegang kepentingan. Salah satu jalan keluar yang dijalankan adalah melakukan pendekatan kepada *pengempon* pura¸ tokoh klan, dan tokoh agama setempat untuk bisa memajukan penutupan rangkaian pelaksanaan upacara agama pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 menjadi pukul 04.00, sehingga pada saat pemungutan suara dijalankan, para pemilih bisa memberikan hak pilihnya di TPS. *Pengempon* pura juga membantu mengeluarkan imbauan agar para *pemedek* (warga yang bersembahyang) untuk menggunakan hak pilihnya pada hari tersebut.

Kini, tahun 2020, Pilkada Serentak yang diagendakan KPU RI juga berbarengan dengan hari raya Galungan yang dirayakan umat Hindu di Bali, yakni pada Rabu, tanggal 23 September. KPU Provinsi Bali bersama KPU kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada, sejak awal melaksanakan koordinasi dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, serta para pemangku adat untuk mengantisipasi agar jangan sampai hari raya menyebabkan turunnya tingkat partisipasi pemilih. Caranya dengan mengajak dan mengimbau desa adat mengerahkan warganya agar turut berperan dan berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak dengan berbondong-bondong datang ke TPS.

Kesimpulan

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu salah satunya diukur dari seberapa tinggi partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Makin tinggi angkanya, berarti makin berkualitas penyelenggaraan pemilu tersebut. Namun, khusus di Bali, agenda pemilu termasuk pilkada acapkali berbarengan dengan jadwal *piodalan* atau upacara di salah satu atau sejumlah pura. Khusus untuk Pilkada Serentak 2020, malah jalan bersamaan dengan hari raya Galungan. Di titik inilah

pentingnya upaya dan strategi KPU untuk memberi pemahaman dan menggalang pemangku kepentingan adat serta agama, dalam memberi imbauan dan pengertian umat tetap menggunakan hak pilihnya meski ada upacara atau hari raya. Ketika dalam pilkada-pilkada sebelumnya upaya pendekatan tersebut membuahkan hasil, maka dapat diperkirakan bahwa strategi serupa juga berhasil juga diterapkan dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang. Maka dapat disimpulkan, lembaga adat dan tokoh adat di Bali sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Bali, pada Pemilu 2019

Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Lomba Mural

Relawan Demokrasi melakukan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Klub Malam

Coattail Effect dan Partisipasi Pemilu Serentak 2019 di Kalimantan Selatan

Oleh: Edy Ariansyah
Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam membentuk pemerintahan demokrasi. Bentuknya melalui partisipasi pemilih menggunakan hak pilih dan menentukan peserta pemilu yang mendapat mandat menyelenggarakan pemerintahan. Selain partisipasi menggunakan hak pilih, partisipasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan peran. Kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih diperlukan pemahaman yang memadai. Pemahaman pemilih yang memadai dapat ditunjang oleh adanya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Kajian ini mendeskripsikan partisipasi pemilih Pemilu dan menguji tesis coattail effect berdasarkan hasil Pemilu serentak anggota DPR dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilu tahun 2019 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diselenggarakan secara serentak memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keserentakan pemilihan umum tahun 2019 dan masifnya sosialisasi serta pendidikan pemilih sangat signifikan meningkatkan partisipasi pemilih di Kalimantan Selatan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan dalam berbagai metode, bentuk dan sarana serta sinergitas dengan pemilih, stakeholder kunci dan stakeholder pendukung Pemilu menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih. Terdapat kontradiksi tesis coattail effect dalam keserentakan Pemilu tahun 2019 di Kalimantan Selatan. Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kalimantan Selatan berbanding terbalik dengan perolehan suara partai politik pengusul dalam Pemilu Anggota DPR di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I dan Kalimantan Selatan II.

Kata kunci: Pemilu, pemilih, pemangku kepentingan, sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi dan coattail effect

Latar Belakang

Pemerintahan suatu negara demokratis dibentuk berdasarkan kehendak rakyat. Instrumen penghimpun kehendak rakyat salah satunya melalui pemilihan umum (Pemilu). Rangkaiannya diselenggarakan secara periodik dengan jangka waktu tertentu. Setiap warga negara memiliki dan diberi kesempatan yang sama. Setiap pilihan pemilih nilainya dihitung setara, tanpa terkecuali. Penentuan pilihan berdasarkan asas bebas, adil dan rahasia. Diselenggarakan oleh institusi yang mandiri. Demikianlah gambaran secara sederhana pembentukan pemerintahan melalui sistem demokrasi.

Indonesia bagian dari negara yang menerapkan sistem demokrasi. Menerapkan standar penyelenggaraan Pemilu yang demokratik. Walaupun diawal berdirinya Negara Republik Indonesia dalam konstitusi tidak ditemukan pengaturan tentang Pemilihan Umum atau Pemilihan. Namun, melalui amandemen ketiga ketentuan konstitusi Indonesia secara tegas menentukan "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali"[1].

Pada dimensi penyelenggaraan, Pemilu telah diselenggarakan berkali-kali dan sejak lama. Penyelenggaraannya berlangsung periodik lima tahun sekali sejak tahun 1955 hingga Pemilu tahun 2019. Kompleksitas dari periode penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu dengan segala kompleksitasnya. Pertama kali di dunia diselenggarakan secara serentak memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten/kota. Sebanding dengan keserentakannya, jumlah kontestan politik Pemilu tergolong variatif.

Sebelum penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, ragam analisis menggunakan pendekatan *coattail effect* (efek ekor jas). Keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu DPR dan DPRD dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan perolehan suara partai politik pengusul. Perolehan suara partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, sekaligus sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. Misalnya, Electoral Research Institute – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merujuk tesis Shugart, "jika waktu penyelenggaraan pemilu presiden diserentakan (simultan) dengan pemilu legislatif akan menimbulkan *coattail effect*, yaitu (hasil) pemilihan presiden akan memengaruhi (hasil) pemilihan anggota legislatif"[2].

---

[1]Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga

[2]Syamsuddin Haris, Ramlan Surbakti, Ikrar Nusa Bhakti, Saldi Isra, Kuskridho Ambardi, Nico Harjanto, Didik Supriyanto, Sri Nuryanti, Sri Yanuarti, dan Moch. Nurhasim, 2014. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Jakarta: Electoral Research Institute – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal. 27

Kajian berkenaan dengan *coattail effect* dari keserentakan Pemilu dilakukan pengujian pada hasil Pemilu 2019 dibatasi pada satu wilayah provinsi, yaitu Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I dan Kalimantan Selatan II untuk Pemilihan Anggota DPR. Menguji tesis *coattail effect* dalam keserentakan Pemilu dilihat apakah terdapat pengaruh meningkat perolehan suara partai politik pengusul atau tidak? Apakah linear perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perolehan suara partai politik pengusul? Fokus pengujian pada perolehan suara Partai Politik untuk pengisian kursi DPR dengan perolehan suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, lebih awal diuraikan tantangan dan geografis Kalimantan Selatan, aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemudian mendeskripsikan bentuk dan tingkat partisipasi Pemilu 2019.

Tantangan Geografis Kalimantan Selatan

Pemilu di Kalimantan Selatan dengan sejumlah Peserta Pemilu Tahun 2019 memiliki tantangan tersendiri. Kalimantan Selatan memiliki tiga belas kabupaten dan kota. Karakteristik wilayah Kalimantan Selatan mencakup dataran rendah (lintasan rawa, lintasan sungai, pesisir, lintasan laut dan gambut), dan dataran tinggi. Secara administratif, terdapat dua kota, yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru; Sebelas kabupaten, yaitu Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.

Masyarakat yang bermukim di dataran rendah, selain menggunakan transportasi darat, sebagian wilayahnya diakses menggunakan alat transportasi sungai dan laut. Dari tiga belas kabupaten dan kota, terdapat sembilan kabupaten yang sebagian kecil wilayahnya diakses menggunakan transportasi laut, sungai, roda dua, dan berjalan kaki. Wilayah yang hanya bisa diakses melalui sarana transportasi laut, sungai, hanya roda dua, dan berjalan kaki dapat dideskripsikan melalui peta tatangan akses beberapa wilayah di Kalimantan Selatan berikut ini.

Peta Tatangan Akses Beberapa Wilayah di Kalimantan Selatan

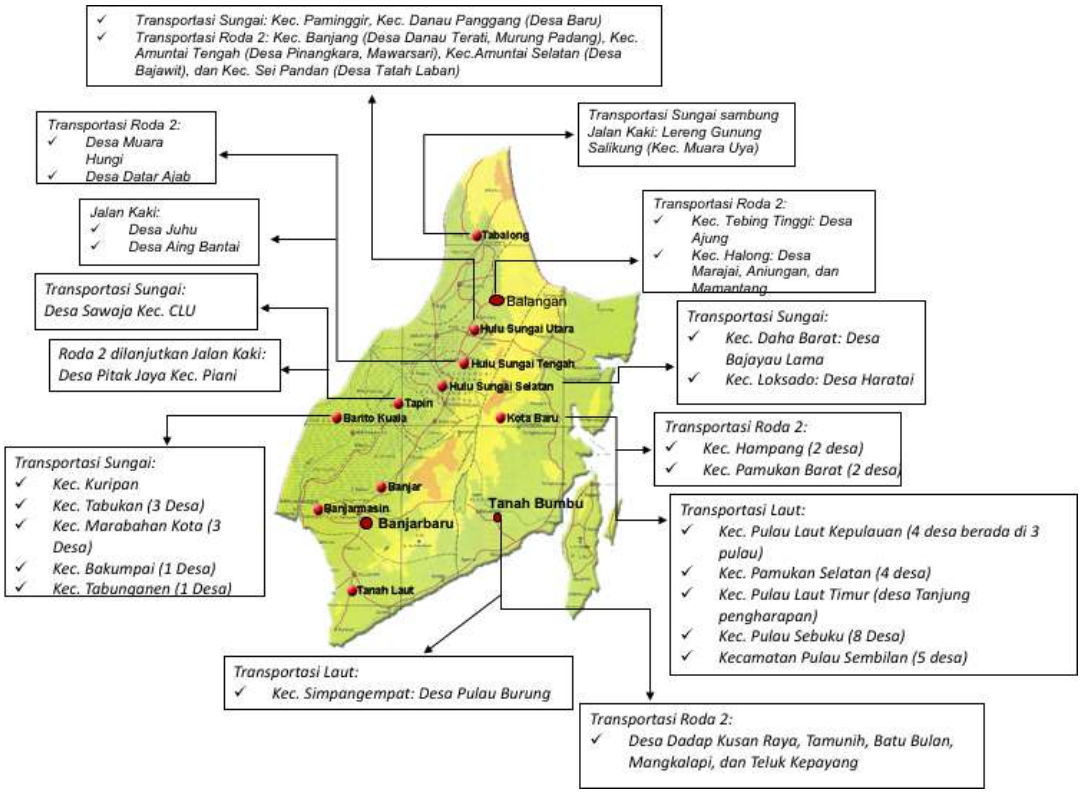

Beberapa desa di Kalimantan Selatan berada di wilayah hutan tropis. Akses tempuh desa di hutan tropis hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Masyarakat bermukim di lingkup pegunungan Meratus, seperti masyarakat desa Juhu dan desa Aing Bantai Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa tanpa akses transportasi, teknologi komunikasi dan informatika, dan listrik. Akses pulang - pergi ke kedua desa tersebut kurang lebih selama empat hari berjalan kaki.

Kondisi geografis yang hanya bisa diakses dengan alat transportasi tertentu menjadi bagian tantangan bagi penyelenggaraan pemilihan umum. Dampaknya tidak hanya bagi penyelenggara dan pemilih, namun juga bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan Pemilu termasuk peserta Pemilu.

Memilih dan dipilih merupakan suatu hak konstitusional warga. Negara melalui Komisi Pemilihan Umum hadir menunaikan tanggung jawab melayani hak memilih dan dipilih masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah kuncinya. Seberat apapun tantangan yang dihadapi, KPU tetap melayani.

Beberapa tantangan penyelenggaraan Pemilu pada wilayah sulit akses, diantaranya: (a) pendistribusian logistik Pemilu; (b) transformasi pengetahuan kepemiluan; (c) rekrutmen penyelenggara Pemilu; dan (d) keterbatasan jangkauan teknologi komunikasi dan informatika untuk sosialisasi penyelenggaraan Pemilu menyasar basis pemilih. Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, masyarakat ikut berpartisipasi memudahkan pendistribusian logistik dibantu pengamanan dari TNI dan Polri; transformasi pengetahuan dan sosialisasi kepemiluan menggunakan metode tatap muka dan pendekatan *door to door* ke rumah warga dilengkapi alat peraga sosialisasi dalam bentuk flyer dan poster; dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk membantu menggerakkan masyarakat dalam menyukseskan agenda-agenda kepemiluan sesuai asas dan prinsip Pemilu.

Tantangan tersebut di atas menjadi catatan penting untuk dilakukan penguatan di masa mendatang demokrasi kita. Penguatan sarana dan fasilitas layanan publik; ketersediaan akses komunikasi melalui teknologi dan informatika; dan kualitas sumber daya manusia. Penguatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dan peran penting institusi-institusi politik agar bermakna bagi masyarakat dalam bernegara. Menurut laporan UNDP pada tahun 2002 tentang "Deepening Democracy in a Fragmented World", bahwa "*for politics and political institutions to promote human development and safeguard the freedom and dignity of all people, democracy must widen and deepen*"[3].

Walau terdapat wilayah sulit akses, Pemilu di Kalimantan Selatan terselenggara dengan demokratis, lancar, aman, damai dan sesuai asas serta prinsip Pemilu. Berbagai strategi untuk mewujudkan partisipasi positif masyarakat diimplementasikan. Antusias partisipasi positif masyarakat meningkat. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan dengan berbagai rangkaian metode dan instrumen. Penggunaan komunikasi sosialisasi semaksimal-mungkin memudahkan masyarakat memahami. Sosialisasi menggunakan metode tatap muka, media luar ruang, media massa, melalui forum-forum basis pemilih hingga metode *door to door* ke setiap rumah warga. Penggunaan alat peraga sosialisasi yang dapat dipahami masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat diaktivasi berpartisipasi sebagai agen sosialisasi di setiap basis pemilih.

Pemangku kepentingan kunci dan pendukung Pemilu juga tidak kalah partisipatifnya. Berperan melakukan pendidikan politik untuk menciptakan pemilih cerdas, seperti media massa, perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi pemuda dan mahasiswa. Peran berbagai pemangku kepentingan Pemilu dapat menyumbang pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan kepemiluan.

[3]UNDP, 2002. "Deepening Democracy in a Fragmented World". *Human Development Report 2002.* Hal. 1

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Sosialisasi dan pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 diselenggarakan dalam berbagai bentuk dan cara. Sosialisasi dilakukan kepada berbagai basis pemilih. Memberikan pemahaman yang memadai kepada basis pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih muda, basis keagamaan dan adat, pemilih marjinal, pemilih penyandang disabilitas, basis berkebutuhan khusus, basis keluarga, basis komunitas, dan basis warga net.

Bentuk sosialisasi dan Pendidikan pemilih terlaksana sesuai rencana. Baik diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan atau KPU Kabupaten/Kota sendiri maupun kerjasama dengan pemangku kepentingan pendukung Pemilu di Kalimantan Selatan.

Tabel Bentuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Kalimantan Selatan

No	Kegiatan	Karakteristik Wilayah	Bentuk/Sarana
1	Sosialisasi	Terjangkau Transportasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika	Baliho, Spanduk, Placement iklan Media Massa (TV, Radio, Koran, dan Online), Infografis, Perlombaan (jingle Pemilu, Mural Pemilu), Konser Musik, Dialog Interaktif melalui Radio dan taslk Show di TV, KPU Run, Pawai Ajakan Menggunakan Hak Pilih, Gerakan Melindungi Hak Pilih, Pemilu Expo, Diskusi Media Massa, Video Tutorial, Publikasi Media Sosial, Flyer, Pemutaran Film, Diskusi Media Massa, dan Sosialisasi *door to door* oleh 50 Relawan Demokrasi tiap kabupaten/ kota mewakili 11 basis pemilih
		Sulit Akses Transportasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, atau Jaringan Listrik	Poster, flyer, Sticker, Spanduk, Baliho, Tatap Muka, dan *Door to Door* dari rumah ke rumah warga
2	Pendidikan Pemilih	Sulit Akses Transportasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, atau Jaringan Listrik	Kerjasama dengan basis-basis pemilih, Relawan Demokrasi, dan Kerjasama Organisasi Sosial dan Budaya
		Terjangkau Transportasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika	KPU *Goes to Campus,* Dialog dan Pemutaran film Suara April, Lomba Debat Pemilu (Pemilih Pemula), Layanan Audiensi Rumah Pintar Pemilu, Kerjasama Organisasi Sosial, Budaya dan Agama, dan Kerjasama Lembaga Pendidikan

Melalui berbagai metode dan bentuk kegiatan, materi-materi demokrasi dan kepemiluan telah ditransformasikan kepada masyarakat melalui pendidikan

pemilih dan sosialisasi. Materi-materi berikut ini telah ditransformasikan melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilu.

Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Kalimantan Selatan

- Jadwal, Program dan Tahapan Pemilu
- Jenis Logistik Pemilu
- Alat Bantu Pemilih Disabilitas
- Peserta Pemilu DPD
- Peserta Pemilu DPR dan DPRD
- Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Tata Cara Pindah Pemilih
- Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih
- Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden
- Daftar Calon Sementara DPR, DPD, dan DPRD
- Daftar Calon Tetap DPR, DPD, dan DPRD
- Visi dan Misi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- Daftar Pemilih Khusus dan
- Daftar Pemilih Tambahan
- Pemilih dan Pentingnya Penggunaan Hak Pilih
- Pemantau, Pelaksana Survei dan Jajak Pendapat
- Konsep, Nilai dan Prinsip Demokrasi
- Pemilu
- Kampanye Pemilu
- Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- Tata Cara Mencoblos
- Suara Sah dan Tidak Sah
- Pendaftaran Tim Kampanye
- Pendaftaran Akun Media Sosial Peserta Pemilu
- Pencalonan DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- Syarat-syarat pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- Gerakan Melindungi Hak Pilih

Secara umum, sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kalimantan Selatan dilakukan dengan dua pendekatan klasifikasi wilayah.

Pertama, sosialisasi di wilayah perkotaan, yang terjangkau teknologi komunikasi dan informatika, terdapat sarana media massa, dan terjangkau media sosial. Sosialisasi dan pendidikan pemilih pada wilayah klasifikasi ini lebih mudah ketimbang di wilayah yang tidak terjangkau media sosial, teknologi komunikasi dan informatika.

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan dengan berbagai metode dan bentuk kegiatan. Di antaranya sosialisasi menggunakan media luar ruang, tatap muka, KPU *Goes to Campus*, lomba debat Pemilu untuk Pemilih Pemula, lomba mural, konser musik, pagelaran musik jingle Pemilu, pemutaran film Suara April, ngopi bareng media, pawai ajakan memilih, diskusi publik, *talkshow*, KPU Run, Pemilu Expo, dialog interaktif, infografis, gerakan melindungi hak pilih, iklan media, dan rilis media. Selain diselenggarakan langsung oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, juga diselenggarakan atas kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga penyiaran publik dan media massa. Kegiatan sosialisasi tersebut di atas selain bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, juga bertujuan menguatkan legitimasi proses dan hasil Pemilu. Bagian penunjang untuk meningkatkan partisipasi Pemilu, tentu juga dilakukan rangkaian kegiatan peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu, seperti dialog publik. Publikasi kegiatan dialog publik dapat diakses di **https://youtu.be/qV1F3C4GuOs.**

Sinergitas – partisipatif media massa sangat membantu menyebarkan informasi sosialisasi di wilayah perkotaan. Adanya partisipasi media massa, memudahkan pemilih mendapatkan informasi kepemiluan yang dirilis atau disebarkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara diskusi media, ekspos tahapan, *talk show*, pemberitaan dan rilis informasi kepemiluan yang melibatkan jurnalis. Akses informasi dibuka secara proporsional sehingga media massa mendapatkan informasi seutuhnya. Dari informasi yang dibuka menjadi referensi pengetahun bagi para jurnalis untuk mewartakan kepada khalayak umum terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

Selain itu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan memaksimalkan fungsi teknologi komunikasi dan informatika di era 4.0 secara positif sebagai sarana mengaktivasi partisipasi pemilih, sosialisasi dan menyebarkan informasi kepemiluan. Pemanfaatannya dengan memaksimalkan fungsi laman

dan akun media sosial, seperti Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Selain dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kabupaten/Kota, juga diorganisir melalui Relawan Demokrasi. Terutama Relawan Demokrasi yang fokus pada basis pemilih warga net. Komunikasi sosialisasi didesain menarik, mudah dipahami oleh segmen sasaran, dan berkelanjutan pada setiap tahapan Pemilu.

Melalui penyampaian informasi kepemiluan lewat media massa dan media sosial dapat mencegah pengaruh isu hoax. Masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan langsung dari penyelenggara Pemilu. Kunci pentingnya adalah keterbukaan informasi penyelenggaraan dan sinergitas yang positif antara media massa dengan penyelenggara Pemilu.

Kedua, klasifikasi sosialisasi dan pendidikan pemilih di wilayah-wilayah kecamatan atau desa yang terbatas atau tanpa akses transportasi dan jaringan teknologi komunikasi dan informatika. Sosialisasi dan pendidikan pemilih pada wilayah klasifikasi sulit dilakukan dengan cara penyebaran informasi kepemiluan menggunakan media luar ruang (poster, spanduk, baliho, dan flyer); kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil atau masyarakat adat melalui kegiatan sosial, keagamaan dan budaya; metode tatap muka dan *door to door* dengan strategi dan pendekatan kontekstual. Dua tahap strategi dan pendekatan sosialisasi di wilayah sulit akses. *Tahap pertama*, mengaktivasi peran organisasi masyarakat sipil, tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat yang tidak mengandung konflik kepentingan dengan calon atau peserta Pemilu. Terhadap tokoh-tokoh di setiap basis pemilih dan wilayah sulit akses dibekali dengan informasi dan pengetahuan kepemiluan. Tokoh-tokoh ini dapat menjadi agen penggerak sosialisasi di setiap basis pemilih, membantu mengkomunikasikan dan mengajak masyarakat setempat sehingga mempermudah KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kabupaten/Kota serta jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa melakukan sosialisasi dan pendidikan Pemilih. Aktivasi dan gerakan partisipasi masyarakat demikian diawali dengan penguatan kepercayaan publik. Kepercayaan publik dibangun dari berbagai pendekatan dan cara KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kabupaten/Kota, dengan kunci pentingnya menyelenggarakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. *Tahap kedua*, setelah memiliki jejaring sebagai agen penggerak dalam membantu sosialisasi dan pendidikan pemilih di wilayah sulit akses. Kemudian, menyebarkan informasi kepemiluan dalam bentuk poster, sticker dan flayer melaui tokoh-tokoh masyarakat atau adat; melakukan sosialisasi dalam bentuk *door to door* dan tatap muka disertai alat peraga sosialisasi secara langsung oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan kepada masyarakat. Beberapa di antaranya dilakukan *door to door* dalam Gerakan Melindungi Hak Pilih di desa Angkipih Kecamatan Paramasan, yang merupakan salah satu desa terluar di Kabupaten Banjar; Sosialisasi tatap muka

di salah satu desa terkanalisasi air bendungan Riam Kanan, desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar; dan sosialisasi *door to door* dan tatap muka dengan masyarakat adat desa terluar di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, desa Kapul.

28 Jam Berjalan Kaki

Sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui metode tatap muka dan *door to door* pada setiap rumah pemilih juga dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Selatan di desa yang berada diketinggian pegunungan Meratus. Sosialisasi *door to door* difokuskan kepada wilayah yang sama sekali tidak terjangkau jaringan komunikasi teknologi dan informatika (internet, televisi, radio, dan jaringan seluler); tidak terdapat sarana transportasi dan jaringan listrik. Salah satunya dilakukan di Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa yang berdekatan dengan puncak Halau-Halau, gunung tertinggi di Kalimantan Selatan.

Akses menuju desa Juhu hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Melintasi jalan setapak di antara semak belukar, pepohonan tinggi dan rimbun, naik – turun gunung-gunung, melintasi puluhan sungai di pegunungan Meratus. Jarak tempuh menuju desa Juhu dibutuhkan sekitar 28 jam berjalan kaki dari Dusun Kiyu Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur. Tidak ada pilihan transportasi lain.

Walau wilayahnya sulit akses, tugas KPU Provinsi harus dilaksanakan. Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Melaksanakan tugas KPU, seorang Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan dibantu seorang staf bernama Baderuddin dan seorang anggota PPK Kecamatan Batang Alai Timur melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan berjalan kaki ke Desa Juhu.

Sebelum menuju Desa Juhu, KPU Provinsi Kalimantan Selatan melakukan sosialisasi *door to door* di tiap rumah dan tempat keramaian warga di Dusun Kiyu Desa Hinas Kiri. Desa Hinas Kiri merupakan desa terakhir yang bisa diakses menggunakan transportasi darat. Jumlah warga yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 di Desa Hinas Kiri sebanyak 534 pemilih. Sebagian besar warga Desa Hinas Kiri tergolong buta aksara, bergantung pada sosialisasi dalam bentuk visualisasi yang disertai penjelasan secara detil dan mudah dipahami masyarakat. Materi yang disosialisasikan, seperti jumlah, nama, dan nomor urut peserta Pemilu; daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; tata cara mencoblos; suara sah dan tidak sah; hari dan tanggal pemungutan suara; dan ajakan berpartisipasi dan pentingnya menggunakan hak pilih secara demokratis

jdih.kpu.go.id

tanpa *vote buying*. Kegiatan sosialisasi di Dusun Kiyu dipublikasikan juga oleh rekan-rekan jurnalis, yang sempat berencana ikut ke Desa Juhu. Namun, gagal ikut karena medan tempuh yang sulit dan curah hujan yang tak kunjung henti. Sosialisasi Pemilu di Kiyu dan menuju desa Juhu dapat disaksikan melalui video dokumen berita Antara Kalsel dengan judul "Komisioner KPU Kalsel Eddy Ariansyah Naik Gunung Sosialisasi Pemilu Bagi Warga Buta Huruf" di **https://youtu.be/E9U0BFlWlW4**; video berita BanjarmasinPost dengan judul "Sosialisasikan Tata Cara Mencoblos Komisioner KPU Kunjungi Warga di Pedalaman Meratus" di **https://youtu.be/FaxtYv49Mhk**; dan diwartakan oleh TVRI Kalimantan Selatan pada tanggal 15 April 2019 dalam rangkaian berita Kalimantan Selatan Hari Ini dengan judul "2 Hari Jalan Kaki untuk Mengantar Logistik Pemilu", "Sosialisasi Pemilu Hingga ke Pedalaman" dan "Buta Huruf Jadi Masalah Pemilih di Desa Kiyu" pada kurun menit ke 1.01.32 sampai dengan menit ke 1.11.22 berikut di **https://youtu.be/_-h03fl-0to.**

Usai melakukan sosialisasi di Dusun Kiyu, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan PPK Batang Alai Timur memulai jalan kaki menuju Desa Juhu. Perjalanan hari pertama mulai pukul 14.22 waktu setempat, memasuki hutan belantara. Keadaan makin sulit memasuki waktu malam, melintasi beberapa sungai, naik turun bukit, jurang, kemudian rute yang dilintasi banyak tertutup dedaunan, jalanan penuh gumpalan akar dan berbatuan sebelum akhirnya terus menanjak. Bahkan ketiga personil tim sosialisasi sempat terjatuh berguling-guling – terseluncur beberapa kali karena jalanan becek. Akses ke desa Juhu tergolong sangat sulit. Dibutuhkan waktu tempuh pulang-pergi selama tiga hari bagi masyarakat desa Juhu atau terbiasa mendaki gunung, sedangkan bagi yang tidak terbiasa mendaki kurang lebih empat hari berjalan kaki. Apalagi harus membawa laptop dan alat peraga sosialisasi dan pendidikan pemilih yang cukup berat. Sepanjang perjalanan, juga menyempatkan singgah menyosialisasikan kepemiluan ketika berpapasan dengan warga di jalan dan warga yang bermukim pondok ladang pertanian. Selama perjalanan hanya boleh istirahat selama dua jam, yaitu pukul 02.00 dini hari hingga pukul 04.00 subuh. Itupun hanya tidur di tenda seadanya. Dalam keadaan gelap dan disertai hujan, dua penyelenggara harus melanjutkan perjalanan setelah istirahat sejenak tersebut. Mereka bertiga tiba di desa Juhu, tempat bermukimnya Suku Dayak Kaharingan pada hari kedua perjalanan tepat pada pukul 16.27 waktu setempat. Setelah tiba di lokasi, langsung bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tanpa istirahat terlebih dahulu, kedua penyelenggara Pemilu melangsungkan proses sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Desa Juhu merupakan salah satu desa terpencil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Walaupun terpencil, bukan berarti tidak memiliki hak untuk mendapatkan informasi kepemiluan dan berpartisipasi. Pemilu tidak hanya konsumsi elit. Pemilu

untuk semua warga negara Indonesia. Tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai jajaran *state auxiliary institutions* hadir menunaikan tugas mencerdaskan pemilih, memberikan pemahaman yang memadai kepada semua segmen pemilih dan pemangku kepentingan, dan melayani hak pilih dan dipilih. Tentu sangatlah penting menyosialisasikan kepemiluan kepada masyarakat, tak terkecuali kepada pemilih buta aksara dan pemilih di pedalaman untuk menguatkan kualitas Pemilu dan demokrasi Indonesia. Proses sosialisasi di desa Juhu menggunakan tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa banjar, dan bahasa dayak. Materi yang disosialisasikan terkait peserta Pemilu; surat suara Pemilu; tata cara mencoblos; suara sah dan tidak sah; pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara; dan pentingnya menggunakan hak pilih sesuai asas Pemilu dan demokratis; serta hari dan tanggal pemungutan suara. Masyarakat Juhu antusias berpartisipasi. Bersedia saling mengajak warga sekitarnya dan membantu memfasilitasi peminjaman balai adat sebagai tempat sosialisasi sekaligus pendidikan pemilih. Setelah selesai penjelasan materi-materi sosialisasi, dilakukan pemutaran dan nonton bareng film Suara April, walau terbatas dengan menggunakan laptop seadanya yang telah dicarger penuh sebelum menuju desa Juhu.

Masyarakat desa Juhu tercatat 138 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, sebagian besar hadir mengikuti acara sosialisasi dan pendidikan pemilih. Daftar pemilih tersebut terhimpun pada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Satu-satunya tempat pemungutan suara di desa Juhu. Dokumentasi sosialisasi dan pendidikan pemilih di desa Hinas Kiri, selama perjalanan menuju desa Juhu dan aktivitas sosialisasi di desa Juhu dapat disimak di **https://youtu.be/ZORWEXGUOYY** dengan judul "Sosialisasi Pemilu KPU Provinsi Kalimantan Selatan".

Terselenggaranya sosialisasi dan pendidikan pemilih di wilayah sulit akses ini kata kuncinya aktivasi kesadaran partisipatif warga. Kesadaran partisipatif masyarakat berbanding lurus dengan menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap KPU Provinsi Kalimantan Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS. Partisipasi pemilih menjadi mahkotanya dan dibangun secara sinergitas.

Aktivasi Partisipasi Melalui Relawan Demokrasi

Selain disosialisasikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kabupaten/Kota, juga tidak kalah aktifnya digerakkan oleh Relawan Demokrasi. KPU Kabupaten/Kota membentuk Relawan Demokrasi. Jumlahnya 50 relawan di masing-masing Kabupaten/Kota. Sebanyak 650 Relawan Demokrasi yang bergerak di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Sasaran gerak sosialisasi Relawan Demokrasi menyasar 11 basis pemilih. Masing-masing Relawan Demokrasi melakukan sosialisasi dengan berbagai bentuk dan metode sesuai klasifikasi basis

pemilih.

Sebelum melakukan sosialisasi, Relawan Demokrasi telah diberikan penguatan pemahaman melalui bimbingan teknis dan pelatihan dari KPU Kabupaten/Kota. Relawan Demokrasi juga dibekali sejumlah instrumen penunjang sosialisasi, seperti poster, flyer, dokumen video film Suara April, dan materi-materi kepemiluan. Aktivitasnya diorganisir secara partisipatif dengan warga basis pemilih.

Partisipasi Pemilih Meningkat

Pada Pemilu 2019 terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang sangat tinggi dibanding pada Pemilu 2014. Partisipasi pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebesar 66,47% di Kalimantan Selatan. Partisipasi pemilih menggunakan hak pilih dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 83,02%, dan sebesar 83,44% partisipasi pemilih Pemilu Anggota DPR daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, dan sebesar 81,61% partisipasi partisipasi pemilih Pemilu Anggota DPR daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II. Terdapat peningkatan partisipasi pemilih sebesar 16,55% pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Berikut diuraikan persentase partisipasi pemilih dan persentase suara tidak sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Anggota DPR tahun 2019.

Tabel Persentase Partisipasi Pemilih,
Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu 2019 di Kalimantan Selatan

Jenis Pemilu	Daerah Pemilihah	Jumlah DPT	Data Suara			Persentase (%)	
			Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Partisipasi Pemilih dari DPT	Suara Tidak Sah dari DPT
Presiden dan Wakil Presiden	Kalimantan Selatan	2.869.166	2.294.102	88.001	2.382.103	83,02%	3,06%
Pemilu Anggota DPR	Kalimantan Selatan I	1.560.438	1.082.514	219.562	1.302.076	83,44%	14,07%
	Kalimantan Selatan II	1.308.728	933.493	134.670	1.068.163	81,61%	10,29%

Selain partisipasi menggunakan hak pilih, masyarakat di Kalimantan Selatan juga antusias berpartisipasi menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Berdasarkan data KPU Provinsi Kalimantan Selatan, pendaftar seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdeskripsi pada tabel berikut ini.

Tabel Partisipasi Masyarakat
dalam Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS di Kalimantan Selatan[4]

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Pendaftar	
				PPK	PPS
1	Tanah Laut	11	135	90	793
2	Kotabaru	21	202	211	895
3	Banjar	20	290	312	1.408
4	Barito Kuala	17	201	260	1.537
5	Tapin	12	135	54	404
6	Hulu Sungai Selatan	11	148	55	1.138
7	Hulu Sungai Tengah	11	169	275	1.297
8	Hulu Sungai Utara	10	219	303	2.299
9	Tabalong	12	131	161	751
10	Tanah Bumbu	10	149	71	868
11	Balangan	8	157	163	1.563
12	Banjarmasin	5	52	97	277
13	Banjarbaru	5	20	77	122
Jumlah		153	2.008	2.129	13.352

Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR

Dari 27 partai politik yang mendaftar, hanya 16 (enam belas) partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang berlaku secara nasional. Empat partai politik lokal yang berlaku khusus di daerah Aceh. Sejumlah partai politik yang berlaku nasional tersebut berkompetisi untuk pengisian 575 kursi DPR dari 80 daerah pemilihan. Sejumlah kursi di 34 DPRD Provinsi/DPRA dan 514 DPRD Kabupaten/Kota. Begitu juga untuk Partai politik lokal aceh berkompetisi dengan partai politik nasional untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di

[4]Diolah dari data KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rekapitulasi Pendaftar Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS di Kalimantan Selatan dalam Pemilu Tahun 2019

Aceh.

Perolehan Kursi Partai Politik

Perolehan kursi merupakan wujud kuantitatif dari kedaulatan pemilih atas yang dipilih. Meminjam istilah kedaulatan yang dikemukakan C.F. Strong (1966) membagi dua aspek, internal dan eksternal. Kedaulatan internal berkaitan dengan kedaulatan politik. Istilah kedaulatan secara internal bermakna supremasi seseorang atau sekumpulan orang di dalam negara atas individu-individu atau perkumpulan individu dalam wilayah yurisdiksinya[5]. Dari enam belas partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, hanya Sembilan partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen, dengan jumlah perolehan kursi sebagai berikut.

Tabel Partai Politik Memenuhi Ambang Batas Parlemen dan Perolehan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2019 - 2024[6]

Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	58
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	78
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	128
4	Partai Golongan Karya	85
5	Partai NasDem	59
8	Partai Keadilan Sejahtera	50
10	Partai Persatuan Pembangunan	19
12	Partai Amanat Nasional	44
14	Partai Demokrat	54
Jumlah		575

Di Kalimantan Selatan dari Sembilan Partai Politik yang memenuhi ambang batas parlemen hanya tujuh partai politik memperoleh kursi. Sedangkan Partai NasDem dan Partai Demokrat di kedua daerah pemilihan tidak memperoleh kursi. Tujuh partai politik yang memperoleh kursi berikut ini, terdiri dari tiga partai politik pengusul H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Partai Gerindra, PKS dan PAN; dan empat partai politik pengusul Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin sebagai Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu PKB, PDI Perjuangan, Partai

[5]Strong, C.F., 1966. *Modern Political Konstitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited. Hal. 8

[6] Diolah dari Data Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019, yang dipublikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui www.kpu.go.id

Golkar, dan PPP. Sebanyak 6 (enam) kursi DPR dialokasikan untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I dan 5 (lima) kursi untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II. Secara rinci perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019 di dua Daerah Pemilihan di Kalimantan Selatan terinci pada tabel berikut ini.

Tabel Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019 di Kalimantan Selatan[7]

Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Kursi		Jumlah Perolehan Kursi
		Dapil Kalimantan Selatan I	Dapil Kalimantan Selatan II	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	-	1	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	2	3
4	Partai Golongan Karya	1	1	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	-	1
10	Partai Persatuan Pembangunan	1	-	1
12	Partai Amanat Nasional	1	-	1
Jumlah Alokasi Kursi		6	5	11

Perolehan Suara Partai Politik

Uraian perolehan suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak hanya terhadap partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen. Tetapi, juga diuraikan perolehan suara semua partai politik peserta Pemilu anggota DPR. Berikut perolehan suara Partai Politik Peserta Anggota DPR, yang digabung dengan suara masing-masing calonnya pada dua daerah pemilihan di Kalimantan Selatan pada Tabel, sebagai berikut.

[7] Data diolah dari dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019

Tabel Perolehan Suara Partai Politik
Peserta Pemilu Anggota DPR di Dua Daerah Pemilihan di Kalimantan Selatan[8]

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH PEROLEHAN SUARA DI DUA DAPIL
		DAPIL KALSEL I	DAPIL KALSEL II	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	75,609	106,849	182,458
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	161,566	127,333	288,899
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	97,334	237,062	334,396
4	Partai Golongan Karya	215,017	128,127	343,144
5	Partai NasDem	52,832	47,005	99,837
6	Partai Garuda	4,705	3,310	8,015
7	Partai Berkarya	30,214	24,343	54,557
8	Partai Keadilan Sejahtera	142,415	60,808	203,223
9	Partai Persatuan Indonesia	19,368	21,968	41,336
10	Partai Persatuan Pembangunan	100,413	56,833	157,246
11	Partai Solidaritas Indonesia	7,544	9,363	16,907
12	Partai Amanat Nasional	119,622	53,321	172,943
13	Partai Hati Nurani Rakyat	7,662	8,666	16,328
14	Partai Demokrat	36,298	32,427	68,725
19	Partai Bulan Bintang	9,711	13,970	23,681
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2,204	2,108	4,312

Dari enam belas partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dapat diklasifikasikan partai politik pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Tujuh partai politik pengusul calon presiden Ir. H. Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, Partai Hanura, dan PKPI. Sedangkan empat partai politik pengusul calon Presiden H. Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden H. Sandiaga Salahuddin Uno, yaitu Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Dapat digambarkan gabungan perolehan suara partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden berikut ini.

[8]Data diolah dari Model DC1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 pada Dua Daerah Pemilihan di Kalimantan Selatan[9]

NO	PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUL	SUARA PARTAI POLITIK	GABUNGAN SUARA PARTAI POLITIK PENGUSUL
	PRESIDEN	WAKIL PRESIDEN			
1	Ir. H. Joko Widodo	Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	PDI Perjuangan	334.396	1.137.721
			Partai Golkar	343.144	
			PKB	182.458	
			Partai NasDem	99.837	
			PPP	157.246	
			Partai Hanura	16.328	
			PKPI	4.312	
2	H. Prabowo Subianto	H. Sandiaga Salahuddin Uno	Partai Gerindra	288.899	733.790
			PKS	203.223	
			PAN	172.943	
			Partai Demokrat	68.725	

Berdasarkan perolehan suara gabungan masing-masing partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden di atas, terlihat jumlah suara gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno pada dua daerah pemilihan di Kalimantan Selatan. Jumlah gabungan perolehan suara semua partai politik pengusul Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin sebanyak 1.137.721 suara, sedangkan jumlah gabungan perolehan suara semua partai politik pengusul H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno 733.790 suara. Secara kuantitatif jumlah partai politik pengusul Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin dibandingkan dengan partai Pengusul H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno. Namun jika dibandingkan perolehan suara Pemilu Anggota DPR antara Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan dari dua daerah pemilihan di Kalimantan Selatan terdapat selisih 45.497 suara lebih banyak PDI Perjuangan. Pada jumlah keterpilihan Anggota DPR dari dua Daerah Pemilihan di Kalimantan Selatan, terdapat 3 calon terpilih dari PDI Perjuangan dan 2 calon terpilih dari Partai Gerindra.

[9] *Ibid*

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Perolehan Suaranya

Tidak ada yang berbeda jumlah pasangan calon presiden dan wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019. Pada Pemilu Tahun 2019 juga terdapat dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara serentak dengan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Berikut daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019[10] berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal 20 September 2018.

[10] Foto daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum tahun 2019 yang dipublikasi Komisi Pemilihan Umum di www.kpu.go.id

Setelah pasangan calon ditetapkan KPU Republik Indonesia, sesuai tahapan kampanye peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye melakukan rangkaian aktivitas kampanye. Kampanye dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya kampanye tatap muka, pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, debat, kampanye melalui iklan media massa, alat peraga kampanye, rapat umum, dan/atau bentuk lainnya. Di Kalimantan Selatan, Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo hadir melakukan kampanye Rapat Umum. Pasangan Calon Presiden H. Prabowo Subianto tidak turun melakukan kampanye rapat umum di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pemungutan suara di Kalimantan Selatan, perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berikut ini.

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan[11]

Nomor Urut	Pasangan Calon		Perolehan Suara
	Presiden	Wakil Presiden	
01	Ir. H. Joko Widodo	Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	823.939
02	H. Prabowo Subianto	H. Sandiaga Salahuddin Uno	1.470.163

Kontradiksi *Coattail Effect*

Berdasarkan data perolehan suara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan kedua gabungan partai politik pengusul di Kalimantan Selatan menunjukkan pengaruh yang berlawanan. Jika dibandingkan pada masing-masing satu partai politik pengusul juga perolehan suaranya tidak berpengaruh. Tesis *coattail effect* menerangkan bahwa figur calon Presiden dan Wakil Presiden dapat memengaruhi peningkatan perolehan suara partai politik pengusul dalam keserentakan Pemilu. Namun, berbeda ketika tesis tersebut diuji pada Pemilu serentak 2019 di *locus* Kalimantan Selatan. *Pertama*, perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 lebih banyak dibanding perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01. *Kedua*, perolehan suara partai politik pengusul pasangan calon Nomor Urut 01, yaitu PDI Perjuangan lebih banyak dibandingkan dengan perolehan suara Partai Gerindra sebagai pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 02.

[11]Data diolah dari Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Walau Pemilu diselenggarakan secara serentak, tidak dapat disimpulkan secara langsung bahwa peningkatan perolehan suara partai politik pengusul berbanding lurus dengan tingginya perolehan suara pasangan calon yang diusung. Kontradiksi dapat dilihat pada perolehan suara Pasangan Calon dengan perolehan suara partai politik yang tidak berbanding lurus. Artinya *coattail effect* bukan salah satu variabel penentu yang memengaruhi tingkat perolehan suara partai politik pengusul. Terdapat variabel lain yang juga memengaruhi daulat pemilih, seperti perilaku pemilih, strategi partai politik, isu-isu kampanye, dan sebagainya.

Berbagai variabel lain tersebut telah banyak dikaji oleh kalangan ilmu politik dan penggiat kepemiluan dalam berbagai pendekatan. Misalnya, untuk mengkaji perilaku memilih dalam Pemilu dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, salah satunya pendekatan sosiologis. "Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama"[12]. Selain variabel tersebut, tidak kalah pentingnya dalam negara demokrasi yaitu maksimalitas fungsi partai politik. Menurut Miriam Budiardjo (2010) setidaknya empat fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik (conflict management)[13]. Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi, kemajuan demokrasi ditunjang oleh maksimalnya fungsi institusi politik, dan partai politik salah satunya. Sebab, partai politik menurut Sigmund Neumann: "*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who compete for popular support with other group or groups holding divergent views*"[14]. Gambaran elektabilitas peserta Pemilu anggota DPR dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan serentak pada tahun 2019 merupakan cermin pilihan pemilih. Secara sempit gambaran legitimasi pemilih terhadap masing-masing peserta Pemilu dari seluruh kuantitas partisipasi penggunaan hak pilih pada saat pemungutan suara Pemilu.

[12]Ramlan Surbakti, 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo. hlm. 145

[13]Miriam Budiardjo, 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 405 - 411

[14]Eckstein, Harry; Apter, David E (ed), 1963. "Modern Political Parties". *Comparative Politics: A Reader*. London: The Free Press of Glencoe. hlm. 352

Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilihan umum di Kalimantan Selatan terjadi peningkatan partisipasi pemilih. Kuantitas dan kualitas partisipasi pengguna hak pilih ditunjang oleh pemahaman pemilih yang memadai tentang kepemiluan. Pemahaman pemilih memadai ditunjang melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu. Selain itu, juga didukung oleh partisipasi berbagai elemen, seperti media massa, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, relawan demokrasi, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, TNI dan Polri melalui peran masing-masing bersinergi mendukung terwujudnya Pemilu berkualitas dan demokratis.

Coattail effect bukanlah variabel tunggal yang dapat meningkatkan perolehan suara partai politik pengusul pasangan calon. Variabel dan faktor-faktor lain juga berpengaruh. Untuk membentuk konsepsi baru relasionalitas *coattail effect* dengan variabel perilaku pemilih, strategi partai politik, dan isu-isu kampanye yang menunjang peningkatan perolehan suara partai politik pengusul Pasangan Calon dalam Pemilu serentak perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut secara komprehensif.

Perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan partai politik pengusul merupakan wujud kuantitas daulat pemilih. Semua peserta Pemilu di tingkat Kalimantan Selatan melegitimasi dan menerima dengan damai hasil Pemilu. Penerimaan seluruh kelompok kepentingan atas hasil Pemilu di Kalimantan Selatan merupakan cermin dari proses penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan demokratis. Terhadap catatan penting untuk kemajuan sosial dan ekonomi, seperti di wilayah sulit akses atau terisolir, desa Juhu dan desa Aing Bantai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibutuhkan komitmen dan upaya resolutif dari institusi-institusi politik untuk masa mendatang yang bermakna bagi kemajuan masyarakat setempat dan penguatan demokrasi Indonesia.

jdih.kpu.go.id

Daftar Pustaka

Eckstein, Harry; Apter, David E (ed), 1963. "Modern Political Parties". *Comparative Politics: A Reader*. London: The Free Press of Glencoe.

Internasional IDEA, 2004. *Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Jakarta: International IDEA.

Mahkamah Konstitusi, 2008. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

Miriam Budiardjo, 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ramlan Surbakti, 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo

Strong, C.F, 1966. *Modern Political Konstitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited.

Syamsuddin Haris, Ramlan Surbakti, Ikrar Nusa Bhakti, Saldi Isra, Kuskridho Ambardi, Nico Harjanto, Didik Supriyanto, Sri Nuryanti, Sri Yanuarti, dan Moch. Nurhasim, 2014. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Jakarta: Electoral Research Institute – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesial.

UNDP, 2002. "Deepening Democracy in a Fragmented World". *Human Development Report 2002.*

Sosialisasi Pemilu 2019 melalui metode Door to Door

Pendidikan Pemilih Pemilu 2019 di Warga Desa terpencil dan sulit akses transportasi, teknologi komunikasi dan informatika

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui peluncuran Desa Sadar Pemilu

Sosialisasi Ajakan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu 2019 melalui Media Luar Ruang

Partisipasi Pemilu di Yogyakarta: Dari Kuantitatif Menuju Kualitatif (Refleksi Pemilu 2019)

Oleh: Ahmad Shidqi
Anggota KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemilu di Yogyakarta

Pemilu sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Yogyakarta. Meskipun di Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, tidak bisa diselenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, baik secara langsung maupun melalui DPRD, namun sejarah menunjukkan bahwa di awal-awal masa pasca kemerdekaan, atau tepatnya pada tahun 1951, di Yogyakarta pernah diselenggarakan Pemilu yang bersifat lokal. Pemilu 1951 tersebut menjadi semacam *pilot project* bagi pelaksanaan Pemilu nasional yang sejak 1948 sudah direncanakan untuk diselenggarakan. Namun karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan, terutama pasca meletusnya peristiwa Madiun, maka rencana penyelenggaraan Pemilu menjadi tertunda. Namun di beberapa daerah tidak sedikit Pemilu lokal berhasil dilaksanakan, seperti di Karesidenan Kediri dan Surakarta pada tahun 1946, di Kalimantan Selatan pada tahun 1948, dan di Yogyakarta sendiri serta di Minahasa pada tahun 1951, dan terakhir di Makassar pada tahun 1952 (Uji Nugroho, 2018).

jdih.kpu.go.id

Mengingat pelaksanaan Pemilu di sejumlah daerah tersebut sebagai "percobaan", maka sistem Pemilu yang digunakan di daerah-daerah itu tidaklah sama, Ada yang menggunakan sistem pemilihan langsung dan ada pula yang tidak langsung atau bertingkat. Namun terlepas dari keragaman sistem yang digunakan, setidaknya pelaksanaan Pemilu di masa-masa itu adalah sebuah kemajuan demokrasi luar biasa bagi negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Apalagi situasi politik dalam negeri saat itu masih belum stabil karena masih diwarnai pergolakan politik yang konfliktual. Bongkar pasang kabinet akibat tarik menarik kekuasaan menjadi warna yang mencolok dalam dinamika politik masa-masa itu. Namun sejarah mencatat, di tengah situasi semacam itu partisipasi pemilih dalam Pemilu 1951 di Yogyakarta mencapai 91,45%. (Uji Nugroho, 2018. Hlm.120). Capaian ini tentu luar biasa untuk sebuah event politik yang baru saja dikenal oleh masyarakat. Meskipun pada awalnya masyarakat Yogyakarta saat itu acuh tak acuh terhadap Pemilu karena dianggapnya merepotkan, namun berkat sosialisasi Panitia Pemilihan Umum setempat yang cukup gencar dan kreatif, salah satunya lewat layar tancap, maka akhirnya masyarakat Yogyakarta cukup antusias menyambut pesta demokrasi yang pertama kali digelar di bumi Mataram ini. Koran lokal setempat, Kedaulatan Rakyat, sebagaimana dikutip oleh Uji Nugroho, menggambarkan antusiasme partisipasi masyarakat yang datang ke TPS sebagai berikut:

> *Kalau dua bulan jang lalu dikatakan, bahwa rakjat di Jogjakarta bersikap atjuh tak atjuh terhadap pemilihan umum ini, maka kini ternjata malahan sebaliknja. Makin dekat pada pemilihan pemilih, makin berdujun orang menudju ke KPPS-nja masing2. Belum sampainja pemilihan anggauta2 DPR, boleh dipastikan orang-lebih2 dari partai2 dan organisasi2-akan berebut pengaruh terhadap pemilih2 jang terpilih itu, untuk mendapatkan kursi*

sebanjakbanjaknja. (Uji Nugroko, dkk, 2018. Hlm.102)

Bahkan lebih lanjut koran Kedaulatan Rakyat menurunkan berita yang menggambarkan suasana pada saat hari pemungutan suara pada 27 Agustus 1951 dengan penuh heroisme sebagai berikut:

> *Dapur-dapur mendjadi kapiran. Nampak soal ini sama sekali tidak dipikirkan lebih dahulu, sama sekali orang tidak menjangka, bahwa pada hari pemilihan itu, pasar-pasar mendjadi sepi...Njonja rumah jang turut mendjadi pemilih umum, pagi-pagi harus sudah berangkat, sampai lepas tengah hari baru pulang, hingga persiapan medja makan....terlambat.*
>
> *Tetapi ini pun masih untung, kalau Njonja rumah dimadjukan sebagai tjalon pemilih ia baru pulang setelah malam mendjadi gelap. Oleh sebab itu, meskipun baginja tidak kapiran, sebab ditempat pemilihan umum itu mendapat djamuan, tetapi rumah tangganya benar-benar mengalami vacuum.....Sekalipun Njonja rumah tinggal dirumah, dapur pun mendjadi dingin, sebab segala bahan lauk pauk tidak bisa didapatkan, pasar hampir kosong...*
>
> *…Suasana pada pagi di dalam kota terasa kelihatan sepi dari pada biasanja. Mobil2 tidak banjak jang berkeliaran. Pendjual dalam pasar Bringhardjo diantaranja agak kurang daripada hari2 kainnja. Tapi makin siang makin ramailah lagi seperti biasa. Sekolah2 SM kebawah banjak tutup, tetapi SMA buka terus. (Hlm. 118)*

Antusiasme terhadap demokrasi elektoral yang ditunjukkan oleh masyarakat Yogyakarta tidak hanya muncul pada saat menyambut Pemilu pertama di tahun 1951, melainkan empat tahun kemudian atau tepatnya pada Pemilu nasional pertama 1955 warga Yogyakarta juga nampak sama antusiasnya. Hasil laporan Kedaulatan Rakyat, sebagaimana dikutip oleh Wildan Sena Utama dalam buku Jogja Memilih disebutkan bahwa partisipasi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat hari pemungutan suara cukup luar biasa. (Ugi Nogroho, 2018. Hlm. 171).

> *Di sepanjang jalan-jalan utama di kota Yogyakarta pada saat hari pemilihan 29 September 1955 keadaannya sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Sedikit sekali sepeda dan kendaraan bermotor yang berseliweran di jalan raya. Di terminal bis kondisinya tidak jauh berbeda, meskipun masih ada bis-bis yang beroperasi. Di Stasiun Tugu situasi pagi hari tanggal 29 September 1955 benar-benar sepi.*

Kereta api jurusan Yogyakarta I Jakarta I Bandung yang berangkat jam 07.05 pagi terdiri atas lima gerbong untuk Bandung dan tujuh gerbong untuk Jakarta yang biasanya bisa memuat sampai 800 orang, hanya terisi sekitar 26 orang saja. Kereta api cepat Yogyakarta ke Jember yang berangkat jam 06.45 yang biasanya memuat sekitar 200 orang hanya terisi 19 penumpang saja dan kereta Yogyakarta-Solo yang berangkat jam 07.30 yang biasanya terisi 80 penumpang hanya terisi 13 penumpang.

Sebagian besar kantor-kantor pemerintahan tutup, kecuali kantor-kantor penting, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, ketentaraan, kantor PTT, dan lain-lain. Toko dan pasar-pasar tutup melayani pembeli dari pagi sampai siang hari, namun beberapa toko yang menjual obat-obatan seperti apotek, buka sore hari. Suasana yang hening akibat pemilu bisa terlihat di sepanjang Jalan Malioboro dan Pasar Beringharjo yang sepi karena toko-tokonya tutup dan jalanannya hanya sedikit dilewati oleh orang-orang yang berseliweran.

Dari dokumen-dokumen sejarah di atas menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta sejak awal sudah cukup responsif terhadap penyelenggaraan Pemilu. Baik pada Pemilu pertama 1951 yang hanya berskala lokal maupun Pemilu pertama nasional pada 1955 tampak masyarakat Yogyakarta cukup antusias untuk berpartisipasi hadir ke TPS. Kesuksesan partisipasi ini ternyata tidak hanya di awal-awal masa pasca kemerdekaan di mana pembangunan kelembagaan demokrasi di Indonesia masih dibilang sangat baru. Melainkan di era berikutnya, terutama pasca reformasi, partisipasi Pemilu masyarakat Yogyakarta senantiasa menunjukkan angka yang tinggi. Dengan tanpa memperhitungkan Pemilu di era orde baru karena saat itu Pemilu bagi banyak orang dipandang kurang demokratis karena diselenggarakan di bawah tekanan rezim yang otoriter, maka Pemilu Presiden langsung pasca reformasi yang dimulai pada tahun 2004 sampai dengan Pemilu serentak 2019 lalu, di Yogyakarta selalu menunjukkan capaian angka yang tinggi dan berada di atas rata-rata capaian nasional.

PEMILU	DIY	NASIONAL
Pileg 2004	84,13 %	84,00 %
Pilpres 2004	80,93 %	78,00 %
Pileg 2009	72,94 %	70,96 %
Pilpres 2009	75,97 %	72,55 %
Pileg 2014	80,2 %	72,97 %

Pilpres 2014	79,84 %	70,91 %
Pileg 2019	88,38 %	81,69 %
Pilpres 2019	89,67 %	81,97 %

Tingkat Partisipasi Pemilu langsung di DIY

Fenomena ini, bagi sebagian orang mungkin dipandang paradoks. Betapa tidak, di sebuah daerah yang konon dikenal masih cukup kuat memegang nilai-nilai dan budaya kerajaan yang notabene bersifat oligarkhis dan feodal tersebut bisa terselenggara Pemilu pertama di Indonesia. Bukan hanya itu, sedari awal penyelenggaraan Pemilu di daerah tersebut juga selalu mendulang partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Tapi justru di situlah letak keistimewaannya, budaya Jawa yang sangat menghargai *gotong royong, tepo sliro* dan *tata tentrem kerta raharja* justru menjadi modal sosial bagi terwujudnya kultur partisipasi di dalam masyarakat Yogyakarta. Tidak hanya itu, berdirinya banyak kampus yang notabene diikuti oleh kehadiran banyak kaum terdidik di Yogyakarta secara tidak langsung juga turut membentuk dan memperkuat watak watak sosial masyarakat Yogyakarta yang partisipatif, termasuk dalam soal Pemilu.

Partisipasi sebagai Watak Sosial Masyarakat Yogyakarta

Substansi dan tujuan utama pemilu sejatinya adalah untuk memfasilitasi hak masyarakat dalam menentukan kepemimpinan sebuah bangsa. Atau dengan kata lain, sejauh mana kualitas pemimpin sebuah bangsa akan ditentukan oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan umum yang terbuka, jujur dan adil. Karena itulah, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Artinya, partisipasi masyarakat menjadi unsur pokok dan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, pemilu tentu menjadi tidak bermakna dan kehilangan relevansinya sebagai alat kedaulatan rakyat. Tentu partisipasi di sini bukan semata-mata diwujudkan dalam bentuk kehadiran pemilih untuk memberikan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara), melainkan lebih dari itu juga keterlibatan aktif mereka dalam setiap tahapan pemilu.

Dalam sejarah Pemilu langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta, partisipasi dalam bentuk kehadiran pemilih ke TPS selalu menunjukkan angka yang tinggi. Fenomena ini, sebagaimana telah disebutkan di bagian awal tulisan ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari watak sosiologis dan antropologis masyarakat Yogyakarta itu sendiri yang secara kultural memang bersifat partisipatif. Bukan hanya dalam soal pemilu, dalam banyak even dan kegiatan sosial budaya lainnya, partisipasi

jdih.kpu.go.id

masyarakat Yogyakarta selalu menunjukkan antusiasme yang tinggi. Bila malam hari, misalkan, kita masih bisa dengan mudah menyaksikan orang-orang yang nongkrong di pos-pos ronda. Meskipun di tengah kesibukan dunia modern yang cukup dinamis ini, masih banyak orang yang lek-lek'an (bergadang) untuk menjaga kondisi keamanan kampung. Begitu juga saat hari minggu pagi, di kampung-kampung masih kerap kita jumpai kegiatan gotong royong yang melibatkan seluruh warga untuk tujuan bersama, seperti bersih-bersih desa, memperbaiki jalan kampung, maupun untuk acara hajatan seperti perkawinan dan sebagainya.

Selain itu, budaya partisipatif masyarakat Yogyakarta juga ditunjukkan oleh maraknya tradisi dan upacara adat serta kebudayaan yang diselenggarakan oleh masyarakat Yogyakarta. Mulai dari upacara yang berskala besar seperti grebeg maule (memperingati mauled Nabi Muhammad), grebeg suro (memperingati tahun baru Hijriyah), grebeg gede (memperingati lebarah haji/idul adha), dan sebagainya, hingga upacara-upacara yang berskala kecil seperti merti-merti desa dan dusun serta kenduri-kenduri budaya yang diselenggarakan di kampung-kampung. Semua upacara tersebut secara kultural turut memperkuat watak partisipatif dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta.

Tentu saja semua tradisi dan budaya tersebut di atas tidak bisa dilepaskan dari kuatnya pengaruh etika Jawa dalam masyarakat Yogyakarta. Dalam etika Jawa, prinsip-prinsip *tata tentrem kerto raharjo, gotong royong, guyub, rukun, tepo sliro,* dan sebagainya telah membentuk perilaku sosial masyarakat Yogyakarta yang partisipatif. Selain itu, budaya patronase yang masih kuat dalam struktur masyarakat Yogyakarta juga turut membentuk budaya partisipasi ini. budaya patronase ini dalam beberapa hal mungkin banyak dimaknai secara negatif, namun untuk beberapa hal bisa bermakna positif. Misalnya dalam Pemilu, tidak sedikit masyarakat yang hadir ke TPS itu bukan semata-mata ingin memilih, melainkan karena ada rasa tidak enak atau sungkan pada ketua KPPS yang kebetulan sebagai Kepala Dusun/Dukuh atau ketua RW/RT. Dalam konteks ini, patronase yang direpresentasikan oleh ketokohan seorang Kepala Dusun yang menjadi petugas KPPS telah mendorong seseorang untuk hadir ke TPS. Karena dalam struktur masyarakat Yogyakarta, khususnya di kawasan pedesaan, posisi kepala Dusun atau RW/RT masih memiliki pengaruh sosial budaya yang cukup kuat. Sehingga apapun even di kampung tersebut, bila terdapat Dukuh atau RW/RT maka partisipasi warga akan tinggi, termasuk dalam hal ini Pemilu.

Sampai di sini, kami memahami Pemilu di Yogyakarta kemudian terselenggara bukan semata-mata sebagai event politik prosedural, melainkan juga telah menjelma, dalam beberapa kasus, sebagai kegiatan budaya yang secara antropologis tidak jauh berbeda dengan budaya-budaya lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat Yogyakarta seperti *grebeg, merti* dusun, dan sebagainya. Sehingga

jdih.kpu.go.id

partisipasi masyarakat Yogyakarta dalam Pemilu selalu menunjukkan grafik yang stabil tinggi dan bahkan di atas rata-rata partisipasi nasional, karena memang masyarakat Yogyakarta sudah sangat terbiasa dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya apapapun yang positif di lingkungannya.

Tantangan Partisipasi: dari Kuantitatif Menuju Kualitatif

Sebagaimana sudah diuraikan di atas, bahwa partisipasi dalam arti kehadiran pemilih di TPS dalam setiap Pemilu di Yogyakarta bukanlah menjadi problem utama lagi, setidaknya sampai dengan Pemilu 2019 lalu. Yang justru menjadi tantangan bagi KPU DIY saat ini adalah lebih pada mutu dan kualitas dari partisipasi itu sendiri. Karena bagi kami, mengukur partisipasi Pemilu semata-mata dari segi kuantitas yang dicerminkan oleh angka-angka agregat tidaklah cukup untuk membangun dan memperkuat konsolidasi demokrasi, melainkan jauh lebih dalam dari itu juga perlu mengupayakan agar demokrasi elektoral bisa berjalan secara baik dan berkualitas. Karena Pemilu itu sejatinya hanyalah instrumen untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa ini, yaitu kehidupan masyarakat yang tertib, sejahtera, aman sentosa. Dan cita-cita itu bisa terwujud bila partisipasi masyarakat dalam Pemilu berjalan secara beriringan antara kuantitatif dan kualitatif. Namun bila yang berjalan hanya capaian kuantitatif saja, maka tidak menutup kemungkinan demokrasi hanya bersifat prosedural dan seremonial belaka, sedangkan tujuan utama dari demokrasi itu sendiri tertinggal jauh dari gerbong demokrasi yang bernama Pemilu.

Oleh sebab itu, berbicara soal tantangan partisipasi, bagi KPU DIY dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya, tidak lagi sekedar seputar strategi meningkatkan angka kehadiran pemilih di TPS, melainkan lebih dari itu juga menyasar pada perilaku pemilih dalam mengartikulasikan hak-hak politiknya dalam menyambut dan melaksanakan Pemilu. Hasil riset yang dilakukan oleh PolGov Fisipol UGM kerjasama dengan KPU DIY pasca Pemilu 2019 lalu menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat Yogyakarta dalam politik elektoral justru cukup mengkhawatirkan. Gesekan dan konflik sosial hampir selalu mewarnai partisipasi elektoral masyarakat Yogyakarta dalam setiap Pemilu. Tak heran bila menjelang Pemilu 2019 lalu, Bawaslu mengeluarkan rilis indeks kerawanan Pemilu dengan menempatkan Yogyakarta sebagai urutan ke dua paling rawan setelah Papua. Begitu pula POLRI dalam analisis keamanan menjelang Pemilu 2019 lalu juga mengeluarkan rilis yang menempatkan Kota Yogyakarta sebagai salah satu di antara 10 kota rawan dalam Pemilu 2019.

Berdasarkan atas sejumlah peristiwa dan gesekan sosial selama masa Pemilu dari waktu ke waktu tersebut setidaknya perlu dipikirkan upaya peningkatan kualitas partisipasi bagi masyarakat Yogyakarta dalam melaksanakan Pemilu. Karena itulah KPU DIY berkerjasama dengan Fisipol UGM berusaha memetakan kualitas partisipasi masyarakat Yogyakarta dalam Pemilu 2019 lalu. Dari penelitian yang dilakukan, setidaknya ada dua variabel yang memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat Yogyakarta dalam Pemilu, yaitu: Pertama, faktor demografi (usia dan gender). Dalam wawancara yang dilakukan melalui metode FGD terhadap sejumlah pemangku kepentingan seperti partai politik, penyelenggara Pemilu, dan beberapa mantan Caleg, ditemukan fakta bahwa corak dan kecenderungan partisipasi masyarakat Yogyakarta dalam Pemilu sangatlah bervariasi. Namun di antara variasi bentuk dan corak tersebut, anak muda dan kelompok perempuan termasuk yang cukup aktif. Anak-anak muda, misalnya, mereka cukup aktif dalam merespon dan berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Partisipasi mereka ini terbagi ke dalam dua kategori, pertama partisipasi secara *online* dan kedua partisipasi di dalam dunia nyata *(offline)*.

Partisipasi secara *online* ditunjukkan dengan keaktifan mereka mengikuti dan mendistribusikan beberapa informasi menyangkut Pemilu, peserta Pemilu atau calon yang disebarkan melalui media sosial, seperti twitter, instagram, facebook, maupun aplikasi chatting. Sedangkan partisipasi di dalam dunia nyata (*offline*) ditunjukkan dengan keikutsertaan anak muda Yogyakarta dalam kampanye-

kampanye yang diorganisir oleh peserta Pemilu. Namun celakanya, di dalam kedua partisipasi tersebut, anak muda banyak yang terjebak pada partisipasi yang kurang berkualitas. Untuk partisipasi *online* misalkan, tidak sedikit anak muda Yogyakarta yang terjebak pada ujaran kebencian dan berita bohong (hoax) yang memang cukup marak persebarannya di Pemilu 2019 lalu. Sedangkan dalam partisipasi *offline*, banyak juga anak muda Yogyakarta yang cukup aktif mengikuti konvoi-konvoi kampanye yang melanggar ketertiban umum, misalkan tidak pakai helm, knalpot blombongan, hingga tidak patuh pada rambu-rambu lalu lintas.

Keterlibatan anak muda dalam kampanye yang diwarnai ketidak tertiban dan sesekali juga melakukan tindak kekerasan-, sebenarnya, menurut investigasi tim riset Fisipol UGM, disebabkan oleh adanya pengaruh *geng* atau laskar yang secara sosiologis memang sudah cukup lama bermunculan di Yogyakarta. Melalui *geng* dan *lascar* ini pula sebagian anak muda Yogyakarta merasa terwadahi artikulasi sosialnya. Karena itulah, banyak anak-anak muda Yogyakarta yang bergabung ke sejumlah *geng-geng* dan laskar-laskar tersebut. Bahkan bisa dikatakan, organisasi *geng* dan *lascar* sebagian besar anggotanya adalah anak muda. Melihat potensi politik dari *geng* dan *laskar* ini, maka elit-elit politik di Yogyakarta kemudian merangkul dan menggandeng mereka. Tujuannya jelas yaitu untuk kepentingan *elektoral*. Begitu pula aktifis *geng/laskar* juga merasa diuntungkan bila berafiliasi dengan organisasi politik semacam Parpol. Selain sebagai backup politik bila terjadi sesuatu, elit politik juga tentu bisa dijadikan sumber logistik untuk aktivitas mereka. Di sinilah terjadi simbiosis-mutualistik antara elit politik dengan aktifis *geng/laskar.* Tak heran di Yogyakarta ini tidak sedikit elit politik yang (di)(men) jadi(kan) sebagai pimpinan bagi sejumlah *geng/laskar* tersebut.

Selain anak muda, kelompok masyarakat yang juga aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2019 lalu, masih menurut riset Fisipol UGM, adalah kaum perempuan atau yang kemudian dikenal dengan sebutan *"emak-emak".* Sama seperti halnya anak muda yang tergabung dalam *geng/laskar* yang kemudian menjadi underbouw partai, temuan riset Fisipol UGM juga menunjukkan bahwa gerakan *emak-emak* merupakan gerakan organik dari bawah. Kemunculan gerakan emak-emak dalam pemilu tidak terlepas dari faktor figur kandidat dan kehadiran media sosial. Gerakan emak-emak banyak muncul di kubu pasangan calon 02 karena faktor Sandiaga Uno sebagai kandidat. Sandiaga Uno yang dianggap muda dan rupawan mampu menarik perhatian emak-emak dan menggerakannya dalam pemilu. Selain itu, kehadiran media sosial terutama facebook dan instagram yang banyak digunakan oleh emak-emak, juga menjadi pendorong aktivisme emak-emak. Sifat emak-emak yang suka membagikan foto dan video dalam setiap momen pemilu, mengamplifikasi popularitas kandidat. Partisipasi pemilih seperti emak-emak ini dikenal militan dalam mendukung kandidat baik dalam proses kampanye maupun dalam preferensi pilihan. (Karim, 2019).

Faktor kedua yang memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat Yogyakarta dalam Pemilu 2019 lalu adalah jenis dan sistem pemilu. Hasil riset FISIPOL UGM menunjukkan bahwa tingkat persaingan dalam pemilihan legislatif lebih tinggi dibandingkan pemilihan eksekutif. Hal ini tidak terlepas dari kompleksitas pemilu dan penggunaan sumber daya oleh kandidat. Pemilihan legislatif dinilai memiliki kompleksitas yang tinggi karena kandidat tidak hanya bersaing dengan kandidat lain di luar partai namun juga kandidat lain di internal partai. Untuk mengalahkan pesaingnya, baik dari luar maupun internal partai, kandidat mengerahkan sumber daya yang dimiliki baik ekonomi maupun sosial. Salah satu sumber daya penting kandidat adalah kepemilikan dan penggunaan "geng". Geng tertentu bahkan sangat melekat dengan kandidat tertentu dibandingkan dengan partai politik. Penguasaan geng oleh kandidat ini menjadi penting tidak terlepas dari sistem pemilu proporsional terbuka yang mengedepankan figur dan tidak bekerjanya mesin partai. (Karim, 2019).

Berdasarkan atas hasil riset FISIPOL UGM di atas, KPU DIY merasa perlu untuk mengevaluasi kembali paradigma dan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang selama ini telah dikembangkan oleh KPU. Perubahan paradigm *(sifthing of paradigm)* dari partisipasi kuantitatif menuju kualitatif tampaknya sudah harus mulai menjadi fondasi utama bagi program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU. Setelah tahap konsolidasi demokrasi negeri ini mulai masuk ke tahap yang lebih stabil dan matang, maka target kuantitatif harusnya sudah cukup sehingga kita bisa memperkuat pada target kualitatif. Karena bila secara prosedural Pemilu kita secara teknis sudah tertata rapi dan berhasil mendulang partisipasi yang tinggi, namun soliditas serta solidaritas sosial sosial di masyarakat mengalami erosi yang cukup dalam, maka apalah artinya kita menyelenggarakan Pemilu. Bukankah Pemilu itu untuk membentuk kepemimpinan yang kuat dan adanya kepemimpinan yang kuat diharapkan akan melahirkan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat?

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah ruh utama Pemilu itu sendiri. Tanpa partisipasi masyarakat, Pemilu bisa terjebak menjadi sekedar ritualitas demokrasi yang penuh hingar bingar yang menghabiskan biaya besar. Namun semata-mata menjadikan angka partisipasi sebagai target utama Pemilu tentu akan menjauhkan substansi Pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat. Di sinilah perlunya penyeimbangan target partisipasi antara kuantitatif dan kualitatif. KPU

jdih.kpu.go.id

sebagai Penyelenggara Pemilu tentu tidak hanya bertanggung jawab atas tingginya angka partisipasi pemilih yang hadir ke TPS, melainkan juga perlu memastikan bentuk dan perilaku pemilih dalam berpartisipasi tersebut tidak didasarkan atas mobilisasi sesuatu di luar kehendaknya, melainkan betul-betul berdasarkan kedaulatan hakiki yang dimiliki oleh dirinya sebagai manusia Indonesia yang bebas, mandiri dan berdaulat untuk menentukan arah dan masa depan bangsa Indonesia. Di sinilah relevansinya kenapa KPU mengeluarkan adagium : "Pemilih Berdaulat, Negara Kuat".

Daftar Pustaka

Abdul Gaffar Karim, dkk, 2019. *Peta Kerawanan Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta.* Yogyakarta: FISIPOL UGM.

Uji Nugroho W, dkk, 2018. *Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta.* Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.

jdih.kpu.go.id

Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU D.I Yogyakarta

Kiprah Relawan Demokrasi dalam Pemilu 2019 di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah

Oleh: Apnizal
Anggota KPU Provinsi Jambi

Abstrak

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis di kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal. Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu; basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Relasi akan dibentuk disetiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Tantangan pemilu di Indonesia semakin kompleks dari pemilu ke pemilu. Tantangan tersebut meliputi, pelaksanaan pemilu serentak, beban kerja penyelenggara pemilu, apatisme pemilih, kerumitan pemilu di Indonesia dan isu hoax dan politik identitas. Program Relasi dilatarbelakangi oleh tingkat partisipasi pemilih yang cenderung menurun, empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu yaitu pemilu 1999 (93%), pemilu 2004 (84,1%), pemilu 2009 (70,9%), pemilu 2014 (75,11%). Tren menurunnya partisipasi menjadi tantangan bagi KPU bagaimana meningkatkan partisipasi di Pemilu 2019 dalam menjawab tantangan-tantangan pemilu yang ada, untuk itu artikel ini menjelaskan apa faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi pemilih dan bagaimana strategi Relasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2019 di Provinsi Jambi.

Kata kunci: relawan demokrasi, Pemilu 2019, partisipasi masyarakat

Latar Belakang

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini diserahi mandat kedaulatan rakyat untuk mengurusi negara. Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sedangkan menurut Praktikno pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengonversi suara rakyat menjadi wakil rakyat.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah,serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berdasarkan pengertian diatas, peran publik, pemilih dan warga negara tidak bisa diabaikan. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum adalah salah satu faktor untuk menilai sejauh mana kualitas pemilu itu diselenggarakan. Partisipasi tidak sekedar persoalan seberapa tinggi tingkat pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik suara, tetapi juga sejauh mana penggunaan hak pilih tersebut dilakukan atas kesadaran sebagai pemilih.

Salah satu hal yang selalu ditunggu dan dihitung selain hasil pemilu adalah angka partisipasi pemilih di dalam penyelenggaraan pemilu. Angka partisipasi pemilih, setidaknya akan menggambarkan sejauh mana partisipasi politik warga dalam kontestasi suatu pemilu. Jika ingin dilihat dari sisi lain, angka partisipasi pemilih ini juga akan menjelaskan kekuatan legitimasi dari orang yang terpilih melalui proses pemilu yang dilakukan. Karena pada hakikatnya, proses pemilu adalah bentuk penyerahan mandat dari pemilih kepada yang dipilih, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Berangkat dari itu, tingkat partisipasi pemilih mestinya menjadi entitas penting yang mesti dijaga dan ditingkatkan di dalam penyelenggaraan pemilu. Mengapa peningkatan angka partisipasi pemilih menjadi penting untuk diupayakan? Sebab tingginya angka partisipasi pemilih menjadi potret pelaksanaan demokrasi yang

berkualitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau *voter turn out*, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu.

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5 persen. Ini tantangan berat bagi penyelenggara pemilu dan stakeholders terkait. Tidak mudah menaikkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS bukan saja ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Jauh lebih berpengaruh dari itu adalah kualitas peserta pemilu, termasuk daftar calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Karena itu, partisipasi pemilih dalam pemilu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai politik dan rekam jejak calon/kandidat.

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, yaitu pemilu 1999 (93%), pemilu 2004 (84,1%), pemilu 2009 (70,9%), pemilu 2014 (75,11%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (*voluntarisme*) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.

Pemilu 2019 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi pemilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya.

Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara. Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

KPU sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemilu terus berupaya agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Ukuran keberhasilan pemilu di Indonesia sesungguhnya sangat sederhana. Pemilu bisa dianggap sukses besar jika pelaksanaannya berjalan luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur dan adil) serta tingkat partisipasinya tinggi. Hal yang tidak sederhana adalah mengamankan agar asas pemilu tersebut bisa terpenuhi.

Bila asas Luber dan Jurdil bisa berlangsung dengan baik, maka ukuran berikutnya adalah pencapaian tingkat partisipasi warga (Supriyono, 2014:47).

Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis (*schumpetrian*), pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi antara actor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga Negara.

Pemilu juga memberikan ruang keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpinannya. Pemimpin yang akan menentukan nasib rakyat melalui kebijakan hukum yang sah. Oleh karenanya, para penyelenggara Negara merupakan pengemban mandate rakyat untuk memastikan kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak rakyat. Sebagai sarana untuk melakukan siklus pergantian pemimpin dan membentuk pemerintahan yang berkualitas, dalam pemilu masyarakat berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Oleh karena itu hal ini yang kemudian memunculkan konsekuensi makna pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Partisipasi pemilih sejak Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2019 bergerak fluktuatif. Pada setiap pemilihan terjadi penurunan sekitar 10% untuk Pemilu Legislatif yang terjadi sampai dengan Pemilu 2009, untuk tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 5%. Sedangkan untuk Pilpres pada 2014 tingkat partisipasi pemilihnya lebih rendah dibandingkan dengan Pileg.

Tingkat Partisipasi Pemilih Pileg

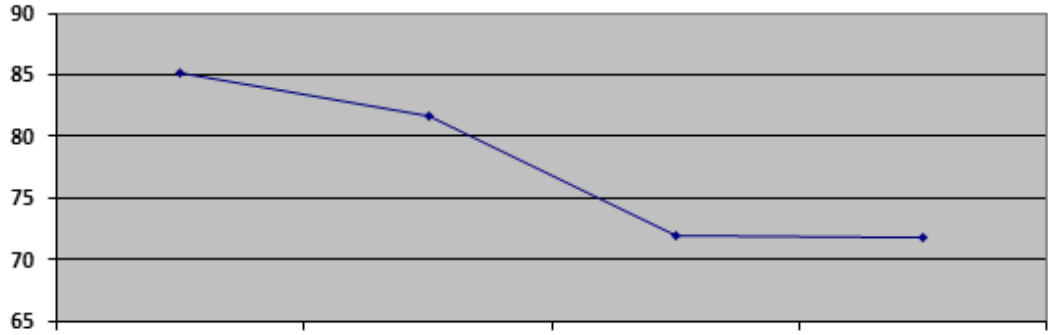

sumber : partisipasi pemilih dalam pemilu 2014, KPU

Tingkat Partisipasi Pemilih Pilpres

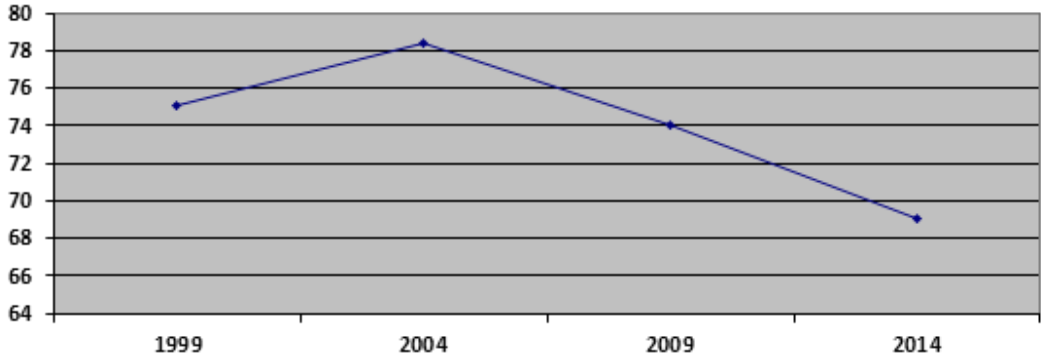

sumber : partisipasi pemilih dalam pemilu 2014, KPU

Partisipasi selalu menjadi bagian penting dalam pemilu sekaligus menjadi tantangan kerja bagi penyelenggara pemilu. Tiga kali pemilu paska-reformasi menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat partisipasi pemilih. Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih berada dikisaran 92,6%. Penurunan tingkat partisipasi terjadi pada Pemilu 2004 yang ada pada kisaran 84,1%. Demikian juga pada Pemilu 2009, penurunan tingkat partisipasi terjadi, dimana hanya 70,9%. Jika diperhatikan terjadi tingkat penurunan yang konstan di kisaran 8-10%. Peningkatan tingkat partisipasi memang terjadi pada pemilu 2014, sebanyak 75,1% pemilih menggunakan hak pilihnya. Namun angka tersebut masih di bawah tingkat partisipasi Pemilu 2004 dan 1999.

Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD & Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Partisipasi Pemilih dari Pemilu Tahun 2004 – 2019 di Jambi

Pemilu DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Jambi		**Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Jambi**	
Tahun	Partisipasi %	Tahun	Partisipasi %
2004	78,58 %	2004	78,58 %
2009	74,57 %	2009	74,08 %
2014	77,25 %	2014	70,58 %
2019	85,13 %	2019	85,27%

Berdasarkan data di atas tingkat partisipasi masyarkat di Provinsi menurun dari Pemilu 2004 – 2014, khusus Pemilu Legislatif 2014 sempat naik diangkat 77,25% namun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden justru menurun sampai dititik terendah 70,58%. Peningkatan tajam terjadi pada Pemilu Serentak 2019 menjadi sekitar 85%. Peningkatan ini mengindikasikan peran Relasi sangat efektif

meningkatkan partisipasi pemilih.

Faktor penyebab tingkat partisipasi masyarakat menurun

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Pacitan yang bisa dijadikan rujukan, penyumbang rendahnya partisipasi pemilih rendah jika digolongkan berdasarkan kelompok usia, maka pemilih pemula dan pemilih muda menjadi penyumbang terbesar golput. Jumlahnya mencapai angka 35,1% dibandingkan kelompok usia lain seperti pemilih dewasa dan pemilih lanjut usia. Sedangkan untuk kehadiran pemilih berdasarkan kategori pekerjaan, maka pelajar atau mahasiswa menjadi penyumbang terbesar golput sebesar 24,71% jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain seperti petani dan nelayan, pengusaha atau wiraswasta, dan PNS. Begitu juga untuk partisipasi pemilih berdasarkan kategori pendidikan, maka kategori tamat SMA menjadi penyumbang terbesar golput sebesar 19,66% dibandingkan dengan tingkat pendidikan lain seperti tidak lulus SD atau lulus SD, Tamat SMP dan Tamat Sarjana. Dari keterangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok pemilih muda, pelajar/mahasiswa, dan tamat SMA menjadi penyumbang terbesar golput. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa pemilih millenial menjadi penyumbang terbesar golput dalam pemilu.

Hasil wawancara dengan Desy Arianto, Komisoner KPU Kabupaten Sarolangun 2 periode tahun 2003–2013, Komisioner KPU Provinsi Jambi Tahun 2013-2018, dan sekarang sebagai Pembina Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi, ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya angka partisipasi pemilu baik secara nasional maupun di daerah. Pertama golput ideologis disebabkan karena adanya paham keagamaan anti demokrasi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik (pemerintahan dan partai politik) yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, dan masyarakat sudah kehilangan harapan pada calon-calon legislatif maupun anggota DPR. Kedua adalah golput teknis yaitu masyarakat tidak berpartisipasi karena faktor tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT).

Sedangkan menurut Apnizal Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Barat selama dua periode tahun 2008-2018 yang sekarang sebagai Komisioner KPU Provinsi Jambi Divisi Sosialisasi penyebab menurunnya angka partisipatif pemilu adalah 3 faktor: pertama faktor non teknis yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat terkait pentingnya pemilu, sehingga pada saat mereka tidak terdaftar dalam DPT mereka juga tidak peduli. Kedua faktor teknis yaitu tidak validnya data kependudukan dan diperparah dengan tidak maksimalnya pekerjaan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), kondisi geografis yang susah dijangkau dan cuaca buruk saat hari pencoblosan. Faktor ketiga yaitu faktor politis dimana masyarakat sudah apatis tidak percaya lagi kepada calon peserta pemilu karena bermasalah seperti terlibat korupsi, banyak pelanggar dan tidak mempunyai visi misi yang jelas. Khusus untuk pemilih pemula, kebanyakan masih

menganggap pemilu itu menyulitkan. Kurangnya sosialisasi tentang pemilu, serta ketidaktahuan pemilih pemula tentang partai politik dan calon-calon anggota legislatifnya acapkali menyulitkan mereka untuk memilih.

Relawan Demokrasi

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis di kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program Relawan Demokrasi (Relasi) pertama kali digagas oleh KPU pada Pemilu 2014, program ini merupakan respon atas semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih dan sekaligus merupakan strategi baru baru dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Relasi pada Tahun 2014 hanya dibagi dalam 5 segmen pemilih strategis yaitu: pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran.

Program Relasi Pemilu 2019 mengalami pelebaran segmen, berdasarkan Pasal 5 (1) huruf a PKPU No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU menjadikan pemilih berbasis sebagai sasaran utama. Pemilih berbasis artinya pemilih yang memiliki basis, jaringan yang luas atau komunitas, meliputi: basis keluarga; pemilih pemula; pemilih muda; pemilih perempuan; pemilih penyandang disabilitas; pemilih berkebutuhan khusus; kaum marjinal; komunitas; keagamaan; relawan demokrasi; dan warga internet (*netizen*).

Berdasarkan pembagian basis tersebut menuntut KPU harus mampu berkreasi dan menemukan instrumen pendidikan politik dan sosialisasi pemilu yang kreatif, efektif, menyenangkan dan kekinian. Istilah yang dikenal sekarang sosialisasi zaman Now/*electiontainment*. Relasi yang dibentuk oleh KPU tingkat kabupaten/kota merupakan salah satu jawaban sosialisasi pemilu zaman Now. Mereka melakukan sosialisasi berdasarkan basis mereka masing-masing, sehingga sosialisasi lebih mudah ditangkap oleh anggota komunitasnya.

Strategi Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 di Provinsi Jambi

Program Relawan Demokrasi di Provinsi Jambi melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu: 1. basis keluarga, 2. basis pemilih pemula, 3. basis pemilih muda, 4. basis pemilih perempuan, 5. basis penyandang disabilitas, 6. basis pemilih berkebutuhan khusus, 7. basis kaum marginal, 8. basis komunitas, 9. basis keagamaan, 10. basis warga internet dan 11. basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya.

Jumlah relawan demokrasi maksimal 55 (lima puluh lima) orang yang mewakili keseluruhan basis pemilih dengan ketentuan setiap basis pemilih terdiri dari minimal 4 (empat) orang relawan. Relasi bekerja selama 3 bulan mulai bulan Februari sampai dengan April 2019. Sebelum menjalankan tugasnya, relawan demokrasi diwajibkan mengikuti *Training of Trainer* (ToT) dengan materi: 1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi. 2. Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis. 3. Kode etik relawan. dan 4. Teknik-teknik berkomunikasi publik. Setelah lolos ToT, tugas relawan demokrasi menyampaikan materi tersebut diatas yang telah disusun dalam sebuah modul kepada basis masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya Relawan Demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain: a. Simulasi. b. Bermain peran. c. Diskusi kelompok. d. Ceramah. e. Alat bantu (visual dan non visual). dan f. Posting materi sosialisasi ke media sosial. Mekanisme kegiatan relawan demokrasi meliputi: a. Memetakan varian kelompok sasaran (*mapping*). b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran. c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan. d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain. e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal. f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Berikut dijelaskan peran Relasi di 11 kabupaten/kota yang telah dihimpun berdasarkan hasil wawancara dengan Komisoner KPU dan Relasi. Pada prinsipnya semua Relasi di 11 kabupaten/kota melaksanakan kegiatan sosialisasi di semua (11) basis masyarakat, namun karena keterbatasan halaman artikel maka akan dijelaskan kegiatan Relasi satu kabupaten satu basis masyarakat:

Kabupaten Sarolangun

Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok

lain yang terpinggirkan. Relawan Demokrasi Basis Kebutuhan Khusus Kabupaten Sarolangun fokus kepada masyarakat terpencil seperti Suku Anak Dalam, yakni: 1. Suku Anak Dalam di Desa Lubuk Jering Kec. Air Hitam, 2. Suku Anak Dalam di Desa Pematang Kabau Kec. Air Hitam, 3. Suku Anak Dalam di Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam.

Jumlah Peserta pada saat 3 kali kegiatan dihadiri oleh ±50 orang setiap satu kali pertemuan. Waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi: pertama pada Hari Minggu Tanggal 17 Februari 2019 di Desa Lubuk Jering, sosialisasi kedua pada Hari Kamis Tanggal 07 Maret 2019 di Desa Pematang Kabau, sosialisasi ketiga pada Hari Minggu Tanggal 31 Maret 2019 di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam.

Kabupaten Batang Hari

Relawan Demokrasi Basis Pemilih Pemula, kelompok sasarannya adalah Siswa/i SLTA sederajat dalam Kabupaten Batang Hari yang telah berusia 17 tahun pada saat pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. Adapun langkah awal yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi basis pemilih pemula untuk melaksanakan sosialisasi adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah baik dalam bentuk surat maupun menemui pimpinan, guru bidang kesiswaan atau pengurus sekolah lainnya untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan sosialisasi di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi Pemilu Tahun 2019.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh relawan demokrasi pemilih pemula dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Siswa/i Kelas XII SMK N 1 Batang Hari, Aula SMK N 1 Batanghari , Jumat, 8 Februari 2019
2. Siswa/i Kelas XII SMA N 10 Batang Hari, Aula SMA N 10 Batanghari, Selasa, 12 Februari 2019
3. Siswa/i Kelas XII SMK N 5 Batang Hari, Aula SMK N 5 Batanghari, Kamis, 14 Februari 2019
4. Siswa/i Kelas XII MAN 1 Batang Hari, Aula MAN 1 Batanghari, Jumat, 15 Februari 2019
5. Anggota PMII Kabupaten Batang Hari, Gedung BPLS Muara Bulian, Minggu, 17 Februari 2019.

jdih.kpu.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Relasi Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke ibu-ibu arisan, perkumpulan rutin tingkat RT/RW, desa/kelurahan, contohnya:

1. Sosialisasi di Kantor Desa Parit Pudin, selasa 12 Februari 2019, sasaran keluarga PKH
2. Sosialisasi di Desa Parit Pudin Dusun Pudin Pasar, Rabu 13 Februari 2019, sasaran ibu-ibu PKH
3. Sosialisasi di Desa Parit Pudin Dusun Parit Cagat, Kamis 21 Februari 2019, di keluarga PKH
4. Sosialisasi di Dusun Parit Panglong Desa Mekar Jaya, minggu 10 maret 2019, di keluarga PKH

Kabupaten Bungo

Basis Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas di Kabupaten Bungo memiliki perkumpulan dan telah terdaftar sebagai Lembaga resmi dalam Kabupaten Bungo yakni Sekretariat Perkumpulan Penyandang disabilitas. Berikut 3 sasaran yang telah dilaksanakan oleh Relasi Basis Disabilitas:

1. Sosialisasi Februari, Rabu & Minggu Tanggal : 06, 10, 17 & 24 Februari 2019 di Sungai Pinang, Asrama SDLB, Disabilitas Apotek Sehat & Dilubuk Landai
2. Sosialisasi Maret, Jumat, Minggu, Senin & Selasa Tanggal : 01, 10, 11 & 12 Maret 2019 di Sekretariat PPDI Kabupaten Bungo, Simpang Babeko, Dusun Babeko & Dusun Sepunggur
3. Sosialisasi April, Senin & Jumat Tanggal : 08 & 12 April 2019, di Sungai Pinang & Punti Luhur, Peserta Komunitas Kepala Dusun Punti Luhur dan Keluarga 12 Orang.

Kabupaten Muaro Jambi

Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2016, pengguna internet Indonesia saat ini mencapai 132,7 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen dari pengguna internet Indonesia paling sering mengakses internet dari perangkat bergerak atau mobile gadget. Aktivitas komunikasi dan akses informasi menggunakan internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui smartphone, manusia milenial dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan di manapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi.

Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi Relasi untuk menyasar basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Relasi membentuk dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperti website dan media sosial seperti twiter, facebook, instagram dan platform media sosial lainnya, kemudian Relasi membuat status, kicauan dan komentar-komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik tentang politik, demokrasi dan pemilu.

Kabupaten Tebo

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.

Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum/ tidak bekerja penting mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama. Edukasi secara terus menerus dibutuhkan agar kepercayaan mereka terhadap pemilu sebagai instrumen demokrasi makin kuat dan mendalam. Kebiasaan mereka memilih harus dipupuk dan disemai agar tidak tergerus oleh apatisme maupun pragmatisme politik yang pada akhirnya akan merusak kualitas demokrasi.

Bentuk kegiatannya relasi adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi kepemudaan, mahasiswa di kampus. Contoh: sosialisasi club motor team herex rimbo, pengurus karang taruna, raider safety community, base camp club motor RKC dan VR. Rimbo Bujang, arisan pemuda, club olahraga bola voli kantor Desa Purwoharjo, dll.

Kabupaten Kerinci

Jumlah DPT perempuan di Pemilu 2019 lebih besar dari laki-laki, untuk itu basis ini menjadi penting sebagai sasaran sosialisasi dan edukasi. Bentuk kegiatannya Relasi adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu/emak-emak kompleks, contoh: kelompok takziah Desa Kemantan, kelompok pengajian ibu Desa Koto Majidin, kelompok pengajian ibu Desa Semerap, perkumpulan ibu-ibu Desa Pendung, kelompok ibu-ibu desa Siulak Mukai, dll.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Basis pemilih komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen. Pertama, berdasarkan lokasi, di mana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Kedua, berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama seperti komunitas hobi yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat kita seperti komunitas sepeda santai, komunitas fotografi, komunitas *skateboard* dan lain sebagainya.

Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas pecinta kuliner, komunitas keolahragaan, komunitas hobbi, komunitas masyarakat etnis dan lain sebagainya. Contoh: PSHT Ranting Rantau Rasau, Kelompok Hadroh AlIstiqomah Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Organisasi Kemahasiswaan PMII Komisariat STIE AL-Mujaddid Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Komunitas Motor Klasik Lawas (K.M.K.L) Dusun Simpang Kiri, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kelompok Pemuda Teluk Buan Mesjid SK I, Dusun Teluk Buan, Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, komunitas Mahasiswa STIES dan UT Tanjung Jabung Timur Kelurahan Parit Culum 1, dan Kecamatan Muara Sabak Barat.

Kota Jambi

Basis Keagamaan, basis keagamaan menggunakan forum-forum keagamaan untuk melakukan sosialisasi. Berikut sasaran Relasi Basis Keagamaan Kota Jambi: Pemilih yang aktif di berbagai etnis agama, Majelis Taklim Agama Islam, pemilih

yang aktif di jama'ah Kristen Protestan, Pemilih yang aktif di Jama'ah Kristen Katolik. Jumlah Peserta pada saat 7 x Kegiatan di hadiri oleh ± 50 Orang setiap satu kali pertemuan.

Waktu pelaksanaan sosialisasi pertama pada hari Sabtu 23 Februari 2019 di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi. Sosialisasi kedua dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Februari 2019 di Masjid Nur Aminah Pattimura. Sosialisasi ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Februari 2019 di Masjid Darrusalam Simpang Kawat. Sosialisasi keempat dilaksanakan pada hari Sabtu 02 Maret 2019 di Gereja Bethen Indonesia, Sosialisasi kelima dilaksanakan pada hari Rabu 06 Maret 2019 di Gereja Santos Paal 10. Sosialisasi keenam dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Maret 2019 di SD Xaverius II. Sosialisasi ketujuh dilaksanakan pada hari Minggu 07 April 2019 di Hotel Grand Abadi.

Kota Sungai Penuh

Basis kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan fasilitasi untuk dapat berpartisipasi sehingga secara sosial mereka tidak makin terbelakang. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat nelayan pinggiran danau kerinci, komunitas waria/LGBT di pasar sungai penuh, masyarakat miskin kota, pemulung, dll.

Peningkatan Partisipasi Pemilih (Dibanding Pemilu Sebelumnya)

Pemilu Tahun 2019 baru saja usai, apabila dilihat hasilnya, Pemilu 2019 bisa dibilang sukses apabila dilihat dari partisipasi pemilihnya yang tinggi yaitu mencapai angka 81%. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 sebesar 75%. Terjadi kenaikan angka sekitar 6% dibandingkan Pemilu sebelumnya. Peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 menjadi catatan positif ditengah penyelenggaraan pemilu yang dianggap memakan korban jiwa. Capaian ini juga sukses melampaui target yang sudah dicanangkan oleh KPU RI yaitu sebesar 77,5%.

Khusus untuk Pemilu di Jambi terdapat capaian partisipasi pemilih yang cukup menggembirakan yaitu sebesar 85,07%. Jumlah tertinggi dalam

jdih.kpu.go.id

penyelenggaraan Pemilu selama ini apabila dibandingkan dengan Pemilu 2014 dan Pemilu 2014 sebesar 77,25% dan 74,49%. Angka ini juga menggambarkan bahwa masyarakat semakin sadar dengan adanya Pemilu sekaligus menjadi keberhasilan KPU dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.

Tantangan Pemilihan Umum 2019

Pemilihan umum 2019 adalah pemilihan legislatif anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan legislatif yang dilaksanakan secara serentak. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

Pertama, *Pemilu Serentak*. Perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang cukup besar. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara yang baik. Meskipun rentang waktu pelaksanaan menjadi lebih pendek, namun persiapan penyelenggaraan pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Untuk itu, sosialisasi dan pendidikan pemilih harus dilaksanakan lebih luas lagi baik dari sisi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Kedua, Beban Kerja. Pelaksanaan Pemilu serentak yang memilih beberapa pejabat politik sekaligus tentu sangat menyita waktu bagi penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih ekstra. Paling tidak ada 5 surat suara yang harus dicoblos pada saat pemungutan suara dan hal ini tentu saja berimbas pada beban kerja yang lebih berat pada penyelenggara pemilu, utamanya KPPS. Penghitungan suara pada pemilu 2019 dimulai setelah selesai pemungutan suara dan berakhir pukul 12 malam dan dilakukan tanpa jeda. Dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Pemilu serentak antara legislatif dan presiden banyak menguras beban secara fisik dan psikologis. Secara fisik petugas KPPS harus bekerja 24 jam dalam melayani hak pemilih. Pekerjaan ini dilakukan tanpa jeda sehingga membuat petugas KPPS kelelahan. Sedangkan dari sisi psikologis beban dan tanggung jawab yang begitu detail dan komprehensif bahkan ada sanksi hukum yang menanti jika terjadi kesalahan sedikit saja. Hal ini menjadi tekanan tersendiri bagi petugas KPPS dalam menyelenggarakan Pemilu.

Ketiga, *Apatisme Pemilu***.** Pada Pemilu 2019 ini KPU masih dihadapkan dengan apatisme masyarakat dalam pemilu. Seperti kita ketahui tingkat partisipasi pemilih saat ini mengalami tren penurunan. Banyak masyarakat yang menarik diri dari proses pemilu. Menurut mereka tidak ada perbedaan antara memilih dengan golput, keadaan mereka tidak berubah semakin baik dari pemilu ke pemilu.

Mereka cenderung tidak tertarik dengan pemilu dan yang paling ironis mereka didominasi oleh pemilih dengan usia muda (millenial). Pemilih millenial ini justru merupakan potensi besar dalam menentukan arah masa depan bangsa. Namun, apatisme di kalangan millenial sudah semakin besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dalam memberikan pendidikan pemilih bagi masyarakat agar masyarakat menjadi sadar akan arti pentingnya memberikan hak pilihnya. Sosialisasi dan pendidikan pemilih harus tetap dilakukan baik oleh KPU maupun berbagai stakeholder lainnya agar kesadaran politik masyarakat dapat tercipta dengan baik.

Keempat, *Rumit*. Pemilu di Indonesia merupakan pemilu paling rumit dan paling menakjubkan di dunia karena skalanya yang besar dan dilaksanakan dalam satu hari saja dengan berbagai regulasi yang mengatur. Pemungutan suara dilaksanakan di 809.500 TPS, dimana satu TPS melayani maksimal 300 pemilih. Jumlah pemilih sebanyak 193 juta merupakan jumlah terbesar dalam hal memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Sedangkan jumlah total anggota legislatif yang bersaing sebanyak 245.000 orang yang memperebutkan sekitar 20.500 kursi yang ada di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Pada hari yang sama, yaitu 17 April 2019 menjalankan lima pemilihan sekaligus yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD kabupaten/Kota. Dari sisi pelaksanaan pemilu di Indonesia masih menggunakan sistem manual baik dalam memberikan suaranya yaitu melalui paku maupun dari sistem penghitungannya juga masih manual dan berjenjang. Penghitungan secara manual dan berjenjang tentu saja membuat rekapitulasi menjadi begitu lama. Lain halnya di berbagai negara sudah menggunakan sistem elektronik dalam pemungutan maupun penghitungan suaranya.

Kelima, Isu Hoax dan Politik Identitas. Pada pemilu 2019 isu hoax dan politik identitas menjadi dua isu sentral yang ramai diperdebatkan. Kedua isu tersebut dikhawatirkan mengancam pelaksanaan pemilu secara destruktif. Isu hoax dan politik identitas dapat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan adanya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang baik diharapkan dapat menangkal serangan hoax dan politik identitas. Dengan demikian masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya pemilu yang berkualitas dan calon wakil rakyat akan lebih mengedepankan visi dan misinya dalam meraih suara rakyat.

jdih.kpu.go.id

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat di Provinsi Jambi karena 3 faktor: pertama faktor non teknis yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan politik masyarakat terkait pentingnya pemilu. Kedua faktor teknis maladministrasi pemilu yaitu tidak validnya Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu, kondisi geografis dan cuaca buruk saat hari pencoblosan. Ketiga faktor politis dimana masyarakat sudah apatis tidak percaya lagi kepada calon peserta pemilu karena bermasalah seperti terlibat korupsi, banyak pelanggar dan tidak mempunyai visi misi yang jelas.

Peran Relawan Demokrasi sangat efektif meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Jambi dengan melakukan sosialisasi kepada 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu: 1. basis keluarga, 2. basis pemilih pemula, 3. basis pemilih muda, 4. basis pemilih perempuan, 5. basis penyandang disabilitas, 6. basis pemilih berkebutuhan khusus, 7. basis kaum marginal, 8. basis komunitas, 9. basis keagamaan, 10. basis warga internet dan 11. basis relawan demokrasi.

Sosialisasi dilakukan secara terstruktur massif dan sistematis dimana langkah awal KPU kabupaten/kota melakukan seleksi Relasi secara ketat (55 orang tiap kabupaten/kota) kemudian para Relasi dibekali dengan *Training of Trainer* (ToT) materi-materi kepemiluan, kemudian melakukan pemetaan sasaran per basis dan terakhir melakukan sosialisasi dengan metode yang efektif dan menghibur atau *electiontainment*. Dengan peran relasi ini tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Jambi pada Pemilu Serentak 2019 naik menjadi 81,75% melebihi target nasional 77,5%.

Daftar Pustaka

Buku

Daud M Liando, 2016, *Pemilu dan partisipasi Politik Masyarakat*, Jurnal LPP Vol 3 Tahun 2016. Unsrat

KPU Provinsi, 2019, *Laporan Evaluasi Pemilu 2019*, KPU Provinsi Jambi, Jambi.

KPU RI, 2019, *Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilu 2019*, KPU RI, Jakarta.

Moleong, Lexi. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Pratikno, 2004, *Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004*, dalam M. Faried Cahyono dan Lambang

Rumah Pintar Pemilu KPU RI, 2016, Potret Partisipasi Pemilih 2014, KPU RI, Jakarta. Pedoman Pelaksanaan

Rumah Pintar Pemilu KPU RI, 2016, *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas*, KPU RI, Jakarta.

Sulastono, 2001, *Demokrasi atau Democrazy*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supriyono, Arif, 2014, *Mendongkrak Partisipasi Pemilu di Indonesia*. Perludem, Jakarta.

Trijono, (Eds). *Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan*, CSPS Books, Yogyakarta.

Hasil wawancara

Wawancara dengan Desy Arianto, Komisioner KPU Provinsi Jambi Periode 2003 – 2008 – 2013 – 2018

Wawancara dengan Apnizal, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, April 2019

Wawancara dengan Mawin Marbawi, Koordinator Relasi Kab. Sarolangung, Juni 2019

Wawancara dengan A. Kadir, Ketua KPU Kab. Batang Hari, Juni 2019

jdih.kpu.go.id

Wawancara dengan M.Ilyas, Komisoner KPU Kab. Tanjung Jabung Jabat Divisi Sosialisasi, Juli 2019

Wawancara dengan M. Bisri, Ketua KPU Kab. Bungo, Juli 2019

Wawancara dengan Edison, Komisioner KPU Kab. Muaro Jambi dan Nando Nawawi Relasi Basis Netizen, Juli 2019.

Wawancara dengan Basri, Ketua KPU Kabupaten Tebo, Juli 2019

Wawancara dengan Syahril Syarif, Komisioner KPU Kab. Kerinci Divisi Sosialisasi, Juni 2019

Wawancara dengan Nurdin, Komisioner KPU Kab. Tanjung Jabung Timur Divisi Sosialisasi dan Ade Hawati Relasi Basis Komunitas, Juli 2019

Wawancara dengan Yatno, Ketua KPU Kota Jambi, Juli 2019

Wawancara dengan Irwan, Ketua KPU Kota Sungai Penuh dan para Relasi, Juni 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Relawan Demokrasi Mendatangi Rumah Warga untuk melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Relawan Demokrasi Mendatangi Sekolah-Sekolah untuk melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Sistem Noken: Partisipasi Pemilih Etnik di Papua

Adam Arisoi
Anggota KPU Provinsi Papua

Terletak di tengah pulau Papua, Provinsi Papua memiliki luas wilayah 316.553,07 km^2. Papua merupakan provinsi terbesar di Indonesia dengan kontur geografis pegunungan. Provinsi ini memiliki populasi pemilih etnis yang sangat besar. Oleh karena itu, tentunya perilaku elektoral pemilih Papua menarik untuk dikaji, apalagi 12 dari 29 kabupaten/kota di Papua menggunakan sistem Noken sebagai sistem pemberian atau pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. Perbedaan sistem tersebut terletak tidak sekedar TPS tidak memiliki suara, tetapi juga pada teknis mekanisme pemberian suara oleh pemilihnya.

Sistem Noken ini sebenarnya telah digunakan sudah sejak lama yaitu Pemilu kedua zaman pemerintah era Orde Baru, tepatnya pada Pemilu Legislatif tahun 1977. Alasan sistem Noken tersebut digunakan adalah karena kendala teknis distribusi logistik pemungutan suara dimana kotak suara yang dibutuhkan untuk menyimpan surat suara tercoblos oleh pemilih tak kunjung datang hingga hari pemungutan suara (voting day). Sistem Noken adalah warisan budaya lokal dalam penyelenggaraan Pemilu di Papua –lebih dari 250 suku di Papua dan Papua Barat menggunakan sistem Noken. Hal ini ditegaskan dalam konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 47/81/PHPU.ANII/2009 dimana sistem Noken merupakan model pemilihan yang sesuai dengan budaya dan adat istiadat setempat yang harus dipahami dan dihormati.

Secara leksikal, kata Noken berarti tas atau kantong anyaman tali yang terbuat dari serat kulit pohon kayu dan daun pandan serta rumput rawa. Noken merupakan hasil kerajinan tangan atau hasil budaya yang sangat khas masyarakat Papua. Sebagai perlengkapan keseharian hidup, Noken merupakan salah satu kearifan lokal yang telah banyak memberi manfaat kehidupan bagi masyarakat Papua. Noken mempunyai nilai filosofis dari peradaban orang Papua. Itulah kenapa Noken menempati posisi istimewa bagi masyarakat Papua dalam Pemilu.

Hanya perempuan Papua saja yang bisa membuat Noken tersebut. Alasan inilah yang membuat Noken juga dimaknai sebagai simbol perlindungan Orang Papua. Perempuan Papua memandang Noken sebagai identitas martabat perempuan sebagai manusia dan makhluk Tuhan. Seorang perempuan Papua dikategorikan sudah dewasa, jika sudah bisa membuat Noken dan ini pulalah yang memungkinkan perempuan Papua untuk bisa menikah. Noken adalah salah satu

syarat pernikahan bagi perempuan Papua. Noken memiliki fungsi kultural atau ada istiadat. Noken adalah spirit kultural masyarakat Papua. Selain fungsi tersebut, Noken yang dibawa dengan kepala juga memiliki fungsi lainnya yaitu fungsi untuk menyimpan atau membawa barang-barang kebutuhan sehari seperti hasil-hasil pertanian misalnya sayuran, umbi-umbian dan juga digunakan untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar.

Noken tidak hanya terkenal di dalam Papua sendiri atau di dalam negeri Indonesia saja, tetapi terkenal di internasional. Pada tanggal 4 Desember 2012, Noken telah didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia dalam bentuk tak benda. UNESCO pun mengakuinya sebagai upaya mendorong usaha perlindangan dan pengembangan warisan budaya Noken tersebut.

Dalam pemilu, tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Papua yang menggunakan sistem Noken tersebut. Dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, hanya 12 Kabupaten saja yang menggunakan sistem tersebut yaitu Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, Tolikara, Puncak Jaya, Yahukimo, Jayawijaya, Memberamo Tengah, Lanny Jaya, dan Nduga. Di ke-12 kabupten tersebut, angka kehadiran pemilih pengguna hak pilih sebanyak 1.953.446 orang atau 55,16% (separuh lebih) dari jumlah total DPT Provinsi Papua yaitu sebanyak 3.541.017 pemilih.

Pemberian suara dengan sistem noken tidak bersifat tunggal, tetapi ada beberapa cara yaitu ada yang menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara; ada yang sistem ikat, dimana suara pemilih di satu kampung dibagi sesuai kesepakatan; dan ada yang menyerahkan kepada kepala suku untuk memilih mewakili satu kampung atau satu suku. Inilah kekhasan pemberian suara di Papua dimana pemilih tanpa harus hadir di TPS, suara pemilih diwakilkan atau diakomodir melalui kepala suku atau kesepakatan (konsensus politik) masyarakat (baca: pemilih) dalam satu kampung.

Syarat daerah dapat menggunakan sistem Noken berdasarkan Putusan MK tersebut adalah hanya kabupaten yang berada di wilayah adat Mee Pago dan La Pago, sedangkan di wilayah adat lainnya, seperti Saireri, Anim Ha dan Tabi tidak bisa menggunakan sistem Noken tersebut. sistem noken. Hal ini didasari pada Putusan MK RI Nomor 6/32/PHPU.DPD/XII/2012 tertanggal 25 Juni 2012 dimana sistem Noken tidak boleh dilaksanakan di tempat yang selama ini tidak menggunakan sistem Noken.

Deskripsi tersebut di atas menstimulasi penulis untuk melakukan kajian tentang bagaimana Sistem Noken dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi elektoral di Papua? Kajian ini dilakukan khususnya pelaksanaan sistem Noken dalam

meningkatkan partisipasi dalam pemilu khususnya di wilayah adat Meepago dan Lapago.

jdih.kpu.go.id

jdih.kpu.go.id

EPILOG

Mendaulatkan Suara Pemilih:
(Suatu Ragam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu Serentak 2019)

Oleh Nur Syarifah
Kepala Biro Teknis dan Hupmas
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pemilu serentak yang dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019 menjadi babak baru bagi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Lebih dari 187 juta pemilih, dalam negeri atau luar negeri untuk pertama kalinya, memilih secara serentak calon anggota legislatif dan capres-cawapres. Pemilih berhadapan dengan 5 (lima) jenis surat suara di TPS.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang menganut paham bahwa memilih adalah hak, bukan merupakan kewajiban, disadari tidak dapat dipastikan pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Pemilu akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Pada penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang tidak serentak, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau voting turn out rata-rata masih rendah. Dengan sistem Pemilu serentak ini, maka pencapaian target tingkat partisipasi masyarakat sebesar 77,5% yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 – 2019 menjadi tantangan yang cukup berat bagi jajaran penyelenggara Pemilu. KPU harus menyusun strategi dan melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan intensif untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat, serta untuk mengurangi jumlah suara yang tidak sah akibat ketidakpahaman dalam melakukan pencoblosan.

Harapan Manfaat Buku

Ragam tulisan yang termuat dalam Buku ini, merepresentasikan capaian kinerja kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh baik oleh KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Isi Buku ini menggambarkan potret sosialisasi dan pendidikan pemilih di seluruh Indonesi, termasuk fakta peningkatan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang terdistribusi di semua provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan TPS.

jdih.kpu.go.id

Dengan adanya dokumentasi peningkatan partisipasi pemilih dalam buku ini, paling tidak manfaat yang diharapkan ada 2 (dua) aspek, yakni ;

1. Manfaat secara teoritik
   Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang menggeluti ilmu kepemiluan untuk melakukan kajian dan mengembangkan teori terkait dengan partisipasi pemilih dalam dinamika Pemilu. Secara akademik Buku ini menjadi bagian dari kajian sistem kepemiluan, sistem kepartaian, sistem pemerintahan yang efektif. Di samping itu, Buku ini diharapkan juga mampu melengkapi teori-teori tentang strategi dan manajemen pendidikan pemilih serta partisipasi pemilih dan pendidikan politik untuk mewujudkan Pemilu yang bebas, adil dan demokratis, sekaligus untuk melengkapi studi kepemiluanyang komprehensif. Buku ini diharapkan pula dapat menjadi sumber informasi ilmiah dalam rangka mengharmonisasikan produk perundang-undangan di bidang kepemiluan terutama relasi antara warga negara dengan negara serta Pemilu.

2. Manfaat Praktis
   Secara praktis, Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu, DPR, Pemerintah atau pihak lain dalam merumuskan kebijakan di bidang legislasi terkait dengan Pemilu dan partisipasi pemilih yang berhubungan erat dengan sistem Pemilu, sistem kepartaian dan pemerintahan yang efektif serta kedaulatan rakyat sebagaimana dalam konstitusi. Dengan demikian, diharapkan Indonesia memiliki produk kebijakan yang selalu harmonis dengan praktek Pemilu. Buku ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dari KPU dalam mendesain manajemen strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam mewujudkan partisipasi pemilih di Indonesia pada masa yang akan datang.

Mendaulatkan Suara Pemilih Dalam Partisipasi *Electoral*

Judul Buku ”Mendaulatkan Suara Pemilih dalam Pemilu”, ini dapat dimaknai selaras dengan Konstitusi Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang berbunyi bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam rumusan Konstitusi tersebut, yang dimaksudkan dengan rakyat berdaulat adalah setiap warganegara yang telah memenuhi syarat-syarat memilih dalam Pemilu yang memiliki hak kedaulatan pada momentum Pemilu. Hak memilih ini juga disebut sebagai kebebasan yang tidak dapat dibatasi oleh latar belakang suku, agama, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial, dan status ekonomi, dan juga di manapun warga negara itu berada.

Dalam proses demokrasi, hak memilih merupakan pernyataan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan urusan publik. Mereka yang terpilih melalui Pemilu

jdih.kpu.go.id

menerima mandat dari rakyat yang berdaulat, dan karena itu rakyat yang berdaulat itu berhak meminta mereka yang terpilih untuk mempertanggungjawabkan secara reguler setiap tindakan baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Karena itu Pemilu dapat pula dilukiskan sebagai sarana yang digunakan pemilih untuk mengekspresikan hasil penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Prinsipnya bahwa memberikan suara pada Pemilihan Umum hanya merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam Pemilu.

Secara teoritik model demokrasi electoral menghendaki adanya partisipasi pemilih yang bebas dan adil. Sebab pada level ini demokrasi ditandai dengan adanya Pemilu yang dilaksanakan secara reguler dan kompetisi antar partai guna memperebutkan suara pemilih. Partisipasi pemilih dalam Pemilu selalu dinamis sejalan dengan sistem Pemilu yang diterapkan dalam suatu negara. Di Indonesia, dinamika tersebut bisa dilihat sejak Pemilu pasca kemerdekaan tahun 1955, di mana tingkat partisipasi pemilih mencapai 91,4 persen. Pemilu di masa ini dianggap sebagai Pemilu paling demokratis yang diikuti banyak partai dengan beragam ideologi dan perseorangan di tengah keterbatasan kondisi sebagai negara yang baru merdeka. Pelaksanaan Pemilu saat itu dapat berlangsung dengan aman dan diterima seluruh peserta Pemilu. Kenaikan tingkat partisipasi pemilih selanjutnya berlanjut pada Pemilu masa orde baru. Pada Pemilu tahun 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,6 persen. Sementara dalam Pemilu 1977 dan Pemilu 1982, partisipasi pemilih sebesar 96,5 persen. Pada Pemilu 1987, tingkat partisipasi pemilih mencapai sebesar 96,4 persen. Pemilu 1992, tingkat partisipasi pemilih 95,1 persen. Pada Pemilu 1997, Pemilu terakhir Orde Baru, tingkat partisipasi pemilih sebesar 93,6 persen. Pada masa orde baru tingkat partisipasi pemilih sangatlah tinggi. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu pasca reformasi tahun 1999 hanya mencapai 92,6 persen. Setelahnya, tingkat partisipasi pada Pemilu 2004, mulai menurun. Pada Pilpres putaran pertama, partisipasi pemilih mencapai 78,2 persen. Pada putaran kedua, partisipasi pemilih turun menjadi 76,6 persen.

Pada Pemilu legislatif tahun 2009, partisipasi pemilih menurun hingga angka 70,9 persen. Sementara pada Pilpres 2009, partisipasi pemilih 71,7 persen. Pada Pemilu legislatif 2014, partisipasi pemilih mencapai naik menjadi 72 persen. Sedangkan pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih turun menjadi 69,58 persen. Pada Pemilu 2019 KPU berikhtiar untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sejalan dengan konstitusi, KPU menetapkan slogan Pemilih Berdaulat Negara Kuat, sebagai salah satu stimulus dalam upaya mendaulatkan suara pemilih pada Pemilu serentak 2019. Dengan berbagai ragam sosialisasi dan pendidikan pemilih di seluruh Indonesia, maka hasilnya tingkat partisipasi pemilih mencapai 81.93%. Tingkat partisipasi pemilih yang melebihi target menunjukkan bahwa KPU telah sukses mendaulatkan suara pemilih sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Pemilu. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran pemilih

telah tumbuh dalam menentukan nasib bangsanya. Kesadaran pemilih itu tumbuh untuk melakukan tindakan secara bebas dan mandiri menggunakan hak pilihnya secara cerdas di TPS.

Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman bahwa jika Indonesia ingin kuat maka pemilihnya harus berdaulat. KPU akan melakukan segala daya upaya agar data pemilihnya baik, sehingga hak warga negara terjamin. Dalam berbagai kesempatan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih Arief Budiman mengharapkan kepada seluruh masyarakat mengikuti Pemilu serentak 2019 dengan penuh kesadaran untuk datang ke TPS. Kinerja KPU yang transparan seharusnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat datang ke TPS. Apalagi KPU telah bekerja dengan sangat transparan, mulai dari tahap menyusun program tahapan dan anggaran serta, penyusunan regulasi, sampai dengan penetapan perolehan suara.

Ragam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Meminjam sambutan Hasyim Asy'ari dalam setiap kesempatan disebutkan bahwa salah satu pekerjaan penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait teknis dan substansi Pemilu. Pengalaman Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih belum melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu secara optimal, padahal partisipasi masyarakat menjadi titik krusial keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Tingkat partisipasi pemilih tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik Parpol, figur para calon dan masyarakat pada umumnya. Menjalankan amanah sebagai penyelenggara Pemilu, KPU berupaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat dengan beragam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang terencana, terukur dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif sebagai subyek pelaku, bukan hanya sebagai subyek pelengkap. Beberapa ragam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dapat dikategorikan sebagai berikut:

Kategori Kreasi Sosialisasi dan Olah Raga

KPU menggelar berbagai ragam kreasi sosialisasi. Salah satu di antaranya, setahun menjelang hari Pemungutan Suara, Sabtu (21/4/2018), KPU menyelenggarakan pagelaran seni budaya bertema "Menyongsong Pemilu Serentak 2019" dengan melibatkan pelaku seni dan budaya, artis serta pemilih dari berbagai elemen.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah lomba kreasi jingle dan maskot Pemilu 2019. Lomba ini telah menarik banyak partisipasi dari masyarakat, terutama kalangan pemilih muda. Karya yang dikirimkan untuk maskot sebanyak 228 buah, dan jingle sebanyak 250 lagu. Setelah melalui serangkaian penjurian oleh para juri yang berasal dari kalangan artis profesional dan akademisi bidang seni, maka ditetapkan maskot yang diberi nama "Sang Sura", karya David Wijaya dan jingle dengan judul lagu "Pemilih Berdaulat Negara Kuat", karya L. Agus Wahyudi.

Sosialisasi kepada pemilih juga dilakukan melalui lomba paduan suara antar Kementerian/Lembaga, dengan menyanyikan lagu Mars Pemilu dan jingle Pemilu 2019. Melalui lagu-lagu tersebut diharapkan para peserta lomba memahami pentingnya Pemilu dan mengetahui tanggal pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya para peserta lomba dapat meneruskan informasi tentang Pemilu kepada lingkungannya, baik lingkungan kerja maupun keluarganya.

Selain melalui seni budaya, KPU bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Pemilu Run 2019, Minggu (7/4/2019), yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka menyongsong Pemilu serentak 2019 serta menjadi strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat mencapai target yang di tetapkan sebesar 77,5%.

Kegiatan Pemilu Run 2019 juga dimaksudkan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai tanggal pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, memahami jenis surat suara, teknis pencoblosan, dan pada akhirnya akan menjadi pemilih yang jujur dan sadar secara sukarela untuk aktif terlibat pada tahapan Pemilu 2019. Selain itu diharapkan Pemilu Serentak 2019 akan berlangsung dengan bahagia, nyaman, aman dan damai.

Kegiatan Pemilu Run 2019

jdih.kpu.go.id

Kegiatan Pemilu Run 2019

Kategori Tatap Muka dan kegiatan Ilmiah

Ragam sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam bentuk tatap muka dan kegiatan ilmiah ini juga dilakukan melalui kunjungan ke berbagai kampus dan perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan KPU Goes to Campus dilaksanakan di universitas yang bekerja sama dengan KPU untuk menyelenggarakan program beasiswa S-2 Tata Kelola Pemilu, antara lain di Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Gajah Mada, serta beberapa kampus lain seperti Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Rangkaian kegiatan KPU *Goes to Campus* terus berlanjut hingga menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Kegiatan ini juga menyasar pemilih Pemilu di pesantren. Secara garis besar kegiatan KPU *Goes to Campus* dan KPU *Goes to Pesantren* ditujukan sebagai ajang sosialisasi dan pendidikan bagi basis pemilih pemula dan pemilih muda menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2019. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mencapai target partisipasi pemilih sebesar 77,5% pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Basis pemilih pemula dan pemilih muda yang direpresentasikan oleh mahasiswa perlu mendapat perhatian besar, mengingat bahwa pemilih pemula dan pemilih muda diharapkan dapat menjadi *agent of change* yang akan diharapkan memperbaiki proses demokrasi Indonesia ke depan.

KPU Goes to Campus
Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur

KPU Goes to Campus
IPDN Jatinangor, Jawa Barat

KPU Goes to Pesantren
Pesantren Assyafiah Bekasi, Jawa Barat

Pendekatan ilmiah lain yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan Lomba Cerdas Cermat kepemiluan. Lomba ini dilakukan dengan target sasaran pemilih perempuan.

Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan
Kelompok Perempuan

Lomba Cerdas Cermat Kepemiluan
Semarakan HUT KOPRI KE-47

Pemanfaatan Media Sosial

Menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, penggunaan media internet, termasuk media sosial sebagai sarana berbagi informasi begitu masif, khususnya di kalangan generasi muda. Kalangan generasi muda yang merupakan pengguna media sosial aktif terbanyak saat ini pada umumnya adalah kategori pemilih pemula. Atas dasar itu, Tim Website Pusat Penelitian Politik-LIPI bekerja

sama dengan KPU mengadakan kegiatan diskusi bertajuk "Peran Media Internet bagi Pemilih Pemula". Secara khusus diskusi ini dirancang sebagai sarana berdiskusi dengan para pemilih pemula ataupun calon pemilih pemula yang duduk di usia SMA/SMK maupun institusi pendidikan yang setingkat untuk berbagi pandangan mengenai Pemilu dan demokrasi. Partisipasi kaum muda sangat dibutuhkan untuk memperkaya diskusi mengenai demokrasi Indonesia ke depan. Ada tiga tujuan acara diskusi. Pertama, mendiskusikan pengaruh media internet bagi pemilih berbasis warganet utamanya di kalangan anak muda/mileneal (pemilih pemula). Kedua, mengenalkan dan memberikan pengetahuan kepada basis pemilih warga internet untuk turut berpartisipasi dalam mengikuti tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Ketiga, tercapainya target partisipasi pemilih sebesar 77,5% pada Pemilu Serentak Tahun 2019, utamanya bagi pemilih pemula.

KPU pun mengembangkannya ke daerah yang lebih heterogen, mengingat masih banyaknya masyarakat di daerah yang membutuhkan pembelajaran tentang manfaat dan cara menggunakan informasi di internet dengan benar. Wawan Ichwanuddin, yang juga merupakan Koordinator Survei Nasional Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2018, menjelaskan bahwa ada tiga model besar yang memengaruhi perilaku pemilih secara umum. Pertama, model sosiologis, yaitu perilaku pemilih yang dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, suku, agama, dan lain-lain. Kedua, model psikologis, yaitu perilaku memilih yang dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat jangka pendek, seperti melihat kemampuan presiden terpilih untuk bisa memahami kepentingan rakyat kecil. Terakhir, model rasional, di mana pemilih lebih melihat kepada aspek kinerja dan proyeksi program ke depan dengan menghitung untung rugi. Dengan mengacu pada hasil survei nasional P2P LIPI tahun 2018, Wawan membandingkan antara pemilih pemula dan pemilih dewasa terkait ketertarikan terhadap politik, terutama dalam hal intensitas mengkonsumsi berita politik dan penggunaan jenis aplikasi *chatting* untuk mengakses berita politik. Pemilih pemula cenderung menganggap dirinya dan pendapatnya penting untuk didengar oleh pemerintah dalam membuat kebijakan. Di satu sisi, mereka meyakini bahwa partisipasi mereka ikut menentukan terpilihnya pemimpin yang baik. Di sisi lain, mereka pesimis bahwa pemerintah mendengarkan keluhan mereka ketika terjadi suatu persoalan di masyarakat. Dengan demikian, yang dapat dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah mendekati dan meyakinkan pemilih pemula bahwa pemerintah benar-benar mendengar suara mereka.

Pendiri *Youth Initiative for Political Participation* menjelaskan mengenai polarisasi di media sosial seperti: *social bots* yang beralih fungsi menjadi penyebar berita *hoax, filter bubble, echo chamber,* dan *search algorithm* di Google yang hanya memunculkan iklan berita yang sesuai dengan preferensi kita. Hal tersebut menggiring kita pada *confirmation bias*, di mana kita tidak lagi menyaring dan langsung menerima informasi secara mentah-mentah karena merasa sudah sesuai

dengan preferensi kita. Neildeva juga mengatakan bahwa media sosial justru menutup kemungkinan penggunanya untuk berpikiran terbuka, sehingga solusi yang ditekankan di sini adalah *media literacy*. Selain "melek politik", anak muda juga harus "melek media", kritis dan mengkonfirmasi kebenaran suatu berita agar tidak termakan *hoax*, untuk mengedukasi pemilih KPU menginformasikan secara resmi kepada masyarakat tentang calon-calon anggota DPR, DPD, maupun DPRD agar pemilih dapat memilih calonnya dengan baik. Pemilih dapat mengakses laman KPU atau mendatangi kantor KPU provinsi, maupun KPU kabupaten/kota secara langsung. Pilihan ini mengingat bahwa internet hanyalah salah satu media, terutama untuk daerah dengan jaringan infrastruktur internet yang sudah baik. Terakhir, dalam hal meningkatkan minat generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik perlu dipikirkan inovasi-inovasi yang diperlukan, tidak sekedar pada inovasi cara seperti penerapan *e-voting*, tapi bagaimana partai politik berperan aktif untuk menumbuhkan partisipasi. Ketika kandidat suatu partai politik menarik dan membawa harapan baru, maka otomatis akan menjadikan partisipasi politik meningkat.

Sosialisasi dan Simulasi Pemungutan Suara

Tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu serentak 2019 lebih berat, mengingat penyelenggaraan Pemilu makin kompleks. Pemilih akan menerima 5 (lima) jenis surat suara, sehingga pemilih perlu cermat untuk memberikan suara yang benar pada surat suara. Untuk itulah, KPU melakukan kegiatan simulasi pemungutan suara di TPS yang merepresentasikan urutan tahapan pemungutan suara di TPS, sekaligus mengedukasi kepada pemilih untuk memahami tata cara pemberian suara yang benar. Edukasi tata cara pemberian suara yang benar ini menjadi penting untuk mengurangi jumlah suara yang tidak sah (invalid vote).

Simulasi, yang melibatkan penyelenggara (KPPS), pengawas, saksi, petugas pengamanan, dan pemilih, diharapkan dapat memberikan panduan bagi penyelenggara dalam menyelenggarakan tahapan pemungutan suara di TPS. KPU juga memanfaatkan kegiatan simulasi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan para calon penyelenggara di TPS guna menyempurnakan kebijakan teknis di TPS.

Kegiatan simulasi pemungutan suara ini diselenggarakan beberapa kali, yang berlokasi di kantor KPU, di Kabupaten Tangerang (Banten), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Simulasi Nasional Pemungutan dan Penghitungan Suara, di Kabupaten Tanggerang

Sosialisasi Pemilih Perempuan dan Penyandang Disabilitas

KPU bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menggelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih Perempuan dan Penyandang Disabilitas Pemilu Serentak 2019. Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pengetahuan kepada basis pemilih perempuan dan disabilitas untuk turut berpartisipasi dalam mengikuti tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. KPU sendiri telah menetapkan 11 basis pemilih sebagai sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Dari 11 basis pemilih tersebut, basis pemilih perempuan dan basis pemilih disabilitas adalah prioritas basis pemilih yang ditargetkan Pemerintah (Bappenas) dalam RPJMN untuk digarap.

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional, pada hari Kamis 8 Maret 2018 di Taman Ismail Marzuki dan dihadiri oleh koalisi perempuan penyandang disabilitas. Selain kerjasama dengan HWDI, KPU juga menggandeng Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Penca) untuk melaksanakan sosialiasi jenis-jenis surat suara, mengenalkan calon terutama calon legislatif, dan simulasi tata cara pemungutan suara di TPS. Kegiatan yang diikuti oleh 200 orang penyandang disabilitas yang meliputi disabilitas netra, intelektual, mental, rungu wicara, juga disabilitas fisik pengguna kursi roda, serta disabilitas lainnya, dilaksanakan pada Kamis (14/2/2019) bertempat di aula kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

Sosialisasi dan pendidikan kepada para penyandang disabilitas ini merupakan wujud jaminan KPU untuk memastikan penyandang disabilitas yang berhak memilih memahami tata cara pemberian suara yang benar. Jumlah penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 tercatat sebanyak 1.247.730 pemilih, yang terdiri dari 83.182 tunadaksa, 166.364 tunanetra, 249.546 tunarungu, 332.728 tunagrahita dan 415.910 penyandang disabilitas lainnya.

KPU bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sosialisasi Pendidikan Pemilih Perempuan dan Penyandang Disabilitas Pemilu Serentak 2019.

KPU bersama Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Penca) melakukan simulasi tata cara pemungutan suara di TPS.

Pembentukan Relawan Demokrasi

KPU resmi membentuk Relawan Demokrasi untuk Pemilu Serentak 2019 di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Menurut Anggota KPU, Ilham Saputera Senin (21/1/2019) pembentukan relawan demokrasi tersebut tertuang dalam Surat KPU Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, tanggal 9 Januari 2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019. Dalam Lampiran Surat tersebut dijelaskan tugas Relawan Demokrasi sebagai subyek yang akan melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih agar partisipasi masyarakat meningkat dan suara tidak sah menurun.

Relawan Demokrasi bertugas turun ke wilayah sebarannya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa yang telah dijalankan oleh KPU, serta menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Selain itu, Relawan Demokrasi juga membantu menginformasikan kepada masyarakat terkait waktu penyelenggaraan Pemilu 2019 Serentak di tingkat bawah. "Untuk membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa yang sudah kita jalankan, kemudian nanti mereka bisa bekerja di komunitas-komunitas yang kemudian nanti bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu. Kemudian kapan Pemilu-nya, jam berapa, pokoknya terkait dengan sosialisasi Pemilu di tingkat bawah. Dalam menjalankan tugasnya, Relawan Demokrasi menyampaikan materi tentang: Pentingnya demokrasi, Pemilu dan partisipasi; Tanggal, hari dan jam pemungutan suara; Tatacara pemberian suara dalam Pemilu; Pengenalan terhadap kontestan Pemilu, dan Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih. KPU Daerah memberikan honor dengan besaran yang ditetapkan oleh masing-masing daerah untuk para Relawan Demokrasi.

Bagi KPU program relawan demokrasi merupakan gerakan sosial yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam Pemilu secara optimal.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Empat Pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilihan di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada Pemilu nasional misalnya, yaitu Pemilu 1999 (92,6%), Pilpres 2004 putaran pertama (78,2%), dan menurun pada putaran kedua (76,6%), Pemilu 2009 (70,9%), Pemilu 2014 (72%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan Pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan Pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaraan masyarakat tentang pentingnya Pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Kemunculan program Relawan Demokrasi juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (*voluntarisme*) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tunaide dari kontestan Pemilu.

Pemilu Serentak 2019 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi pemilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud. Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada

setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2019 dapat lebih baik dibandingkan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Dalam menjalankan tugasnya relawan demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain: Simulasi; Bermain peran/*roleplaying*; Diskusi kelompok/FGD; Ceramah; Alat bantu (visual dannon visual); dan Posting materi sosialisasi ke media sosial. Sementara untuk agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi: Memetakan varian kelompok sasaran (mapping); Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompoksasaran; Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan; Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan Pemilu yang lain; Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU kabupaten/kota.

Rekomendasi di Masa Depan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi Pemilu di masyarakat bukan semata-mata menjadi tanggung jawab KPU semata. Peningkatan partisipasi pemilih paling tidak menjadi tangggung jawab semua pihak. Di akhir tulisan ini beberapa rekomendasi untuk perbaikan penting di masa depan yakni:

1. Aspek regulasi, bahwa pada aspek ini pemerintah dan DPR perlu membuat regulasi berupa peraturan perundang-undangan Pemilu yang kompetibel antara sistem Pemilu, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan yang efektif selaras dengan teknis kepemiluan, termasuk di dalamnya kemudahan pemilih dalam menggunakan haknya di TPS;
2. Aspek Penyelenggara Pemilu, bahwa KPU dan seluruh jajarannya perlu terus melakukan dan mendesain program sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan dalam tahap pra Pemilu, penyelenggaraan Pemilu dan pasca Pemilu;
3. Aspek Peserta Pemilu, bahwa Partai Politik sebagai peserta Pemilu melakukan peran dan fungsinya dalam upaya melakukan pendidikan politik kepada

masyarakat agar pemilih secara terus menerus mengetahui informasi mengenai partai politik dan perannya dalam Pemilu;

4. Aspek pemerintahan, bahwa pemerintah yang terpilih dari hasil Pemilu, benar-benar melakukan perbaikan sistem demokrasi melalui upaya mewujudkan kesejahteraan dan amanah rakyat sehingga gairah masyarakat untuk mengikuti Pemilu akan tumbuh kesadarannya dengan baik;

5. Aspek pemilih, bahwa pada aspek ini diharapkan adanya pemilih yang tumbuh kesadarannya, cerdas dalam memilih serta lahirnya partisipasi electoral dari masyarakat yang benar-benar memahami pentingnya Pemilu dan demokrasi. Masyarakat juga hendaknya tidak saja dijadikan obyek dalam Pemilu tetapi diberikan peran yang cukup besar, sehingga tumbuh rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab secara nyata serta berpartisipasi penuh dalam Pemilu.

jdih.kpu.go.id

KOMISI
PEMILIHAN UMUM
BHINNEKA TUNGGAL IKA

PEMILIH BERDAULAT
NEGARA KUAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
JL. IMAM BONJOL NO 29 MENTENG
JAKARTA PUSAT

www.kpu.go.id KPU Republik Indonesia @kpu_ri @KPU_ID YouTube KPU RI

ISBN 978-602-50455-9-2